



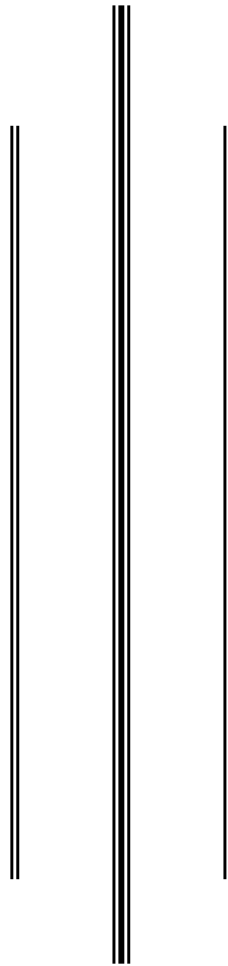
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI  
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
2022**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI  
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
2022**



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA  
BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 4 April 2022

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (7-44/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA  
BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memuat dan menjabarkan Visi, Misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Prioritas utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah yaitu 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola, dan 1 (satu) tata kelola. Secara filosofis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali



Tahun 2018-2023 dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Berjalannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, terdapat dinamika perkembangan daerah maupun nasional dalam Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 tersebut. Perkembangan dimaksud berupa terbitnya Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat, berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempengaruhi beberapa sektor perencanaan yang telah disusun.

Dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat khususnya dampak pariwisata di Bali. Maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang, dimana sangat mempengaruhi *refocussing* anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya.

Dengan terjadinya perubahan yang mendasar tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta

Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dicapai, dengan tetap menjaga keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta dapat menjalankan amanat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sedang diimplementasikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, mencakup:

1. penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintah Provinsi Bali dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. penyesuaian terhadap nomenklatur program, indikator, dan target sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi, dan amanat regulasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 7

## DAFTAR ISI

# PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

### Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	6
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	10
1.3.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 .....	11
1.3.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Ke-3 (2015-2020) dan Ke-4 (2020-2025) .....	14
1.4 Maksud dan Tujuan .....	14
1.4.1 Maksud .....	14
1.4.2 Tujuan .....	15
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>17</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	17
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	17
2.1.2 Kondisi Topografi dan Geologi .....	18
2.1.3 Hidrologi .....	19
2.1.4 Iklim dan Suhu .....	24
2.1.5 Penggunaan Lahan .....	24
2.1.6 Daya Dukung Lingkungan Hidup .....	26
2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah .....	29
2.1.8 Aspek Demografi .....	39
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	42
2.2.1 Pertumbuhan PDRB .....	42
2.2.2 Inflasi .....	45
2.2.3 PDRB per Kapita Provinsi Bali .....	46
2.2.4 Ketimpangan Pendapatan .....	47
2.2.5 Persentase Penduduk Miskin .....	48

2.2.6	Indeks Pembangunan Manusia .....	50
2.2.7	Rata – Rata Lama Sekolah.....	52
2.2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	53
2.2.9	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	54
2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	55
2.3.1	Layanan Urusan Wajib.....	55
2.3.2	Urusan Pemerintahan Pilihan .....	200
2.3.3	Penunjang Urusan .....	232
2.4	Aspek Daya Saing.....	256
2.4.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita .....	256
2.4.2	Nilai Tukar Petani .....	257
2.4.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita .....	258
2.4.4	Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 Penduduk .....	258
2.4.5	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi).....	259
2.4.6	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum .....	260
2.4.7	Angka Kriminalitas yang Tertangani.....	260
2.5	Kerjasama Antar Daerah .....	261
2.6	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga .....	265
2.7	Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah .....	267
2.8	Standar Pelayanan Minimal.....	269
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>		<b>297</b>
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016 - 2020).....	297
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	398
3.1.2	Neraca Daerah .....	312
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Dalam Periode 2016-2020).	317
3.2.1	Kebijakan Pendapatan .....	317
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah .....	322
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	324
3.2.4	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	326
3.2.5	Analisis Pembiayaan .....	327
3.3	Kerangka Pendanaan.....	337
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBD Bali 2021-2023 .....	337
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan .....	339
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....</b>		<b>349</b>
4.1	Permasalahan Pembangunan .....	349
4.1.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	350

4.1.2	Aspek Pelayanan Umum.....	360
4.1.3	Aspek Daya Saing Daerah .....	368
4.2	Isu-Isu Strategis .....	371
4.2.1	Kesenjangan.....	375
4.2.2	Daya Saing.....	376
4.2.3	Nilai Tambah.....	376
4.2.4	Keberlangsungan/Sustainability .....	377
4.2.5	Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum .....	377
4.2.6	Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana .....	478

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ..... 379**

5.1	Visi.....	379
5.2	Misi .....	384
5.3	Paradigma Pembangunan Bali.....	386
5.3.1	Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala dan Niskala..	387
5.3.2	Pembangunan Bersifat Holistik .....	387
5.3.3	Pembangunan Bersifat Integratif.....	387
5.3.4	Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis.....	388
5.3.5	Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural .....	388
5.3.6	Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah .....	388
5.3.7	Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali .....	388
5.4	Transformasi Ekonomi Bali .....	389
5.5	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.....	391
5.6	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024.....	393
5.7	Tujuan dan Sasaran .....	394

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

	.....	<b>406</b>
6.1	Strategi.....	406
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan .....	413
6.3	Program Pembangunan Daerah .....	421

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... 483**

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... 543**

<b>BAB IX PENUTUP.....</b>	<b>558</b>
9.1 Pedoman Transisi.....	558
9.2 Kaidah Pelaksanaan .....	558

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen ..... 10
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Semesta Berencana dengan RPJPD ..... 14
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Provinsi Bali..... 18
Gambar 2.2	Peta Topografi Wilayah Provinsi Bali..... 19
Gambar 2.3	Peta Curah Hujan Wilayah Provinsi Bali ..... 24
Gambar 2.4	Presentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2018 ..... 25
Gambar 2.5	Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2016-2018 (Hektar) ..... 25
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2016 - 2020 ..... 40
Gambar 2.7	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (jiwa/km <sup>2</sup> ) ..... 42
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2020..... 43
Gambar 2.9	Nilai PDRB ADHB (dalam ribu) Provinsi Bali Tahun 2016-2020 ... 43
Gambar 2.10	Kontribusi PDRB ADHB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 ..... 44
Gambar 2.11	Laju Inflasi Provinsi Bali Tahun 2018-2020 (%)..... 45
Gambar 2.12	Laju Inflasi Provinsi Bali Menurut Komoditas..... 46
Gambar 2.13	PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Bali Tahun 2016-2020 ..... 47
Gambar 2.14	Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2016-2020..... 48
Gambar 2.15	Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ..... 48
Gambar 2.16	Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 ..... 49
Gambar 2.17	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 ..... 50
Gambar 2.18	Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020..... 50
Gambar 2.19	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2016-2020... 51
Gambar 2.20	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 ..... 53
Gambar 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2016-2020. .... 54
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Peremuan (IPG) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 ..... 55
Gambar 2.23	Indeks Pemberdayaan Peremuan (IDG) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 ..... 55
Gambar 2.24	Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Bali ..... 56
Gambar 2.25	Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Bali ..... 57

Gambar 2.26	Angka Pendidikan yang Ditamatkan .....	58
Gambar 2.27	Angka Partisipasi Murni Provinsi Bali .....	59
Gambar 2.28	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Bali.....	60
Gambar 2.29	Angka Putus Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	60
Gambar 2.30	Angka Kelulusan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	61
Gambar 2.31	Angka Melanjutkan di Provinsi Bali.....	62
Gambar 2.32	Fasilitas Pendidikan (Kondisi Ruang Kelas Baik) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	62
Gambar 2.33	Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Jumlah Ketersediaan Guru Terhadap Jumlah Murid Per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Bali.....	63
Gambar 2.34	Angka Melek Huruf di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	64
Gambar 2.35	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Provinsi Bali .....	65
Gambar 2.36	Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bali.....	66
Gambar 2.37	Angka Kematian Balita per 1000 KH di Provinsi Bali.....	67
Gambar 2.38	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali .....	68
Gambar 2.39	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali.....	69
Gambar 2.40	Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provinsi Bali .....	70
Gambar 2.41	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Provinsi Bali.....	71
Gambar 2.42	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Bali .....	72
Gambar 2.43	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 .....	73
Gambar 2.44	Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota .....	73
Gambar 2.45	Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali .....	74
Gambar 2.46	Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota.....	74
Gambar 2.47	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Bali..	75
Gambar 2.48	Persentase Ibu Hamil yang Ditolong Tenaga Kesehatan.....	76
Gambar 2.49	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Bali.....	77
Gambar 2.50	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Bali .....	78
Gambar 2.51	Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif.....	79
Gambar 2.52	Jumlah Balita Ditimbang .....	90
Gambar 2.53	Persentase Cakupan Imunisasi Campak .....	81
Gambar 2.54	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali.....	81
Gambar 2.55	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani .....	82
Gambar 2.56	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Provinsi Bali.....	83
Gambar 2.57	Jumlah Kasus TBC yang Dilaporkan.....	83



Gambar 2.58	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali .....	84
Gambar 2.59	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi di Provinsi Bali.....	85
Gambar 2.60	Tingkat kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali .....	85
Gambar 2.61	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang terdeteksi DOTS di Provinsi Bali .....	86
Gambar 2.62	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Provinsi Bali .....	87
Gambar 2.63	Cakupan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.....	87
Gambar 2.64	Kasus DBD yang Dilaporkan.....	88
Gambar 2.65	Incidence Rate Kasus DBD per 100.000 Penduduk .....	88
Gambar 2.66	Penderita Diare yang Ditangani di Provinsi Bali .....	89
Gambar 2.67	Angka Kejadian Malaria di Provinsi Bali .....	89
Gambar 2.68	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari penduduk umur 15-49 tahun di Provinsi Bali .....	92
Gambar 2.69	Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan dari Tahun 2016-2020 Berdasarkan Faktor Risiko Penularan .....	92
Gambar 2.70	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS.....	93
Gambar 2.71	Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia.....	94
Gambar 2.72	Cakupan Kunjungan Bayi .....	95
Gambar 2.73	Persentase Ibu Hamil yang Memeriksa Kehamilannya .....	96
Gambar 2.74	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 .....	97
Gambar 2.75	Cakupan Pelayanan Nifas .....	97
Gambar 2.76	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani di Provinsi Bali .....	98
Gambar 2.77	Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Bali.....	99
Gambar 2.78	Cakupan Balita Pendek/Stunting .....	99
Gambar 2.79	Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKBM-JKN) di Provinsi Bali .....	102
Gambar 2.80	Jumlah Kasus Kusta Baru di Provinsi Bali.....	106
Gambar 2.81	Cakupan Konsumsi Garam Beryodium di Rumah Tangga .....	107
Gambar 2.82	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020 .....	108
Gambar 2.83	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak.....	109
Gambar 2.84	Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020 .....	110

Gambar 2.85	Kapasitas Produksi Potensial Air Bersih di Provinsi Bali Tahun 2016-2019 .....	111
Gambar 2.86	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Berakses Air Minum Aman di Provinsi Bali .....	112
Gambar 2.87	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali .....	113
Gambar 2.88	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk.....	114
Gambar 2.89	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Bali .....	115
Gambar 2.90	Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan.....	116
Gambar 2.91	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Provinsi Bali .....	116
Gambar 2.92	Persentase Penegakan Perda di Provinsi Bali.....	117
Gambar 2.93	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di provinsi Bali .....	118
Gambar 2.94	Persentase PMKS yang Tertangani di Provinsi Bali .....	118
Gambar 2.95	Persentase PMKS Skala yang Memeproleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Bali .....	119
Gambar 2.96	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Provinsi Bali.....	120
Gambar 2.97	Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di provinsi Bali.....	120
Gambar 2.98	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Provinsi Bali .....	121
Gambar 2.99	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Bali .....	121
Gambar 2.100	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Provinsi Bali..	122
Gambar 2.101	Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB).....	123
Gambar 2.102	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan di Provinsi Bali .....	124
Gambar 2.103	Keselamatan dan Perlindungan di Provinsi Bali .....	125
Gambar 2.104	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Pekerja Jamsostek di Provinsi Bali .....	126
Gambar 2.105	Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Provinsi Bali.....	127
Gambar 2.106	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan di Provinsi Bali.....	128
Gambar 2.107	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Masyarakat, dan Kewirausahaan di Provinsi Bali...	129
Gambar 2.108	Capaian IPG di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	129
Gambar 2.109	Capaian IDG di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	130

Gambar 2.110	Rasio KDRT di Provinsi Bali .....	133
Gambar 2.111	Perempuan Berstatus Kawin Usia < 18 Tahun di Provinsi Bali...	134
Gambar 2.112	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur di Provinsi Bali.....	135
Gambar 2.113	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Bali .....	136
Gambar 2.114	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Bali .....	137
Gambar 2.115	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Bali ....	137
Gambar 2.116	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bali .....	138
Gambar 2.117	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Provinsi Bali .....	139
Gambar 2.118	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Bali .....	139
Gambar 2.119	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Nonpertanian di Provinsi Bali Tahun 2013-2016.....	143
Gambar 2.120	Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali .....	144
Gambar 2.121	Peningkatan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Tahun 2016-2019 .....	149
Gambar 2.122	Bauran Energi Terbarukan Tahun 2016-2019 .....	150
Gambar 2.123	Volume Timbulan Sampah di Provinsi Bali.....	154
Gambar 2.124	Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	156
Gambar 2.125	Rasio Pasangan Berakate Nikah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	158
Gambar 2.126	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Bali .....	160
Gambar 2.127	Persentase LPM Berprestasi di Provinsi Bali.....	161
Gambar 2.128	Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan di Provinsi Bali.....	162
Gambar 2.129	Persentase Posyandu Aktif di Provinsi Bali Tahun 2016-2020....	163
Gambar 2.130	Posyandu Model/Integrasi yang Dibina di Provinsi Bali.....	164
Gambar 2.131	Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	165
Gambar 2.132	Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah Dibina di Provinsi Bali .....	166
Gambar 2.133	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Bali .....	167

Gambar 2.134	Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Bali .....	168
Gambar 2.135	Persentase KB Aktif dan DO KB di Provinsi Bali.....	169
Gambar 2.136	Peserta KB Aktif Kabupaten/Kota .....	169
Gambar 2.137	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Provinsi Bali.....	171
Gambar 2.138	Rasio Akseptor KB di Provinsi Bali .....	172
Gambar 2.139	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Provinsi Bali .....	172
Gambar 2.140	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) di Provinsi Bali .....	173
Gambar 2.141	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Bali .....	174
Gambar 2.142	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di provinsi Bali Tahun 2013-2018.....	174
Gambar 2.143	Cakupan Anggota BKB, BKR, dan BKL Ber-KB di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 .....	175
Gambar 2.144	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Bali.....	177
Gambar 2.145	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Provinsi Bali .....	178
Gambar 2.146	Jumlah Pelabuhan dan Bandara di Provinsi Bali .....	179
Gambar 2.147	Persentase Layanan Angkutan Darat Di Provinsi Bali .....	180
Gambar 2.148	Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi Bali.....	181
Gambar 2.149	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan HP/Telepon Rumah .....	184
Gambar 2.150	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi .....	185
Gambar 2.151	Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Bali.....	186
Gambar 2.152	Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	188
Gambar 2.153	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda di Provinsi Bali .....	189
Gambar 2.154	Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda di Provinsi Bali.....	190
Gambar 2.155	Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga di Provinsi Bali .....	190
Gambar 2.156	Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bali .....	195
Gambar 2.157	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Provinsi Bali .....	196
Gambar 2.158	Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Provinsi Bali.....	196
Gambar 2.159	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Provinsi Bali.....	198
Gambar 2.160	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Provinsi Bali.....	199
Gambar 2.161	Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Provinsi Bali.....	199

Gambar 2.162	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Provinsi Bali .....	200
Gambar 2.163	Jumlah Daya Tarik Wisata .....	200
Gambar 2.164	Jumlah DTW Kabupaten/Kota .....	201
Gambar 2.165	Tingkat Kunjungan Wisatawan ke Bali.....	201
Gambar 2.166	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan .....	203
Gambar 2.167	Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata di Provinsi Bali.....	206
Gambar 2.168	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB .....	207
Gambar 2.169	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Provinsi Bali.....	208
Gambar 2.170	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar .....	209
Gambar 2.171	Cakupan Bina Kelompok Petani .....	209
Gambar 2.172	Jumlah Kelompok Ternak Pembibitan.....	210
Gambar 2.173	Jumlah Kelompok Pengolah Pakan Ternak, Sarana Prasarana Ternak, dan Pasar Ternak .....	210
Gambar 2.174	Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak .....	211
Gambar 2.175	Rumah Potong Hewan dan Unggas.....	212
Gambar 2.176	Jumlah Pemotongan Ternak.....	212
Gambar 2.177	Jumlah Peternak.....	215
Gambar 2.178	Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Bali .....	219
Gambar 2.179	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB.....	220
Gambar 2.180	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik .....	220
Gambar 2.181	Persentase Penambangan Liar.....	221
Gambar 2.182	Nilai Perdagangan .....	222
Gambar 2.183	Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi Bali .....	222
Gambar 2.184	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat .....	224
Gambar 2.185	Nilai Perindustrian .....	225
Gambar 2.186	Jumlah Industri Kecil dan Menengah.....	226
Gambar 2.187	Cakupan Bina Perajin Tahun 2016-2020 .....	226
Gambar 2.188	Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU) .....	228
Gambar 2.189	Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.....	229
Gambar 2.190	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2015-2020 .....	231
Gambar 2.191	Nilai Tukar Nelayan.....	231
Gambar 2.192	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD .....	233
Gambar 2.193	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW .....	234
Gambar 2.194	Persentase SILPA (dalam juta rupiah).....	236
Gambar 2.195	Persentase Belanja Pendidikan (20%) .....	237

Gambar 2.196	Persentase Belanja Kesehatan (10%) .....	238
Gambar 2.197	Pesentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Provinsi Bali .....	242
Gambar 2.198	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.....	243
Gambar 2.199	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah di Provinsi Bali .....	243
Gambar 2.200	Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi Bali.....	245
Gambar 2.201	Jumlah Temuan BPK di provinsi Bali .....	247
Gambar 2.202	Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev .....	247
Gambar 2.203	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita .....	257
Gambar 2.204	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita .....	258
Gambar 2.205	Jumlah Kantor Bank dan ATM di Provinsi Bali .....	259
Gambar 2.206	Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB di Provinsi Bali.....	260
Gambar 2.207	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum .....	260
Gambar 3.1	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Bali .....	300
Gambar 3.2	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali .....	301
Gambar 3.3	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali .....	302
Gambar 3.4	Rata-Rata Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	303
Gambar 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali .....	351
Gambar 4.2	Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Bali .....	353
Gambar 4.3	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.....	354
Gambar 4.4	Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bali.....	356
Gambar 4.5	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali .....	359
Gambar 4.6	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali .....	359
Gambar 4.7	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali .....	360
Gambar 4.8	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap.....	361
Gambar 4.9	Persentase Rumah dengan Sanitasi di Provinsi Bali .....	361
Gambar 4.10	Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali .....	363
Gambar 4.11	Jumlah DTW di Provinsi Bali.....	364
Gambar 4.12	Jumlah DTW Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.....	364
Gambar 4.13	Produktivitas Bahan Pangan Utama di Provinsi Bali .....	369

Gambar 4.14	Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali .....	369
Gambar 4.15	Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali.....	370
Gambar 4.16	Isu Strategis Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 .....	371
Gambar 4.17	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2018-2013 .....	372
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.....	392
Gambar 5.2	Keterkaitan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 .....	392
Gambar 5.3	Keterkaitan Visi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2020-2024 ..	394

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali .....17
Tabel 2.2	Kebutuhan air di Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai 2020 .....27
Tabel 2.3	Jumlah Ketersediaan air di Provinsi Bali.....28
Tabel 2.4	Status dan Daya Dukung Air Provinsi Bali dengan Asumsi Terkait ..28
Tabel 2.5	Kawasan Lindung di Provinsi Bali .....31
Tabel 2.6	Kawasan Budidaya di Provinsi Bali .....32
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Bali 41 Tahun 2020 (dalam ribu).....41
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2016-2020 .....52
Tabel 2.9	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan .....76
Tabel 2.10	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunasi campak.....80
Tabel 2.11	Tingkat Kematian Akibat Malaria di Provinsi Bali.....90
Tabel 2.12	Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat di Provinsi Bali .....91
Tabel 2.13	Persen Darah Donor yang HIV+ per Kabupaten/Kota tahun 2016 dan Tahun 2017.....92
Tabel 2.14	Cakupan Puskesmas Pembantu .....95
Tabel 2.15	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi .....100
Tabel 2.16	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat .....100
Tabel 2.17	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin .....101
Tabel 2.18	Saranan kesehatan .....101
Tabel 2.19	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB .....102
Tabel 2.20	Jumlah Alokasi Anggaran JKN .....103
Tabel 2.21	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di PKM yang Ditanggung JKN Tahun 2019-2020 .....104
Tabel 2.22	Jumlah Kunjungan Rawat Inap di PKM yang DItanggung JKN.....104
Tabel 2.23	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara ..105
Tabel 2.24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bali Mandara.....105
Tabel 2.25	Inventaris Bendung dan Panjang Saluran Irigasi Daerah Irigasi di Provinsi Bali.....109
Tabel 2.26	Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2019 .....114
Tabel 2.27	Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2020 .....114
Tabel 2.28	Tingkat Hubungan Industrial di Provinsi Bali.....123
Tabel 2.29	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....131
Tabel 2.30	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Provinsi Bali .131
Tabel 2.31	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.....132



Tabel 2.32	Rasio APM Laki-Laki dan Perempuan di SD .....	140
Tabel 2.33	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP di Bali .....	140
Tabel 2.34	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA di Bali .....	141
Tabel 2.35	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi di Bali .....	141
Tabel 2.36	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Provinsi Bali .....	142
Tabel 2.37	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita .....	144
Tabel 2.38	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan .....	145
Tabel 2.39	Tanah Pemerintah Provinsi Bali Tercatat Pada Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Bali .....	146
Tabel 2.40	Tanah Pemerintah Provinsi Bali yang Sudah Bersertifikat .....	146
Tabel 2.41	Tanah Pemerintah Provinsi Bali yang Belum Bersertifikat .....	146
Tabel 2.42	Ketersediaan Dokumen KLHS di Provinsi Bali .....	147
Tabel 2.43	Laporan Inventarisasi GRK Provinsi Bali .....	151
Tabel 2.44	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	157
Tabel 2.45	Rasio Bayi Berakta Kelahiran .....	157
Tabel 2.46	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi .....	158
Tabel 2.47	Kabupaten/Kota Mengoprasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Provinsi Bali .....	159
Tabel 2.48	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK .....	159
Tabel 2.49	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran .....	160
Tabel 2.50	Persentase Remaja ( Umur 14 s.d 19 th) yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) .....	176
Tabel 2.51	Rasio Ijin Trayek Provinsi Bali .....	178
Tabel 2.52	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di provinsi Bali .....	181
Tabel 2.53	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Provinsi Bali .....	182
Tabel 2.54	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun di Provinsi Bali .....	183
Tabel 2.55	Cakupan Layanan Telekomunikasi .....	183
Tabel 2.56	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet .....	184
Tabel 2.57	Jumlah UMKM .....	186
Tabel 2.58	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja .....	188
Tabel 2.59	Buku Kabupaten Dalam Angka .....	191
Tabel 2.60	Buku PDRB .....	191
Tabel 2.61	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah .....	192
Tabel 2.62	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya .....	192
Tabel 2.63	Cagar Budaya yang Dilestarikan .....	193

Tabel 2.64	Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi.....	193
Tabel 2.65	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk.....	197
Tabel 2.66	The Best 20 Direct Foreign Tourist Arrivals to Bali 2016-2020 .....	202
Tabel 2.67	Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata .....	203
Tabel 2.68	Jumlah Restoran dan Rumah Makan.....	205
Tabel 2.69	Jumlah Bar di Provinsi Bali.....	205
Tabel 2.70	Jumlah Pramuwisata di Provinsi Bali.....	206
Tabel 2.71	Jumlah Penyakit Hewan.....	212
Tabel 2.72	Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali.....	213
Tabel 2.73	Pemasukan Bahan Asal Ternak ke Bali (kg) .....	213
Tabel 2.74	Pengeluaran Ternak dari Bali .....	214
Tabel 2.75	Pengeluaran Bahan Asal Ternak dari Bali .....	214
Tabel 2.76	Kelas Kelompok Peternak .....	215
Tabel 2.77	Pasar Hasil Peternakan .....	216
Tabel 2.78	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali.....	218
Tabel 2.79	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis di provinsi Bali .....	218
Tabel 2.80	Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri.....	223
Tabel 2.81	Kinerja Perlindungan Konsumen.....	223
Tabel 2.82	Capaian Pengiriman Transmigrasi.....	227
Tabel 2.83	Konsumsi Ikan .....	229
Tabel 2.84	Cakupan Bina Kelompok Nelayan .....	229
Tabel 2.85	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan .....	230
Tabel 2.86	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman .....	230
Tabel 2.87	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD.....	233
Tabel 2.88	Opini BPK .....	235
Tabel 2.89	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana .....	237
Tabel 2.90	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020 .....	239
Tabel 2.91	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa .....	239
Tabel 2.92	Penetapan APBD .....	240
Tabel 2.93	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan..	241
Tabel 2.94	Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural .....	242
Tabel 2.95	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah .....	244
Tabel 2.96	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah .....	244
Tabel 2.97	Persentase Pelanggaran Pegawai .....	246
Tabel 2.98	Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi .....	248

Tabel 2.99	Fungsi Pengawasan, Pembentukan dan Fungsi Anggaran .....	248
Tabel 2.100	Fungsi Pengawasan.....	248
Tabel 2.101	Jumlah Sistem Peringatan Dini.....	249
Tabel 2.102	Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali .....	250
Tabel 2.103	Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali (lanjutan) .....	251
Tabel 2.104	Jumlah Korban Bencana.....	252
Tabel 2.105	Data Tertanganinya Bantuan Pasca Bencana (Semua Jenis Bencana) .....	252
Tabel 2.106	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana .....	253
Tabel 2.107	Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana.....	254
Tabel 2.108	Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (lanjutan) .....	255
Tabel 2.109	Jumlah Kejadian Bencana.....	256
Tabel 2.110	Nilai Tukar Petani .....	257
Tabel 2.111	Banyaknya Perkara Pidana yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Negeri Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali .....	261
Tabel 2.112	Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan .....	269
Tabel 2.113	Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 .....	273
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali.....	299
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali ....	304
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali .....	308
Tabel 3.4	Struktur Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali.....	310
Tabel 3.5	Neraca Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2020.....	314
Tabel 3.6	Proporsi Penggunaan Anggaran APBD Provinsi Bali Tahun 2016- 2020 .....	327
Tabel 3.7	Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	330
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2020 .....	332
Tabel 3.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	332
Tabel 3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	334
Tabel 3.11	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023 .....	345
Tabel 3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2023 .....	346
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	348

Tabel 4.1	Rumusan Permasalahan Kesenjangan .....	355
Tabel 4.2	Rumusan Permasalahan Kualitas SDM.....	357
Tabel 4.3	Rumusan Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran.....	360
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan Sarana dan Prasarana .....	362
Tabel 4.5	Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup .....	363
Tabel 4.6	Rumusan Permasalahan Pariwisata .....	365
Tabel 4.7	Rumusan Permasalahan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan .	365
Tabel 4.8	Rumusan Permasalahan Bencana dan Perubahan Iklim .....	367
Tabel 4.9	Rumusan Permasalahan Kebudayaan Bali.....	368
Tabel 4.10	Rumusan Permasalahan Rendahnya Produktivitas .....	370
Tabel 4.11	Relasi Isu Strategis Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali.....	374
Tabel 5.1	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana Visi: "Nangun Sat Kerthi Loka Bali .....	401
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023 VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA.....	406
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 .....	413
Tabel 6.3A	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana (Sebelum Perubahan) .....	422
Tabel 6.3B	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana (Setelah Perubahan) .....	431
Tabel 6.4	Kegiatan Indikatif Sesuai Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Bali Tahun 2018-2023 .....	442
Tabel 7.1A	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023 .....	487
Tabel 7.1B	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022-2023 .....	489
Tabel 7.2A	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	491
Tabel 7.2B	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	516
Tabel 7.2C	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	530
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Bali .....	545
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali.....	547

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi karena dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki, dan menentukan tindak lanjut yang tepat.

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 5 Maret 2019. Dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Bali yang sudah memasuki tahun ketiga telah terbit beberapa kebijakan nasional dan perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program

perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah tersebut, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit dalam memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Bali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah di Bali serta terdapat beberapa Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang berlokasi di Bali. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap Prioritas Nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian nomenklatur program sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mengatur tentang tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan, yang berkaitan dengan perkembangan keadaan daerah yaitu adanya Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal bulan Maret 2020. Pandemi ini berdampak sangat buruk terhadap perekonomian Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mencapai minus 9,31%. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Bali menunjukkan perkembangan meningkat dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Bali. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2021. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2021 sangat berpengaruh terhadap target

capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19.

Kebijakan nasional dan perkembangan keadaan daerah menjadi aspek penting dalam perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Bali akibat Pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian beberapa target indikator kinerja makro (IKU pemda) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan dari tahun 2020.

Substansi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi:

1. Gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan;
2. Kondisi keuangan dan kerangka pendanaan;
3. Permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19;
4. Target indikator tujuan dan sasaran;
5. Target kinerja Indikator Kinerja Utama; dan
6. Penyesuaian nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kerjanya;
7. Penyesuaian target indikator kinerja program; dan
8. Penyesuaian Perangkat Daerah pelaksana program.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;



3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Perubahan RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi, yaitu:

1. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
2. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana masyarakat/umat, pinjaman daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan obligasi daerah, dan hibah;
3. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pendekatan spasial dan non-spasial;
5. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 menjadi dokumen yang sangat strategis, karena berperan sebagai:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Bali Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat;

3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
4. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 di Bali;
5. Pedoman penyusunan RPJMD kabupaten/kota se-Bali;
6. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
7. Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
8. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.

Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan Tahun 2023. Selanjutnya RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran 2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan strategis di kabupaten/kota dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar Hukum penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

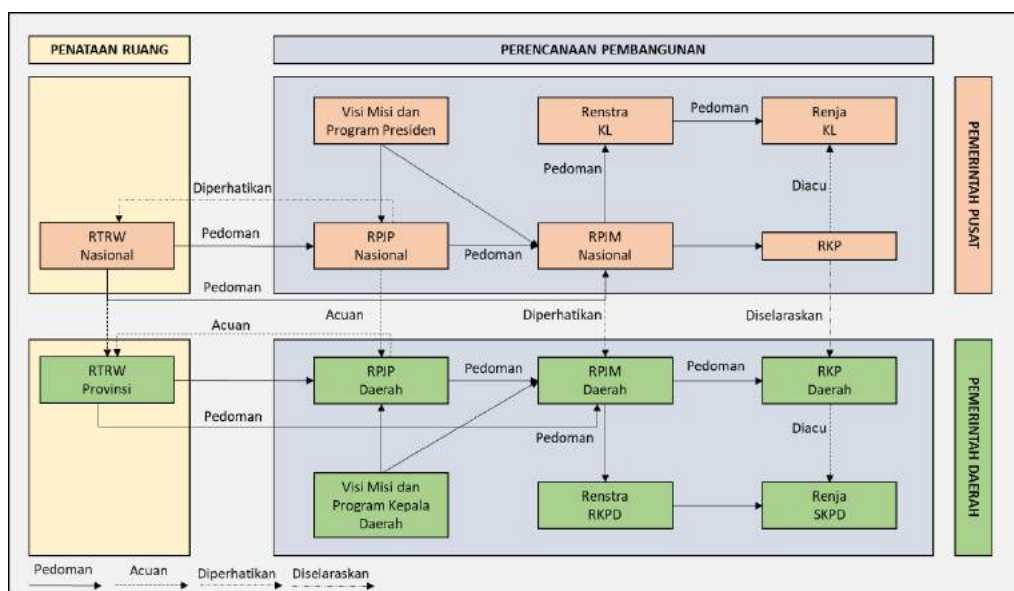
- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.



**Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2018-2023 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dan RTRW Provinsi Bali dengan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 juga mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

dan evaluasi RPJMD sebelumnya, serta memperhatikan pula RPJMD Provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Bali. Selanjutnya, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

### **1.3.1 Arahannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025**

Perencanaan pembangunan daerah memiliki pentahapan dalam penyusunannya, yaitu dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, jangka menengah lima tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu satu tahun. Berdasarkan pentahapan tersebut, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.

Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

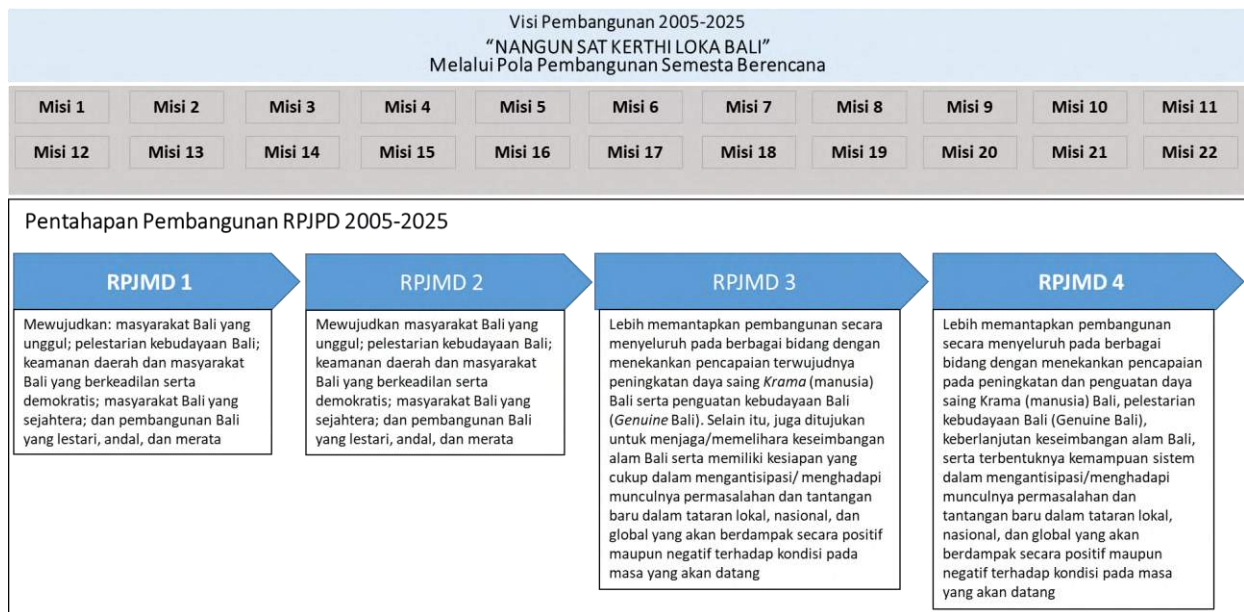
1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.



15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPJMD Provinsi Bali akan memasuki periode 2018-2023. Secara ringkas, hubungan antara RPJMD Semesta Berencana dan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2 Hubungan RPJMD Semesta Berencana dengan RPJPD**

### 1.3.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Ke-3 (2015-2020) dan Ke-4 (2020-2025)

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025, maka diperlukan pentahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Semesta Berencana. Skala prioritas dalam setiap tahapnya berbeda-beda, namun tetap memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk tahapan ketiga dan keempat. Tahapan ketiga dan keempat diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing *Krama* (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Maksud dari perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah

Provinsi Bali 2 (dua) tahun kedepan yang holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

#### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Menetapkan pedoman untuk perubahan dokumen perencanaan kabupaten/kota se-Bali;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan terkait dengan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah ini menguraikan terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menguraikan terkait dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang diprediksikan akan berkembang selama lima tahun mendatang.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan program pembangunan daerah.

### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

### **BAB IX PENUTUP**

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur. Provinsi Bali memiliki beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Provinsi Bali berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

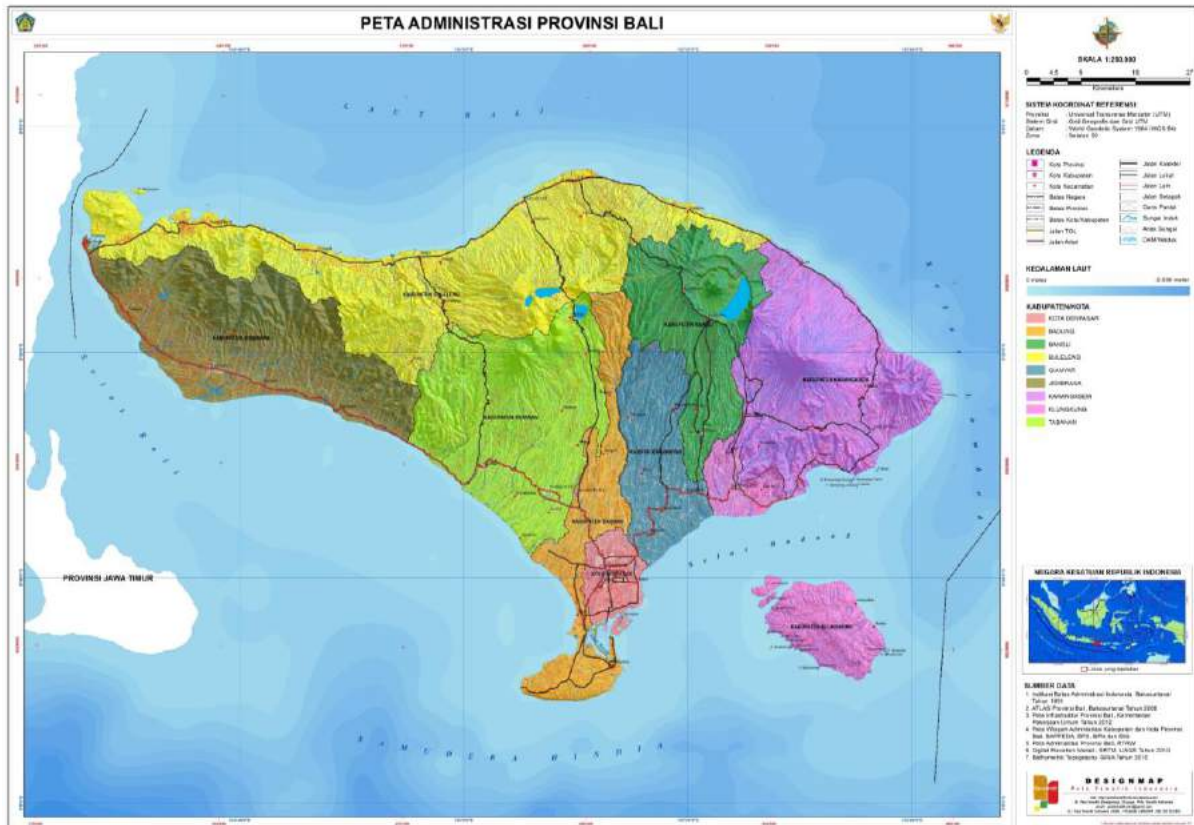
- ❖ Sebelah Utara : Laut Jawa
- ❖ Sebelah Barat : Selat Bali dan Provinsi Jawa Timur
- ❖ Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- ❖ Sebelah Timur : Selat Lombok dan Provinsi NTB

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29 % dari luas kepulauan Indonesia, yang secara administratif dibagi menjadi delapan kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.493 desa adat, 1.596 subak sawah, dan 1.130 subak abian dengan total 2.726 subak sawah/subak swah pda tahun 2018. Luas dan proporsi luas wilayah masing-masing kabupaten dan kota tersebut disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Dibandingkan Luas Provinsi Bali (%)
1	Jembrana	841,80	14,93
2	Tabanan	839,33	14,89
3	Badung	418,52	7,42
4	Gianyar	368,00	6,53
5	Klungkung	315,00	5,59
6	Bangli	520,81	9,24
7	Karangasem	839,54	14,89
8	Buleleng	1.365,88	24,23
9	Denpasar	127,78	2,27
<b>Bali</b>		<b>5.636,66</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Provinsi Bali**

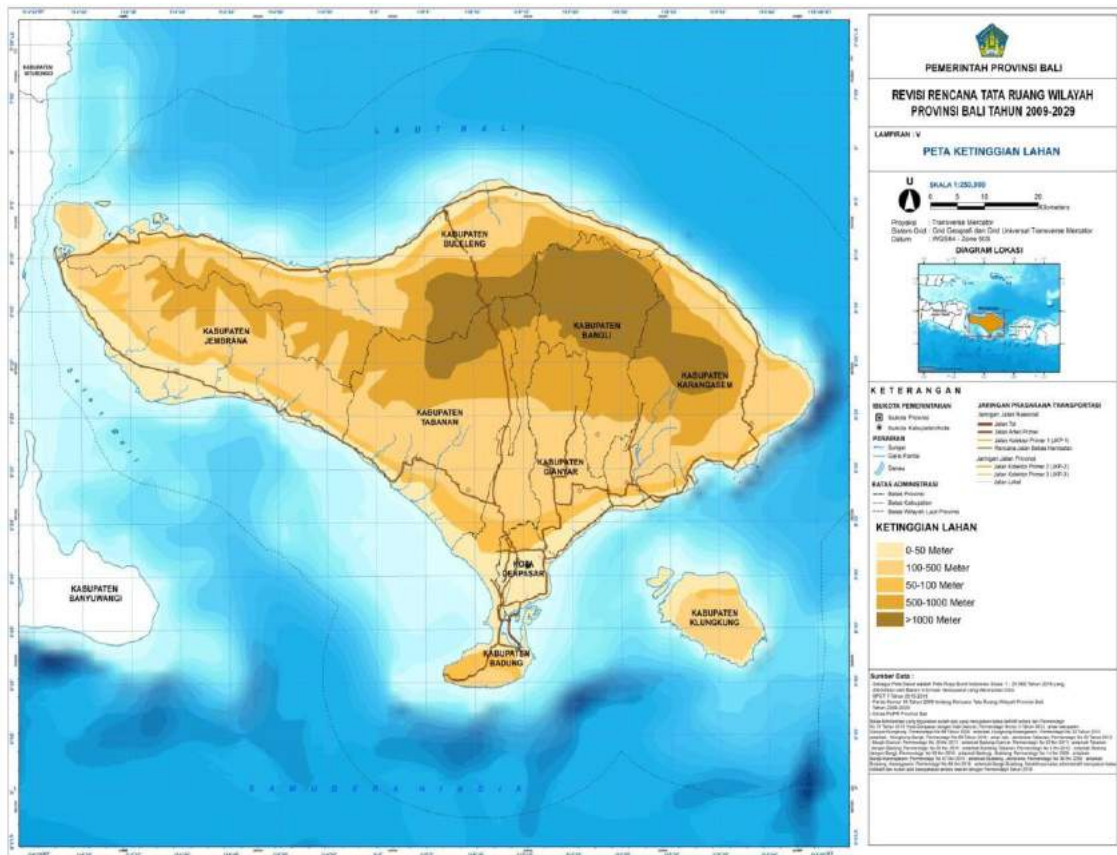
Sumber Data : RTRW Provinsi Bali

### 2.1.2 Kondisi Topografi dan Geologi

Berdasarkan relief dan topografinya, di bagian tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur. Diantara bentangan pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Agung (3.142 m) dan Gunung Batur (1.717 m). Selain itu, terdapat gunung yang tidak berapi antara lain Gunung Merbuk (1.356 m), Gunung Patas (1.414 m), dan Gunung Seraya (1.058 m), dan lain sebagainya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Provinsi Bali terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama. Bagian pertama, adalah Bali Utara yang memiliki dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Sementara bagian kedua adalah Bali Selatan, yang memiliki dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan yang ada di Provinsi Bali, yaitu lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha.

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latosol. Hanya sebagian kecil terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol secara keseluruhan meliputi 44,90 persen dari luas Provinsi Bali. Jenis tanah Regosol meliputi sekitar

39,93 persen dari luas Provinsi Bali. Jenis tanah Andasol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49 persen dari luas Provinsi Bali.



**Gambar 2.2 Peta Topografi Wilayah Provinsi Bali**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.1.3 Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat buah danau sebagai sumber air utama yaitu Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Selain sumber air danau, potensi kesediaan air di Provinsi Bali dapat berasal dari mata air, air sungai dan air tanah. Jumlah mata air di Bali mencapai 570 buah dengan total debit air yang dikeluarkan mencapai 442,39 juta m<sup>3</sup> per tahun. Mata air tersebut merupakan sumber air dari 315 buah sungai dengan panjang total mencapai 3.756 km. Total tampungan air danau dan waduk di Provinsi Bali mencapai 1,036 juta m<sup>3</sup> yang digunakan untuk keperluan irigasi dan konsumsi penduduk. Untuk air tanah, Provinsi Bali memiliki potensi yang mencapai 8.000 juta m<sup>3</sup>.

#### a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan

air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. Komponen utama DAS meliputi vegetasi, lahan dan air, dimana air berperan sebagai pengikat keterkaitan dan ketergantungan antar komponen utama DAS. DAS mempunyai peran yang sangat besar sebagai sistem perlindungan dan penyangga kehidupan, oleh karena itu keberadaannya perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat berfungsi secara lestari. Beberapa kebutuhan penting dalam pengelolaan lahan di daerah aliran adalah sebagai berikut:

- ❑ Kebutuhan dalam hal rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.
- ❑ Kebutuhan untuk mencapai pendapatan wilayah dan pendapatan perkapita sesuai dengan kondisi kelayakan;
- ❑ Kebutuhan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sungai-sungai di Bali merupakan Satuan Wilayah Sungai Bali Penida yang terdiri atas 391 daerah aliran sungai. Karakteristik sungai yang ada sebagian besar merupakan sungai intermitten dan annual sehingga pemanfaatan sumber air dari sungai-sungai ini tidak dapat diharapkan sepanjang tahun. Hanya kurang dari 11% sungai yang memiliki debit aliran pada musim kemarau. Sungai-sungai yang potensial di Bali berjumlah 66 sungai (Dinas PU Provinsi Bali, 2012). Ditinjau dari debit airnya, sepuluh sungai dengan debit maksimum terbesar di Bali disajikan pada Tabel 2.11. Sungai yang memiliki debit air maksimum tertinggi di Bali adalah Tukad Medewi di Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 233,81 m<sup>3</sup>/dtk. Sungai lainnya dengan debit air relatif tinggi (diatas 100 m<sup>3</sup>/dtk) yaitu Tukad Telaga Waja (Karangasem), Tukad Penet (Badung), Tukad Melangit (Klungkung/Gianyar), Tukad Unda (Klungkung), dan Tukad Pangyangan (Jembrana).

#### **b. Danau, Waduk, dan Embung**

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Potensi air danau adalah 1.059,703 juta m<sup>3</sup>, terbesar adalah Danau Batur dengan potensi air 80,11% dari total potensi air danau.



Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem (Dinas PU Provinsi Bali, 2011). Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 26,57 juta m<sup>3</sup>.

Kualitas air danau berdasarkan dua parameter kunci yaitu *biochemical oxygen demand* (BOD) dan *chemical oxygen demand* (COD). Kadar BOD air dari empat danau di Bali menunjukkan nilai yang relatif rendah (dibawah baku mutu air Kelas I sebesar 3 mg/l) walaupun terjadi fluktuasi dalam tiga tahun pengukuran. Demikian pula halnya dengan kadar COD air di empat danau di Bali masih rendah (di bawah baku mutu air Kelas I sebesar 10 mg/l). Kadar COD di Danau Batur terjadi penurunan dalam tiga tahun pengukuran, Danau Tamblingan terjadi peningkatan, sementara Danau Beratan dan Danau Buyan berfluktuasi. Setelah tahun 2016 Pemerintah Provinsi Bali (cq. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup) tidak melakukan monitoring dan pelaporan kualitas air danau sehingga tidak diketahui perkembangan mutakhir mengenai kualitas air danau di Bali. Dengan demikian maka target nasional terjadinya perbaikan sistem monitoring kualitas air belum tercapai.

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi Bali adalah 4 danau, yaitu Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Daya Tamblingan. Peningkatan kualitas air danau diselenggarakan dengan pengendalian pencemaran air danau dan revitalisasi kawasan danau oleh Balai Wilayah Sungai Bali-Penida.

Dari empat danau di Bali, terdapat tiga danau yang meningkat pendangkalanannya berdasarkan sedimentasi danau, yaitu Danau Batur, Danau Beratan dan Danau Tamblingan. Danau Batur meningkat sedimentasinya dari 5.980,47 m<sup>3</sup> di tahun 2015 menjadi 6.348,48 m<sup>3</sup> di tahun 2019. Danau Beratan meningkat sedimentasinya dari 2.443,32 m<sup>3</sup> di tahun 2015 menjadi 4,847,19 m<sup>3</sup> di tahun 2019. Danau Tamblingan meningkat sedimentasinya dari 1.574,63 m<sup>3</sup> di tahun 2015 menjadi 4,427,80 m<sup>3</sup> di tahun 2019. Sedangkan satu danau menurun sedimentasinya yaitu Danau Buyan dari 3.052,05 m<sup>3</sup> di tahun 2015 menjadi 2.847,80 m<sup>3</sup> di tahun 2019.

### **c. Mata Air**

Berdasarkan JICA (2006), di Provinsi Bali terdapat 1.273 buah mata air dan menurut Dinas PU Provinsi Bali (2011) mata air yang telah terinventarisasi potensinya pada tahun 2010 (sebanyak 570 buah (Tabel 2.30). Jumlah mata air terbanyak terdapat di Kabupaten Bangli yaitu 423 buah, disusul Kabupaten Buleleng 327 buah, Kabupaten Tabanan 177 buah dan Kabupaten Karangasem 138 buah. Kabupaten dengan wilayah dataran rendah relatif sedikit terdapat mata air, seperti di Kabupaten Jembrana 61 buah, Kabupaten Badung 30 buah, Kabupaten Gianyar 79 buah, Kabupaten Klungkung 38 buah termasuk di Nusa Penida sebanyak 9 buah. Mata air yang telah terinventarisasi potensinya tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Buleleng (144 buah). Potensi air mata air menurut JICA (2006) dan Dinas PU Provinsi Bali (2011) adalah 1.379,21 juta m<sup>3</sup> setahun dengan potensi terbesar di Kabupaten Tabanan. Sedangkan menurut Ditjen Sumberdaya Air Kemen PU (2009), potensi air total mata air di Bali adalah 781.064,56 x 10<sup>3</sup> m<sup>3</sup>.

### **d. Air Tanah**

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1986), kondisi keterdapatannya air tanah dan produktivitas akuifer di wilayah Provinsi Bali sebagai berikut.

- Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).
- Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).
- Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya

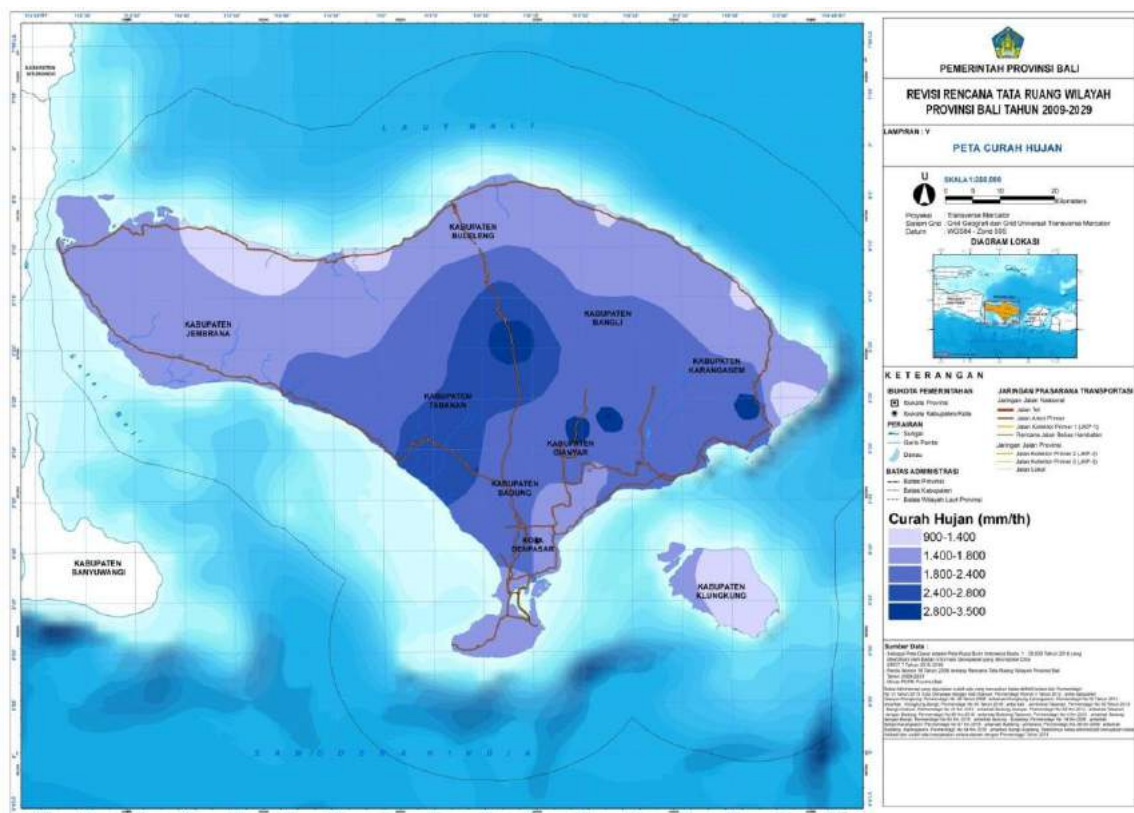
< 5 liter/detik. Terdapat di wilayah Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoyo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kecamatan Gerogak, Seririt, dan Banjar).

- ❑ Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
- ❑ Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya > 5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayahpesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).
- ❑ Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), daerah hulu Kabupaten Gianyar. Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kabupaten Buleleng (Tejakula, Buleleng dan Seririt).
- ❑ Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Terdapat di Kabupaten Tabanan (daerah hulu Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar Kabupaten Karangasem dan Buleleng.
- ❑ Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan Kabupaten Buleleng.
- ❑ Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.

- ❑ Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima).
- ❑ Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem.

### 2.1.4 Iklim dan Suhu

Provinsi Bali umumnya beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi dengan musim pancaroba di Provinsi Bali. Pada tahun 2019 rata-rata suhu berkisar antara 26,1°C – 27,8°C. Kelembaban udara berkisar antara 76% – 83%. Curah hujan tertinggi tahun 2019 yaitu 2.438 mm yang ada di Kabupaten Bangli.



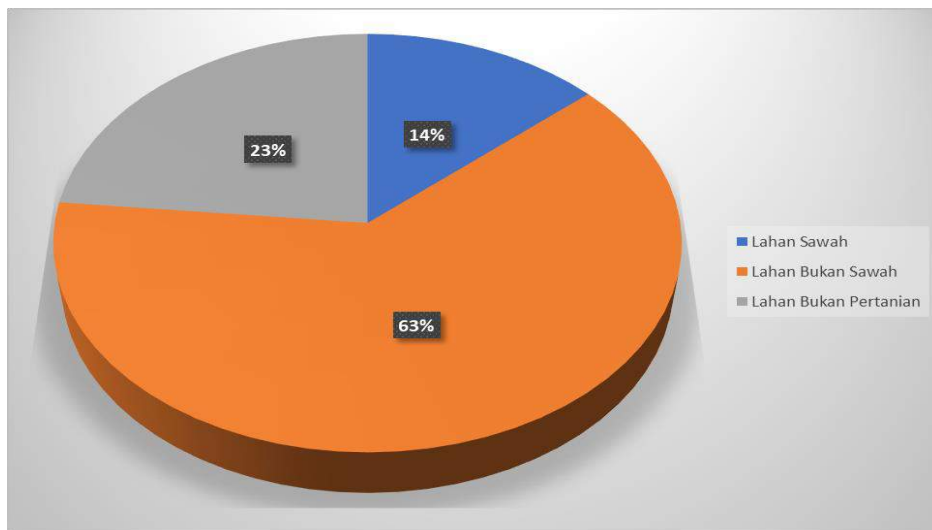
**Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Wilayah Provinsi Bali**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.1.5 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Bali didominasi oleh penggunaan lahan bukan sawah. Pada tahun 2018 luas penggunaan lahan bukan sawah mencapai 355.720 ha atau 63% dari total luas lahan yang ada di Provinsi Bali. Total penggunaan lahan untuk lahan sawah sebesar 70.067 ha atau 14% dari total luas lahan yang ada di Provinsi Bali. Luas lahan bukan pertanian seluas

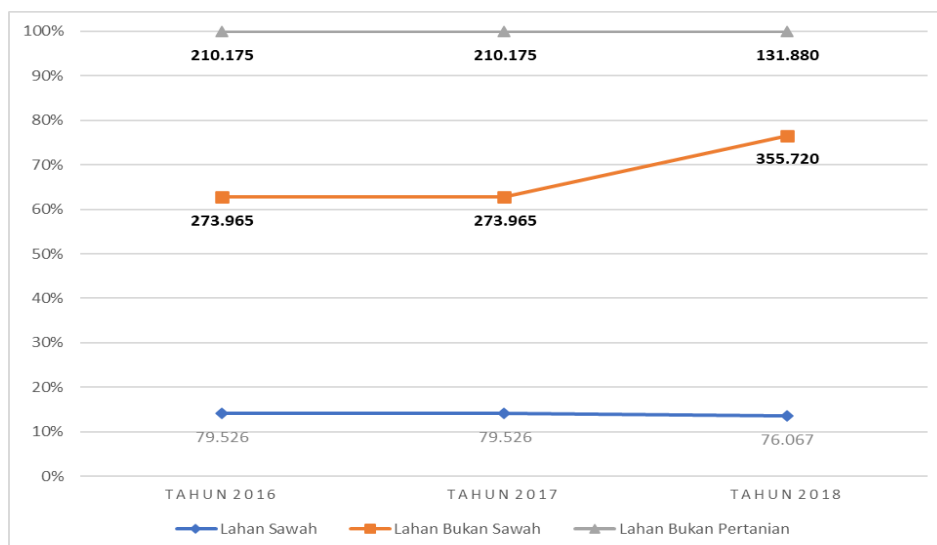
131.880 ha atau 27% dari total luas lahan yang ada di Provinsi Bali (Gambar 2.4).



**Gambar 2.4 Presentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2018**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

Selama kurun waktu 2016 sampai 2018 penggunaan lahan sawah terus berkurang. Tahun 2016 luas lahan sawah sebesar 79.526 ha terus mengalami penurunan menjadi 76.067 ha pada tahun 2018. Penggunaan lahan bukan sawah tahun 2016 sebesar 273.965 ha mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 menjadi 355.720 ha. Hal yang sama juga terjadi pada lahan bukan pertanian, dimana pada tahun 2016 tercatat seluas 210.175 ha meningkat menjadi 131.880 ha (Gambar 2.5).



**Gambar 2.5 Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2016-2018 (Hektar)**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### **2.1.6 Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Analisis kemampuan lahan, mencakup analisis mengenai sifat tanah (fisik maupun kimia), topografi, drainase, kedalaman tanah, dan kondisi lingkungan hidup lainnya. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dilakukan klasifikasi kemampuan lahan dengan kedalaman tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaannya. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan “tingkat bahaya kerusakan” dan “hambatan dalam mengelola lahan”. Klasifikasi kemampuan lahan dikelompokkan ke dalam 8 kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VIII. Dalam hal ini, apabila tingkat bahaya/resiko kerusakan dan hambatan penggunaan meningkat, maka spektrum penggunaan lahan menurun. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim.

Kajian yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara untuk menghitung daya dukung air menunjukkan estimasi kebutuhan air sektor pertanian tahun 2009 untuk irigasi diperkirakan mencapai 1.592,24 juta m<sup>3</sup>, sawah sekitar 2.080,60 juta m<sup>3</sup>/tahun, kehutanan sebesar 1.031,20 juta m<sup>3</sup>/tahun; kebutuhan air domestik 107,65 juta m<sup>3</sup>/tahun; kegiatan industri sekitar 22,08 juta m<sup>3</sup>/tahun; kegiatan hotel dan restoran sekitar 16,58 juta m<sup>3</sup>/tahun; dan kebutuhan fasilitas pemerintahan dan umum sekitar 25,12 juta m<sup>3</sup>/tahun. Kebutuhan air di Provinsi Bali berdasarkan kebutuhan setiap sektor adalah sekitar 4.239,71 juta m<sup>3</sup>/tahun (Unud, 2009). Kebutuhan air domestik di atas meningkat dua kali lipat tahun 2014 menjadi sebesar 284.674.815 m<sup>3</sup>/tahun.

Berdasarkan hasil Perhitungan neraca air yang dilakukan Departemen Kimpraswil tahun 2003 menunjukkan bahwa Pulau Jawa dan Bali telah mengalami defisit air sebesar 38,4 milyar m<sup>3</sup> dan diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2020 sebesar 44,1 milyar m<sup>3</sup>, apabila tidak dilakukan pengelolaan sumberdaya air yang tepat. Mindset sumberdaya air merupakan benda sosial (*public good*) yang menyebabkan perilaku boros air masyarakat harus diubah. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan hutan,

ketidakakuratan penataan ruang dan/ atau pelanggaran tata ruang, over eksploitasi air tanah, dan perubahan iklim merupakan isu penting di Provinsi Bali yang menuntut penanganan terpadu antarsektor, karena mempengaruhi stok atau kontinuitas sumberdaya air. Begitu juga pencemaran air permukaan karena mempengaruhi kelayakan pakainya.

Kabupaten yang memiliki nilai surplus air di Provinsi Bali hanya Kabupaten Jembrana pada semua tahun dan asumsi yang digunakan, sedangkan Kabupaten Tabanan secara normal memiliki defisit air, akan tetapi memiliki air yang berlebih saat kejadian La Nina atau saat air tanah diinput sebagai salah satu sumber air saat perhitungan. Sedangkan wilayah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng mengalami surplus air saat kejadian La Nina dan ketersediaan air dari CAT dimasukkan dalam perhitungan. Sedangkan pada Kabupaten/kota yang lain mengalami kondisi defisit air setiap tahun, baik pada kondisi normal ataupun saat asumsi-asumsi fenomena iklim dan ketersediaan air tanah dimasukkan dalam proses perhitungan. Kota Denpasar adalah yang paling tinggi defisitnya dan diikuti oleh Kabupaten Badung. Secara lengkap berikut tabel yang menyajikan kebutuhan air di Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai 2020, dan tabel mengenai ketersediaan air di Provinsi Bali dan daya dukung air Provinsi Bali.

**Tabel 2.2 Kebutuhan air di Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai 2020**

No	Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Air Per Tahun (Milliar M <sup>3</sup> )				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buleleng	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
2	Karangasem	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
3	Klungkung	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	Bangli	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Badung	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
6	Denpasar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13
7	Gianyar	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8	Tabanan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9	Jembrana	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Total		<b>0,48</b>	<b>0,49</b>	<b>0,50</b>	<b>0,51</b>	<b>0,52</b>

Sumber Data : BWS Bali Penida, 2021

**Tabel 2.3 Jumlah Ketersediaan air di Provinsi Bali**

No	Kabupaten/ Kota	Zona	Kebutuhan Air Per Tahun (Milliar M <sup>3</sup> ) Berdasarkan Air Permukaan
1	Buleleng	Zona Utara	1,38
2	Karangasem	Zona Timur	0,54
3	Klungkung	Zona Tengah	0,28
4	Bangli		
5	Badung	Zona Sarbagita	3,25
6	Denpasar		
7	Gianyar		
8	Tabanan		
9	Jembrana	Zona Barat	1,11
<b>Total</b>			<b>6,55</b>

Sumber Data : BWS Bali Penida, 2021

**Tabel 2.4 Status dan Daya Dukung Air Provinsi Bali dengan Asumsi  
Terkait**

No	Kabupaten/ Kota	Zona	Daya Dukung Air				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buleleng	Zona Utara	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
2	Karangasem	Zona Timur	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Klungkung	Zona Tengah	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
4	Bangli						
5	Badung	Zona Sarbagita	2,92	2,92	2,91	2,90	2,89
6	Denpasar						
7	Gianyar						
8	Tabanan						
9	Jembrana	Zona Barat	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08
Total			<b>6,08</b>	<b>6,07</b>	<b>6,06</b>	<b>6,05</b>	<b>6,04</b>

Sumber Data : BWS Bali Penida, 2021

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pembangunan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan aspek lingkungan akan berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, nilai budaya, dan daya tarik Bali itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada implementasi prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang bersifat holistik, dengan mempertimbangkan daya dukung



dan daya tampung lingkungan hidup dan mengintegrasikannya dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi.

Mengacu pada arahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali untuk mendukung ketersediaan air secara berkelanjutan, arahan peraturan zonasi kawasan resapan air mencakup: pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan penerapan prinsip 'tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai' atau disebut *zero delta Q policy*' adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya. Sehingga dengan penerapan zonasi tersebut akan bisa menabung air pada saat musim hujan dan memanen air pada saat musim kemarau.

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 19, UU No. 32 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air sangat penting sekali di dalam menjaga kelestarian upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

### **2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah**

Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 563.666 Ha dan merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya.

Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Pesatnya pengembangan pariwisata di Provinsi Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali terutama pada wilayah Bali selatan, baik yang berasal dari wilayah Bali maupun luar wilayah Bali. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung dan daya tampung seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi wilayah; meningkatnya intrusi air laut ke daratan, menurunnya debit air tanah dan air permukaan, meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali. Hal tersebut menyebabkan kerentanan ekologi Bali semakin tinggi yang bermuara pada makin rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Bali. Jika keseimbangan ekosistem tersebut terganggu, maka keunggulan bersaing Bali dari sektor pariwisata akan menurun, dan Bali akan ditinggalkan.

Neraca lahan atau penatagunaan tanah di Provinsi Bali belum pernah dihitung, namun dapat diperkirakan bahwa tutupan lahan hutan, perkebunan, persawahan terus mengalami penurunan. Target kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) berdasarkan arahan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan keleluasaan untuk alih fungsi lahan pertanian sawah sebesar 10% dari luas sawah yang ada sesuai arahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali cenderung sulit untuk dipenuhi terlebih belum ditetapkannya sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai arahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sesuai

Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, rencana pola ruang terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan lindung mencakup :
  - 1). kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
  - 2). kawasan perlindungan setempat;
  - 3). kawasan konservasi;
  - 4). kawasan lindung geologi;
  - 5). kawasan rawan bencana;
  - 6). Kawasan cagar budaya; dan
  - 7). kawasan lindung lainnya.
- b. Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas :
  - 1). kawasan hutan produksi;
  - 2). kawasan hutan rakyat;
  - 3). kawasan pertanian;
  - 4). kawasan perikanan;
  - 5). kawasan pariwisata;
  - 6). kawasan peruntukan industri;
  - 7). kawasan permukiman;
  - 8). kawasan pertambangan dan energi; dan
  - 9). kawasan peruntukan lainnya.

**Tabel 2.5 Kawasan Lindung di Provinsi Bali**

No	Jenis Peruntukan	Luas Peruntukan	
		Ha	%
<b>I</b>	<b>Kawasan Peruntukan Lindung</b>		
1	kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	96.667,97	17,28
	a. Hutan Lindung	96.667,97	17,28
	b. Kawasan Resapan Air		
2	Kawasan Perlindungan Setempat	3.432,17	0,61
3	Kawasan Konservasi	21.424,59	3,83
	a. Taman Nasional	14.115,56	2,52
	b. Taman Hutan Raya	1.084,32	0,19
	c. Taman Wisata Alam	4.474,84	0,80
	d. Cagar Alam	1.749,87	0,31
4	Kawasan Lindung Geologi		
5	Kawasan Rawan Bencana	7.317,29	1,31
6	Kawasan Cagar Budaya		
7	Kawasan Ekosistem Hutan Mangrove	345,55	0,06
<b>Sub Total I</b>		<b>129.187,57</b>	<b>23,09</b>

Sumber Data : RTRW Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.6 Kawasan Budidaya di Provinsi Bali**

No	Jenis Peruntukan	Luas Peruntukan	
		Ha	%
<b>II</b>	<b>Kawasan Peruntukan Budidaya</b>		
1	Kawasan Hutan Produksi	8.856,35	1,58
2	Kawasan Hutan Rakyat		
3	Kawasan Pertanian	293.723,34	52,50
	a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	57.024,81	10,19
	b. Kawasan Holtikultura	10.643,08	1,90
	c. Kawasan perkebunan	226.055,45	40,41
	d. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
4	Kawasan Perikanan	119,76	0,02
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	5.291,04	0,95
6	Kawasan Peruntukan Industri	1.924,80	0,34
7	Kawasan Pariwisata	39.369,74	7,04
8	Kawasan Permukiman	81.000,71	14,48
9	Kawasan Peruntukan Lainnya		
	<b>Sub Total II</b>	<b>430.285,74</b>	<b>76,91</b>

Sumber Data : RTRW Provinsi Bali, 2021

Komposisi rencana pola ruang secara umum adalah kawasan peruntukan lindung sebesar 129.187,57 ha atau 23,09% dan kawasan peruntukan budidaya sebesar 430.285,74 ha atau 76,91%. Komponen kawasan budidaya yang banyak menghabiskan tutupan lahan adalah kawasan pertanian sebesar 293.723,34 ha atau 52,5%, kawasan permukiman sebesar 81.000,71 ha atau 14,48%, dan kawasan pariwisata sebesar 39.369,74 ha atau 7,04%. Komposisi kawasan pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan sebesar 57.024,81ha atau 10,19%, holtikultura sebesar 10.643,08 ha atau 1,9%, dan perkebunan sebesar 226.055,45 ha atau 40,41%. Komposisi kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang tersebar berdasarkan lokasi permukiman tersebut. Peruntukan kawasan pariwisata adalah rancangan untuk kawasan efektif pariwisata.

Arahan peruntukan untuk kawasan permukiman, kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan peruntukan perindustrian merupakan proyeksi pengembangan rencana pola ruang terbangun di Provinsi Bali yang pada gilirannya akan terkait dengan pemusatan intensitas aktivitas. Pemusatan

intensitas aktivitas pada umumnya terdiri dari pemusatan jumlah penduduk yang lebih tinggi dari kawasan lainnya yang pada gilirannya juga membutuhkan lahan dan sumberdaya air minum yang lebih tinggi pula. Peraturan zonasi kawasan merupakan perangkat lanjut untuk mengendalikan arahan peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, tata masa bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana minimal yang harus dipenuhi di setiap kawasan pengembangan.

Di sisi lain, kawasan budidaya non terbangun seperti pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai pendukung ketahanan pangan, sosial budaya kawasan serta pelestarian lingkungan juga membutuhkan lahan yang tidak sedikit dan dialokasikan sebanyak 52,50% dari luas wilayah Provinsi Bali. Namun demikian keberlanjutan kegiatan budidaya pertanian juga sangat tergantung pada ketahanan terhadap alih fungsi dan ketersediaan air baku untuk pertanian. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas keseimbangan proporsi rencana pola ruang yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya harus tetap dipertahankan untuk mewujudkan daya dukung lahan secara optimal. Berkurangnya tutupan lahan hutan, perkebunan dan lainnya juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya air.

Isu utama pengembangan wilayah saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Bali bagian Selatan dengan Bali Utara, Timur dan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah provinsi difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan (*strategic development regions*) dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan seperti PKN, PKLW dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan

industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan. Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut kebijakan pembangunan sektor transportasi khususnya transportasi darat harus dilakukan secara merata yang menembus semua kawasan/wilayah. Sesuai arahan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, beberapa pembangunan jalan bebas hambatan dan peningkatan jalan arteri primer dan kolektor primer 1 yang menghubungkan antar kota kabupaten dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai ibu kota provinsi dan outlet antar provinsi dan internasional. Sistem transportasi darat tersebut dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan dan sentra-sentra produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk pertanian pada kawasan yang dilintasinya.

Rencana pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah antara lain: pembangunan bandara Baru Bali Utara, Pembangunan Kawasan Industri Pengambangan dan Kawasan Industri Celukan Bawang, pembangunan kawasan pariwisata dan pelabuhan celukan bawang dalam rangka mendorong pusat-pusat pertumbuhan. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan di Provinsi Bali khususnya Jalan Bebas Hambatan Antar Kota, mencakup: Gilimanuk–Negara; Negara–Pekutatan; Pekutatan–Soka (ruas bagian barat); Mengwitani–Singaraja (ruas tengah-utara); Kuta–Tanah Lot–Soka; dan Cangu–Beringkit–Batuan–Purnama (ruas selatan-timur). Peningkatan jalan kolektor primer, mencakup ruas jalan: Cekik–Seririt–Singaraja–Kubutambahan–Amed–Amlapura– Angantelu (ruas utara-ampenan); dan Mengwitani–Singaraja; Soka–Seririt (ruas tengah);

Keterpaduan pembangunan antarsektor juga sangat penting untuk memperkecil ketimpangan melalui perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, keterpaduan perencanaan daratan, pesisir

dan lautan dapat mendorong kinerja pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah satu fokus pemerintahan kedepan.

Arah Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tema dikelompokkan menjadi, pengembangan wilayah dengan tema pariwisata, pengembangan wilayah dengan tema pertanian, pengembangan wilayah dengan tema ekonomi produktif, dan pengembangan wilayah dengan tema UMKM.

#### **a. Kepariwisata**

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Bali. Trend pariwisata dunia saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek Keamanan dan kenyamanan. Disamping itu, Bali juga menghadapi berbagai tantangan penting antara lain:

- Pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- Rendahnya kapasitas untuk mempertahankan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, industri, pariwisata dan perumahan;
- pencemaran lingkungan; dan
- kemacetan yang semakin buruk.

Sebagai Sektor ekonomi utama di Bali, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 dimana Pembangunan kepariwisataan merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi antara lain :

- Pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- Pembangunan pemasaran pariwisata daerah;

- Pembangunan industri pariwisata daerah; dan
- Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

Dalam upaya mewujudkan pariwisata budaya yang berkualitas dan berkelanjutan serta memiliki daya saing yang berlandaskan Tri Hita Karana yang mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dengan mengedepankan kekayaan dan keragaman potensi daya tarik wisata berwawasan lingkungan berdasarkan budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu berlandaskan Tri Hita Karana;

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

1. Pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. Pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku;
3. Pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan;
4. Pengembangan dtw berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
5. Pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) menurun secara drastis sebanyak 82,96% di tahun 2020 dibanding tahun 2019. Sebelum terjadinya pandemi, Bali menyumbang hampir 40% total wisman yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisman yang berkunjung ke Bali di tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 6.275.210 wisman dan menurun secara signifikan di tahun 2020 menjadi 1.069.473 wisman. Mengingat tingginya ketergantungan kepada wisman, Bali menjadi daerah yang ekonominya paling terdampak pandemi Covid-19.

#### **b. Pertanian**

Pengembangan kawasan Pertanian, Peternakan dan perkebunan diarahkan di beberapa lokasi di Provinsi Bali antara lain:

1. Padi sebagai komoditas Tanamam Pangan dikembangkan di 9 kabupaten/kota se - Bali



2. Jagung sebagai komoditas Tanaman Pangan dikembangkan di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng
3. Bawang Merah sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Tabanan, Buleleng, Karangasem dan Bangli
4. Cabai sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Bangli, Tabanan, Buleleng, Klungkung dan Gianyar.
5. Jeruk sebagai komoditas hortikultura dikembangkan di Kabupaten Bangli dan Buleleng
6. Kopi sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Buleleng, Badung, Bangli dan Tabanan
7. Kakao sebagai komoditas perkebunan dikembangkan di Kabupaten Jembrana
8. Jambu Mete merupakan komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem
9. Cengkeh sebagai komoditas perkebunan di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Jembrana
10. Sapi Potong sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Badung, Klungkung, Karangasem dan Buleleng
11. Kambing sebagai komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Tabanan
12. Babi komoditas peternakan dikembangkan di Kabupaten Gianyar.

**c. Kelautan dan Perikanan**

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sekiranya perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan. Dan pengembangan kegiatan terpadu tersebut diarahkan di beberapa lokasi di Provinsi Bali antara lain :

1. Untuk di Kabupaten Klungkung Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Nusa Penida dan Klungkung Daratan, sedangkan Kawasan Minapolitan Perikanan tangkap di pusatkan di PPI Kusamba.
2. Kabupaten Bangli Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku

3. Kabupaten Tabanan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya diarahkan di Kecamatan Penebel, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Marga, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat dan Kecamatan Pupuan.
4. Kabupaten Jembrana Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap diarahkan di PPN Pengambengan.
5. Kabupaten Buleleng Kawasan Minapolitan Perikanan tangkap diarahkan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Gerokgak.

**d. Industri**

Adapun industri yang sekiranya dapat dijadikan industri unggulan di Provinsi Bali adalah :

1. Industri pangan diantaranya
  - industri pengolahan biji kakao, lokasi pengembangannya dilakukan di Kabupaten Jembrana dengan kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Tabanan, Buleleng, Badung, Karangasem dan Bangli.
  - industri pengolahan buah-buahan, lokasi pengembangannya di Kabupaten Buleleng dan Karangasem, dengan seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali sebagai kabupaten penyangganya.
  - industri pengolahan biji kopi, lokasi pengembangannya di Kabupaten Tabanan dan Buleleng, dengan kabupaten Bangli sebagai kabupaten penyangganya.
  - industri pengolahan mente, lokasi pengembangannya di Kabupaten Karangasem dengan kabupaten bangli, Buleleng dan Gianyar sebagai kabupaten penyangganya.
  - industri pengolahan kelapa, lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana, dengan kabupaten Tabanan sebagai Kabupaten penyangganya
  - industri pengolahan ikan, lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dengan kabupaten Buleleng, Badung dan Klungkung sebagai kabupaten penyangganya.

- industri pengolahan daging.  
lokasi pengembangannya di Kabupaten Jembrana dan Tabanan dengan Kabupaten Badung sebagai kabupaten penyangganya
2. Industri Farmasi dan Kosmetik berupa industri dan kosmetik farmasi berbahan herbal.  
Industri tersebut berpotensi menjadi industri unggulan dengan menjalin kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen/pelaku usaha; melakukan inovasi produk/peningkatan kapasitas produksi produk herbal; upaya perlindungan produk herbal melalui hak cipta/paten; pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan dan pengendalian mutu; dan penguatan jaringan pasar dan promosi produk.
  3. Industri tekstil dan aneka industri berupa industri kerajinan kayu, tekstil dan produk tekstil.  
Industri kerajinan kayu perlu didukung dengan adanya kelancaran pengadaan bahan baku kayu; adanya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kayu dengan konsentrasi kepada desain modern dan sistem produksi berwawasan lingkungan; peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran dari SDM industri serta peningkatan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.
  4. Industri Elektronika dan Telematika/ICT.  
Didukung dengan pembentukan IT centre serta kelompok-kelompok pengembang software; peningkatan jumlah unit usaha yang menghasilkan piranti lunak, animasi, maupun game; serta penguatan produk dengan mengembangkan ciri khas Bali.

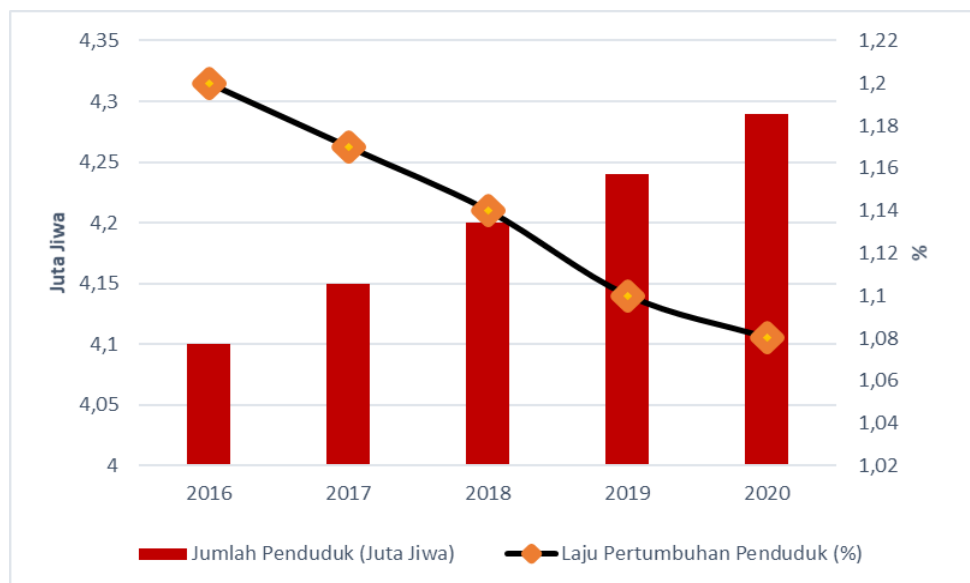
### **2.1.8 Aspek Demografi**

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971, penduduk Provinsi Bali berjumlah 2.120.338 jiwa, meningkat menjadi 2.469.724 jiwa pada tahun 1980. Laju pertumbuhan penduduk selama periode 1971-1980 rata-rata 1,69% pertahun. Hasil Sensus Penduduk tahun 1990, jumlah penduduk meningkat menjadi 2.777.356 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 1980-1990 rata-rata 1,18% pertahun, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan periode 1971-1980. Hasil Sensus Penduduk tahun 2000, jumlah penduduk meningkat menjadi 3.890.757 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk periode 1990 - 2000 rata-rata 1,19% perahun.

Laju pertumbuhan penduduk dalam periode 2000 - 2010 rata-rata 2,14% pertahun. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2020 rata-rata 1,01% pertahun.

Selama periode 2010-2020, pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Buleleng yaitu 2,33% pertahun. Pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar mengalami laju pertumbuhan negatif (-0,81%), sangat menurun dibandingkan periode 2000-2010. Terdapat tiga kabupaten lagi yang menurun laju pertumbuhannya yaitu Tabanan, Badung, dan Gianyar.

Jumlah penduduk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali dari tahun 2010-2020 adalah sebesar 1.01%. Pertumbuhan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pada tahun 2000-2010 yaitu sebesar 2,14%. Ini menunjukkan bahwa tren penambahan penduduk di Provinsi Bali semakin menurun. Gambar 2.6 menunjukkan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali dari tahun 2016-2020.



**Gambar 2.6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2016 - 2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

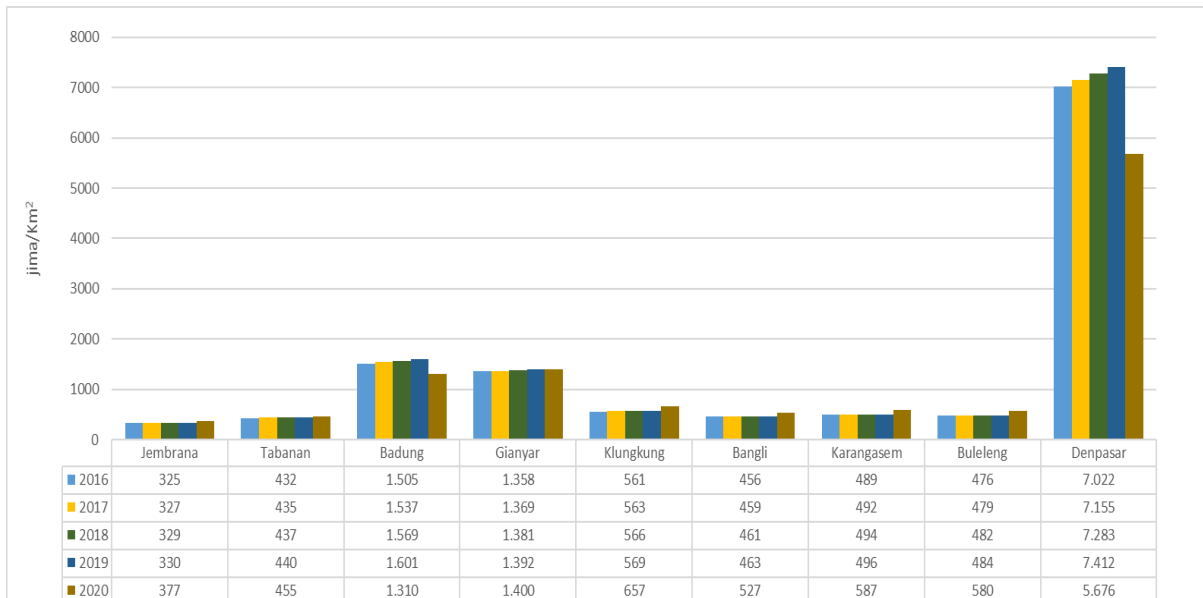
Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2020 sebesar 4,32 juta jiwa yang terdiri dari 2,17 juta jiwa laki-laki atau 50,2% dan 2,14 juta jiwa perempuan atau 49,8%. Ini menunjukkan bahwa sex ratio masih di dominasi laki-laki dan sekaligus menjadi salah satu bonus demografi untuk pengembangan ketenaga kerjaan yang lebih produktif.

**Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Bali Tahun 2020 (dalam ribu)**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	152,3	145,2	297,5
5-9	154,0	147,0	301,0
10-14	169,4	158,3	327,7
15-19	172,4	161,9	334,4
20-24	172,3	163,9	336,1
25-29	170,1	164,2	334,4
30-34	165,9	163,6	329,5
35-39	163,5	162,8	326,3
40-44	165,7	166,3	332,0
45-49	155,5	156,5	312,1
50-54	142,8	143,2	286,0
55-59	121,7	122,8	244,6
60-64	95,1	97,2	192,3
65-69	71,6	75,0	146,5
70-74	47,0	52,6	99,6
75+	51,7	65,9	117,6
<b>Jumlah Provinsi</b>	<b>2.171,1</b>	<b>2.146,4</b>	<b>4.317,5</b>

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

Kepadatan penduduk di Provinsi Bali mencapai 747 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2020. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kota Denpasar, dimana selama kurun waktu 2016 sampai 2020 kepadatan penduduk Kota Denpasar terus mengalami peningkatan hingga mencapai 5.676 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan dalam ketersebaran kepadatan penduduk di Provinsi Bali yang bermuara pada kondisi ekonomi dan penyediaan infrastruktur pendukung yang juga belum merata di setiap kabupaten/kota.



**Gambar 2.7 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (jiwa/km<sup>2</sup>)**

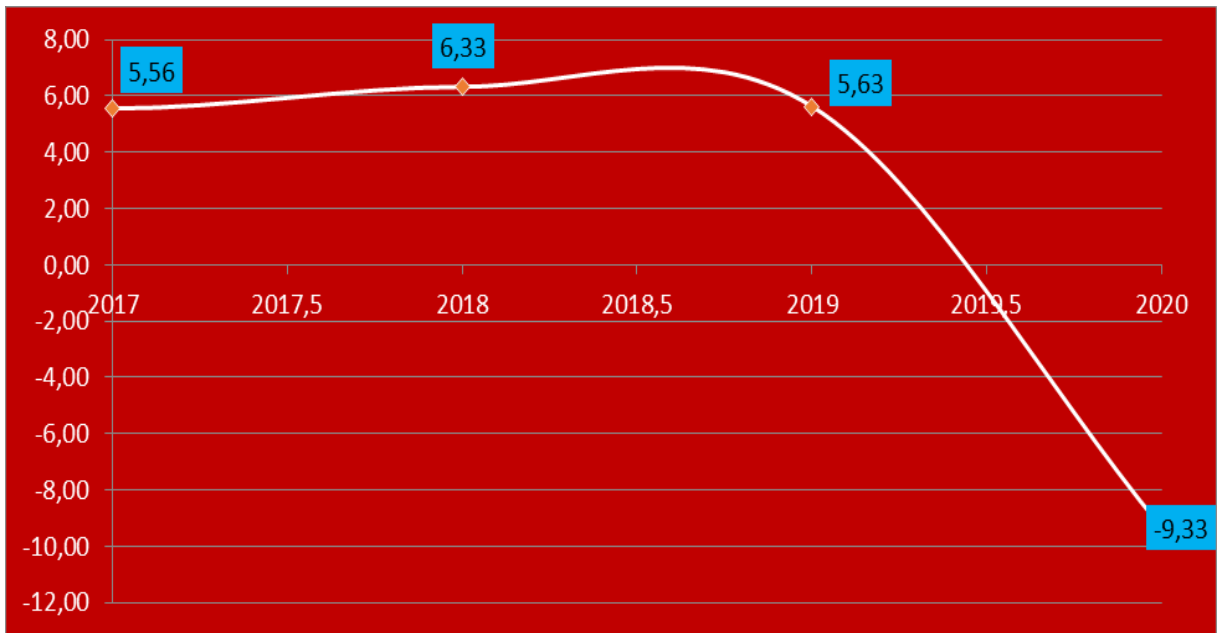
Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Daya dukung sektor pertanian, pariwisata dan sektor jasa-jasa pendukung pariwisata adalah modal dasar dalam menggerakkan pembangunan di Provinsi Bali. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% aktivitas ekonomi Bali disumbangkan oleh industri pariwisata sedangkan kontribusi sektor pertanian tidak lebih dari 20%.

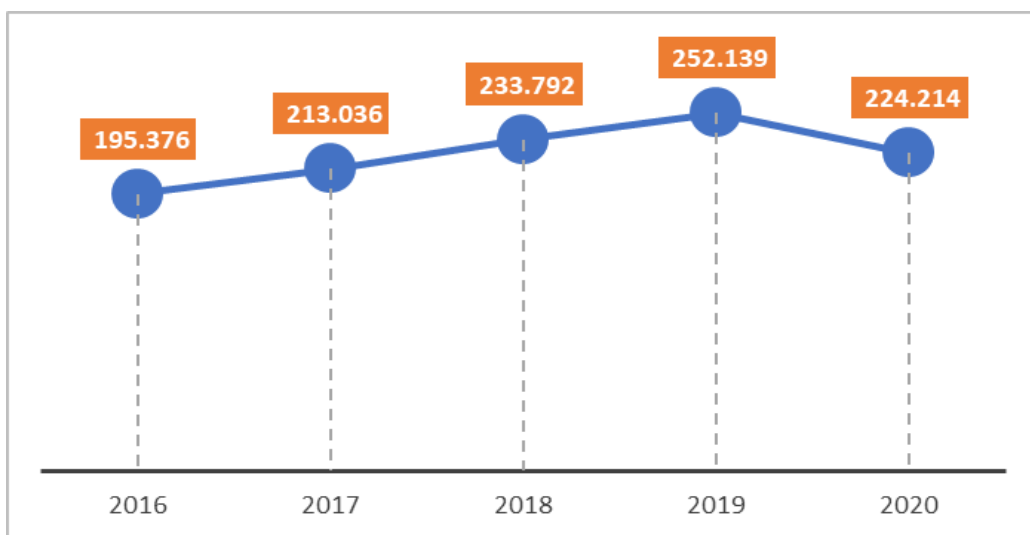
Kondisi perekonomian Provinsi Bali berfluktuasi selama tahun 2016-2019 namun tetap berada diatas rata-rata Nasional. Pada tahun 2019 pertumbuhan Ekonomi Bali yang sebesar 5,63% tetap lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,02%. Terjadinya Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan Ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar 9,33% paling dalam diantara provinsi lain di Indonesia. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di berbagai negara menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi Bali yang sebagian besar bersumber dari sektor pariwisata.



**Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

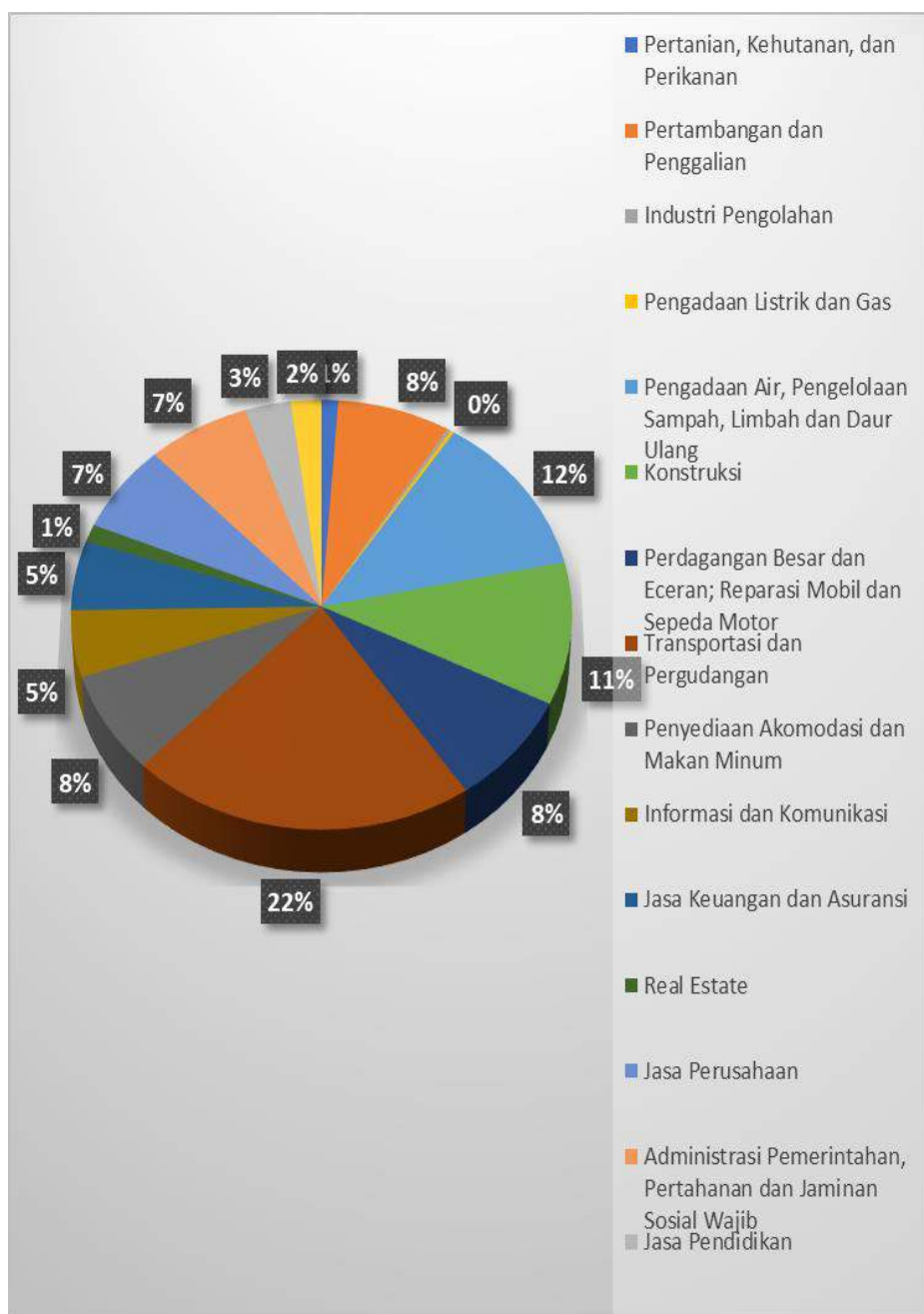
Kinerja ekonomi Bali selama periode tahun 2016-2020 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang dihasilkan pada masing-masing lapangan usaha/sektor ekonomi. Pada tahun 2016, total nilai tambah yang tercipta (PDRB atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai 195,376 triliun rupiah. Nilai tambah yang tercipta di Bali termasuk dalam kategori cukup besar untuk ukuran provinsi kecil yang tidak memiliki sumberdaya alam dan migas.



**Gambar 2.9 Nilai PDRB ADHB (dalam ribu) Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

Struktur perekonomian Provinsi Bali masih ditunjang oleh sektor tersier (pariwisata). Hal tersebut terlihat dari kategori yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu kategori penyediaan akomodasi makan dan minum. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi makan dan minum tahun 2016-2020 berturut-turut yaitu 22,87 persen, 23,49 persen, 23,33 persen, 23,26 persen, dan 18,37 persen. Segmentasi wilayah sektor tersier ini berada di wilayah Bali bagian selatan atau biasa disebut “Sarbagita” (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), karena di wilayah tersebut terkonsentrasi aktivitas ekonomi pendukung pariwisata, seperti: hotel, villa, agen dan biro perjalanan wisata, restoran, rumah makan, cafe, dan lain sebagainya.



**Gambar 2.10 Kontribusi PDRB ADHB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021



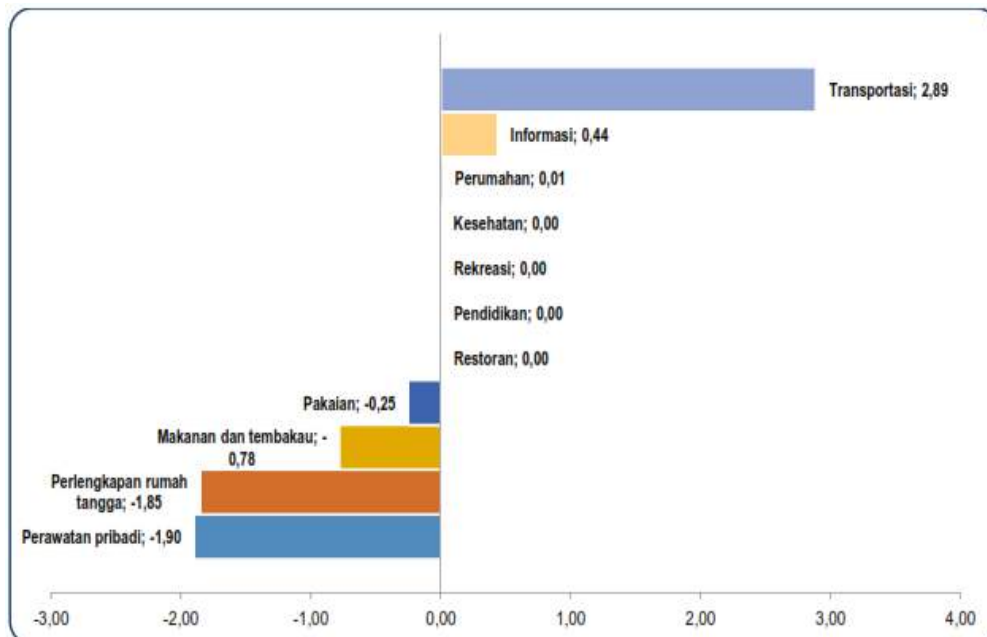
### 2.2.2 Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bali (Kota Denpasar) mengalami penurunan selama 2018-2020. Laju inflasi Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 3,4 persen mengalami penurunan menjadi 2,37 persen pada tahun 2019 begitu juga pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,55 persen. Pada Bulan Mei 2020 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi sedalam 0,55 persen yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga konsumen dari 104,42 persen pada April 2020 menjadi 104,32 persen pada Mei 2020. Dari sebelas kelompok pengeluaran, empat kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) sedalam -1,90 persen; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam -1,85 persen; kelompok I (makan, minum dan tembakau) sedalam -0,78 persen; dan kelompok II (pakain dan alas kaki) sedalam -0,25 persen. Sementara itu, tiga kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok VI (transportasi) setinggi 2,89 persen; kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,44 persen; dan kelompok III (perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya) setinggi 0,01 persen. Empat kelompok pengeluaran tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok V (kesehatan); kelompok VIII (rekreasi, olah raga dan budaya); kelompok IX (pendidikan); dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran).



**Gambar 2.11 Laju Inflasi Provinsi Bali Tahun 2018-2020 (%)**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

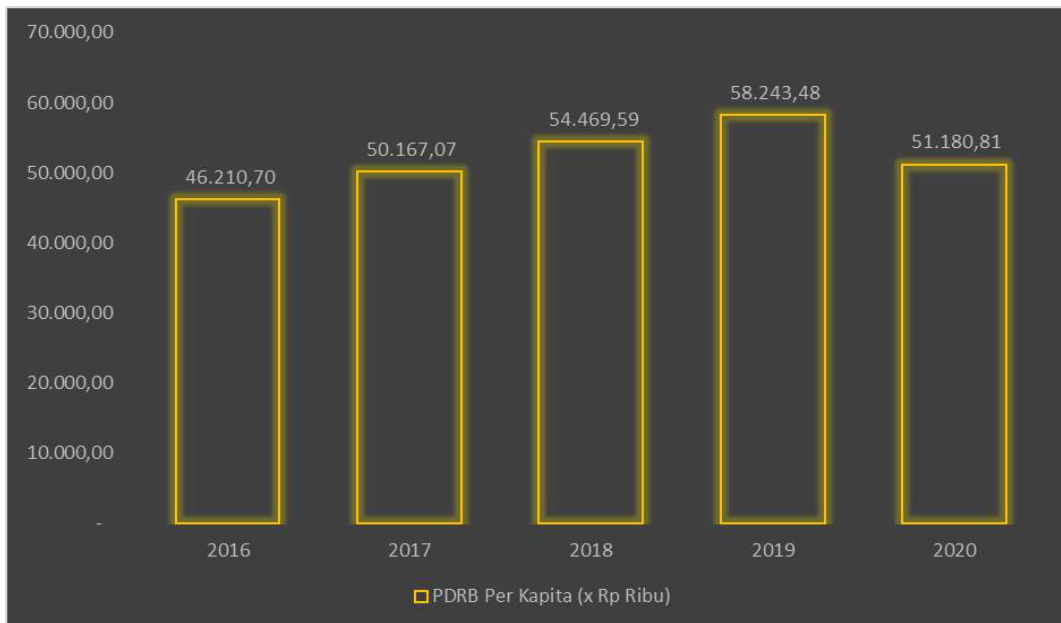


**Gambar 2.12 Laju Inflasi Provinsi Bali Menurut Komoditas**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.2.3 PDRB per Kapita Provinsi Bali

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun. Dalam konteks Bali, selama periode 2016 sampai 2020 PDRB per kapita terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 PDRB per kapita di Bali adalah sebesar 46,21 juta rupiah terus meningkat menjadi 50,17 juta rupiah pada tahun 2017 dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 58,24 juta rupiah. Realisasi PDRB per kapita tersebut telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.



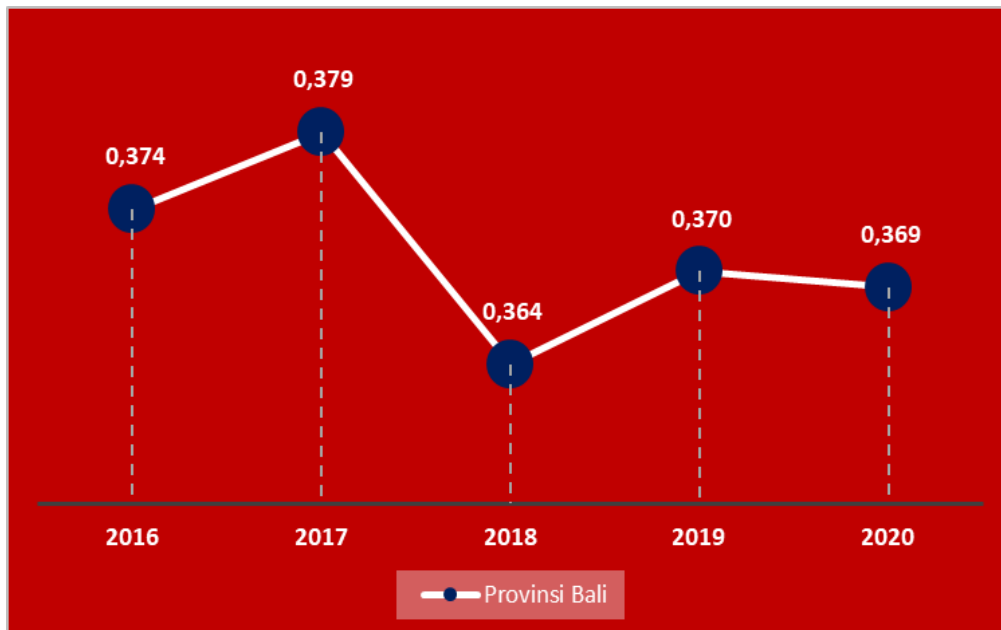
**Gambar 2.13 PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

#### **2.2.4 Ketimpangan Pendapatan**

Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan, umumnya digunakan Indeks Gini atau Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Kedua indikator tersebut, menghitung berapa persen bagian dari total pendapatan penduduk suatu wilayah yang diterima oleh penduduk pada masing-masing golongan pendapatan.

Gini rasio Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS yang rilis pada Bulan Maret Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2016 adalah sebesar 0,366 meningkat menjadi 0,369 pada tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa selama kurun waktu tersebut ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan. Meskipun demikian angka tersebut masih lebih baik dari indeks gini Indonesia yang mencapai 0,385. Namun jika mengacu pada data BPS yang rilis pada Bulan September sedikit terjadi perubahan dimana pada tahun 2016 besarnya gini rasio di Bali adalah sebesar 0,374 selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,369. Artinya tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesenjangan masyarakat Provinsi Bali selama kurun waktu tersebut.



**Gambar 2.14 Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2.15 Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

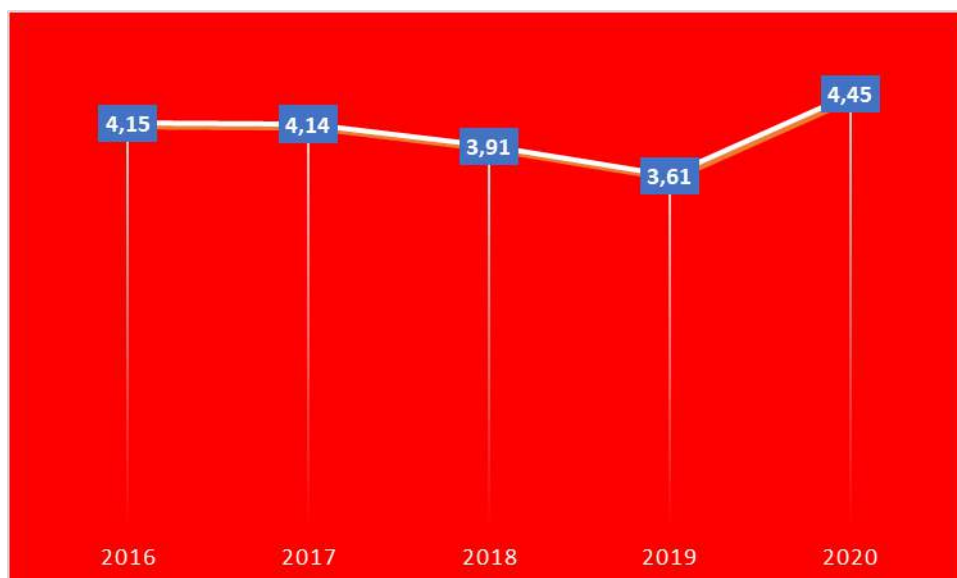
### 2.2.5 Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan papan. Semakin tinggi angka kemiskinan menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat disuatu daerah/negara yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sebaliknya semakin rendah angka kemiskinan menunjukkan semakin kecil

jumlah masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Angka kemiskinan di Provinsi Bali menunjukkan trend yang cukup baik yaitu cenderung mengalami penurunan yang artinya jumlah masyarakat miskin (mampu memenuhi kebutuhan dasar) setiap tahunnya semakin kecil.

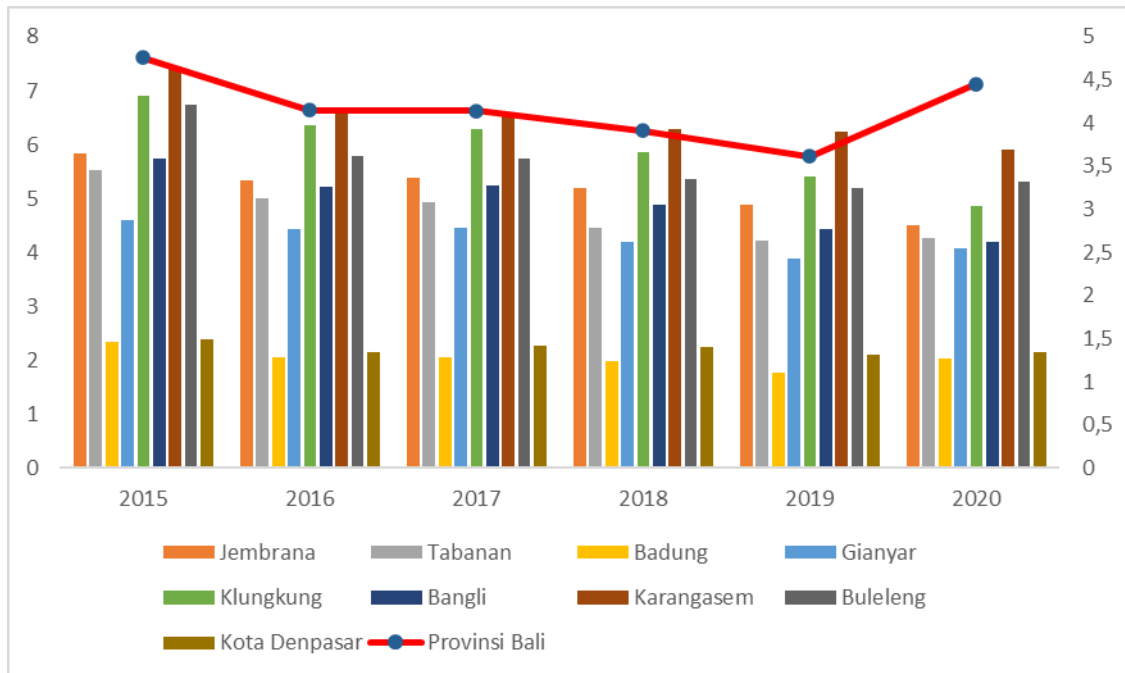
Gambar 2.16 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 angka kemiskinan di Bali adalah sebesar 4,15% yang berarti ada sebanyak 4,15% dari total populasi di Bali masih berada pada garis kemiskinan. Angka ini beranjak turun dari tahun-tahun sebelumnya sampai pada angka 3,61% pada tahun 2019. Dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian Bali berimbas pada naiknya penduduk miskin pada tahun 2020, dimana angka kemiskinan Bali meningkat menjadi 4,45%. Jumlah penduduk miskin di Bali pada tahun 2020 tercatat sekitar 196,92 ribu orang, bertambah 40,01 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 yang tercatat sekitar 156,91 ribu orang.

Pada level kabupaten/kota Gambar 2.17, Kabupaten Badung menempati posisi pertama dengan angka kemiskinan terendah yaitu 2,02% pada tahun 2020. Angka ini sudah melewati target nasional dan melewati pencapaian level provinsi. Kota Denpasar menduduki peringkat kedua dengan angka kemiskinan mencapai 2,14% pada tahun 2020, sedangkan Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2020 adalah Kabupaten Karangasem yaitu 5,91%.



**Gambar 2.16 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

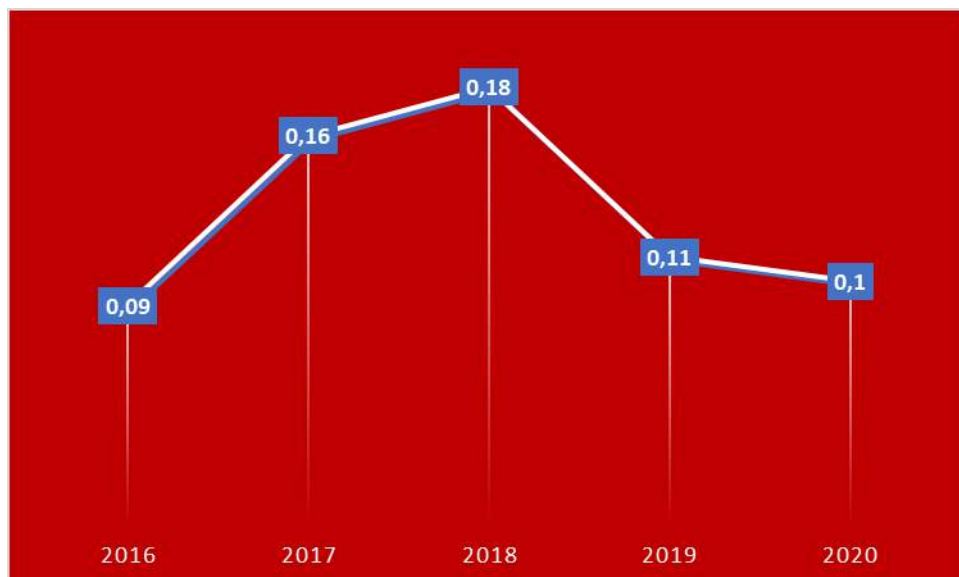
Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2.17 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

Rasio kesenjangan kemiskinan mengalami fluktuasi pada periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Namun demikian secara keseluruhan terjadi penurunan rasio kesenjangan selama lima tahun yaitu dari 0,14 pada tahun 2015 menjadi 0,1 pada tahun 2020.



**Gambar 2.18 Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

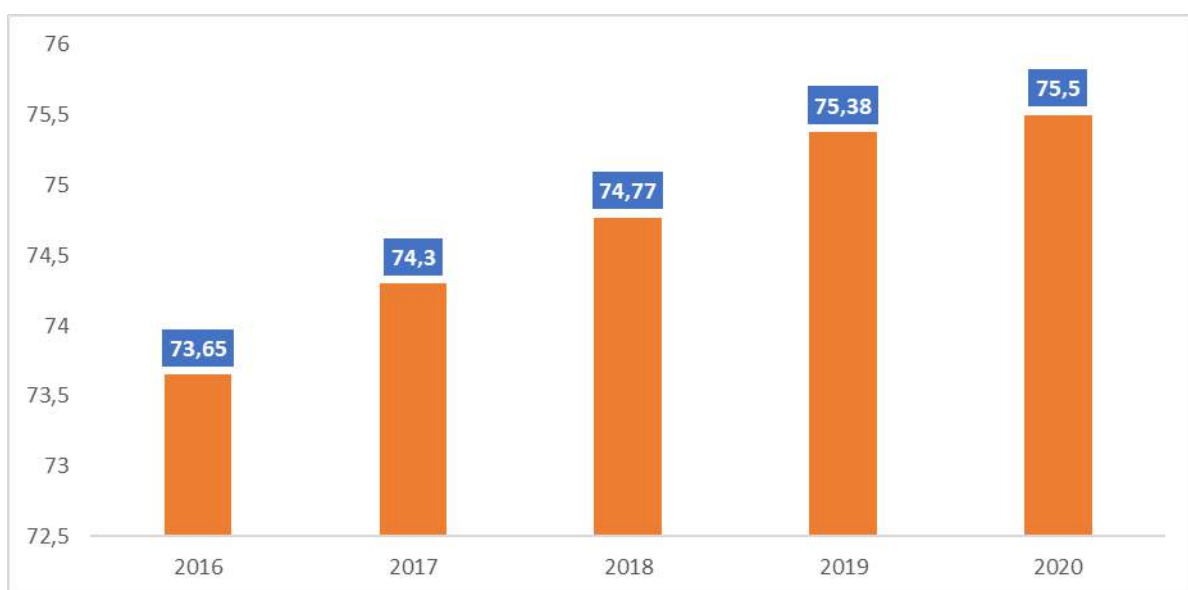
Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan terhadap angka harapan

hidup, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan dan standar hidup masyarakat suatu daerah/negara. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah/negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Selain itu IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakat.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu 1) umur panjang dan hidup sehat; 2) pengetahuan; dan 3) standar hidup layak. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali yang berhasil dihimpun, kecenderungan angka IPM di Provinsi Bali selama kurun waktu 2015-2020 terus mengalami peningkatan. Realisasi IPM Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 73,27 dan terus meningkat menjadi 74,3 pada tahun 2017. Angka IPM tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Namun demikian target IPM di Provinsi Bali baru bisa dipenuhi pada tahun 2018 dengan angka IPM sebesar 74,77 dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan angka IPM sebesar 75,5. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,94. Dengan demikian secara rata-rata penduduk di Provinsi Bali sudah mendapatkan akses pendidikan yang baik, akses kesehatan yang baik termasuk juga mendapatkan kesejahteraan melalui akses pekerjaan yang baik.



**Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2016-2020**

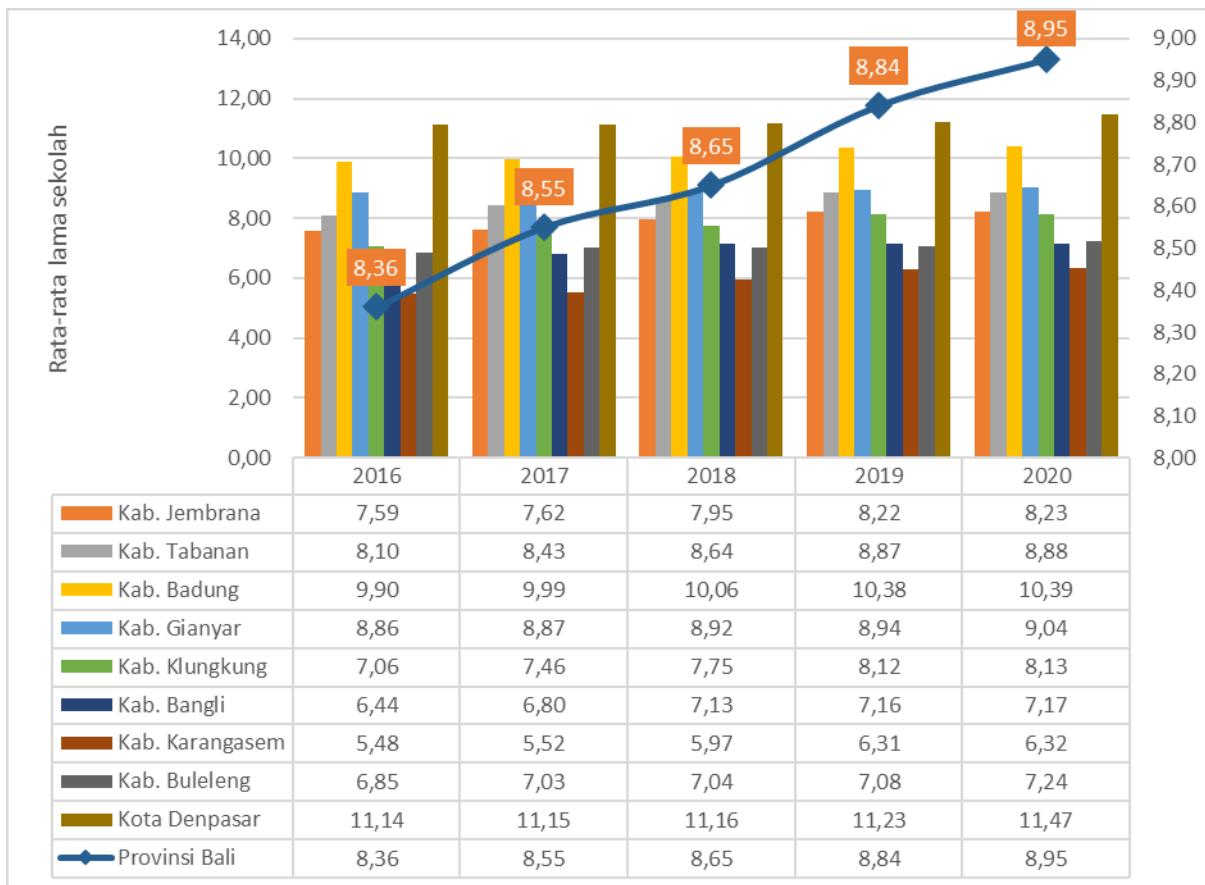
No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	IPM	73,65	74,3	74,77	75,38	75,5
2	Pengeluaran	13279	13573	13886	14146	13929
3	AHH	71,41	71,46	71,68	71,99	72,13
4	HLS	13,04	13,21	13,23	13,27	13,33
5	RLS	8,36	8,55	8,65	8,84	8,95

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.2.7 Rata - Rata Lama Sekolah

Selama kurun waktu 2016-2019 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, rata-rata lama sekolah yaitu 8,4 dan meningkat menjadi 8,8 pada tahun 2019. Selama kurun waktu 2016-2019, rata-rata lama sekolah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kota Denpasar memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar tahun 2016 yaitu 11,1 dan meningkat menjadi 11,2 pada tahun 2019. Kabupaten Karangasem adalah kabupaten dengan rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Bali yaitu 6,9 pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,3 pada tahun 2019.





**Gambar 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

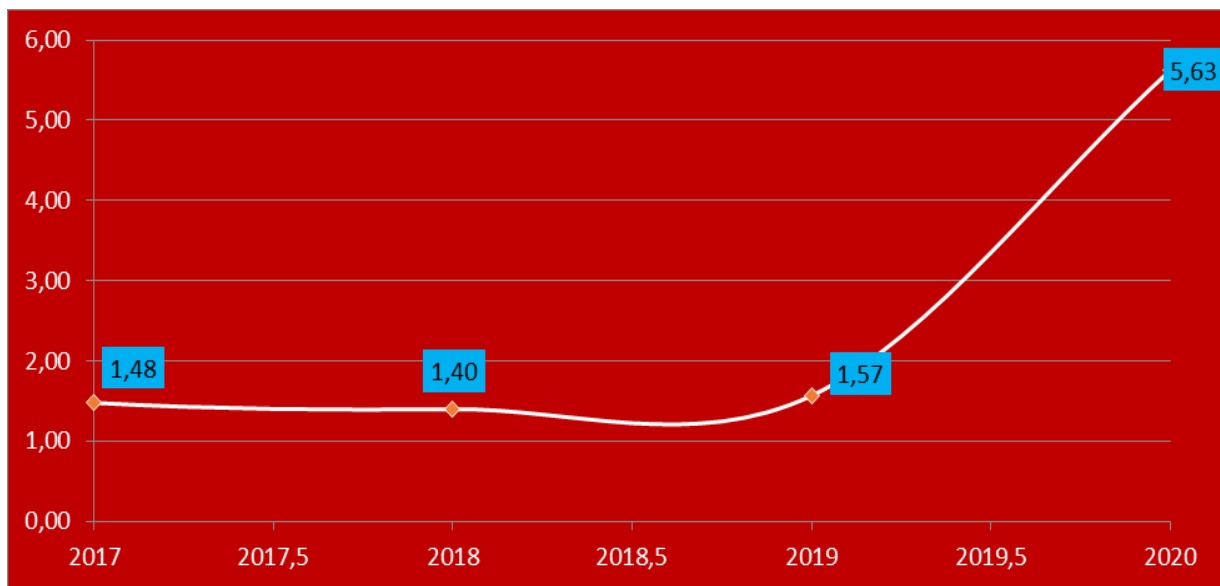
Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

### 2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan demikian TPT dapat dibedakan menjadi 1) penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; 2) penduduk yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; 3) penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan 4) penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT ini menunjukkan kemampuan sebuah negara/daerah dalam menyiapkan kesempatan kerja pada penduduk yang siap bekerja. Semakin rendah nilai TPT maka semakin kuat struktur ekonomi sebuah daerah/negara, sebaliknya semakin tinggi TPT maka semakin siap pemerintah menyediakan ruang kerja bagi penduduk dalam usia angkatan kerja.

Angka TPT di Provinsi Bali periode tahun 2016 - 2020 selalu berada di bawah rata-rata nasional. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap industri di Provinsi Bali mengakibatkan capaian TPT Provinsi Bali tahun 2019 sebesar 1,57 persen. Akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perusahaan-perusahaan/industri

utamanya yang bergerak pada sektor akomodasi dan makan minum, transportasi, serta jasa perusahaan banyak yang memberhentikan/merumahkan tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan angka TPT yang sangat signifikan mencapai 5,63 persen.



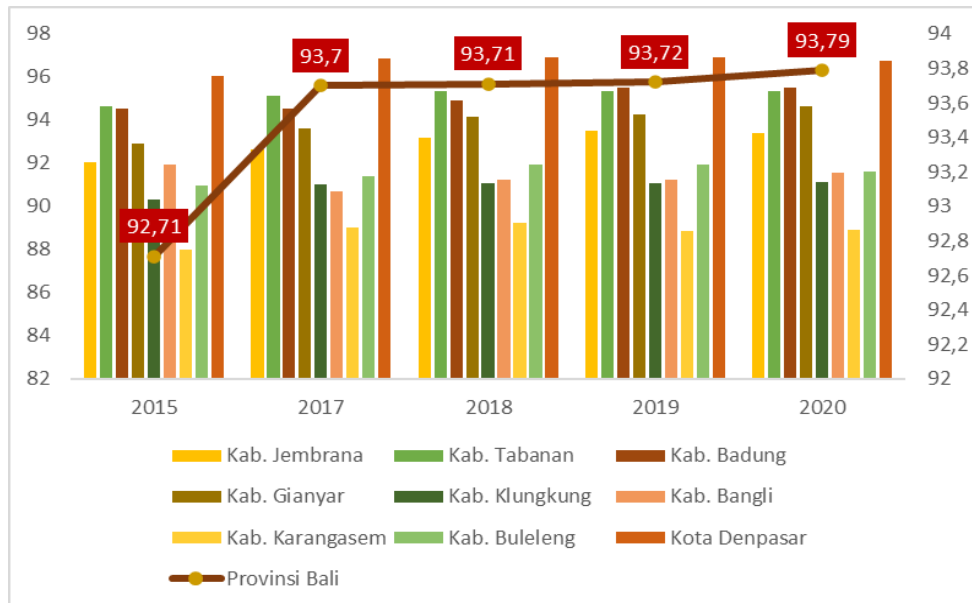
**Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

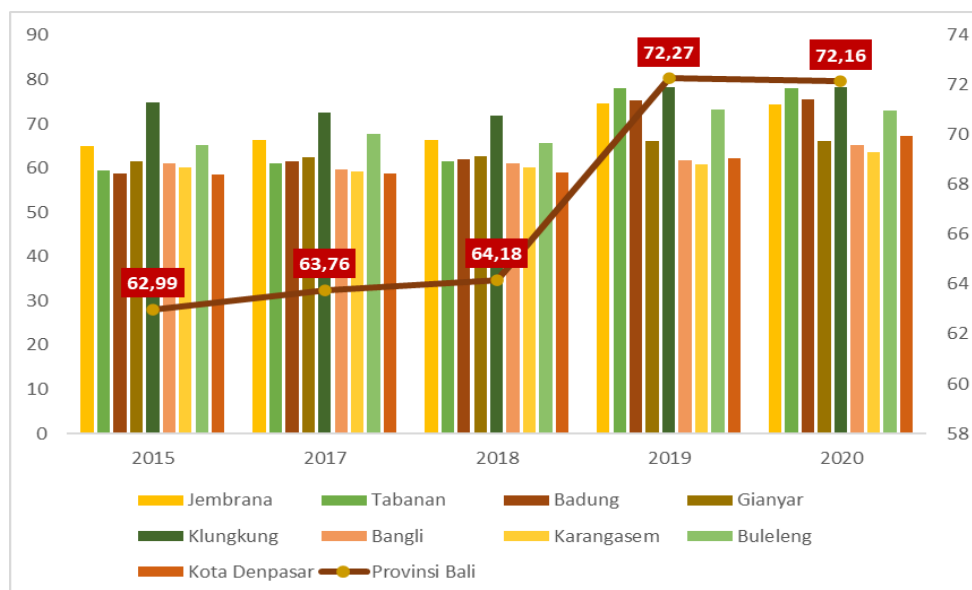
Indeks Pembangunan Perempuan (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Gambar 2.22 menunjukkan bahwa indeks pemberdayaan gender di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu dari 62,99 persen menjadi 72,16 persen. Ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan baik itu pada bidang politik dan ekonomi semakin baik dari tahun ke tahunnya.



**Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Peremuan (IPG) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2.23 Indeks Pemberdayaan Peremuan (IDG) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Layanan Urusan Wajib

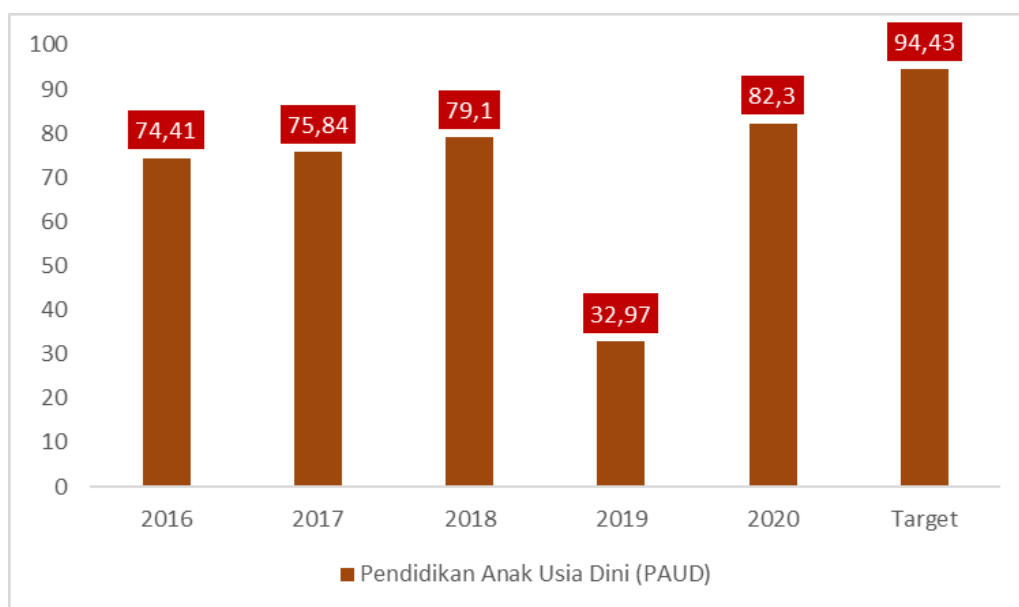
#### 2.3.1.1 Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Keberhasilan program pembangunan pada bidang pendidikan dapat diukur dari capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan

Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut adalah gambaran kondisi pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perkembangan pendidikan anak usia dini terus mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Target yang ditetapkan pemerintah Provinsi Bali adalah 94,43 persen namun sampai dengan akhir periode 2020 capaiannya masih 82,3 persen. Keikutsertaan anak dalam PAUD diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menyiapkan peserta didik yang lebih baik pada jenjang selanjutnya. Sehingga perlu ada peningkatan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah.



**Gambar 2.24 Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

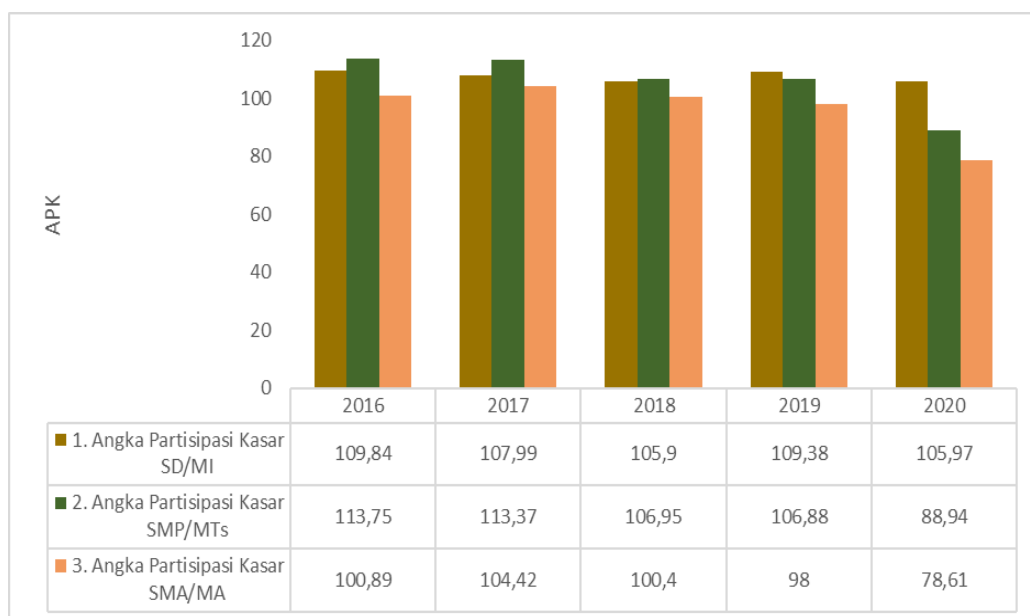
### 2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali bisa dilihat pada jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C.

Berdasarkan hasil evaluasi pada angka partisipasi kasar di tiap jenjang pendidikan tersebut, belum satupun yang memenuhi target pemerintah yaitu secara berturut-turut sebesar 112 untuk jenjang SD/MI/Paket A, 110 untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, dan 95 untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pendidikan masih belum optimal dilihat dari potensi peserta didik yang seharusnya bisa mengikuti jenjang pendidikan tersebut. Selain itu angka ini juga cukup bervariasi antar kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi peserta didik masih belum merata antar wilayah.

Penurunan angka partisipasi kasar di tingkat SMP dan SMA pada tahun 2020 disebabkan karena kurangnya fasilitas pendidikan sesuai usia sekolah.



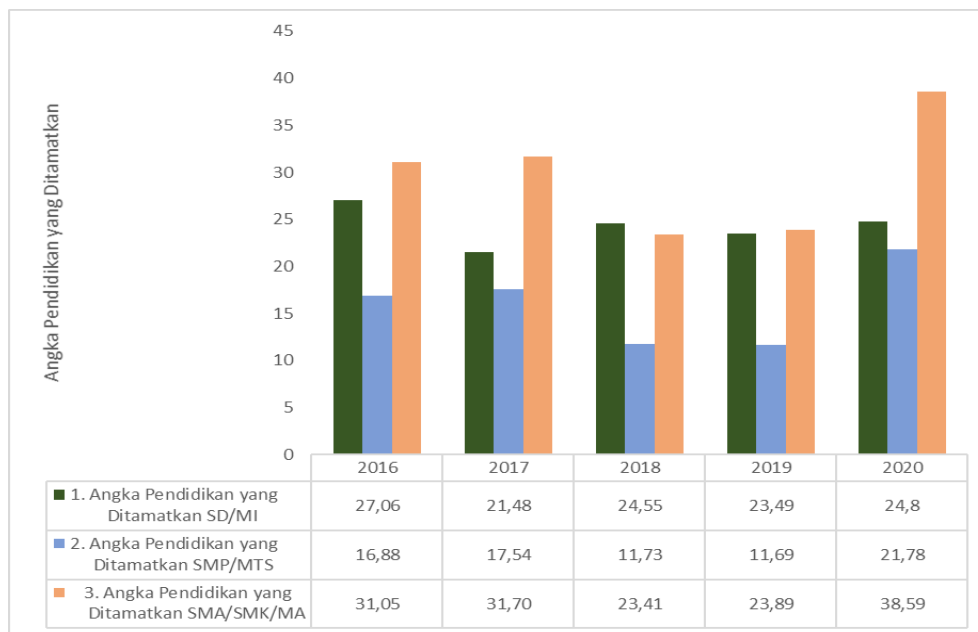
**Gambar 2.25 Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

### 3. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan menunjukkan seberapa besar jenjang pendidikan yang bisa diselesaikan oleh peserta didik di Provinsi Bali. Angka ini menunjukkan besarnya potensi kualitas SDM yang nantinya masuk ke angkatan kerja di Provinsi Bali. Semakin tinggi angka pendidikan yang ditamatkan maka diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja yang tentunya bisa semakin menggerakkan ekonomi di Bali. Sampai dengan tahun 2020, angka pendidikan yang ditamatkan pada setiap jenjang belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu 27,55 untuk SD/MI dimana capaian saat ini adalah 24,8. Selanjutnya untuk jenjang SMP/MTS

yaitu sebesar dimana capaian saat ini adalah 21,78 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA adalah sebesar 38,59 dimana capaian saat ini adalah sebesar 23,89. Capain tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan stake holder terkait harus semakin meningkatkan upaya peningkatan pendidikan yang bisa diselesaikan pada setiap jenjang.



**Gambar 2.26 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan**

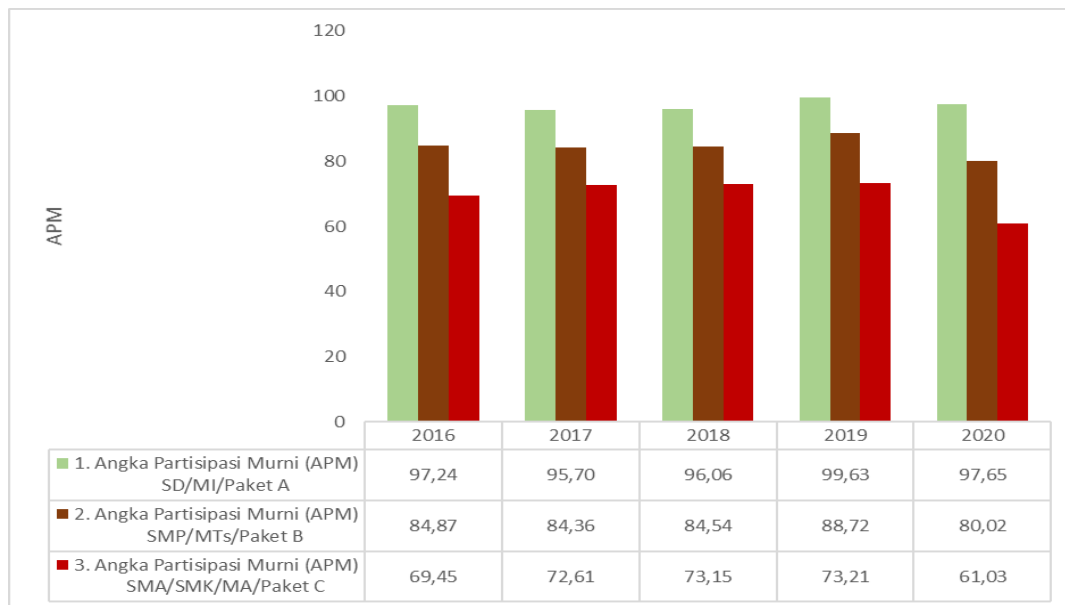
Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

#### 4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI/Paket A yaitu 97,65 sedangkan untuk tingkat SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 80,02 dan untuk tingkat SMA/SMK/MA/Paket C adalah sebesar 61,03. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa capaian

partisipasi masyarakat untuk masing-masing jenjang pendidikan sudah cukup baik namun masih belum mencapai target untuk jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait harus menodorong semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada setiap jenjang pendidikan untuk menjamin peningkatan kualitas SDM usia kerja di Provinsi Bali.

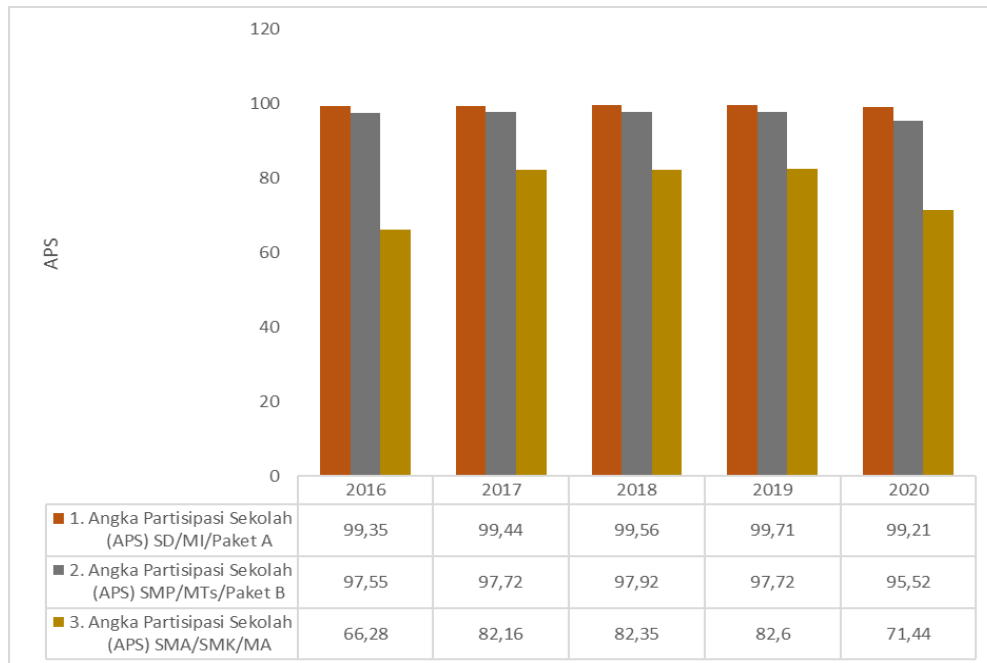


**Gambar 2.27 Angka Partisipasi Murni Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

## 5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Provinsi Bali berfluktuasi selama kurun waktu 2016-2020. Namun demikian pada tahun 2020 capain APS untuk masing-masing jenjang pendidikan tersebut secara berturut-turut adalah 99,21 persen; 95,52 persen; dan 71,44 persen. Secara keseluruhan angka-angka tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga selanjutnya perlu dorongan program untuk mempertahankan tingkat capain yang sudah ada saat ini.

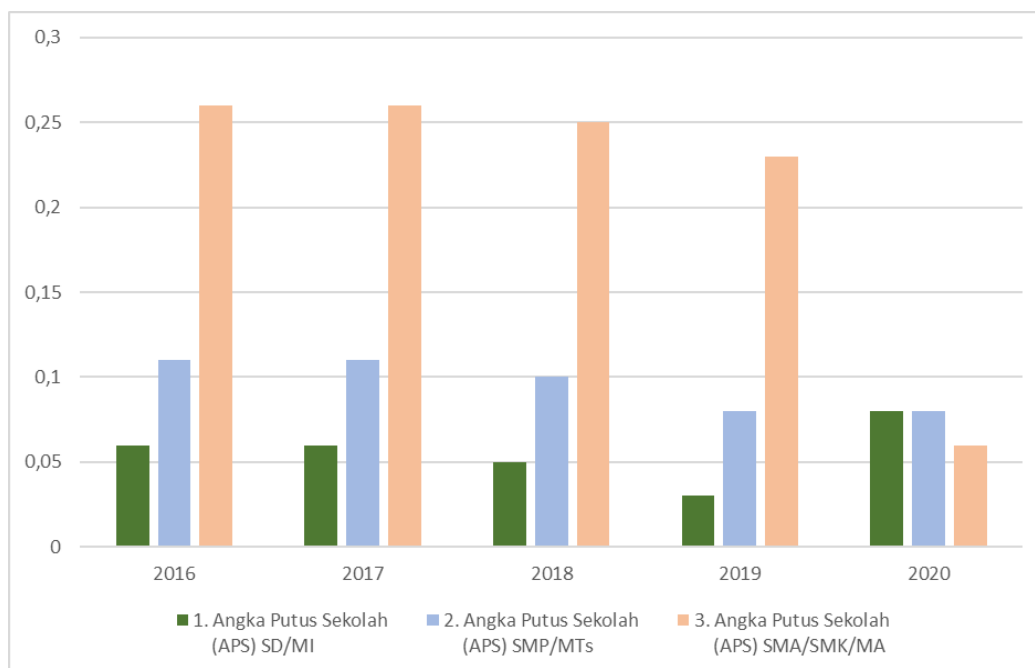


**Gambar 2.28 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

## 6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan banyaknya peserta didik yang tidak menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang dijalani. Pada tahun 2020 angka putus sekolah di Provinsi Bali secara berturut-turut untuk jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA adalah 0,08 persen; 0,08 persen; dan 0,06 persen. Angka ini menunjukkan pencapaian yang sudah baik karena sudah mampu mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.



**Gambar 2.29 Angka Putus Sekolah di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021



## 7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan baik pada tingkat SD/M, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA selama periode 2016-2020 sudah sangat baik yaitu hampir mencapai 100 persen secara keseluruhan. Dengan demikian ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah melalui berbagai program yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan stake holder terkait.

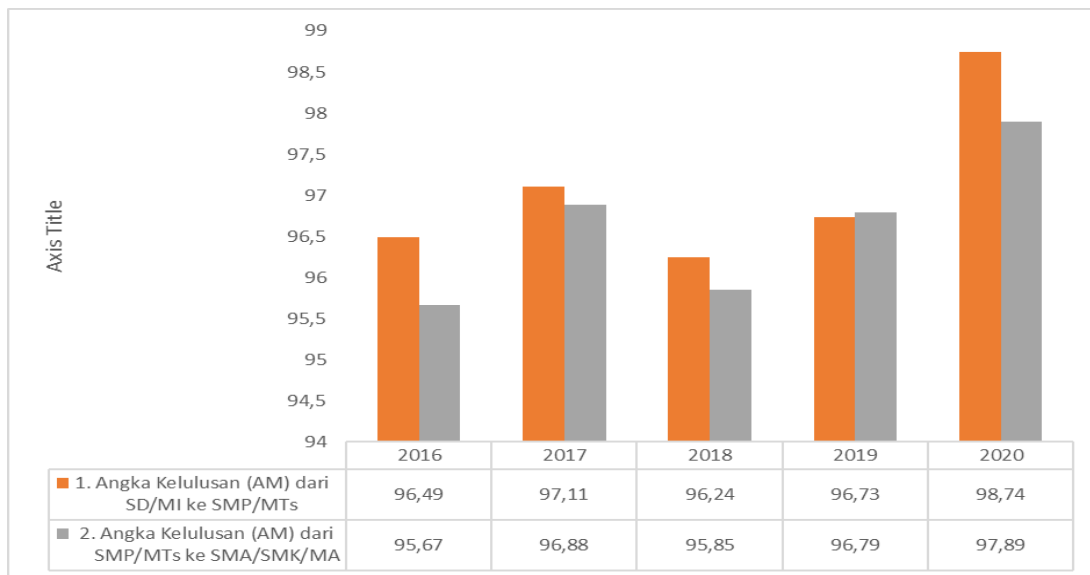


**Gambar 2.30 Angka Kelulusan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

## 8. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah di Provinsi Bali cukup baik sebagaimana ditunjukkan oleh grafik dibawah. Rata-rata angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS tahun 2020 adalah 96,73% sudah melampaui target pemerintah sebesar 80 persen. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA adalah sebesar 97,98 persen juga masih di atas target yaitu 70 persen. Ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di Provinsi Bali masih tinggi dan hal ini bisa menjadi keuntungan bagi kualitas SDM kependudukan usia produktif.

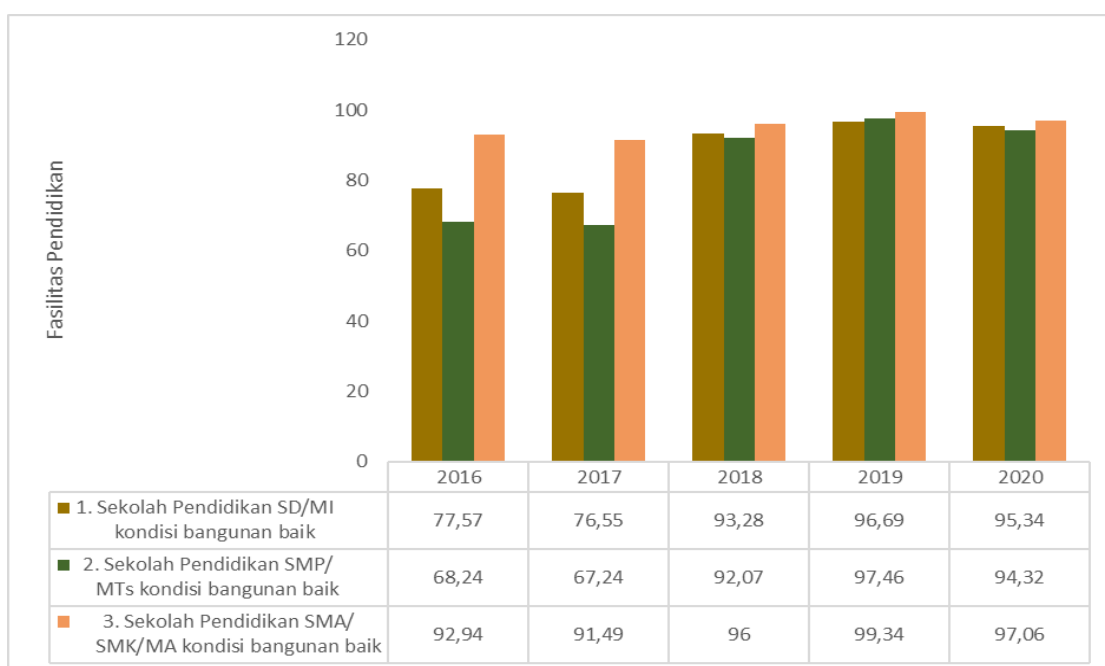


**Gambar 2.31 Angka Melanjutkan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

## 9. Fasilitas Pendidikan

Secara umum fasilitas pendidikan di Provinsi Bali baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA sudah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah yaitu secara berturut-turut adalah sebesar 90,23 persen, 92,07 persen, dan 81,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memenuhi kebutuhan dasar fasilitas yang diperlukan oleh peserta didik pada setiap jenjang di Provinsi Bali. Ketersediaan fasilitas pendidikan menjadi modal penting agar peserta didik di Provinsi Bali bisa meningkatkan kualitas SDMnya melalui pendidikan yang baik.

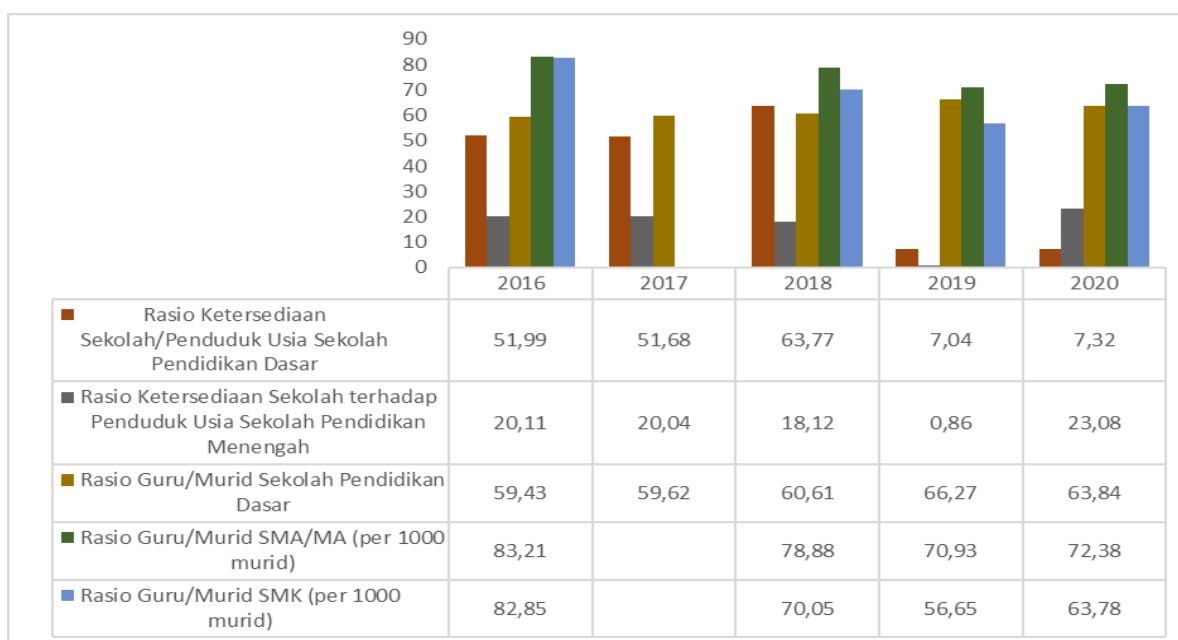


**Gambar 2.32 Fasilitas Pendidikan (Kondisi Ruang Kelas Baik) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

## 10. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Rasio Jumlah Guru

Rasio ketersediaan sekolah dan rasio jumlah guru terhadap murid ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Secara umum rasio ketersediaan sekolah dasar dan sekolah pendidikan menengah sudah mencapai target pemerintah yaitu sebesar 62,8 persen untuk SD/MI per 10.000 penduduk usia sekolah SD/MI dan 60 untuk SMP/MTs per 10.000 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Dengan demikian program pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan menurut jenjang pendidikan sudah mampu mengakomodasi kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Rasio ketersediaan guru baik untuk murid SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA selama kurun waktu 2016 sampai 2020 mengalami trend peningkatan yang baik namun belum mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah terutama untuk rasio guru terhadap murid SMA dan SMK. Ini mengindikasikan bahwa saat ini kebutuhan guru untuk peserta didik pada jenjang SMA dan SMK masih perlu ditingkatkan agar pelayanan terhadap peserta didik bisa dilakukan secara lebih optimal.



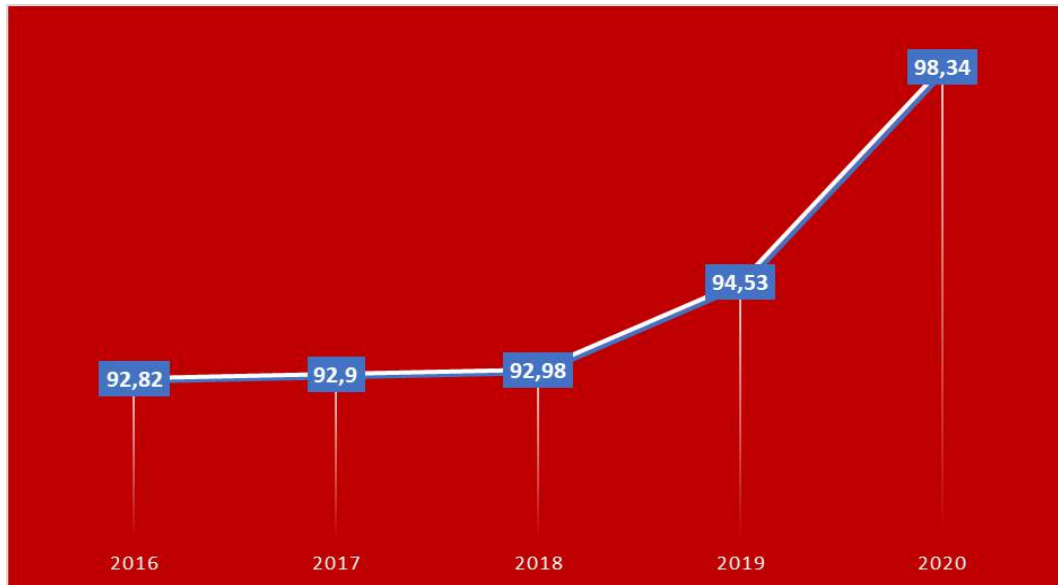
**Gambar 2.33 Rasio Ketersediaan Sekolah per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Jumlah Ketersediaan Guru Terhadap Jumlah Murid Per 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

## 11. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis di suatu wilayah. Angka melek huruf menjadi salah satu dasar dalam pertimbangan pengembangan suatu daerah karena akan berpengaruh terhadap kualitas SDM di usia produktif/angkatan kerja. Angka

melek huruf di Provinsi Bali cenderung meningkat pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Berdasarkan perbandingan terhadap target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka capaian saat ini sudah terpenuhi dan perlu dipertahankan dengan berbagai program terkait dari Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait.

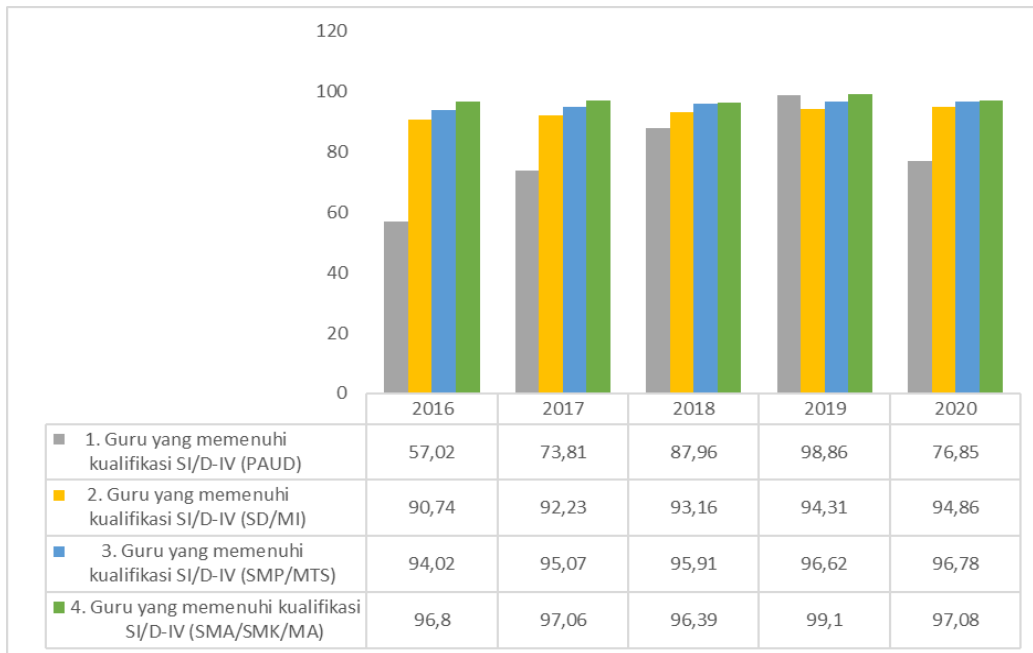


**Gambar 2.34 Angka Melek Huruf di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

## **12. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Kualifikasi guru dengan pendidikan S1/DIV pada tahun 2020 pada setiap jenjang pendidikan belum semuanya memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 87,96 untuk guru /PAUD, 93,16 untuk guru pada sekolah dasar, 95,91 untuk guru pada sekolah menengah pertama dan 95 untuk guru pada sekolah menengah atas. Kualifikasi guru pada jenjang pendidikan PAUD saat ini baru mencapai 76,85 masih dibawah target pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar 87,96. Ini menunjukkan bahwa guru pada jenjang pendidikan tersebut masih bisa ditingkatkan kualifikasi pendidikannya untuk meningkatkan kemampuan dalam mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan PAUD.



**Gambar 2.35 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021

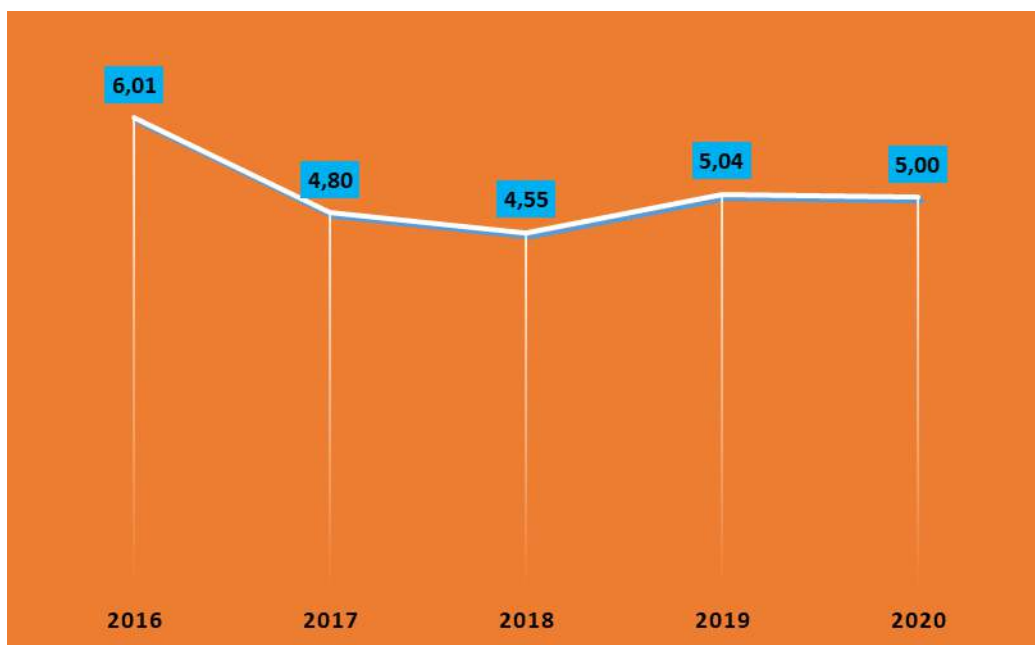
### 2.3.1.2 Kesehatan

Pemerintah Provinsi Bali mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Provinsi Bali dengan meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan. Urusan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Keberhasilan program pembangunan pada bidang kesehatan dapat diukur dari capaian berbagai indikator kesehatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut.

#### 1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu 6,01/1000 kelahiran hidup; 4,80/1000 kelahiran hidup ; 4,55/1000 kelahiran hidup; 5,04/1000 kelahiran hidup; dan 5,00/1000 kelahiran hidup. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi angka kematian bayi di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program terkait penurunan AKB di Bali belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini perlu didorong agar tingkat AKB bisa lebih baik lagi.



**Gambar 2.36 Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## **2. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

AKBa di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 4,22/1000 anak; 3,19 /1000 anak; 3,20 /1000 anak; 3,5 /1000 anak; dan 3,5 /1000 anak. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi trend penurunan angka kematian Balita di Provinsi Bali. Jumlah kematian balita tertinggi pada tahun 2017 yaitu ada di Kabupaten Gianyar

sebesar 74/1000 anak. Sedangkan, jumlah kematian balita terendah ada di Kota Denpasar yaitu 15/1000 anak. Penurunan AKBa ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas lingkungan, kualitas kesehatan, kualitas asupan dan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa menurunkan potensi kematian bayi.



**Gambar 2.37 Angka Kematian Balita per 1000 KH di Provinsi Bali**

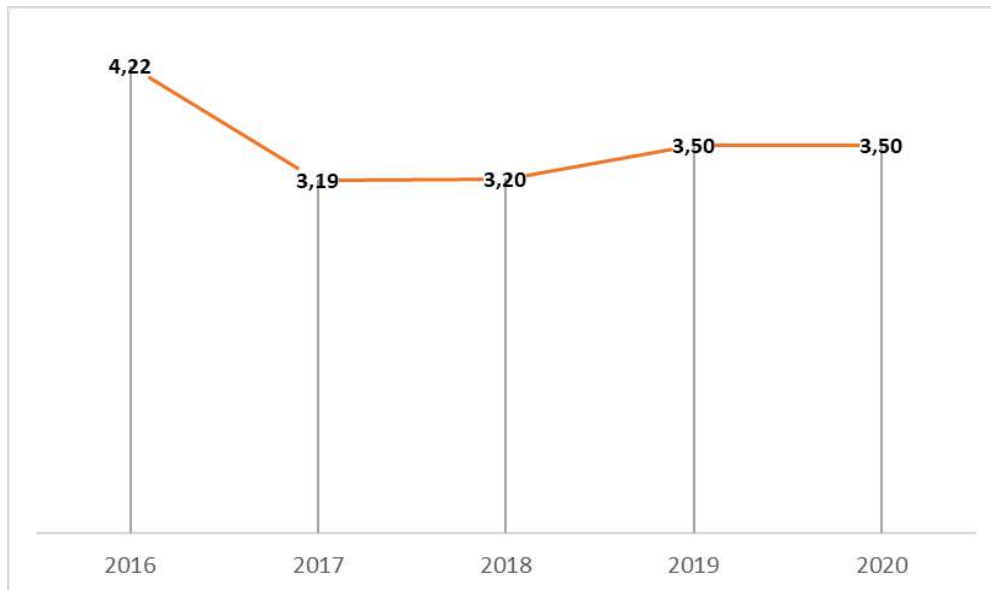
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### **3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**

Angka kematian bayi *endogen* atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor *endogen* yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Angka kematian neonatal di Provinsi Bali tahun 2016 sebesar 4,22/1000 kelahiran hidup. Angka tersebut menurun menjadi 3,19/1000 kelahiran hidup pada tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,20/1000 kelahiran hidup. Angka tersebut mengalami trend peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 3,5/1000 kelahiran hidup. Dengan demikian sudah terjadi perbaikan pelayanan kesehatan pada puskesmas atau

rumah sakit pada ibu hamil selama masa kehamilan ibu yang menyebabkan kualitas kesehatan bayi pada masa kandungan.



**Gambar 2.38 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

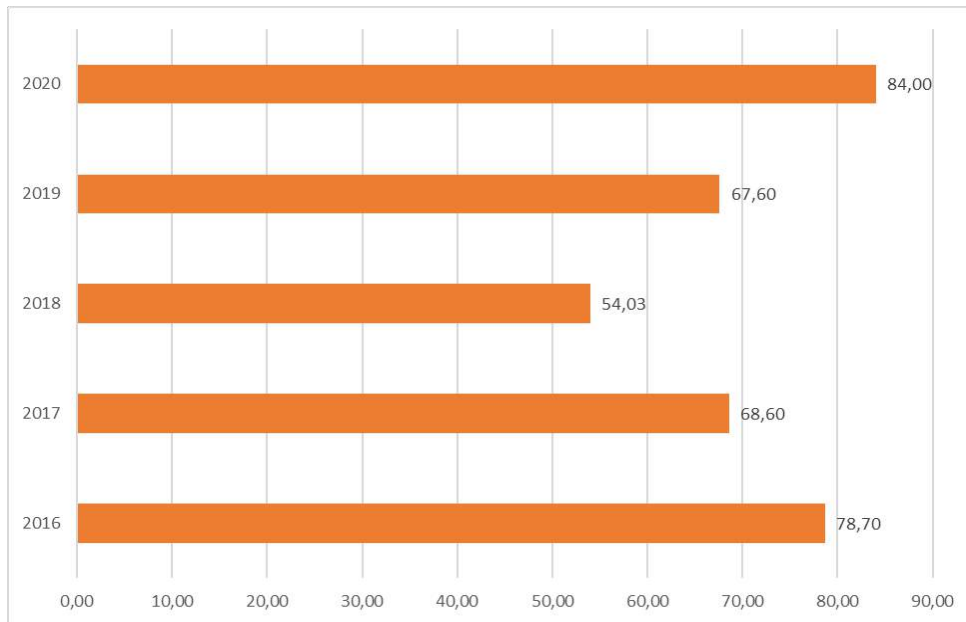
#### **4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll per 100.000 kelahiran hidup (Budi, Utomo. 1985). Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi AKI dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020, AKI di Provinsi Bali cukup fluktuatif. Pada tahun 2016 tercatat AKI mencapai 78,7/100.000 Kelahiran Hidup menurun menjadi 68,6 /100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2017 dan 54,03/100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2018. Selanjutnya meningkat secara berturut-turut pada tahun 2019



dan 2020 menjadi 67,6/100.000 Kelahiran Hidup dan 84/100.000 Kelahiran Hidup.



**Gambar 2.39 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

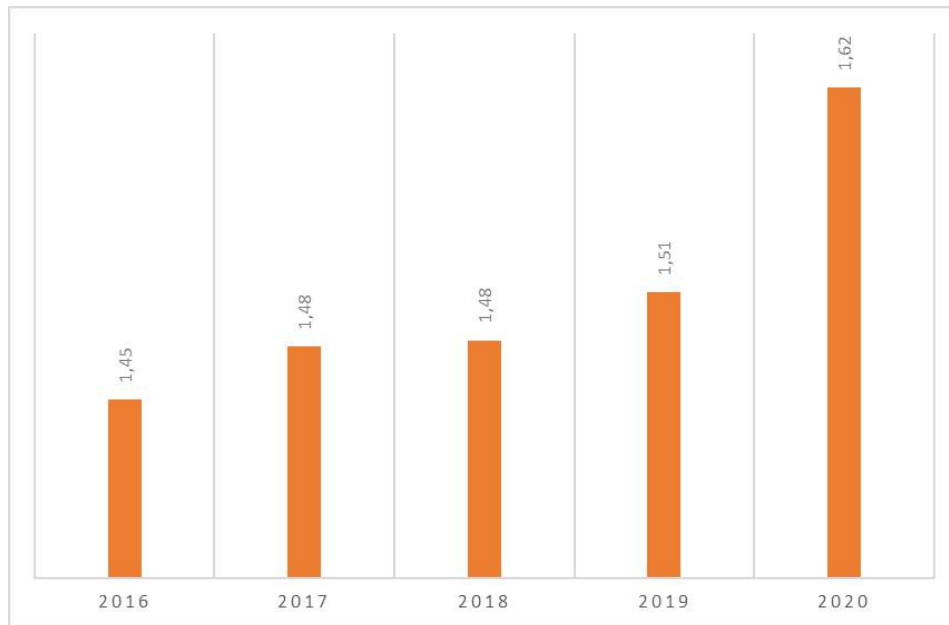
## 5. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Posyandu yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan integratif serta saling memperkuat antar program dan kegiatan untuk kelangsungan pelayanan di Posyandu sesuai dengan situasi/kebutuhan lokal yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat.

Rasio posyandu per balita di Provinsi Bali pada tahun 2016 adalah sebesar 1,45 terus mengalami peningkatan secara berturut-turut sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut 1,48 persen; 1,51 persen; dan 1,62 persen. Ini mengindikasikan bahwa pelayanan posyandu untuk balita di Provinsi Bali masih dibawah kondisi ideal yaitu 1:50 atau 2 persen. Namun demikian usaha peningkatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sudah

digalakan dengan cukup baik sehingga dari tahun ketahun (2016-2020) terjadi peningkatan rasio posyandu di Provinsi Bali.



**Gambar 2.40 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Provisni Bali**

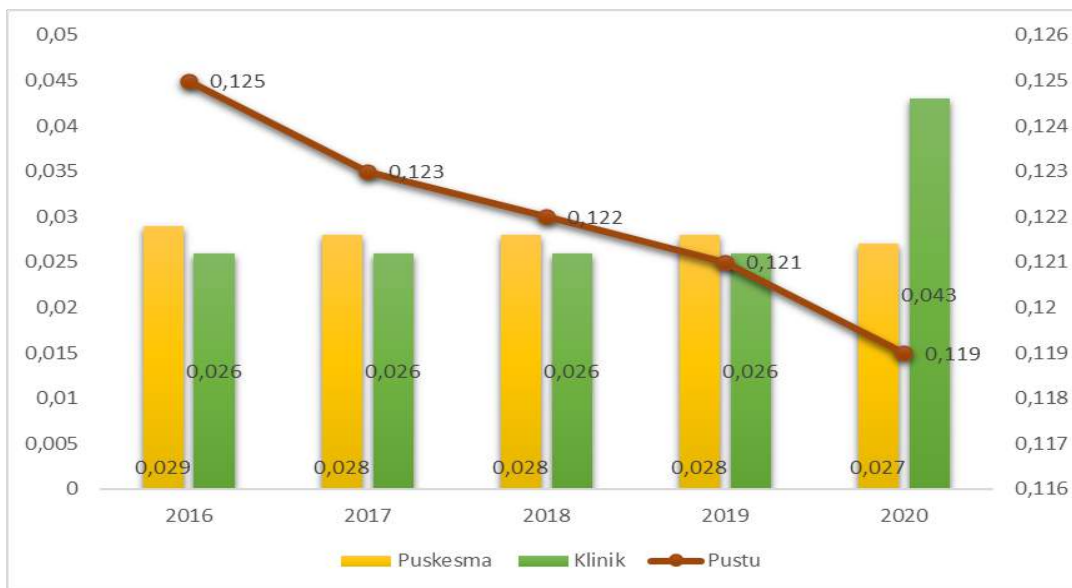
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## **6. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 Penduduk**

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan beberapa sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio puskesmas per 1000 penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2016 adalah sebesar 0,029 mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,028 dan pada tahun 2020 menjadi 0,027 sedangkan untuk klinik cenderung stabil dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu sebesar 0,026 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,043. Rasio Pustu dari tahun 2016 ke 2020 cenderung menurun yaitu dari 0,125 ke 0,119. Ini menunjukkan bahwa jumlah pelayanan untuk Pustu cenderung berkurang. Hal ini juga disebabkan oleh semakin meningkatnya jangkauan pelayanan Puskesmas di Provinsi Bali. Dengan demikian dari sisi jangkauan pelayanan, hampir semua penduduk sudah bisa dilayani oleh faskes. Harapannya ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Provinsi Bali. Kebijakan dan program peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan agar ada keseimbangan

antara jangkauan pelayanan yang sudah baik dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.



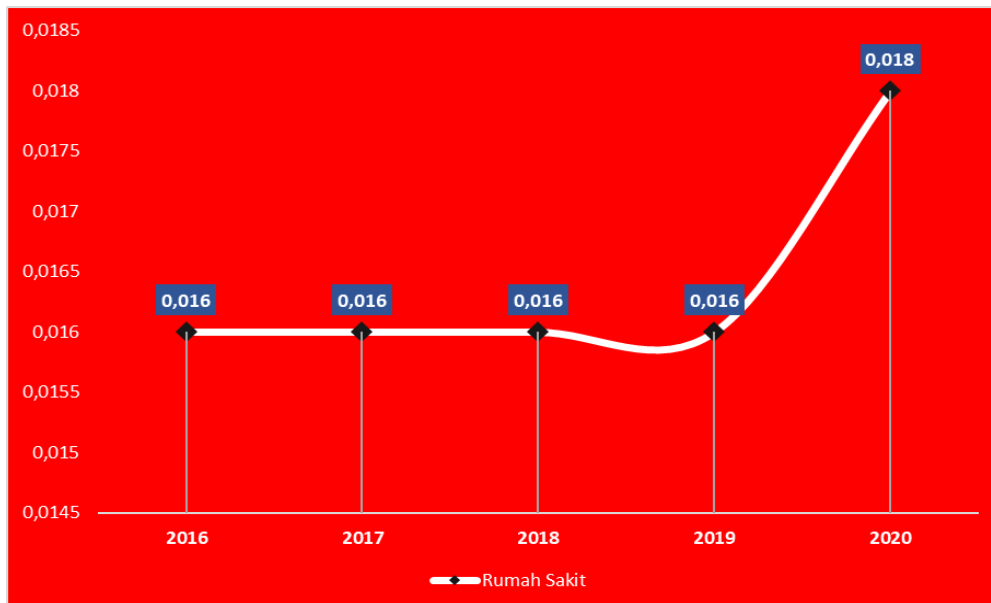
**Gambar 2.41 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Masyarakat yang tidak bisa dilayani secara optimal di Puskesmas karena jenis penyakit dan gejala penyakit yang membutuhkan observasi dan pendalaman yang lebih baik harus dirujuk ke rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit menjadi rujukan lanjutan yang harus bisa menyediakan fasilitas dan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan Puskesmas. Untuk mengetahui jangkauan terhadap layanan rumah sakit harus dihitung besarnya jangkauan fasilitas kesehatan rumah sakit terhadap jumlah penduduk.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 mengalami sedikit trend kenaikan. Pada tahun 2016 rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah sebesar 0,016 sampai dengan tahun 2019. Rasio ini sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,018 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan ada beberapa rumah sakit yang sudah selesai di bangun pada tahun 2020 sehingga tingkat keterlayanan fasilitas kesehatan yang lebih baik bisa disediakan oleh pemerintah.

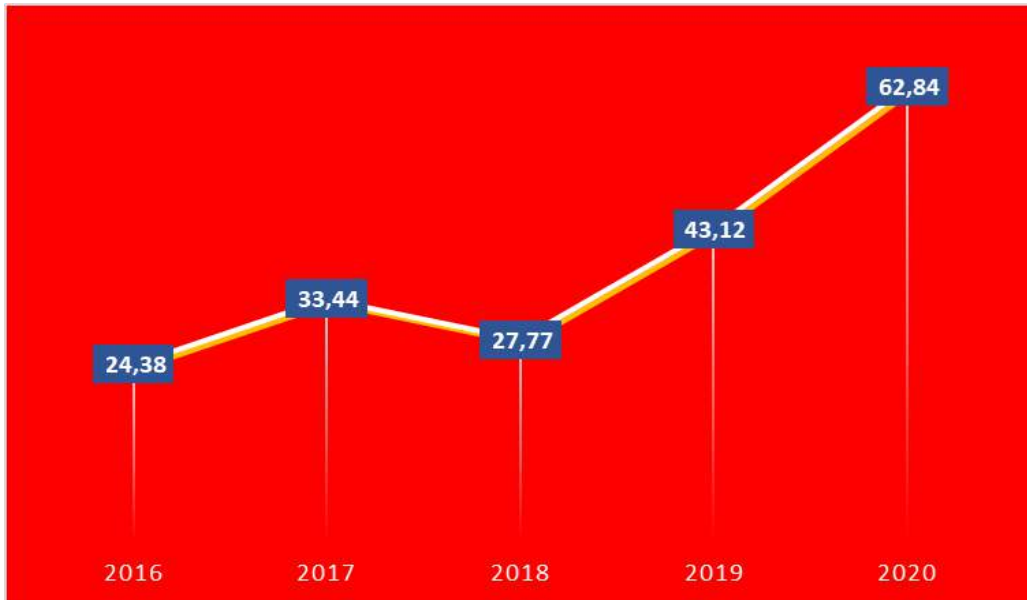


**Gambar 2.42 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

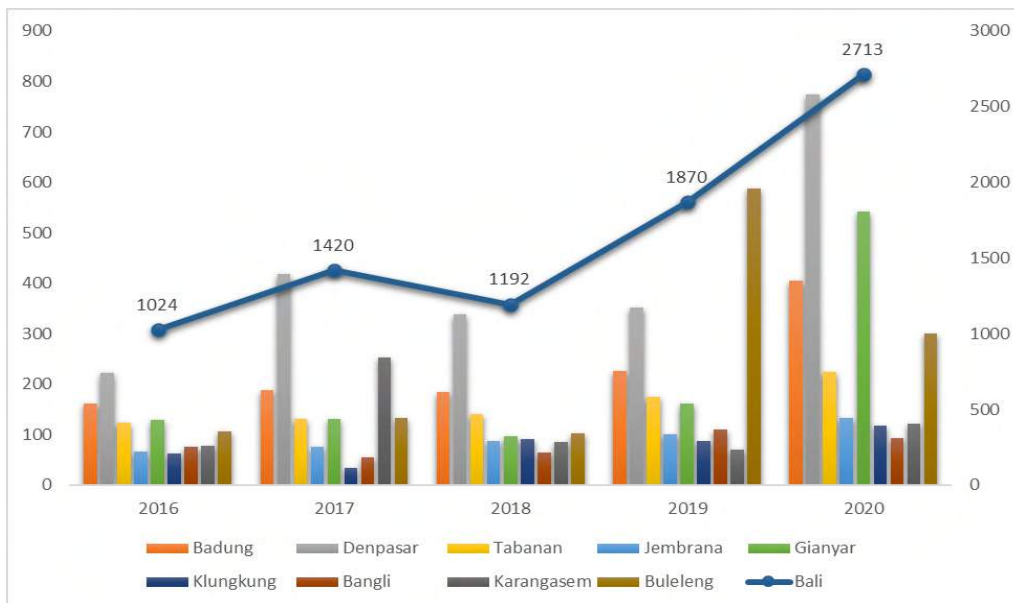
### 8. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini salah satunya bisa dilakukan dengan meningkatkan rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk. Menurut data BPS rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk di Indonesia adalah sebesar 36. Rasio ini jika dibandingkan dengan di rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2020, menunjukkan rasio yang lebih kecil dimana rasio Provinsi Bali mencapai 63 per 100.000 penduduk. Dengan demikian pada tahun 2020 Provinsi Bali sudah menyediakan dokter yang melebihi kapasitas dokter yang bisa disediakan secara nasional. Tentunya angka ini bisa ditingkatkan lagi dengan memberikan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh jangkauan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kualitas layanan kesehatan yang baik.



**Gambar 2.43 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021



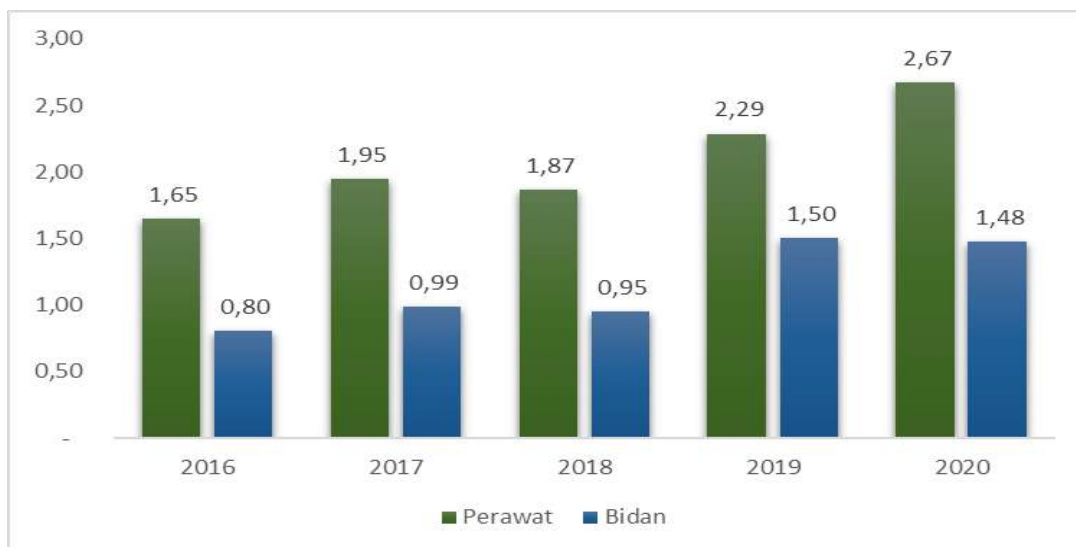
**Gambar 2.44 Jumlah Dokter per Kabupaten/Kota**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 9. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

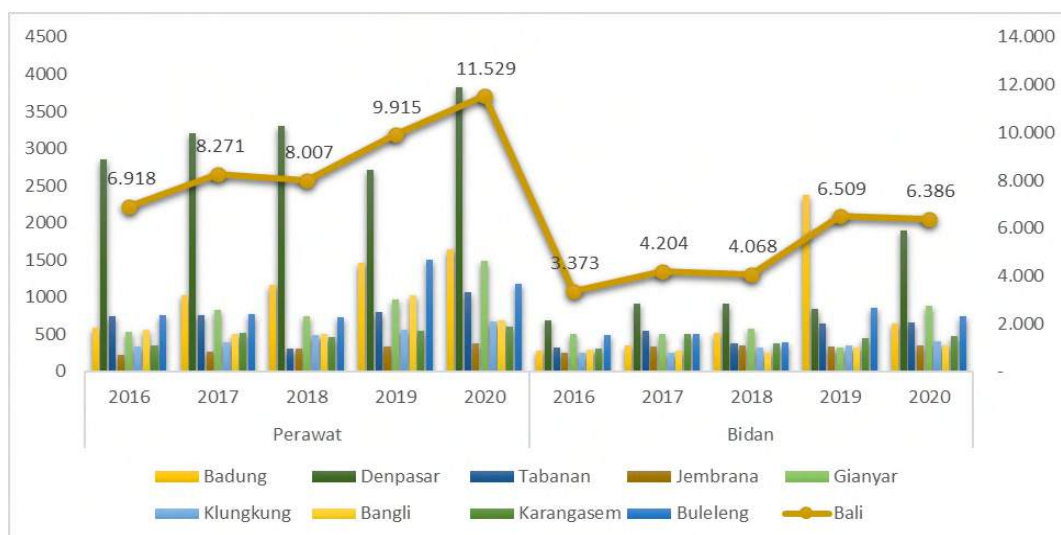
Rasio tenaga perawat selama kurun waktu 2016 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Rasio tenaga perawat tahun 2016 adalah sebesar 1,65 meningkat menjadi 1,87 pada tahun 2018 selanjutnya meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 2,67. Hal yang sama juga terjadi pada tenaga bidan, dimana tercatat rasio tenaga bidan pada tahun 2016 adalah sebesar 0,8 meningkat menjadi 0,95 pada tahun 2018 dan 1,48 pada tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari jumlah tenaga kesehatan (perawat dan bidan) untuk skala kabupaten/kota, maka Kota Denpasar merupakan penyumbang

tenaga kesehatan terbesar baik itu untuk tenaga bidan maupun tenaga perawat. Tercatat jumlah tenaga perawat di Kota Denpasar pada tahun 2020 adalah sebanyak 3.820 sedangkan untuk tenaga bidan adalah sebanyak 1.890. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan ini dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Semakin banyak jumlah tenaga medis, maka harapannya semakin banyak masyarakat yang siap dilayani.



**Gambar 2.45 Rasio Tenaga Perawat dan Bidan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021



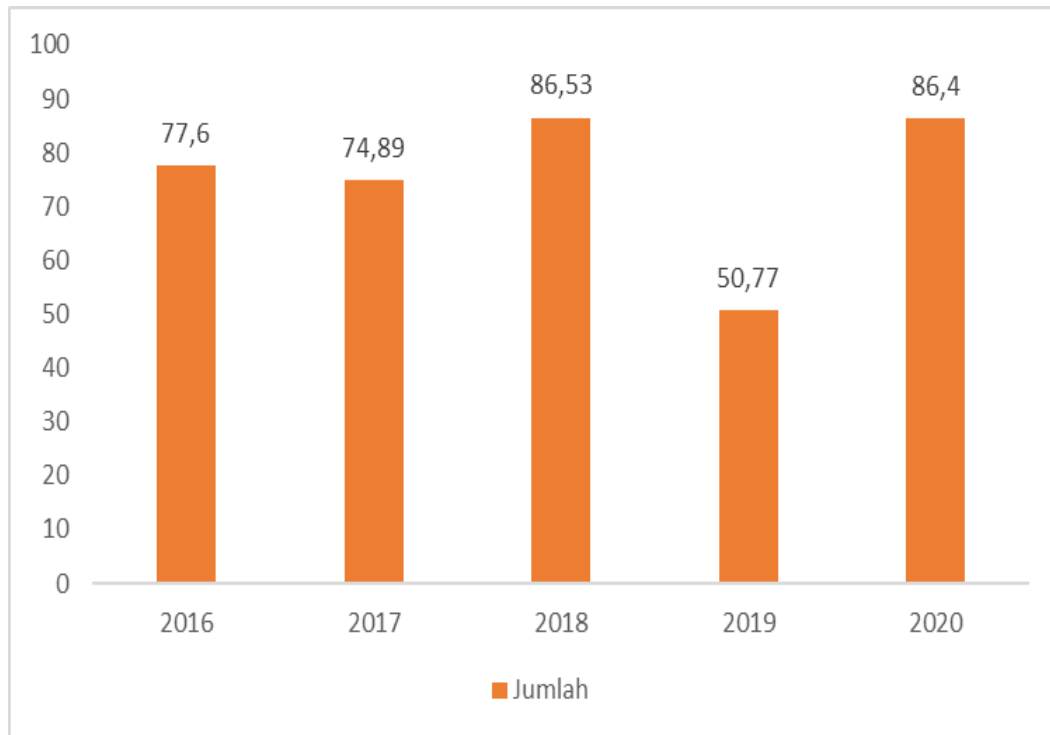
**Gambar 2.46 Jumlah Perawat dan Bidan Menurut Kabupaten/Kota**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 10. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2016 adalah sebesar 77,6 persen. Cakupan tersebut menurun menjadi 74,89 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 86,53 persen. Namun, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 berturut-turut sebesar 50,77 dan 86,4. Angka tersebut menunjukkan cakupan komplikasi kebidanan yang berhasil ditangani mengalami fluktuasi sehingga perlu ada keseriusan lebih baik lagi dalam menangani komplikasi kebidanan oleh tenaga medis dan faskes di Provinsi Bali.



**Gambar 2.47 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

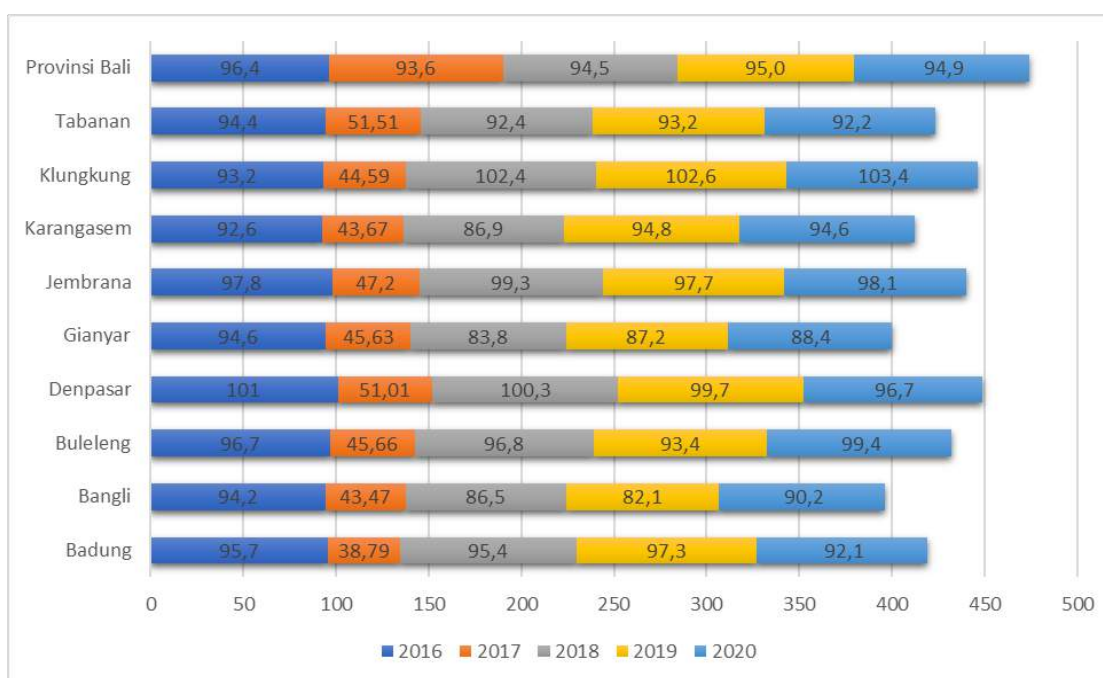
### **11. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Bali pada tahun 2016 adalah sebesar 96,4 persen. Cakupan tersebut menurun menjadi 93,6 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 98,3 persen. Namun, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 berturut-turut sebesar 98,0 dan 97,8. Meskipun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami fluktuasi, namun angka tersebut sudah sangat baik karena dalam 5 tahun terakhir angkanya sudah berada di atas 90 persen.

**Tabel 2.9 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	95,7	80,1	96,2	96,6	94,7
Bangli	94,2	89,5	91,5	92,6	97,9
Buleleng	96,7	93,5	100,6	99,4	100,0
Denpasar	101	99,6	102,3	100,6	98,7
Gianyar	94,6	92,8	83,9	87,6	87,0
Jembrana	97,8	91,9	107,2	103,6	102,6
Karangasem	92,6	101	102,7	103,1	104,9
Klungkung	93,2	104,7	107,2	101,8	106,2
Tabanan	94,4	92,7	93,6	95,4	95,7
Provinsi Bali	96,4	93,6	98,3	98,0	97,8

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021



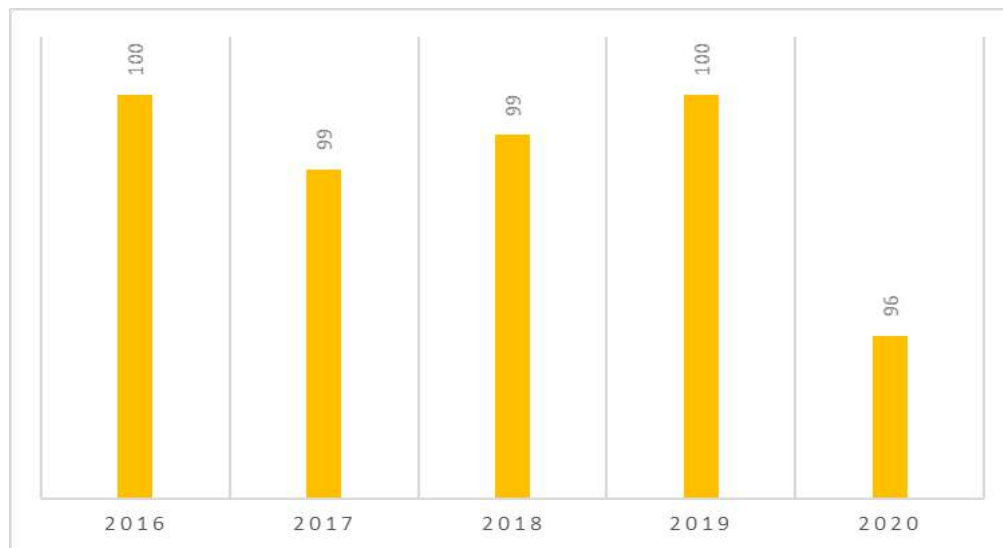
**Gambar 2.48 Persentase Ibu Hamil Yang Ditolong Tenaga Kesehatan**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 12. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI mengalami fluktuasi selama periode 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016, cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 100 persen menurun menjadi 99 persen pada tahun 2017. Selanjutnya meningkat secara berturut-turut pada tahun 2018 – 2019 menjadi 99 persen dan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 96 persen.





**Gambar 2.49 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi Bali**

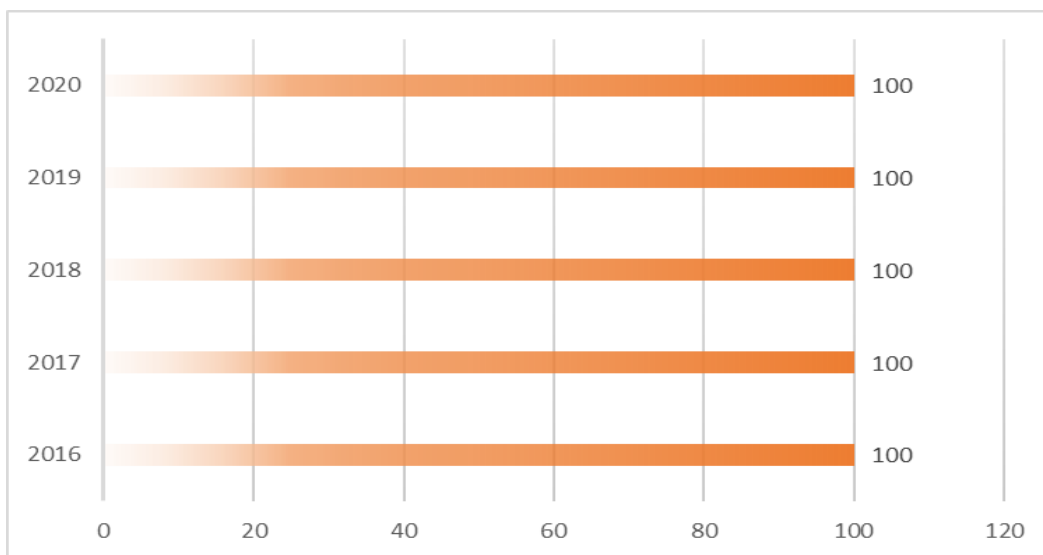
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### **13. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang untuk menjaga kadar nutrisi yang cukup di dalam tubuh. Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk.

- ❑ Kurang makan : kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrisi yang penting hingga berujung pada gizi buruk.
- ❑ Makan tidak teratur : makan secara tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan dan malnutrisi.
- ❑ Gangguan pencernaan : beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan, seperti penyakit *Crohn's*, yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi meski mengonsumsi makanan sehat.
- ❑ Kurang ASI : Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting karena mengandung nutrisi penting. Kurangnya ASI berisiko menyebabkan bayi gizi buruk.
- ❑ Kurang aktivitas : pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas hingga memicu malnutrisi.
- ❑ Fasilitas layanan dasar buruk : sejumlah layanan dasar, misalnya sanitasi, yang buruk juga bisa memicu masalah gizi.

Dengan demikian penting sekali agar balita yang mengalami gizi buruk bisa mendapatkan perawatan yang baik dari faskes terdekat dan tenaga medis yang tersedia. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

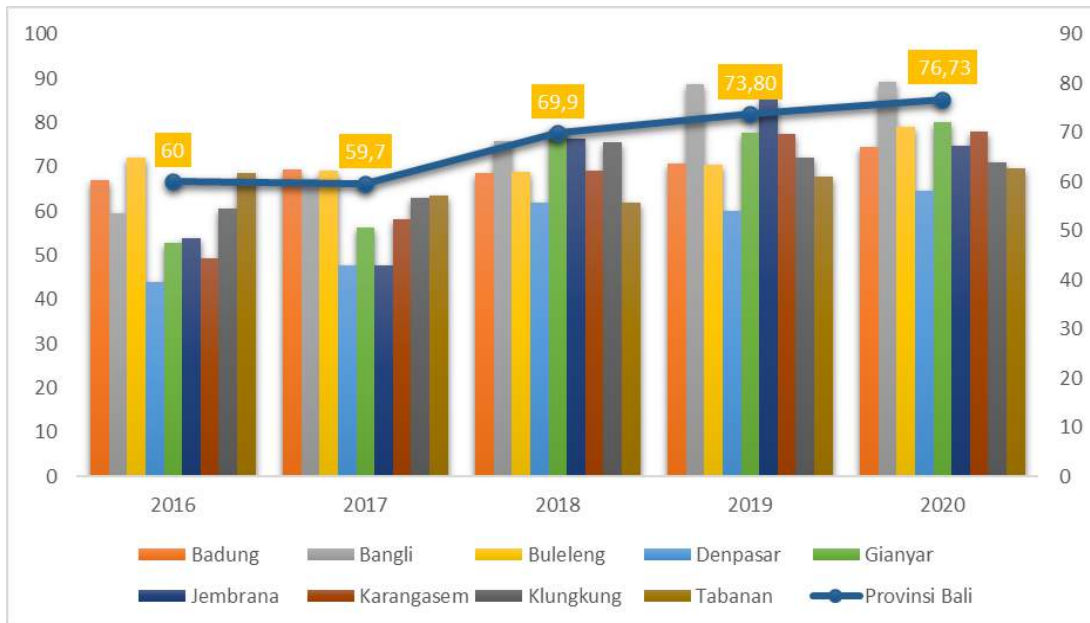


**Gambar 2.50 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### **14. Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif**

Persentase balita usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif meningkat cenderung meningkat. Tercatat pada tahun 2016 persentase balita yang mendapatkan ASI Eksklusif adalah sebesar 60 persen, selanjutnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 69,9 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019 dan 2020 dimana angka asupan ASI Eksklusif pada balita mencapai 73,8 persen dan 76,73 persen. Jika dilihat pada skala kabupaten kota, maka persentase asupan ASI eksklusif tertinggi pada tahun 2016 adalah Kabupaten Tabanan dengan persentase mencapai 68,5 persen sedangkan untuk tahun 2020 persentase terbesar adalah Kabupaten Bangli dengan nilai 89,26 persen.

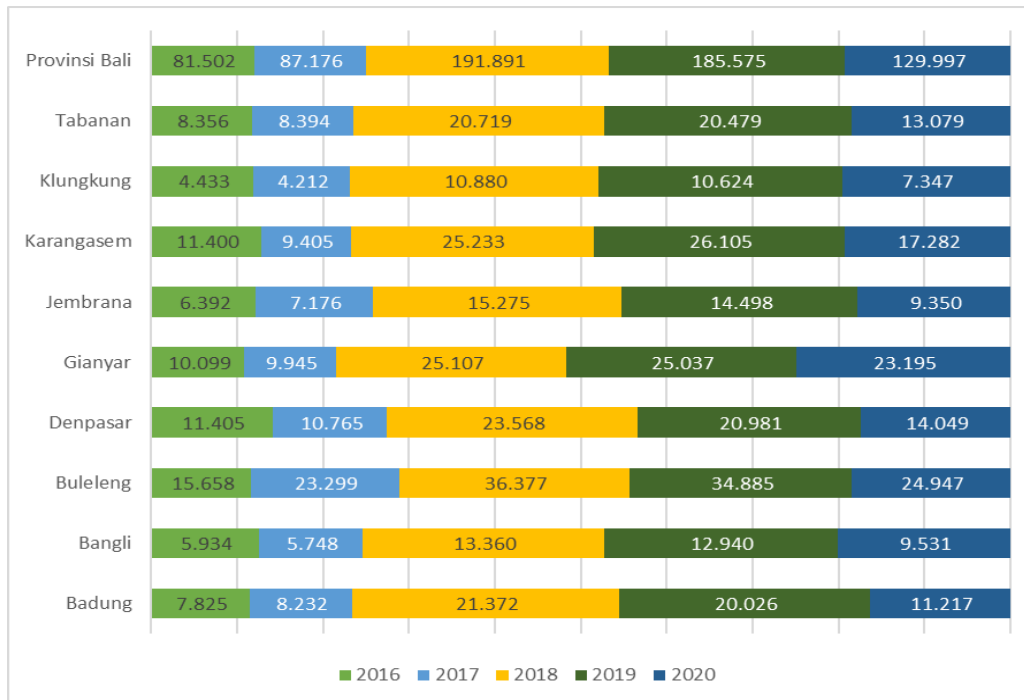


**Gambar 2.51 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 15. Jumlah Balita Ditimbang

Menimbang bayi secara rutin adalah salah satu instrumen yang bisa dilakukan oleh dinas kesehatan atau tenaga medis untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang bayi. Dalam buku KIA biasanya sudah disediakan catatan untuk merekam hasil timbangan bayi secara berkala. Sehingga dari riwayat catatan tersebut bisa diketahui bagaimana proses tumbuh kembang bayi. Selain itu, hasil timbangan juga bisa menjadi rujukan bagi tenaga medis untuk menilai apakah bayi dalam kondisi gizi yang baik atau kurang. Jumlah balita yang ditimbang di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 81.502 pada tahun 2016 menjadi 129.997 pada tahun 2020. Jumlah balita yang ditimbang terbesar pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Buleleng sebesar 15.658 dan yang terendah yaitu Kabupaten Klungkung sebesar 4.433. Penimbangan bayi harus selalu di sosialisasikan kepada masyarakat agar bisa memantau tumbuh kembang bayi dengan lebih baik.



**Gambar 2.52 Jumlah Balita Ditimbang**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

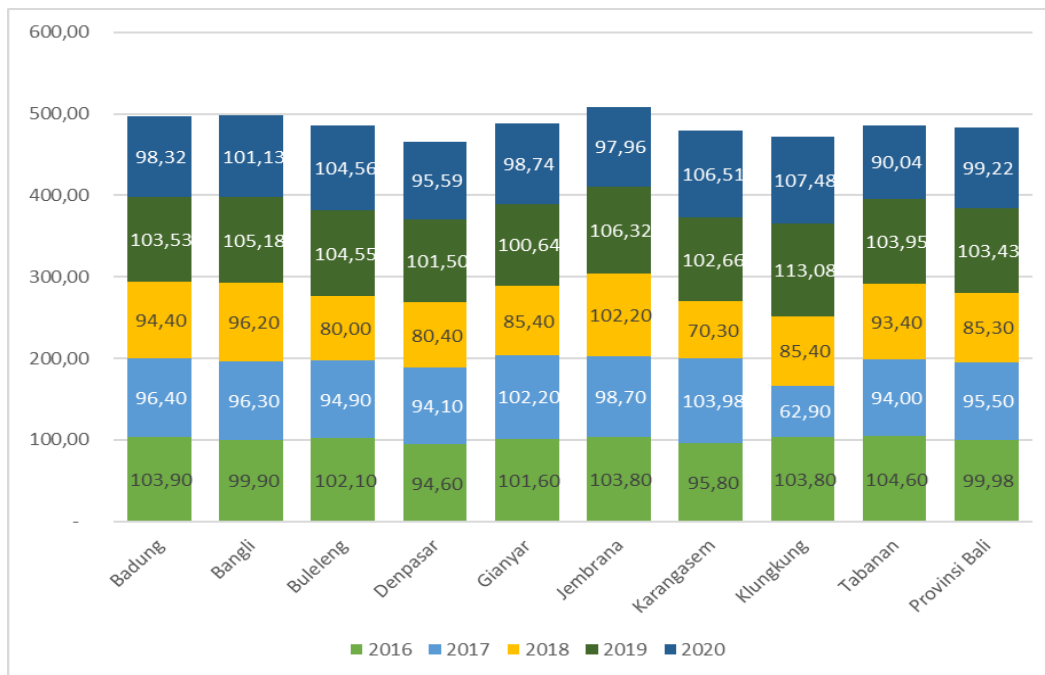
### 16. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan angka yang fluktuatif. Tercatat pada tahun 2016 jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sebesar 99,98 persen menurun pada tahun selanjutnya berturut turut menjadi 95,5 persen dan 85,3 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 103,43 persen dan terakhir pada tahun 2020 menurun menjadi 99,22 persen. Dengan demikian angka terendah terjadi pada tahun 2019 dan sudah meningkat di tahun selanjutnya.

**Tabel 2.10 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunasi campak**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	103,90	96,40	94,40	103,53	98,32
Bangli	99,90	96,30	96,20	105,18	101,13
Buleleng	102,10	94,90	80,00	104,55	104,56
Denpasar	94,60	94,10	80,40	101,50	95,59
Gianyar	101,60	102,20	85,40	100,64	98,74
Jembrana	103,80	98,70	102,20	106,32	97,96
Karangasem	95,80	103,98	70,30	102,66	106,51
Klungkung	103,80	62,90	85,40	113,08	107,48
Tabanan	104,60	94,00	93,40	103,95	90,04
Provinsi Bali	99,98	95,50	85,30	103,43	99,22

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

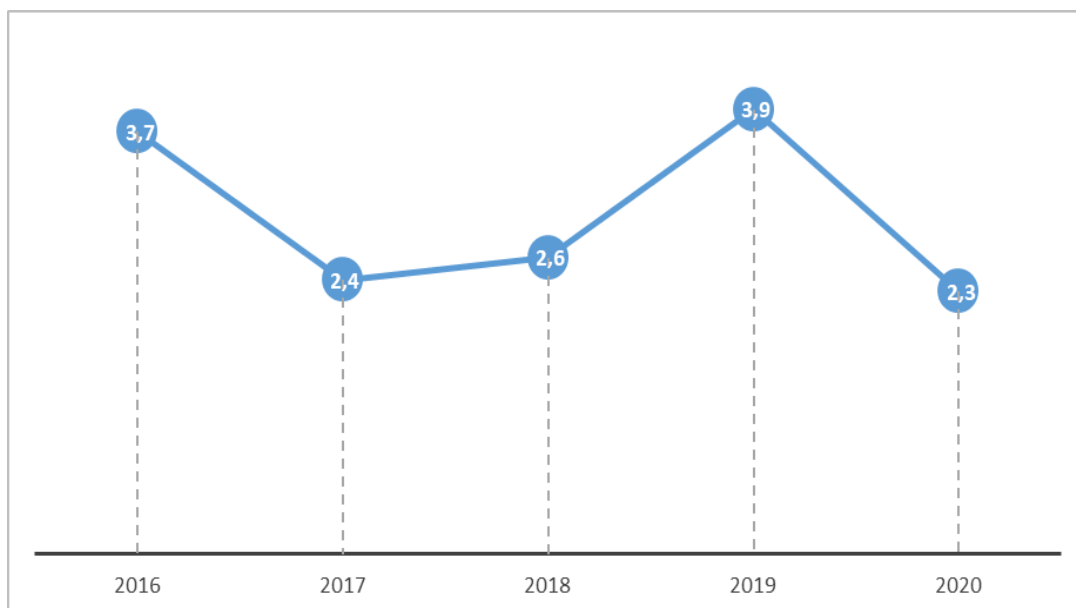


**Gambar 2.53 Persentase Cakupan Imunisasi Campak**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 17. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk berfluktuatif selama kurun waktu 2016 sampai 2020. Tahun 2016, non polio AFP Rate per 100.000 penduduk sebesar 3,7 dan menurun menjadi 2,4 pada tahun 2017. Namun, menurun menjadi 2,6 pada tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 3,9 pada tahun 2019. Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk kembali mengalami penurunan menjadi 2,3 pada tahun 2020.

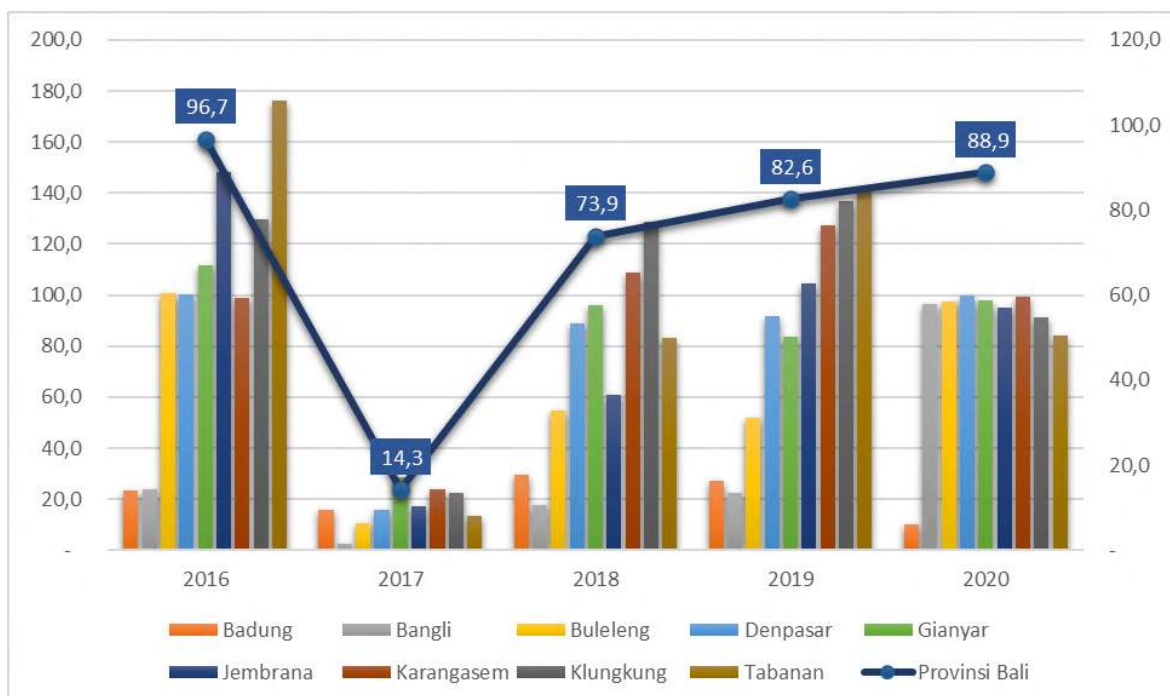


**Gambar 2.54 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 18. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Cakupan balita pneumonia yang ditangani selama tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan grafik yang fluktuatif. Tercatat pada tahun 2016 cakupan balita pneumonia menunjukkan angka 96,7 menurun menjadi 14,3 pada tahun selanjutnya dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 73,9. Pada tahun 2019 dan 2020 berturut-turut meningkat menjadi 82,6 dan 88,9. Jika dilihat pada skala kabupaten/kota maka pada tahun 2016 jumlah cakupan balita pneumonia tertinggi adalah Kabupaten Tabanan sebesar 176,1 dan yang terendah adalah Kabupaten Badung dengan nilai 23,2 sedangkan pada tahun 2020 cakupan balita pneumonia terbesar adalah Kota Denpasar dengan angka 100 dan yang terendah adalah Kabupaten Badung dengan angka 10.

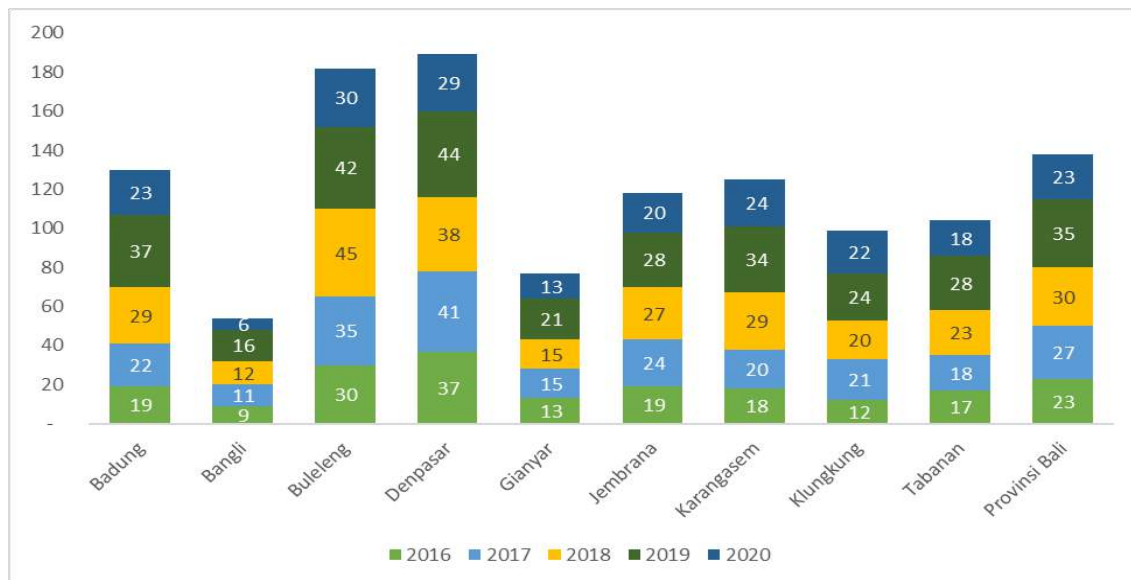


**Gambar 2.55 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

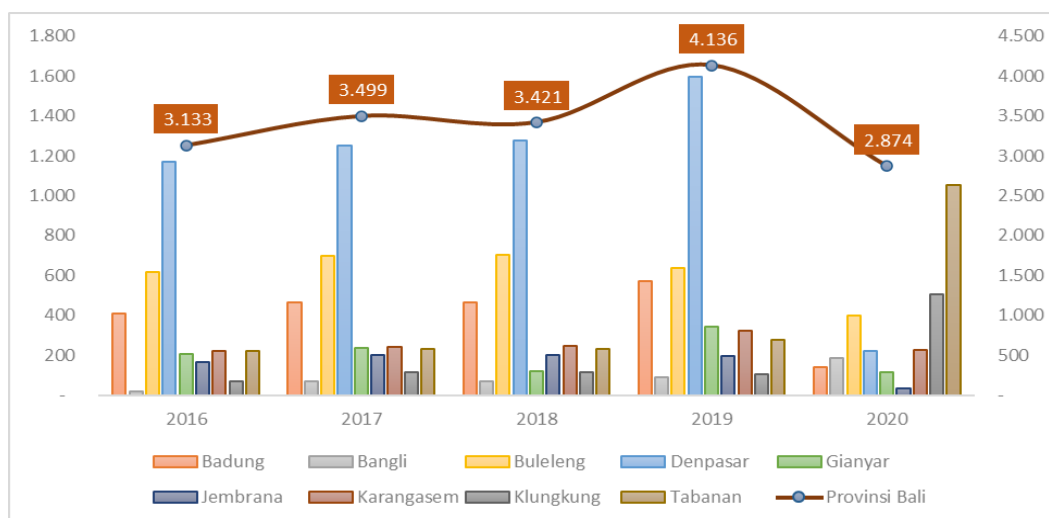
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 23 kasus. Cakupan tersebut meningkat pada tahun 2017 menjadi 27 kasus dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut menjadi 30 kasus dan 35 kasus. Pada tahun 2020 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Provinsi Bali menurun menjadi 23 kasus.



**Gambar 2.56 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

Jumlah kasus TBC yang dilaporkan di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 berfluktuasi, sebesar 3.133 kasus, 3.499 kasus, 3.421 kasus, 4.136 kasus dan 2.874 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus TBC yang dilaporkan yang terbesar ada di Kabupaten Tabanan sebesar 1.054 kasus dan yang terendah ada di Kabupaten Jembrana sebesar 33 kasus.



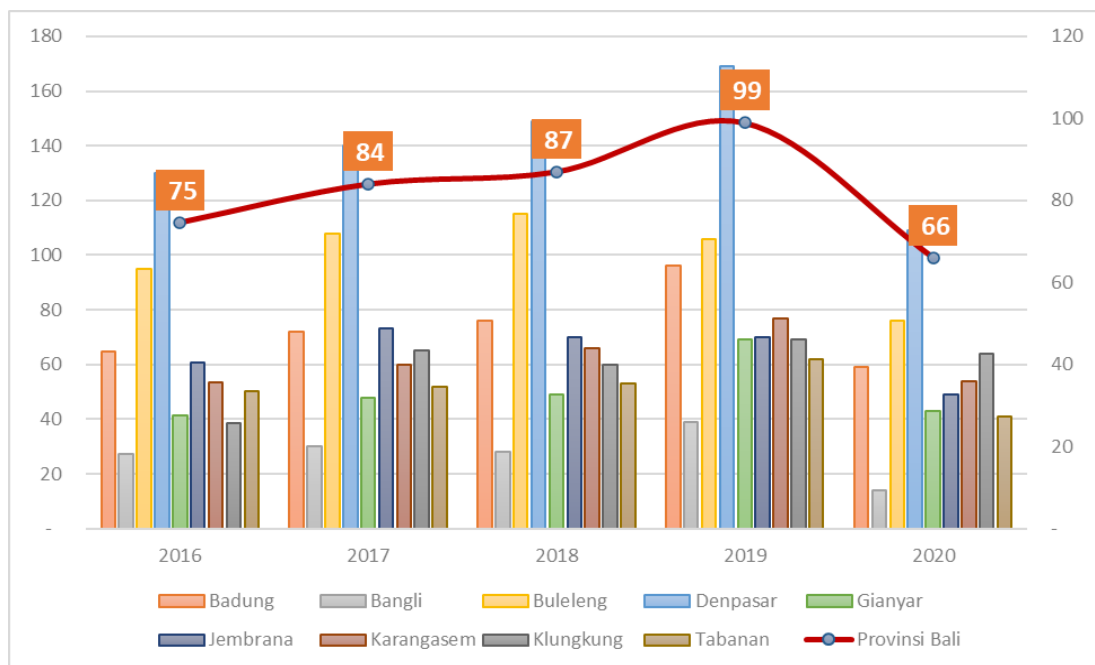
**Gambar 2.57 Jumlah Kasus TBC yang Dilaporkan**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Untuk angka prevalensi TBC dihitung di level nasional berdasarkan global report sehingga di daerah prevalensi ini belum bisa dihitung. Angka yang tersedia di Provinsi Bali adalah case notifikasi rate/kasus TBC yang ditemukan dan tercatat di bagi jumlah penduduk. Berdasarkan angka tersebut

tercatat pada tahun 2016 sebesar 75, meningkat pada tahun 2017 menjadi 84, dan secara berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 87 dan 99. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 66. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan angka yang cukup baik. Jika dilihat pada skala kabupaten/kota, Kota Denpasar menunjukkan angka tertinggi dari tahun 2016-2020. Tercatat pada tahun 2020 angka notifikasi rate/kasus TBC di Kota Denpasar adalah sebesar 109, menurun dari tahun 2016 yaitu sebesar 130. Sedangkan angka terendah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Bangli dengan angka 14 menurun dari tahun 2016 yaitu sebesar 27.



**Gambar 2.58 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 21. Prevalensi Tekanan Darah Tinggi

Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah penduduk umur  $\geq 18$  tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Prevalensi tekanan darah tinggi di Provinsi Bali tahun 2019 adalah 24,64% dengan kecenderungan peningkatan dalam periode 2015-2019. Angka pada tahun 2019 ini belum mencapai target nasional. Dengan kecenderungan yang meningkat maka diproyeksikan prevalensi tekanan darah tinggi di Provinsi Bali akan mencapai angka 56,06% pada tahun 2030.



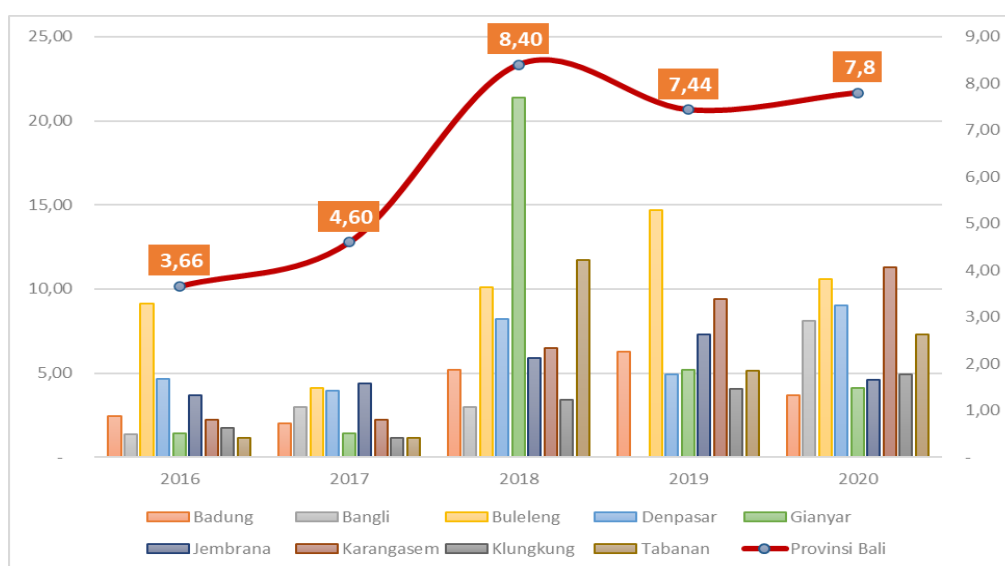


**Gambar 2.59 Prevalensi Tekanan Darah Tinggi di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 22. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Grafik dibawah menunjukkan angka kematian pasien TBC dibandingkan dengan jumlah kasus TBC yang ditangani di Provinsi Bali. Tercatat angka kematian pasien TBC meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Provinsi Bali. Pada tahun 2016 angka kematian pasien TBC mencapai 3,66 meningkat menjadi 4,6 pada tahun 2017 selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,4. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,44 namun meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 7,8. Jika dilihat pada skala kabupaten/kota angka kematian tertinggi pada tahun 2020 ada di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 11,3 meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 2,2.

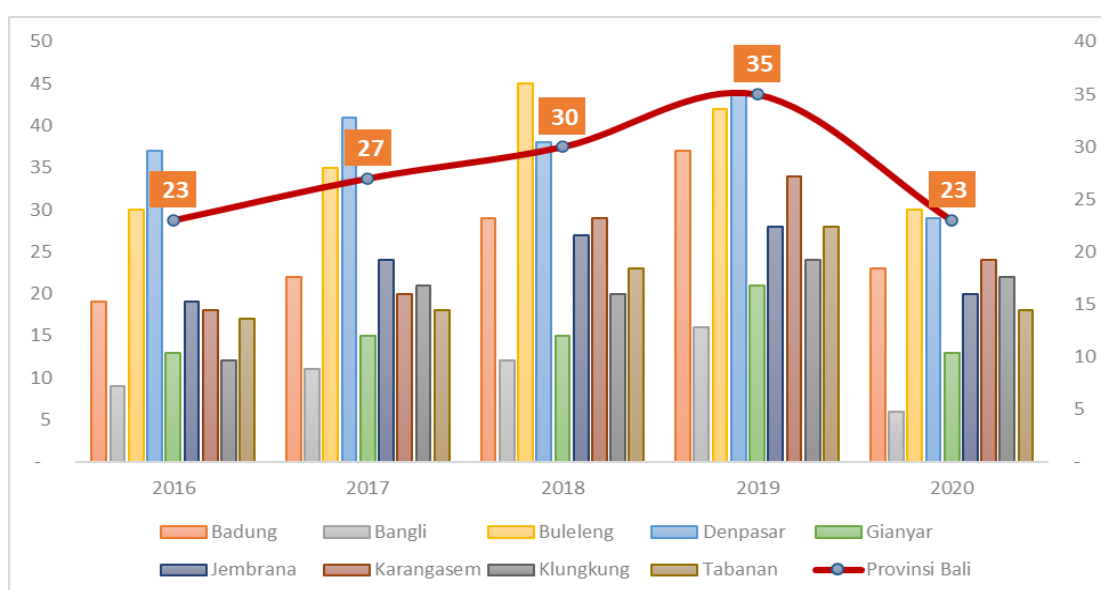


**Gambar 2.60 Tingkat kematian Karena Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 23. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 27 persen, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 23 persen. Sampai dengan tahun 2020 jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami penurunan yang mencapai 23 persen. Kabupaten Buleleng memiliki proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi pada tahun 2020 yaitu 30 persen. Namun, Kabupaten Bangli memiliki proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah pada tahun 2020 yaitu 6 persen.

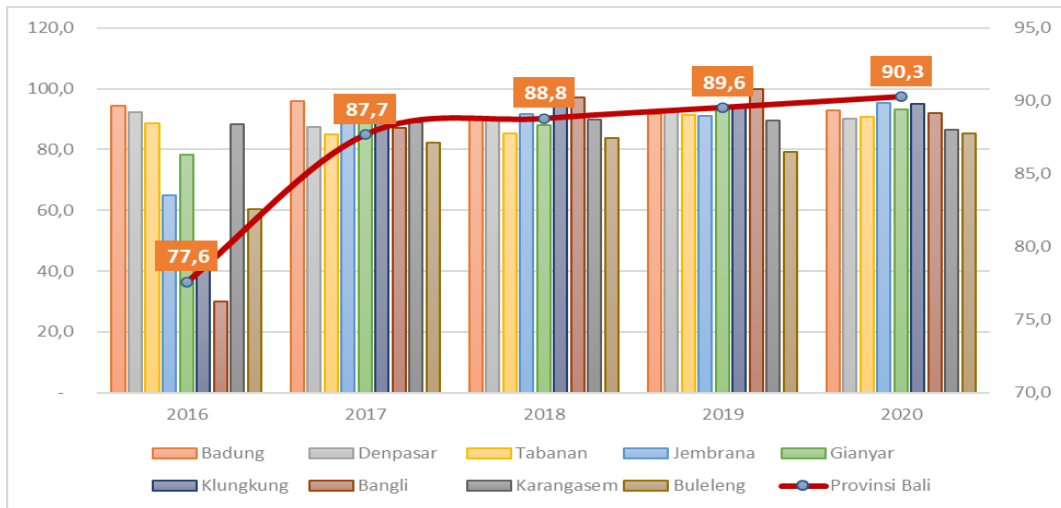


**Gambar 2.61 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang terdeteksi DOTS di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 24. Proporsi Kasus TBC Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 77,6 persen, 87,7 persen, 88,8 persen, 89,6 persen dan 90,3 persen. Kabupaten Jembrana menjadi Kabupaten tertinggi untuk proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS pada tahun 2020 yaitu sebesar 95,4 persen. Sedangkan, Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten terendah untuk proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS pada tahun 2020 yaitu sebesar 85,2 persen.

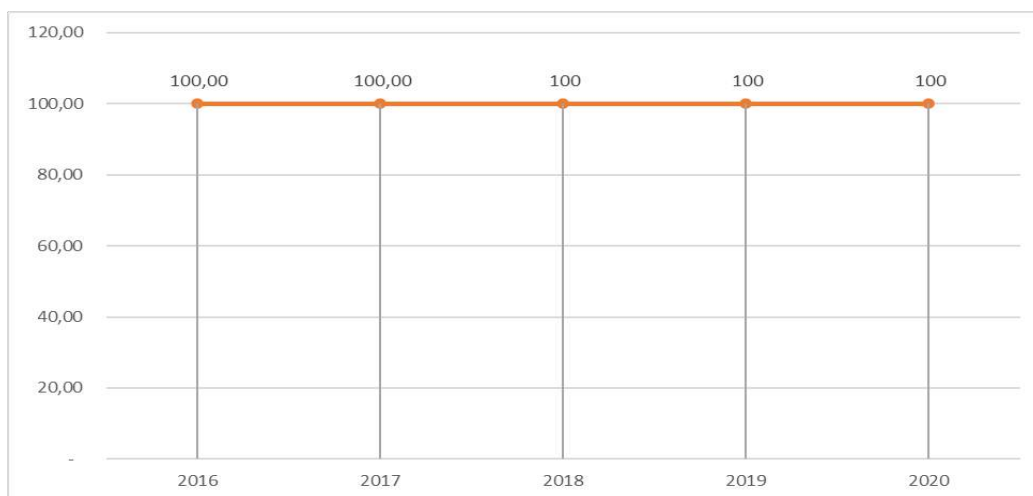


**Gambar 2.62 Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

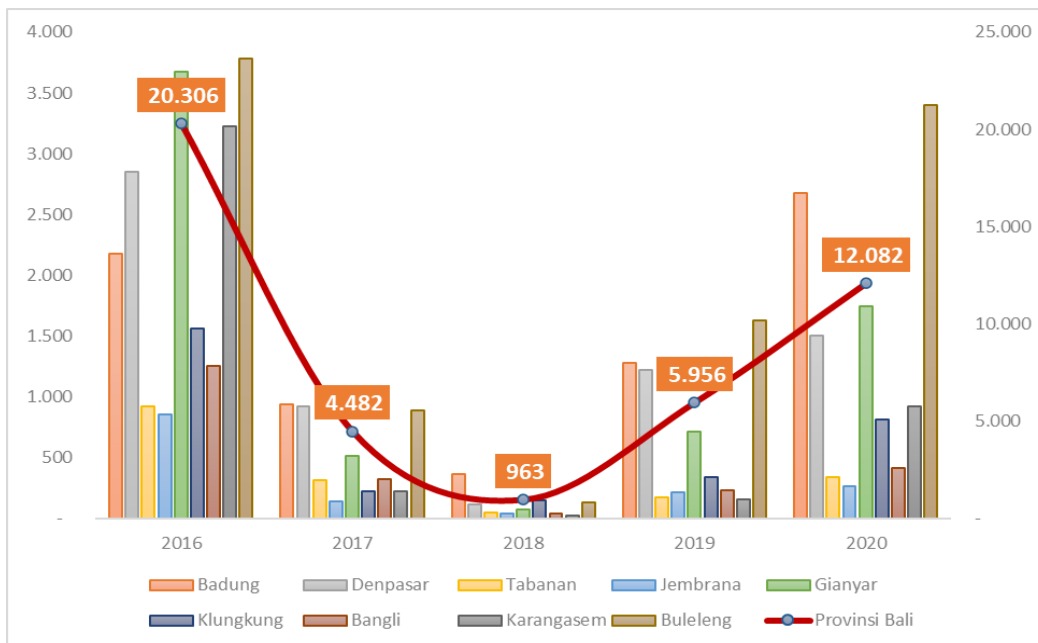
### 25. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kasus DBD yang dilaporkan di Provinsi Bali menurun dari 20.306 kasus pada tahun 2016 menjadi 12.082 kasus. Pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu mencapai 963 kasus. Pada tahun 2020, kasus DBD yang dilaporkan terbesar terjadi di Kabupaten Buleleng sebesar 3.402 kasus dan yang terendah terjadi di Kabupaten Jembrana yaitu 267 kasus. Incidence rate kasus DBD per 100.000 penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 515,9.



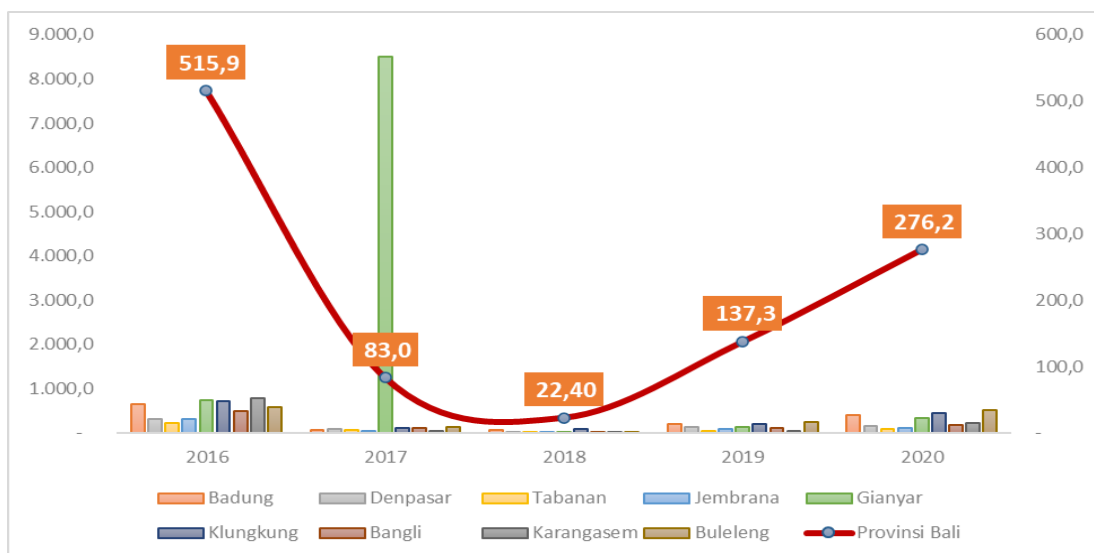
**Gambar 2.63 Cakupan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2.64 Kasus DBD yang Dilaporkan**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

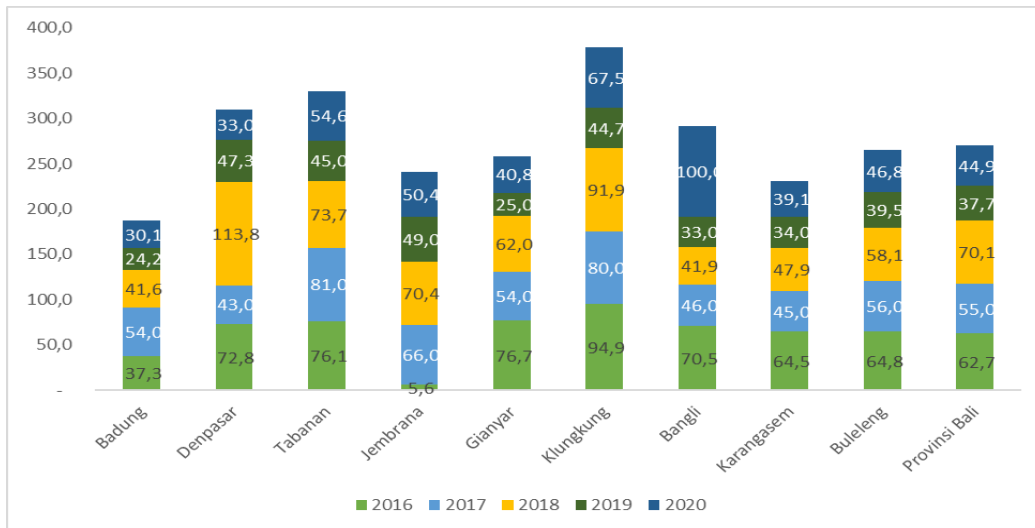


**Gambar 2.65 Incidence Rate Kasus DBD per 100.000 Penduduk**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 26. Penderita Diare Yang Ditangani

Penderita diare di Provinsi Bali yang telah ditangani selama kurun waktu 2016 sampai 2020 yaitu sebesar 62,7 persen, 55 persen, 70,1 persen, 37,7 persen, dan 44,9 persen. Kabupaten Bangli pada tahun 2020 berhasil menangani penderita diare sebesar 100 persen sedangkan Kabupaten Badung berhasil menangani penderita diare sebesar 30,1 persen.

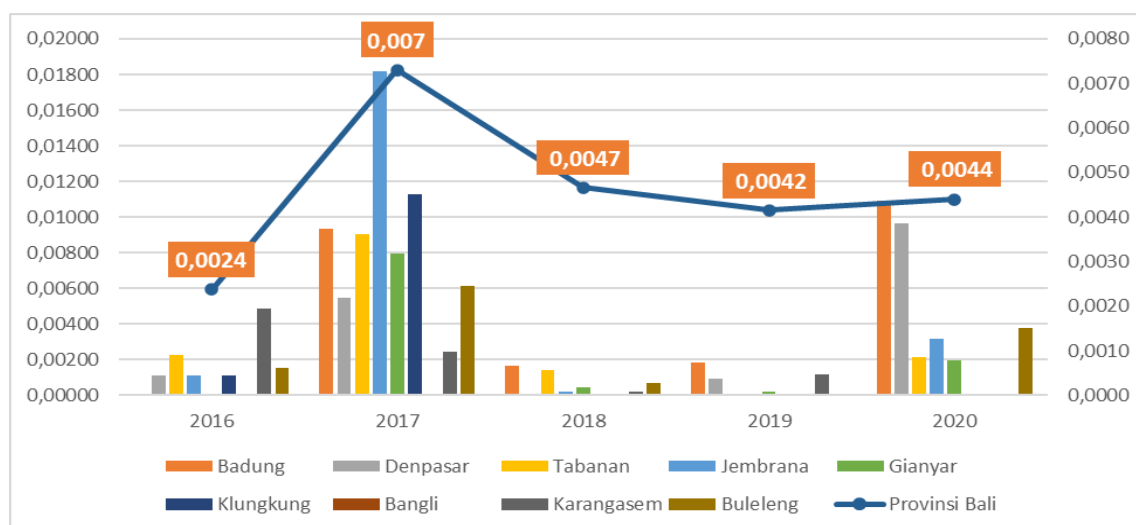


**Gambar 2.66 Penderita Diare Yang Ditangani di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 27. Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2016 sampai 2020, yaitu 0,24 persen; 0,77 persen; 0,47 persen; 0,42 persen; dan 0,44 persen. Angka kejadian malaria terendah pada tahun 2020 ada di Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem yaitu 0,00. Angka kejadian malaria tertinggi tahun 2020 ada di Kabupaten Badung yaitu sebesar 1,09 persen.



**Gambar 2.67 Angka Kejadian Malaria di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 28. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat. Namun jika tidak ditangani, penyakit

ini bisa berakibat fatal dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian. Di Indonesia, jumlah penderita malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun, beberapa provinsi di Indonesia masih banyak yang menderita malaria, terutama di wilayah timur Indonesia yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta dan Bali sudah masuk ke dalam kategori provinsi bebas malaria.

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, selama kurun waktu 2016 sampai 2020 tingkat kematian malaria di Provinsi Bali adalah 1 orang yaitu pada tahun 2016 di Kabupaten Bangli. Ini kemungkinan disebabkan oleh orang tersebut bepergian ke luar daerah yang memiliki potensi penyebaran malaria.

**Tabel 2.11 Tingkat Kematian Akibat Malaria di Provinsi Bali**

KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kematian akibat malaria				
	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denpasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jembrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gianyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klungkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangli	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karangasem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buleleng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinsi Bali	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### **29. Proporsi Anak Balita Yang tidur Dengan Kelambu Berinsektisida**

Kelambu berinsektisida diperlukan untuk mencegah kejadian malaria pada daerah endemis. Provinsi Bali sejak tahun 2016 sudah tidak ada kasus *indigenous* atau kasus penularan setempat. Pada tahun 2016 semua kabupaten/kota di Bali sudah diberikan sertifikat bebas malaria, sehingga tidak ada data proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida.

### **30. Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat**

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat malaria yang tepat di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen pada tahun 2017. Capaian proporsi tersebut ada di Kabupaten Karangasem.

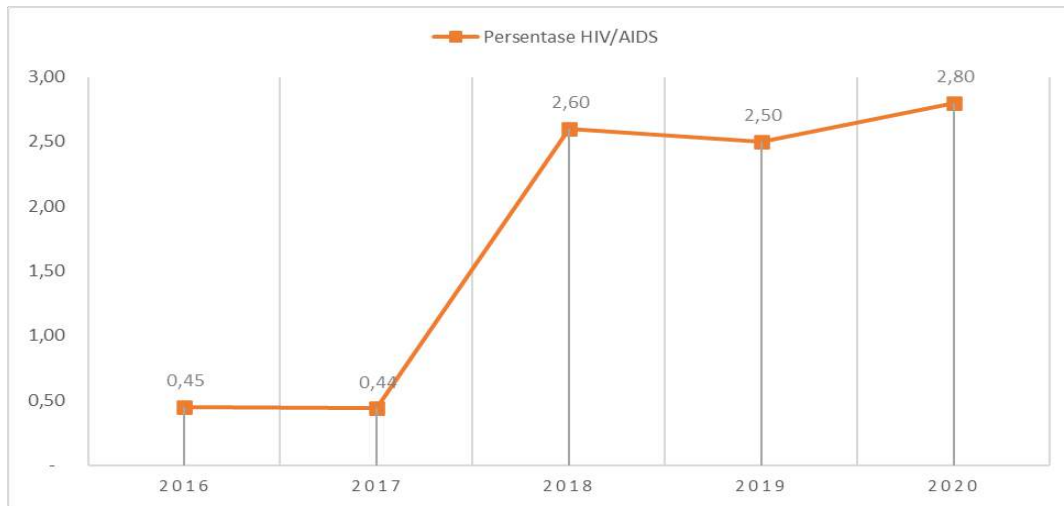
**Tabel 2.12 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat di Provinsi Bali**

KABUPATEN/KOTA	Proporsi anak balita dg demam yg diobati dg obat anti malaria				
	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denpasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jembrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gianyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klungkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karangasem	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
Buleleng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinsi Bali	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

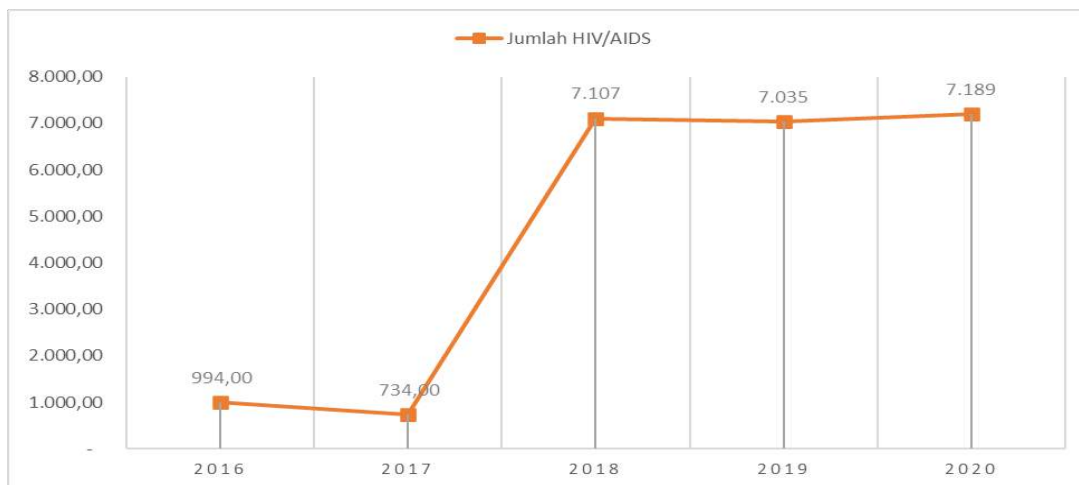
### 31. Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari penduduk umur 15-49 tahun cenderung mengalami penurunan dari 0,50 persen pada tahun 2013 menjadi 0,44 persen pada tahun 2017. Jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan terus meningkat dari tahun ketahun. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan oleh klinik-klinik *voluntary testing & counseling* (VCT) dan rumah sakit sejak tahun 1987 sampai dengan 31 Desember 2012 berjumlah 7.170 kasus (Gambar 2.68). Sekitar 40% dari kasus-kasus ini dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan 60% dari 8 kabupaten di Bali. Sampai dengan tahun 1999, jumlah kasus yang dilaporkan kebanyakan penularannya melalui hubungan seks sejenis (*homosexual*). Sejak tahun 2000 sampai dengan 2007 penularan HIV terutama terjadi pada pemakai narkoba suntik atau *injecting drugs user* (IDU), dan sejak tahun 2003 sampai saat ini penularan melalui hubungan seks lawan jenis (*heterosexual*) meningkat dengan tajam. Jumlah kasus perempuan lebih sedikit dibanding jumlah kasus laki-laki tetapi pola kenaikannya sama dengan kenaikan jumlah kasus laki-laki. Kebanyakan dari kasus-kasus perempuan tersebut adalah ibu rumah tangga yang pada umumnya tertular dari suaminya. Bila ibu rumahtangga tersebut hamil maka sekitar 30-50% bayi-bayinya juga akan tertular HIV.



**Gambar 2.68 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari penduduk umur 15-49 tahun di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2.69 Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS yang Dilaporkan ke Dinas Kesehatan dari Tahun 2016-2020 Berdasarkan Faktor Risiko Penularan**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.13 Persen Darah Donor yang HIV+ per Kabupaten/Kota tahun 2016 dan Tahun 2017**

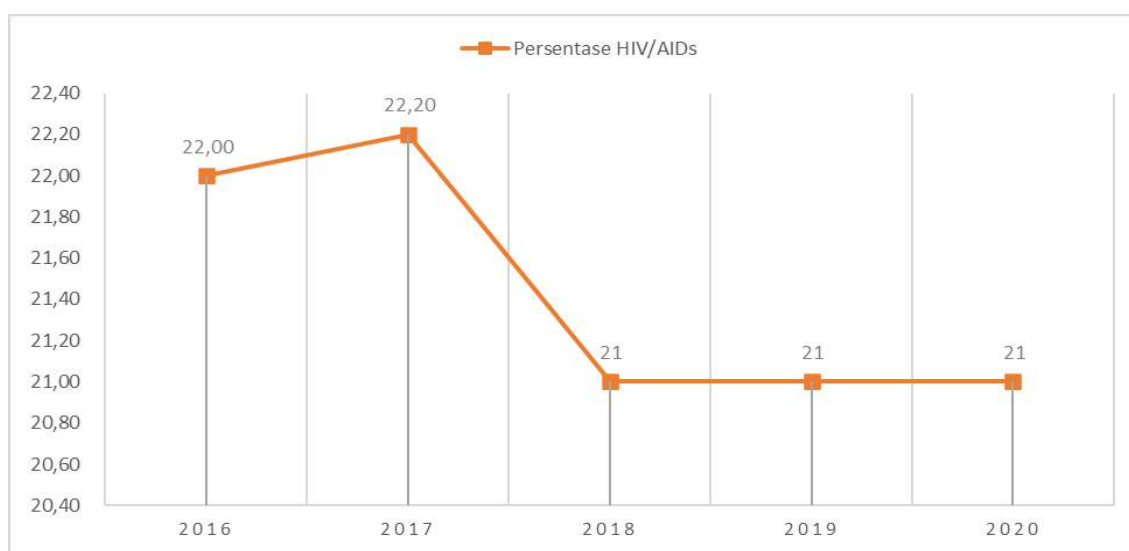
Kab/Kota	2016				2017
	Jml Pendoror	Jml Sampel	HIV+	% Positif	Jml Pendoror
Jembrana	2.254	2.254	20	0,89	2.280
Tabanan	5.001	5.001	29	0,58	4.490
Badung	5.559	5.559	40	0,72	5.501
Gianyar	3.863	3.863	22	0,57	5.091
Klungkung	3.483	3.483	5	0,14	3.483
Bangli	1.821	1.821	3	0,16	1.664
Karangasem	2.771	2.771	10	0,36	2.569
Buleleng	10.534	10.534	0	0,00	10.082
Denpasar	4.151	4.151	11	0,26	2.969
<b>Jumlah</b>	<b>39.437</b>	<b>39.437</b>	<b>140</b>	<b>0,35</b>	<b>38.129</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021



### **32. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS**

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS mengalami peningkatan dari 22 persen pada tahun 2016 menjadi 22,20 persen pada tahun 2017, peningkatan ini disebabkan oleh upaya peningkatan di sekolah – sekolah melalui kelompok siswa peduli AIDS (KSPA) pada sekolah dijenjang SMP dan SMA. Hanya saja pada tahun 2018-2020 angka tersebut menurun menjadi 21 persen.



**Gambar 2.70 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS**

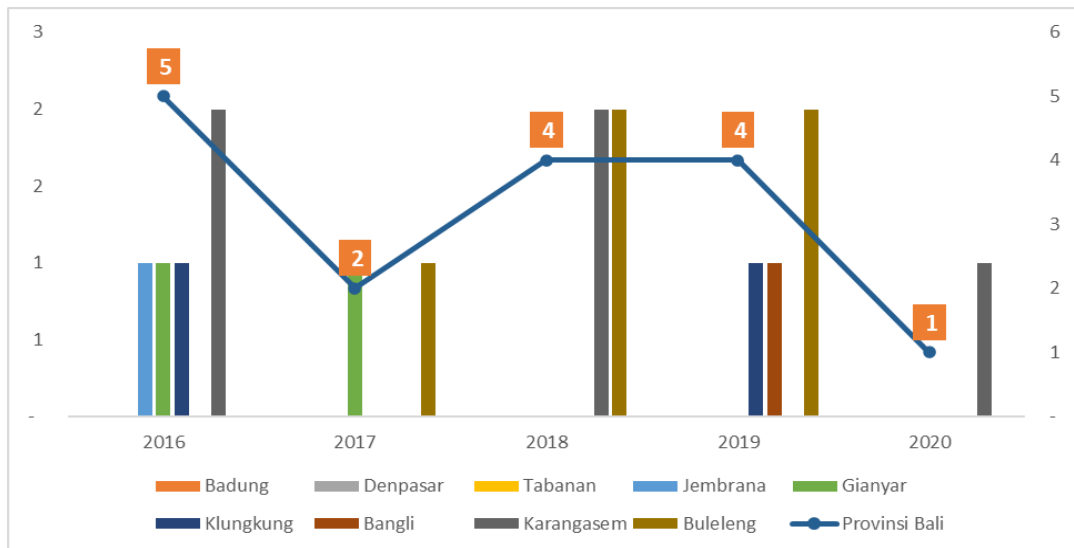
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### **33. Kasus Rabies Pada Manusia**

Rabies atau yang dikenal juga dengan istilah “anjing gila” adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Penyakit ini tergolong sangat berbahaya karena berpotensi besar menyebabkan kematian. Pada tahun 2017, di Indonesia terdapat lebih dari 25.000 kasus gigitan hewan penular rabies yang diberi vaksin anti rabies, namun tetap ada 90 korban meninggal. Di Bali penyakit rabies menjadi salah satu penyakit yang sangat diperhatikan karena potensi perkembangan penyakit ini sangat tinggi, dimana persebaran anjing liar sangat banyak terutama di daerah-daerah pedesaan. Untuk anjing peliharaan kebanyakan sudah divaksin oleh pemilik anjing, akan tetapi sangat sedikit anjing-anjing liar yang juga mendapat perawatan yang sama. Hewan yang tidak divaksin ini sangat beresiko mengalami penyakit rabies yang kemudian bisa ditularkan ke manusia.

Jumlah kasus rabies pada manusia di Provinsi Bali berfluktuasi mulai dari 5 kasus pada tahun 2016; 2 kasus pada tahun 2017; 4 kasus pada

tahun 2018; 4 kasus pada tahun 2019 dan 1 kasus pada tahun 2020. Dengan demikian antisipasi terhadap penyebaran penyakit ini harus dilakukan dengan melakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing liar yang ada di Bali dan meningkatkan pasokan vaksin rabies di faskes-faskes yang ada sampai pada level Puskesmas.



**Gambar 2.71 Jumlah Kasus Rabies Pada Manusia**

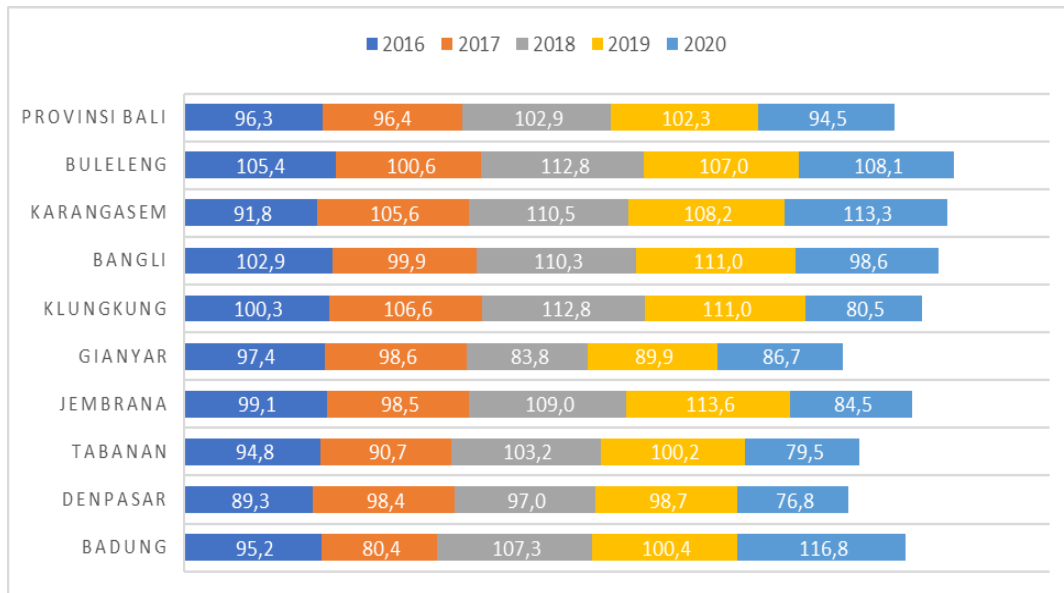
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin merupakan salah satu target prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin memiliki akses yang rendah terhadap pelayanan kesehatan yang baik akibat dari kemampuan ekonomi yang rendah. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin selama kurun waktu 2016 sampai 2020 telah mencapai 100 persen. Artinya pemerintah sudah sangat optimal memberikan kualitas layanan dan keterjangkauannya terhadap kelompok masyarakat miskin.

### 35. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Provinsi Bali selama tahun 2016 sampai 2020, yaitu 96,3 persen, 96,4 persen, 102,9 persen, 102,3 persen dan 94,5 persen. Cakupan kunjungan bayi tertinggi tahun 2020 ada di Kabupaten Badung yaitu sebesar 116,8 persen dan yang terendah ada di Kota Denpasar yaitu dengan dengan angka kunjungan sebesar 76,8 persen.



**Gambar 2.72 Cakupan Kunjungan Bayi**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 36. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas pembantu di Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 16 persen. Selanjutnya sampai dengan tahun 2019 cakupan puskesmas pembantu masih tetap pada angka 16 persen. Pada tahun 2020 angka tersebut menurun menjadi 15 persen. Angka ini cenderung tetap dikarenakan fokus Pemerintah Provinsi Bali adalah dengan pembangunan Puskesmas dan peningkatan kualitas pelayanannya. Harapannya adalah masyarakat bisa memanfaatkan Puskesmas sebagai faskes utama yang menjadi rujukan ketika mengalami masalah kesehatan.

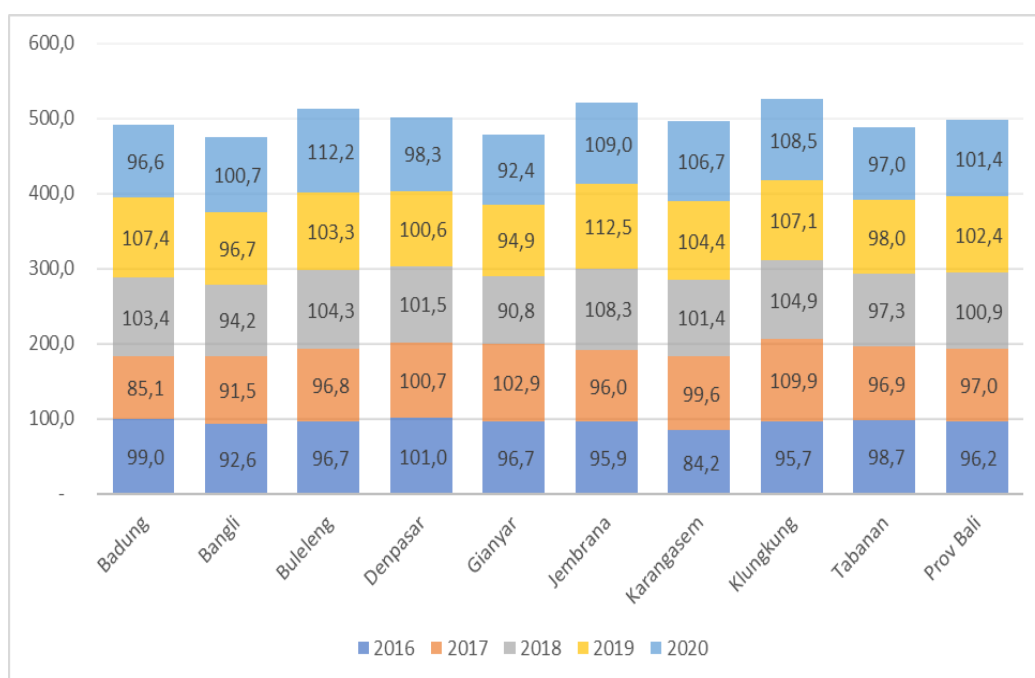
**Tabel 2.14 Cakupan Puskesmas Pembantu**

KAB/KOTA/PROV	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Bangli	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Buleleng	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Denpasar	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Gianyar	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12
Jembrana	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
Karangasem	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Klungkung	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29
Tabanan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>Prov Bali</b>	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 37. Persentase Ibu Hamil Yang Memeriksa Kehamilannya Minimal Satu Kali

Persentase ibu hamil yang memeriksa kehamilannya minimal 1 kali berfluktuasi selama kurun waktu 2016 sampai 2020, yaitu 96,2 persen, 97 persen, 100,9 persen, 102,4 persen dan 101,4 persen. Pada tahun 2020, persentase ibu yang memeriksa kehamilannya minimal 1 kali yang tertinggi ada di Kabupaten Buleleng sebesar 112,2 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Gianyar yaitu 92,4 persen.

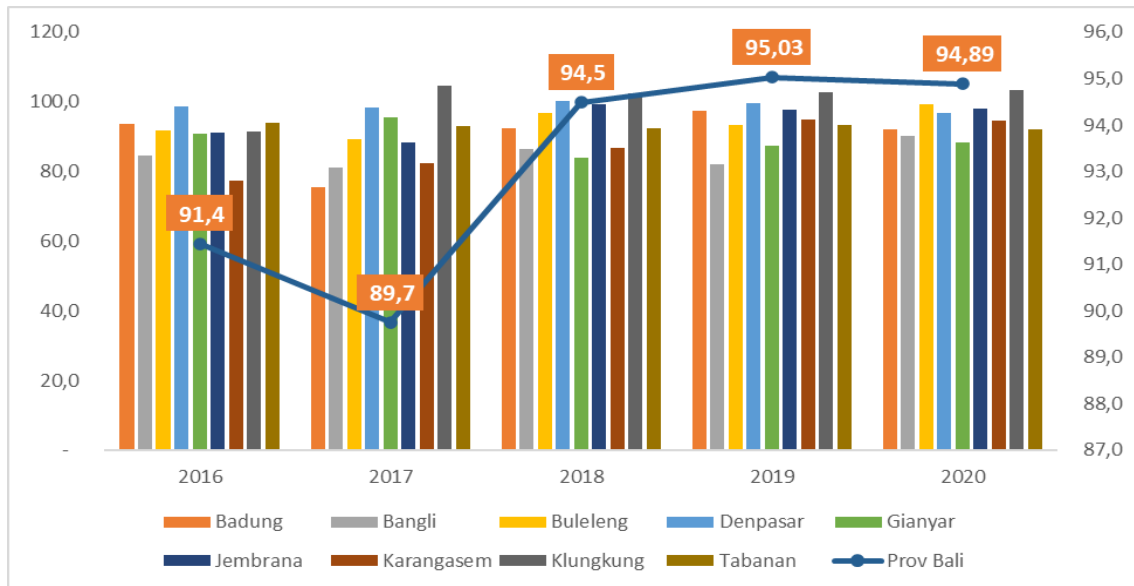


**Gambar 2.73 Persentase Ibu Hamil Yang Memeriksa Kehamilannya Minimal Satu Kali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 38. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 berfluktuasi selama kurun waktu 2016 sampai 2020, sebesar 91,4 persen, 89,7 persen, 94,5 persen, 95,03 persen, dan 94,89 persen. Pada tahun 2020, cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi ada di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 103,4 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Gianyar yaitu 88,4 persen.

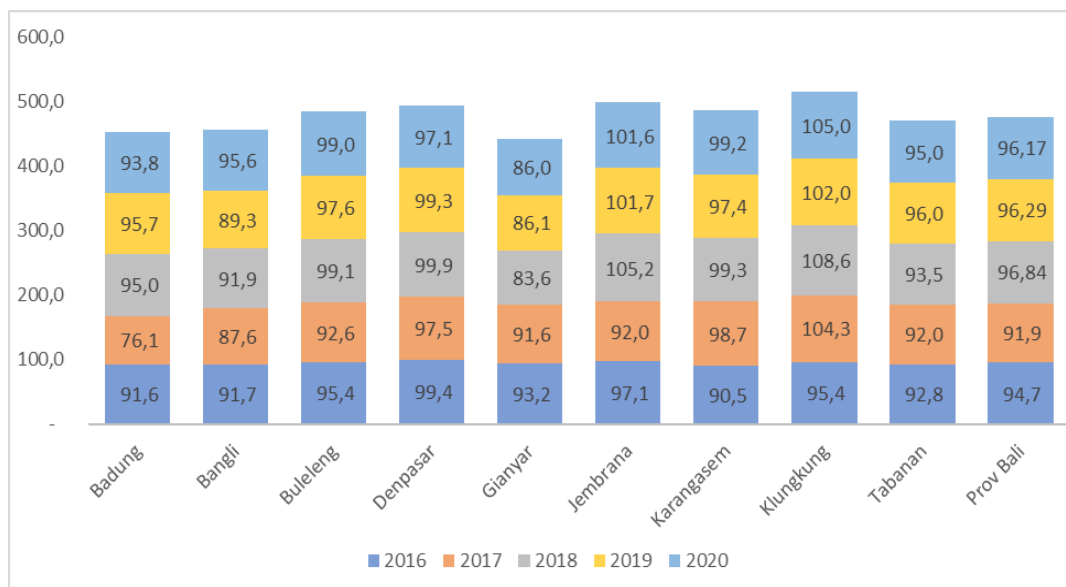


**Gambar 2.74 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 39. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2013 sampai 2020, yaitu 94,7 persen, 91,9 persen, 96,84 persen, 96,29 persen dan 96,17 persen. Pada tahun 2020, cakupan pelayanan nifas tertinggi ada di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 105 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan terendah pada tahun 2020 ada di Kabupaten Gianyar yaitu 86 persen.



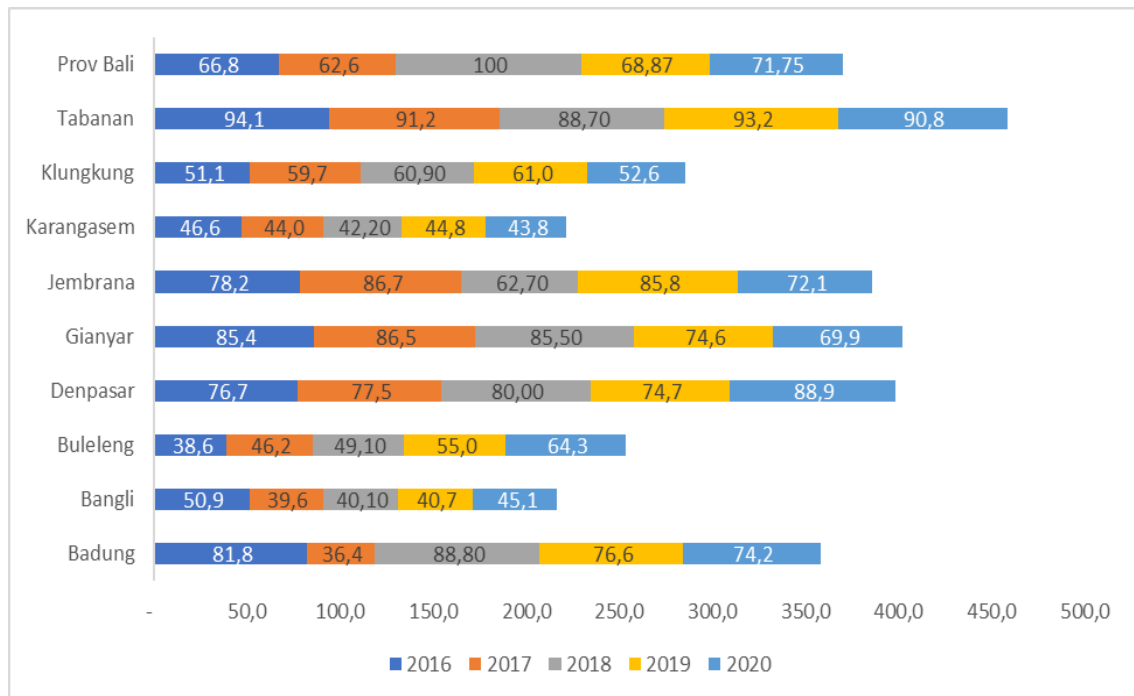
**Gambar 2.75 Cakupan Pelayanan Nifas**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 40. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2016 sampai 2020, yaitu

66,8 persen, 62,6 persen, 100 persen, 68,87 persen dan 71,75 persen. Cakupan neonatus terendah di Provinsi Bali tahun 2020 ada di Kabupaten Karangasem dengan 43,8 persen. Sedangkan, cakupan neonatus tertinggi di Provinsi Bali tahun 2020 yaitu di Kabupaten Tabanan dengan 90,8 persen.



**Gambar 2.76 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 41. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak Balita di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020, yaitu 105,5 persen, 117 persen, 95,6 persen, 92,4 persen dan 71,8 persen. Pada tahun 2020, cakupan pelayanan anak balita terendah ada di Kota Denpasar yaitu 49,5 persen. Sedangkan, cakupan pelayanan balita tertinggi ada di Kabupaten Klungkung dengan 96,9 persen.

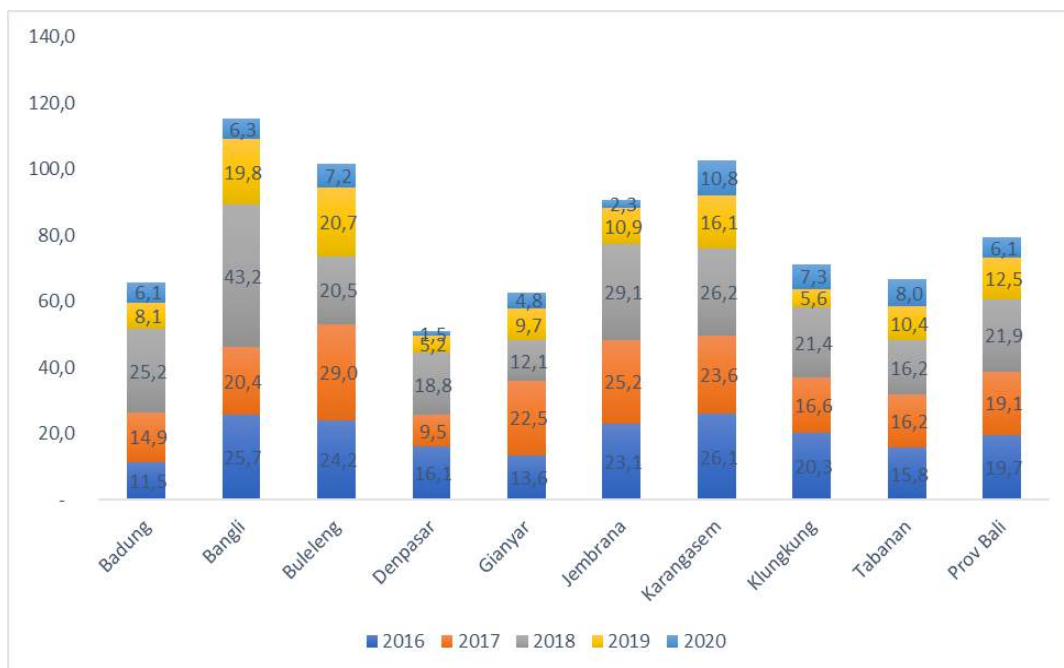


**Gambar 2.77 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 42. Cakupan Balita Pendek/Stunting

Cakupan balita pendek/stunting cenderung mengalami penurunan dari 19,7 persen pada tahun 2016 menjadi 6,1 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2020, cakupan balita pendek/stunting terbesar ada di Kabupaten Karangasem yaitu 10,8 persen dan terendah ada di Kota Denpasar yaitu 1,5 persen.



**Gambar 2.78 Cakupan Balita Pendek/Stunting**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 43. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin hampir mencapai 100 persen selama kurun waktu 2016 sampai 2020. Ini mengindikasikan bahwa pemberian makanan pendamping ASI sudah sangat baik di Provinsi Bali.

**Tabel 2.15 Cakupan Pemberian Makanan Pendampingan Asi**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	N/A	98,9	100	100	100,0
Bangli	N/A	100,0	100	100	100,0
Buleleng	N/A	98,6	100	100	100,0
Denpasar	N/A	100,0	100	100	100,0
Gianyar	N/A	100,0	100	100	100,0
Jembrana	N/A	100,0	100	100	100,0
Karangasem	N/A	100,0	100	100	100,0
Klungkung	N/A	100,0	100	93	94,5
Tabanan	N/A	100,0	100	100	100,0
<b>Provinsi Bali</b>	<b>N/A</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,9</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 44. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Provinsi Bali berfluktuasi selama kurun waktu 2016 sampai 2020, yaitu 98,4 persen, 98,2 persen, 77,6 persen, 95,7 persen dan 45,9 persen. Pada tahun 2020, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan tingkat Provinsi Bali yang yang tertinggi adalah Kota Denpasar sebesar 96,1 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Buleleng sebesar 12,3 persen.

**Tabel 2.16 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	100,0	100,0	100,0	100,0	19,8
Bangli	97,2	99,0	63,5	67,5	18,5
Buleleng	96,1	95,4	49,9	99,5	12,3
Denpasar	99,4	99,3	100,0	99,8	96,1
Gianyar	100,0	96,5	109,1	98,5	47,0
Jembrana	96,2	98,4	-	73,3	14,3
Karangasem	100,0	97,0	90,6	100,0	43,3
Klungkung	100,0	100,0	100,0	100,0	77,9
Tabanan	96,2	98,4	65,1	73,3	14,3
<b>Provinsi Bali</b>	<b>98,4</b>	<b>98,2</b>	<b>77,6</b>	<b>95,7</b>	<b>45,9</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021



#### 45. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin selama kurun waktu 2016 sampai 2020 di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen.

**Tabel 2.17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Badung	100	100	100	100	100
Bangli	100	100	100	100	100
Buleleng	100	100	100	100	100
Denpasar	100	100	100	100	100
Gianyar	100	100	100	100	100
Jembrana	100	100	100	100	100
Karangasem	100	100	100	100	100
Klungkung	100	100	100	100	100
Tabanan	100	100	100	100	100
<b>Provinsi Bali</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 46. Persentase Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar ) Level I

Persentase Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I sudah sangat baik yaitu sebesar 83,33 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 100 persen pada tahun selanjutnya sampai tahun 2020.

**Tabel 2.18 Saranan kesehatan**

<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
RS Umum	100	100	100	100	100
RS Khusus	-	100	100	100	100
Jumlah Kab/Kota	83,33	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 47. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Penyelidikan Epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenal penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan/penyebaran serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dilakukan untuk memastikan adanya Kejadian Luar Biasa/KLB atau setelah terjadi KLB/wabah. Pemerintah

Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah dan selalu melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk kasus-kasus luar biasa yang terjadi di Provinsi Bali.

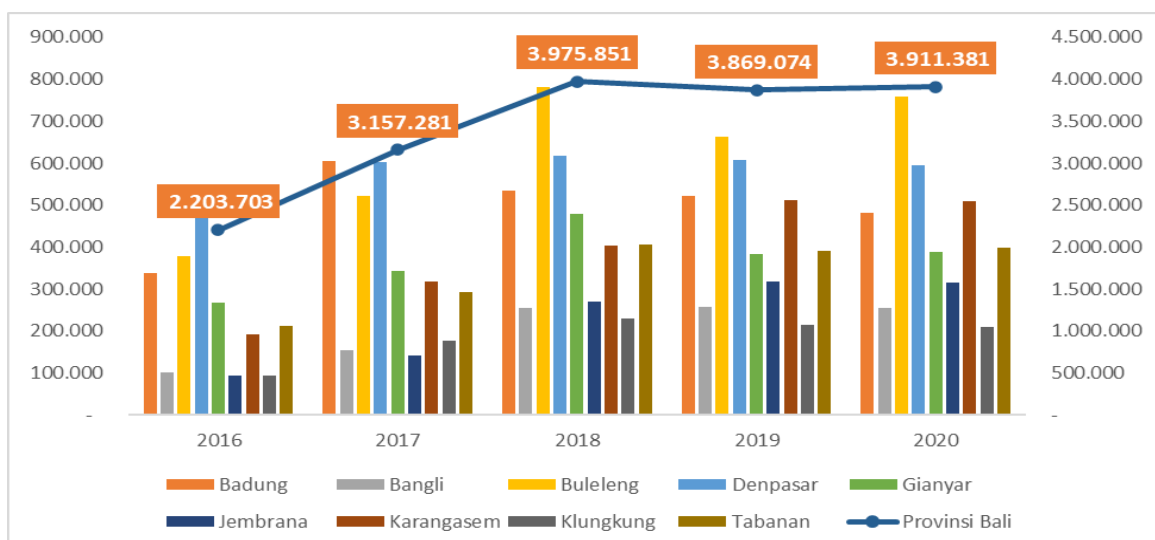
**Tabel 2.19 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB**

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Badung	100	100	100	100	100
Bangli	100	100	100	100	100
Buleleng	100	100	100	100	100
Denpasar	100	100	100	100	100
Gianyar	100	100	100	100	100
Jembrana	100	100	100	100	100
Karangasem	100	100	100	100	100
Klungkung	100	100	100	100	100
Tabanan	100	100	100	100	100
<b>Provinsi Bali</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 48. Jumlah Kepesertaan JKN

Jumlah kepesertaan JKBM meningkat dari 2.061.698 di tahun 2013 menjadi 2.460.477 di tahun 2014. Namun, kepesertaan JKBM mulai menurun pada tahun 2015 dan 2016 hingga mencapai 1.465.912. Selanjutnya dari tahun 2019 dan 2020 seluruh jaminan kesehatan sudah terintegrasi kedalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Tercatat pada tahun 2020 jumlah peserta jaminan kesehatan nasional mencapai 3,9 juta.



**Gambar 2.79 Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JKBM-JKN) di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 49. Jumlah Alokasi Anggaran JKN

Alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan nasional (JKN) di Provinsi Bali dimulai pada tahun 2019 yaitu sebesar 170 triliun dan berkurang menjadi 165 triliun pada tahun 2020. Sebelumnya dari tahun 2016 sampai 2018 alokasi anggaran terbagi menjadi Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan Askes. Untuk JKMB, alokasi anggaran pada tahun 2016 mencapai 163 miliar.

**Tabel 2.20 Jumlah Alokasi Anggaran JKN**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Badung	N/A	N/A	N/A	-	6.503.582.580
Bangli	N/A	N/A	N/A	17.811.770.400	17.244.120.510
Buleleng	N/A	N/A	N/A	44.577.432.198	45.859.959.900
Denpasar	N/A	N/A	N/A	-	2.373.145.980
Gianyar	N/A	N/A	N/A	17.387.216.160	3.968.685.420
Jembrana	N/A	N/A	N/A	24.111.547.542	25.345.266.714
Karangasem	N/A	N/A	N/A	33.716.798.802	33.096.328.722
Klungkung	N/A	N/A	N/A	14.976.160.200	14.177.875.050
Tabanan	N/A	N/A	N/A	17.887.724.496	17.041.264.236
<b>Provinsi Bali</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>170.468.649.798</b>	<b>165.610.229.112</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

#### 50. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Yang Ditanggung JKN

Jumlah kunjungan rawat jalan di PKM yang ditanggung JKN selama tahun 2019 sampai 2020 yaitu 7,9 juta pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 5,2 juta. Sedangkan untuk skala kabupaten/kota jumlah kunjungan rawat jalan yang ditanggung JKN terbesar adalah Kota Denpasar pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2,6 juta menurun pada tahun 2020 menjadi 1,1 juta. Kabupaten dengan jumlah kunjungan rawat jalan terendah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Jembrana yaitu 73 ribu.

**Tabel 2.21 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di PKM yang Ditanggung JKN Tahun 2019-2020**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Badung	N/A	N/A	N/A	943.637	510.356
Bangli	N/A	N/A	N/A	231.218	147.159
Buleleng	N/A	N/A	N/A	782.723	203.698
Denpasar	N/A	N/A	N/A	2.632.503	1.122.967
Gianyar	N/A	N/A	N/A	904.240	424.719
Jembrana	N/A	N/A	N/A	371.064	73.745
Karangasem	N/A	N/A	N/A	377.622	113.326
Klungkung	N/A	N/A	N/A	469.339	128.679
Tabanan	N/A	N/A	N/A	1.283.064	2.487.827
<b>Provinsi Bali</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>7.995.410</b>	<b>5.212.476</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

Jumlah kunjungan rawat inap rumah sakit yang ditanggung JKN pada tahun 2019 adalah sebanyak 374.076 menurun pada tahun selanjutnya menjadi 287.428. Jika dibandingkan dengan skala kabupaten Kota, Kota Denpasar memiliki jumlah pasien yang dirawat inap terbanyak pada tahun 2020 yaitu sebanyak 87.654 sedangkan kabupaten/kota yang memiliki pasien rawat inap terendah adalah Kabupaten Klungkung sebanyak 13.452.

**Tabel 2.22 Jumlah Kunjungan Rawat Inap di PKM Yang Ditanggung JKN**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Badung	N/A	N/A	N/A	41.574	31.900
Bangli	N/A	N/A	N/A	13.888	14.370
Buleleng	N/A	N/A	N/A	51.901	41.560
Denpasar	N/A	N/A	N/A	132.489	87.654
Gianyar	N/A	N/A	N/A	48.909	39.127
Jembrana	N/A	N/A	N/A	18.684	16.287
Karangasem	N/A	N/A	N/A	19.524	16.200
Klungkung	N/A	N/A	N/A	17.751	13.452
Tabanan	N/A	N/A	N/A	29.356	26.878
<b>Provinsi Bali</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>374.076</b>	<b>287.428</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 51. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Bali

Cakupan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara pada tahun 2016 adalah sebesar 40.764. Cakupan pelayanan ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2020 jumlah cakupan pelayanan hanya mencapai 26.470 atau hampir 50% dari tahun 2016. Penurunan cakupan ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah semakin banyaknya ketersediaan faskes (rumah sakit) daerah di masing-masing kabupaten/kota yang mampu memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Dengan demikian masyarakat dari lokasi yang lebih jauh bisa memilih faskes yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

**Tabel 2.23 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Badung	7.293,0	3.134,0	3.263	3.900	2.798
Bangli	1.656,0	841,0	1.306	1.385	744
Buleleng	1.574,0	1.277,0	1.968	2.789	2.127
Denpasar	10.776,0	22.914,0	14.885	14.630	8.298
Gianyar	7.022,0	2.964,0	3.763	4.133	2.694
Jembrana	1.632,0	666,0	1.031	1.209	1.103
Karangasem	2.764,0	1.540,0	2.199	3.058	1.787
Klungkung	3.250,0	2.363,0	3.724	4.141	2.346
Tabanan	4.797,0	1.946,0	2.708	3.482	2.553
<b>Provinsi Bali</b>	<b>40.764,0</b>	<b>37.645,0</b>	<b>34.847</b>	<b>38.727</b>	<b>26.470</b>

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.24 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bali Mandara**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	BOR	10,36	23,00	35,10	35,10
2	LOS	4,20	4,94	4,97	4,97
3	TOI	6,58	20,17	30,47	30,47
4	BTO	5,43	13,94	7,78	7,78
5	GDR	6	27	22	22
6	NDR	24	37	31	31
7	RAJAL	2796	40581	59498	51203
8	RANAP	200	40645	4294	5129
9	IGD	426	1645	12997	10515

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 52. Kasus Penyakit Tropis yang Terabaikan

Menurut situasi di Indonesia, penyakit tropis yang terabaikan yang dipilih adalah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit filariasis dan kusta. Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium leprae*.

Di Provinsi Bali tidak pernah ditemukan penyakit filariasis. Penyakit tropis yang terabaikan di Bali adalah kusta. Jumlah kasus baru kusta di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dalam periode 2015-2019, oleh karena itu jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan ini cenderung meningkat dimana diproyeksikan jumlah kasus baru kusta mencapai 156 kasus pada tahun 2030.

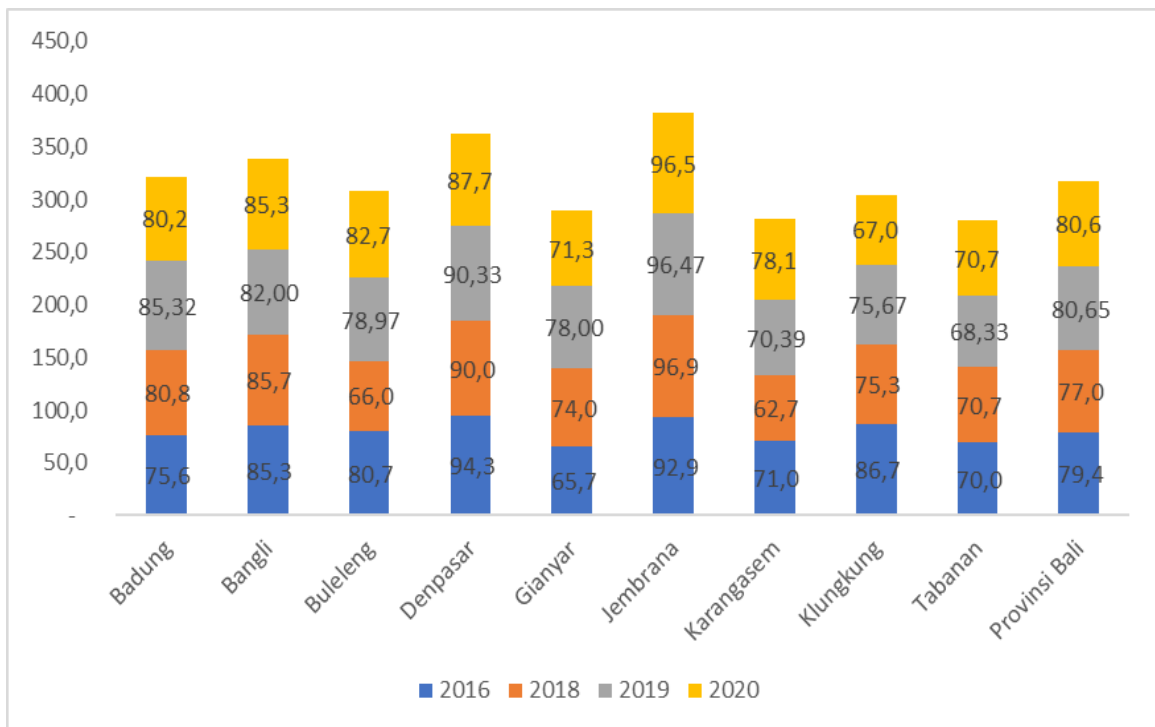


**Gambar 2.80 Jumlah Kasus Kusta Baru di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

## 53. Cakupan Konsumsi Garam Beryodium di Rumah Tangga

Konsumsi garam beryodium di rumah tangga mengalami peningkatan dari 79,4 persen pada tahun 2016, menurun menjadi 77,0 persen pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 80,65 dan terus meningkat sampai 80,6 pada tahun 2020. Pada tahun 2020, cakupan terbesar terjadi di Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 96,50 persen dan terendah ada di Kabupaten Klungkung yaitu 67,0 persen.



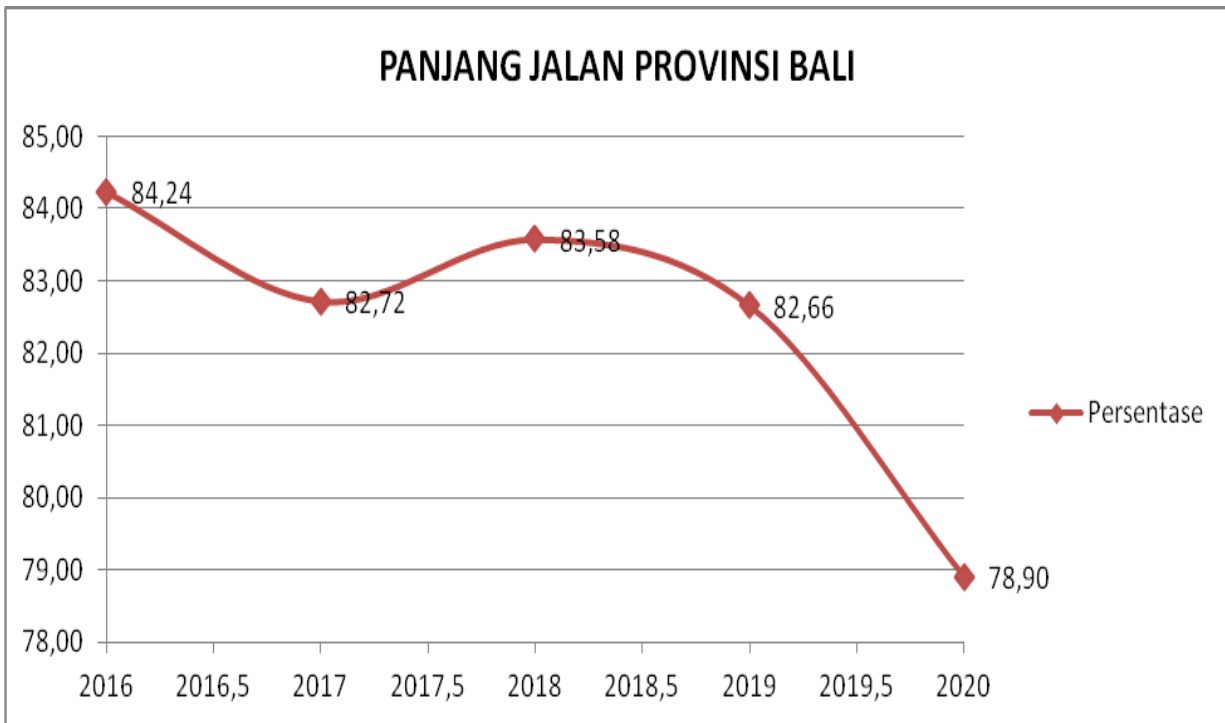
**Gambar 2.81 Cakupan Konsumsi Garam Beryodium di Rumah Tangga**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 84,24%. Kondisi ini mengalami penurunan di beberapa titik, tetapi ada juga peningkatan di beberapa tempat karena mendapat penanganan. Sampai di akhir tahun 2020 kondisi mantap menjadi 78,90%. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas pendanaan yang mendukung peningkatan kualitas jalan dan jembatan baik dari APBD maupun APBN dipandang belum memadai ditambah lagi dengan potensi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh volume/beban yang ditimbulkan oleh kendaraan yang melintas di jalan dan jembatan serta kontribusi penurunan kualitas jalan dan jembatan oleh penyedia layanan utilitas yang jaringannya dibawah jalan.



**Gambar 2.82 Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020**

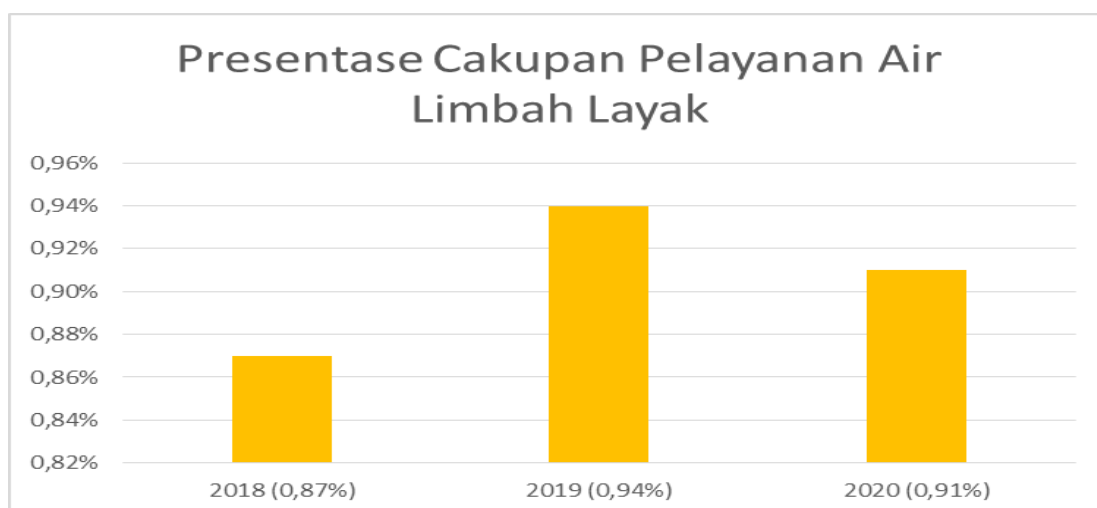
Sumber Data : DPUPR Perkim Provinsi Bali, 2021

## 2. Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak

Presentase Layanan Air Limbah Layak adalah salah satu indikator penentu kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi Bali. Indikator tersebut memberikan gambaran terhadap kondisi lingkungan yang sehat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Berdasarkan data Rekapitulasi Pelanggan Air Limbah pada UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, persentase pelanggan eksisting dibandingkan dengan jumlah KK Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk tahun 2018 sebesar 0,87%, tahun 2019 sebesar 0,94% dan tahun 2020 sebesar 0,91%. Capaian tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan *refocusing* anggaran pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional serta penurunan jumlah pelanggan yang tutup sementara karena dampak.





**Gambar 2. 83 Presentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak**

Sumber Data : DPUPR Perkim Provinsi Bali, 2021

### 3. Persentase Jaringan Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik

Dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Provinsi Bali dibagi sesuai dengan kewenangan diantaranya pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap daerah Irigasi dengan luasan lebih dari 3000 ha, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pada sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap daerah Irigasi dengan luasan kurang dari 1000 ha.

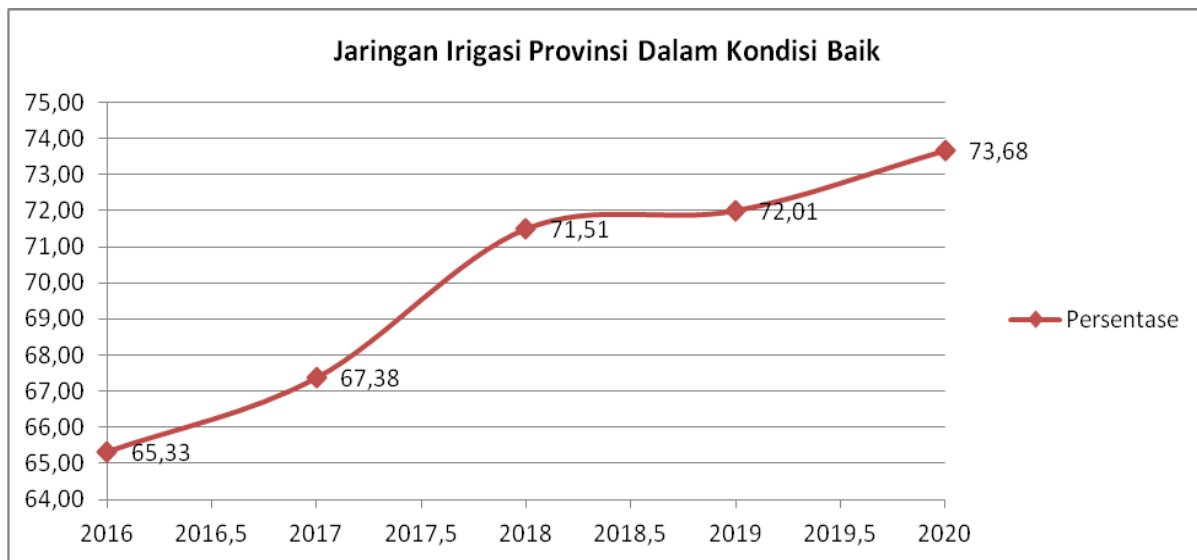
**Tabel 2.25 Inventaris Bendung dan Panjang Saluran Irigasi Daerah Irigasi di Provinsi Bali**

Kewenangan	Luas Baku (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Jaringan Irigasi						
			Bendung/Pengambilan	Bangunan Air	Saluran Pembawa Primer	Saluran Pembawa Sekunder	Saluran Pembuangan	Saluran Tersier	Total Saluran
Pusat									
Provinsi	9271	6808	21	999	67789	105183	-	267602	440574

Sumber: DPUPR Perkim Provinsi Bali, 2021

Rasio jaringan irigasi yang ada di Provinsi Bali sebesar 47,52 (dalam 1 ha sawah memiliki panjang saluran irigasi 47,52 km). Untuk Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi, kondisi jaringan irigasi terus diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dalam kurun waktu tertentu terdapat penurunan angka yang diakibatkan oleh penurunan kondisi jaringan irigasi yang signifikan serta bersifat tidak terduga. Pada tahun 2016-2020, persentase kondisi jaringan irigasi provinsi dalam kondisi

baik berturut-turut : 65,33 persen, 67,38 persen, 71,51 persen, 72,01 persen, dan 73,68 persen pada tahun 2020.



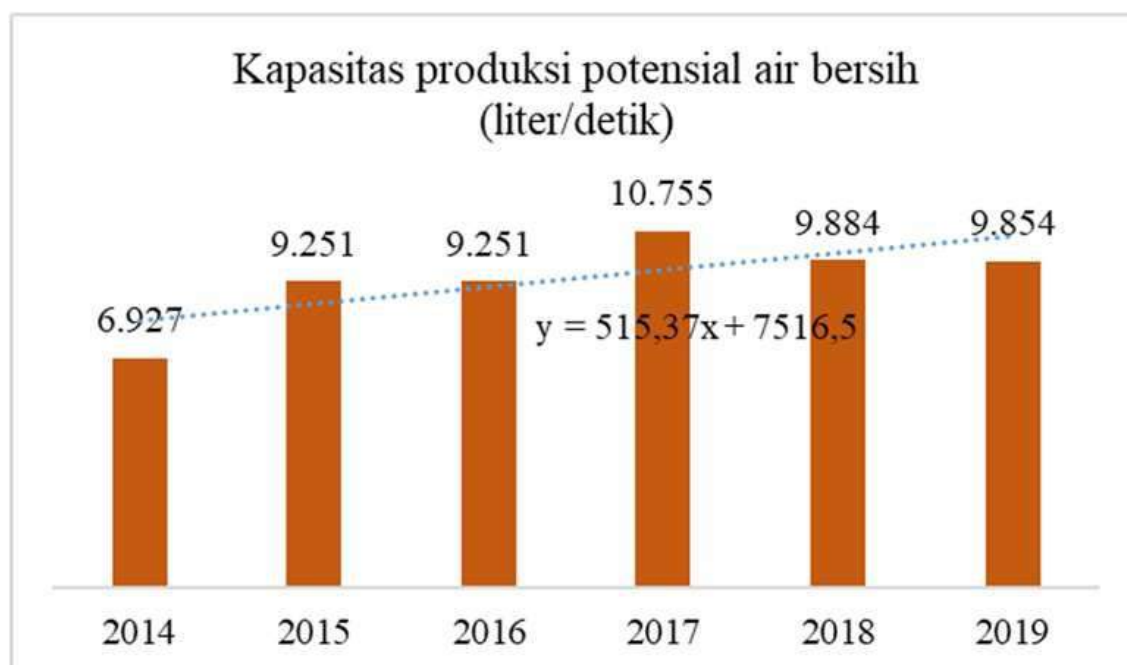
**Gambar 2. 84 Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik**

Sumber Data : DPUPR Perkim Provinsi Bali, 2021

#### **4. Kapasitas Prasarana Air Baku**

Infrastruktur air bersih atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Bali tahun 2019 terdiri atas SPAM regional, SPAM IKK, SPAM perdesaan, dan SPAM strategis yang dikelola oleh 20 perusahaan air minum di seluruh kabupaten/kota, tersebar di Kabupaten Buleleng 11 perusahaan, Klungkung 2 perusahaan dan kabupaten/kota lainnya masing masing 1 perusahaan.

Dalam periode 2014-2019, jumlah perusahaan air bersih di Bali tidak mengalami perubahan. Jumlah kapasitas sumber untuk pelayanan air baku perpipaan pada perusahaan air minum di seluruh wilayah kabupaten/kota di Bali tahun 2019 sebesar 9.854 liter/detik. Kapasitas prasarana produksi air baku di Bali menurun sejak tahun 2018 yaitu menjadi 9.884 liter/detik dari 10.755 liter/detik pada tahun 2017. Dengan penambahan jumlah penduduk maka kapasitas penyediaan air bersih masih perlu ditingkatkan.

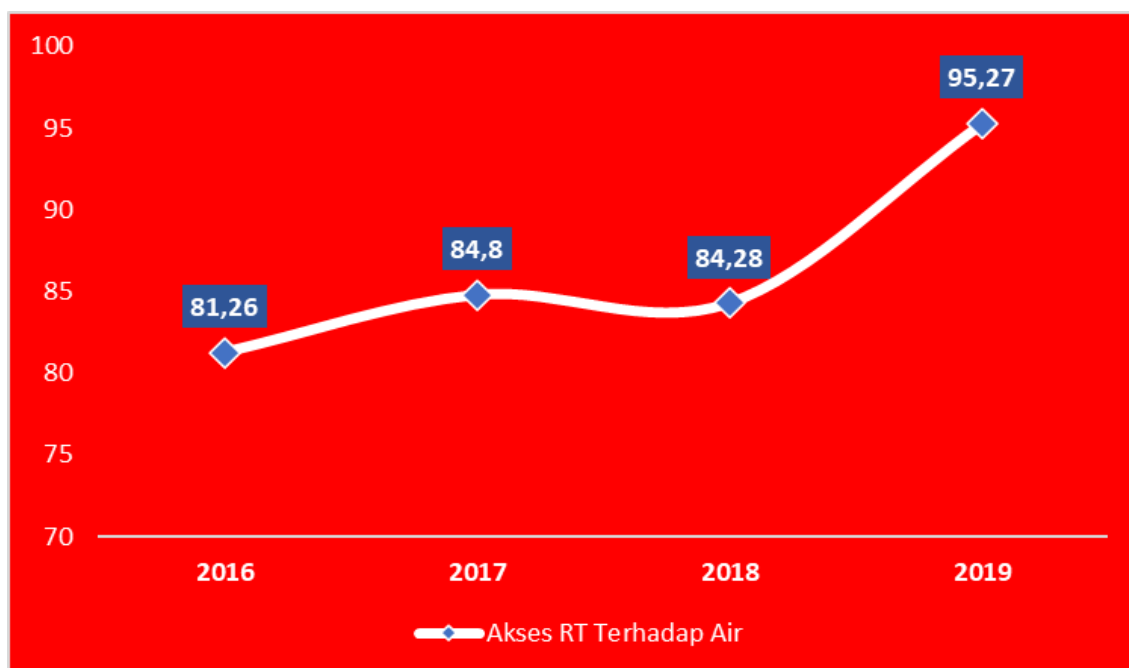


**Gambar 2. 85 Kapasitas Produksi Potensial Air Bersih di Provinsi Bali Tahun 2016-2019**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2020

## **5. Persentase Penduduk yang Berakses Air Minum Aman di Provinsi Bali**

Persentase Penduduk yang Berakses Air Minum Aman di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tercatat pada tahun 2016 akses rumah tangga (RT) terhadap air minum aman adalah sebesar 81,26 persen terus meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi 95,27 persen. Ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat sudah mampu mengakses air minum dengan baik. Hal ini disebabkan oleh terbangunnya SPAM regional yaitu: SPAM Petanu, SPAM Penet, dan SPAM Telaga Waja serta perampungan pembangunan SPAM Regional Burana Titab yang akan memenuhi kebutuhan air bersih/air minum di Kabupaten Buleleng dan Jembrana serta SPAM Skala Perdesaan.



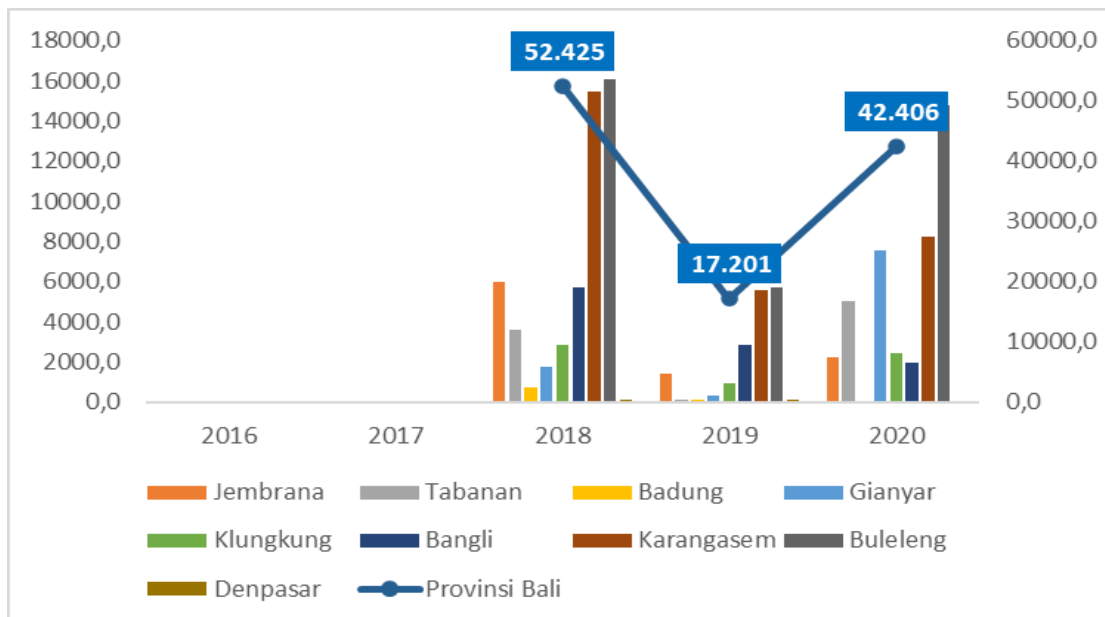
**Gambar 2.86 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Berakses Air Minum Aman di Provinsi Bali**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

##### **1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni**

Program kegiatan urusan Rumah Tidak Layak Huni baru memiliki data backlog dan Jumlah RTLH pada tahun 2018 dengan jumlah 52.425 unit rumah. Tahun 2019 data menunjukkan penurunan jumlah RTLH menjadi 17.201 unit pada akhir tahun 2019 setelah data RTLH dikurangi dengan realisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari kegiatan pemerintah provinsi sebanyak 7 unit di Desa Ababi, Karangasem, dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta melalui program perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Namun, terjadi peningkatan data RTLH Pada Tahun 2020 menjadi 42.406 unit. Tahun 2020 hingga 2021, tidak terdapat realisasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid19 serta Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai pada Permendagri 90 tahun 2019. Tahun 2021 data menunjukkan peningkatan jumlah RTLH menjadi 47.538 unit bersumber dari SIBARU dan eRTLH.



**Gambar 2.87 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bali**

Sumber Data : DPUPR Perkim Provinsi Bali, 2021

## 2. Luas Kawasan Kumuh

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota se-Bali, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 745,12 Ha luas kawasan kumuh yang tersebar di Kabupaten/Kota. Sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk kawasan kumuh kewenangan pusat (>15 Ha) seluas 511,74 Ha, kewenangan provinsi (10-15 Ha) seluas 42,74 Ha, dan kewenangan kabupaten seluas 190,64 Ha. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu kawasan kumuh kewenangan pusat (>15 Ha) seluas 511,74 Ha, kewenangan provinsi (10-15 Ha) seluas 49,74 Ha, dan kewenangan kabupaten seluas 190,64 Ha. Ini mengindikasikan bahwa program penangan kumuh yang berhasil dilakukan adalah kawasan kumuh pada level provinsi yaitu sebesar 7 Ha. Program penangan kawasan kumuh yang dilakukan meliputi penataan infrastruktur kawasan, penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan peningkatan layanan. Pada tahun 2020 tidak ada program penanganan kumuh yang dilakukan karena adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga jumlah kawasan kumuh yang menjadi tanggung jawab Provinsi Bali masih sama dengan data pada tahun 2019 yaitu 42,74 Ha. Selanjutnya ini akan menjadi prioritas pemerintah agar pada tahun-tahun selanjutnya jumlah kawasan kumuh di Provinsi Bali bisa dikurangi sampai dengan 0 persen.

**Tabel 2.26 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2019**

Kewenangan	Kawasan Kumuh berdasarkan SK Bupati/Wali Kota(Ha)	Tertangani (Ha)	Belum tertangani (Ha)
Nasional	511,74		
Prov	49,74	7	42,74
Kab/Kota	190,64		
<b>Total</b>	<b>554,48</b>		

Sumber Data : DPUPR Perkim Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.27 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Bali Tahun 2020**

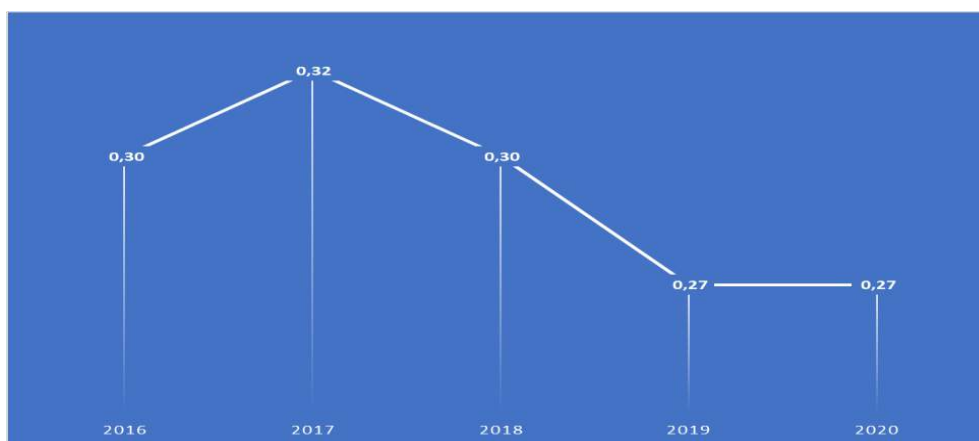
Kewenangan	Kawasan Kumuh berdasarkan SK Bupati/Wali Kota(Ha)	Tertangani (Ha)	Belum tertangani (Ha)
Nasional	511,74		
Prov	42,74	7	
Kab/Kota	190,64		
<b>Total</b>	<b>554,48</b>		

Sumber Data : DPUPR Perkim Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan dari 0,33 pada tahun 2016 menjadi 0,27 pada tahun 2020. Selama kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan rasio jumlah satpo pp sebanyak 0,03. Angka ini menunjukkan bahwa penurunannya yang terjadi tidak begitu besar, tetapi angka ini menunjukkan bahwa jumlah satpol pp di Provinsi Bali tergolong kecil.

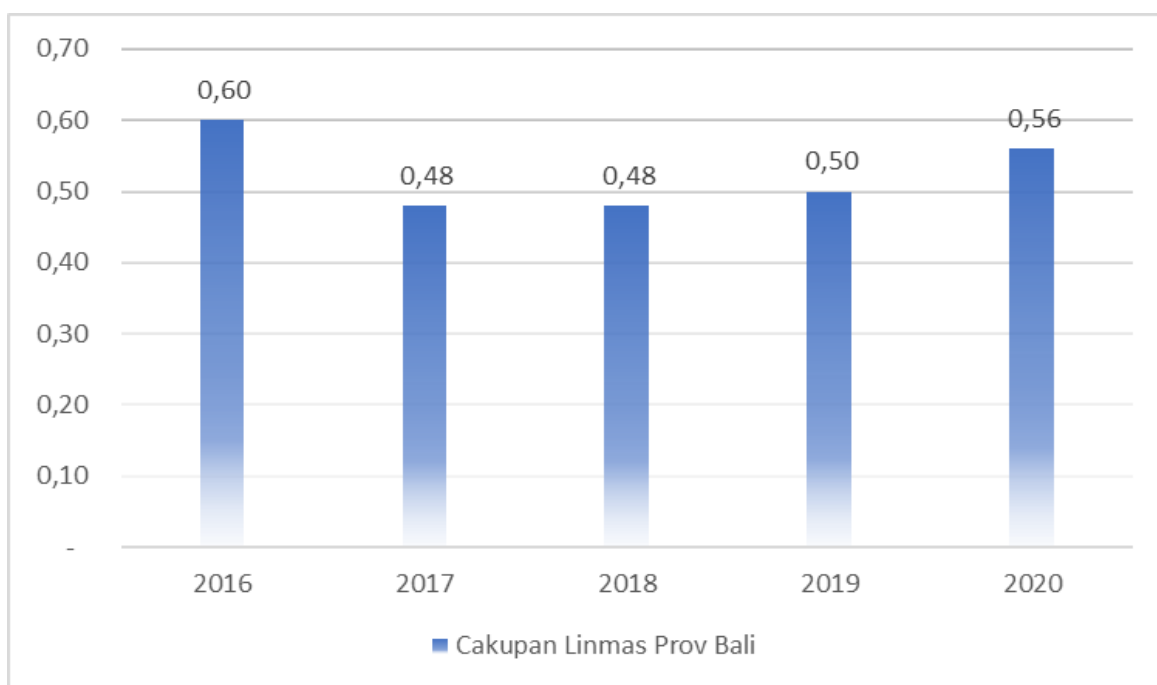


**Gambar 2. 88 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk**

Sumber Data : Satpol PP Provinsi Bali, 2021

## 2. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan pelayanan linmas di Provinsi Bali dari tahun 2016-2020 terjadi sedikit fluktuasi. Pada tahun 2016 cakupan Linmas sebesar 0,6 menurun menjadi 0,48 pada tahun 2017 dan 2018. Angka tersebut meningkat menjadi 0,56 pada tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah perlindungan masyarakat mulai dari tahun 2018 ke tahun 2020.

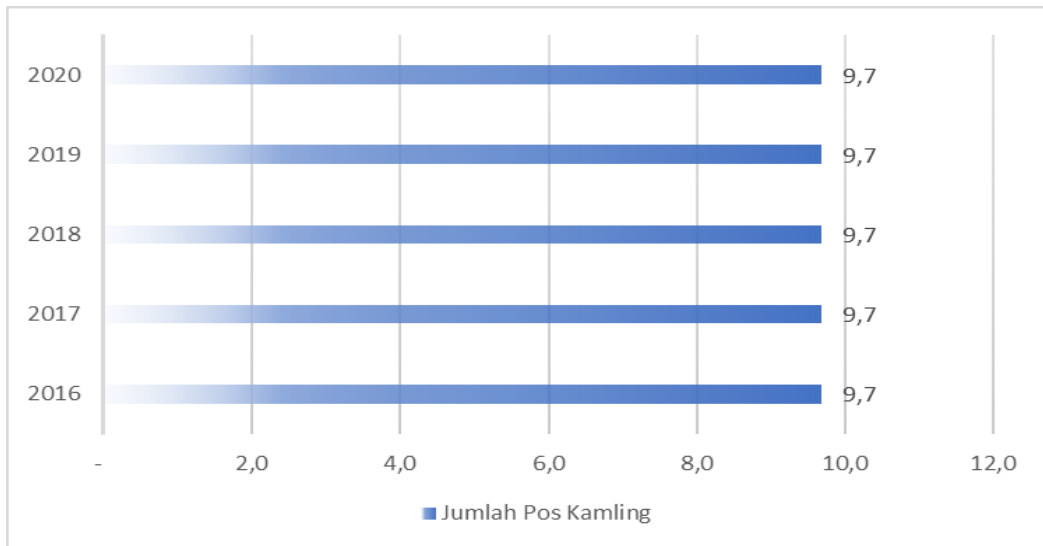


**Gambar 2. 89 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Bali**

Sumber Data : Satpol PP Provinsi Bali, 2021

## 3. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2020 di Provinsi Bali tercatat sebesar 0,97%. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari data kabupaten/kota di Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki rasio pos siskamling terbesar yaitu 8,8% sedangkan kabupaten yang memiliki angka terendah adalah Kota Denpasar dengan nilai 1,0%.



**Gambar 2. 90 Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan**

Sumber Data : Satpol PP Provinsi Bali, 2021

#### **4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)**

Selama tahun 2016 sampai 2020, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) telah mencapai 100 persen. Hal tersebut berarti seluruh jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2016 sampai 2020 telah dapat diselesaikan.



**Gambar 2. 91 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Provinsi Bali**

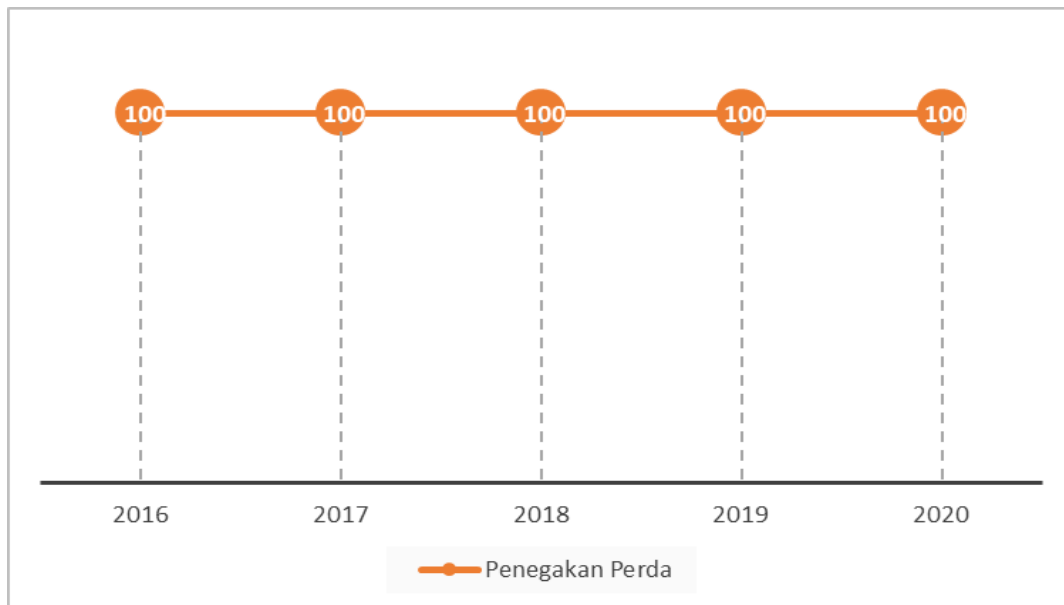
Sumber Data : Satpol PP Provinsi Bali, 2021

#### **5. Persentase Penegakan PERDA**

Persentase penegakan perda di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 telah mencapai 100 persen. Persentase tersebut mengindikasikan



bahwa jumlah seluruh pelanggaran perda yang terjadi telah dapat diselesaikan.



**Gambar 2. 92 Persentase Penegakan Perda di Provinsi Bali**

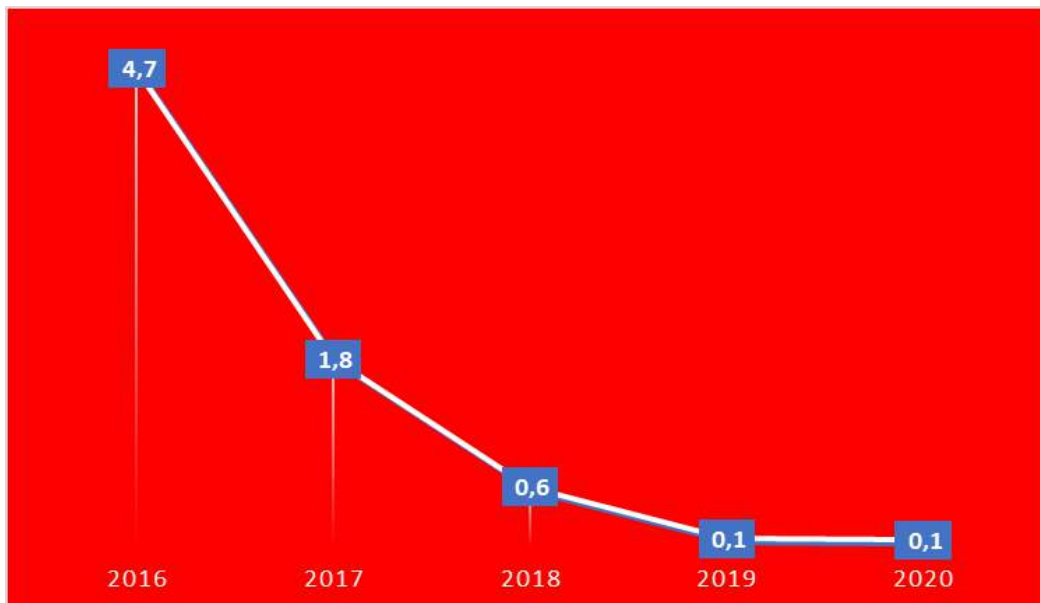
Sumber Data : Satpol PP Provinsi Bali, 2021

### **2.3.1.6 Sosial**

#### **1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial**

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Bantuan Sosial untuk PMKS di Provinsi Bali, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.93 memperlihatkan tren penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 bantuan sosial kepada PMKS melalui dana APBD masih dilaksanakan di luar dan di dalam panti sosial sedangkan mulai tahun 2018 bantuan sosial kepada PMKS dilaksanakan hanya di dalam panti sosial sesuai kewenangan Provinsi sehingga dibandingkan dengan besaran data PMKS yang ada di Provinsi Bali besarnya bantuan sosial tidak bisa menyamai jumlah PMKS sehingga capaian dari tahun ke tahun akan terlihat menurun.

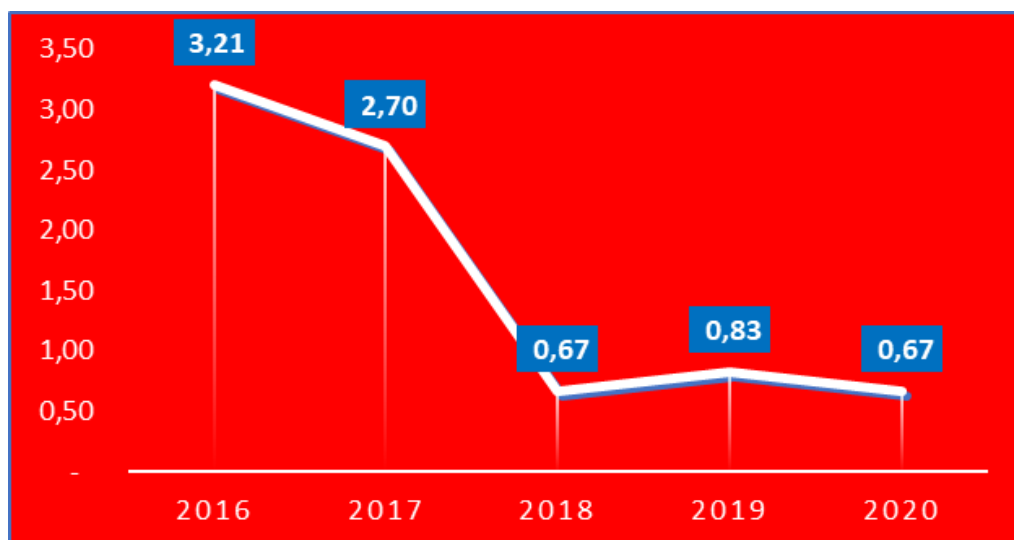


**Gambar 2. 93 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Bali, 2021

## 2. Persentase PMKS Yang Tertangani

Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, persentase PMKS yang tertangani mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang bisa memberikan bantuan sosial kepada PMKS yang ada di panti sosial. Dari Gambar 2.94 terlihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan angka PMKS yang tertangani yaitu 3,21 persen pada tahun 2016 menjadi 0,67 pada tahun 2020.

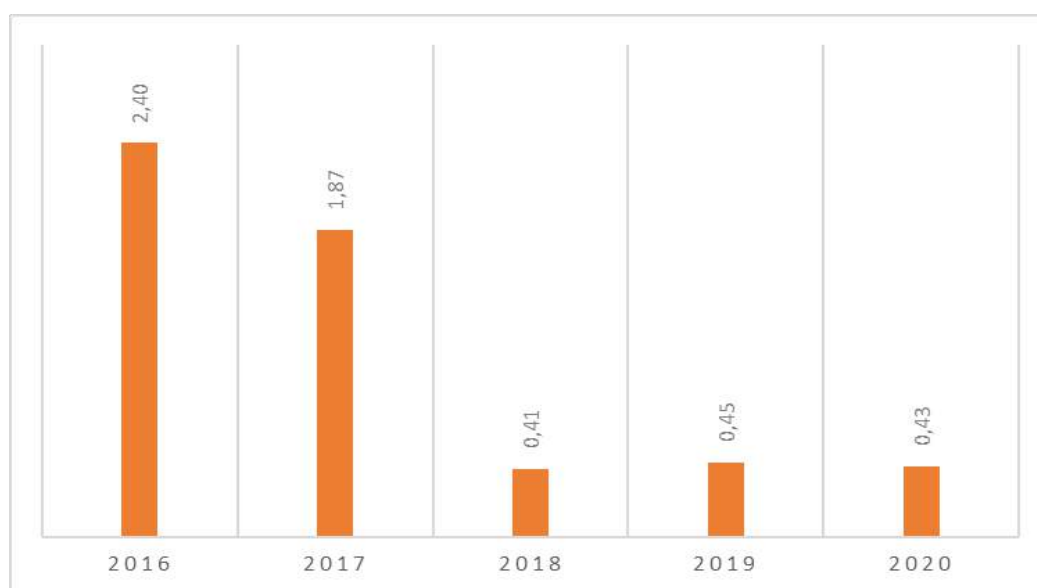


**Gambar 2. 94 Persentase PMKS Yang Tertangani di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Bali, 2021

### **3. Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Sejalan dengan penurunan anggaran untuk bantuan sosial kepada PMKS karena pengaruh kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Maka jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dari pemerintah juga mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada Gambar 2.95, persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2016 adalah sebesar 2,4 persen dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 0,43 persen.

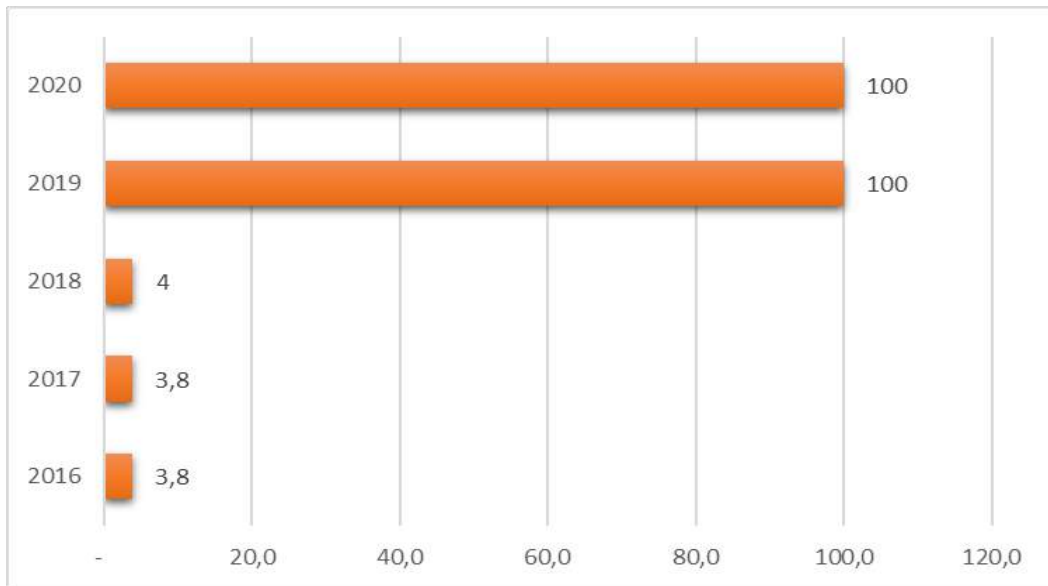


**Gambar 2. 95 Persentase PMKS Skala Yang Memeproleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Bali, 2021

### **4. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial mewajibkan terpenuhinya kebutuhan dasar, sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam panti sosial. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial mengalami peningkatan yang drastis terutama pada tahun 2019. Menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Bali, persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial pada tahun 2016 dan 2017 adalah 3,8 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 setiap panti sosial sudah bisa menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial.

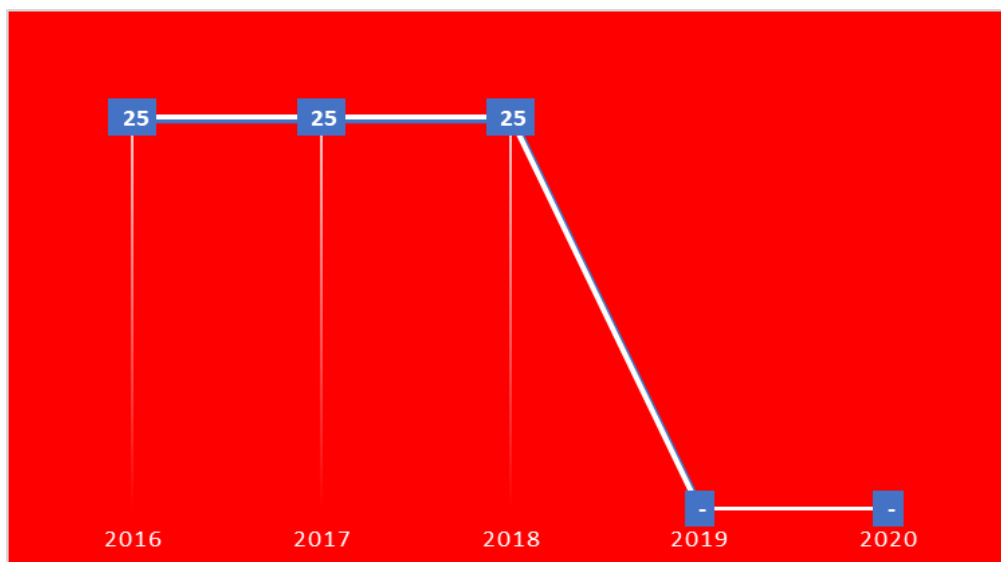


**Gambar 2. 96 Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Bali, 2021

#### **5. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 cenderung datar yaitu sebesar 25 persen. Tahun 2019 sampai sekarang tidak memberikan bantuan lagi karena disarankan untuk memanfaatkan sarana prasarana yang ada di desa.

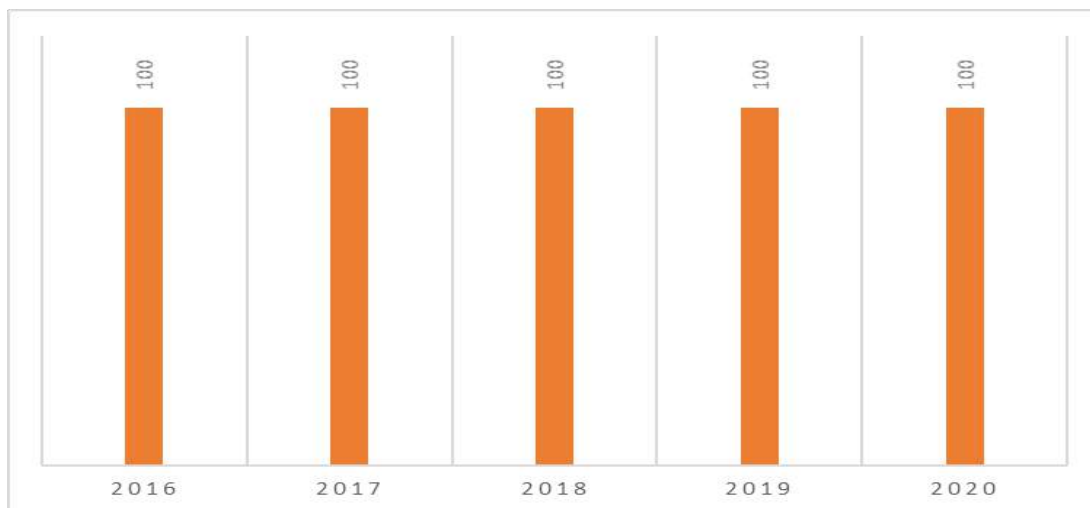


**Gambar 2. 97 Persentase WKBSM Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Bali, 2021

## 6. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, capaian korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Provinsi Bali telah mencapai 100 persen.

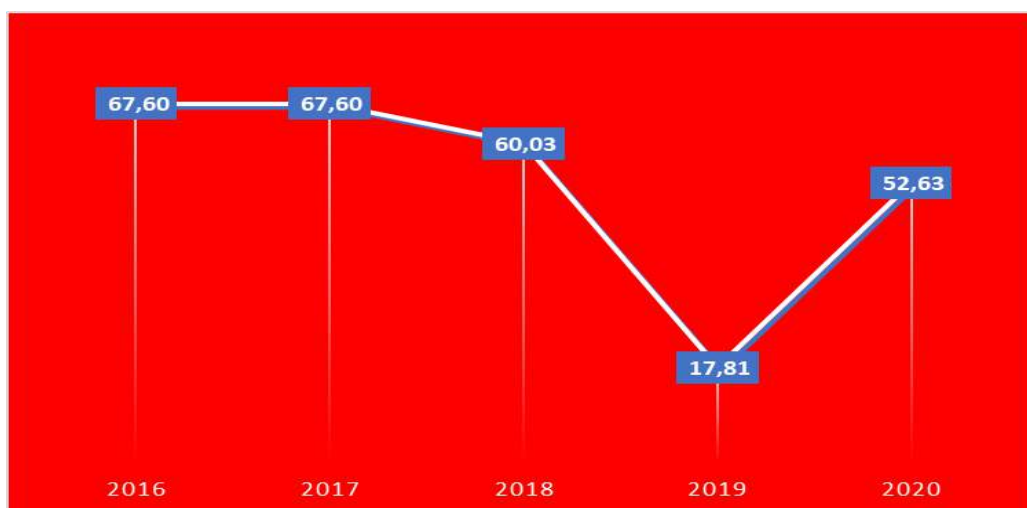


**Gambar 2. 98 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Bali, 2021

## 7. Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, Provinsi Bali memiliki persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 67,6 persen.



**Gambar 2. 99 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Bali**

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi Bali, 2021

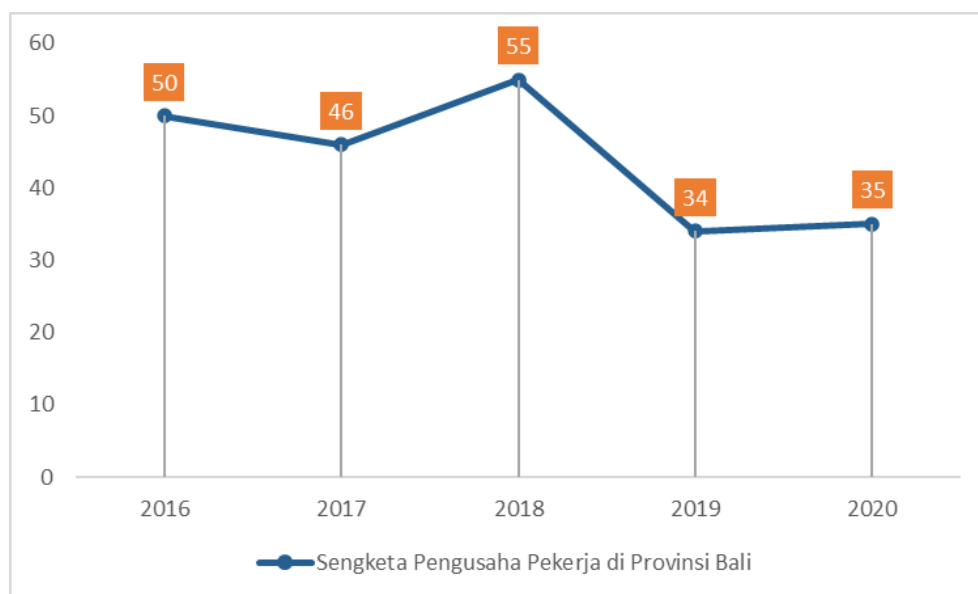
### 2.3.1.7 Tenaga Kerja

#### 1. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha pekerja pada tahun 2016 sebesar 50, angka tersebut menurun pada tahun selanjutnya menjadi 46 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 55 sengketa, namun selanjutnya secara berturut-turut pada tahun 2019 menurun menjadi 34 dan pada tahun 2020 menjadi 35.

Sengketa pengusaha pekerja biasanya terjadi karena adanya perbedaan penafsiran para pihak terhadap Perjanjian Kerja (PK)/Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga memicu terjadinya perselisihan. Perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya secara Bipartit (pengusaha-pekerja). Jika belum menemukan jalan keluar, maka dilakukan proses mediasi oleh mediator di masing-masing kabupaten/kota. Akan tetapi, jika di Disnaker kabupaten/kota tidak memiliki Mediator, atau permasalahan belum dapat terselesaikan, maka sengketa akan dilanjutkan melalui proses mediasi di Disnaker Provinsi.

Data sengketa pengusaha pekerja yang disajikan adalah sengketa yang proses penyelesaiannya difasilitasi oleh Disnaker ESDM Provinsi Bali. Capaian yang disajikan berdasarkan surat permohonan dari kabupaten/kota, dan bukan target yang ditetapkan oleh Provinsi karena sengketa pengusaha pekerja diharapkan tidak ada/tidak terjadi.



**Gambar 2. 100 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Provinsi Bali**

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.28 Tingkat Hubungan Industrial di Provinsi Bali**

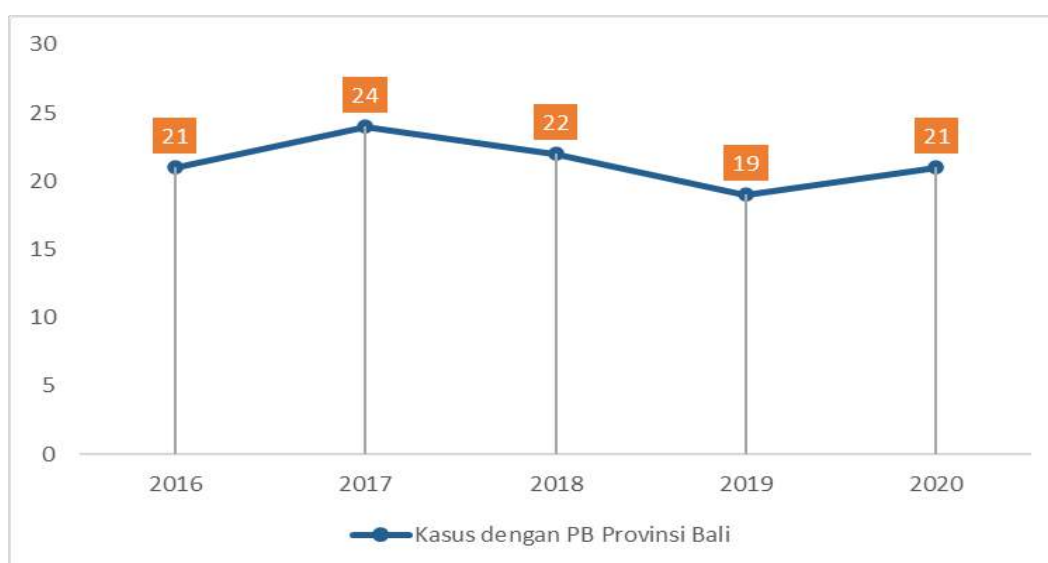
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus	50	46	55	34	35
2	PB	21	24	22	19	21
		Anjuran : 29	Anjuran : 22	Anjuran : 33	Anjuran : 14	Anjuran : 14

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

## 2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Pada tahun 2016, besaran kasus yang diselesaikan dengan PB sebesar 21, angka tersebut meningkat menjadi 24 pada tahun 2017. Namun, besaran kasus yang diselesaikan dengan PB mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 22 dan pada tahun 2019 menjadi 19. Pada tahun 2020, besaran kasus yang diselesaikan dengan PB meningkat kembali menjadi 21.

Sengketa pengusaha pekerja yang terjadi, yang tidak terselesaikan secara bipartit maupun mediasi oleh kabupaten/kota, maka akan diupayakan penyelesaiannya di provinsi. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) melalui mediasi oleh mediator di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada umumnya penyelesaiannya disepakati melalui perjanjian bersama, dan jika tidak maka akan diselesaikan melalui Anjuran. Data kasus yang disajikan adalah kasus yang proses penyelesaiannya difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan hasil kesepakatan melalui Perjanjian Bersama (PB).



**Gambar 2. 101 Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**

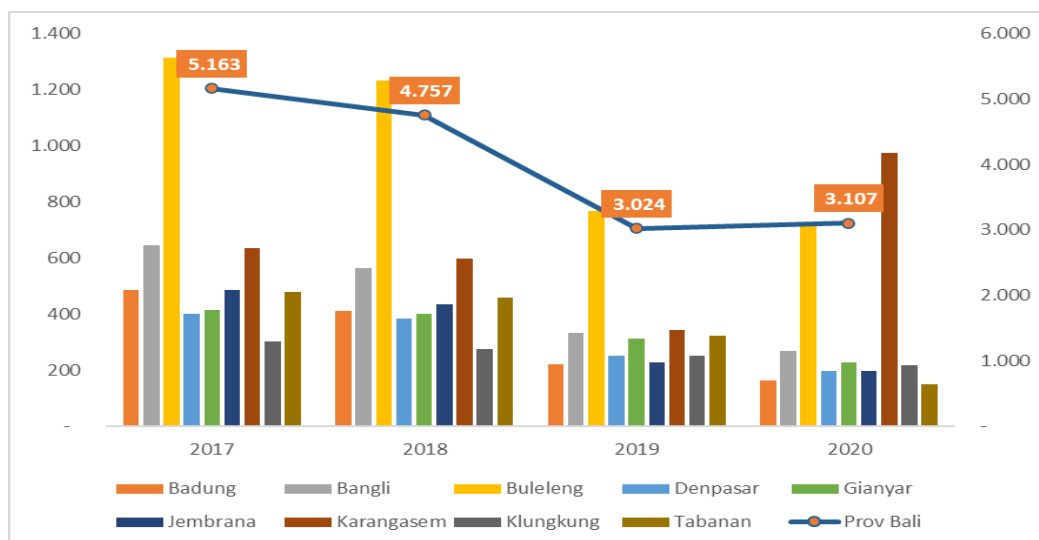
Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

### 3. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Data penempatan yang disajikan adalah data penempatan berdasarkan Informasi Pasar Kerja (IPK). Berdasarkan data tersebut besaran pencari kerja yang terdaftar di Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu dari 5.163 pada tahun 2017 menjadi 4.757 pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 3.024, pada tahun 2020 menjadi menjadi 3.107.

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Bali, disajikan berdasarkan yang terdata melalui Informasi Pasar Kerja (IPK). Berbagai faktor mempengaruhi peningkatan dan penurunan pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dari tahun ke tahun. Secara umum, faktor tersebut diantaranya:

1. terbatasnya lowongan kerja/permintaan tenaga kerja dari dunia usaha/instansi, serta kurangnya informasi mengenai lowongan kerja yang tersedia bagi pencari kerja.
2. minimnya tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan lowongan yang ada.
3. pencari kerja memilih-milih pekerjaan, dan rendahnya motivasi pencari kerja ke arah usaha mandiri.



**Gambar 2. 102 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan di Provinsi Bali**

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

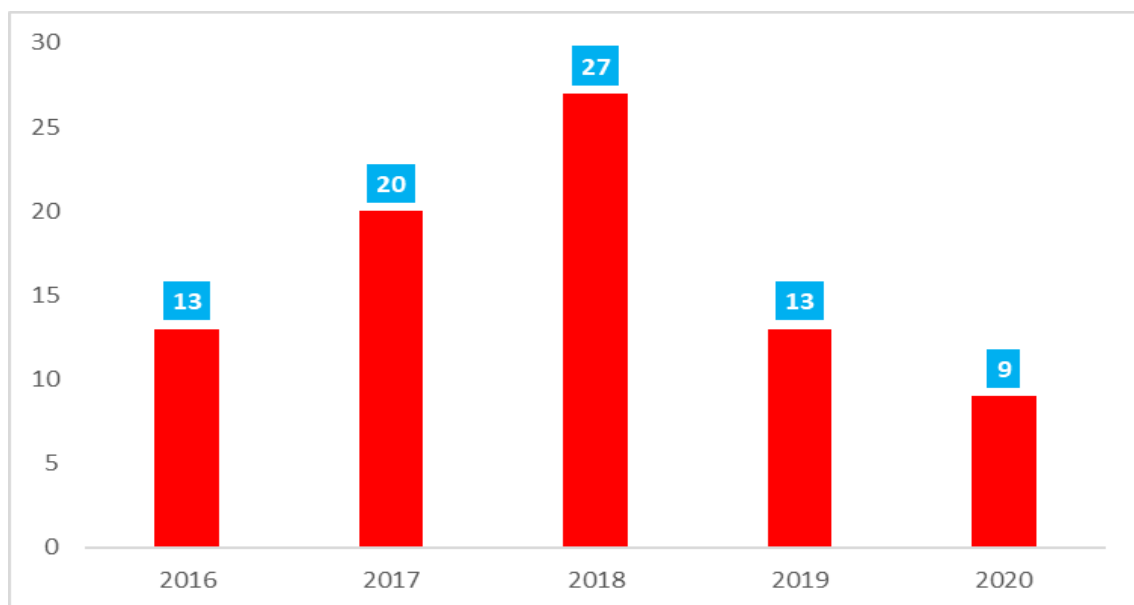
### 4. Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016, keselamatan dan



perlindungan sebesar 13 meningkat menjadi 27 pada tahun 2018 dan menurun menjadi 9 pada tahun 2020.

Keselamatan dan perlindungan merupakan kegiatan pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnaker ESDM Provinsi Bali, terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di perusahaan. Pencapaian target setiap tahunnya mengacu pada target yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya. Capaian dan target setiap tahunnya berbasis pada anggaran.



**Gambar 2. 103 Keselamatan dan Perlindungan di Provinsi Bali**

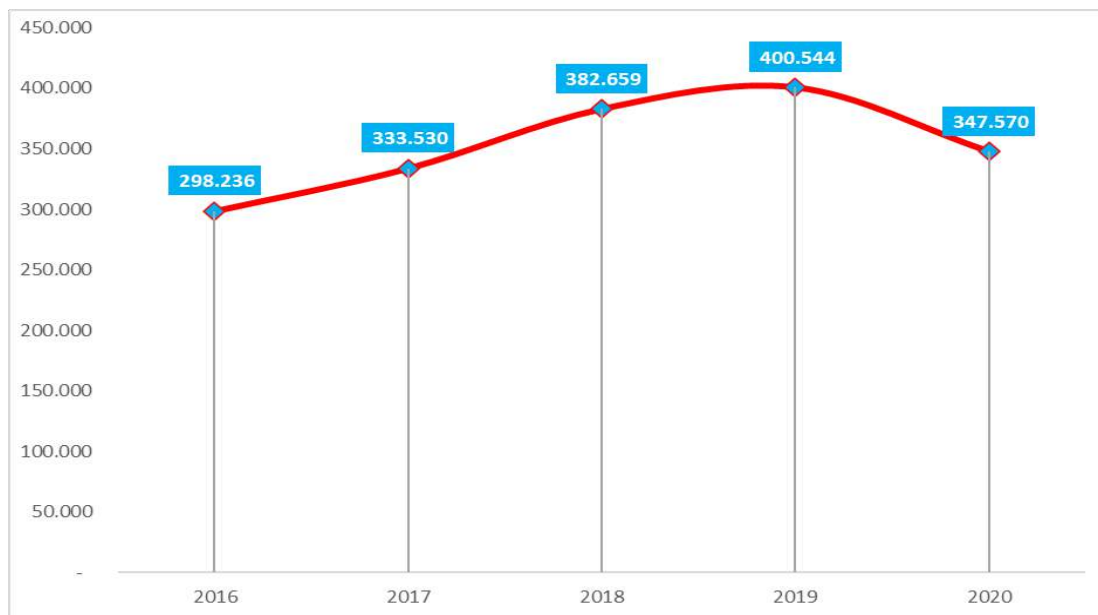
Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

### **5. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Pekerja Jamsostek**

Pekerja/buruh yang bekerja menjadi pekerja Jamsostek terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pekerja/buruh yang bekerja menjadi pekerja Jamsostek sebanyak 298.236 pada tahun 2016, meningkat menjadi 347.570 pada tahun 2020.

Secara umum, besaran pekerja/buruh yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, dari tahun 2016 s.d. tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dikarenakan serapan tenaga kerja yang juga meningkat, serta perhatian atas perlindungan terhadap tenaga kerja oleh perusahaan juga semakin meningkat. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan peserta seiring dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala aktivitas kemasyarakatan, khususnya pada sektor pariwisata yang merupakan

sektor unggulan di Bali, sehingga berdampak pula pada pengurangan jumlah tenaga kerja di dunia usaha, baik karena PHK, maupun dirumahkan.



**Gambar 2. 104 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Pekerja Jamsostek di Provinsi Bali**

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

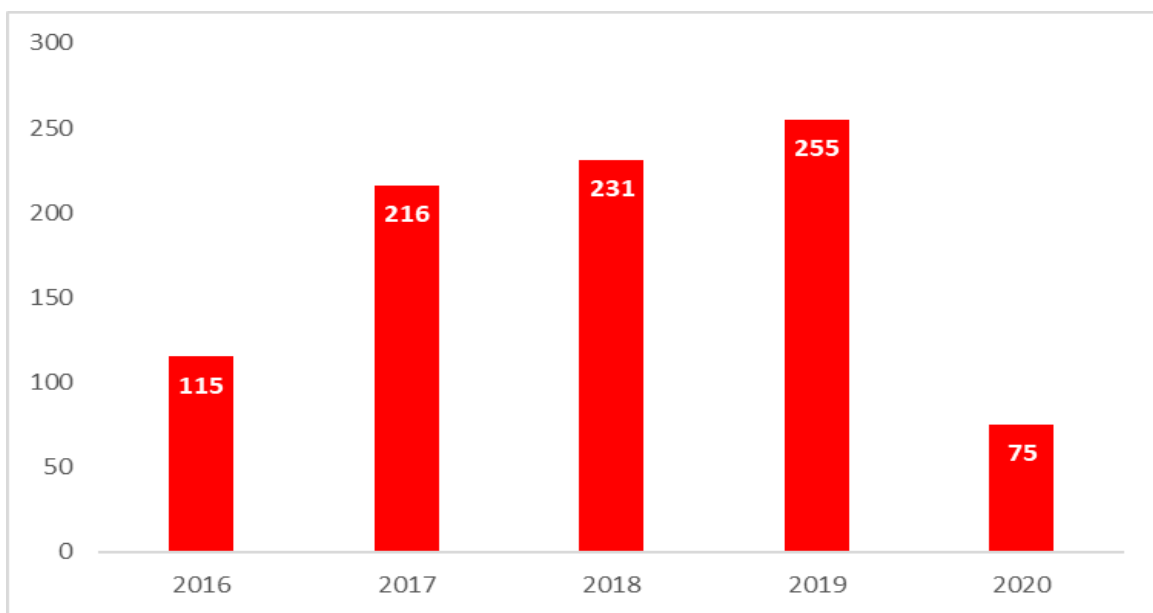
## 6. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Besaran pemeriksaan perusahaan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020. Besaran pemeriksaan perusahaan pada tahun 2016 sebesar 115, meningkat menjadi 225 pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 75. Data yang disajikan tersebut adalah pemeriksaan terkait pengujian lingkungan kerja, dan pemeriksaan terkait norma ketenagakerjaan di perusahaan.

Pemeriksaan perusahaan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan terkait pengujian lingkungan kerja yang difasilitasi oleh UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, serta pembinaan dan pemeriksaan dalam rangka penegakan penerapan peraturan perundangan ketenagakerjaan di perusahaan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan perusahaan yang difasilitasi oleh UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja merupakan pengujian berbasis pelayanan, yang dilaksanakan apabila ada permintaan dari perusahaan untuk dilakukan pengujian, sehingga capaian setiap tahun tidak tetap/tidak konstan (tergantung permintaan). Sedangkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mengacu

pada target yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya, dan berbasis anggaran.



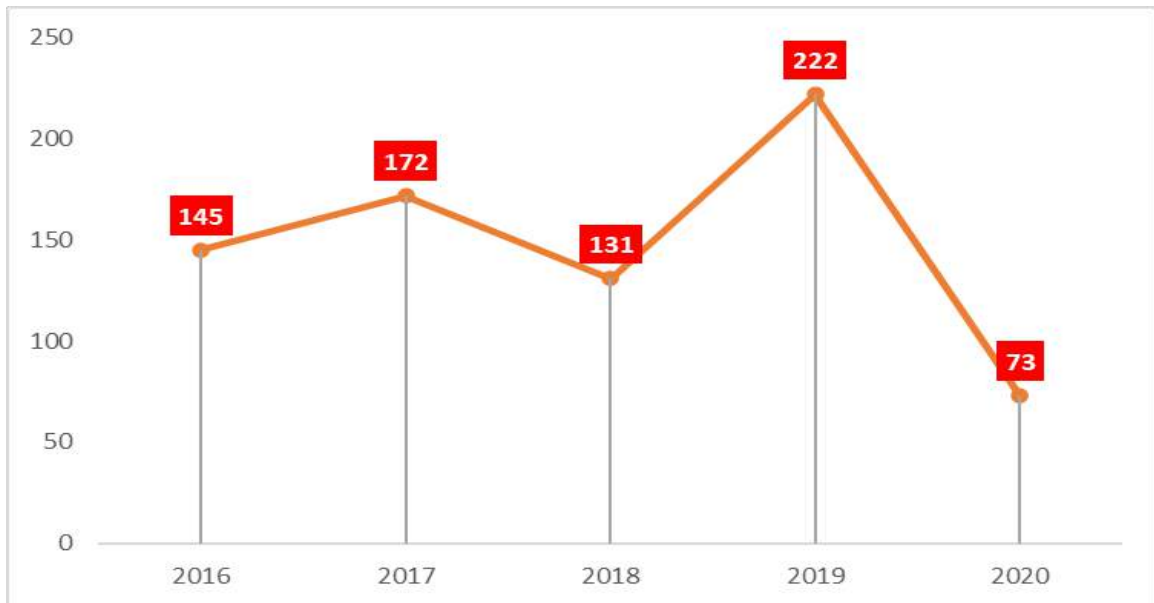
**Gambar 2. 105 Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Provinsi Bali**

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

#### **7. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan**

Besaran pengujian peralatan di perusahaan pada tahun 2016 sebesar 145 dan meningkat menjadi 222 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 besaran pengujian peralatan di perusahaan turun menjadi 73.

Pengujian peralatan di perusahaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Pengujian yang dilaksanakan adalah pengujian peralatan berupa Genset yang ada di perusahaan. Pengujian yang dilaksanakan juga merupakan pengujian berbasis pelayanan, yang dilaksanakan apabila ada permintaan dari perusahaan untuk dilakukan pengujian, sehingga capaian setiap tahun tidak tetap/tidak konstan (tergantung permintaan).



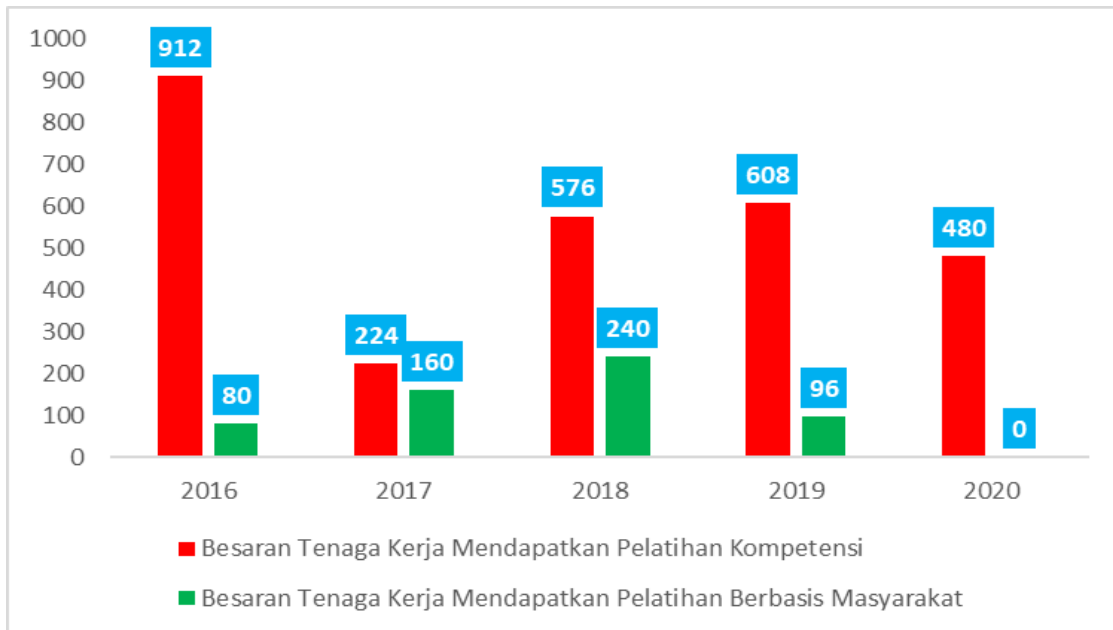
**Gambar 2. 106 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan di Provinsi Bali**

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

### **8. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2016 sebesar 912, namun mengalami penurunan menjadi 224 pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 576 dan 608. Pada tahun 2020 angka tersebut mengalami penurunan lagi menjadi 480. Sedangkan untuk tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat sebesar 80 pada tahun 2016 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif pada tahun-tahun selanjutnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing, Pemerintah Provinsi Bali melalui UPTD BLKIP mengupayakan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, dan masyarakat. Pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan berdasarkan animo masyarakat dan kebutuhan dunia industri. Pelatihan berbasis masyarakat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan di masyarakat, dan disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah.



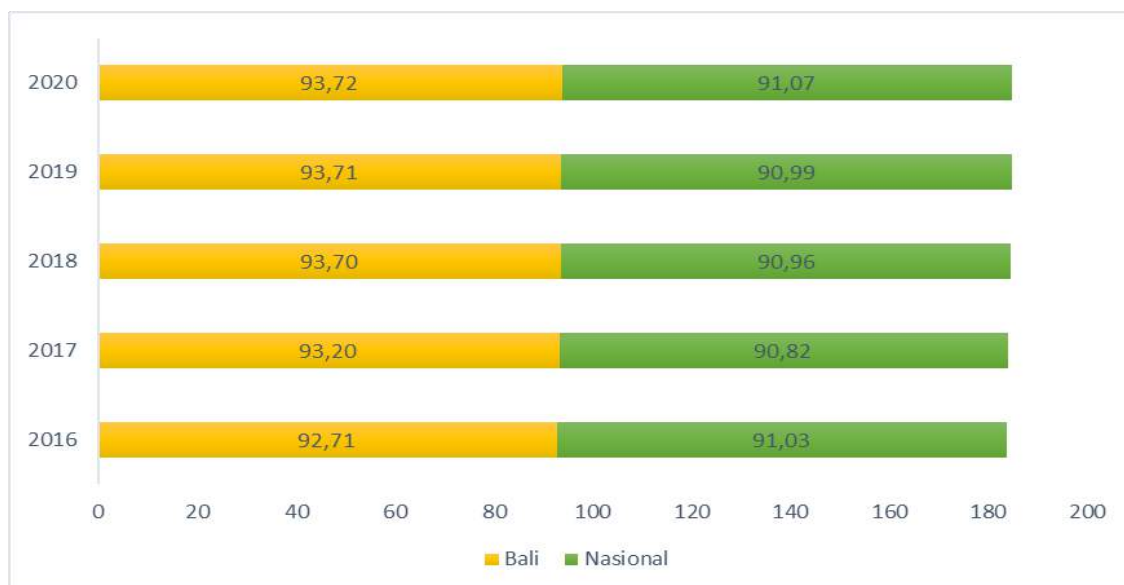
**Gambar 2. 107 Besaran pencari kerja/masyarakat yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat pada UPTD BLK-IP Provinsi Bali**

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 1. Capaian IPG dan IDG di Provinsi Bali

Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG). Indikator ini dapat dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun 2016 capaian IPG Provinsi Bali mencapai 92,71 hal ini menunjukkan capaian IPG yang cukup bagus.

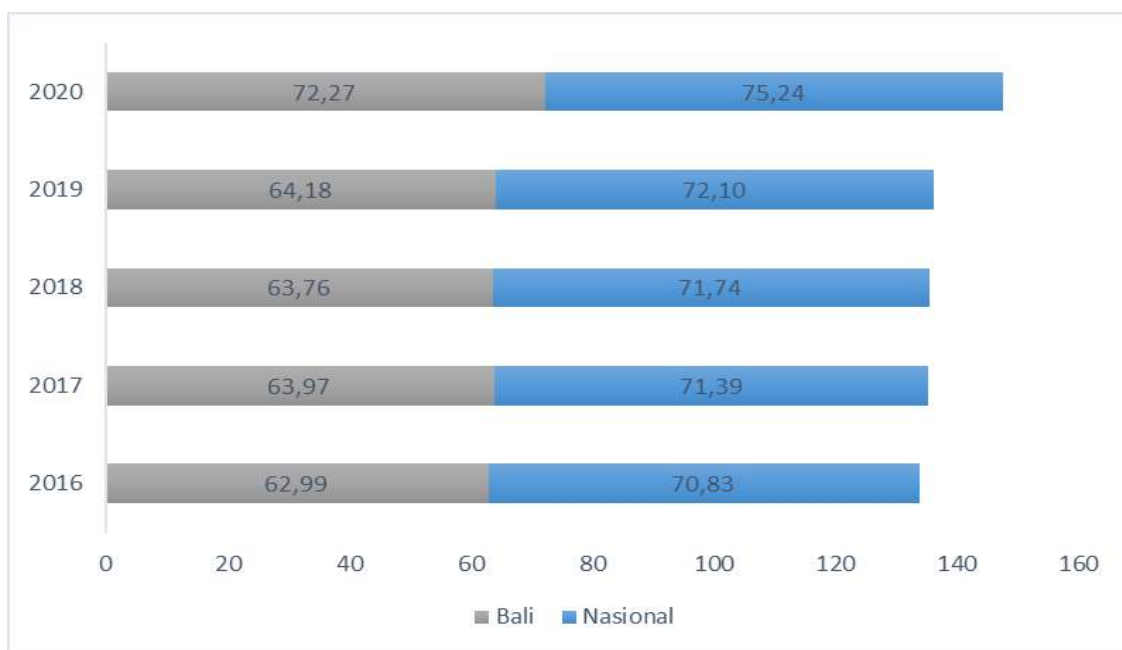


**Gambar 2. 108 Capaian IPG di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

Selain IPG indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Dengan capaian IDG Provinsi Bali tahun 2016 sebesar 62,99 hal ini menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, masih berada dibawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi se Pulau Jawa dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat. Jika diperbandingkan dengan beberapa Provinsi se Pulau Jawa, maka nampak posisi Provinsi Bali berada paling bawah dan jaraknya cukup jauh. Artinya para perempuan Bali dalam hal kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih di bawah dari para perempuan di provinsi se Pulau Jawa. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 72,27



**Gambar 2. 109 Capaian IDG di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali

## **2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan pada tahun 2016 mencapai 45,22% menurun pada tahun 2016 dengan realisasinya yaitu sebesar 41,70%. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan lagi sebesar 4,33% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 47,29%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa ideologi gender yang meletakkan peran perempuan di ranah domestik masih mempengaruhi eksistensi perempuan di dunia publik. Namun demikian perempuan boleh berbangga karena sudah diberi kesempatan menduduki posisi di pemerintahan, meskipun belum sepadan dengan laki-laki, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.29 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	45,22%	41,70%	46,03%	47,29%

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

### 3. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR

Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh proporsi keanggotaan legislatif. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tercatat bahwa jumlah perempuan yang terpilih dan duduk di lembaga Legislatif jumlahnya masih sangat minim dan jauh dari harapan, yaitu sebesar 9,09%. Namun demikian pada tahun 2019 angka keterwakilan perempuan pada Lembaga Legislatif mengalami peningkatan yaitu menjadi 16,36%. Meskipun demikian angka ini masih jauh dari 30% kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun demikian perempuan sudah mampu mengakses dunia politik yang selama ini diidentifikasi dengan dunianya laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan gender yang cukup tinggi di lembaga Legislatif.

**Tabel 2.30 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR di Provinsi Bali**

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	9,09%	9,09%	9,09%	16,36%

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

#### 4. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Sejak lama perempuan diidentikkan dengan aktivitas domestik dibandingkan dengan aktivitas publik seiring dengan transformasi sosial, perempuan yang beraktivitas di ruang publik dan berperan pada ranah produktif semakin terlihat, akibatnya peran perempuan dalam proses pembangunan semakin nyata. Pada tahapan pembangunan di era industrialisasi, perempuan akan lebih banyak dipekerjakan sebagai angkatan kerja formal. Profesionalitas tenaga kerja perempuan di Provinsi Bali semakin terlihat dari banyaknya keterlibatan perempuan bekerja di lembaga swasta maupun di organisasi sosial lainnya yang mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir.

Momentum peningkatan tersebut perlu di pertahankan sehingga terjadi keseimbangan antara profesionalitas tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta pada kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik dimana pada tahun 2016 sampai tahun 2020 persentasenya berada diatas 95%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih dominan bekerja di lembaga swasta.

**Tabel 2.31 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pekerja Perempuan	11.084	2.437.494	2.584.943	2.304.917
Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	10.765	1.123.807	1.209.274	1.048.691
Persentase	97,1	46,1	46,8	45,5

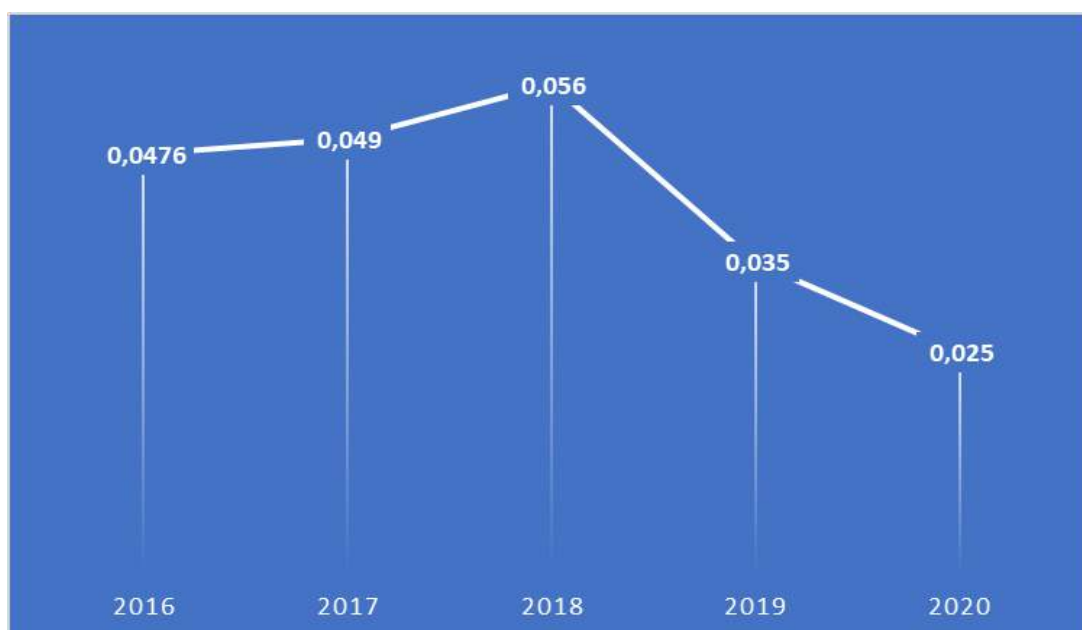
Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

#### 5. Rasio KDRT

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya diibaratkan seperti fenomena gunung es. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat dan tidak terungkap sehingga kasus kekerasan ini tidak terdata dengan baik. Banyak kasus dimasyarakat yang tidak dilaporkan karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kasus KDRT merupakan aib keluarga dan masalah keluarga sehingga orang lain tidak perlu tahu. Pendekatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan dilakukan dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.



Memberikan wawasan yang benar kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak positif terhadap penurunan jumlah kasus KDRT di Provinsi Bali. Dilihat dari data korban yang melapor dan tercatat di lembaga pemberi layanan yang tersebar di Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio KDRT yang terjadi di Provinsi Bali adalah 0,0467 meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,049 dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 0,056. Selanjutnya dari tahun 2018-2020 terjadi tren penurunan rasio KDRT di Provinsi Bali yaitu menjadi 0,025 pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa jumlah laporan dan penyelesaian kasus KDRT terus menurun.



**Gambar 2. 110 Rasio KDRT di Provinsi Bali**

Sumber: Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

## **6. Perkawinan Usia Dini**

Perempuan yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun di Provinsi Bali relatif tinggi yaitu 20,80% pada tahun 2019 dimana terdapat 6,06% perempuan yang berstatus kawin sebelum umur 15 tahun. Perkawinan dini ini cenderung meningkat baik pada perempuan umur di bawah 18 tahun maupun di bawah 15 tahun.

Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menangkap informasi status perkawinan atau hidup bersama maka dapat diperoleh informasi indikasi awal kemungkinan untuk hamil dan tingkatan risiko menjadi hamil, sebagai contoh usia pertama kali melakukan hubungan seksual, dan frekuensi hubungan

seksual yang terakhir serta untuk mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia. Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.



**Gambar 2. 111 Perempuan Berstatus Kawin Usia < 18 Tahun di Provinsi Bali**

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2021

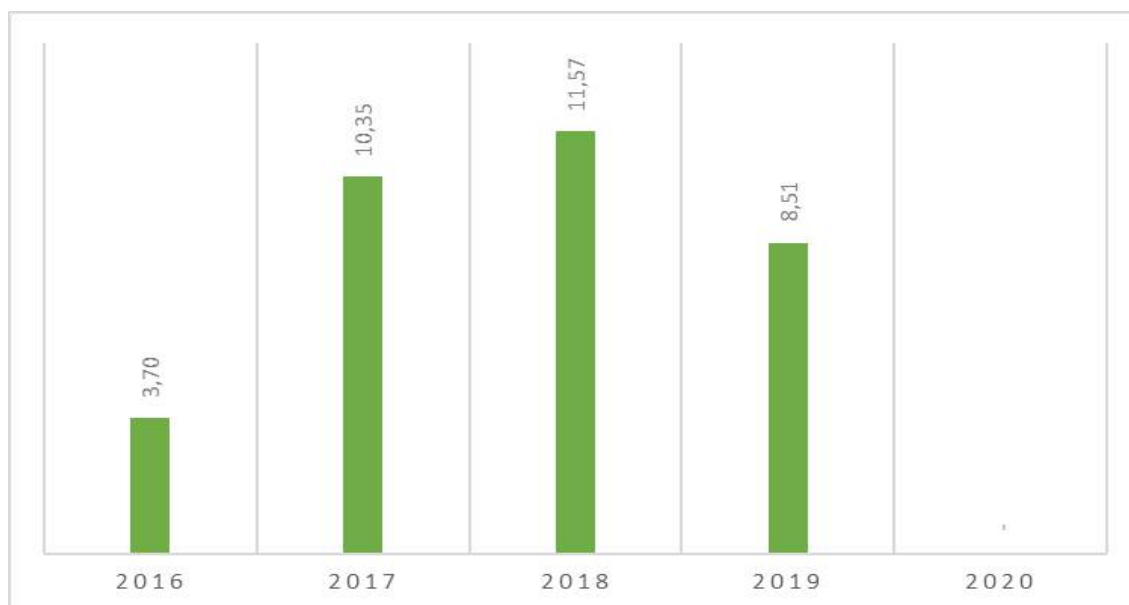
## 7. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pada pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun demikian mengacu pada pasal 69, 70 dan 71 juga diatur tentang pengecualian bagi anak usia 13–15 tahun diijinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental dan sosial. Dari data yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali menunjukkan bahwa masih ada anak usia 15–19 yang bekerja. Jumlah tenaga kerja di bawah umur pada tahun 2016 adalah sebesar 3,7% meningkat pada tahun 2017 menjadi 10,35 selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi menjadi 11,57 dan akhirnya pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8,51%.

Berdasarkan data hasil survey angkatan kerja nasional sebagaimana dirilis BPS Provinsi Bali tahun 2018, jumlah tenaga kerja dibawah umur pada tahun 2017 sebanyak 133.763 orang atau 5,49 % dari keseluruhan angkatan kerja sebanyak 2.434.450 orang. Persentase ini jauh lebih tinggi dari tahun

sebelumnya. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh :

- Diiijkannya mempekerjakan anak usia 15 tahun keatas
- Data BPS tidak didasarkan pada batasan usia anak 0-18 tahun tetapi kelompok umur 15-19 tahun sehingga ada kemungkinan besar anak usia di atas 18 tahun yang cukup banyak.

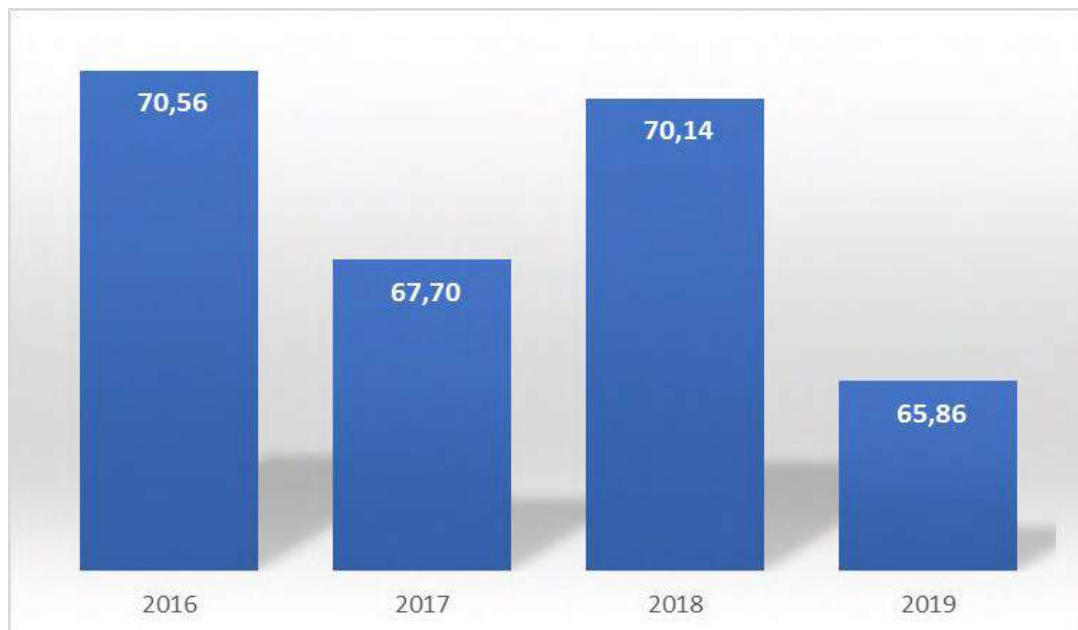


**Gambar 2. 112 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur di Provinsi Bali**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

## **8. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Angkatan kerja perempuan di Provinsi Bali selama tiga 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 sebesar 70,56% menurun menjadi 67,7% kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 70,14% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 65,86%. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari data jumlah angkatan kerja ini dapat diindikasikan masih adanya kesenjangan gender dimana angkatan kerja perempuan di Provinsi Bali jumlahnya masih di bawah laki-laki. Angkatan kerja perempuan ini bekerja di berbagai sektor pembang unan seperti sebagai PNS, pegawai swasta, perdagangan dan lain-lain.



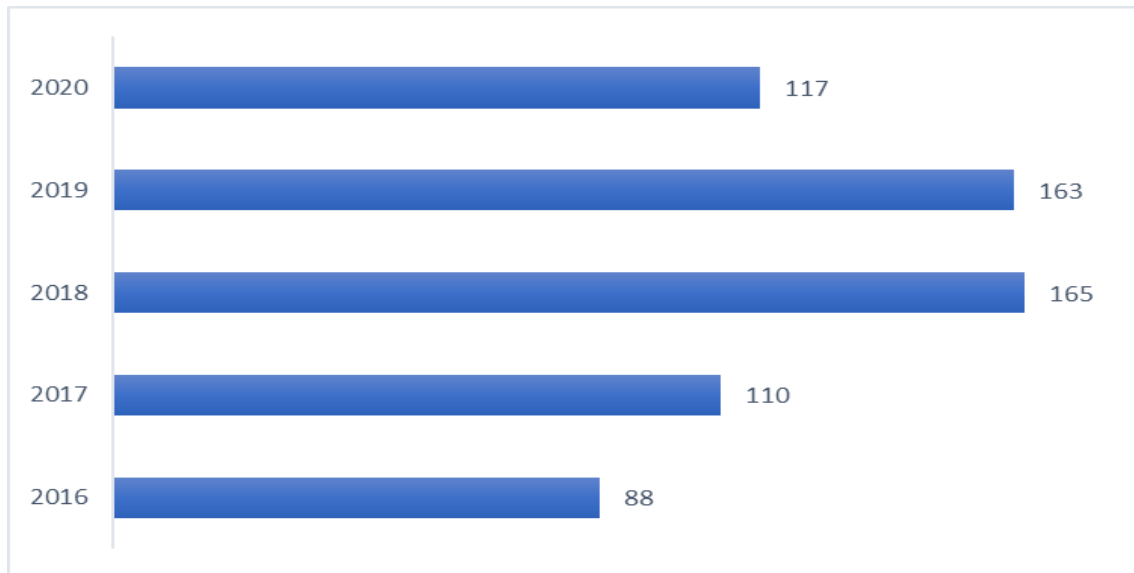
**Gambar 2. 113 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

#### **9. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Pada prinsipnya semua laporan pengaduan di unit pelayanan terpadu (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali ditangani secara keseluruhan. Untuk tahun 2016 terdapat 88 kasus, selanjutnya meningkat pada tahun 2017 menjadi 110 kasus. Pada tahun 2018 jumlah kasus masih mengalami peningkatan yaitu mencapai 165 kasus. Selanjutnya dari tahun 2018-2020 jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2020 jumlah kasus mencapai 117 kasus.

Seluruh pengaduan kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Provinsi Bali, mendapat penanganan atau yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu sehingga cakupan penanganan kasusnya 100%.

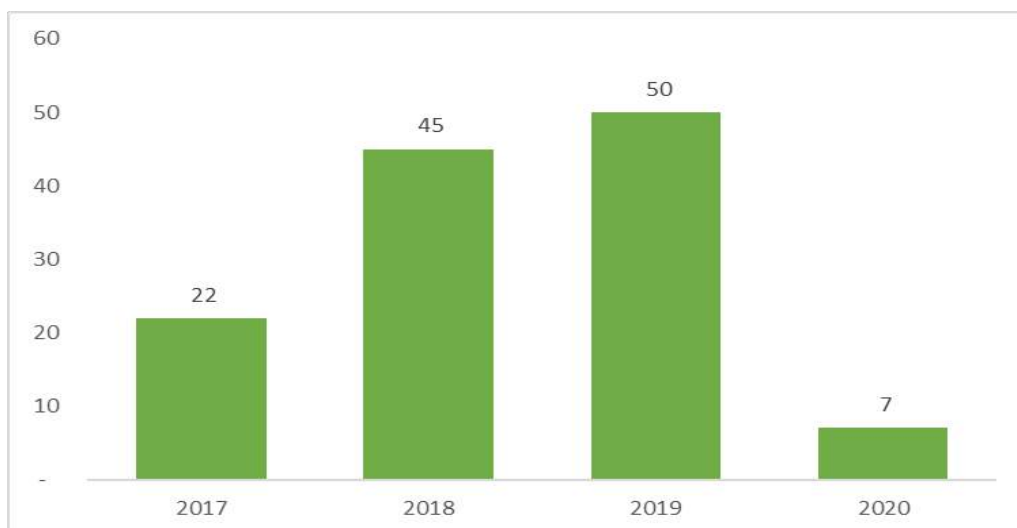


**Gambar 2. 114 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

**10. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Dinas Sosial Provinsi Bali, dapat kami sampaikan bahwa data cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu adalah sebagai berikut: tahun 2017 sebanyak 22 kasus, tahun 2018 sebanyak 45 kasus, tahun 2019 sebanyak 50 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 7 kasus.

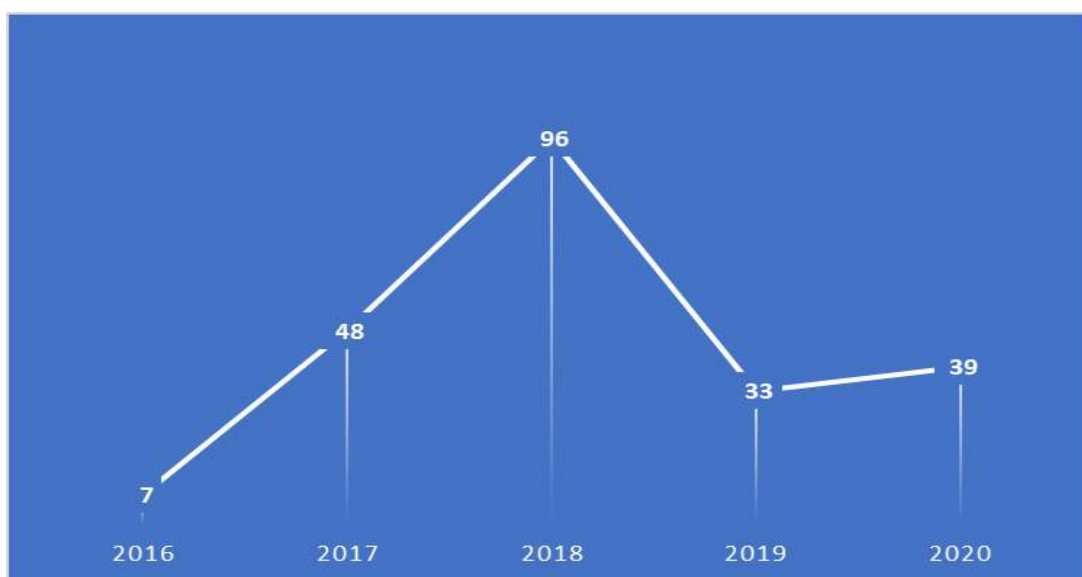


**Gambar 2. 115 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

## **11. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengadilan Negeri Provinsi Bali, dapat kami sampaikan bahwa jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan diputuskan oleh Pengadilan atas dasar Perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan, dimana data yang diperoleh yaitu tahun 2016 sebanyak 7 kasus, tahun 2017 sebanyak 48 kasus, tahun 2018 sebanyak 96 kasus, tahun 2019 sebanyak 33 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 39 kasus. Pada 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah, putusan pengadilan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak pada tahun 2018.

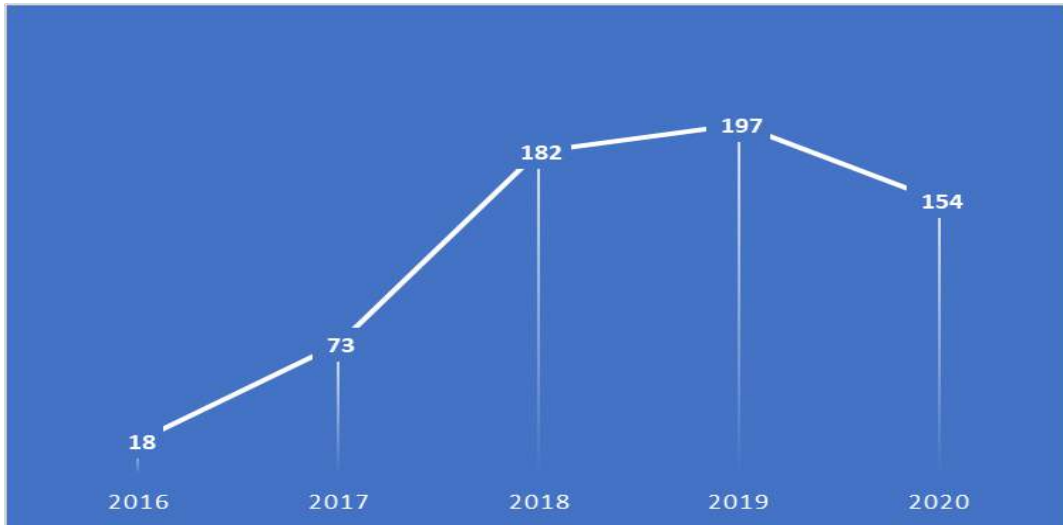


**Gambar 2. 116 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

## **12. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

Berdasarkan hasil koordinasi dengan POLDA Bali dan Pengadilan Tinggi, jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2016 sebanyak 18 kasus, tahun 2017 sebanyak 73 kasus, tahun 2018 sebanyak 182 kasus, tahun 2019 sebanyak 197 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 154 kasus. Layanan bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan banyaknya korban yang membutuhkan bantuan hukum, sehingga cakupan layanan adalah 100%.

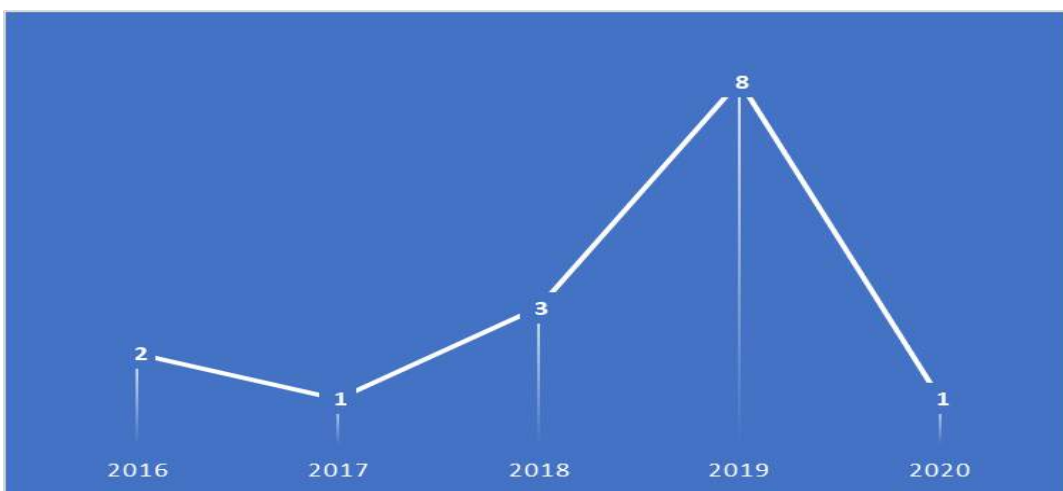


**Gambar 2. 117 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

### **13. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**

Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi Bali yang ditangani P2TP2A Provinsi Bali yaitu, pada tahun 2016 sejumlah 2 kasus, selanjutnya menurun pada tahun 2017 menjadi hanya 1 kasus. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus yang ditangani yaitu 3 kasus dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 8 kasus selanjutnya jumlah kasus tertangani pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 1 kasus.



**Gambar 2. 118 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

#### 14. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk dengan usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap sekolah karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Rasio APM SD di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 0,99 pada tahun 2017 menjadi 1 pada tahun 2018 dan 2019. Rasio APM perempuan juga cenderung menurun dari 96,56 pada tahun 2016 menjadi 95,52 pada tahun 2019. Namun, rasio APM perempuan selama kurun waktu 2017-2019 masih di bawah rasio APM laki-laki. Rasio APM laki-laki cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yaitu dari 95,66 ke 97,64.

**Tabel 2.32 Rasio APM Laki-Laki dan Perempuan di SD**

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
APM Laki-Laki	-	95,66	96,60	97,64	-
APM Perempuan	-	96,56	95,75	96,52	-
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	-	0,99	1	1	-

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

#### 15. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Rasio APM SMP adalah penduduk usia 12 – 14 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 12 – 14 tahun. Pada tahun 2017 rasio APM laki-laki dibandingkan dengan APM perempuan adalah sebesar 1,03 menurun pada tahun 2019 menjadi 0,97. Ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun mulai dari tahun 2017-2019 terjadi peningkatan angka partisipasi murni untuk perempuan di Provinsi Bali selama kurun waktu tersebut.

**Tabel 2.33 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP di Bali**

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
APM Laki-Laki	-	86,55	87,21	85,85	-
APM Perempuan	-	83,99	84,65	87,66	-
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	-	1,03	1,03	0,97	-

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021



## 16. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

APM SMA adalah penduduk usia 15 – 17 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMA dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 – 17 tahun. Pada tahun 2017 rata-rata APM tingkat SMA/ sederajat sebesar 72,39% selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 73 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 72,93. Rasio APM laki-laki dibandingkan dengan APM perempuan adalah sebesar 1,02 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1,06. Angka ini sekaligus menunjukkan bahwa APM laki-laki masih lebih besar dibandingkan APM perempuan untuk SMA di Provinsi Bali.

**Tabel 2.34 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA di Bali**

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
APM Laki-Laki	-	74,44	72,38	73,55	-
APM Perempuan	-	70,34	73,61	72,30	-
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	-	1,06	0,98	1,02	-

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

## 17. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di Perguruan Tinggi

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir APM tingkat Perguruan Tinggi/ sederajat walaupun kecil akan tetapi mengalami peningkatan setiap tahunnya. APM tahun 2016 sebesar 21,78. Walaupun APM tingkat Perguruan Tinggi/ sederajat terjadi peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi masih ada ketimpangan antara Laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2016 APM perempuan mencapai 20,87% lebih rendah dari pada APM Laki-laki yang mencapai 22,69%. Namun demikian kondisi ini bisa diartikan sebagai suatu kemajuan bagi perempuan di mana mereka bersama laki-laki sudah mampu mengisi peluang di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Tabel 2.35 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi di Bali**

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
APM Laki-Laki	22,69	23,53	22,45	-	-
APM Perempuan	20,87	21,98	25,74	-	-
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	0,92	0,93	0,87	-	-

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

## **18. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun**

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kemajuan pembangunan manusia, karena pendidikan membawa dampak yang positif bagi kualitas manusia. Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan baik dalam indeks pembangunan manusia maupun indeks pembangunan gender salah satunya adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun keatas, yang mampu membaca dan menulis. Dapat diartikan sebagai kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan, tertulis yang menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media. Hal ini dapat digunakan untuk melihat potensi intelektual masyarakat, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah.

Dari tren angka melek huruf dapat dilihat bahwa angka melek huruf perempuan sedikit lebih cepat dibandingkan angka melek huruf laki-laki yang meningkat tipis. Tercatat pada tahun 2016 terlihat bahwa angka melek huruf Provinsi Bali sudah mencapai level diatas 90%, dimana 96,37% penduduk laki-laki dan 89,23% untuk perempuan, dengan kata lain pada tahun 2016 sebanyak 3,63% penduduk laki-laki dengan 10,77% penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas yang masih buta huruf. Hal ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam hal baca dan tulis di Provinsi Bali antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Provinsi Bali.

**Tabel 2.36 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di Provinsi Bali**

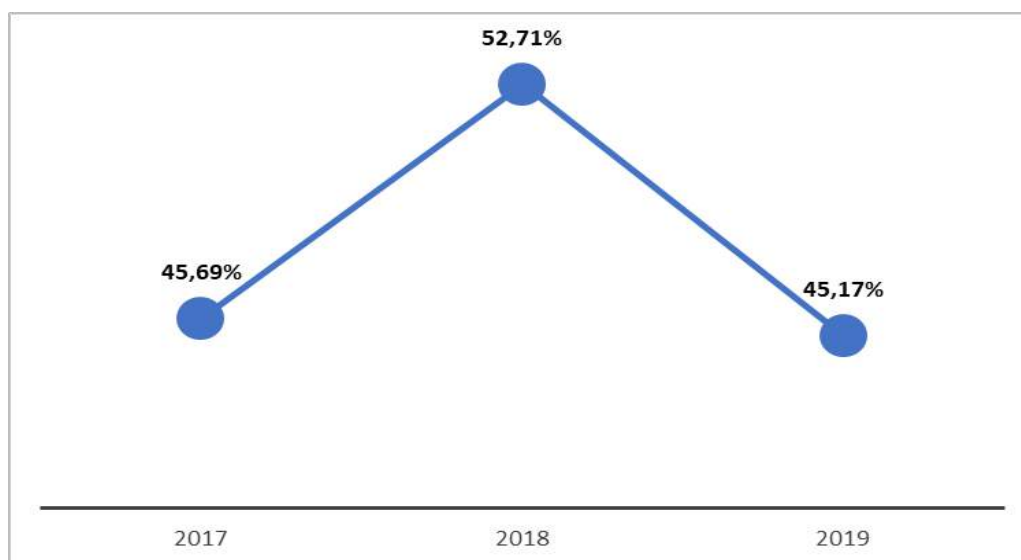
Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf Laki-Laki	89,23%	89,40%	96,49%	97,38%	96,99%
Angka Melek Huruf Perempuan	96,37%	96,40%	89,48%	91,66%	92,59%
Rasio APM Laki-Laki/Perempuan	93,00%	93,00%	107%	106,2%	104,75%

Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

## 19. Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

Secara umum perkembangan kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian mengalami fluktuasi pada rentang periode tersebut. Pada tahun 2014 kontribusinya paling tinggi dengan capaian 25,60%. Pada tahun 2016 kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian mencapai 25,53% atau meningkat 0,53% dari Tahun 2015. Berdasarkan data sakernas BPS menunjukkan bahwa proporsi perempuan pekerja bebas non pertanian Provinsi Bali pada tahun 2016 sebatas 25,53% dari total 129.932 orang pekerja bebas non pertanian. Artinya penduduk laki-laki masih mendominasi pekerja bebas non pertanian di Provinsi Bali.

Hal ini dapat berpengaruh pada sumbangan pendapatan perempuan lebih kecil. Jika kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian meningkat tentu akan menurunkan proporsi kontribusi laki-laki. Akibatnya proporsi sumbangan pendapatan perempuan akan meningkat dan mempersempit gap dengan proporsi sumbangan pendapatan laki-laki.



**Gambar 2. 119 Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Nonpertanian di Provinsi Bali Tahun 2013-2016**

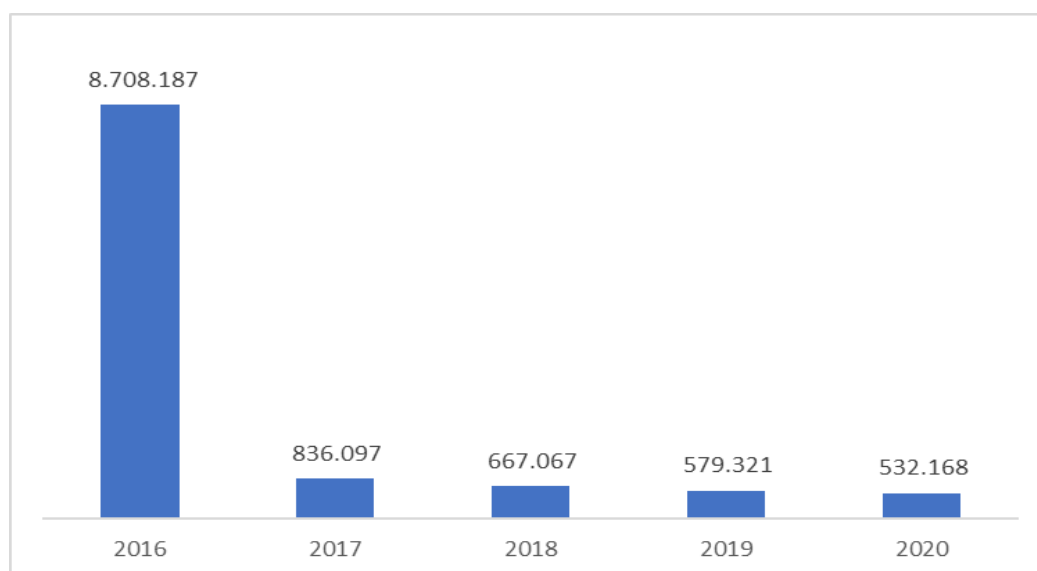
Sumber Data : Dinsos P3A Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.9 Pangan

#### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Realisasi ketersediaan beras selama kurun waktu 2016 sampai 2020, berturut-turut yaitu 8.708.187 ton, 836.097 ton, 667.067 ton, 579.321 ton

dan 532.168 ton tahun 2020. Realisasi ketersediaan tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.



**Gambar 2. 120 Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali**

Sumber : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

## 2. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Ketersediaan energi mengalami peningkatan dari tahun 2016, dimana ketersediaan energi sebesar 2.607 kkal/kap/hari pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 2.591 kkal/kap/hari pada tahun 2017. Realisasi ini sudah melebihi standar kebutuhan energy nasional (WNPG) yaitu sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Dari total ketersediaan energi lebih didominasi oleh pangan nabati sebesar 2.108 kkal/kap/hari atau 79,70%, sedangkan pangan hewani hanya sebesar 537 kkal/kap/hari atau sebesar 20,30%. Begitu juga ketersediaan protein untuk Bali sudah memenuhi angka kecukupan protein. Ketersediaan protein mengalami peningkatan, dimana tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 76 grkal/kap/hari dan selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 64,31 grkal/kap/hari. Walaupun terjadi penurunan ketersediaan protein sudah mencukupi kebutuhan.

**Tabel 2.37 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Energi (kkal/kap/hari)	2.607,0	2.591,0	2.646	2.647	2.650
Protein (grkal/kap/hari)	76.00	60.00	63.00	63.51	64.31

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

### 3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Kegiatan pengawasan pangan, penataan kelembagaan dan penyampaian informasi keamanan pangan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dari pusat, provinsi dan Kabupaten telah memberikan hasil yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan keamanan pangan yang aman dikonsumsi bagi masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tercatat sebesar 80%. Namun dengan adanya peningkatan keamanan pangan bukan berarti tugas dinas Ketahanan Pangan sudah berakhir, karena masih ada beberapa pangan yang masih tercemar residu baik cemaran pestisida, formalin maupun cemaran oleh mikroorganisme beredar dipasaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

**Tabel 2.38 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%	80%	80%	80%

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

#### 2.3.1.10 Pertanahan

##### 1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Pada tahun 2016 tanah aset pemerintah Provinsi Bali yang sudah bersertifikat sebanyak 4.299 bidang tanah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota serta di luar Bali yang digunakan untuk asrama mahasiswa dan kantor perwakilan. Pada Tahun 2017 jumlah tersebut menurun sebesar 74 bidang yang disebabkan adanya dua kali pencatatan pada buku inventaris tanah. Pada tahun 2018 tanah aset pemerintah Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 428 bidang karena perubahan aturan terkait kewenangan SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi. Setelah dilakukan pendataan dan pemetaan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 tanah Pemprov Bali yang sudah bersertifikat semakin meningkat karena hal tersebut merupakan salah satu prioritas dalam rangka pengamanan BMD berupa tanah milik Pemerintah Provinsi sebagaimana telah menjadi target MCP Korsupgah KPK dengan melakukan kerja sama dengan BPN Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.39 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Tercatat Pada Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Bali**

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Badung	1.042	1.041	1.111	1.147	1.142
2	Bangli	208	205	206	209	215
3	Buleleng	241	181	250	252	340
4	Denpasar	403	398	460	469	454
5	Gianyar	433	435	438	436	436
6	Jembrana	222	226	232	237	232
7	Karangasem	579	578	585	622	629
8	Klungkung	964	963	1.063	1.069	1.068
9	Tabanan	490	490	598	617	618
	Luar Bali	10	10	11	9	11

Sumber Data : BPKAD Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.40 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Yang Sudah Bersertifikat**

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Badung	1.027	1.023	1.095	1.121	1.117
2	Bangli	165	163	164	168	177
3	Buleleng	207	143	213	217	309
4	Denpasar	340	337	396	410	409
5	Gianyar	403	401	404	408	412
6	Jembrana	205	209	215	219	216
7	Karangasem	545	544	549	583	586
8	Klungkung	947	945	1.047	1.047	1.043
9	Tabanan	451	451	560	566	568
	Luar Bali	9	9	10	9	9

Sumber Data : BPKAD Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.41 Tanah Pemerintah Provinsi Bali Yang Belum Bersertifikat**

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Badung	15	18	16	24	25
2	Bangli	43	42	42	41	38
3	Buleleng	34	38	37	38	31
4	Denpasar	63	61	64	56	45
5	Gianyar	30	34	34	29	24
6	Jembrana	17	17	17	17	16
7	Karangasem	34	34	36	41	43
8	Klungkung	17	18	16	22	25
9	Tabanan	39	39	38	50	50
	Luar Bali	1	1	1	1	2

Sumber Data : BPKAD Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.11 Lingkungan Hidup

#### 1. Tersedianya dan Tersusunnya Dokumen RPPLH Provinsi

Dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bali selama tahun 2013 sampai 2015 belum tersedia.

Namun, pada tahun 2015 telah dilakukan kajian akademis dan pada tahun 2016 telah dilakukan penyusunan Ranperda RPPLH Provinsi Bali. Pada tahun 2017 telah tersedia Perda RPPLH Provinsi Bali yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017. Lebih lanjut pada tahun 2018 rencananya akan disusun kembali RPPLH tersebut. Dokumen tersebut sudah menjadi salah satu rujukan dan pertimbangan dalam revisi dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

## **2. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Provinsi**

Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bali telah diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang termuat dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 sebagaimana uraian tabel Analisis Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD.

## **3. Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi**

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah tersusun pada Tahun 2017 yaitu 3 dokumen, yaitu KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, KLHS Revisi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, dan KLHS Kawasan Sepanjang Arteri Primer Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padang Bali. Pada tahun selanjutnya tersusun 3 dokumen KLHS dan 1 dokumen RPPLH yaitu KLHS Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul-Pancasari, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, KLHS RTR Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan Kajian Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sedangkan pada tahun 2019 ada 1 dokumen KLHS yang disusun yaitu KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Provinsi).

**Tabel 2.42 Ketersediaan Dokumen KLHS di Provinsi Bali**

<b>No</b>	<b>Jenis KLHS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	KLHS RTRW	-	KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali	KLHS Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul-Pancasari	KLHS Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Provinsi)	-

No	Jenis KLHS	2016	2017	2018	2019	2020
2	KLHS RPJMD	-	KLHS Revisi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018	KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023	-	-
3	KLHS RTR	-	KLHS Kawasan Sepanjang Arteri Primer Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padang Bali.	KLHS RTR Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	-	-
4	Kajian	-	-	Kajian Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-	-

Sumber : DLH Provinsi Bali, 2021

#### 4. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

KLHS tersebut telah digunakan untuk Kebijakan Rencana Program tingkat daerah Provinsi Bali. KLHS Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 digunakan sebagai dasar untuk KRP tingkat Provinsi.

#### 5. Peningkatan Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas lingkungan hidup Bali pada pada tahun 2016 menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 61,12 hal ini dapat dilihat dari penjumlahan indeks kualitas air sebesar 61,39, indeks kualitas udara sebesar 96,63 dan tingkat tutupan lahan sebesar 36,38. Namun capaian Tahun 2019 belum dapat mencapai target Bali *Green Province* yaitu sebesar 70 yang disebabkan karena tingkat tutupan lahan yang masih relatif kecil dan hal ini akan dapat tercapai pada RPJMD Tahun 2019-2023. Capaian indeks kualitas air laut yang mulai dihitung pada tahun 2020 sebesar 69,75.

Untuk itu tahun-tahun berikutnya harus bisa dioptimalkan pengembangan penanaman tanaman keanekaragaman hayati (*bio diversity*),



tanaman produksi, pemantapan ruang terbuka hijau, taman kota dan pedesaan serta pengembangan kebun arboritum. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target RPJMD di bidang lingkungan hidup masih ada beberapa yang belum tuntas dapat diselesaikan seperti capaian tingkat tutupan lahan yang disebabkan karena adanya alih fungsi lahan yang masih cukup tinggi serta kondisi lahan kritis yang berbatu dan kritis air, hal ini disebabkan karena laju percepatan kematian pohon yang ditanam lebih besar dari tingkat tanaman yang hidup.

Solusi yang diambil dalam rangka meningkatkan tingkat tutupan lahan antara lain meliputi penanaman tanaman keanekaragaman hayati, pengembangan ruang terbuka hijau kota (RTHK) , penanaman tanaman arboritum dan lain-lain, namun hal ini masih perlu ditingkatkan melalui kewajiban kabupaten/kota untuk memiliki tanaman keanekaragaman hayati (*bio diversity*) minimal 8 (delapan) hektar per masing-masing Kabupaten/kota dan mendorong pengembangan taman-taman baik di perkotaan maupun di pedesaan.



**Gambar 2. 121 Peningkatan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Tahun 2016-2019**

Sumber Data : DLH Provinsi Bali, 2021

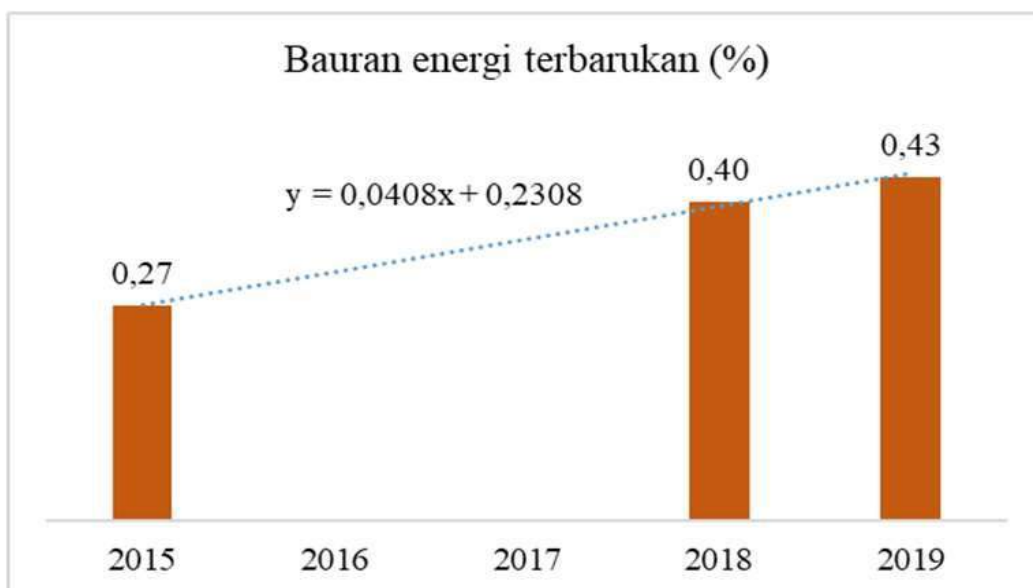
## 6. Bauran Energi Terbarukan

Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Penggunaan energi terbarukan sangat penting untuk

menjaga kelestarian alam dan lingkungan karena jenis energi ini tidak menghasilkan limbah yang dapat merusak dan mengganggu lingkungan.

Bauran energi terbarukan (%) adalah persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final. Energi final adalah energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Bauran energi baru terbarukan (EBT) Provinsi Bali pada tahun 2015 masih sangat kecil yaitu 0,27%. Sumber energi primer masih didominasi oleh minyak yaitu sebesar 75,71% dan selebihnya bersumber dari batubara sebesar 19,63% dan gas sebesar 4,39%. Bauran EBT pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,40% dan tahun 2019 menjadi 0,43%. Ini berarti target nasional belum tercapai. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali (Perda RUED), bauran energi baru terbarukan diproyeksikan atau ditargetkan sebesar 11,15% di tahun 2025 dan meningkat menjadi 20,10% di tahun 2050. Tanpa upaya tambahan, bauran EBT pada tahun 2023 diproyeksikan hanya 0,60% dan tahun 2025 diproyeksikan sebesar 0,72% sehingga masih jauh dari yang ditargetkan dalam Perda RUED.



**Gambar 2. 122 Bauran Energi Terbarukan Tahun 2016-2019**

Sumber Data : DLH Provinsi Bali, 2021

## 7. Laporan Inventarisasi GRK

Berdasarkan laporan data dari Dinas Lingkungan Hidup, GRK yang berhasil diturunkan selama kurun waktu 2016 sampai 2017 yaitu sebesar 2 persen.

**Tabel 2.43 Laporan Inventarisasi GRK Provinsi Bali**

No	Tahun	BAU (tonCO <sub>2</sub> - eq)	Penurunan Emisi GRK (Gg CH <sub>4</sub> )			Penurunan Emisi		
			Mitigasi-2	Mitigasi-3	Mitigasi-6	Gg CH <sub>4</sub>	TonCO <sub>2</sub> -eq	(%)
1	2016	633.973	1,42	2,71	0,11	4,24	89.127	14,06
2	2017	658.613	2,07	3,42	0,11	5,60	117.688	17,87
3	2018	-	-	-	-	-	-	-
4	2019	-	-	-	-	-	-	-
5	2020	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : DLH Provinsi Bali, 2021

## 8. Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi

Hingga saat ini belum tersusun Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi dikarenakan tidak adanya kegiatan tersebut di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Namun DISLH Provinsi Bali telah melakukan pengusulan untuk Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Tahun 2013 hingga 2018. Pada tahun 2016 terdapat 14 (empat belas) usulan dan Tahun 2017 terdapat 12 (dua belas) usulan, namun di Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak disetujui untuk Proklam.

## 9. Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali tidak mengelola limbah B3 akan tetapi melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan dan mengelola limbah B3. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan yaitu secara berturut-turut sebesar 30 perusahaan, 27 perusahaan, 15 perusahaan, 9 kabupaten/kota, dan 9 kabupaten/kota.

## 10. Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Yang Ditandatangani Gubernur

Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, DISLH hanya rekomendasi izin pengumpulan limbah B3.

### **11. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi**

Jumlah pengawasan dan pengendalian izin lingkungan tahun 2016 yaitu 18 kawasan dan 54 perusahaan, tahun 2017 yaitu 18 kawasan dan 47 perusahaan, tahun 2018 yaitu 15 perusahaan, 2019 yaitu 30 perusahaan dan tahun 2020 sebanyak 25 perusahaan yang telah diberikan pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan/izin PPLH oleh Provinsi Bali.

### **12. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi**

Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1 (satu) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), hal ini memang belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Solusi yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan kinerja ASN Dinas Lingkungan Hidup dan pemerhati lingkungan dalam melakukan pengawasan, pemberian informasi dan pengaduan terhadap para pelaku yang terindikasi membuang limbah/ sampah ke lingkungan.

### **13. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA**

Di Dinas Lingkungan Hidup pernah dilaksanakan pelatihan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Lingkungan Hidup. Hanya saja pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 tidak ada kegiatan tersebut yang dilakukan.

### **14. Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat**

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pelatihan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 570/03-X/HK/2017 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia, Narasumber dan Peserta Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Selama tahun 2016 sampai tahun 2020 terdapat pelatihan kepada 40 orang, 30 orang, 30 orang, dan 731 orang.

### **15. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**

Jumlah peserta evaluasi Adipura, Adiwiyata, Kalpataru pada tahun 2016 yaitu 3 Adipura di 9 kab/kota, 30 Adiwiyata, dan 1 Kalpataru. Selama 2017 sampai 2020, yaitu 4 Adipura di 9 kab/kota, 30 Adiwiyata, dan 1 Kalpataru. Pada Tahun 2017, melalui kegiatan Desa Sadar Lingkungan telah dilaksanakan Lomba Desa Unit Percontohan Pengelolaan Sampah, dan telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1517/03-X/HK/2017 tentang Pemenang Lomba Desa Unit Percontohan Pengelolaan Sampah, dengan pemenang sebagai berikut:

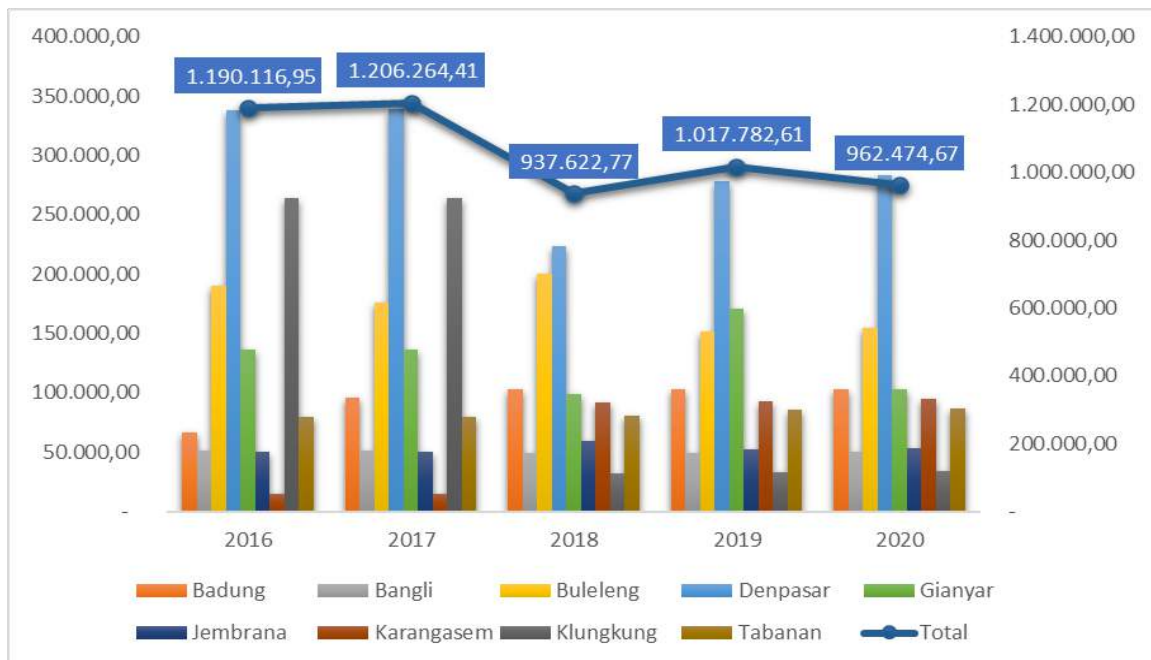
1. Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
2. Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
3. Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem

### **16. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Lokasi Usaha Dan Dampak Lintas Kabupaten/Kota Yang Ditangani**

Melalui kegiatan Penataan Hukum Lingkungan telah dilaksanakan tindak lanjut dari pengaduan adanya dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020 telah ditindaklanjuti 10 kasus, 20 kasus, 12 kasus, 10 kasus, dan 1 kasus dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan.

### **17. Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah Di Wilayah Provinsi**

Data timbulan sampah Provinsi Bali tersedia dari tahun 2016 – 2020, namun penanganan sampah (pengelolaan sampah) baru dilakukan pendataan pada Tahun 2017 antara lain yaitu volume sampah yang masuk ke TPA, volume sampah yang didaur ulang dan volume sampah yang dikompos. Volume timbulan sampah selama kurun waktu 2016 sampai 2020 yaitu 1.190.116,95 m<sup>3</sup>/hari, 1.206.264,41 m<sup>3</sup>/hari, 937.622,77 m<sup>3</sup>/hari, 1.017.782,61 m<sup>3</sup>/hari dan 962.474,67 m<sup>3</sup>/hari.



**Gambar 2.123 Volume Timbulan Sampah di Provinsi Bali**

Sumber Data : DLH Provinsi Bali, 2021

### **18. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Pada Kondisi Khusus Di Provinsi**

Penanganan sampah pada TPA Regional di Provinsi Bali menunjukkan penurunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020. Pada tahun 2019, penanganan sampah sebesar 60,53 persen menurun menjadi 44,96 persen pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari menurunnya aktifitas yang bisa dilakukan akibat pandemi. Hal ini berdampak pada redahnya pengelolaan sampah yang ditimbulkan oleh berbagai aktifitas penduduk di Provinsi Bali.

### **19. Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R**

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang ditetapkan tanggal 24 Oktober 2017, sehingga Tahun 2019 jumlah sampah yang terkurangi melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*) yaitu sebanyak 14,64% menurun pada tahun 2020 menjadi 11,38%.

#### **2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

##### **1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk**

Kenaikan rasio/persentase kepemilikan KTP-el semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh semakin sadar penduduk yang status wajib KTP telah melakukan perekaman KTP-el, dan dilaksanakannya layanan "Jemput Bola" langsung ke masyarakat terutama bagi yang sakit, disabilitas, lokasi tempat tinggal yang jauh, rumah sakit, sekolah dan rumah

tahanan. Pelayanan dengan menggunakan Mobil Keliling dirasakan sangat efektif untuk menjangkau penduduk yang mengalami hambatan dalam menjangkau Dinas Dukcapil. Selain itu banyak instansi pelayanan publik dan pemberian bantuan pemerintah yang telah terhubung dengan SIAK yang mewajibkan menggunakan data kependudukan berupa KTP-el dan KK, telah mendorong masyarakat untuk melengkapi diri dengan dokumen kependudukan. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan dari 100 orang penduduk yang wajib KTP yang memiliki KTP sebanyak 100 orang.

Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el semakin banyak yang telah memiliki KTP-el, hal ini disebabkan penunggalan data biometrik semakin berhasil sehingga tidak ada penduduk yang mempunyai KTP-el dan NIK ganda. Selain itu kenaikan kepemilikan KTP-el disebabkan oleh penyediaan blanko KTP-el yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali setiap tahunnya telah menunjukkan jumlah yang cukup, perbaikan pada Sistem Informasi Administrasi mKependudukan (SIAK) yang memungkinkan cetak KTP-el di luar domisili, dan pelayanan "Jemput Bola". Perangkat keras dan perangkat lunak yang didukung koneksi jaringan yang baik akan memungkinkan penduduk yang telah merekam langsung mendapatkan KTP-el sehingga kepemilikan KTP-el akan mendekati 100%.

Kesadaran penduduk untuk mengurus akta kelahiran semakin meningkat dengan adanya pelayanan Online dan tanpa dipungut biaya. Untuk memudahkan pembuatan Akta Kelahiran bagi penduduk yang tidak mempunyai akta kelahiran karena tidak adanya surat kelahiran, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kelahiran. Dengan SPTJM ini penduduk dapat melaporkan kelahirannya ke Dinas Dukcapil tempat.

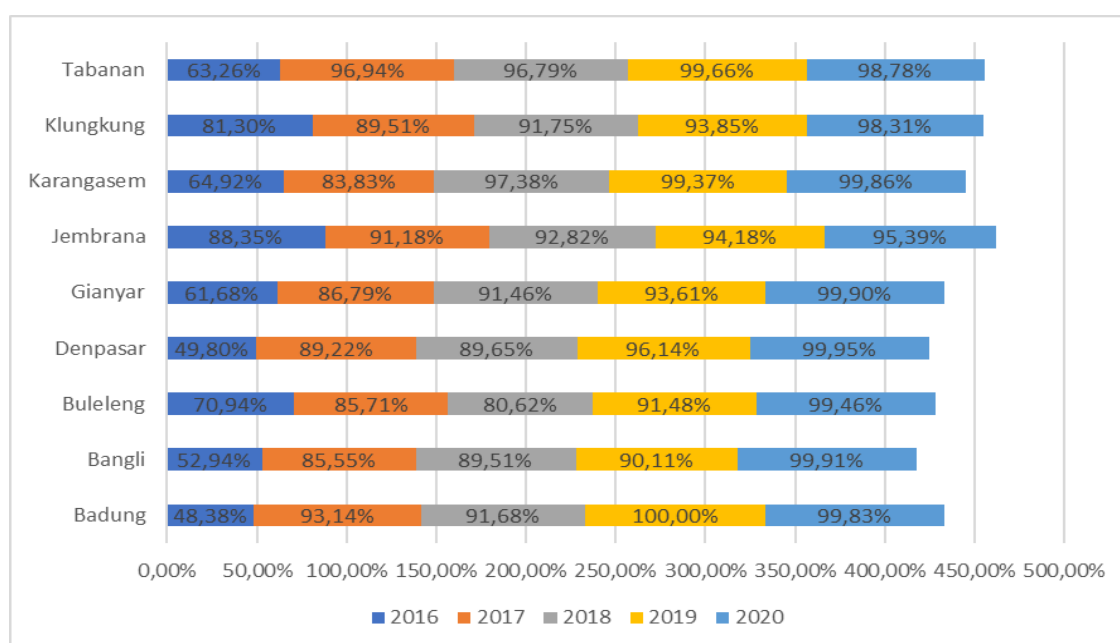
Tingkat kesadaran penduduk untuk melindungi diri atas keabsahan terjadinya perkawinan dan kejelasan hak pasangan dan anak-anak yang dilahirkan. Pemerintah terus mendorong penduduk yang telah menikah sebelum diberlakukan SIAK agar melaporkan perkawinannya ke Dinas Dukcapil.

**Tabel 2.44 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio/Persentase Penduduk Ber-KTP	0,80/80%	0,93/93%	0,94/94,6%	0,96/96,23	0,99/99%
2	Persentase kepemilikan KTP-EL di Provinsi Bali	80,00%	91,20%	95,50%	96,23%	99,26%
3	Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	34,83%	33,64%	35,70%	40,42%	43,19%
4	Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Provinsi Bali	758.114	788.595	930.770	980.348	1.009.940
5	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Provinsi Bali	0,17/17%	0,22/22,2%	0,31/31%	0,40/40%	0,48/48,2%

Sumber Data : Disdukcapil Provinsi Bali, 2021

Kepemilikan KTP-el diseluruh kabupaten/kota se-Bali setiap tahunnya meningkat. Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el disetiap kabupaten/kota segera dapat mencetak KTP-el. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan KTP-el telah didukung oleh kinerja perangkat keras dan perangkat lunak, serta ketersediaan blanko KTP-el yang cukup. Namun demikian perlu adanya peremajaan perangkat keras diseluruh kabupaten/kota yang sudah mulai uzur serta penambahan sarana prasarana pelayanan keliling yang memadai.



**Gambar 2.124 Persentase Kepemilikan KTP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Disdukcapil Provinsi Bali, 2021



## 2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akta kelahiran salah satu adalah dokumen kependudukan menjadi syarat untuk masuk sekolah sehingga peningkatan kepemilikan akta kelahiran meningkat. Pemerintah Provinsi terus mendorong Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk melakukan kerja sama dengan rumah sakit, klinik bersalin atau bidan dalam penerbitan akta kelahiran bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan. Setiap tahun rasio bayi berakte kelahiran semakin meningkat, apalagi diberlakukannya pengajuan akt lahir dilakukan melalui online, baik melalui website atau aplikasi Whatsapp. Diharapkan seluruh bayi yang lahir segera mendapatkan akta kelahiran, dan selanjutnya diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA)nya.

**Tabel 2.45 Rasio Bayi Berakte Kelahiran**

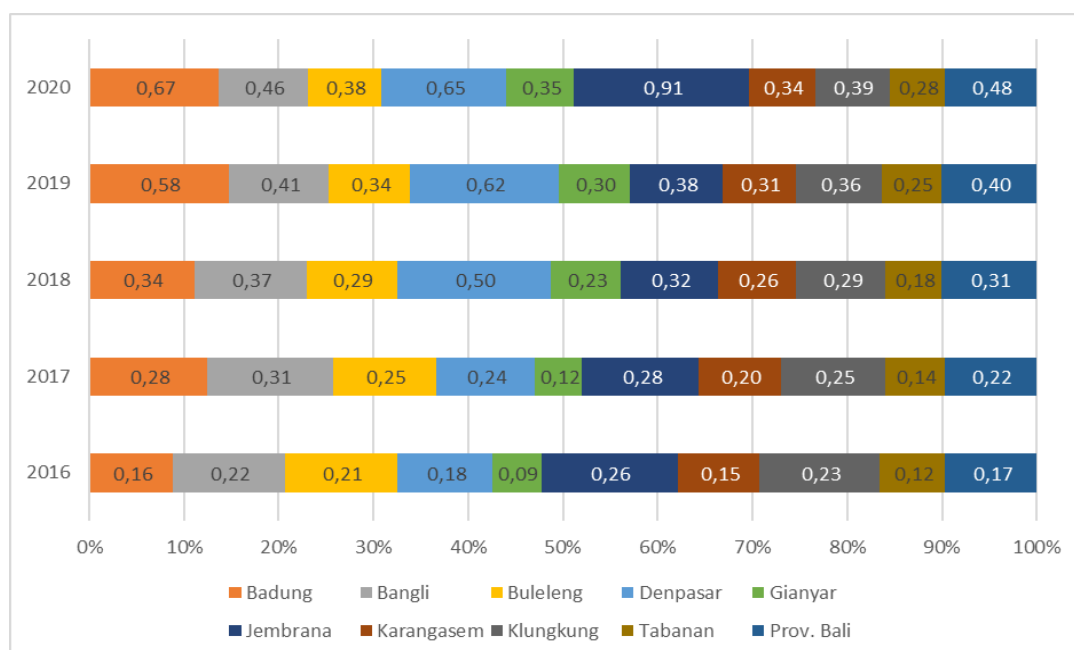
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Bayi Berakte	0,816	0,83	0,92	0,97	0,98

Sumber Data : Disdukcapil Provinsi Bali, 2021

## 3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan ber-Akte nikah dihitung berdasarkan jumlah pasangan yang sudah ber-akte dibagi dengan total jumlah pasangan. Tercata pada tahun 2016 rasio jumlah pasangan berakte adalah sebesar 0,17 yang artinya dari jumlah total pasangan yang ada di Provinsi Bali, hanya 17% yang sudah memiliki Akta Nikah. Angka ini meningkat menjadi 0,48 pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatat perkawinan mereka secara resmi di Disdukcapil Provinsi Bali.

Rasio pasangan yang memiliki akta perkawinan di seluruh Bali meningkat setiap tahunnya. Akta perkawinan merupakan bukti otentik keabsahan telah terjadinya perkawinan sehingga penduduk meningkat keasadarannya untuk membentengi diri apabila terjadi sengketa hukum dan hak-hak privat terlindungi. Tingkat kesadaran penduduk untuk melindungi diri atas keabsahan terjadinya perkawinan dan kejelasan hak pasangan dan anak-anak yang dilahirkan. Pemerintah terus mendorong penduduk yang telah menikah sebelum diberlakukan SIAK agar melaporkan perkawinannya ke Dinas Dukcapil. Banyak penduduk yang belum melaporkan perkawinannya yang dilakukan secara agama/adat yang belum dilaporkan ke Dinas Dukcapil sehingga terlihat rasio pasangan berakte nikah masih kecil.



**Gambar 2.125 Rasio Pasangan Berakte Nikah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Disdukcapil Provinsi Bali, 2021

#### 4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Selama kurun waktu 2016 sampai 2020 seluruh Kabupaten/Kota di Bali telah mengoprasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem inilah yang digunakan untuk melakukan pendataan dan sekaligus menjadi database sistem kependudukan di Provinsi Bali. Setiap tahun sistem ini diperbaharui dengan melakukan update sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi pada setiap tahunnya bisa diatasi dengan melakukan update tersebut. Tercatat sampai dengan tahun 2020 sistem SIAK yang digunakan di Provinsi Bali adalah SIAK Versi 7.3.4. Perkembangan sistem yang digunakan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali ini mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam hal pendataan dan administrasi kependudukan.

**Tabel 2.46 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Database Kependudukan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber Data : Disdukcapil Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.47 Kabupaten/Kota Mengoprasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Provinsi Bali**

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Badung	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4
2	Bangli	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4
3	Buleleng	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4
4	Denpasar	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4
5	Gianyar	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4
6	Jembrana	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4
7	Karangasem	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4
8	Klungkung	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4
9	Tabanan	Siak Versi 5	Siak Versi 6	Siak Versi 7	Siak Versi 7.3.2	Siak Versi 7.3.4

Sumber Data : Disdukcapil Provinsi Bali, 2021

## 5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menggunakan sistem informasi yang dibuat oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh Indonesia dan dilakukan update sesuai dengan kebutuhan. Seluruh kabupaten/kota se-Bali telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7.3.4, sehingga pencetakan dokumen kependudukan selain KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) telah menggunakan kertas putih HVS 80gr dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau Barcode. Dokumen kependudukan dengan TTE tidak perlu lagi legalisir dan Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya TTE tetap berlaku dan sah dan dapat dilakukan legalisir di Dinas Dukcapil penerbit dokumen.

**Tabel 2.48 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
KTP Berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber Data : Disdukcapil Provinsi Bali, 2021

## 6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran atas permintaan penduduk semakin meningkat. Kesadaran penduduk untuk mengurus akta kelahiran semakin meningkat dengan adanya pelayanan online dan tanpa dipungut biaya. Untuk memudahkan pembuatan Akta Kelahiran bagi penduduk yang tidak mempunyai akta kelahiran karena tidak adanya surat kelahiran, pemerintah

telah mengeluarkan regulasi terkait penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kelahiran. Dengan SPTJM ini penduduk dapat melaporkan kelahirannya ke Dinas Dukcapil tempat.

**Tabel 2.49 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**

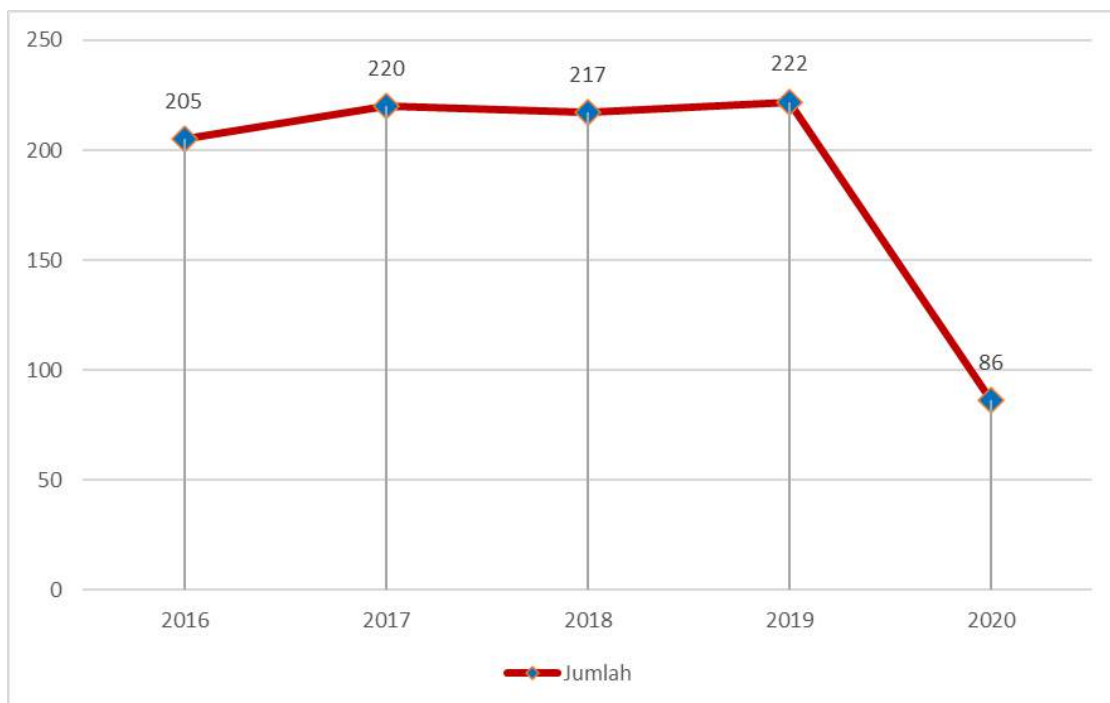
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Akte Kelahiran	34,83%	33,64%	35,79%	40,42%	43,18%

Sumber : Disdukcapil Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### 1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Pemerintahn Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan disebabkan karena kapasitas dan peran LPM dalam pembangunan belum optimal. Selanjutnya pada tahun 2020 pembinaan LPM hanya terfokus pada 3 Kabupaten yaitu Buleleng, Jembrana dan Denpasar karena adanya *refocusing* anggaran. Dampak dari *recofusing* anggaran ini adalah tidak optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada LPM di Provinsi Bali.

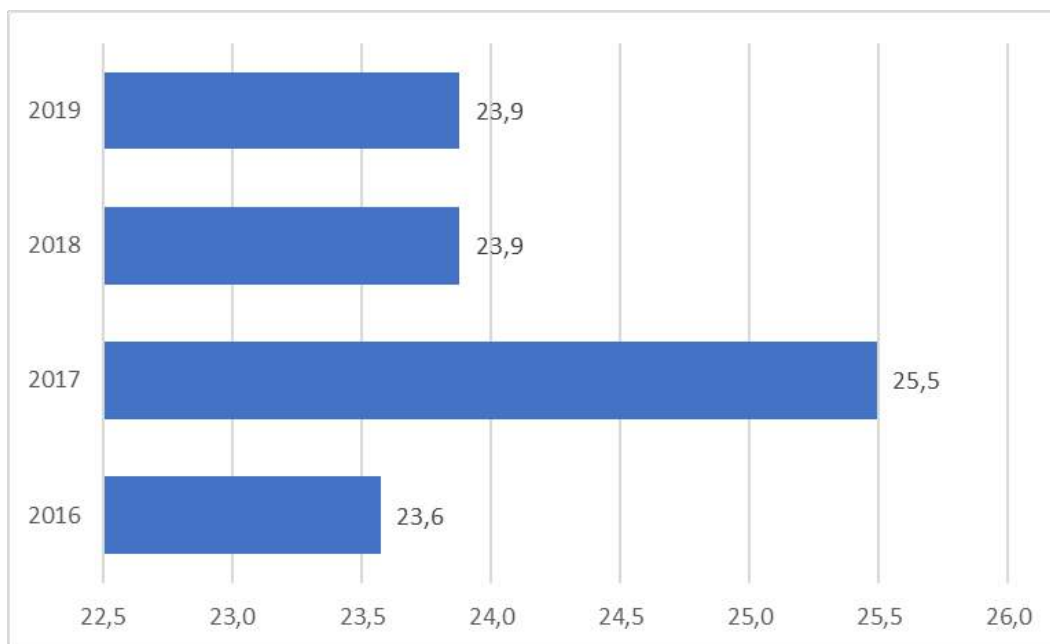


**Gambar 2.126 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas PMD Provinsi Bali, 2021

## 2. Persentase LPM Berprestasi

Setiap tahun dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan dengan melibatkan LPM sebagai pendukung, mengacu kepada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Desa dan Kelurahan. Persentase LPM berprestasi di Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 23,6 persen dan meningkat menjadi 23,9 persen tahun 2019. Persentase LPM berprestasi di pemerintahan Provinsi Bali pada tahun 2017 sampai dengan 2019 cenderung mengalami peningkatan daripada Tahun 2016, disebabkan karena meningkatnya peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2020, perhelatan untuk menentukan persentase LPM berprestasi tidak terlaksana, disebabkan karena perubahan pedoman lomba desa dari Pemerintah Pusat.



**Gambar 2.127 Persentase LPM Berprestasi di Provinsi Bali**

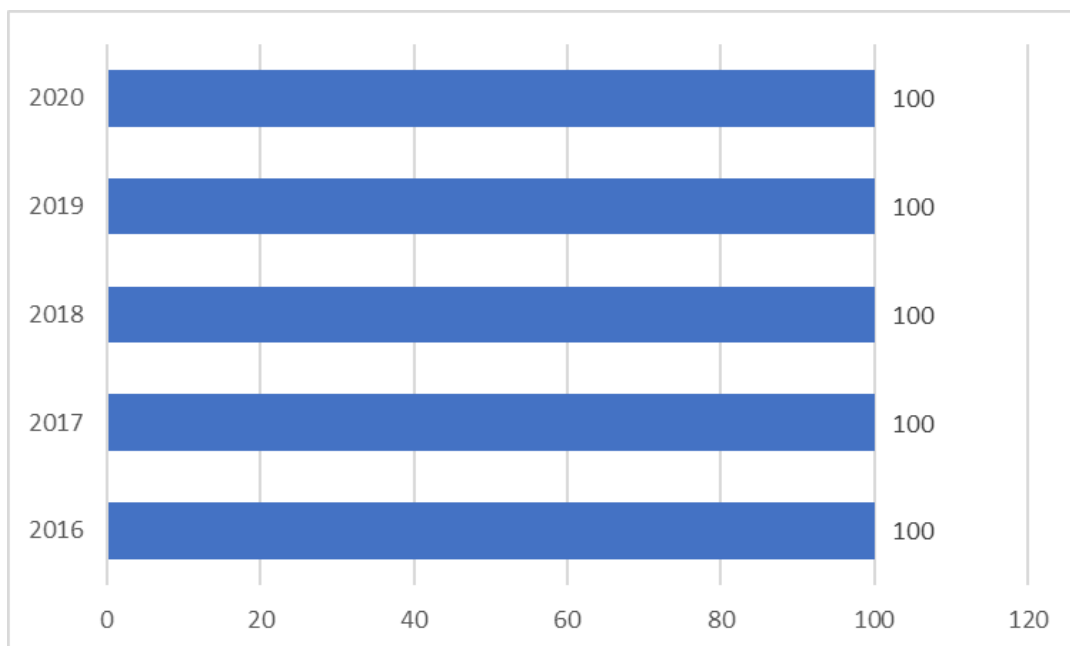
Sumber Data : Dinas PMD Provinsi Bali, 2021

## 3. Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan

Tim Penggerak PKK Provinsi Bali adalah mitra kerja Pemerintah Provinsi Bali bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Bali. Gerakan PKK dengan 10 Program Pokok PKK telah dirasakan secara nyata mampu menurunkan angka kematian ibu/bayi, meningkatkan perekonomian keluarga melalui UP2K PKK, pelestarian lingkungan dan berbagai keberhasilan lainnya. Jejaring gerakan PKK dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa, aktif melaksanakan 10 Program Pokok

PKK dengan efektif dan efisien dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi program.

Peningkatan kualitas dan mutu kader PKK di Provinsi Bali harus dilaksanakan secara berjenjang untuk menjaga terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui pembinaan dari jenjang di atasnya yaitu TP-PKK Provinsi ke jenjang dibawahnya yaitu TP-PKK Kabupaten/Kota dan nantinya diteruskan ke tingkat Desa atau Kelurahan. Pembinaan mencakup penguatan dan penyelarasan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, penyampaian informasi-informasi baru dan kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan isu terbaru.



**Gambar 2.128 Persentase PKK Aktif Desa/Kelurahan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas PMD Provinsi Bali, 2021

#### **4. Persentase Posyandu Aktif**

Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, telah melakukan pemantauan dan sekaligus mengevaluasi terhadap keberadaan dan perkembangan Kelompok posyandu, terutama kelompok – kelompok posyandu Strata Pratama dan Strata Madya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap sehingga desa yang dapat dibina sekitar 34 desa 242 Posyandu di seluruh Kabupaten/Kota se Bali.

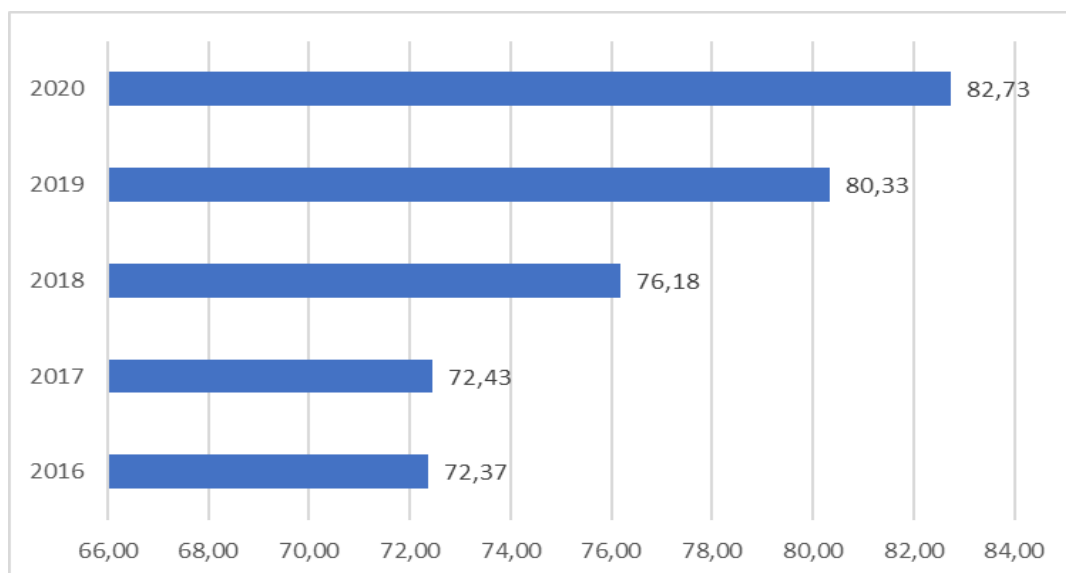
Berdasarkan dari hasil kegiatan tersebut, hampir seluruh Posyandu yang kita bina dan kita pantau, sudah dapat dikatakan aktif tiap bulan buka dan dapat dikatagorikan Strata Madya yang mana dapat dilihat dari belum

Optimalnya perhatian Pemerintah desa terhadap Lembaga Posyandu khususnya terhadap Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Posyandu yang belum optimal.

Permasalahan dari semua posyandu yang di bina adalah masih banyak yang berstatus Madya yang akan menuju Posyandu Purnama, hal ini mengacu pada aktivitas bulannya serta Posyandu tersebut rata – rata belum punya Dana Sehat sesuai dari kriteria dari Posyandu Purnama.

Namun Demikian Posyandu yang ada di seluruh Bali sudah menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun yang mana sudah terbukti peningkatan dari Strata Posyandu yang pada tahun sebelumnya menunjukkan Perubahan pada masing – masing Strata. Posyandu dikatakan aktif apabila minimal Posyandu yang ada di Desa atau Kelurahan 25 % sudah mencapai tingkat Posyandu Purnama, yaitu posyandu yang telah melakukan penimbangan lebih dari 8 (delapan ) kali dalam setahun dengan rerata kader yang bertugas 5 orang atau lebih, cakupan sasaran yang ditimbang kegiatan KIA, KB, dan imunisasi sudah 50 % atau lebih, sudah memiliki kegiatan tambahan, namun sasaran yang berpartisipasi dalam dana sehat kurang dari 50 %. Jadi sesuai dengan uraian diatas yang termasuk Posyandu Aktif adalah Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri.

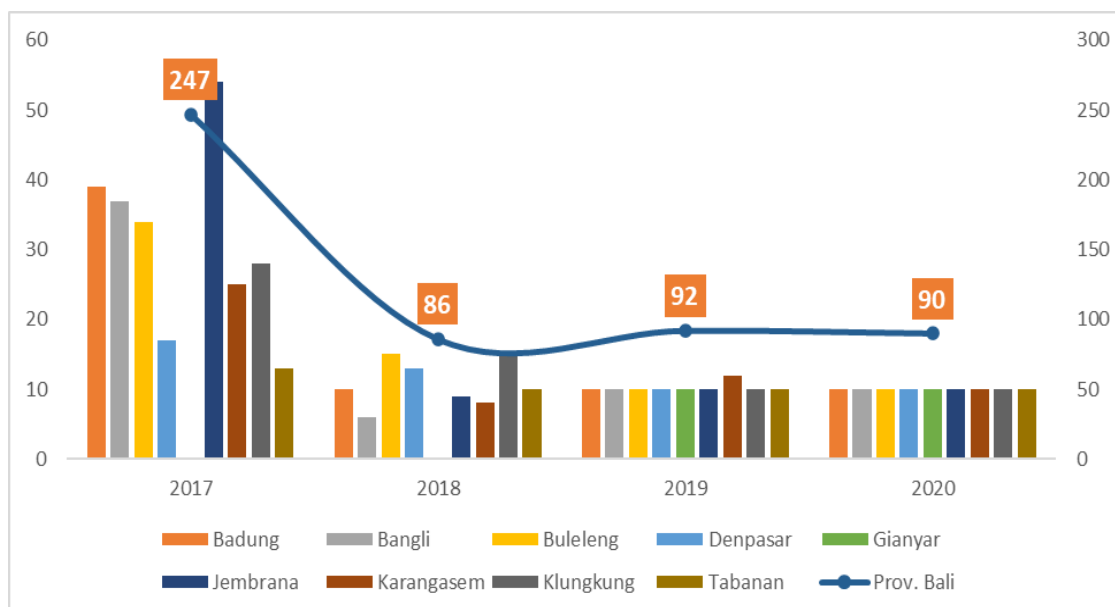
Dengan diadakan berbagai macam usaha Pembinaan ke Kabupaten/Kota sudah dapat di lihat bahwa dari Tahun ke Tahun Posyandu yang aktif (Strata Purnama + Strata Mandiri) sudah mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.



**Gambar 2. 129 Persentase Posyandu Aktif di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Dinas PMD Provinsi Bali, 2021

Jumlah posyandu Model/Integrasi yang dibina di Provinsi Bali dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan yaitu 247 pada tahun 2017, menurun menjadi 86 pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 92 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 90. Jumlah posyandu yang dibina di Provinsi Bali berdasarkan kemampuan fiskal dan di prioritaskan bagi posyandu yang stratanya masih rendah. Persentase Posyandu Aktif di Provinsi Bali dari tahun ke tahun cenderung meningkat dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain: kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk datang ke posyandu, Kemampuan kader dan pengurus pokja posyandu desa untuk mengembangkan posyandu semakin meningkat, Serta adanya dukungan dana desa dalam kegiatan posyandu.



**Gambar 2.130 Posyandu Model/Integrasi yang Dibina di Provinsi Bali**

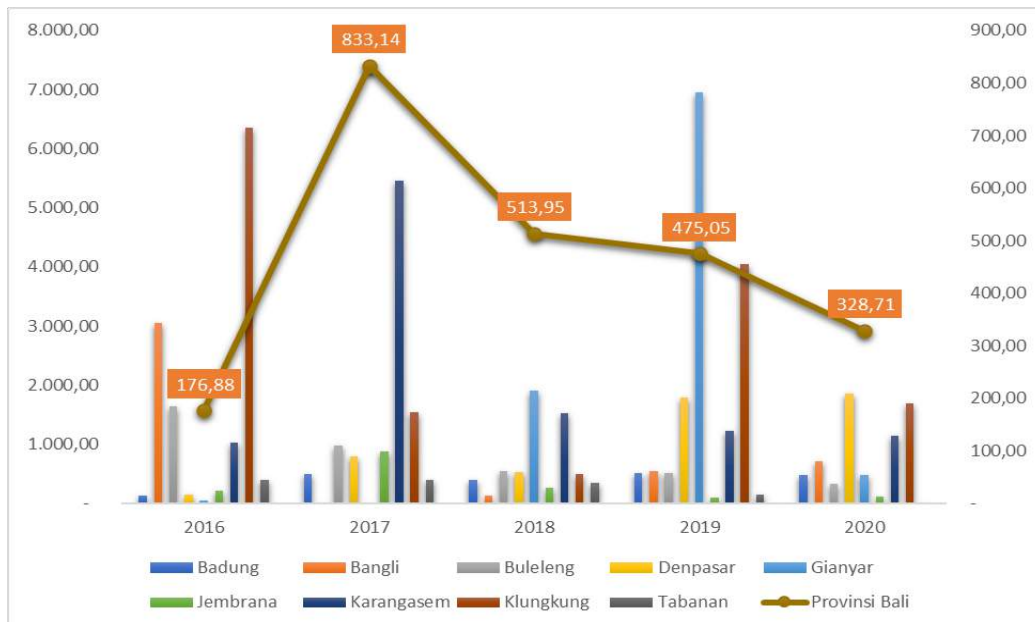
Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

## 5. Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Tingginya persentase swadaya murni masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali setiap tahunnya disebabkan karena meningkatnya kemandirian masyarakat dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam berbagai bidang pembangunan di desa/kelurahan. Persentase nilai swadaya murni masyarakat di Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai dengan 2020 melebihi 100 persen yang artinya bahwa kemandirian masyarakat, gotong royong dan swadaya sangat tinggi melebihi bantuan program pembangunan/pemberdayaan yang telah masuk ke desa/kelurahan.



Jumlah swadaya murni masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlah swadaya murni sebesar 176. Pada tahun 2017 jumlah swadaya murni masyarakat meningkat menjadi 833, namun pada tahun 2018 sampai dengan 2020 jumlah swadaya masyarakat menurun menjadi 513, 475, dan 328.



**Gambar 2. 131 Swadaya Murni Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

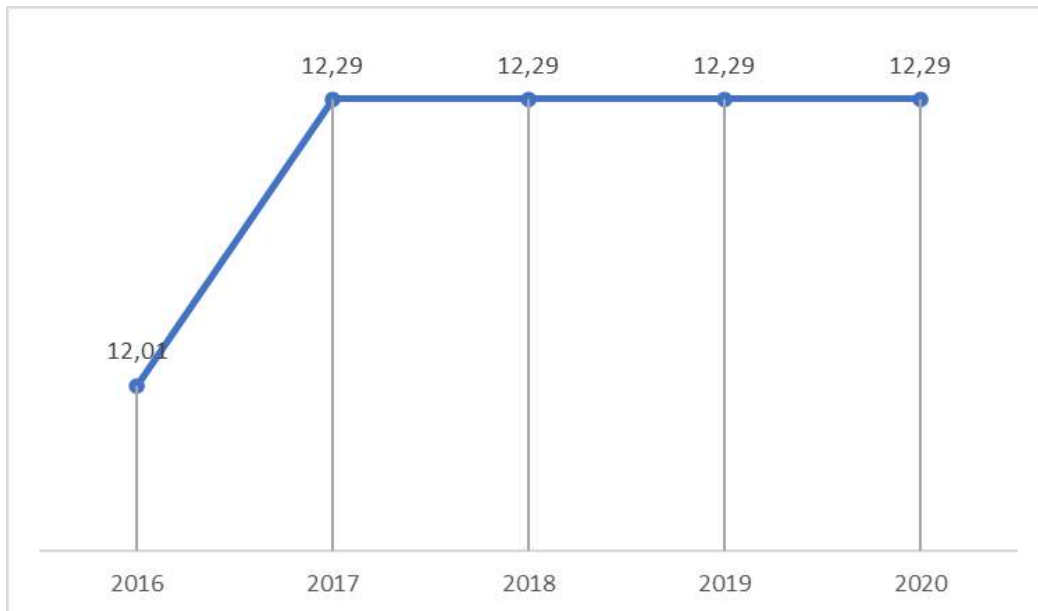
Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

## 6. Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah Dibina

Gerakan PKK dengan 10 Program Pokok PKK yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK mulai dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Tingkat Desa telah mampu menunjukkan trend peningkatan derajat kehidupan masyarakat Bali diantaranya penurunan angka kematian ibu/bayi, peningkatan jumlah kelompok UP2K PKK, dan masih banyak keberhasilan di bidang lainnya.

Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK terus dilaksanakan untuk penyempurnaan program dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui Lomba Kegiatan PKK (Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan, HKG dan Jambore) Tingkat Provinsi Bali. Pelaksanaan Lomba selain bertujuan untuk mengevaluasi, juga sebagai bentuk penghargaan kepada Tim Penggerak PKK Desa yang telah berkomitmen dan menghasilkan inovasi - inovasi baru dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Provinsi Bali adalah Pembinaan kepada pemenang Lomba Kegiatan PKK Desa di sembilan Kabupaten/Kota, yaitu 9 jenis Lomba Kegiatan PKK dan 7 jenis Lomba Jambore Tingkat Provinsi Bali.



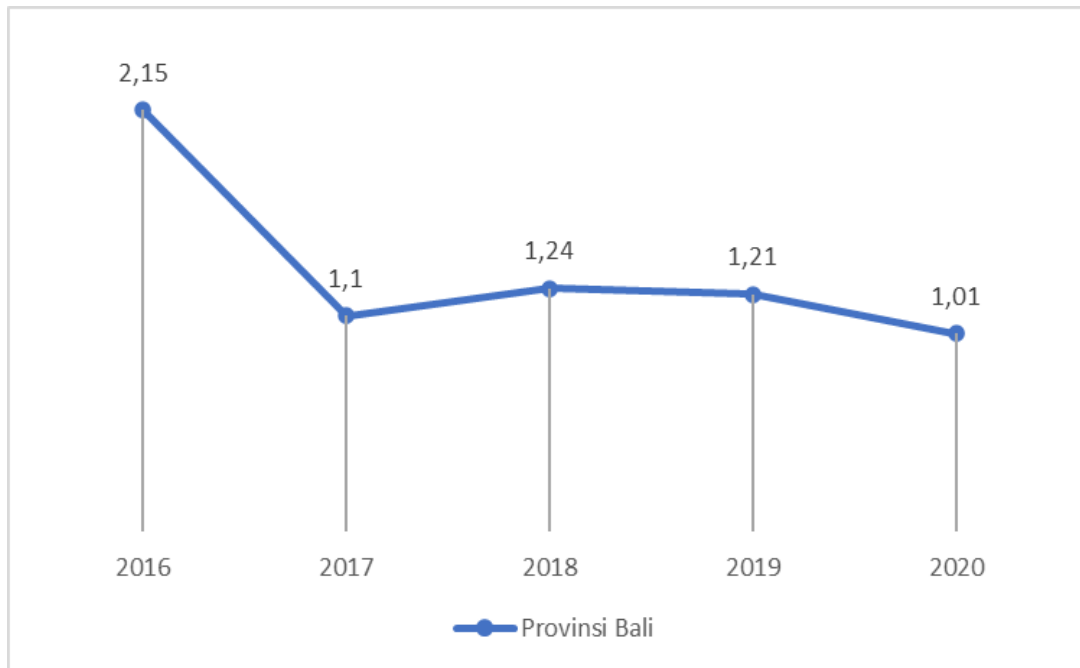
**Gambar 2. 132 Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah Dibina di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas PMD Provinsi Bali, 2021

#### **2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

##### **1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 yaitu sebesar 1,34 persen. Angka ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan selama periode tersebut, dimana pada tahun 2016 angkanya adalah 2,15 dan pada tahun 2020 mencapai 1,01. Pertumbuhan yang semakin menurun ini disebabkan oleh semakin sadarnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Program Keluarga Berencana (KB). Ini sekaligus mengindikasikan bahwa 10 tahun kedepan pertumbuhan akan semakin rendah dan berpotensi mengurangi kepadatan di Provinsi Bali.

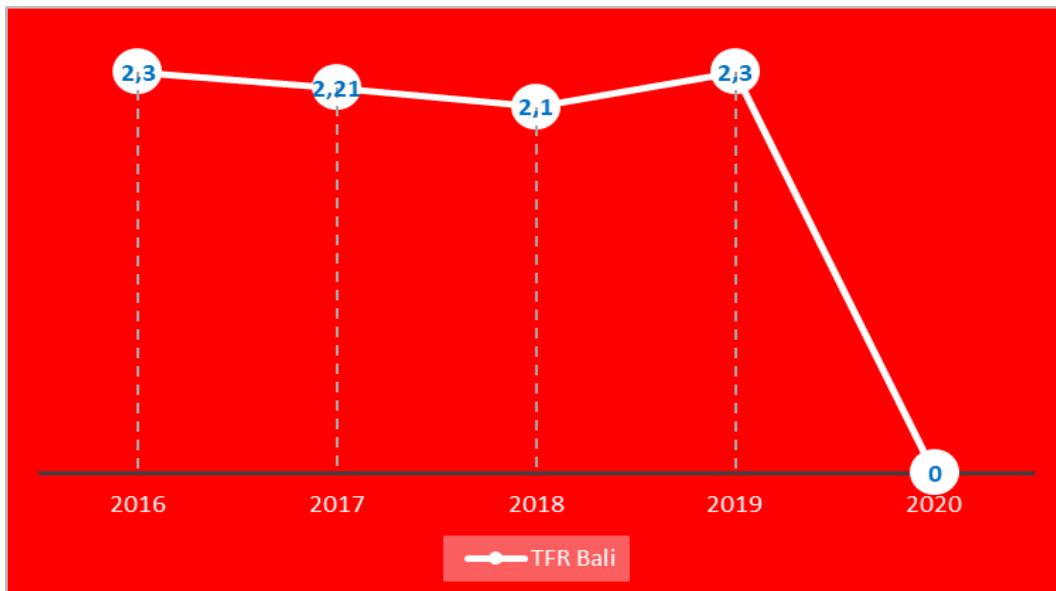


**Gambar 2.133 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Bali**

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

## 2. Total Fertility Rate (TFR)

Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR berfungsi sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Angka TFR di Provinsi Bali ditunjukkan oleh Gambar 2.134 dimana pada tahun 2016 angka TFR untuk Provinsi Bali adalah sebanyak 2,3 kemudian pada tahun 2017 sepat menurun menjadi 2,21 dan pada tahun 2018 menjadi 2,1. Namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,3. Pada tahun 2020 tidak tersedia data TFR Provinsi Bali sehingga tidak diketahui apakah terjadi peningkatan angka TFR atau tidak.



**Gambar 2.134 Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Bali**

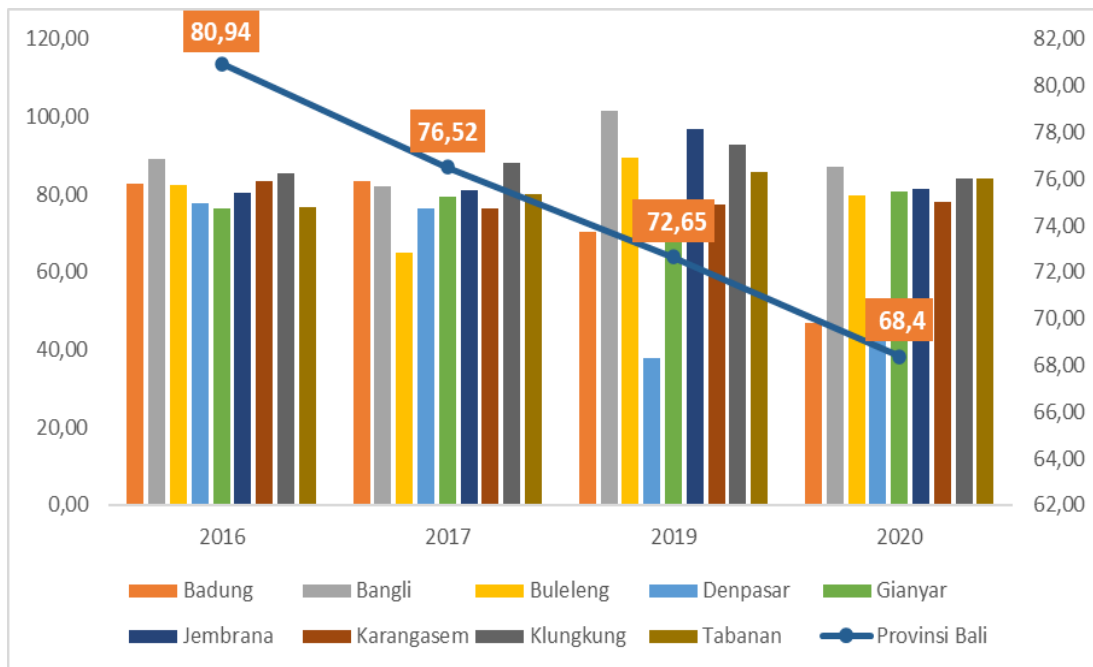
Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

### **3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB**

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB pada tahun 2019 sebesar 29,87 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 33,03 persen pada tahun 2020.

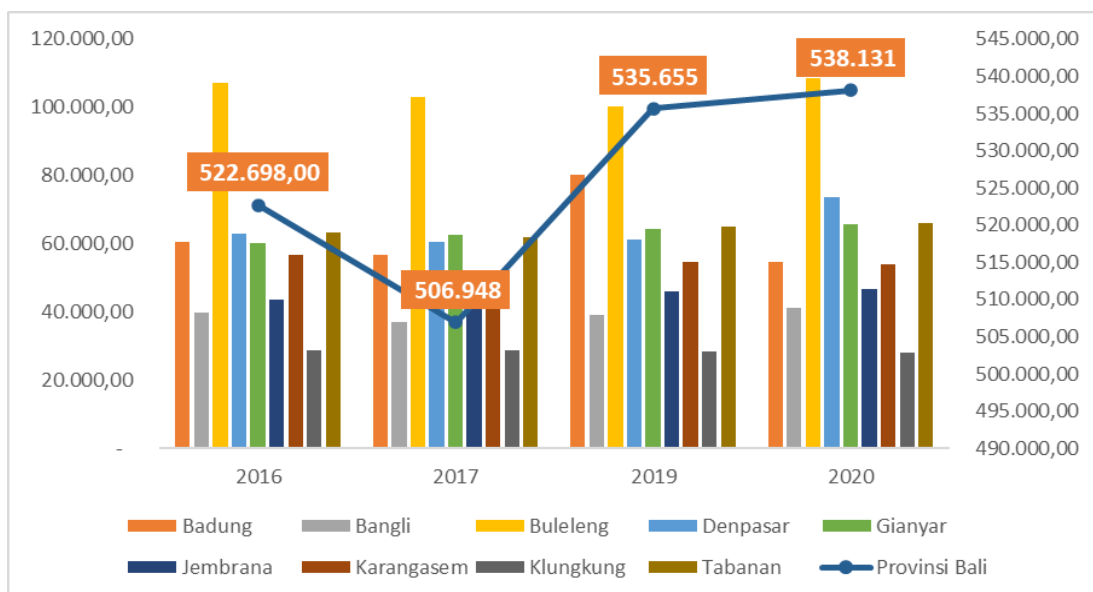
### **4. Persentase KB Aktif di Provinsi Bali**

Persentase KB aktif mengalami penurunan dari 80,94 persen pada tahun 2016 menjadi 76,52 persen pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut menurun menjadi 72,65 persen dan 68,4 persen. Peserta KB aktif tertinggi pada tahun 2020 ada di Kabupaten Bangli sebesar 87,2 persen dan yang terendah ada di Kabupaten Badung yaitu sebesar 47,0 persen.



**Gambar 2. 135 Persentase KB Aktif dan DO KB di Provinsi Bali**

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2.136 Peserta KB Aktif Kabupaten/Kota**

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

## 5. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk selama kurun aktu 2016 sampai 2020 sebesar 1 persen. Telah dilakukan filterisasi penduduk, masuk wilayah Provinsi Bali di pantau melalui pintu-pintu masuk pelabuhan meliputi Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Pelabuhan Padang Bai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar

## **6. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk**

Belum ada kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Namun, telah dilakukan filterisasi penduduk Pengendalian Kependudukan menggunakan UU, PP dan Permen terkait tahun 2010. melalui Perda no 7/2010 tentang Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.

## **7. Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan**

Belum ada sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Namun selama kurun waktu 2014 sampai 2017 OPD yang sudah memanfaatkan data Profil Perkembangan Penduduk sebagai berikut:

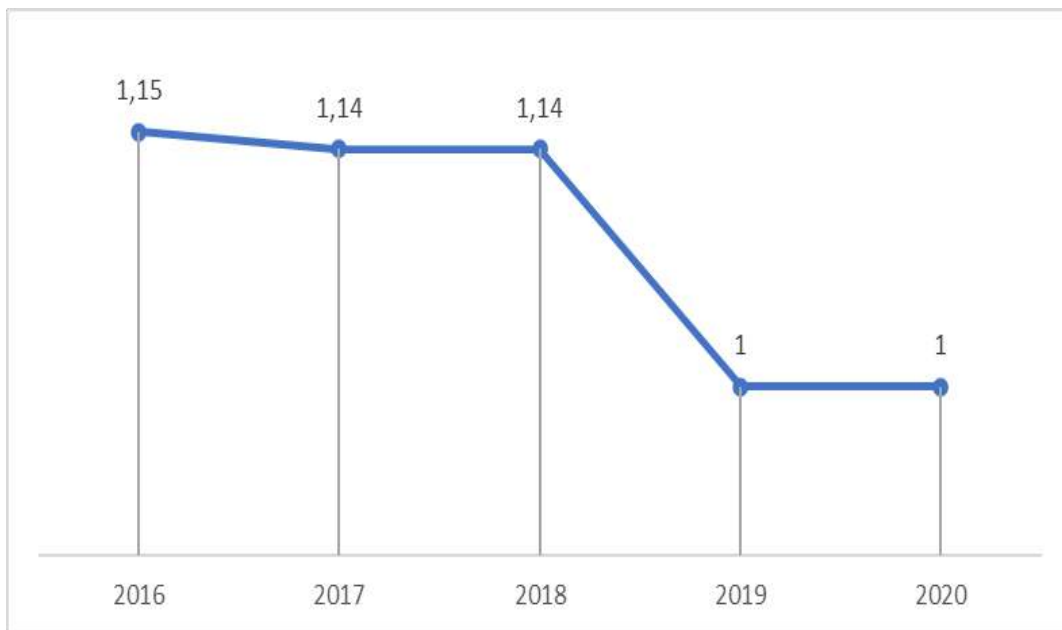
1. BAPPEDA Litbang Provinsi Bali
2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Dinas Pendidikan Provinsi Bali
4. BKKBN Provinsi Bali
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
6. Dinas Tenaga Kerja dan Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
7. Dinas Sosial Provinsi Bali

Kedepannya akan didorong lebih banyak OPD yang menggunakan data Penduduk.

## **8. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Rata-rata jumlah anak dalam Keluarga di Provinsi Bali antara 1 sampai dengan 2. Data ini diperoleh dari jumlah jumlah anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dibagi jumlah Kepala Keluarga. Data diambil dari data base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Untuk memastikan jumlah rata-rata anak dalam keluarga perlu dilakukan pendataan keluarga. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anak per keluarga di Provinsi Bali sebesar 1,15. Angka tersebut menurun menjadi 1,4 pada

tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 angka tersebut menurun lagi menjadi 1.

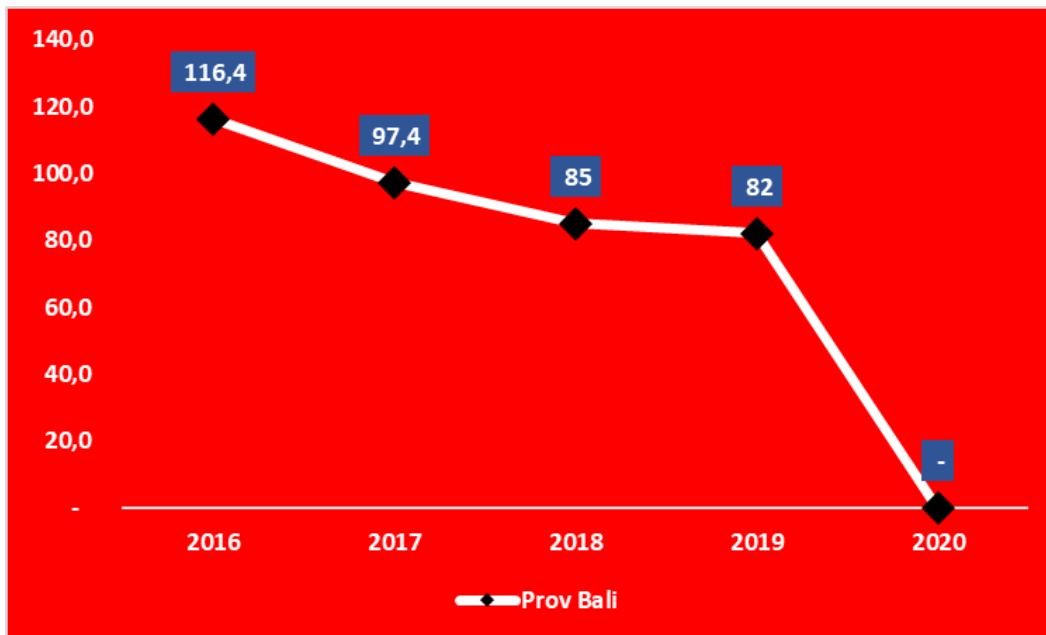


**Gambar 2.137 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Provinsi Bali**

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

## 9. Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah penerima KB (berbagai jenis metode) dengan jumlah pasangan usia subur. Rasio ini dihitung untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan mengikuti program KB. Rasio akseptor KB di Provinsi Bali sebesar 116,36 pada tahun 2016 selanjutnya pada tahun 2017 rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 97,4. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2018 dimana rasio akseptor KB kembali mengalami penurunan menjadi 83,11. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang tidak menggunakan KB. Ini berpotensi semakin meningkatkan total kelahiran atau TFR di Provinsi Bali.

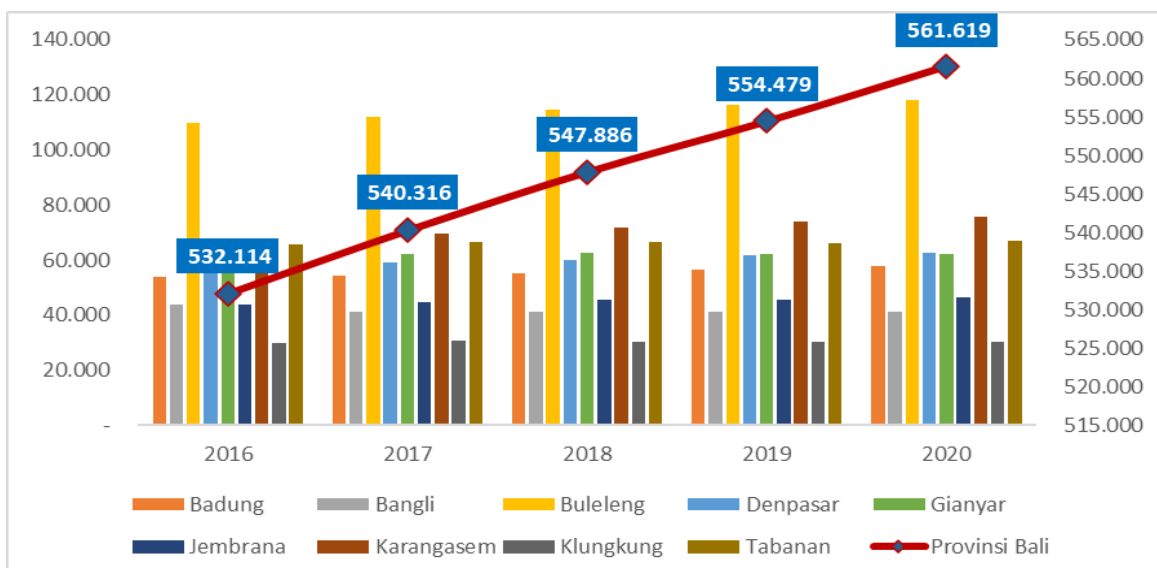


**Gambar 2.138 Rasio Akseptor KB di Provinsi Bali**

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

### 10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Peningkatan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan yang sudah menikah pada jenjang usia 15-49 tahun menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya KB. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya kebutuhan hidup termasuk mahalnya biaya perawatan anak, sehingga banyak orang tua yang mulai lebih berpikir tentang jumlah anak yang harus dibesarkan. Tercatat pada tahun 2016 jumlah peserta kontrasepsi/CPR untuk perempuan pada jenjang usia 19-45 tahun adalah sebanyak 532.114 dan meningkat menjadi 561.619 pada tahun 2020.



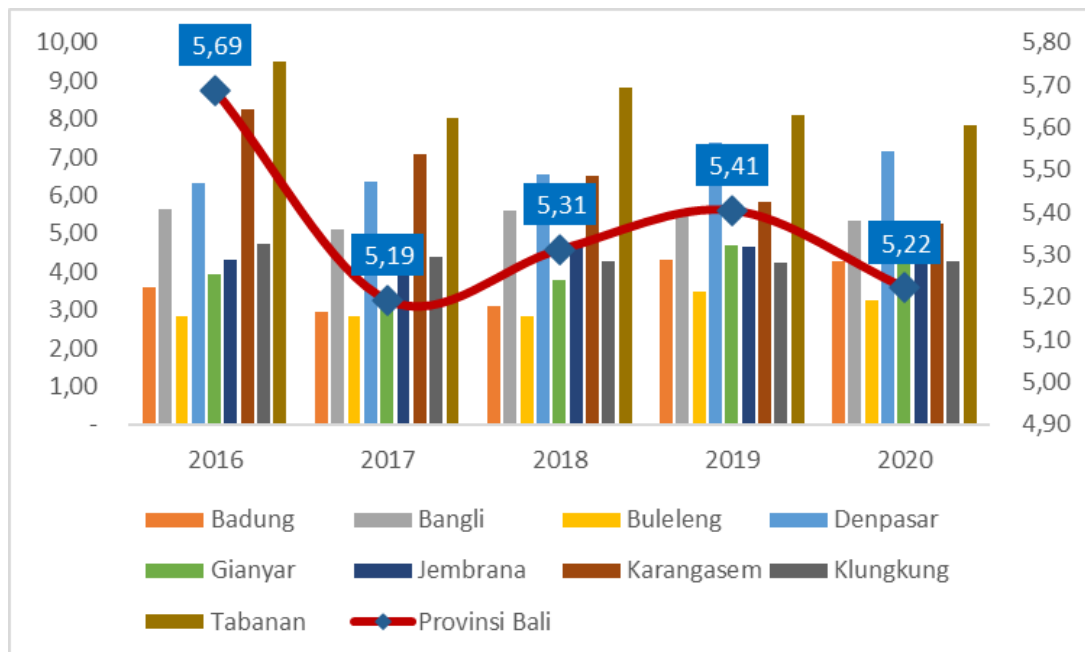
**Gambar 2.139 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 di Provinsi Bali**

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021



### 11. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) di provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 5,69 persen mengalami penurunan menjadi 5,22 persen pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun telah terjadi peningkatan pelayanan KB untuk PUS meskipun angkanya tidak signifikan.

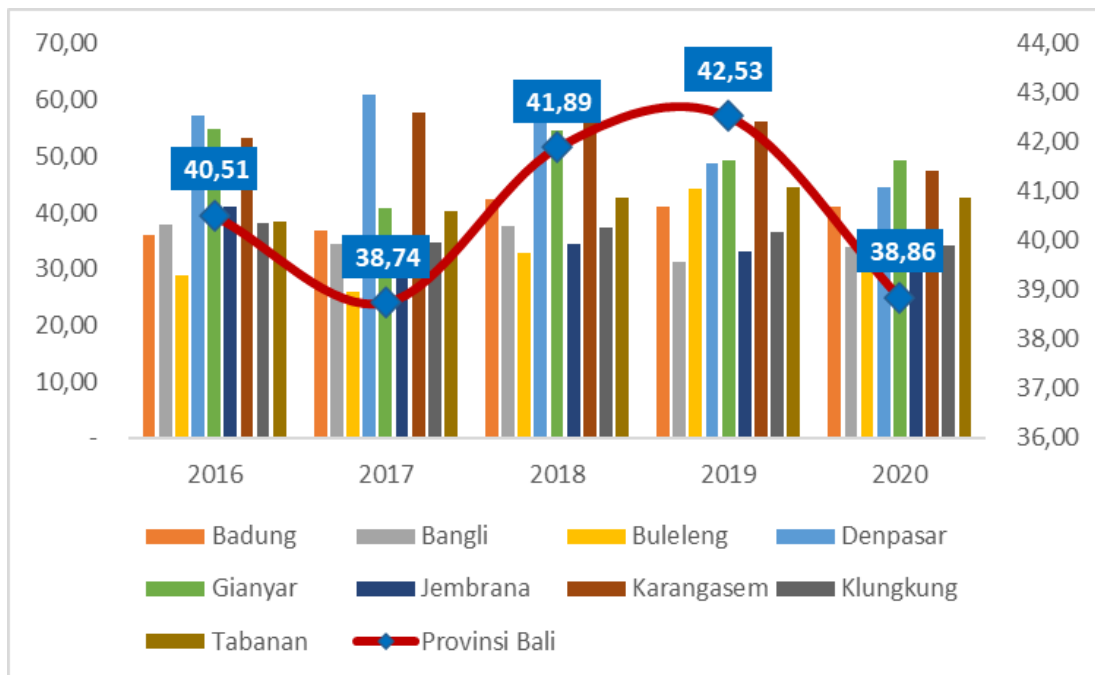


**Gambar 2.140 Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) di Provinsi Bali**

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

### 12. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada tahun 2016 adalah sebesar 40,51 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 38,86 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa pasangan usia subur masih belum memahami penggunaan dari kontrasepsi jangka panjang. Hal ini lebih karena masyarakat merasa khawatir dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang akan berdampak buruk kepada kesehatan dan reproduksi mereka nantinya.

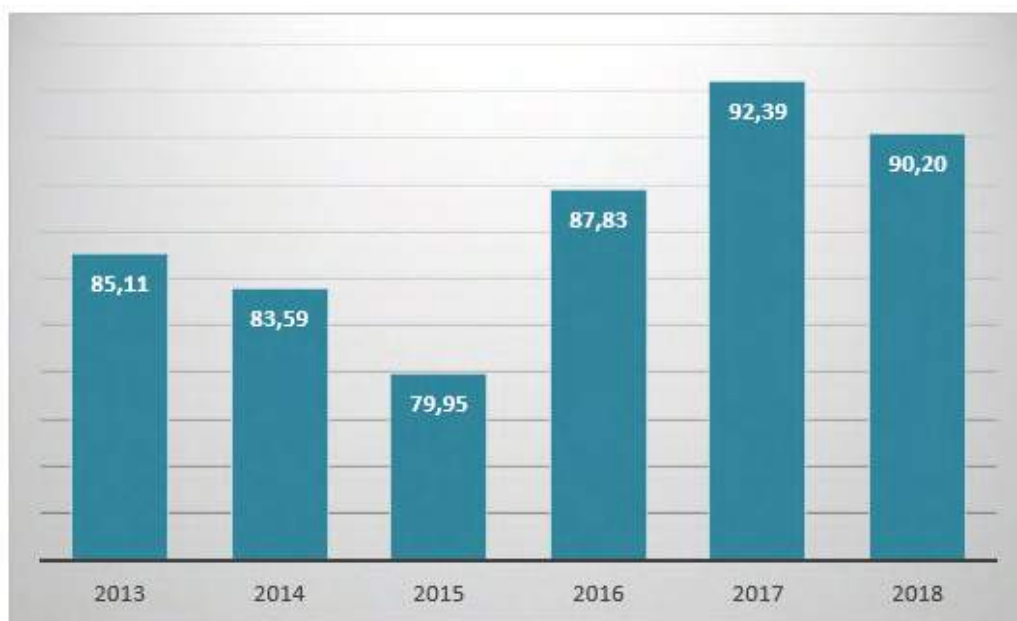


**Gambar 2. 141 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Bali**

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

### 13. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Provinsi Bali mengalami penurunan dari 85,11 persen pada tahun 2013 menjadi 79,95 persen pada tahun 2015. Persentase tersebut mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 menjadi 92,39 persen. Namun persentase tersebut mengalami penurunan tahun 2018 menjadi 90,20.



**Gambar 2. 142 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di provinsi Bali Tahun 2013-2018**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

#### **14. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB**

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB mengalami peningkatan dari 71,70 persen pada tahun 2014 menjadi 91,42 persen pada tahun 2016. Namun, mengalami penurunan menjadi 88,90 persen pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 87,7. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB pada tahun 2014 sebesar 72,07 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 53,40 persen. Namun, kembali meningkat sebesar 65,67 persen pada tahun 2016 dan 81,70 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 85,2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Provinsi Bali pada tahun 2014 sebesar 70,48 persen dan mengalami penurunan menjadi 34,82 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, cakupan tersebut meningkat menjadi 62,64 persen, tahun 2017 meningkat kembali menjadi 84,60 dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 70,48.



**Gambar 2. 143 Cakupan Anggota BKB, BKR, dan BKL Ber-KB di Provinsi Bali Tahun 2014-2018**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

#### **15. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan**

Terdapat 1 petugas PPKBD di setiap desa/kelurahan selama kurun waktu 2016 sampai 2020.

## **16. Persentase Remaja (Umur 14 s.d 19 th) Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Berdasarkan data yang disampaikan oleh BKKBN melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali. Data persentase remaja (umur 14 tahun sampai dengan 19 tahun) yang terkena infeksi penyakit menular seksual (IMS) hanya tersedia pada tahun 2016 dan 2017. Setelah itu BKKBN tidak merilis data terkait sampai dengan tahun 2020. Jika merujuk pada data yang telah disampaikan BKKBN, maka jumlah remaja yang terkena penyakit seksual tergolong kecil. Namun demikian angka ini kemungkinan tidak menunjukkan kondisi real di lapangan dikarenakan jenis penyakit ini biasanya lebih banyak ditutupi. Sehingga upaya edukasi tentang pendidikan sex sangat perlu dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya potensi perkembangan penyakit IMS di kalangan remaja di Provinsi Bali.

**Tabel 2.50 Persentase Remaja ( Umur 14 s.d 19 th) Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Badung	66,0	40,0	-	-	-
2	Bangli	-	NA	-	-	-
3	Buleleng	47,0	17,0	-	-	-
4	Denpasar	94,0	83,0	-	-	-
5	Gianyar	33,0	57,0	-	-	-
6	Jembrana	-	1,0	-	-	-
7	Karangasem	-	NA	-	-	-
8	Klungkung	-	1,0	-	-	-
9	Tabanan	-	1,0	-	-	-
	Provinsi Bali	240,0	200,0	-	-	-

Sumber Data : BKKBN Provinsi Bali, 2021

## **17. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**

Rata-rata usia kawin pertama wanita di Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 22,7 selanjutnya meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 21,64 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 22,7.

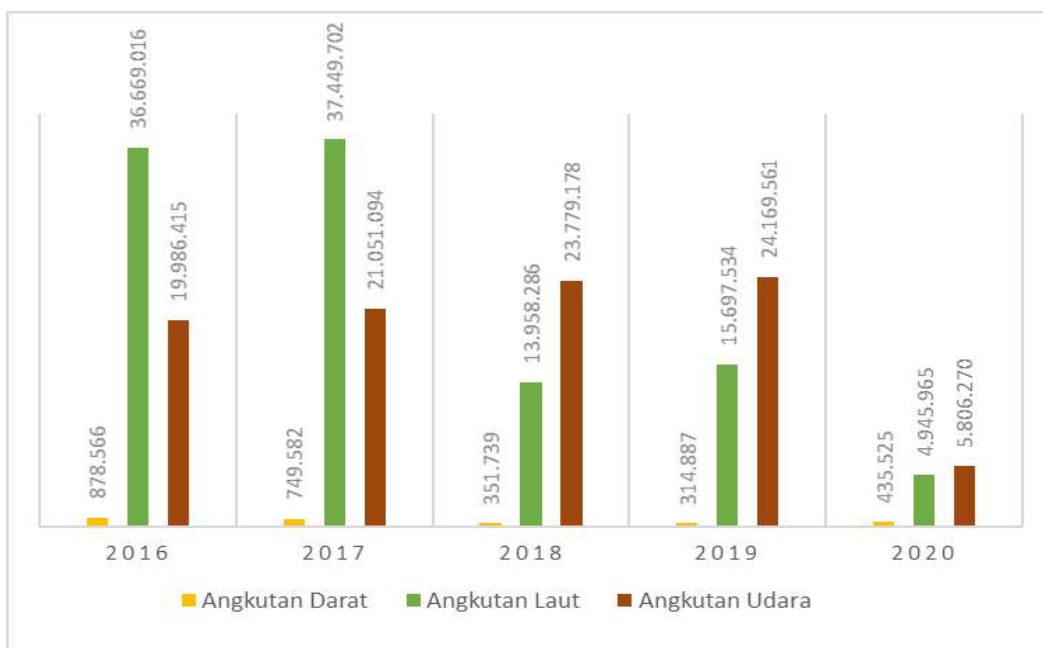
### **2.3.1.15 Perhubungan**

#### **1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

Selama kurun waktu 2016 sampai 2017, jumlah arus penumpang angkutan umum terbesar yaitu untuk angkutan laut dan yang terendah untuk

angkutan darat. Kurun waktu 2018 sampai 2020, jumlah arus penumpang angkutan umum terbesar yaitu untuk angkutan udara dan yang terendah untuk angkutan darat. Pada tahun 2020, jumlah arus penumpang angkutan udara sebesar 5.806.270, untuk angkutan laut sebesar 4.945.965, dan angkutan darat sebesar 435.525.

Penurunan arus penumpang menggunakan angkutan udara dan laut disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat karena pandemi Covid-19 dengan persyaratan yang sangat ketat. Peningkatan yang terjadi pada arus penumpang angkutan darat disebabkan karena mobilitas angkutan orang yang semula melalui laut dan udara beralih menggunakan angkutan darat, sedangkan angkutan barang melalui darat juga tetap mengalami penurunan.



**Gambar 2.144 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Bali**

Sumber Data: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2021

## 2. Rasio Ijin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Izin trayek selain sebagai salah satu penghasilan pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi penguasa transportasi untuk melakukan usaha secara legal. Izin trayek tersebut sekaligus menggambarkan tingkat keterlayanan masyarakat terhadap akses transportasi untuk melakukan berbagai aktifitasnya. Dengan demikian penting sekali melakukan pencatatan izin trayek untuk bisa memetakan bagaimana kondisi transportasi di wilayah Provinsi Bali. Untuk mengetahui

apakah masyarakat sudah mendapatkan layanan transportasi, bisa dilakukan dengan menghitung rasio izin trayek. Rasio izin trayek di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020, yaitu 1:43.751; 1:44.234; 1:30.441; 1:45.176 dan 1:45.633. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan atau penurunan yang signifikan terhadap layanan akses transportasi bagi masyarakat di Provinsi Bali. Selain itu budaya masyarakat yang kurang menyukai penggunaan transportasi umum menyebabkan kebutuhan akan pelayanan transportasi juga rendah.

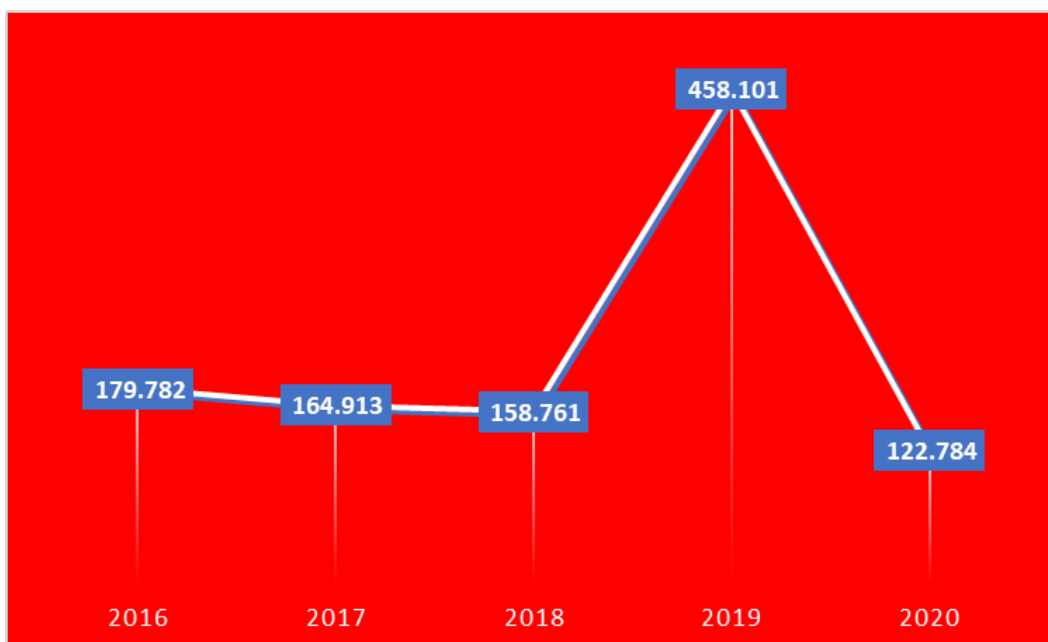
**Tabel 2.51 Rasio Ijin Trayek Provinsi Bali**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin Trayek	96	96	141	96	96
2	Jumlah Penduduk	4.200.100	4.246.500	4.292.200	4.336.900	4.380.800
3	Rasio	1:43.751	1:44.234	1:30.441	1:45.176	1:45.633

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2021

### 3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah uji Kir angkutan umum pada tahun 2016 yaitu 179.782 dan meningkat menjadi 164.913 pada tahun 2017. Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 158.761 pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 458.101 pada tahun 2019 dan mengalami penuruan pada tahun 2020 sebesar 122.784.

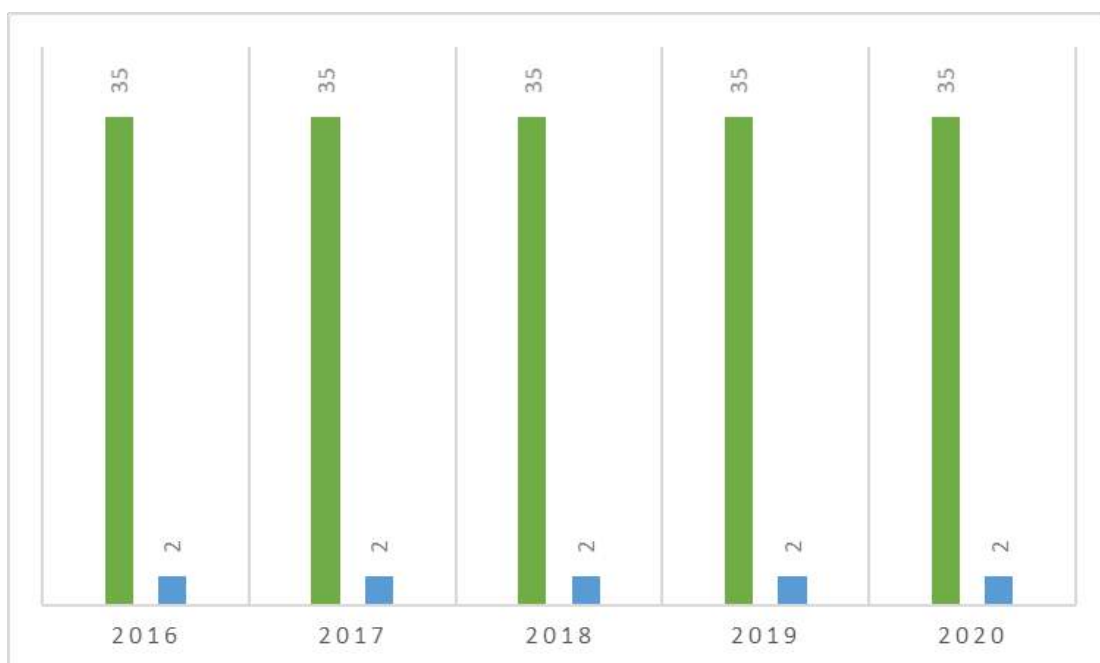


**Gambar 2.145 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2021

#### 4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah rencana pelabuhan di Provinsi Bali menurut RIPNAS adalah 28 pelabuhan akan tetapi jumlah pelabuhan yang sudah ditetapkan selama kurun waktu 2016-2020 yaitu sebanyak 8 pelabuhan. Jumlah bandara di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 yaitu sebanyak 1 bandara dan untuk jumlah terminal bis di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 20 Terminal dan masih adanya progres sejumlah 3 pelabuhan yaitu pelabuhan sanur yang terletak di Denpasar, pelabuhan sampalan dan bias munjul yang terletak di Kabupaten Klungkung.



**Gambar 2.146 Jumlah Pelabuhan dan Bandara di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2021

#### 5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan yaitu 21.780 pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penumpang pada tahun yang sama adalah sebesar 852.895. Berdasarkan perhitungan rasio angkutan terhadap jumlah penduduk, maka pada tahun 2017 100% penduduk di Provinsi Bali sudah mendapatkan layanan angkutan darat. Persentase layanan angkutan darat selama 2016 sampai 2020 diperlihatkan oleh gambar 2.147 dimana dari tahun ke tahun persentase layanan sudah menunjukkan angka yang sangat baik, namun adanya sedikit penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh pemerintah

adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan dan kualitas berbagai fasilitas penunjang yang seharusnya bisa disiapkan.



**Gambar 2.147 Persentase Layanan Angkutan Darat di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2021

## 6. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu lalu lintas adalah papan tanda yang didirikan di sisi atau di atas jalan untuk memberi instruksi atau informasi kepada pengguna jalan. Rambu lalu lintas berfungsi untuk memudahkan pengendara dan sebagai navigasi dalam perjalanan serta membantu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada berbagai macam-macam rambu lalu lintas yang bisa Sahabat temui ketika berkendara. Setiap rambu tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Rambu perintah adalah rambu-rambu yang berisi perintah kepada para pengguna jalan yang wajib untuk dipatuhi. Ada banyak simbol rambu perintah yang memiliki maknanya masing-masing. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, Pemerintah Provinsi Bali selalu menjaga dan meningkatkan rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah Provinsi Bali sampai ke pelosok desa.

Persentase pemasangan rambu-rambu di Provinsi Bali selama kurun waktu 2016 sampai 2020 yaitu 93 pada tahun 2016, 257 pada tahun 2017, 265 pada tahun 2018 dan 139 pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 tidak adanya pemasangan rambu-rambu karena dampak pandemi Covid-19



kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas rambu-rambu tidak dapat dilaksanakan .



**Gambar 2.148 Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dishub Provinsi Bali, 2021

## 7. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Bali selama tahun 2018 sampai 2020, yaitu 1:501,1; 1:525,6; 1:553,9; 1:585,5; dan 1:437,6.

**Tabel 2.52 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di provinsi Bali**

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	743,34	743,34	743,34	743,34	743,34
2	Jumlah Kendaraan	3.725.392	3.907.049	4.117.949	4.352.596	3.253.511
3	Rasio	1:501.1	1:525.6	1:553.9	1:585.5	1:437.6

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2021

## 8. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut dengan angkutan darat menurun dari 878.566 orang pada tahun 2016 menjadi 435.525 orang pada tahun 2020. Pada tahun 2016, jumlah barang yang terangkut dengan angkutan darat yaitu 115.994 barang dan menurun menjadi 70.612 barang pada tahun 2020. Jumlah orang yang terangkut dengan angkutan laut paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 37.449.702 orang. Jumlah tertinggi untuk barang

yang terangkut dengan angkutan laut terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 543.159.485 barang. Jumlah tertinggi orang yang terangkut dengan angkutan udara terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 24.169.561 orang dan untuk jumlah barang tertinggi pada tahun yang sama 2019 sebesar 372.013.846 barang.

**Tabel 2.53 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum di Provinsi Bali**

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Angkutan Darat</b>					
a	Orang	878.566	749.582	351.739	314.877	435.525
b	Barang	115.994	119.381	121.818	392.129	70.612
2	<b>Angkutan Laut</b>					
a	Orang	36.669.016	37.449.702	13.958.386	15.697.534	3.761.026
b	Barang	11.889.193	11.597.731	543.159.485	200.412.990	1.539.540
3	<b>Angkutan Udara</b>					
a	Orang	19.986.415	21.051.094	23.779.178	24.169.561	5.806.270
b	Barang	202.366.091	214.493.127	313.520.106	72.013.846	47.276.383

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2021

### **9. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun**

Pada tahun 2020 jumlah orang yang melalui dermaga sebesar 4 juta orang dan jumlah barang sebesar 2 juta barang. Jumlah orang yang melalui bandara pada tahun yang sama sebesar 5 juta orang dan jumlah barang mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 335 juta barang. Jumlah orang/barang yang melalui terminal sebesar 435 ribu dan 70 ribu barang.

Terjadinya mobilitas jumlah penumpang sehingga terjadinya perbedaan arus penumpang tiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan di dua tahun terakhir. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti arus wisatawan yang menurun disebabkan oleh pandemi Covid-19, kondisi ekonomi mikro dan makro dan lain sebagainya sehingga menyebabkan perbedaan preferensi masyarakat dalam melakukan pergerakan/perjalanan

**Tabel 2.54 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun di Provinsi Bali**

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Dermaga</b>					
a	Orang	36.669.016	37.449.702	13.958.286	15.697.534	4.945.965
b	Barang	11.889.193	11.597.731	543.159.485	200.412.990	2.425.410
2	<b>Bandara</b>					
a	Orang	19.986.415	21.051.094	23.779.178	24.169.561	5.806.270
b	Barang	202.366.091	214.493.127	313.520.106	372.013.846	47.276.383
3	<b>Terminal</b>					
a	Orang	878.566	749.582	351.739	314.877	435.525
b	Barang	115.994	119.381	121.818	392.129	70.612

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

#### 1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan Layanan Telekomunikasi yang telah dapat dipenuhi oleh operator telepon seluler peningkatannya masih relatif kecil, hal ini kemungkinan disebabkan karena operator masih mempertimbangkan atau hitung-hitungan yang matang dalam memperluas layanan telekomunikasi.

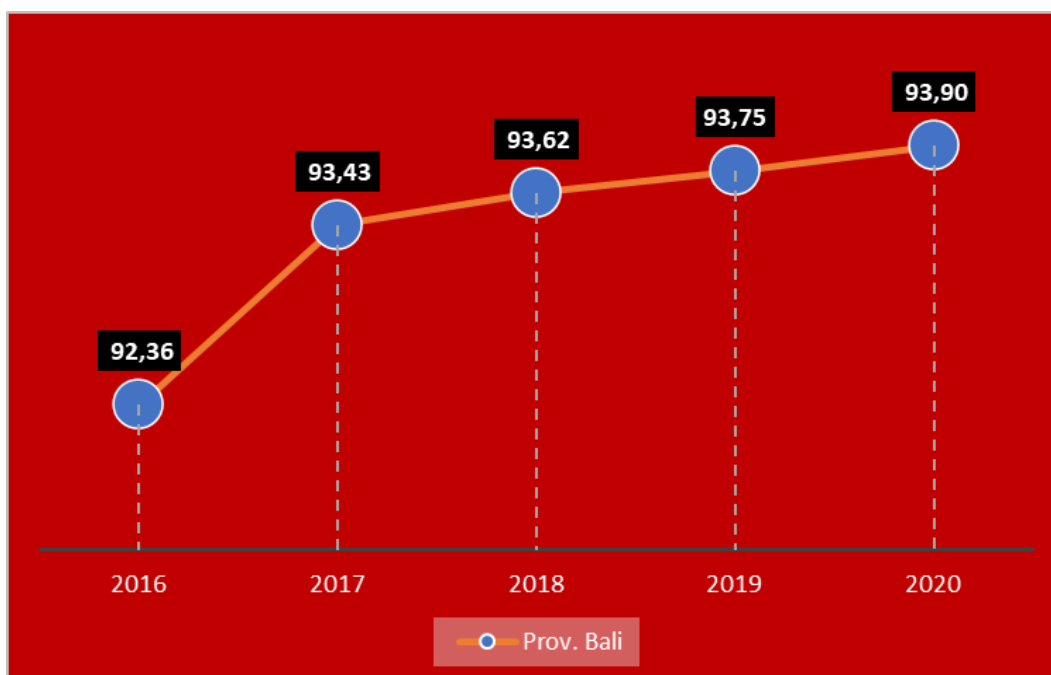
**Tabel 2.55 Cakupan Layanan Telekomunikasi**

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan layanan telekomunikasi	49,35	49,50	50,00	60,00	65,00

Sumber Data : Diskominfo Provinsi Bali, 2021

#### 2. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Penggunaan HP/telepon pada rumah tangga/masyarakat mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini menandakan bahwa kebutuhan akan komunikasi dan informasi yang mudah dan cepat menjadi tuntutan di era digital saat ini untuk berbagai tujuan.



**Gambar 2.149 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan HP/Telepon Rumah**

Sumber Data : Diskominfo Provinsi Bali, 2021

### 3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Terjadi peningkatan pada data rumah tangga dengan akses internet. Berdasarkan analisis dari data yang telah dimiliki, peningkatan tren akses terhadap internet di tingkat rumah tangga diduga terjadi karena tiga faktor utama yaitu semakin tingginya tingkat pertumbuhan teknologi, dorongan dan dukungan pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan yang ada serta dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan bekerja dan belajar bisa dilakukan dari rumah. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi maka akses terhadap internet menjadi semakin mudah untuk dimiliki. Selain terhadap mudahnya memiliki akses internet, sarana pendukung lainnya seperti telepon seluler/HP, komputer, laptop, maupun tablet yang semakin berkembang dan mudah untuk dimiliki menyebabkan terjadinya pertumbuhan pada akses internet. Kebijakan pemerintah dalam mendukung adanya sarana seperti wifi gratis pada daerah publik serta program Bali Smart Island menjadi faktor pendorong yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses internet.

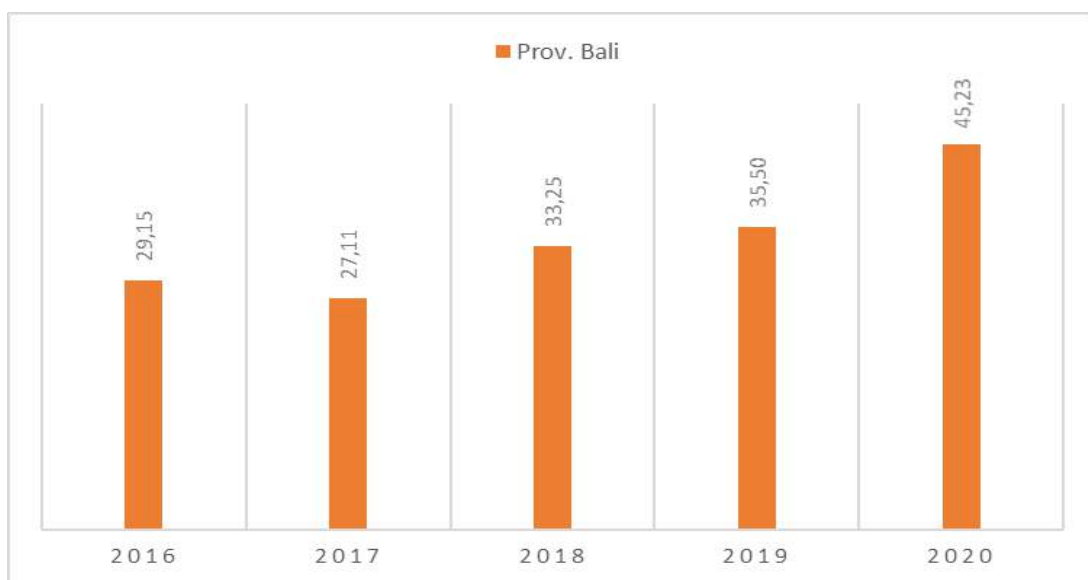
**Tabel 2.56 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	60,65	67,10	74,15	79,59	85,67

Sumber : Diskominfo Provinsi Bali, 2021

#### 4. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Berdasarkan data dari tabel dapat disimpulkan bahwa terjadi turun naik tingkat rumah tangga yang memiliki komputer pribadi namun masih dibawah 50%. Berdasarkan analisis terhadap tren yang terjadi, faktor kemajuan teknologi dan fleksibilitas yang menyebabkan rumah tangga di Provinsi Bali lambat laun lebih memilih untuk meninggalkan komputer. Seiring dengan kemajuan teknologi, ponsel/HP terkini memiliki kemampuan yang setara jika dibandingkan dengan fitur yang dimiliki oleh komputer. Selain itu fleksibilitas dari ponsel/HP yang dapat dibawa pada kondisi apapun menjadi nilai tambah jika dibandingkan dengan komputer. Sebagai catatan dari data kepemilikan komputer diatas, yang dimaksud dengan komputer mengacu pada komputer desktop, laptop (*portable*), atau tablet (komputer genggam yang serupa)



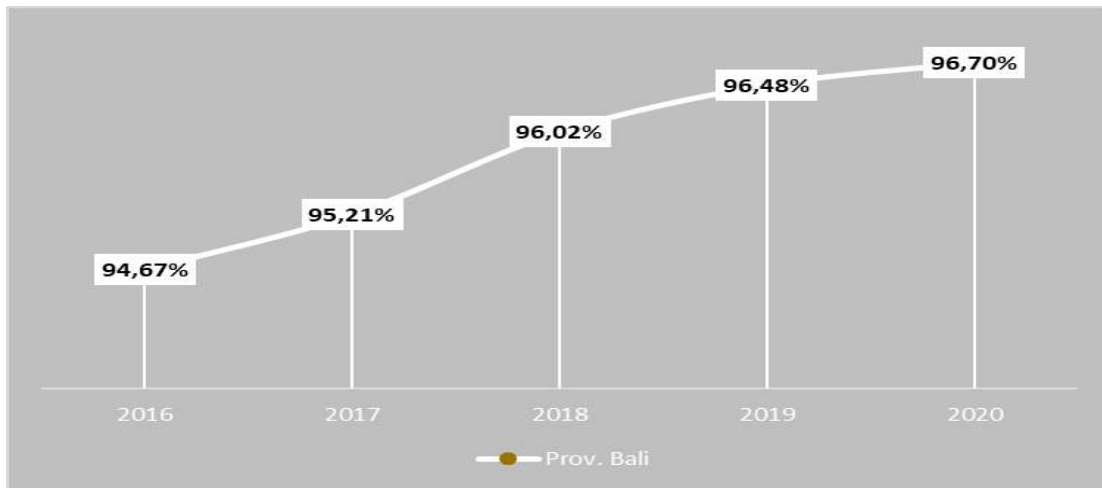
**Gambar 2.150 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi**

Sumber Data : Diskominfo Provinsi Bali, 2021

#### 2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

##### 1. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 90,29 persen, angka tersebut mengalami penurunan sampai dengan tahun 2015 menjadi 88,18 persen. Kenaikan persentase koperasi aktif terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 89,53 persen. Namun, mengalami penurunan kembali menjadi 86,79 persen pada tahun 2017. Mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 87,42 persen.



**Gambar 2.151 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Bali**

Sumber Data : Diskop UKM Provinsi Bali, 2021

## 2. Jumlah UMKM

Perkembangan UKM di Provinsi Bali dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2016 jumlah UMKM di Provinsi Bali ada sebanyak 300.650 meningkat pada tahun 2018 menjadi 312.967 dan pada tahun 2020 menjadi 327.353. Perkembangan jumlah UKM tersebut disebabkan karena program penumbuhan kewirausahaan telah digaungkan melalui dunia pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan informal dengan perubahan pola pikir setelah tamat dari perguruan tinggi tidak harus menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha. Untuk mewujudkan pembentukan wirausaha baru berbagai jalur yang ditempuh antara lain melalui pelaksanaan pelatihan, magang, studi banding, temu usaha, promosi, studi banding, dan penyebaran publikasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

**Tabel 2.57 Jumlah UMKM**

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Buleleng	11.196	31.563	34.552	34.374	54.489
Jembrana	10.071	10.525	27.654	24.346	46.277
Tabanan	38.690	38.980	41.459	42.744	43.715
Badung	26.863	16.899	19.688	19.261	22.647
Denpasar	30.694	30.840	31.826	32.026	32.224
Gianyar	91.511	91.511	75.412	75.482	75.542
Bangli	42.924	43.948	44.068	44.068	44.123
Klungkung	9.712	9.712	11.761	14.584	35.792
Karangasem	38.989	38.989	39.589	40.468	57.456
<b>Provinsi Bali</b>	<b>300.650</b>	<b>312.967</b>	<b>326.009</b>	<b>327.353</b>	<b>412.265</b>

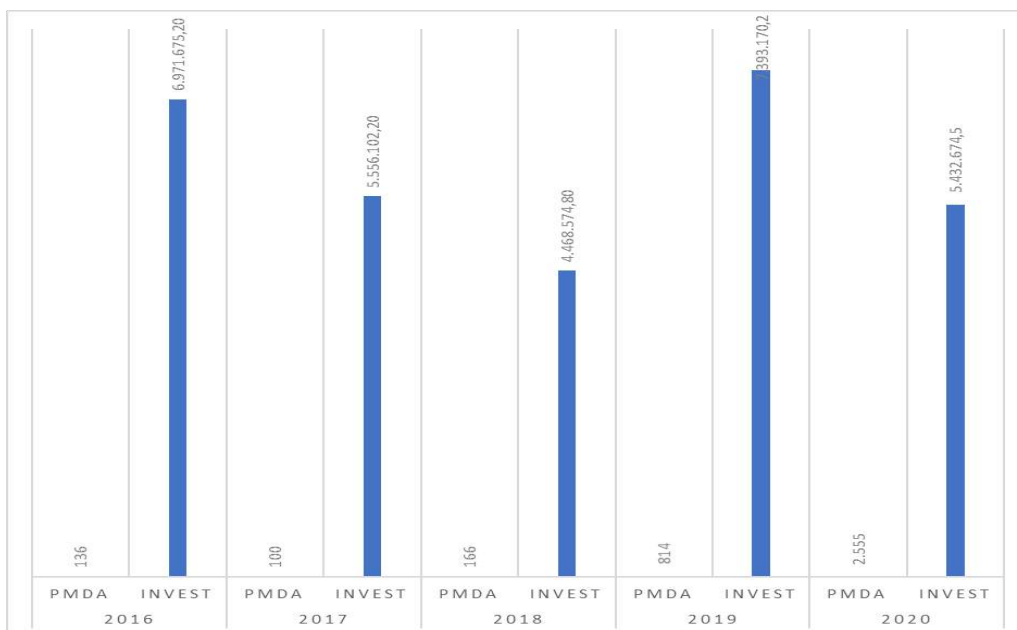
Sumber Data : Diskop UKM Provinsi Bali, 2021

Pada tahun 2020, jumlah UMKM sektor formal mengalami penurunan sebesar 8%, sementara sektor informal meningkat sebesar 37%. Sejak pandemi COVID-19, telah banyak UMKM sektor formal yang tutup yang menyebabkan pelaku usaha dan pekerja UMKM sektor formal beralih ke sektor informal. Hal ini terlihat pada tahun 2020, pertumbuhan UMKM Provinsi Bali meningkat secara signifikan yaitu 25,9% (terhadap tahun 2019) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4% - 10%. Pertumbuhan paling tinggi terjadi di sektor perdagangan sebesar 93,2% (dibandingkan tahun 2019) yang didominasi oleh sektor informal. Tren pertumbuhan yang didominasi oleh sektor informal juga terjadi pada sektor industri non-pertanian dan aneka jasa. Sedangkan jumlah UMKM pada sektor industri pertanian mengalami penurunan sebesar 26%.

#### **2.3.1.18 Penanaman Modal**

##### **1. Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2016 sebesar 136 investor dan jumlah investasi sebesar Rp.6.971.675.200.000, tahun 2017 jumlah investor berskala Nasional sebanyak 100 investor dan jumlah nilai investasi sebesar Rp.5.556.102.230.000, pada tahun 2018 jumlah investor berskala nasional sebanyak 166 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.4.468.574.800.000, pada tahun 2019 jumlah investor berskala nasional sebanyak 814 dengan nilai investasi sebesar Rp.7.393.170.200.000, sedangkan pada tahun 2020 jumlah investor berskala nasional sebanyak 2.555 dengan jumlah investasi sebesar Rp.5.432.674.500.000.



**Gambar 2. 152 Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

Sumber Data : DPMPTSP Provinsi Bali, 2021

## 2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Untuk rasio daya serap tenaga kerja setiap pada tahun 2013 sebesar 36,10 dengan jumlah perusahaan PMDN sebanyak 110 investor dan yang tertinggi terlihat pada tahun 2015 sebesar 57,79 dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN sebanyak 86 investor

**Tabel 2.58 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio daya serap tenaga kerja	41,44	42,43	34,16	41,44	42,43

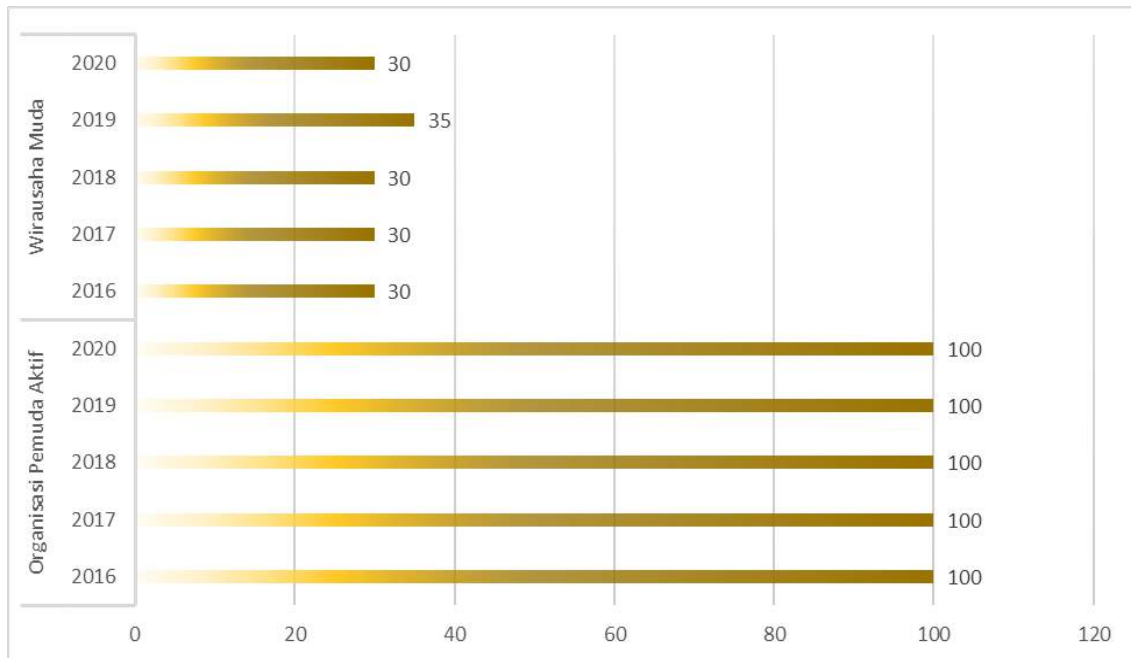
Sumber Data : DPMPTSP Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

#### 1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda

Persentase organisasi pemuda yang aktif selama kurun waktu 2016 sampai 2020 yaitu sebesar 100 persen. Sedangkan persentase wirausaha muda aktif secara berturut-turut selama kurun waktu 2016-2020 adalah 30 persen, 30 persen, 30 persen, 35 persen, dan 30 persen.



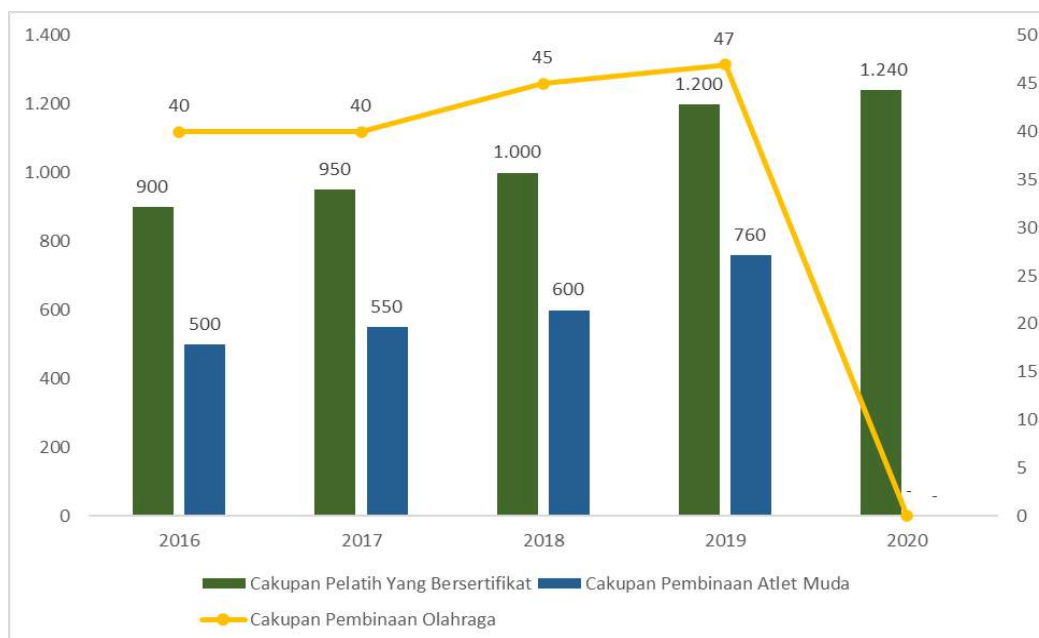


**Gambar 2. 153 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif dan Persentase Wirausaha Muda di Provinsi Bali**

Sumber Data : Disdikpora Provinsi Bali, 2021

## **2. Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda**

Selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2016 sampai 2019 cakupan pembinaan olahraga mengalami peningkatan dari 40 pembinaan pada tahun 2016 menjadi 47 pembinaan pada tahun 2019. Pembinaan tersebut melibatkan pelatih yang bersertifikat yaitu sebanyak 900 pada tahun 2016 terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi 1.240. Selama pembinaan ini atlet muda yang berhasil dibina sebanyak 500 pada tahun 2016 meningkat pada tahun 2017 menjadi 550, selanjutnya secara berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019 meningkat 600 dan 760 atlet muda.

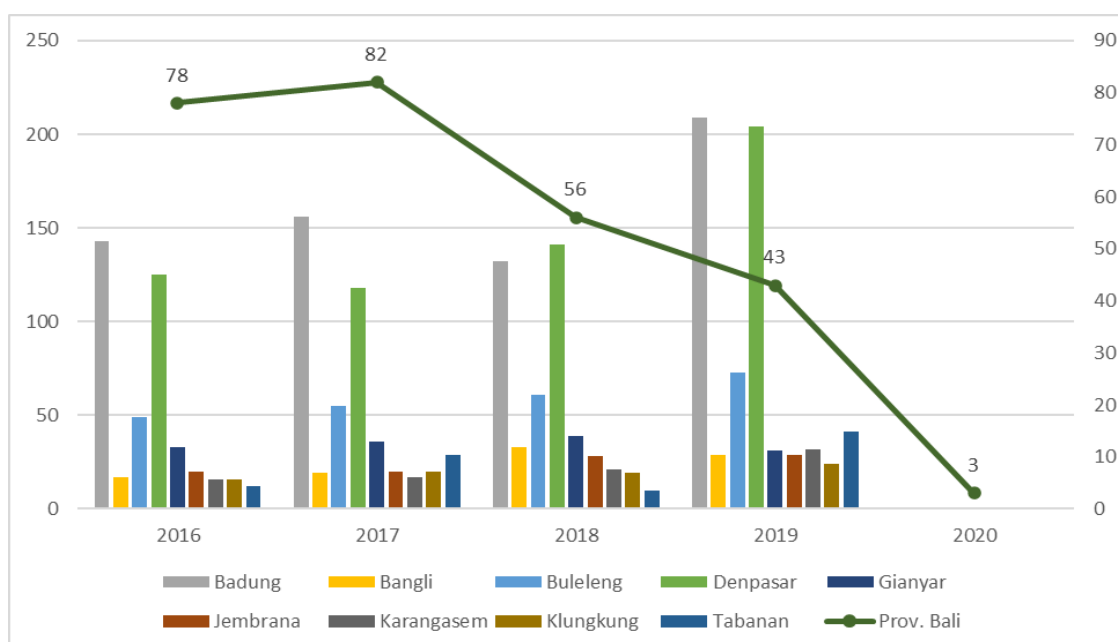


**Gambar 2. 154 Cakupan Pembinaan Olahraga, Pelatih yang Bersertifikasi, Pembinaan Atlet Muda di Provinsi Bali**

Sumber Data : Disdikpora Provinsi Bali, 2021

### 3. Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah atlet berprestasi cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2016-2020. Tercatat jumlah atlet berprestasi (memperoleh emas) pada perhelatan berbagai kompetisi pada tahun 2016 sebanyak 78 atlet, meningkat menjadi 82 pada tahun 2017. Selanjutnya dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan yang mencapai 43 pada tahun 2019 dan 3 pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa prestasi atlet di Provinsi Bali cenderung menurun.



**Gambar 2. 155 Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga di Provinsi Bali**

Sumber Data : Disdikpora Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.20 Statistik

#### 1. Buku "Kabupaten Dalam Angka"

Kabupaten di Provinsi Bali setiap tahunnya membuat Buku Kabupaten Dalam Angka yang bekerjasama dengan statistik kabupaten yang mencapai 100 persen.

**Tabel 2.59 Buku Kabupaten Dalam Angka**

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Buku "Kabupaten Dalam Angka"	9	9	9	9	9

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

#### 2. Buku "PDRB"

Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat pembuatan buku PDRB oleh Pemerintah Provinsi Bali yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Pada tahun selanjutnya yaitu 2016 sampai dengan tahun 2018 kerjasama penyusunan buku PDRB tersebut tidak dilanjutkan lagi, tetapi BPS secara kontinyu sudah mempublikasikan hasil perhitungan PDRB setiap tahun.

**Tabel 2.60 Buku PDRB**

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Buku "PDRB"	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.21 Persandian

#### 1. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 80,95 persen, 83,33 persen, 85,71 persen, 88,09 persen, 89,13 persen dan 91,30 persen.

**Tabel 2.61 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat Daerah	85,71	88,09	89,13	91,30	91,30

Sumber Data : Diskominfo Provinsi Bali, 2021

### 2.3.1.22 Kebudayaan

#### 1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Untuk mengimplementasikan semangat berkesenian masyarakat Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2018 telah menyelenggarakan 3 (tiga) festival seni budaya yaitu Pesta Kesenian Bali, Pesona Budaya Provinsi Bali (Bali Mandara Nawanatya), serta Peragaan dan Pementasan Seni Budaya (Bali Mandara Mahalango), sebagai ruang terhadap hasil karya seni dan bentuk presentasi serta ekspresi seni masyarakat Bali. Kreatifitas budaya dan ekonomi kreatif dalam perhelatan ketiga event seni budaya tersebut dapat mengeksplorasi, mengolah, mengemas dan mentransformasikan keragaman dari produk warisan budaya secara profesional dan modern, serta sebagai modal dalam meningkatkan pendapatan Nasional melalui pariwisata budaya demi kesejahteraan masyarakat. Ketiga *event* kebudayaan tersebut diselenggarakan di Taman Budaya Art Center Denpasar, selain bertujuan untuk melestarikan budaya juga untuk mengoptimalkan fungsi Taman Budaya sebagai pusat berkesenian dan berkebudayaan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 5 kegiatan festival menjadi hanya 2 kegiatan festival pada tahun 2020.

**Tabel 2.62 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	3	3	4	2

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2021

## 2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Pulau Bali karena sejarah perkembangannya, banyak memiliki cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah pulau Bali.

Cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 19.790 pada tahun 2016 dan 2017, sebanyak 20.178 pada tahun 2018, dan 20.688 pada tahun 2019.

**Tabel 2.63 Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cagar Budaya	19.790	19.790	20.178	20.688	20.898
*Benda	18.796	18.796	19.160	19.336	19.336
*Bangunan	95	95	96	341	493
*Situs	582	582	599	611	611
*Kawasan	5	5	5	12	12
*Struktur	312	312	318	388	446

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2021

## 3. Jumlah Karya Budaya Yang Diinventarisasi

Jumlah karya budaya yang diinventarisasi dari tahun ke tahun merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota serta Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Pelaksanaan inventarisasi mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan inventarisasi ke lapangan serta refocusing dan relokasi anggaran tahun 2020. sehingga warisan budaya yang diinventarisasi hanya sejumlah 30 warisan budaya saja.

**Tabel 2.64 Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi**

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi	41	43	61	71	30

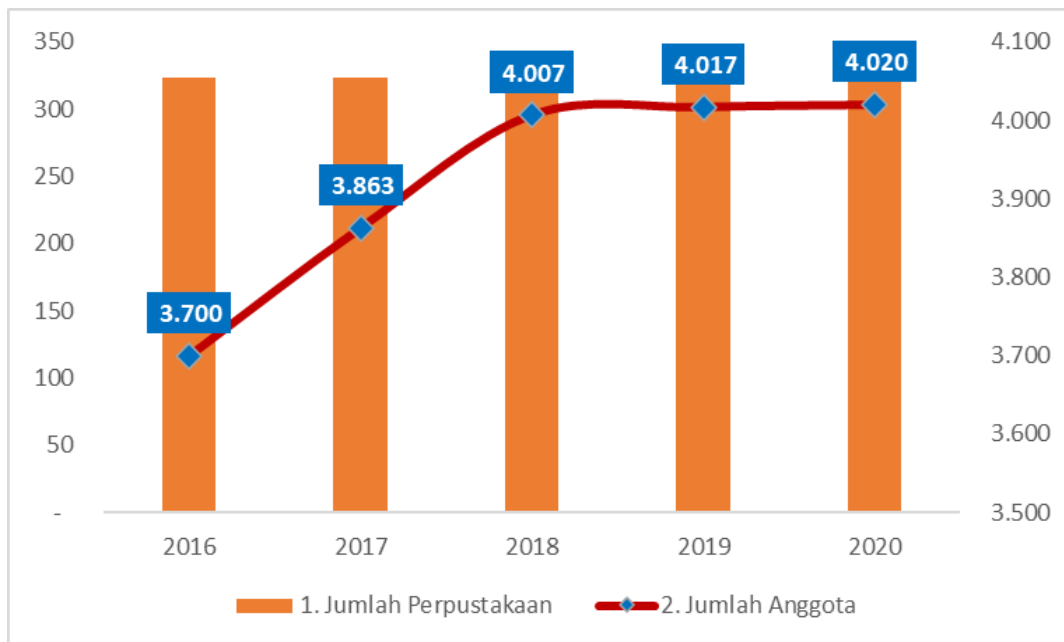
Sumber Data : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2021

### **2.3.1.23 Perpustakaan**

Berdasarkan Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu Bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Dilihat dari luas pulau Bali kurang lebih sekitar 5.633 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak kurang lebih 4.200.000 jiwa. Kehadiran Perpustakaan sebagai penyedia Informasi sangat dibutuhkan Masyarakat, dengan kemajuan Teknologi Informasi yang telah berkembang dewasa ini mendorong Perpustakaan untuk lebih bertransformasi dalam rangka pengembangan dibidang Pendidikan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Transformasi Perpustakaan dilakukan melalui keterbukaan akses Informasi bagi masyarakat dengan mempergunakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan penyediaan fasilitas Teknologi Informasi yang dapat dimanfaatkan Masyarakat. Dalam perkembangan peran Perpustakaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita ketahui bahwa potensi Provinsi Bali tentang Pengelolaan Perpustakaan dapat disajikan data terlampir.

#### **1. Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bali**

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan pada bidang perpustakaan, pembinaan teknis perpustakaan tingkat Provinsi berada pada tingkat Perpustakaan Sekolah SMA/SMK. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jumlah perpustakaan di Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah tetap yaitu sebesar 323. Dengan jumlah anggota yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk pergi ke perpustakaan dan memanfaatkan jasa perpustakaan juga semakin meningkat.

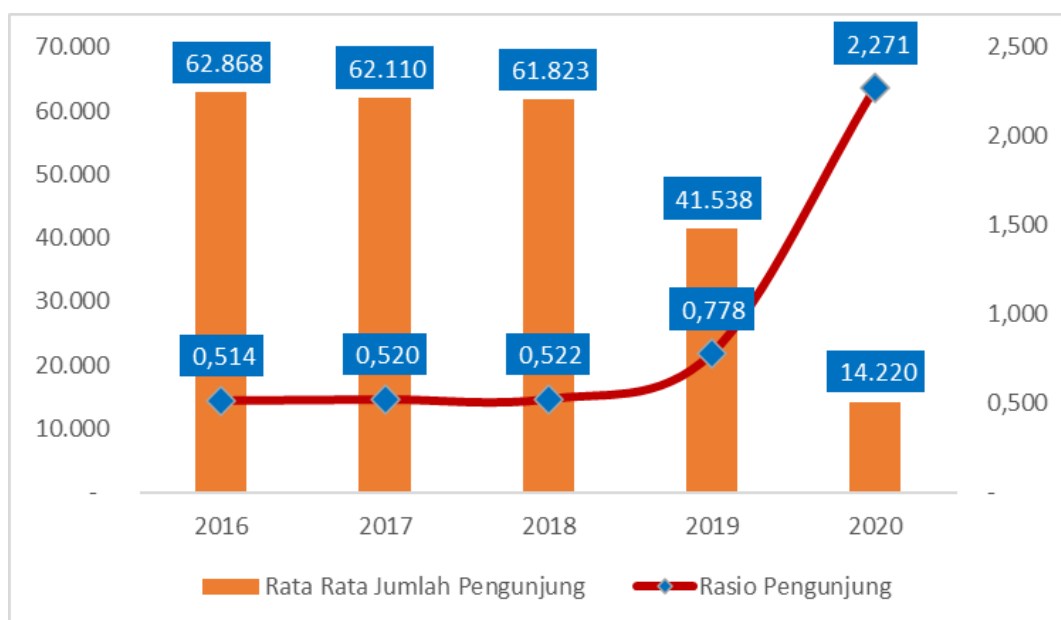


**Gambar 2. 156 Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

## 2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Provinsi Bali

Rasio jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Bali selama tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami trend peningkatan. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Angka tertinggi rasio jumlah pengunjung adalah tahun 2020 dengan angka 2,271 yang menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan semakin sedikit. Penurunan ini tidak mengindikasikan minat literasi masyarakat yang semakin menurun, tetapi perkembangan teknologi yang menyebabkan beralihnya sumber bacaan/literasi masyarakat yang semakin berkembang. Selain itu, dampak dari adanya Pandemi Covid-19 adalah ditutupnya layanan perpustakaan sementara waktu sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali. Dengan demikian pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana cara mengakomodasi perkembangan teknologi ini untuk semakin mengarahkan dan meningkatkan minat literasi masyarakat.



**Gambar 2. 157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

### 3. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Sebagai salah satu sumber literasi perpustakaan daerah sudah seharusnya menyediakan banyak buku dengan berbagai subjek agar menarik semakin banyak orang untuk datang dan membaca buku di perpustakaan. Tercatat dari tahun ke tahun jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan sudah semakin banyak. Namun demikian berkembangnya teknologi seperti saat ini, akses terhadap perpustakaan sudah seharusnya bisa dilakukan secara online, sehingga koleksi buku dan referensi juga seharusnya bisa beralih dalam bentuk buku digital.



**Gambar 2.158 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021



#### 4. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Sebaran ketersediaan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat layanan perpustakaan. Sebaran ketersediaan perpustakaan di Provinsi berdasarkan jenis perpustakaan yaitu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan pendidikan tinggi di Indonesia. Rasio perpustakaan per satuan penduduk dipengaruhi oleh jumlah perpustakaan dan jumlah penduduk per tahun. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan jumlah perpustakaan yang ada di Provinsi Bali, dapat diketahui rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah setiap masyarakat sudah mendapatkan akses ke perpustakaan dengan baik. Berdasarkan data dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, rasio jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk menunjukkan tren yang positif dan hampir mencapai angka 1. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan perpustakaan saat ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

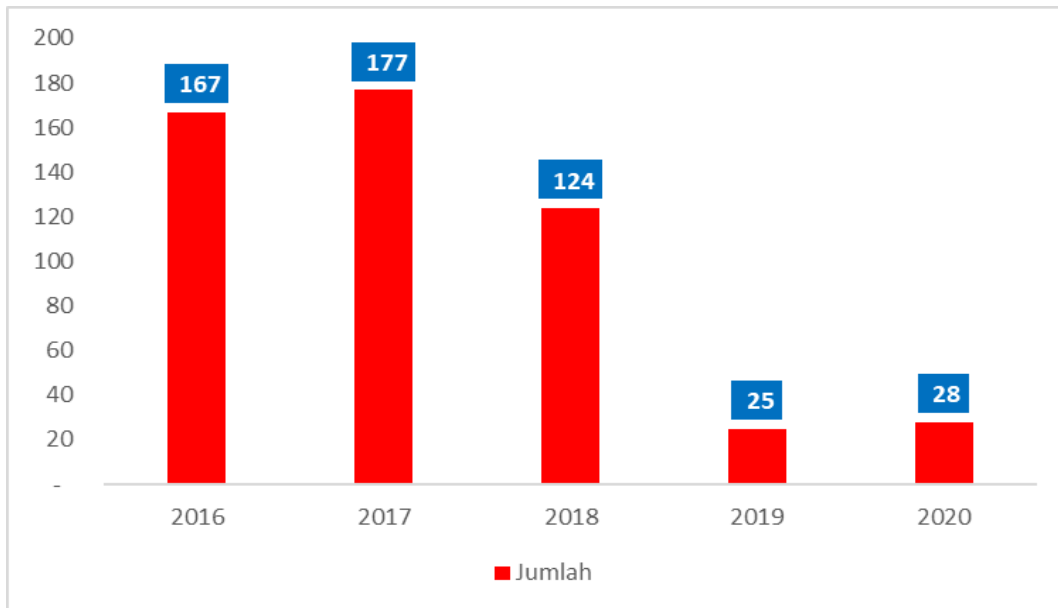
**Tabel 2.65 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio	0,87	0,91	1,02	0,92	0,93

Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

#### 5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat terus mengalami penurunan di Provinsi Bali. Terlihat dari grafik dibawah ini, jumlahnya hanya mencapai 25 pada tahun 2019 dan 28 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang pensiun dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun demikian ktenaga pustakawan ini masih bisa memberikan pelayanan pada masyarakat yang akan berkunjung ke perpustakaan secara maksimal.



**Gambar 2. 159 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

#### **2.3.1.24 Kearsipan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perseorangan, serta lembaga kearsipan. Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kearsipan selama periode 2016 s.d 2020 berbagai upaya dilakukan secara optimal, namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga capaiannya belum sesuai dengan harapan.

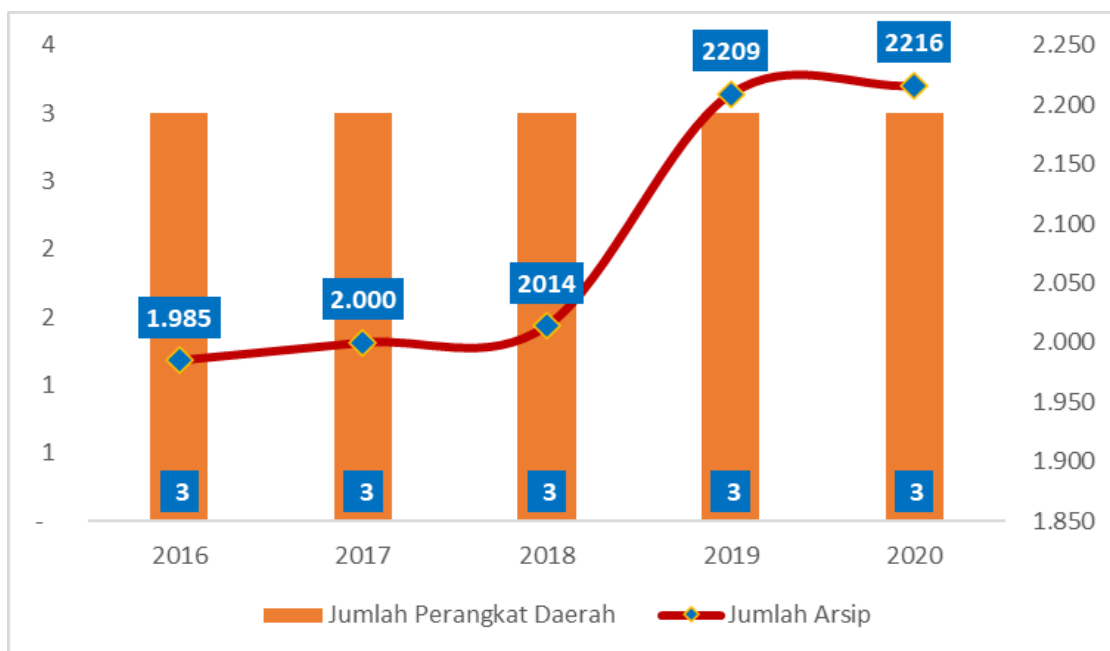
##### **1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Jumlah arsip aktif yang diciptakan oleh semua perangkat daerah pada tahun 2020 adalah sebanyak 235.285 arsip. Jumlah ini dihasilkan oleh 38 perangkat daerah yang ada di Provinsi Bali.



**Gambar 2. 160 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

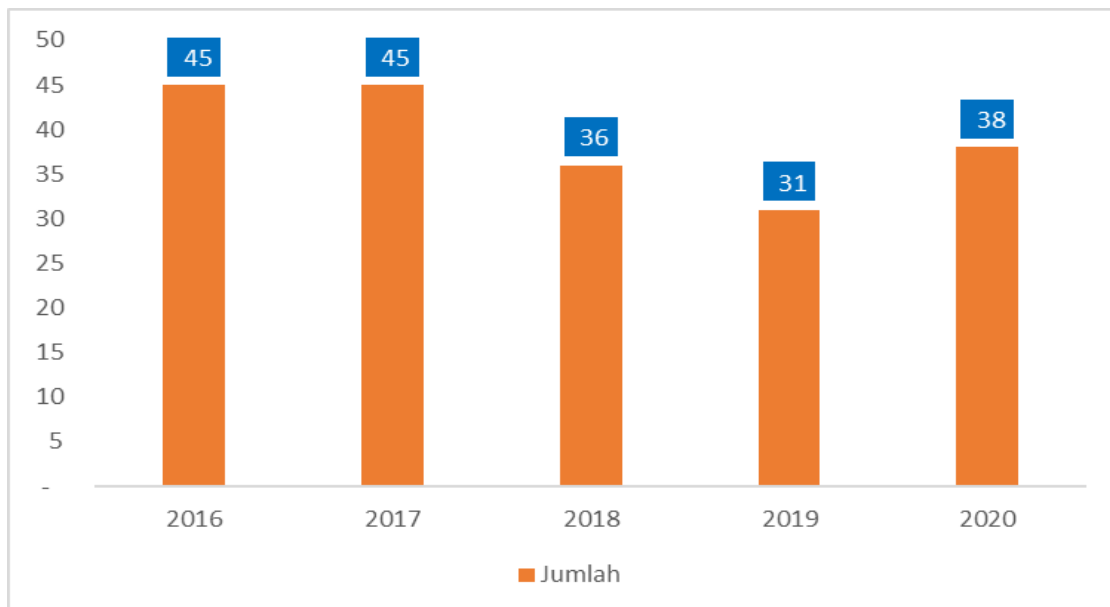


**Gambar 2. 161 Jumlah Arsip yang Dilestarikan di Provinsi Bali**

Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

## 2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan mengalami penurunan dari 45 orang pada tahun 2016 menjadi 36 pada tahun 2018. Data SDM pada bidang kearsipan cenderung menurun karena adanya pegawai yang pensiun pada rentang waktu tersebut.



**Gambar 2. 162 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Provinsi Bali**

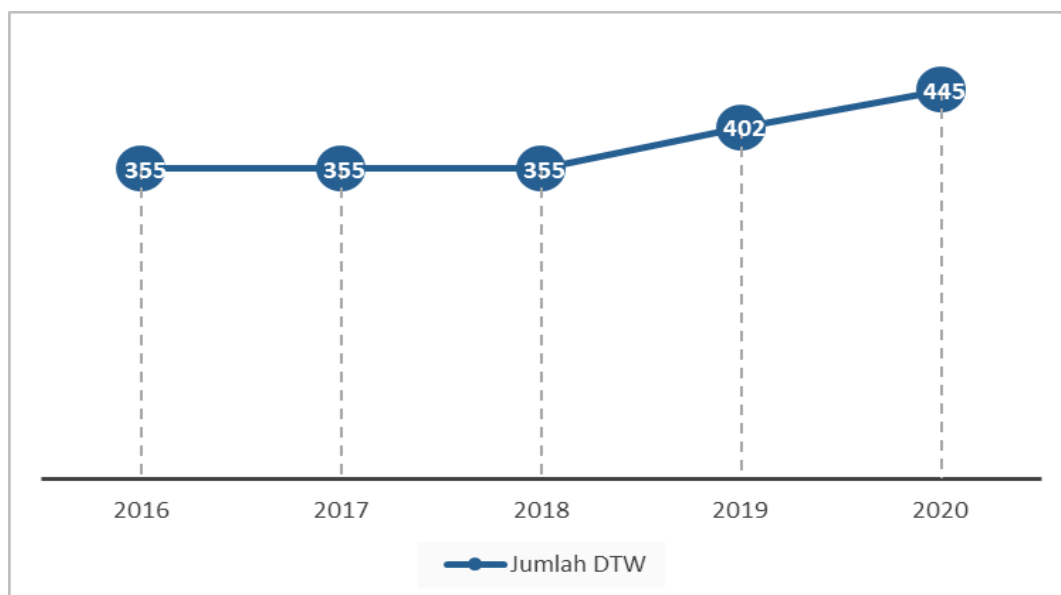
Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

## 2.3.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

### 2.3.2.1 Pariwisata

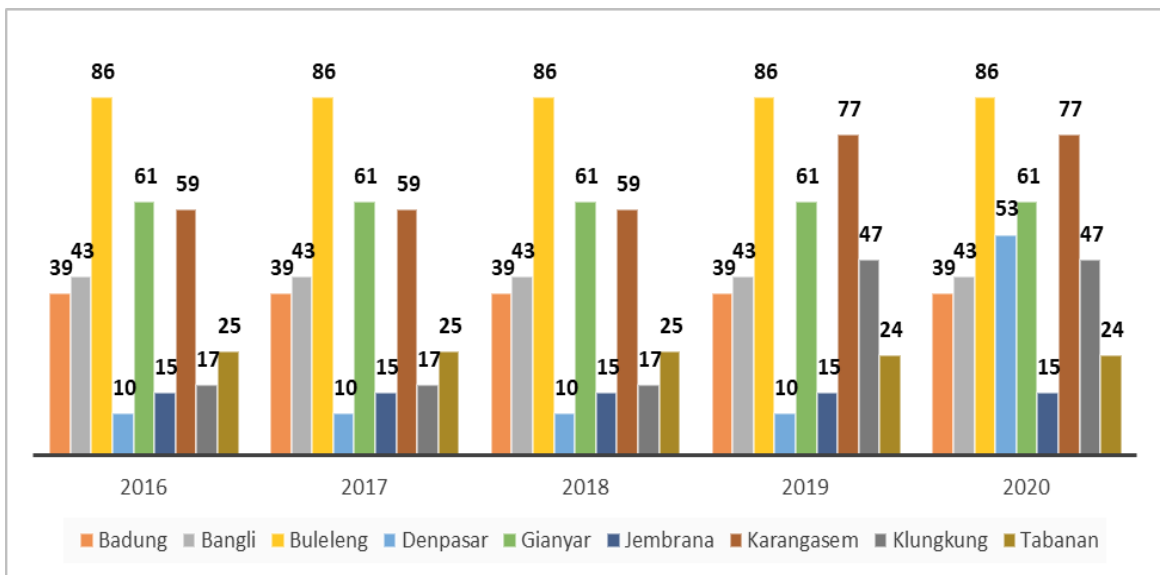
#### 1. Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)

Jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Menurut grafik dibawah jumlah DTW di Provinsi Bali adalah sebanyak 445 DTW meningkat sebanyak 90 DTW jika dibandingkan tahun 2016. Jumlah DTW terbanyak menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2020 yaitu ada di Kabupaten Buleleng dengan 86 DTW dan yang terendah adalah di Kabupaten Jembrana yaitu 15 DTW.



**Gambar 2. 163 Jumlah Daya Tarik Wisata**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

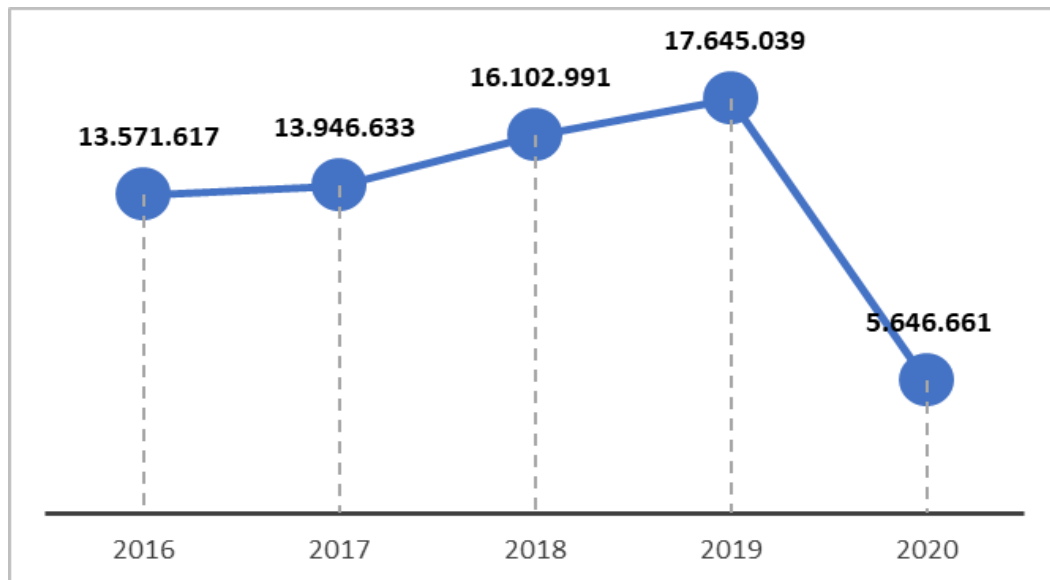


**Gambar 2. 164 Jumlah DTW Kabupaten/Kota**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

## 2. Kunjungan Wisatawan

Selama kurun waktu 2013 sampai 2018, jumlah kunjungan wisatawan nusantara lebih banyak dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 9.757.911 wisatawan. Jumlah wisatawan mancanegara tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 6.070.473 wisatawan.



**Gambar 2. 165 Tingkat Kunjungan Wisatawan ke Bali**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

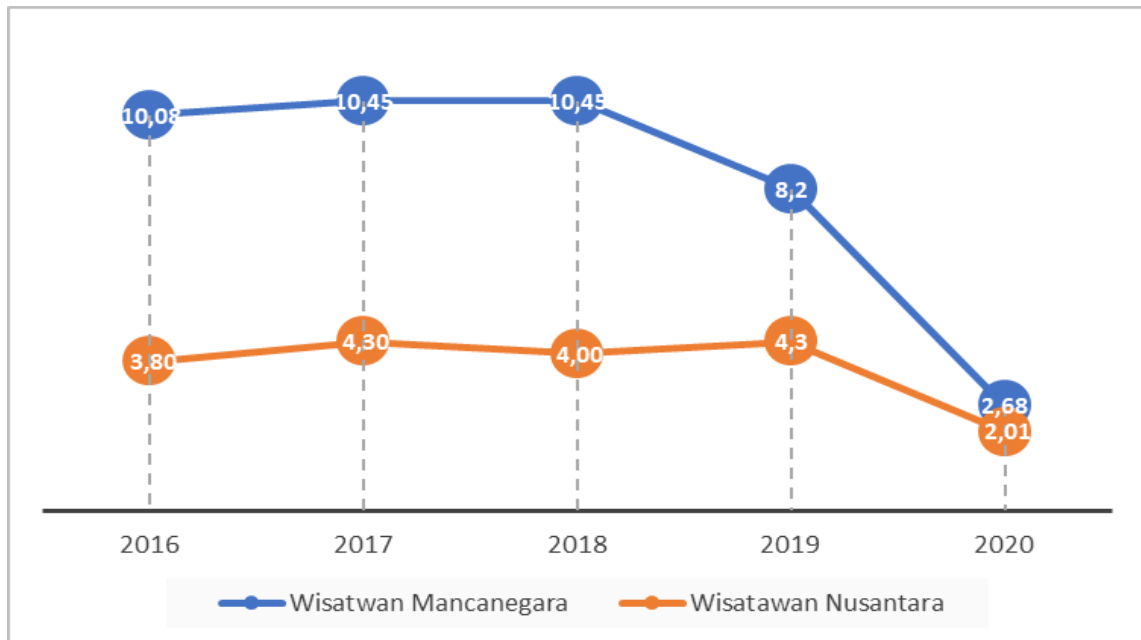
**Tabel 2.66 The Best 20 Direct Foreign Tourist Arrivals to Bali  
2016-2020**

<b>NATIONALITY</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
CHINESE	990,771	1.385.850	1.361.512	1.183.991	117.209
AUSTRALIAN	1,143,157	1,094,974	1.169.215	1.247.387	222.379
INDIAN	187,351	272,761	353.894	372.029	67.367
JAPANESE	235,009	252,998	261.666	257.220	48.260
BRITISH	221,521	243,827	243.827	287.258	46.528
AMERICAN	170,457	191,106	320.783	415.262	77.231
FRENCH	165,291	177,864	177.864	208.975	29.311
GERMAN	153,925	177,184	177.184	197.478	28.941
SOUTH KOREAN	151,44	174,842	143.581	212.846	42.498
MALAYSIAN	179,721	170,459	194.760	184.892	30.929
TAIWANESE	136,514	129,921	106.058	107.366	18.491
SINGAPOREAN	136,448	125,934	144.549	163.377	22.600
DUTCH	95,707	102,235	102.235	108429	22.055
RUSSIAN	66,967	94,898	94.898	143.238	56.603
NEW ZEALAND	84,33	86,463	111.967	132.284	16.561
CANADIAN	53,756	63,385	63.385	73.727	16.369
PHILIPINE	49,166	57,826	88.344	106.902	16.356
ITALIAN	41,689	50,045	50.045	56.374	7.249
SPAIN	37,612	44,69	44.690	56.431	7.727
THAILAND	32,721	42,07	47.367	61.083	7.953
<b>TOTAL</b>	<b>4,333,553</b>	<b>4,939,332</b>	<b>5.257.824</b>	<b>5.576.549</b>	<b>902.617</b>
<b>OTHER NATIONALITIES</b>	<b>594,384</b>	<b>758,407</b>	<b>812.649</b>	<b>698.661</b>	<b>147.887</b>
<b>TOTAL ARRIVAL</b>	<b>4,927,937</b>	<b>5,697,739</b>	<b>6.070.473</b>	<b>6.275.210</b>	<b>1.050.504</b>

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

### **3. Lama Tinggal Wisatawan**

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2016 adalah sebesar 10,8 meningkat menjadi 10,45 pada tahun 2017 dan 2018. Namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 berurutan sebesar 8,2 dan 2,68. Pandemi Covid-19 menjadi alasan turunya rata-rata lama tinggal wisatawan asing di Provinsi Bali. Sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2016 adalah sebesar 3,8 meningkat menjadi 4,3 pada tahun 2017 dan 2019 tetapi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Hal yang sama juga disebabkan oleh Pandemi Covid-19.



**Gambar 2. 166 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan**

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

#### 4. Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata

Jumlah akomodasi pariwisata di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 tercatat jumlah akomodasi di Provinsi Bali adalah sebanyak 4.306 yang terbagi menjadi hotel bintang sebanyak 217, hotel melati sebanyak 1.511 dan pondok wisata sebanyak 2.578. Pada tahun 2020 jumlah akomodasi di Provinsi Bali meningkat menjadi 5.610 yang terdiri dari hotel bintang sebanyak 2266, hotel melati sebanyak 2.097 dan pondok wisata sebanyak 3.247. Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah akomodasi sebanyak 1.304 selama kurun waktu 5 tahun. Peningkatan terbesar adalah pada pondok wisata yaitu meningkat sebanyak 669.

**Tabel 2.67 Jumlah dan Jenis Akomodasi Pariwisata**

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Badung					
1. Hotel Bintang	157	157	156	156	157
2. Hotel Melati	406	406	406	405	426
3. Pondok Wisata	716	716	716	716	759
Bangli					
1. Hotel Bintang	-	-	-	-	-
2. Hotel Melati	6	6	26	45	45
3. Pondok Wisata	12	22	26	32	33
Buleleng					
1. Hotel Bintang	11	11	20	20	20
2. Hotel Melati	187	187	194	194	194
3. Pondok Wisata	316	263	320	322	322

<b>Kab/Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Denpasar					
1. Hotel Bintang	26	26	34	47	47
2. Hotel Melati	211	214	214	224	229
3. Pondok Wisata	72	72	72	88	98
Gianyar					
1. Hotel Bintang	14	14	23	29	29
2. Hotel Melati	198	199	297	304	365
3. Pondok Wisata	1077	1079	1310	1302	1387
Jembrana					
1. Hotel Bintang	-	-	-	-	-
2. Hotel Melati	63	63	67	80	81
3. Pondok Wisata	21	21	21	53	55
Karangasem					
1. Hotel Bintang	9	9	10	10	10
2. Hotel Melati	187	187	244	308	308
3. Pondok Wisata	224	224	294	372	372
Klungkung					
1. Hotel Bintang	1	1	1	1	1
2. Hotel Melati	181	181	249	369	371
3. Pondok Wisata	15	15	16	16	16
Tabanan					
1. Hotel Bintang	4	4	4	2	2
2. Hotel Melati	72	74	74	76	78
3. Pondok Wisata	125	130	130	202	205
Prov. Bali					
1. Hotel Bintang	<b>217</b>	<b>222</b>	<b>248</b>	<b>265</b>	<b>266</b>
2. Hotel Melati	<b>1511</b>	<b>1517</b>	<b>1771</b>	<b>2005</b>	<b>2097</b>
3. Pondok Wisata	<b>2578</b>	<b>2542</b>	<b>2905</b>	<b>3103</b>	<b>3247</b>

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

## 5. Jumlah Restoran dan Bar

Jumlah restoran di Provinsi Bali pada tahun 2020 tercatat sebanyak 3.233 meningkat sebanyak 1.016 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Tabel dibawah menjelaskan bahwa jumlah restaurant terbanyak pada tahun 2020 ada di Kabupaten Gianyar yaitu sebanyak 952 meningkat dari tahun 2016 sebanyak 504. Kabupaten yang memiliki jumlah restaurant paling sedikit adalah Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 47 pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2016 sebanyak 22.

**Tabel 2.68 Jumlah Restoran dan Rumah Makan**

<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.	Badung	823	823	823	823	823
2.	Bangli	22	30	36	44	47
3.	Buleleng	173	173	200	200	200



No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Denpasar	438	455	455	582	604
5.	Gianyar	504	505	622	612	952
6.	Jembrana	76	76	76	134	136
7.	Karangasem	118	118	120	146	146
8.	Klungkung	31	31	146	243	245
9	Tabanan	32	40	40	80	80
<b>Prov. Bali</b>		<b>2.217</b>	<b>2.251</b>	<b>2.518</b>	<b>2.864</b>	<b>3.233</b>

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

Jumlah Bar di Provinsi Bali tercatat sebanyak 522 pada tahun 2020 meningkat sebanyak 96 dari tahun 2016. Berdasarkan tabel di bawah, jumlah Bar terbanyak ada di Kota Denpasar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 155 meningkat sebanyak 22 buah Bar dari tahun 2016. Ada beberapa kabupaten yang tidak memiliki Bar yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Tabanan.

**Tabel 2.69 Jumlah Bar di Provinsi Bali**

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Badung	-	-	-	-	-
2.	Bangli	-	-	-	-	-
3.	Buleleng	81	81	101	101	101
4.	Denpasar	133	133	133	152	155
5.	Gianyar	127	127	133	133	142
6.	Jembrana	6	6	6	6	6
7.	Karangasem	62	62	81	97	97
8.	Klungkung	17	17	17	17	21
9	Tabanan	-	-	-	-	-
Provinsi Bali		<b>426</b>	<b>426</b>	<b>471</b>	<b>506</b>	<b>522</b>

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

## 6. Jumlah Pramuwisata

Jumlah pramuwisata di Provinsi Bali pada tahun 2020 adalah sebanyak 11.101 dengan spesialisasi dalam bahasa inggris adalah jumlah terbanyak yaitu 3.396. Sedangkan jumlah pramuwisata dengan spesialisasi bahasa terendah adalah bahasa arab dan denmark yaitu masing-masing sebanyak 4. Jumlah pramuwisata ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yaitu sebanyak 8.693.

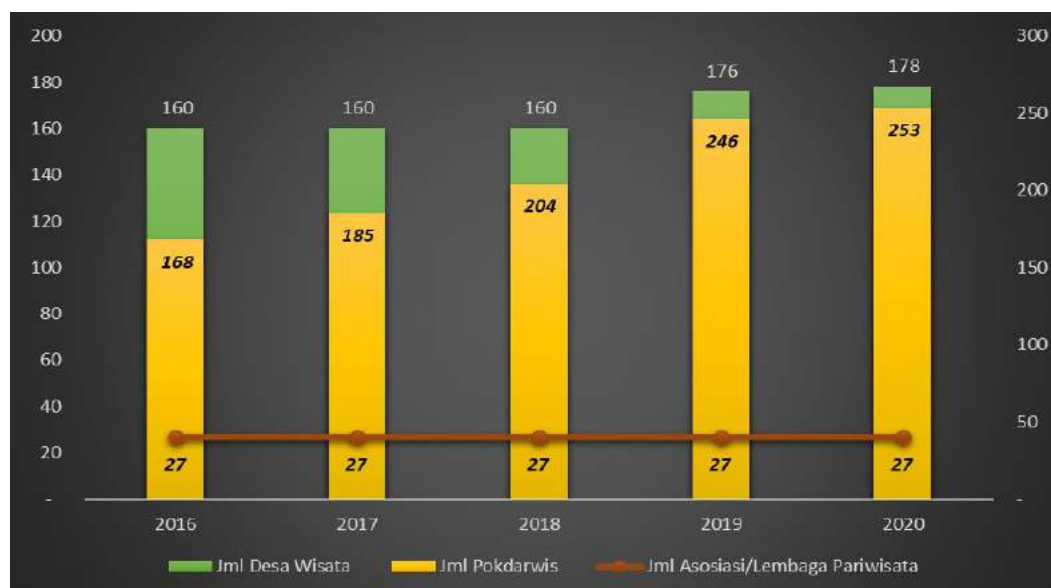
**Tabel 2.70 Jumlah Pramuwisata di Provinsi Bali**

No	Spesialisasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Inggris	2.759	2.980	3.166	3.227	3.396
2	Jepang	2.243	2.269	2.295	2.306	2.322
3	Italia	279	280	282	283	284
4	Belanda	111	126	130	131	133
5	Jerman	475	494	510	521	531
6	Spanyol	150	166	176	187	196
7	Perancis	290	372	400	417	458
8	Mandarin	1.133	1.585	1.857	1.932	1.989
9	Korea	727	776	797	802	841
10	Swedia	2	3	0	9	9
11	Arab	1	1	0	3	4
12	Rusia	126	129	146	148	155
13	Indonesia	390	553	692	727	779
14	Denmark	7	6	3	4	4
Total		<b>8.693</b>	<b>9.740</b>	<b>10.454</b>	<b>10.697</b>	<b>11.101</b>

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

### 7. Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata

Jumlah kelompok sadar wisata cenderung meningkat dari 136 kelompok pada tahun 2013 menjadi 185 kelompok pada tahun 2017. Jumlah desa wisata juga mengalami peningkatan dari 11 desa wisata pada tahun 2013 menjadi 100 desa wisata pada tahun 2017. Jumlah asosiasi/lembaga pariwisata selama lima tahun terakhir sebesar 26 lembaga.



**Gambar 2. 167 Jumlah Kelompok Sadar Wisata, Desa Wisata, dan Lembaga Pariwisata di Provinsi Bali**

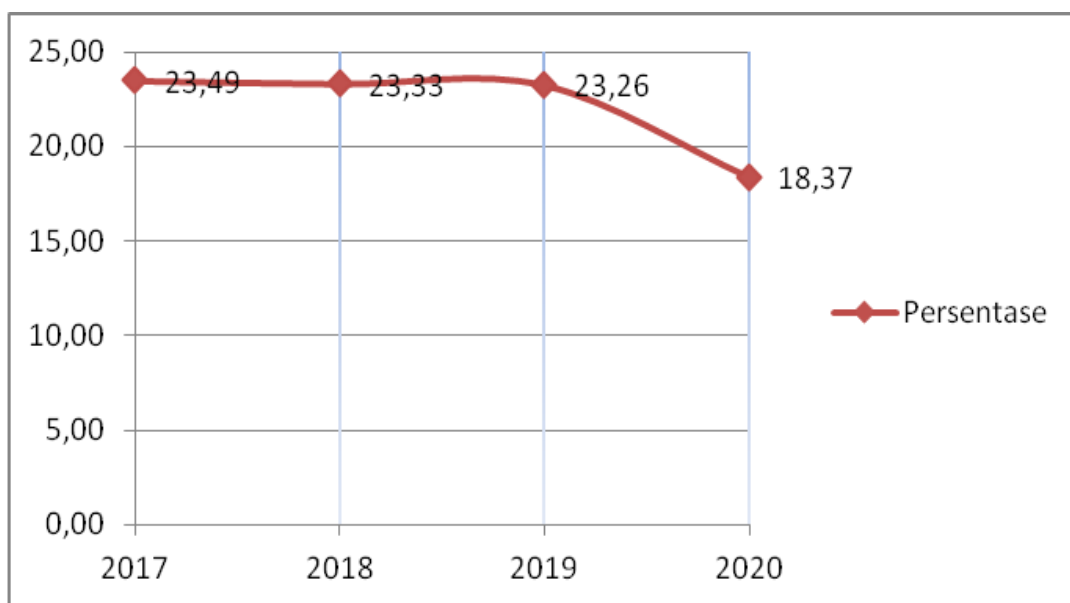
Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

## 8. PAD Sektor Pariwisata

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan untuk memungut pajak sektor pariwisata (Pajak Hotel dan Restoran/PHR) dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota melalui Badan Pendapatan Daerah.

## 9. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Pariwisata menyumbangkan pendapatan terbesar di Provinsi Bali. Pada tahun 2020 tercatat besarnya kontribusi sektor ini terhadap total PDRB Provinsi Bali adalah sebesar 18,37 persen. Angka ini menurun dari data tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu secara berturut-turut sebesar 23,49 persen, 23,33 persen, dan 23,26 persen. Ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan pada kualitas pariwisata di Bali yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah kedepan. Selain itu faktor dominan yang menyebabkan penurunan ini di tahun 2020 adalah adanya Pandemi Covid-19.



**Gambar 2. 168 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

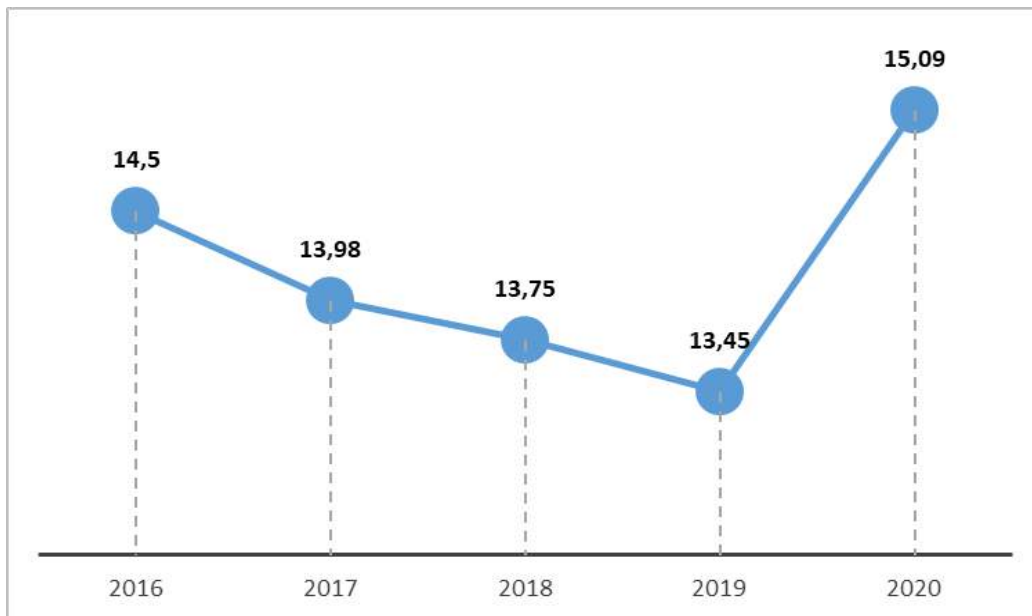
Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

### 2.3.2.2 Pertanian

#### 1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar 14,5% dan cenderung menurun menjadi 13,45% pada tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020 meningkat lagi menjadi 15,09%. Secara keseluruhan terjadi peningkatan kontribusi PDRB sektor pertanian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 0,59%. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mulai

memberikan harapan untuk menjadi sektor yang bisa diandalkan oleh masyarakat Bali. Meningkatnya kontribusi pertanian disebabkan oleh transformasi tenaga kerja dari sektor non pertanian ke pertanian akibat pandemi Covid-19

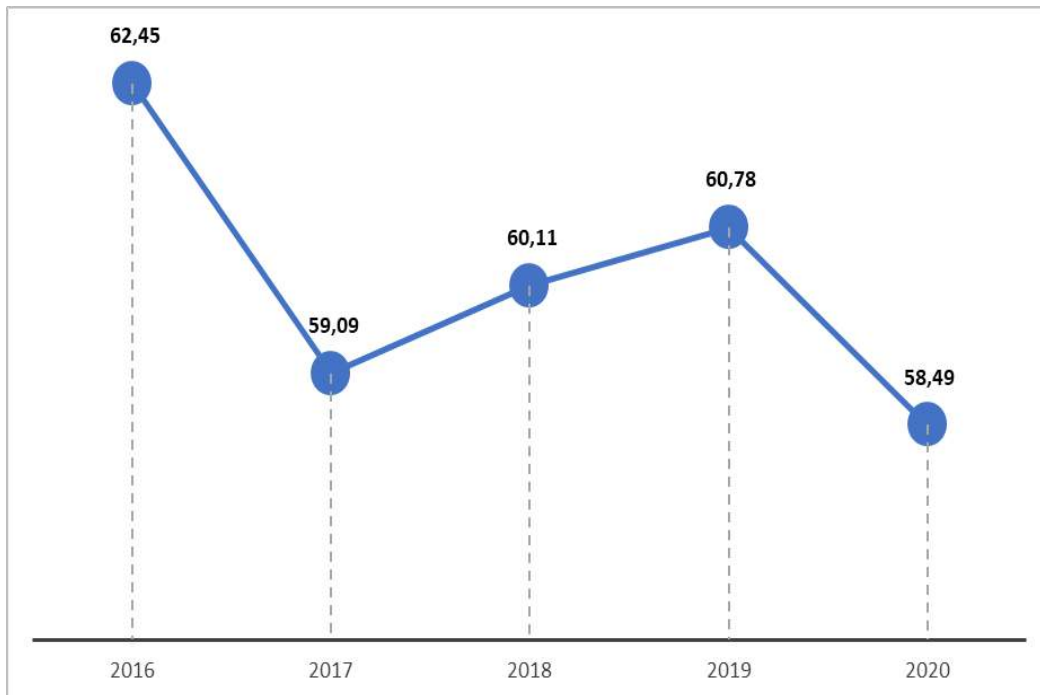


**Gambar 2. 169 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB di Provinsi Bali**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

## **2. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Produktivitas padi cenderung menurun dari tahun 2016 sampai 2020. Tercatat pada tahun 2016 jumlah produksi padi mencapai 62,45 ton per hektar selanjutnya pada tahun 2017 turun menjadi 59,09 ton per hektar. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut sebesar 60,11 dan 60,78 ton per hektar produktifitas padi di Provinsi Bali akhirnya mengalami penurunan terbesar justru di tahun 2020 yaitu 58,49 ton per hektar.

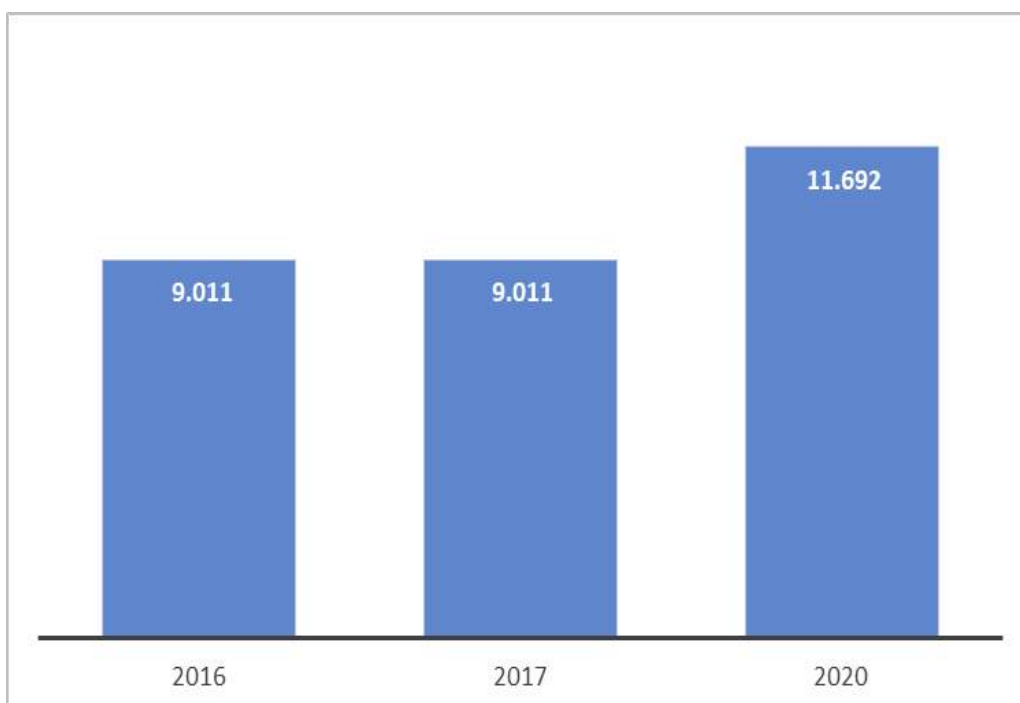


**Gambar 2. 170 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

### 3. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani pada tahun 2020 sebesar 11.692 meningkat dari tahun 2017 yaitu sebesar 9,011.



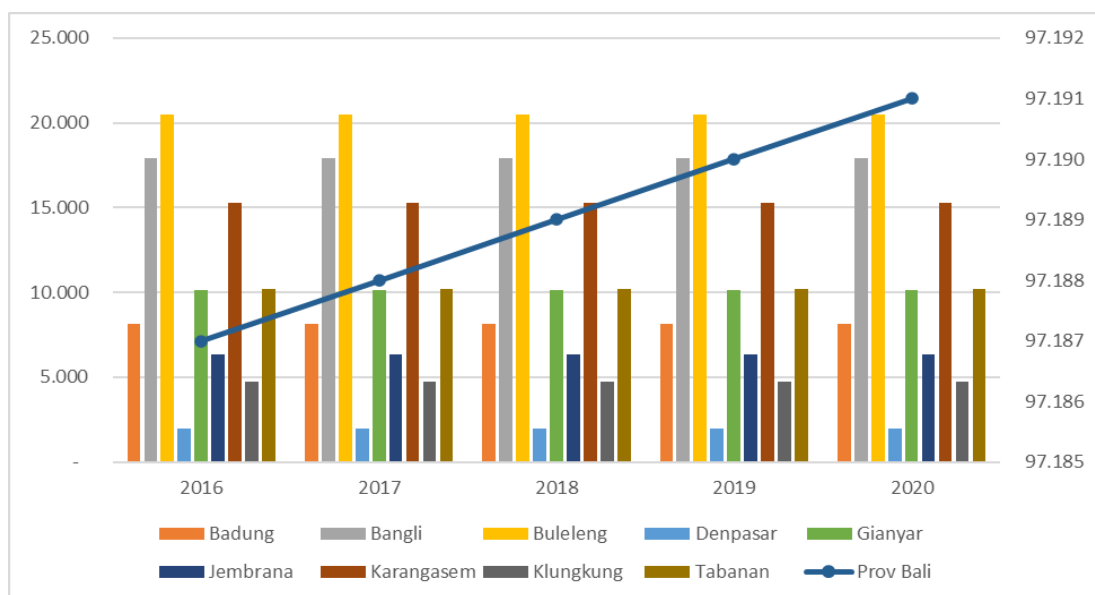
**Gambar 2. 171 Cakupan Bina Kelompok Petani**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

### 2.3.2.3 Peternakan

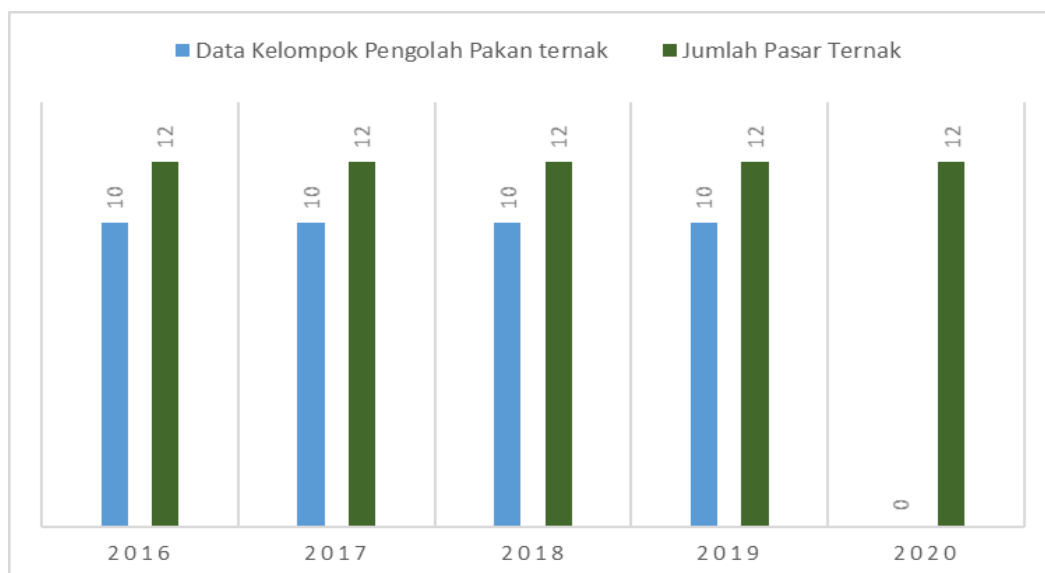
#### 1. Kelompok Ternak

Jumlah kelompok ternak di Provinsi Bali pada tahun 2016 adalah sebanyak 97.187 meningkat menjadi 97.188, 97.189, 97.190 dan 97.191 secara berturut-turut tahun 2017, 2018, 2018, 2019 dan 2020. Jumlah kelompok yang paling banyak di Provinsi Bali yaitu kelompok ternak sapi, yaitu sebanyak 390 kelompok pada tahun 2017. Kelompok pengolah pakan ternak cukup stabil diangka 10 sampai dengan tahun 2019 dan menjadi nol pada tahun 2020. Sedangkan jumlah pasar ternak stabil pada angka 12 dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.



**Gambar 2. 172 Jumlah Kelompok Ternak Pembibitan**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

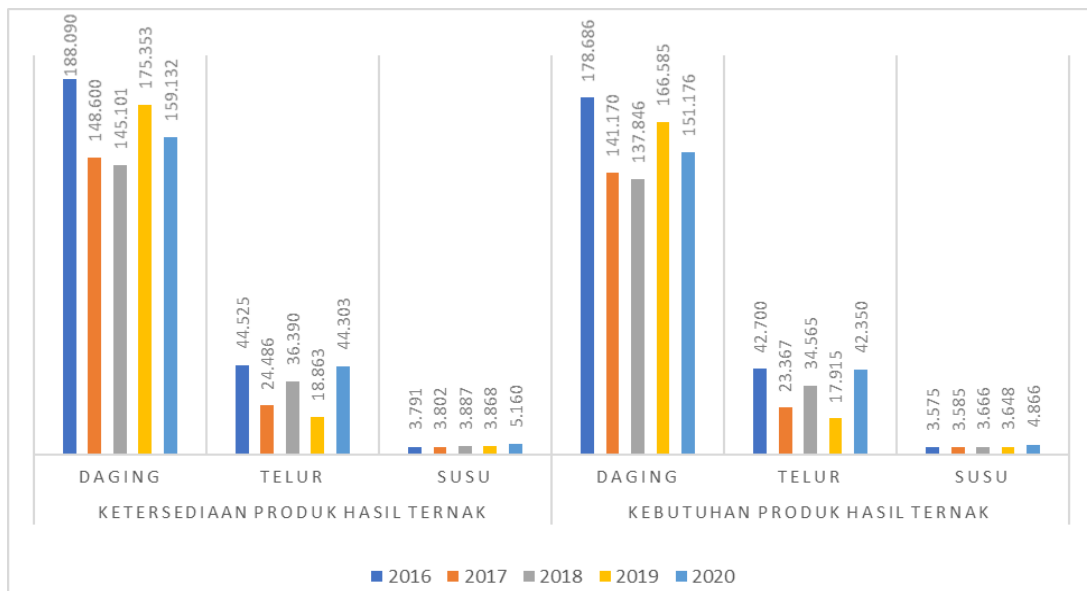


**Gambar 2. 173 Jumlah Kelompok Pengolah Pakan Ternak, Sarana Prasarana Ternak, dan Pasar Ternak**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 202

## 2. Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak

Ketersediaan daging cenderung menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu 188.090 ton pada tahun 2016 menjadi 159.132 pada tahun 2020. Sedangkan jika dilihat kebutuhan produk hasil ternak, kebutuhan daging pada tahun 2016 adalah sebesar 178.685 ton dan pada tahun 2020 adalah sebesar 151.175 ton. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan daging masih lebih kecil dari pada produksi untuk tahun 2016-2020.

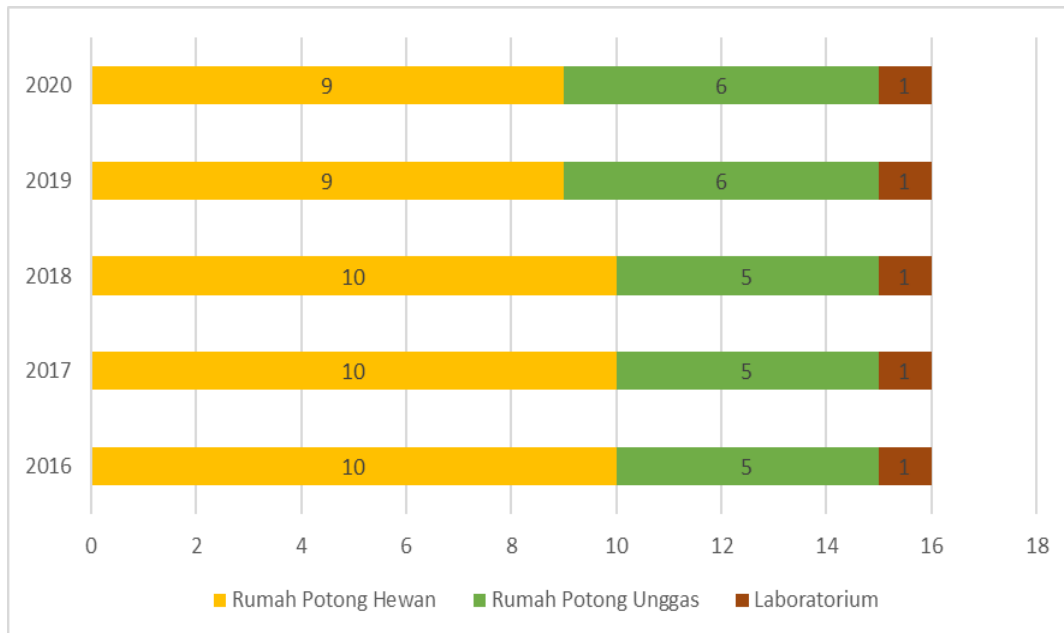


**Gambar 2. 174 Ketersediaan dan Kebutuhan Produk Hasil Ternak**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

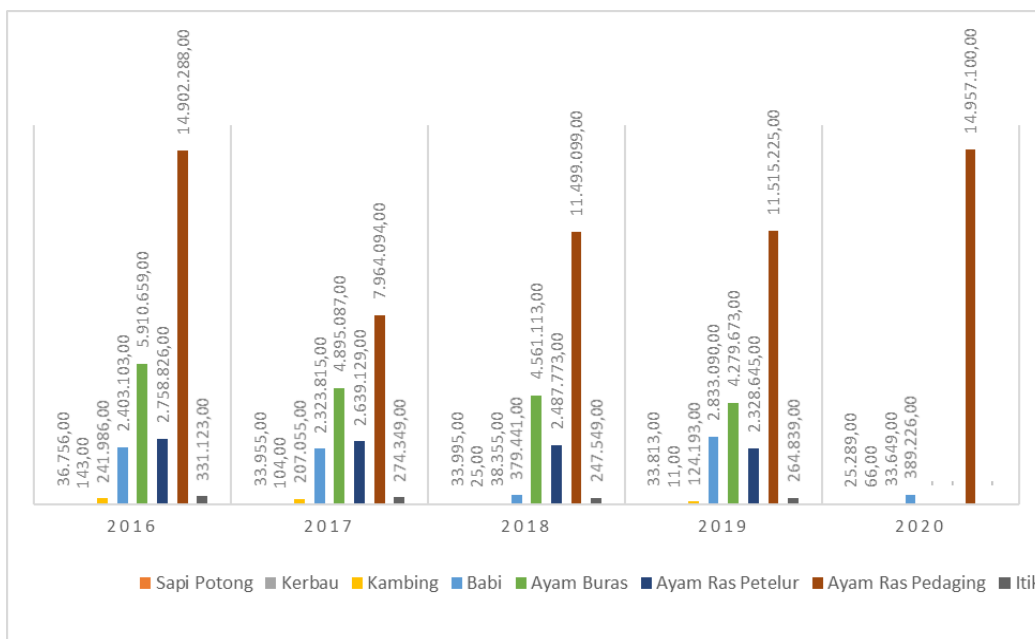
## 3. Rumah Potong Hewan dan Unggas

Rumah potong hewan selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan jumlah sebanyak 1 buah yaitu 10 buah pada tahun 2016 menjadi 9 buah pada tahun 2020. Sedangkan untuk rumah potong unggas berjumlah 6 buah pada tahun 2020 bertambah sebanyak 1 buah jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah ternak yang paling banyak dipotong yaitu jenis ayam ras pedagingan sebanyak 14.902.288 ekor dan yang paling sedikit yaitu kerbau hanya 143 ekor. Sedangkan pada tahun 2020 jenis ayam ras pedagung yang dipotong adalah sebanyak 14.957.100 ekor dan ada 3 jenis ternak yang tidak dipotong yaitu ayam buras, ayam ras petelur dan itik.



**Gambar 2. 175 Rumah Potong Hewan dan Unggas**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2. 176 Jumlah Pemotongan Ternak**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

#### 4. Jumlah Kasus Penyakit Hewan

Penyakit hewan yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 yaitu *colibasilosis* yaitu sebanyak 15.640.

**Tabel 2.71 Jumlah Penyakit Hewan**

Penyakit	2016	2017	2018	2019	2020
Septicaemia Epizootica (SE)	81	217	135	149	56
Penyakit Jembrana (JA)	-	-	13	13	-
Bali Ziekte (BZ)	350	367	534	724	450
ORG	-	-	-	-	-



<b>Penyakit</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Scabies (SC)	4,639	16,881	9.822	28.992	12.803
New Castle Disease (ND)	1,11	214	202	1.081	424
Snot	-	-	-	-	-
Kesus Mencret Menular (DGS)	33	99	33	7	8
Rabies	206	92	149	230	100
Bophin Ephemeral Fever (BEF)	5,897	4,053	3.500	7.696	10.943
Collibacilosis (CB)	32,459	34,493	21.972	53.019	15.640
Pink Eye	-	-	-	-	-
Chronic Respiratory Disease (CRD)	-	-	-	-	-
Hog Cholera (HC)	304	185	140	116	639
Avian Influenza	2	4	1	2	-

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

## 5. Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali

Pemasukan ternak besar dan kecil ke Provinsi Bali yang paling banyak yaitu untuk kambing potong. Pemasukan kambing potong mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 186.975 menjadi 375 pada tahun 2020. Sedangkan untuk pemasukan bahan asal ternak, komoditas terbesar pada tahun 2016 adalah susu sebanyak 3.814.940 liter yang mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 menjadi 196.00 liter. Daging sapi beku pada tahun 2016 tercatat masuk ke Provinsi Bali sebanyak 1.981.124 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 451.200. Namun angka tersebut merupakan pemasukan bahan ternak terbesar ke Provinsi Bali pada tahun 2020.

**Tabel 2.72 Pemasukan Ternak Besar dan Ternak Kecil ke Bali**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Babi Potong	-	-	-	-	-
Kambing Potong	186.97	52.321	330	-	375
Babi Bibit	-	-	-	-	72
Kambing Bibit	50	42	-	-	-
Kerbau Potong	-	-	-	-	-

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.73 Pemasukan Bahan Asal Ternak ke Bali (kg)**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Daging Sapi Beku	1,981,124	1,382,533	980.295	451.200	1.290.550
Daging Sapi Beku Untuk Industri	-	-	-	-	-
Daging Kambing/Daging Beku	157,1	127,425	183.200	151.700	70.000
Daging Ayam Beku	1,159,300	309,3	283.250	135.000	510.000
Daging Olah	-	1,530,479	-	368.672	1.538.528
Daging Babi Beku	-	-	20.000	-	-

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Daging Kalkun Beku	1,2	-	-	-	-
Daging Itik	863,2	-	321.000	41.000	78.000
Mentega	319,408	58,8	69.400	42.000	-
Cream	-	-	-	-	-
Susu (Liter)	3,814,940	3,626,200	2.366.500	196.000	516.000
Yogurt	191,5	189,7	123.600	5.000	130.125
Cheese	-	408,835	830.250	617.500	242.510

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

## 6. Pengeluaran Ternak dari Bali

Pengeluaran ternak dari Bali terbesar pada tahun 2016 yaitu ayam bibit/DOC sebanyak 19.049.200 ekor, jumlah tersebut meningkat pada tahun selanjutnya menjadi 19.779.200 selanjutnya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 menjadi 3.774.845. Sedangkan pengeluaran bahan asal ternak yang terbesar pada tahun 2016 yaitu telur konsumsi sebanyak 126.535.700 butir meningkat pada tahun selanjutnya menjadi 157.153.980 butir. Selanjutnya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 menjadi 60.830.000 butir.

**Tabel 2.74 Pengeluaran Ternak dari Bali**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sapi Potong	44.865	52.513	47.100	54.375	53.449
Sapi Bibit	82	280	40	141	368
Babi Potong	1.636	3.098	6.710	-	3.334
Ayam Afkir	352.605	380.240	221.151	159.656	398.118
Babi Bibit	109	-	196	-	-
DOC Jantan	140.500	53.400	314.000	-	1.170.000
Jumlah Ayam Bibit/DOC	19.042.200	19.779.200	12.248.500	3.774.845	5.335.000

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

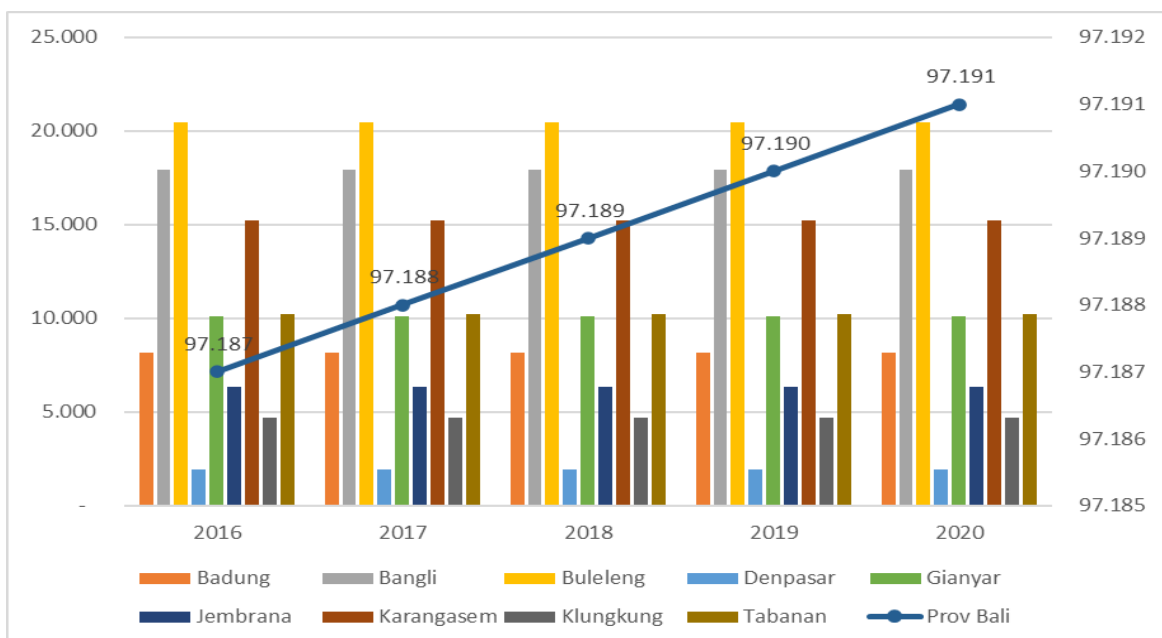
**Tabel 2.75 Pengeluaran Bahan Asal Ternak dari Bali**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Daging Sapi Beku (Kg)	296.436	63.553	52.830	-	68.910
Daging Sapi Olahhan (Kg)	1.183.198	1.445.188	1.283.779	43.290	1.379.550
Daging Babi Beku (Kg)	291.985	644	951	-	-
Daging Ayam Beku (Kg)	583.952	803.688	441.750	20.000	721.530
Daging Olahhan Babi (Kg)	1.400.946	1.583.906	964.364	76.250	924.960
Daging Ayam Olahhan (Kg)	934.351	1.291.008	1.238.985	62.950	1.457.395
Daging Kalkun (Kg)	342	-	-	-	-
Telur Konsumsi (butir)	126.535.700	157.153.980	59.750.000	-	60.830.000
Keju (Kg)	69.055	92.975	35.150	-	200

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

## 7. Jumlah SDM Peternakan

Jumlah peternak terbanyak pada tahun 2016 ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 20.491 sedangkan pada skala provinsi pada tahun yang sama sebanyak 97.187. Sedangkan untuk jenis peternak yang paling banyak pada tahun 2017 adalah peternak sapi potong sebanyak 1.168 peternak. Jumlah peternak lain yang jumlahnya di atas seribu yaitu peternak babi campuran sebanyak 1.050 peternak dan peternak ayam ras pedaging sebanyak 1.158 peternak. Berdasarkan kelas kelompoknya peternak sapi memiliki kelas terbanyak dengan jumlah 2.936 pada tahun 2016. Dari angka tersebut, terdapat 1.768 kelas pemula, 973 kelas lanjut, 180 kelas madya, dan 15 kelas utama.



**Gambar 2. 177 Jumlah Peternak**

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.76 Kelas Kelompok Peternak**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Sapi</b>					
Pemula	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
Lanjut	973	973	973	973	973
Madya	180	180	180	180	180
Utama	15	15	15	15	15
<b>Jumlah</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>	<b>2.936</b>
<b>Kambing</b>					
Pemula	74	74	74	74	74
Lanjut	26	26	26	26	26
Madya	3	3	3	3	3

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Utama	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>Ayam Buras</b>					
Pemula	89	89	89	89	89
Lanjut	75	75	75	75	75
Madya	28	28	28	28	28
Utama	10	10	10	10	10
<b>Jumlah</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

## 8. Situasi Harga dan Hasil Ternak

Harga hasil peternakan sangat bervariasi setiap tahunnya. Harga hasil peternakan dengan jelas dapat dilihat pada table di bawah.

**Tabel 2.77 Pasar Hasil Peternakan**

<b>Uraian</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sapi Potong Berat 375-400 kg	Kg/Berat/ Hidup	43	43	43	42800	41875
Sapi Bibit Jantan Umur 2 Th	ekor	10,000,000	11,000,000	11,000,000	12,500,000	11,000,000
Sapi Bibit Betina Umur 2Th	ekor	6,500,000	8,500,000	8,500,000	10,000,000	7,520,000
Kerbau Umur 7 Bln	ekor	-	-	-	-	-
Kambing PE Berat 40 kg	ekor	-	-	-	2,500,000	2,100,000
Kambing PE Bibit Umur 4- 5 Bln	ekor	-	-	-	2,500,000	1,175,000
Kambing Kacang Umur 6 Bln	ekor	-	-	-	800.000	750.000
Babi Potong Berat 100 Kg	Kg/Berat/ Hidup	24	25	27.000	31.500	46
Babi Landrace Bibit Berat 12 Kg	Kg/Berat/Hidup	65	60	85.000	60.000	79

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
DOC Layer	ekor	6	5	5.300	6.000	15.500
DOC Broiler	ekor	5	5	5.500	6.000	7.750
DOD	ekor	6	6	5.200	5.200	
Broiler Kg/BH	Kg/Berat/Hidup	20	22	24.000	21.500	25.350
Ayam Buras	ekor	50	55	60.000	60.000	53.050
Itik Bali Dewasa	ekor	50	55	55.000	40.000	57.825
Entog Betina	ekor	90	100	100.000	75.000	105.000
Entog Jantan	ekor	110	110	110.000	100.000	167.500
<b>HASIL TERNAK</b>						
Daging Ayam Broiler	Kg	33	34	34.000	34.000	41.500
Daging Ayam Buras	Kg	65	60	60.000	60.000	65.000
Daging Sapi kualitas I	Kg	95	100	100.000	100.000	114.150
Daging Kambing	Kg	125	115	105.000	115.000	163.650
Daging Babi kualitas I	Kg	60	55	55.000	65.000	86.650
Telur Ayam Ras	Butir	1	1	1.350	1.400	1.650
Telur Ayam Buras	Butir	2	2	2.000	2.000	1.875
Telur Itik	Butir	3	2	3.000	3.000	2.350

Sumber Data : Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

#### 2.3.2.4 Kehutanan

##### 1. Luas Kawasan Hutan

Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Bali tersebar pada 22 (dua puluh dua) Register Tanah Kehutanan (RTK), untuk kawasan hutan terluas di Bali adalah Kawasan Hutan Bali Barat yang meliputi Kabupaten Buleleng dan Jembrana yaitu 62,00% dari luas kawasan hutan secara keseluruhan. Beberapa kawasan hutan yang luasnya di atas seribu hektar yaitu Gunung Batukaru, Gunung Abang, Gunung Agung, Penulisan Kintamani, Yeh Leh-Yeh Lebah, Gunung Batur Bukit Payang, Prapat Bena, Gunung Mungsu dan Gunung Seraya.

**Tabel 2.78 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali**

Kabupaten/ Kota	Fungsi Hutan								Jumlah
	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Hutan Konservasi				
					Cagar Alam	Taman Nasional	Taman Wisata Alam	Taman Hutan Raya	
Badung	1.127	-	-	170	-	-	14	424	1.734
Bangli	6.239	453	-	-	-	-	2.849	-	9.541
Buleleng	31.557	3.269	1.423	-	1.004	12.839	1.050	-	51.142
Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	735	735
Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jembrana	34.069	2.742	590	-	-	6.188	-	-	43.589
Karangasem	13.996	196	-	-	-	-	-	-	14.192
Klungkung	805	244	-	-	-	-	-	-	1.049
Tabanan	8.896	-	-	-	746	-	549	-	10.190
Provinsi Bali	<b>96.688</b>	<b>6.904</b>	<b>2.013</b>	<b>170</b>	<b>1.750</b>	<b>19.027</b>	<b>4.461</b>	<b>1.158</b>	<b>132.171</b>

Sumber Data : DKLH Provinsi Bali, 2021

## 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Jumlah lahan kritis cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu 41.638 ha menjadi 46.895 ha. Pada rentan waktu yang sama sebetulnya sudah dilakukan upaya-upaya pemulihan lahan kritis yaitu tercatat pada tahun 2016 melakukan pemulihan kawasan lahan kritis seluas 1.070 ha dan pada tahun 2020 seluas 1.402 ha. Saat ini tercatat luas kawasan hutan di Provinsi Bali adalah seluas 132.171,4 ha.

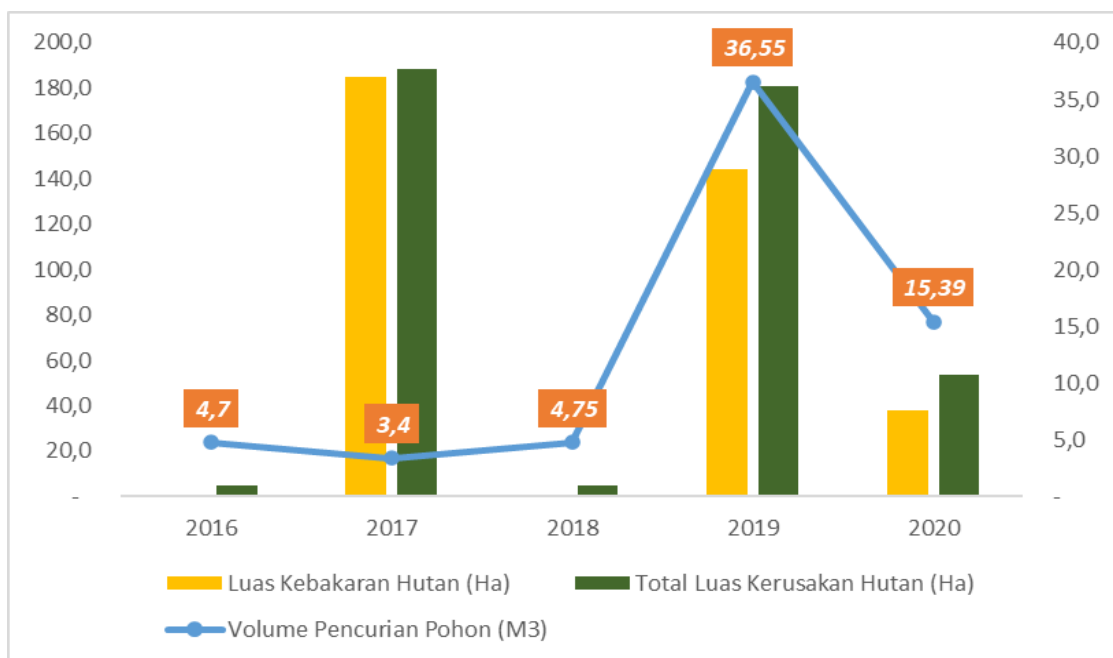
**Tabel 2.79 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis di provinsi Bali**

Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Bali	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas (Ha)	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.171,47
Luas hutan (dalam dan luar kawasan)	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.528,22	132.171,47
Luas lahan kritis	41.638,35	39.623,03	42.762,35	46.895,12	46.895,12
Lahan yang direhabilitasi	1.070,00	1.646,75	1.124,00	4.926,00	1.402,20
% Lahan yang direhabilitasi	2,57	1,48	2,63	10,50	4,33
Jumlah Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Bali	1.070,00	1.646,75	1.124,00	4.926,00	1.402,20

Sumber Data : DKLH Provinsi Bali, 2021

### 3. Kerusakan Kawasan Hutan

Pencurian pohon di Provinsi Bali mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Menurut data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pada tahun 2016 besarnya pencurian kayu mencapai 4,7 M<sup>3</sup> ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 36,55 M<sup>3</sup>. Sementara untuk kasus kebakaran hutan dan kerusakan hutan datanya cukup fluktuatif.



**Gambar 2. 178 Kerusakan Kawasan Hutan di Provinsi Bali**

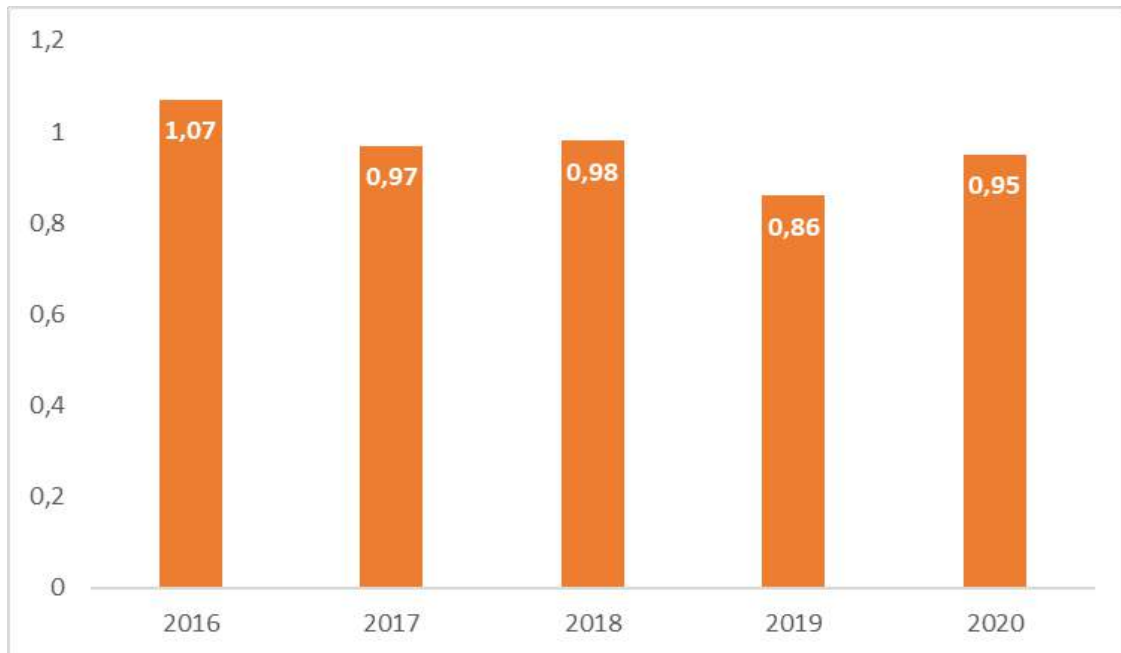
Sumber Data: DKLH Provinsi Bali, 2021

#### 2.3.2.5 Energi Sumber daya Mineral

##### 1. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB

Secara persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar 1,07 persen, menurun menjadi 0,86 persen pada tahun 2019 dan sedikit meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,9 persen. Secara keseluruhan dari tahun 2016 ke tahun 2020 terjadi penurunan persentase kontribusi pada sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB di Provinsi Bali.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB, setiap tahunnya mengalami fluktuasi karena produksi tambang yang ada di Bali, yang melayani proyek pemerintah, swasta dan pembangunan perorangan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat Bali, dimana kondisi ekonomi masyarakat juga sering mengalami perubahan/tidak stabil yang berpengaruh juga pada kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB yang tidak konstan.

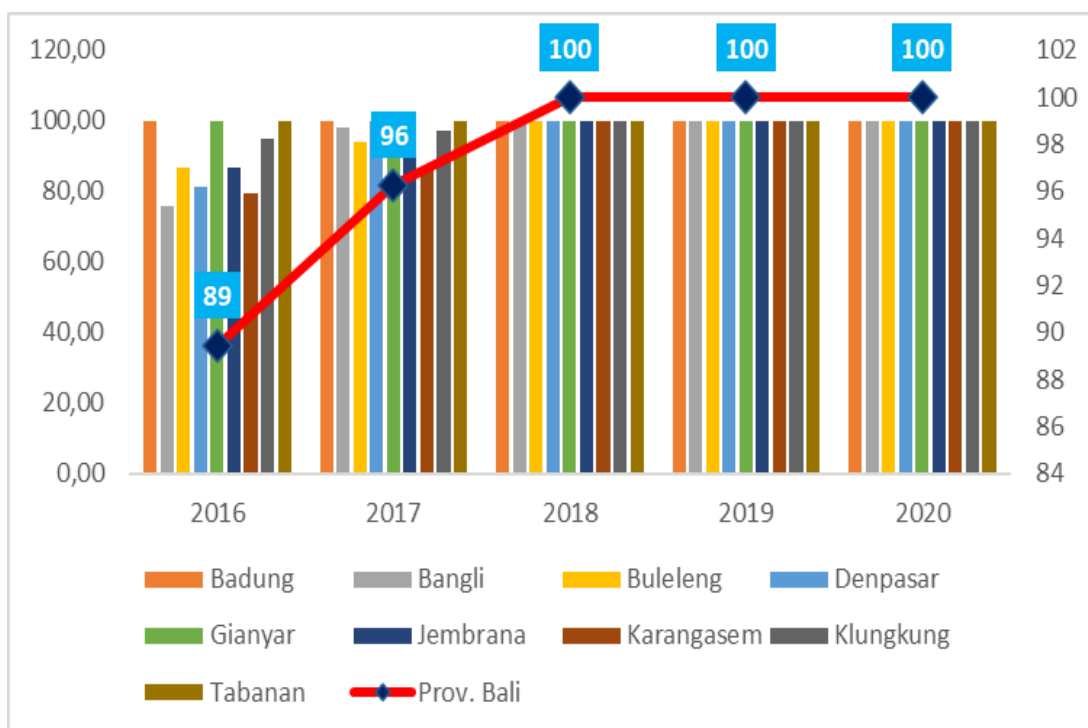


**Gambar 2. 179 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB**

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

## 2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pada tahun 2016 dan 2017, rumah tangga pengguna listrik di Bali memang belum mencapai 100%, akan tetapi berdasarkan informasi dari PT. PLN Persero (data dari desa) bahwa dari akhir tahun 2018, rumah tangga pengguna listrik di Bali telah mencapai 100 persen (melalui PLTS jika lokasinya tidak terjangkau listrik dari PLN).



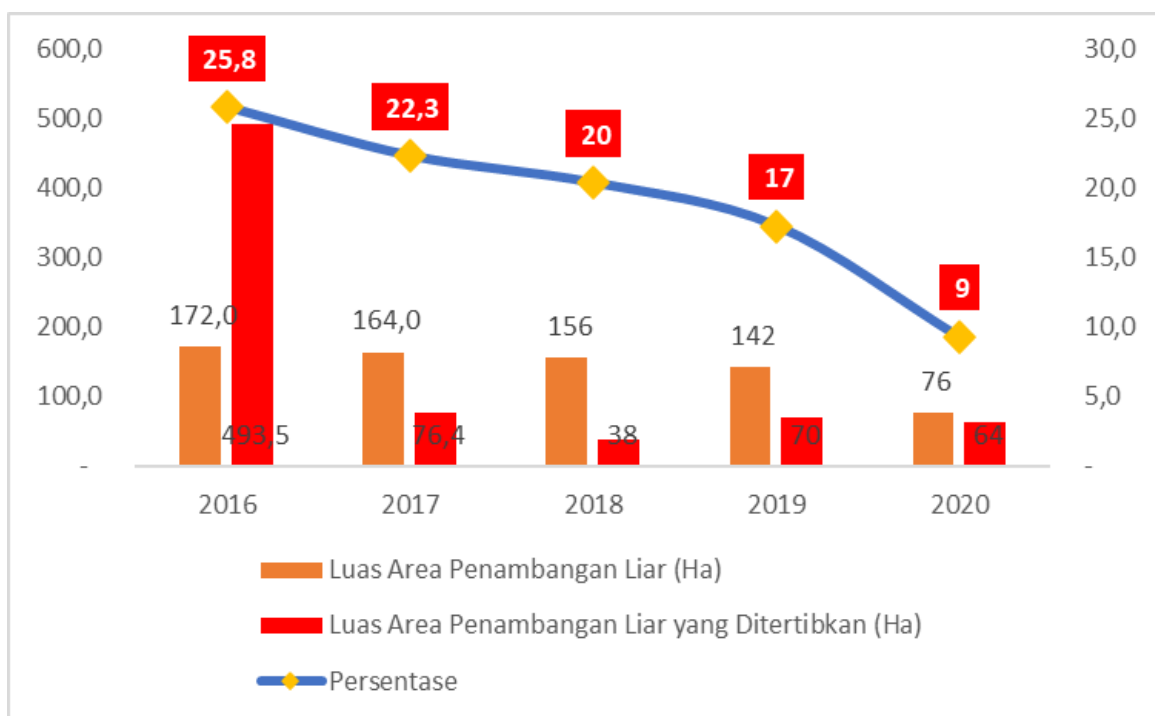
**Gambar 2. 180 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik**

Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021



### 3. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Pemerintah Provinsi Bali melalui Disnaker ESDM Provinsi Bali berupaya meminimalisasi penambangan liar yang terjadi. Dilaksanakan pengendalian kegiatan pertambangan tanpa ijin bersama Satpol PP Provinsi Bali, melalui Tim Penegakan Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dilaksanakan juga sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017, Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2017, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Bali, sehingga dari tahun ke tahun luas area penambangan liar di Bali menurun.



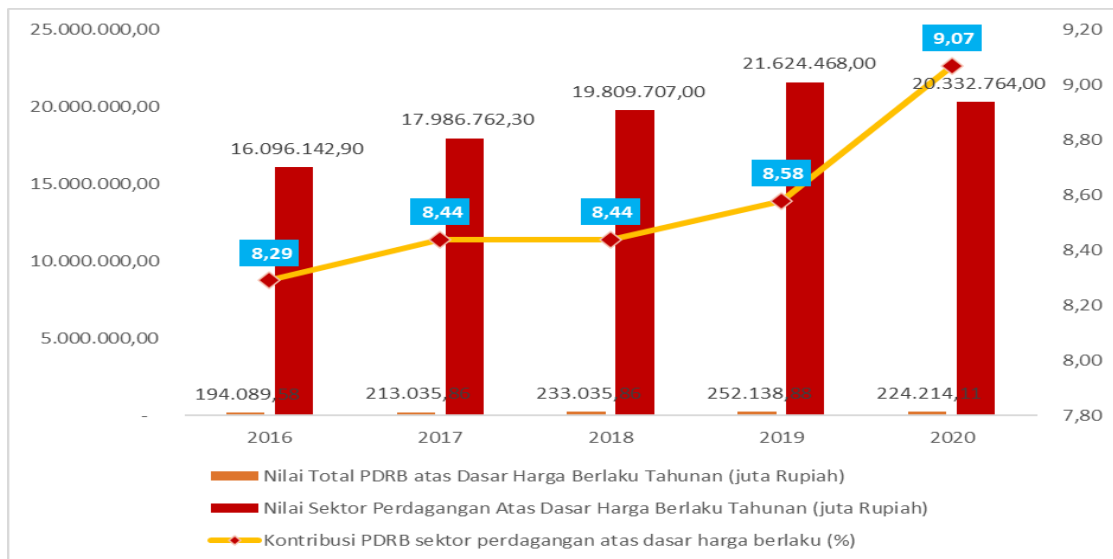
**Gambar 2. 181 Persentase Penambangan Liar**  
Sumber Data : Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

#### 2.3.2.6 Perdagangan

##### 1. Nilai Perdagangan

Nilai total PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (juta rupiah) pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh kondisi ekonomi Provinsi Bali yang masuk dalam tahap resesi (tumbuh negatif secara berturut-turut dari triwulan I sampai dengan triwulan IV) pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi di Provinsi Bali karena sektor utama penggerak ekonomi di Provinsi Bali, yaitu sektor pariwisata sama sekali tidak berjalan. Kebijakan pembatasan pergerakan baik itu secara nasional dan internasional menyebabkan penurunan jumlah

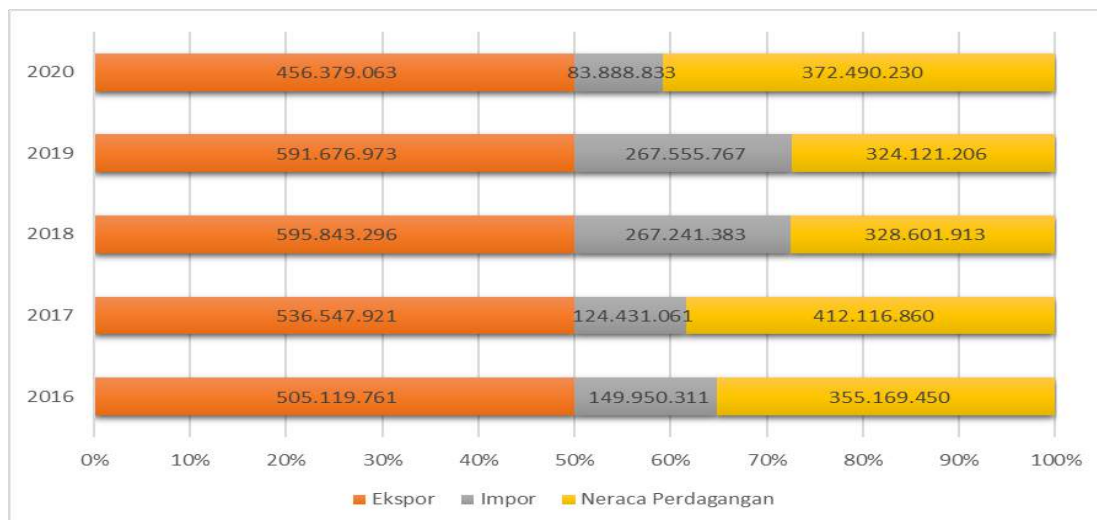
wisaatwan yang sangat luar biasa, yang menyebabkan subsektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menurun secara drastis. Selain itu pembatasan pergerakan juga terjadi secara lokal yang menyebabkan aktifitas ekonomi lainnya juga mengalami penurunan.



**Gambar 2. 182 Nilai Perdagangan**  
Sumber Data : Disperindag Provinsi Bali, 2021

## 2. Nilai Ekspor

Nilai ekspor Provinsi Bali pada tahun 2016 adalah 505 Juta USD menurun menjadi 456 Juta USD, sedangkan nilai impor dari tahun 2016 adalah 355 Juta USD meningkat menjadi 372 Juta USD. Penurunan ekspor pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya produksi akibat dari pandemi Covid-19.



**Gambar 2. 183 Nilai Ekspor dan Impor di Provinsi Bali**  
Sumber : Disperindag Provinsi Bali, 2021

### 3. Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri

Jumlah ijin usaha perdagangan luar negeri cenderung meningkat selama kurun waktu 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 jumlah ijin sebanyak 391 dan pada tahun 2020 sebanyak 558.

**Tabel 2.80 Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ijin Usaha Perdagangan Luar Negeri	391	426	466	513	558

Sumber : Disperindag Provinsi Bali, 2021

### 4. Kinerja Perlindungan Konsumen

Jumlah kabuptaen/kota yang memiliki badan penyelesaian sengketa konsumen selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak berubah yaitu ada 4. Sedangkan untuk lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebanyak 1 selama kuruan waktu 2016-2019 ada 1 kemudian meningkat menjadi 3 pada tahun 2020. Selama lima tahun terakhir, penyelesaian sengketa konsumen melalui sistem pengawasan perlindungan konsumen telah mencapai 100 persen.

**Tabel 2.81 Kinerja Perlindungan Konsumen**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kab/Kota yang memiliki Badan Penyelesaian sengketa konsumen/BPSK	4	4	4	4	4
Jumlah Kab/Kota yang memiliki lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat/LPKSM	1	1	1	1	3
Persentase penyelesaian sengketa konsumen melalui sistem pengawasan perlindungan konsumen (%)	100%	100%	100%	100%	100%
Jumalh Jenis Barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ)	14	14	15	10	10

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penyidikan terhadap hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidik (%)	-	-	-	-	-
Persentase SPBU yang telah dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan	-	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota

Sumber : Disperindag Provinsi Bali, 2021

## 5. Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat

Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat Provinsi Bali pada tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebanyak 306 pasar atau sebesar 82,5 persen (dari jumlah pasar sebanyak 371 Pasar Rakyat). Selanjutnya meningkat pada tahun 2018, 2019 dan 2020 menjadi 355 atau sebanyak 95,7 persen.



**Gambar 2. 184 Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat**

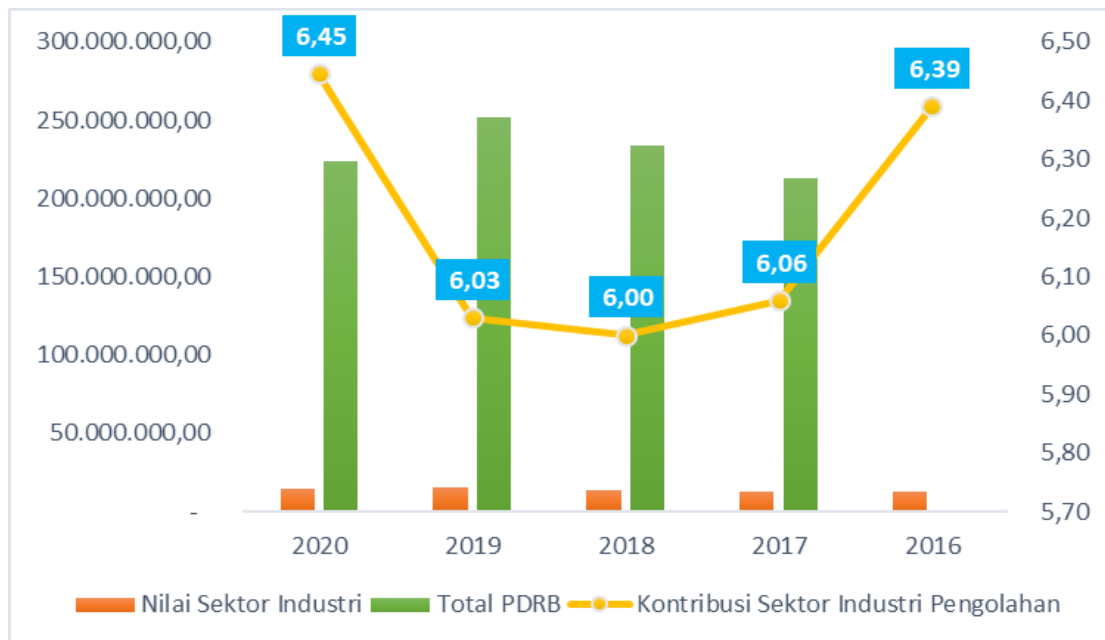
Sumber Data : Disperindag Provinsi Bali, 2021

### 2.3.2.7 Perindustrian

#### 1. Nilai Perindustrian

Nilai sektor perindustrian ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) mengalami peningkatan dari 12.410.972,19 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 14.452.955,68 juta rupiah pada tahun 2020. Sektor perindustrian berkontribusi sebesar 6,45 persen pada tahun 2020 terhadap pembentukan

PDRB. Kontribusi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,39 persen.

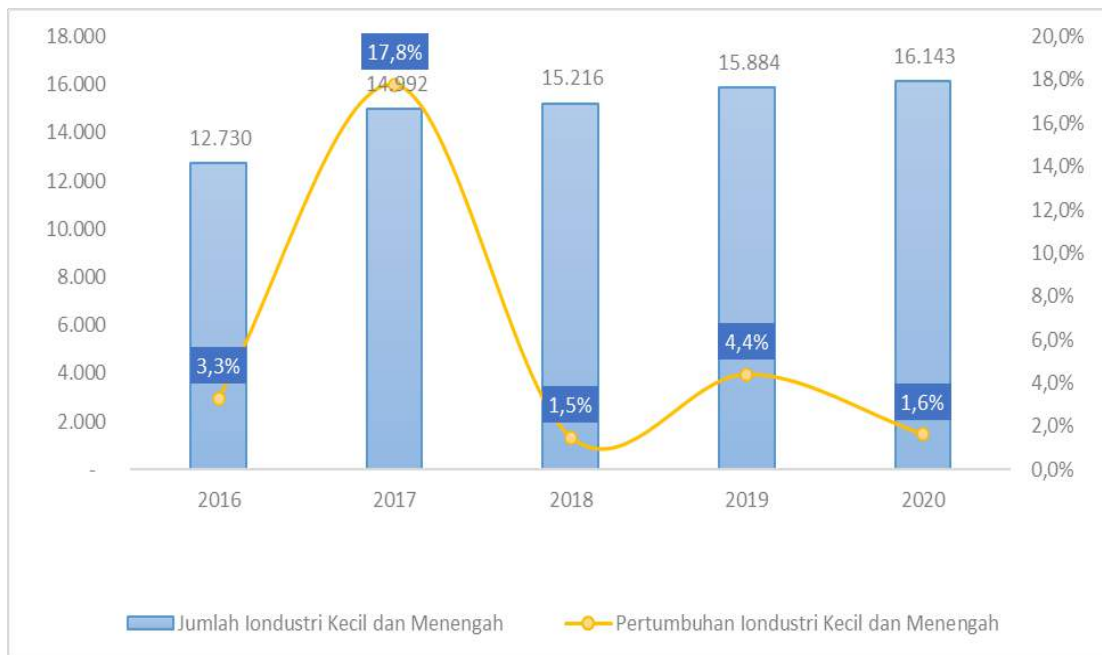


**Gambar 2. 185 Nilai Perindustrian**

Sumber Data : Disperindag Provinsi Provinsi Bali, 2021

## 2. Jumlah Industri

Jumlah industri kecil dan menengah mengalami peningkatan dari 12.730 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 14.992 unit usaha pada tahun 2017 dan 16.143 pada tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa jumlah industri di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Tercatat pertumbuhan industri kecil dan menengah mencapai di Provinsi Bali pada tahun 2016 adalah sebesar 3,3 persen, meningkat secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 17,8 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai 1,5 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 sedikit meningkat menjadi 4,4 persen dan pada tahun 2020 menurun lagi menjadi 1,6 persen.

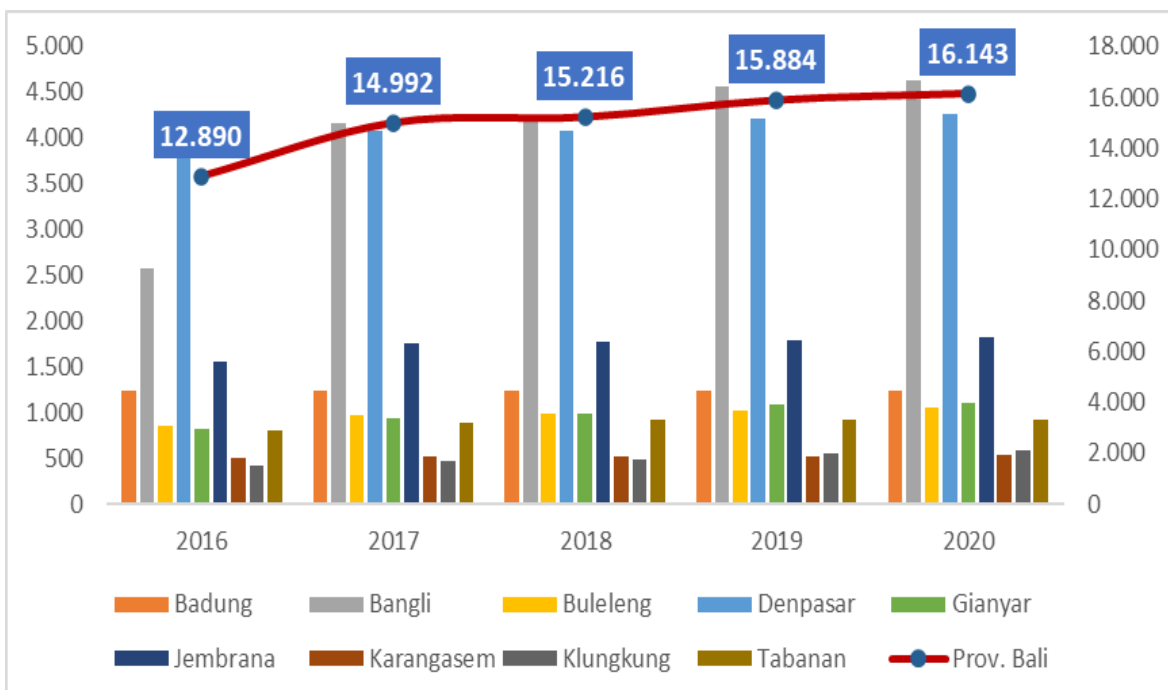


**Gambar 2. 186 Jumlah Industri Kecil dan Menengah**

Sumber Data : Disperindag Provinsi Bali, 2021

### 3. Cakupan Bina Perajin

Cakupan bina Perajin pada tahun 2016 adalah sebesar 12.890 perajin di Provinsi Bali. Angka tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 14.992 pada tahun 2017, 15.216 pada tahun 2018, 15.884 pada tahun 2019 dan 16.143 pada tahun 2020.



**Gambar 2. 187 Cakupan Bina Perajin Tahun 2016-2020**

Sumber Data : Disperindag Provinsi Bali, 2021

### 2.3.2.8 Transmigrasi

#### 1. Capaian Pengiriman Transmigrasi

Jumlah KK transmigrasi pada tahun 2016 sebanyak 43 KK (148 Jiwa), jumlah tersebut jauh dibawah kuota pusat yaitu sebesar 80 KK. Angka tersebut terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 jumlah transmigrasi yang terealisasi sebanyak 6 KK (24 jiwa) dari 10 KK yang ditetapkan sebagai kuota. Pada tahun 2020 ada kuota sebanyak 10 KK, namun tidak ada yang terealisasi sama sekali.

Target pengiriman transmigrasi adalah berdasarkan pada kuota yang telah ditetapkan oleh pusat. Sedangkan jumlah KK terkait pengiriman transmigrasi dari tahun 2016 selalu tidak dapat terpenuhi sesuai dengan target/kuota yang diberikan oleh pusat, karena kawasan yang ditentukan/ditetapkan oleh Pusat tidak sesuai dengan harapan/keinginan calon transmigran, sehingga beberapa calon transmigran mengurungkan niatnya/mengundurkan diri.

**Tabel 2.82 Capaian Pengiriman Transmigrasi**

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kuota/Target Pusat (KK)	80	25	15	10	10
Jumlah KK	43 KK = 148 Jiwa	14 KK = 72 Jiwa	5 KK = 23 Jiwa	6 KK = 24 Jiwa	Tidak Ada

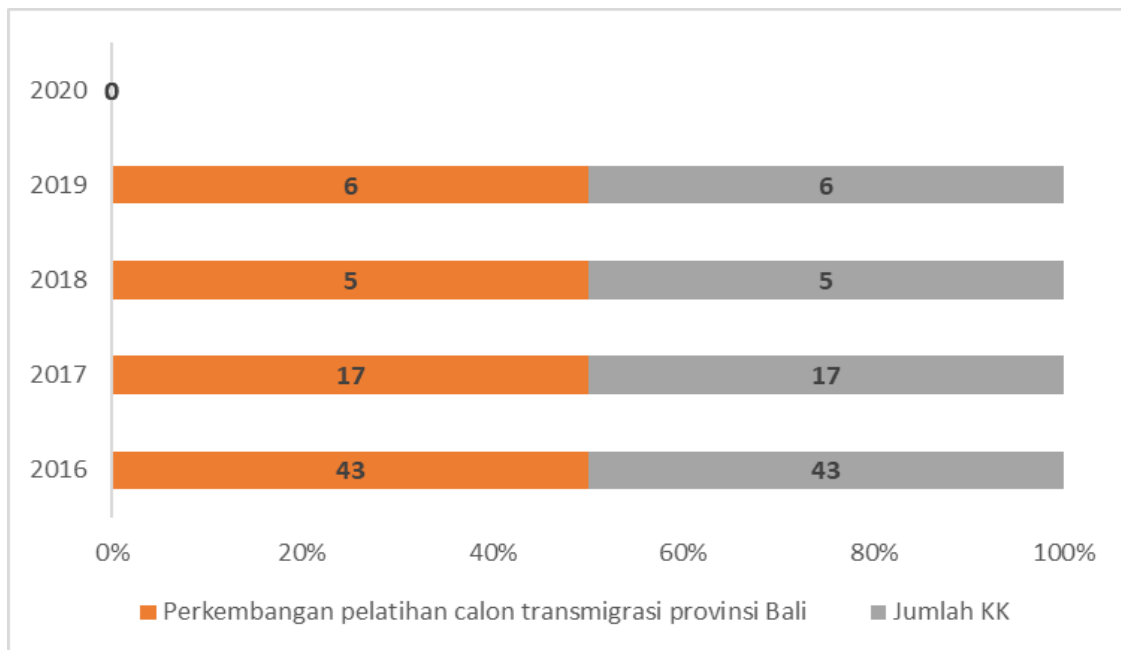
Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

#### 2. Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU)

Para calon transmigran yang telah melalui proses seleksi dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, sebelum diberangkatkan ke daerah/kawasan transmigrasi, selama satu minggu akan diberikan pelatihan dasar umum (PDU), berupa pelatihan pengolahan lahan, pertukangan, pertanian, dll., di Balai Latihan masyarakat (Balamas) Wilayah Timur (Bali, NTT, NTB), yang berlokasi di Kabupaten Badung. Pelatihan Dasar Umum dilaksanakan dengan tujuan agar para calon transmigran memiliki keahlian dan kesiapan dalam menghadapi kondisi di lapangan/di daerah penempatan.

Jumlah calon transmigrasi yang mendapat pelatihan dasar umum (PDU) berfluktuasi selama kurun waktu 2016 sampai 2020. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral,

tercatat jumlah pelatihan/peserta pelatihan yang mengikuti program PDU sebesar 43 KK pada tahun 2016 terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2019 jumlah KK yang mengikuti program tersebut adalah sebanyak 6 KK. Sedangkan pada tahun 2020 tidak bisa dilakukan pelatihan akibat adanya Pandemi Covid-19 untuk mencegah terjadinya penularan yang semakin besar dan fokus pemerintah lebih pada penanganan Covid-19.



**Gambar 2. 188 Jumlah Calon Transmigrasi yang Mendapat Pelatihan Dasar Umum (PDU)**

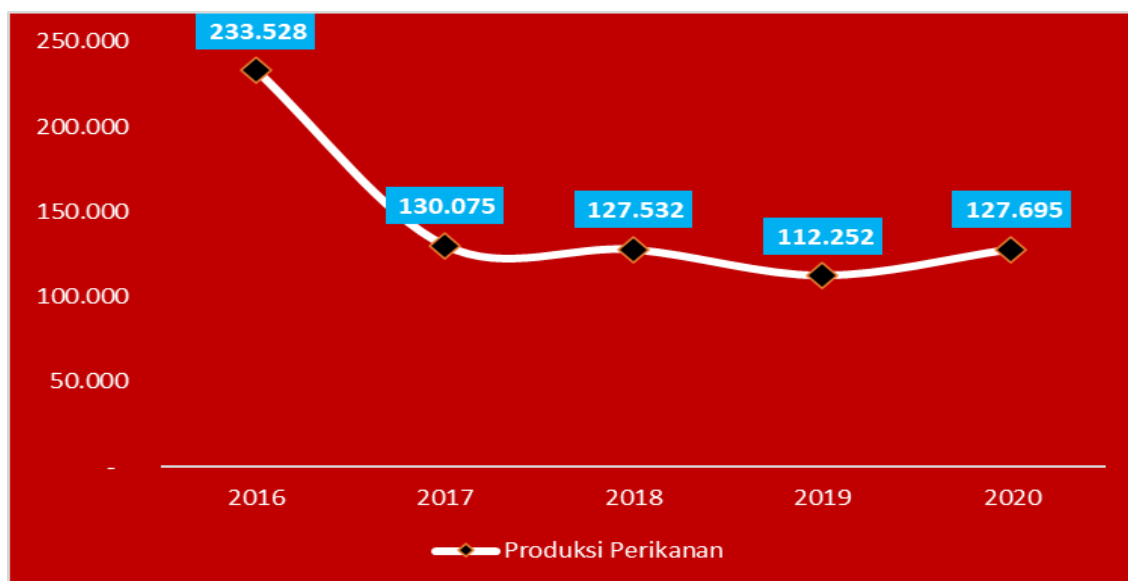
Sumber Data: Disnaker ESDM Provinsi Bali, 2021

### 2.3.2.9 Kelautan dan Perikanan

#### 1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 118.241,05 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 160.378,60 ton. Jumlah produksi kelautan dan perikanan pada tahun 2013 sebesar 263.970,45 ton dan mengalami penurunan menjadi 220.706,45 ton pada tahun 2014. Namun, mengalami peningkatan sampai dengan 229.403,58 ton pada tahun 2016 dan kembali menurun menjadi 113.734,46 ton pada tahun 2017.





**Gambar 2. 189 Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali**

Sumber Data : DKP Provinsi Bali, 2021

## 2. Konsumsi ikan

Tingkat konsumsi ikan terus mengalami peningkatan dari 32,38 ton per kapita pada tahun 2016 menjadi 38,83 ton per kapita pada tahun 2020

**Tabel 2. 83 Konsumsi Ikan**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	32,38	33,52	33,26	31,77	38,83

Sumber Data : DKP Provinsi Bali, 2021

## 3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan mengalami penurunan yaitu 80 pada tahun 2016 menjadi 70 pada tahun 2020.

**Tabel 2.84 Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	80	90	70	70	70

Sumber Data : DKP Provinsi Bali, 2021

#### 4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 60,79 pada tahun 2016 menjadi 70 pada tahun 2020.

**Tabel 2.85 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	60,79	68,60	67,44	66,32	65,10

Sumber Data : DKP Provinsi Bali, 2021

#### 5. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman setiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi masih pada batas penangkapan tidak melebihi potensi lesatri sehingga potensi perikanan laut masih dalam batasan biologis yang aman.

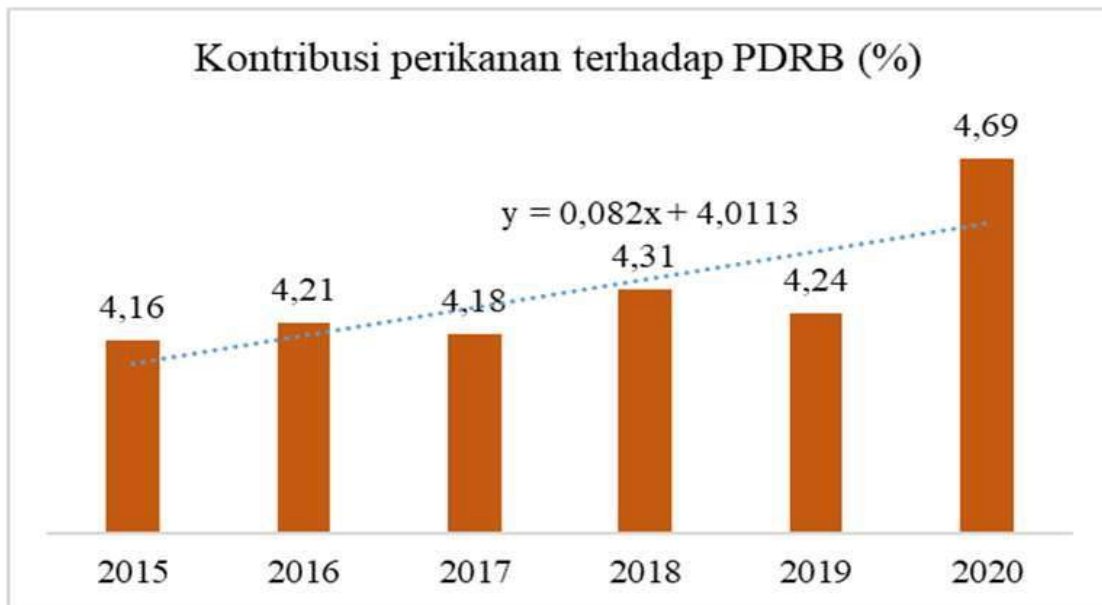
**Tabel 2.86 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman**

Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada dalam batasan biologis yang aman	TAHUN					SATUAN %
	2016	2017	2018	2019	2020	
	75,3	75,78	74,27	64,51	64,56	

Sumber Data : DKP Provinsi Bali, 2021

#### 6. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Selama periode 2015-2020, kontribusi perikanan terhadap PDRB Bali cenderung meningkat dari 4,16% tahun 2015 menjadi 4,69% tahun 2020. Ini menunjukkan peran perikanan bagi perekonomian daerah cenderung meningkat. Walaupun terjadi peningkatan akan tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

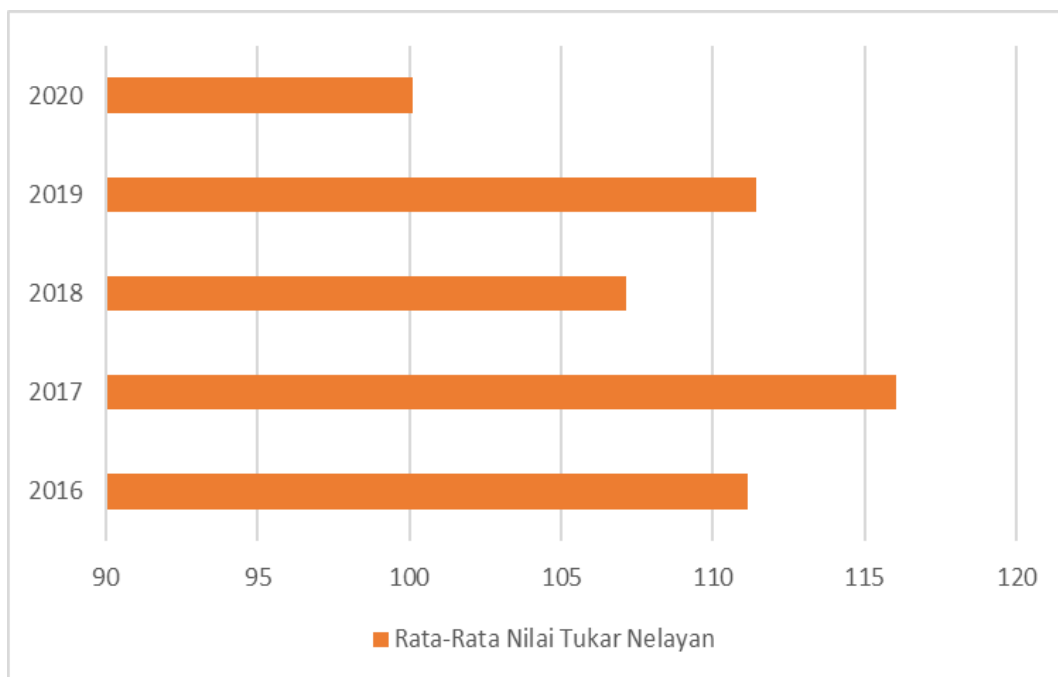


**Gambar 2. 190 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2015-2020**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 7. Nilai Tukar Nelayan

Rata-rata nilai tukar nelayan dan pembudidayaan ikan berfluktuasi selama kurun waktu 2016 sampai 2020.



**Gambar 2. 191 Nilai Tukar Nelayan**

Sumber Data : DKP Provinsi Bali, 2021

### **2.3.3 Penunjang Urusan**

#### **2.3.3.1 Perencanaan Pembangunan**

##### **1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA**

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi PERDA. Dokumen perencanaan yang dimaksud, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

##### **2. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA**

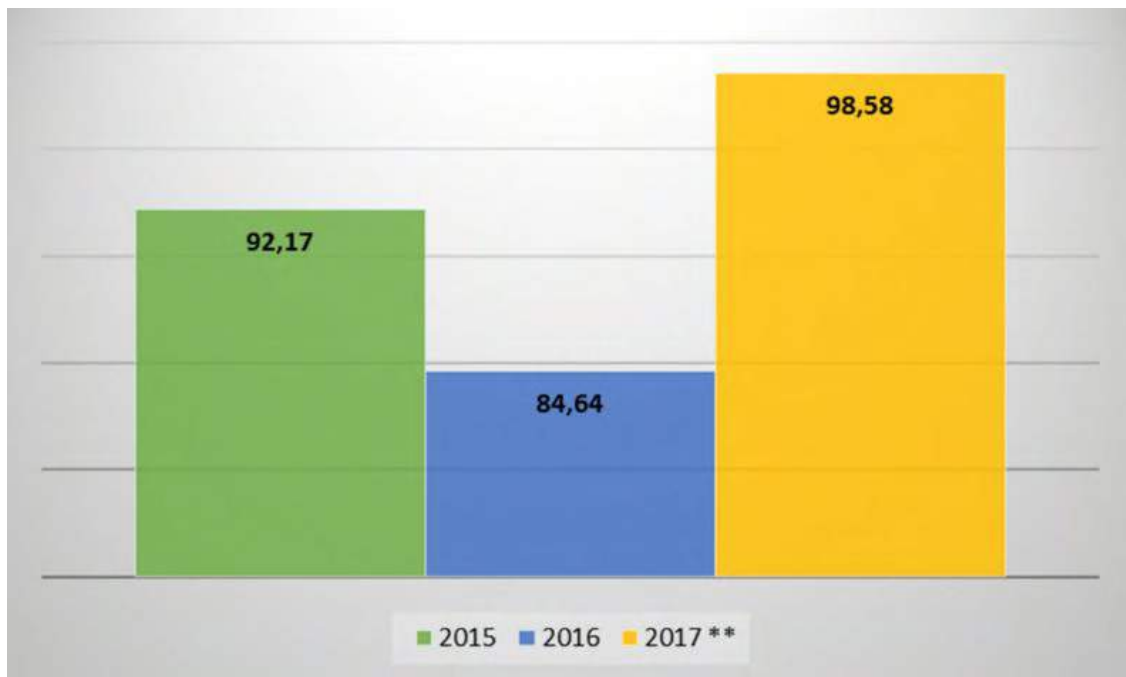
Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dokumen perencanaan terkait dengan tata ruang dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Saat ini RTRW Provinsi Bali tersebut sudah mengalami revisi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2020.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan RTRWP Bali 2009-2029, didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan karena itu sekurang kurangnya harus memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi system perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. Penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

##### **3. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**

Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD pada tahun 2015 mencapai 92,17 persen, pada tahun 2016 sebesar 84,64 persen, dan 98,58 persen pada tahun 2017.



**Gambar 2. 192 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

#### 4. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

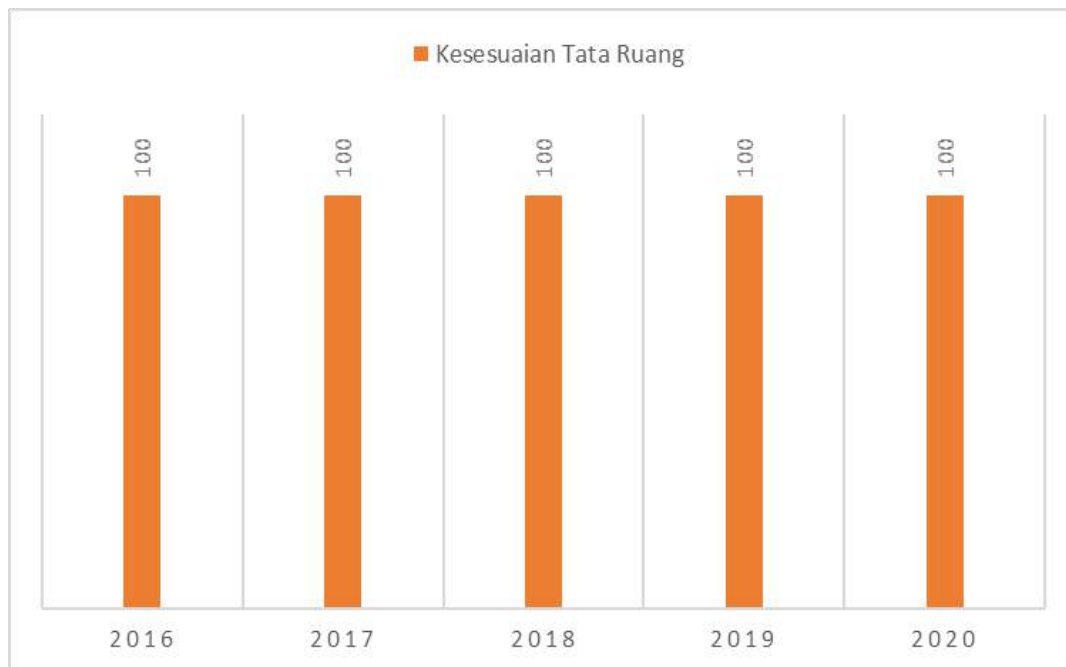
**Tabel 2.87 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	90%	93%	95%	96%	96%

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

#### 5. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW telah mencapai 100 persen selama kurun waktu 2016 sampai 2020.



**Gambar 2. 193 Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW**

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

### 2.3.3.2 Keuangan

#### 1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sejak tahun 2013, Pemerintah Provinsi Bali semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Berikut disampaikan capaian opini BPK dari.

**Tabel 2.88 Opini BPK**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

Capain Opini WTP selama 4 kali berturut-turut bukan tanpa kekurangan, masih ada permasalahan yang masih menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Bali konsen dalam mengurangi jumlah temuan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan tersebut. Opini WTP merupakan wujud dari kinerja dan komitmen kita terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik. Oleh karena itu, komitmen dan semangat untuk terus menunjukkan kinerja yang positif tersebut harus terus dipupuk agar pencapaian ini tetap dapat dipertahankan.

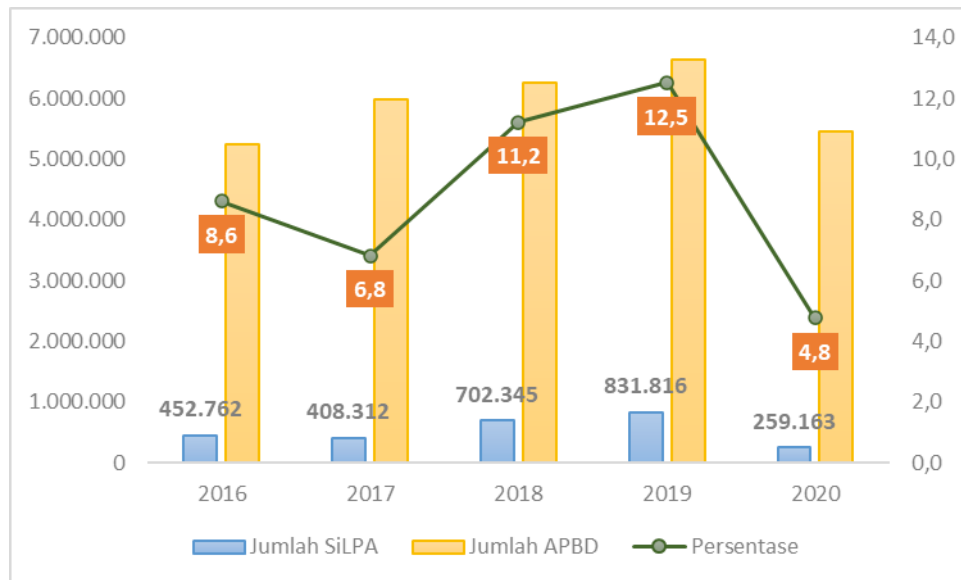
## **2. Persentase SiLPA**

Realisasi SiLPA dapat disebabkan karena pelampauan target pendapatan, tidak tercapainya target realisasi belanja, serta sisa anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Meskipun realisasi pembiayaan menunjukkan hasil positif, namun sejak tahun 2014 persentase SiLPA Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan penurunan realisasi mencapai 6,73% di tahun 2017 dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 11,81%. Kecenderungan penurunan realisasi SiLPA tersebut disebabkan karena berkurangnya realisasi pendapatan Provinsi Bali sebagai dampak dari penataan organisasi dan penataan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menurunnya realisasi penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

## **3. Persentase SiLPA Terhadap APBD**

Adanya SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tidak sepenuhnya merupakan dana menganggur (idle) mengingat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan atau untuk pengeluaran pembiayaan, investasi atau dana cadangan pada tahun berjalan. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang

digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Berikut disampaikan persentase SiLPA terhadap APBD tahun 2016-2020.



**Gambar 2. 194 Persentase SILPA (dalam juta rupiah)**

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

Berdasarkan perhitungan persentase SiLPA terhadap APBD, pada tahun 2016-2020 menunjukkan persentase yang positif, dengan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 menunjukkan realisasi SiLPA mengalami penurunan yaitu sebesar 6,8 persen dari APBD. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,8 persen.

#### **4. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana**

Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Provinsi Bali dan DPA SKPD seluruhnya telah dilaksanakan setiap tahunnya. Seluruh program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Gubernur dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pelaksanaan penatausahaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan SIPKD. Untuk pelaksanaan evaluasi capaian atas output dan outcome program dan kegiatan telah dilakukan monitoring dengan menggunakan aplikasi e-RKPD, SiDalev, Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) dan e-Sakip.



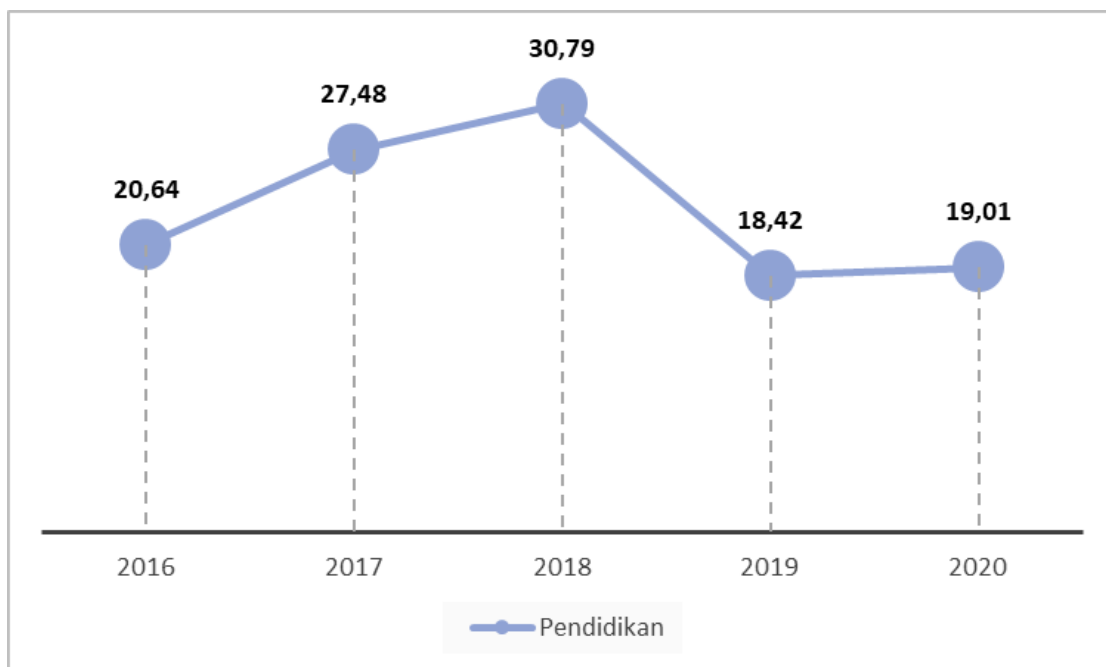
**Tabel 2.89 Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

### 5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Bab VII Pasal 81 Ayat (1) tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan grafik, tercatat dari tahun 2016-2018 Pemerintah Provinsi Bali telah konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran belanja daerah dalam APBD. Hanya pada tahun 2019 dan 2020 persentase anggaran pendidikan mengalami penurunan yaitu berturut-turut sebanyak 18,42% dan 19,01%.



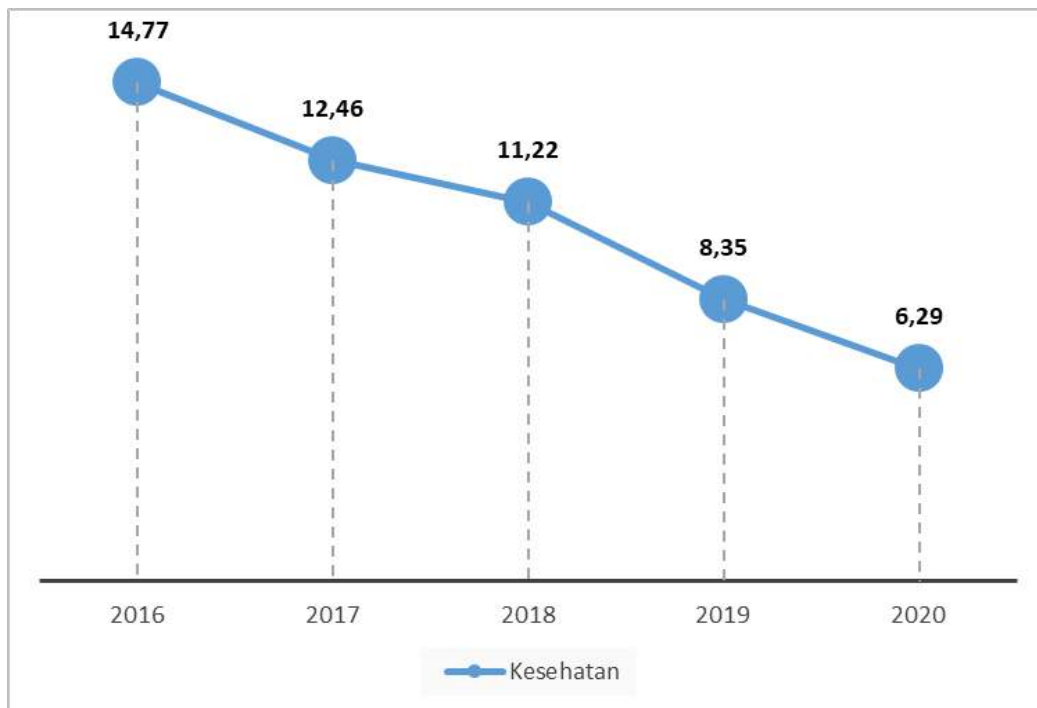
**Gambar 2. 195 Persentase Belanja Pendidikan (20%)**

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

### 6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten dan berkesinambungan mempertahankan pengalokasian anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran belanja daerah dalam

APBD dari tahun 2016-2018. Sesuai data pada grafik, sejak tahun 2019–2020 Pemerintah Provinsi Bali menurunkan anggaran kesehatan menjadi 8,35% dan 6,29%. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



**Gambar 2. 196 Persentase Belanja Kesehatan (10%)**

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

## 7. Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan tabel, proporsi Belanja Tidak Langsung lebih besar dari Belanja Langsung tidak mencerminkan belum berkualitasnya APBD Provinsi Bali. Faktor paling penting adalah pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah lebih tinggi dari rata-rata nasional.

**Tabel 2.90 Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	29,38 : 70,61	25,51 : 64,42	25,05 : 74,71	28,21 : 71,79	32,87 : 67,13

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

## 8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas sumber pendanaan tersebut. Kebijakan belanja bagi hasil pajak dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh kabupaten/kota di Bali. Berdasarkan tabel, sejak tahun 2016 persentase bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota dan Desa menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan dana bagi hasil pajak tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan ke masyarakat di wilayah masing-masing.

**Tabel 2.91 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	18,93%	0,18%	19,87%	19,98	16,63

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

## 9. Penetapan APBD

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Penyusunan APBD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar adalah sebagai berikut : (1) Penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) Penetapan prioritas dan plafon sementara anggaran (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD (5) Penyusunan Rencana Perda APBD (6) Penetapan APBD. Penetapan APBD dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Sesuai tabel diatas, penetapan APBD selama periode 5 tahun dari tahun 2016-2020 telah sesuai ketentuan peraturan perundangan ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

**Tabel 2.92 Penetapan APBD**

<b>Tahun</b>	<b>Penetapan APBD</b>
2016	Tepat Waktu
	11/12/2015
	No. 11 Tahun 2015
	5.704.727.109.732,32
2017	Tepat Waktu
	30/12/2016
	No.12 Tahun 2016
	6.654.312.296.707,50
2018	Tepat waktu
	12/27/2017
	No. 12 Tahun 2017
	6.664.144.528.047,54
2019	Tepat waktu
	12/21/2018
	No. 10 Tahun 2018
	6.834.255.626.694,00
2020	Tepat waktu
	12/19/2019
	No. 11 Tahun 2019
	7.280.707.083.216,00

Sumber Data : Bappeda Provinsi Bali, 2021

### **2.3.3.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali berubah nama menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (BPSDM Provinsi Bali) yang merupakan Badan Daerah Provinsi Bali dengan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan.

Program Prioritas pada BPSDM Provinsi terdiri dari 3 Program, yaitu Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

## 1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa lama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbeda-beda berdasarkan jenis diklat yang dilaksanakan. Bagi Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis dilaksanakan antara 11 hari sampai dengan 15 hari kerja. Bagi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan lamanya pelaksanaan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara mengenai pembelajaran dalam kelas (klasikal) dan pelaksanaan implementasi di perangkat daerah masing-masing (non klasikal) dengan rincian sebagai berikut, Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan jumlah hari klasikal 27 hari dan non klasikal 74 hari, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan jumlah hari klasikal 31 hari dan non klasikal 67 hari, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan jumlah hari klasikal 36 hari dan non klasikal 67 hari, Pelatihan Dasar CPNS Gol. I, II dan III dengan jumlah hari klasikal 33 hari dan non klasikal 80 hari, sedangkan bagi Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III dari Tenaga Honorer K1/K2 dengan jumlah hari klasikal 7 hari. Capaian tiap tahun seperti tabel diatas diperoleh dengan merata-ratakan jumlah hari pembelajaran dalam kelas (klasikal) sehingga di dapat 20 hari.

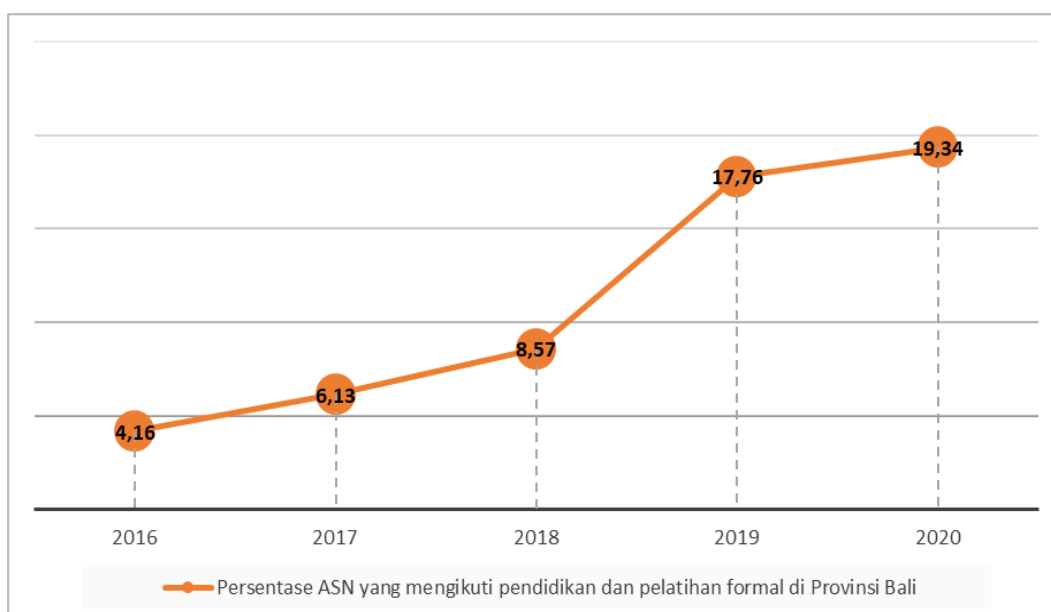
**Tabel 2.93 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**

URUSAN/JENIS DATA	CAPAIAN SETIAP TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20	20	20	20	20

Sumber Data : BKD Provinsi Bali, 2021

## 2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat dari 4,16 persen pada tahun 2016 menjadi 6,13 persen pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus meningkat menjadi 14,04, 18,91 dan 21,10 persen.



**Gambar 2.197 Pesentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Provinsi Bali**

Sumber Data : BKD Provinsi Bali, 2021

### 3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.94 menunjukkan jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II dan III dibagi jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dimana jumlah peserta diklat tahun 2016 sebanyak 4,87 persen pejabat struktural meningkat pada tahun 2017 menjadi 8,96 persen pejabat struktural. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural meingkat secara berturut-turut menjadi 14,04 persen, 18,91 persen, dan 21,1 persen.

**Tabel 2.94 Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	4,87	8,96	14,04	18,91	21,10

Sumber Data : BKD Provinsi Bali, 2021



**Gambar 2.198 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali**

Sumber Data : BKD Provinsi Bali, 2021

#### **4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah di Provinsi Bali**

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah meningkat dari 43 pada tahun 2013 menjadi 52 pada tahun 2017. Jumlah jabatan administrasi cenderung mengalami penurunan dari 256 pada tahun 2013 menjadi 247 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah jabatan administrasi meningkat menjadi 270. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu mengalami peningkatan dari 1.329 pada tahun 2013 menjadi 6.869 pada tahun 2017.



**Gambar 2.199 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi pemerintah di Provinsi Bali**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

## 5. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah cenderung meningkat dari 13,6 persen pada tahun 2016 menjadi 14 persen pada tahun 2020.

**Tabel 2.95 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	14% 7/50

Sumber Data : BKD Provinsi Bali, 2021

## 6. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah cenderung meningkat dari 66,6 persen pada tahun 2016 menjadi 70 persen pada tahun 2020.

**Tabel 2.96 Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah	66,6 % 6/9	66,6 % 6/8	66,6 % 6/8	66,6 % 6/8	70% 7/8

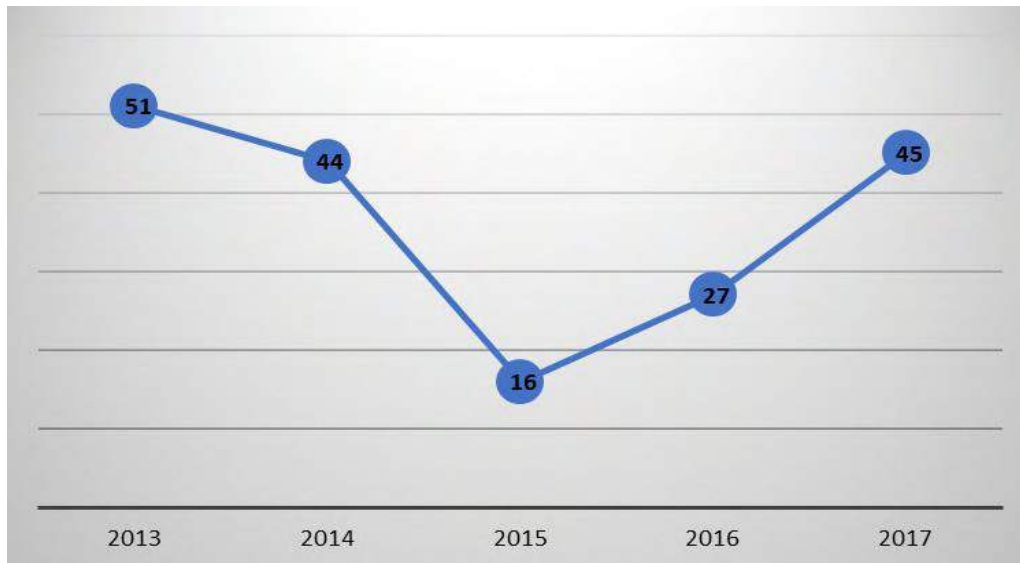
Sumber Data : BKD Provinsi Bali, 2021

### 2.3.3.4 Pengawasan

#### 1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan di pengawasan Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan dari 51 pada tahun 2013 menjadi 16 pada tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan menjadi 27 pada tahun 2016 dan 45 pada tahun 2017.





**Gambar 2.200 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Provinsi Bali**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

## 2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali telah melaksanakan Pembinaan dan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari Tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 16 penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari :

1. Hukuman disiplin ringan : 2 (dua) surat keputusan yang merupakan hukuman disiplin teguran tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang : 5 (lima) surat keputusan yang terdiri dari :
  - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebanyak 3 surat keputusan.
  - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) surat keputusan.
3. Hukuman disiplin berat : 9 (sembilan ) surat keputusan yang terdiri dari :
  - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebanyak 8 (delapan) surat keputusan.
  - Pemberhentian tidak dengan hormat sebanyak 1 (satu) surat keputusan.

Dari 16 penjatuhan hukuman disiplin tersebut, 31,25% (5 kasus) merupakan pelanggaran karena kasus tindak pidana korupsi, dan 68,75%

(11 kasus ) merupakan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan jam kerja. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 prosentase penjatuhan hukuman disiplin mengalami fluktuasi naik turun yang tidak jauh berbeda, dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan 25% (dari 4 kasus di tahun 2013 menjadi 3 kasus di tahun 2014), dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 33,33% (dari 3 kasus di tahun 2014 menjadi 4 kasus di tahun 2015), dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 50% (dari 4 kasus di tahun 2015 menjadi 2 kasus di tahun 2016), dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 50% (dari 2 kasus di tahun 2016 menjadi 3 kasus di tahun 2017).

Dibandingkan dengan jumlah PNS per tahunnya bahwa prosentase penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 2013 sebesar 0.062% (4 kasus dari 6.448 jumlah PNS), tahun 2014 sebesar 0.048% (3 kasus dari 6.283 jumlah PNS), tahun 2015 sebesar 0.066% (4 kasus dari 6.023 PNS), tahun 2016 sebesar 0.033% (2 kasus dari 5.995 PNS), tahun 2017 sebesar 0.025% (3 kasus dari 12.103 PNS).

Secara keseluruhan rata-rata penjatuhan hukuman disiplin PNS dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 0,047% dibandingkan dengan jumlah PNS.

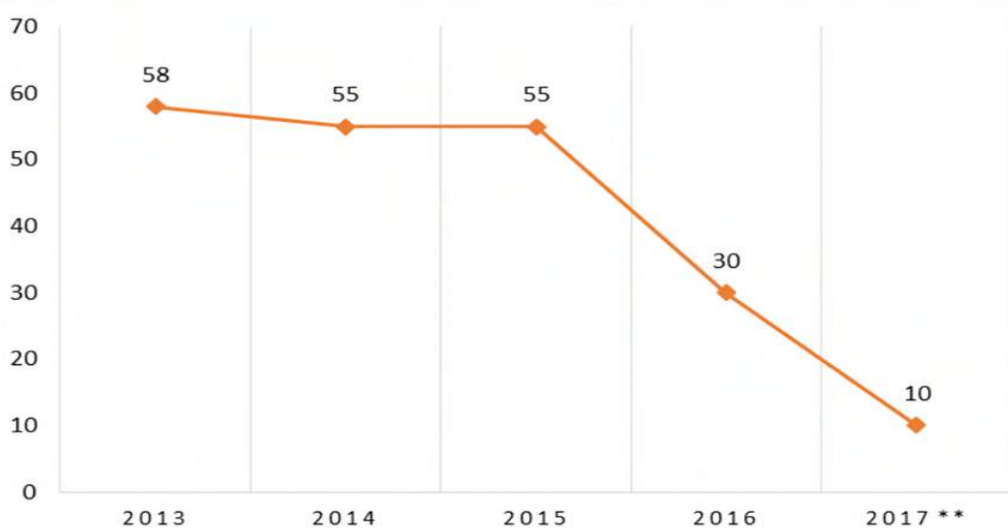
**Tabel 2.97 Persentase Pelanggaran Pegawai**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pelanggaran Pegawai	0.062%	0.048%	0.066%	0.033%	0.025%

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

### 3. Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK mengalami penurunan selama kurun waktu 2013 sampai 2017 dari 58 temuan menjadi 10 temuan.

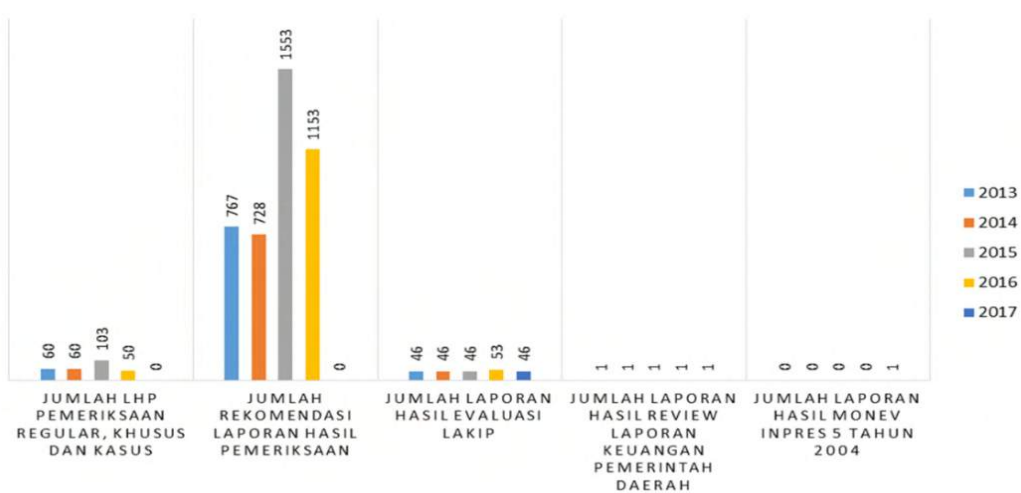


**Gambar 2.201 Jumlah Temuan BPK di provinsi Bali**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

**4. Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev**

Jumlah LHP pemeriksaan regular, khusus dan kasus di Provinsi Bali sebesar 60 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 103 pada tahun 2015. Angka tersebut turun menjadi 50 pada tahun 2016. Jumlah rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selama tahun 2013 sampai 2017, yaitu 767; 728; 1553; dan 1153. Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP sebesar 46 pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017. Sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 53. Jumlah laporan hasil review laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1 laporan pada tahun 2013 sampai 2017. Jumlah laporan hasil monev Inpres 5 Tahun 2004 pada tahun 2017 sebanyak 1 laporan.



**Gambar 2.202 Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev**

Sumber : Data SIPD Provinsi Bali

### 2.3.3.5 Sekretariat DPRD

#### 1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

**Tabel 2.98 Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rencana Kerja Tahunan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Data SIPD Provinsi Bali

#### 2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

**Tabel 2.99 Fungsi Pengawasan, Pembentukan dan Fungsi Anggaran**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Fungsi Pengawasan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Data SIPD Provinsi Bali

#### 3. Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

**Tabel 2.100 Fungsi Pengawasan**

URUSAN/JENIS DATA	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Fungsi Pengawasan	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Data SIPD Provinsi Bali

### 2.3.3.6 Bencana

#### 1. Jumlah Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak

bencana tersebut dengan tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko terkena bencana. Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat. Pembentukan UPT. Pusdalops PB dibantu oleh Palang Merah Perancis (FRC) melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Palang Merah Perancis tanggal 25 Agustus 2008 sedangkan BPBD Provinsi Bali mulai diisi personil pada tanggal 18 Januari 2012. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali yang baru berdiri hanya memiliki sistem peringatan dini yang jumlahnya belum banyak sehingga dalam tabel dibawah tertuang banyak tahun jumlah sistem peringatan dini masih kosong. Berikut jumlah sistem peringatan dini yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali.

**Tabel 2.101 Jumlah Sistem Peringatan Dini**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Banjir</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sistem Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sistem Tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>2</b>	<b>Gunung Meletus</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sistem Elektronik	N/A	N/A	N/A	Sirine Erupsi Gunung Berapi	Sirine Erupsi Gunung Berapi
	Sistem Tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>3</b>	<b>Longsor</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sistem Elektronik	N/A	N/A	N/A	EWS Landslide Karangasem	EWS Landslide Karangasem
	Sistem Tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>4</b>	<b>Gempa</b>	N/A	N/A	N/A	BMKG	BMKG
	Sistem Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sistem Tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>5</b>	<b>Tsunami</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sistem Elektronik	InaTEWS	InaTEWS	InaTEWS	InaTEWS	InaTEWS
	Sistem Tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>6</b>	<b>Lainnya</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sistem Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sistem Tradisional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2021

## 2. Jumlah Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan suatu kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis. Sering kali terjadinya bencana di Provinsi Bali ini disebabkan kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang karakteristik wilayah yang rawan terjadinya bencana. Berikut jumlah kawasan rawan bencana sesuai wilayah dan jenis bencana.

**Tabel 2.102 Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali**

Tahun	Uraian	Badung	Bangli	Buleleng	Denpasar	Gianyar
2016	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Longsor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gempa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Longsor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gempa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Longsor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gempa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2019	Banjir	Tinggi :0; Sedang :39	Tinggi :0; Sedang :21	Tinggi :0; Sedang :48	Tinggi :0; Sedang :43	Tinggi :0; Sedang :36
	Gunung Meletus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Longsor	Tinggi :4; Sedang :6	Tinggi :14; Sedang :48	Tinggi :2; Sedang :90	Nihil	Tinggi :1; Sedang :25
	Gempa	Sedang : 58	Sedang : 40	Sedang : 100	Sedang : 42	Sedang : 69
	Tsunami	Tinggi :11; Sedang :5	Nihil	Tinggi :40; Sedang :6	Tinggi :6; Sedang :4	Tinggi :4; Sedang :6
	Lainnya	Nihil	Sedang : 15	Sedang :22	Nihil	Sedang : 3
2020	Banjir	Tinggi : 0; Sedang :39	Tinggi : 0; Sedang :21	Tinggi :0; Sedang :48	Tinggi :0; Sedang :43	Tinggi :0; Sedang :36
	Gunung Meletus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Longsor	Tinggi :4; Sedang :6	Tinggi :14; Sedang :48	Tinggi :2; Sedang :90	Nihil	Tinggi :1; Sedang :25
	Gempa	Sedang :58	Sedang :40	Sedang :100	Sedang : 42	Sedang : 69
	Tsunami	Tinggi : 11; Sedang : 5	Nihil	Tinggi : 40; Sedang : 6	Tinggi : 6; Sedang : 4	Tinggi : 4; Sedang : 6
	Lainnya	Nihil	Sedang : 15	Sedang : 22	Nihil	Sedang : 3

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.103 Jumlah Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Bali (lanjutan)**

Tahun	Uraian	Jembrana	Karangasem	Klungkung	Tabanan
2016	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A
	Longsor	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gempa	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A
	Longsor	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gempa	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	Banjir	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A	N/A	N/A
	Longsor	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gempa	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A
2019	Banjir	Tinggi : 47; Sedang : 0	Tinggi : 0; Sedang : 20	Tinggi : 0; Sedang : 24	Tinggi : 21; Sedang : 29
	Gunung Meletus	Nihil	Sedang : 13; Rendah : 43	Sedang : 0; Rendah : 16	Nihil
	Longsor	Tinggi : 11; Sedang : 20	Tinggi : 4; Sedang : 65	Tinggi : 3; Sedang : 25	Tinggi : 0; Sedang : 45
	Gempa	Sedang : 46	Sedang : 55	Sedang : 51	Sedang : 107
	Tsunami	Tinggi : 9; Sedang : 17	Tinggi : 0; Sedang : 19	Tinggi : 8; Sedang : 11	Tinggi : 0; Sedang : 7
	Lainnya	Sedang : 43	Sedang : 2	Sedang : 9	Sedang : 9
2020	Banjir	Tinggi : 47; Sedang : 0	Tinggi : 0; Sedang : 20	Tinggi : 0; Sedang : 24	Tinggi : 21; Sedang : 29
	Gunung Meletus	Nihil	Sedang : 13; Rendah : 43	Sedang : 0; Rendah : 16	Nihil
	Longsor	Tinggi : 11; Sedang : 20	Tinggi : 4; Sedang : 65	Tinggi : 3; Sedang : 25	Tinggi : 0; Sedang : 45
	Gempa	Sedang : 46	Sedang : 55	Sedang : 51	Sedang : 107
	Tsunami	Tinggi : 9; Sedang : 17	Tinggi : 0; Sedang : 19	Tinggi : 8; Sedang : 11	Tinggi : 0; Sedang : 7
	Lainnya	Sedang : 43	Sedang : 2	Sedang : 9	Sedang : 9

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2021

### 3. Jumlah Korban Bencana

Jumlah korban bencana dari semua jenis bencana yang sering terjadi di Bali sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kateristik wilayah masing-masing. Meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat juga penggunaan lahan di setiap wilayah di Provinsi Bali sehingga turut merupakan faktor penyebab terjadinya bencana dan timbulnya jumlah

korban. Berikut tabel jumlah korban menurut jenis bencana dan Data tertanganinya bantuan pasca bencana.

**Tabel 2.104 Jumlah Korban Bencana**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Meninggal</b>	<b>Luka-Luka</b>
2016	Banjir	1	1
	Gunung Meletus	N/A	N/A
	Longsor	N/A	N/A
	Gempa	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A
	Lainnya	10	5
2017	Banjir	2	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A
	Longsor	26	3
	Gempa	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A
	Lainnya	7	4
2018	Banjir	2	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A
	Longsor	7	2
	Gempa	2	14
	Tsunami	N/A	N/A
	Lainnya	7	N/A
2019	Banjir	N/A	N/A
	Gunung Meletus	N/A	N/A
	Longsor	9	1
	Gempa	N/A	N/A
	Tsunami	N/A	N/A
	Lainnya	5	6
2020	Banjir	1	1
	Gunung Meletus	N/A	N/A
	Longsor	4	2
	Gempa	N/A	1
	Tsunami	N/A	N/A
	Lainnya	5	2

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.105 Data Tertanganinya Bantuan Pasca Bencana (Semua Jenis Bencana)**

<b>Tahun</b>	<b>Meninggal</b>	<b>Luka Berat</b>	<b>Luka Ringan</b>
2016	13	7	N/A
2017	38	7	N/A
2018	19	19	N/A
2019	14	7	N/A
2020	10	7	N/A

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2021



#### 4. Jumlah Pengungsi Akibat Bencana

Jumlah pengungsi akibat bencana belum ada pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan jumlah pengungsi akibat bencana pada tahun 2020.

**Tabel 2.106 Jumlah Pengungsi Akibat Bencana**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Pengungsi</b>
2016	Banjir	N/A
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	N/A
	Gempa	N/A
	Tsunami	N/A
	Lainnya	N/A
2017	Banjir	50
	Gunung Meletus	70.967
	Longsor	26
	Gempa	N/A
	Tsunami	N/A
	Lainnya	N/A
2018	Banjir	N/A
	Gunung Meletus	122
	Longsor	N/A
	Gempa	N/A
	Tsunami	N/A
	Lainnya	N/A
2019	Banjir	N/A
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	N/A
	Gempa	N/A
	Tsunami	N/A
	Lainnya	N/A
2020	Banjir	N/A
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	N/A
	Gempa	N/A
	Tsunami	N/A
	Lainnya	N/A

Sumber : BPBD Provinsi Bali, 2021

## 5. Jumlah Kerugian Akibat Bencana

Jumlah kerugian akibat bencana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sesuai dengan jenis bencana dari tahun 2016 sampai semester I tahun 2020 dan Data Kerusakan dan kerugian pasca bencana.

**Tabel 2.107 Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana**

Tahun	Uraian	Jumlah Kerugian
2016	Banjir	594.000.000
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	389.000.000
	Gempa	N/A
	Tsunami	N/A
	Lainnya	515.000.000
2017	Banjir	775.000.000
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	1.063.000.000
	Gempa	15.000.000
	Tsunami	N/A
	Lainnya	675.000.000
2018	Banjir	281.000.000
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	828.000.000
	Gempa	15.000.000
	Tsunami	N/A
	Lainnya	517.000.000
2019	Banjir	154.000.000
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	334.000.000
	Gempa	2.209.000.000
	Tsunami	N/A
	Lainnya	444.500.000
2020	Banjir	59.000.000
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	118.000.000
	Gempa	1.376.000.000
	Tsunami	N/A
	Lainnya	493.000.000

Sumber Data : BPBD Provinsi Bali, 2021

**Tabel 2.108 Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (lanjutan)**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Kerusakan</b>
2016	Banjir	60
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	39
	Gempa	N/A
	Tsunami	N/A
	Lainnya	52
2017	Banjir	49
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	130
	Gempa	1
	Tsunami	N/A
	Lainnya	61
2018	Banjir	46
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	59
	Gempa	1
	Tsunami	N/A
	Lainnya	33
2019	Banjir	21
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	22
	Gempa	359
	Tsunami	N/A
	Lainnya	46
2020	Banjir	2
	Gunung Meletus	N/A
	Longsor	12
	Gempa	221
	Tsunami	N/A
	Lainnya	37

Sumber Data : BPBD Provinsi Bali, 2021

## **6. Jumlah Kejadian Bencana**

Jumlah Kejadian Bencana yang merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda dan kerugian psikologis. Berikut tabel jumlah kejadian bencana sesuai jenis bencana.

**Tabel 2.109 Jumlah Kejadian Bencana**

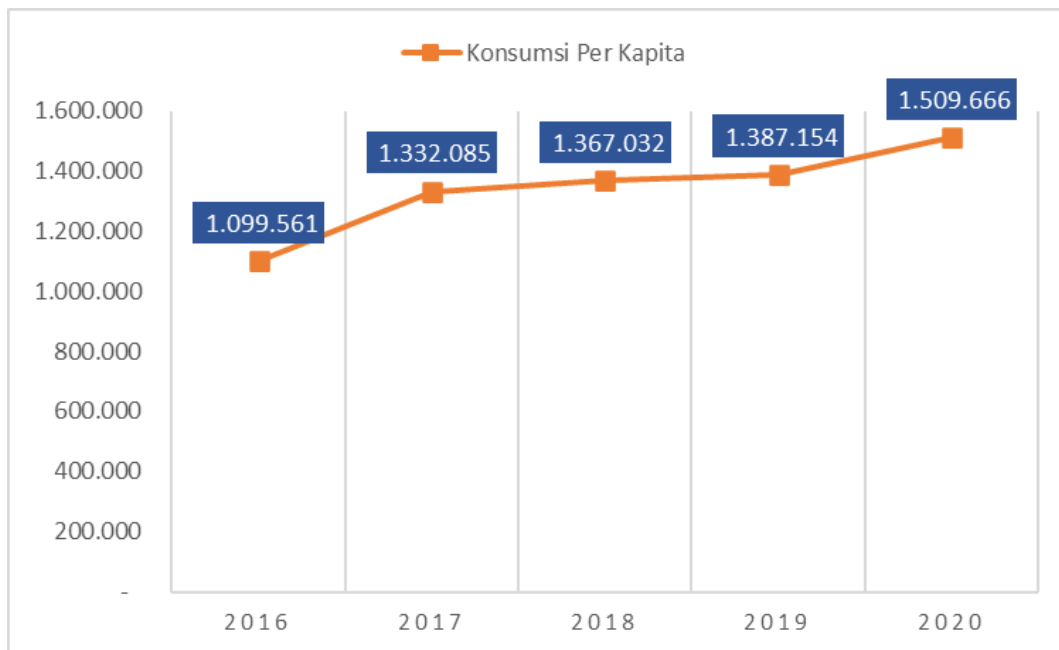
<b>Kejadian Bencana</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Banjir	72	99	153	14	26
Gunung Meletus	0	1	3	25	0
Longsor	176	259	258	75	96
Gempa	0	17	28	19	3
Tsunami	0	0	0	0	0
Kebakaran	345	311	443	264	129
Putting Beliung	39	22	23	20	256
Pohon Tumbang	0	3	1	0	0
Kecelakaan	426	507	586	620	370 (Kejadian lain-lain : pohon tumbang, bangunan roboh, penemuan mayat dan lain-lain)
Pembunuhan	3	780	16	0	
Konflik Sosial	0	2	0	0	
Bangunan Roboh	17	12	40	18	
Penemuan Mayat	10	41	18	12	

Sumber Data : BPBD Provinsi Bali, 2021

## **2.4 Aspek Daya Saing**

### **2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020, yaitu 1.099.561 pada tahun 2016 menjadi 1.509.666 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan yang cukup banyak pada sisi konsumsi rumah tangga di Provinsi Bali selama rentan waktu 5 tahun terakhir. Data ini sekaligus mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat di Provinsi Bali selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik.



**Gambar 2.203 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

#### 2.4.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami fluktuasi namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi rata-rata 94,275. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan di tahun 2020. Ketidakstabilan harga komoditas yang dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat, **supply and demand** menjadi faktor penyebab penurunan nilai harga.

**Tabel 2.110 Nilai Tukar Petani**

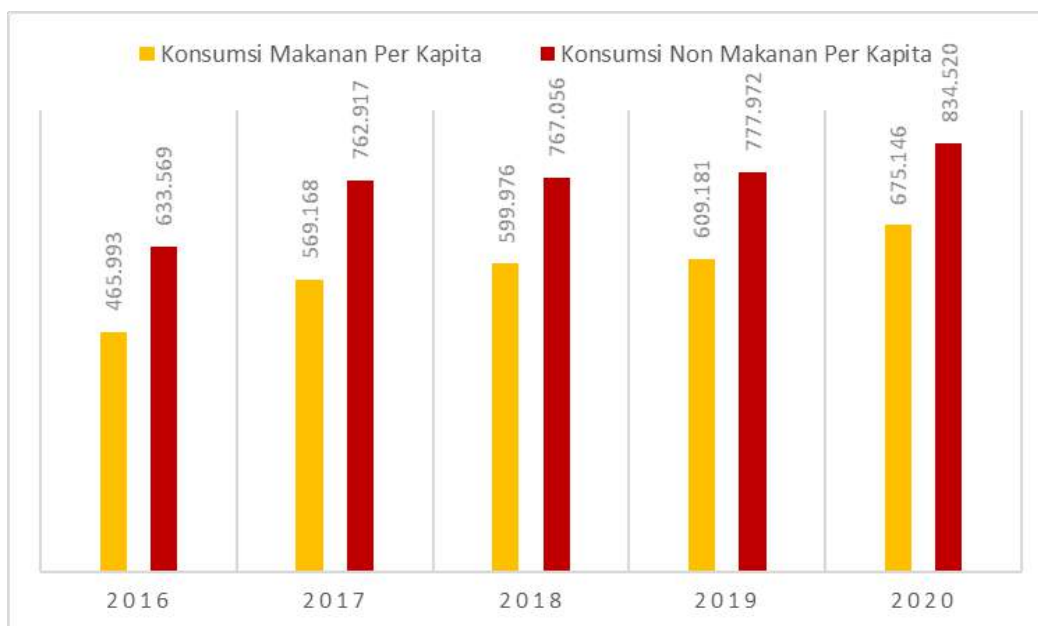
No	Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	104,96	106,25	103,48	103,65	96,27
2	Pebruari	105,42	105,79	103,88	103,98	96,63
3	Maret	104,86	104,72	103,5	104,13	97,1
4	April	104,81	104,98	103,18	103,45	94,81
5	Mei	105,94	104,57	103,23	103,37	93,54
6	Juni	106,58	104,49	103,54	103,58	93,53
7	Juli	106,67	104,14	103,4	104,89	93,92

No	Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
8	Agustus	106,66	103,94	103,54	104,65	93,34
9	September	107,44	104,45	103,28	104,14	93,16
10	Oktober	107,13	104,49	103,7	103,66	92,83
11	Nopember	107,06	104,51	103,15	104,35	92,61
12	Desember	106,74	103,93	103,87	104,93	93,56

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.4.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran perkapita non makanan meningkat dari 633.569 pada tahun 2016 menjadi 834.520 pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi untuk pengeluaran perkapita makanan, dimana terjadi peningkatan dari 465.993 pada tahun 2016 menjadi 675.146 pada tahun 2020.

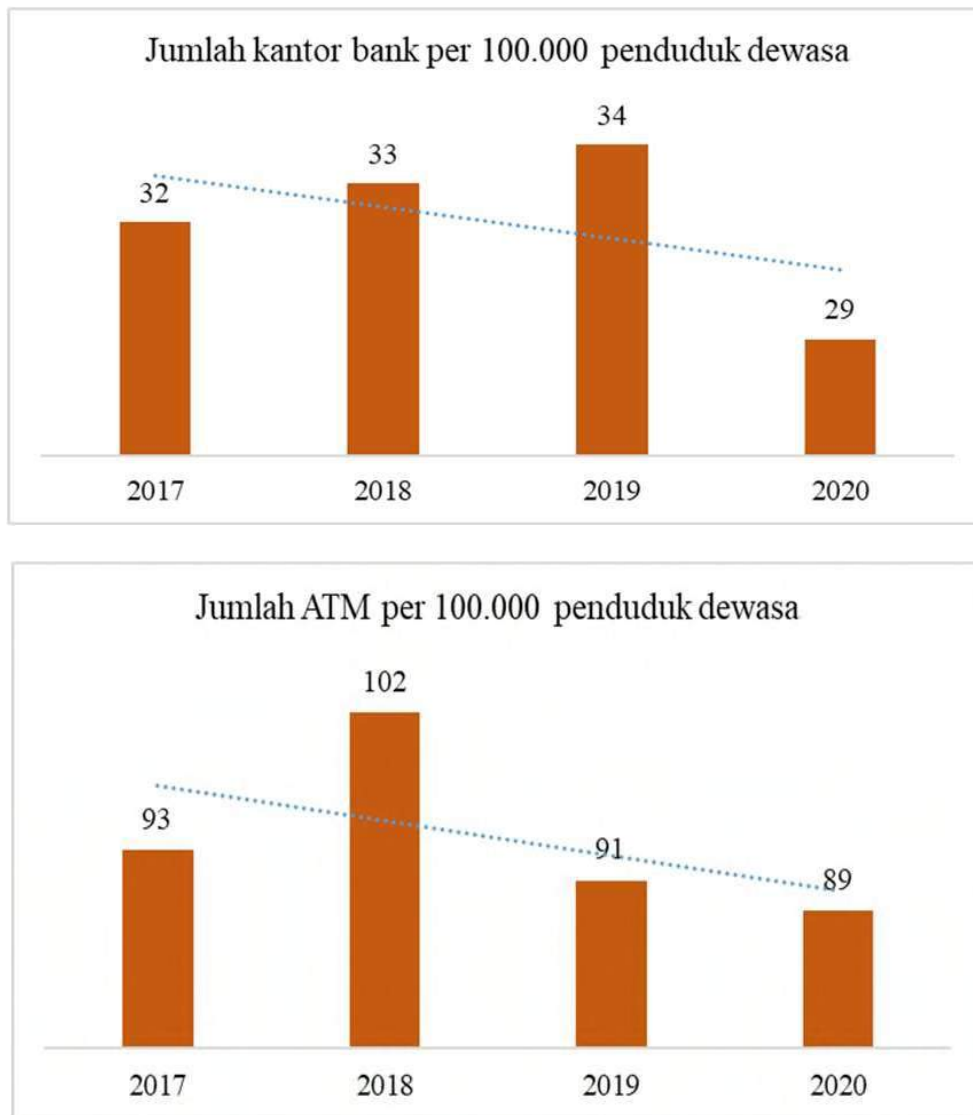


**Gambar 2.204 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

### 2.4.4 Jumlah Kantor Bank dan ATM Per 100.000 Penduduk

Jumlah layanan bank di Provinsi Bali tahun 2020 adalah 968 unit, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.132 unit. Sementara jumlah ATM tahun 2020 sebanyak 3.022 buah, meningkat 1 buah dibandingkan tahun 2019. Rasio jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2020 mencapai 29, menurun dari 34 di tahun 2019. Sedangkan rasio jumlah ATM per 100.000 penduduk tahun 2020 adalah 89, menurun dari 91 di tahun 2019. Dalam periode 2017-2020, rasio layanan kantor bank dan ATM cenderung menurun.

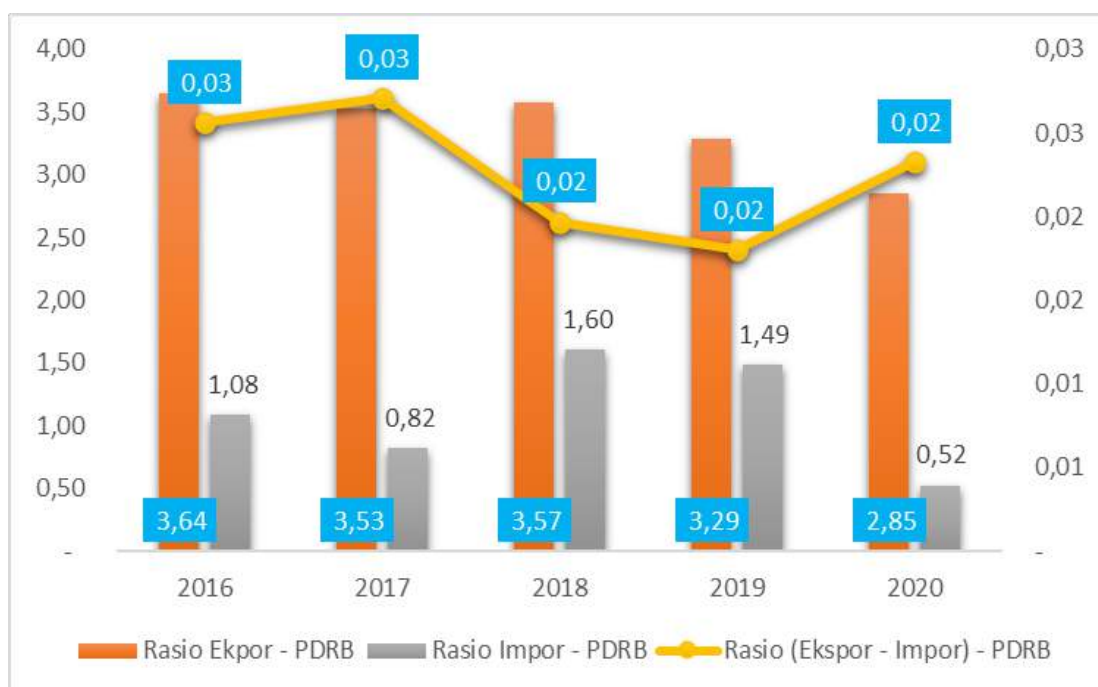


**Gambar 2.205 Jumlah Kantor Bank dan ATM di Provinsi Bali**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

#### **2.4.5 Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)**

Rasio (Ekspor-Impor) terhadap PDRB pada tahun 2016 dan 2020 adalah 0,03 persen dan 0,02 persen. Ini menunjukkan terjadinya penurunan rasio dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Terjadinya penurunan ekspor disebabkan karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya ekspor dibidang jasa yaitu menurunnya kunjungan wisata mancanegara. Hal yang sama juga terjadi untuk rasio Import terhadap PDRB dan rasio Eksporst terhadap PDRB seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.206.

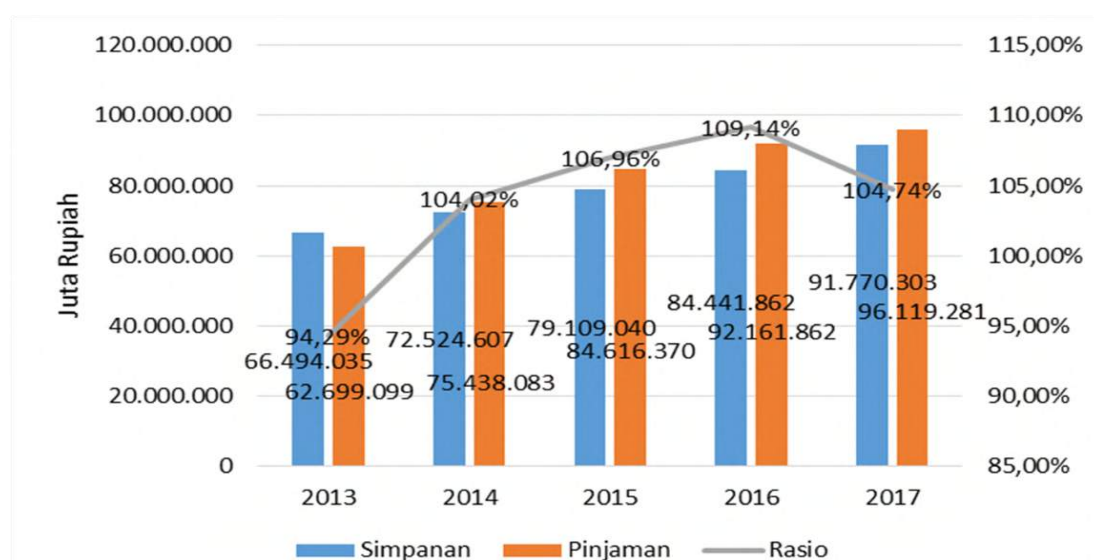


**Gambar 2.206 Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB di Provinsi Bali**

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2021

#### 2.4.6 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum cenderung meningkat dari 94,29 persen pada tahun 2013 menjadi 109,14 persen pada tahun 2016. Namun mengalami penurunan menjadi 104,74 persen pada tahun 2017.



**Gambar 2.207 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum**

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

#### 2.4.7 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Indikator pidana yang diselesaikan selama kurun waktu 2013 sampai 2016 berfluktuasi, yaitu 6.014; 5.525; 5.506; dan 4.607. Sepanjang tahun 2017, jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan tinggi Bali



sebanyak 2.41 kasus atau meningkat 6,43 persen dari tahun lalu yang mencapai 2.271 kasus. Pada bagian lain, jumlah perkara pidana yang diputuskan mencapai 2.351 kasus atau naik 11,32 persen dari tahun lalu sebanyak 2.112 kasus.

**Tabel 2.111 Banyaknya Perkara Pidana yang Diterima dan Diputus oleh Pengadilan Negeri Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali**

Kabupaten/ Kota	Sisa Perkara Bulan Lalu (Akhir Des. 2016)	Perkara yang Masuk 2017	Perkara yang Diputus 2017	Sisa Akhir Bulan Desember 2017
Jembrana	22	144	148	17
Tabanan	17	137	137	16
Gianyar	37	216	212	41
Klungkung	11	92	86	17
Bangli	10	68	73	5
Karangasem	30	129	126	19
Buleleng	48	246	235	49
Denpasar	296	1385	1334	344
<b>Jumlah / Total :</b>	471	2417	2351	508
<b>2016</b>	349	2271	2112	528
<b>2015</b>	270	2119	2040	349
<b>2014</b>	415	2029	2053	343
<b>2013</b>	353	2266	2321	299

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

## 2.5 Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan /atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan Kerja Sama Antar Daerah (selanjutnya disingkat KSAD) semakin dirasakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga-lembaga KSAD yang telah ada, akan dibentuk dan dikembangkan. Keinginan dan inisiasi untuk membentuk lembaga KSAD ini didorong oleh tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah, bahwa mereka tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan hanya

bersandar pada kemampuannya sendiri, tetapi juga tergantung kepada daerah lain, khususnya daerah-daerah tetangga.

KSAD telah dipandang sebagai salah satu bentuk solusi untuk meningkatkan kapasitas potensi daerah melalui pengembangan kinerja dengan memadukan potensi beberapa daerah dalam satu ikatan kerjasama. Pada era otonomi, setiap daerah dituntut untuk mampu berkompetisi dan bersaing dengan daerah lain agar mampu menarik investor dan mengoptimalkan pemanfaatan potensinya. Selain berkompetisi, peningkatan kapasitas daerah dapat dilakukan dengan bentuk lain. KSAD mampu menawarkan alternatif lain disamping dengan berkompetisi tersebut, yaitu dengan bekerja sama membangun dan memanfaatkan potensi masing-masing secara bersama. Kerjasama ini dilakukan untuk membangun potensi kewilayahan yang lebih besar, di dalam kerangka berkompetisi pada skala yang lebih luas. Melalui KSAD, daerah diajak untuk tidak hanya memandang potensi untuk berkompetisi melalui potensinya sendiri, tetapi memandangnya sebagai bagian dari sinergi kewilayahan yang lebih luas dan besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 bahwa untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga.

Selain KSAD juga dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri. Adapun Peraturan yang mendasari pelaksanaan kerjasama luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri, dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menunjukkan adanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan dengan luar negeri, bahwa hubungan luar negeri tidak lagi merupakan monopoli negara (*State Actor*) tetapi dapat dilakukan oleh

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam mengimplementasikan KSAD terutama untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, menentukan kebijakan lebih lanjut, dilakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

### **1. Program dan Kegiatan.**

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah berupa kegiatan:

- Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
- Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Mitra Praja Utama (MPU);
- Peningkatan Kerjasama Kawasan Nusa Tenggara;

### **2. Realisasi Program dan Kegiatan.**

Realisasi Pelaksanaan program peningkatan kerjasama antar daerah sebagai berikut :

- 1). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat.
- 2). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pelayanan Sistem Angkutan Umum di Wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).
- 3). Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 4). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Jembrana.
- 5). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Tabanan.

- 6). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Klungkung.
- 7). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Karangasem.
- 8). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kota Denpasar.
- 9). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Pengendalian Tuberculosis Resisten Obat di Kabupaten Badung.
- 10). Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 11). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kabupaten Badung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali.
- 12). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kabupaten Tabanan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali.
- 13). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 14). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanu.
- 15). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Bangli, Pemerintah Kabupaten Karangasem dan

Pemerintah Kota Denpasar tentang Pembiayaan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sehat (JKN-KBS).

## **2.6 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

#### a. Kebijakan

- 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 3). Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
- 6). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

#### b. Kegiatan

- 1). Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha/Swasta

### **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Realisasi Pelaksanaan program peningkatan kerjasama daerah dengan badan usaha/swasta sebagai berikut :

- 1). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali.
- 2). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Warmadewa tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali.
- 3). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Udayana tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali.
- 4). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Sinar Roda Utama tentang Pelayanan Hemodialisis di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
- 5). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Tentang Pembekalan dan Layanan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa persiapan Pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 6). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.
- 7). Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kanwil DJP Provinsi Bali tentang Addendum/Perubahan atas PKS tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- 8). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram tentang Praktek Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- 9). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali tentang Kegiatan Praktik Klinik Keperawatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali di Provinsi Bali.
- 10). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang tentang Praktik Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

- 11). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan tentang Praktik Klinik Keperawatan Jiwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Advaita Medika Tabanan di Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Bali.
- 12). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Nikki Puri Medika tentang Layanan Pemeriksaan Laboratorium.
- 13). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Yayasan Senyum Bali tentang Pelaksanaan Operasi Deformitas pada Wajah.
- 14). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Deasar tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar di UPT. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
- 15). Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dengan CV Taman Aguna, CV Amerta Jaya, CV Dharma Pertiwi, CV Anantha Winangun, CV Dharma Kerti Sedana, CV Setiawan, Koperasi Tani Nadhi, Koperasi Panca Kawi Artha, YPST. Tentang Penyediaan Pupuk Organik Bersubsidi oleh Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018.
- 16). Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan PT. Global Sentra Gravika tentang Penyediaan Kartu Identitas Berobat dan Stiker Barcode Pasien.
- 17). Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar tentang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- 18). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penyimpanan Uang Daerah.

## **2.7 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

### **1. Kebijakan**

Sesuai dengan pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur dibantu oleh Instansi Vertikal, yang dilakukan

dengan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Hubungan kerja ini selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.

## **2. Realisasi dan pelaksanaan Kegiatan**

Adapun realisasi kerjasama antar daerah dan dengan Instansi Vertikal adalah sebagai berikut.

- a. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda), kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka lebih memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala informasi dan masukan dari anggota Fokorpimda yang memberikan manfaat terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- b. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah pemerintah daerah maupun dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah.
- c. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, dimaksudkan dalam rangka penyediaan data dan kontribusi sektor ekonomi serta data Provinsi Bali di berbagai sektor. Melalui kegiatan ini dihasilkan antara lain penyusunan Buku PDRB, Buku Bali dalam Angka Tahun 2017 yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi, income perkapita serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.



Selain itu juga senantiasa dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal lainnya termasuk dengan BUMN, BUMD yang ada di daerah. Melalui kegiatan koordinasi ini pemerintah daerah dapat melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi vertikal dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## 2.8 Standar Pelayanan Minimal

**Tabel 2.112 Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan**

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>									
1.1	Pendidikan Menengah	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
1.2	Pendidikan Khusus	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>									
2.1	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi	a. Standar Jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. standar jumlah dan kualitas personel / sumber daya manusia kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas personel / sumber daya manusia kesehatan;	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tatacaaa pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
3.1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten / kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
3.2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic dengan sistem pengelolaan air limbah domestic regional lintas kabupaten / kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman</b>									
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	a. standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pemerintah provinsi	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>5</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat</b>									
5.1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>Sosial</b>									
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100

No	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pegemis di dalam panti	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100	5	100	100	100	100	100	100
		b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100	5	100	100	100	100	100	100
		c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100	5	100	100	100	100	100	100

**Tabel 2.113**  
**Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2013-2018**

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
1	Pertumbuhan PDRB	6.65	6.73	6.03	6.33	5.57	6.35	6,6-7,2	▼
2	Laju Inflasi	4.71	8.43	2.75	2.94	3.38	3.4	5,35-5,76	●
3	PDRB per kapita	20.8	38.10	42.48	46.21	50.29	54.62	43,04-45,11	●
4	Indeks Gini	0.402	0.415	0.399	0.374	0.379	0.364	0,330-0,350	▼
5	Kelompok 40% terbawah	16.32	15.49	17.84	18.07	17.85	17.45	17.45	●
6	Kelompok 40% sedang	36.79	36.54	37.35	37.96	38.00	37.84	37.84	●
7	Kelompok 20% tertinggi	46.9	47.98	44.81	43.96	45.36	44.71	44.71	●
8	Persentase penduduk miskin	3.95	4.75	5.25	4.15	4.14	3.91	2,8-2,6	▼
9	Rasio kesenjangan kemiskinan	0.16	0.16	0.26	0.14	0.09	0.05	0.05	●
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.49	72.48	73.27	73.27	74.30	74.45	74,03-74,47	●
11	Angka Melek Huruf	91.03	92.56	92.77	92.82	92.90	89.17	90.42	▼
12	Angka rata-rata lama sekolah	8.10	8.11	8.26	8.36	8.55	9.72	8.11	●
13	Angka usia harapan hidup	71.11	71.20	71.35	71.4	71.46	71.4	71,51-71,58	▼
14	Persentase balita gizi buruk	3%	3%	1,6%	1%	2%	2%	1.20%	●
15	Prevalensi balita gizi kurang	13.20%	13.20%	9%	9.10%	8.60%	13.10%	13.1	●
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	67.23%	92.20%	93.72%	98.60%	100%	100%	100%	●
17	Angka partisipasi angkatan kerja	2,283,896	2,316,758	2,372,015	2,463,039	2,434,450	2,478,567	2,478,567	●
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74.93	74.91	75.51	77.24	75.24	75.51	95.00	●
19	Tingkat pengangguran terbuka	1.83	1.90	1.99	1.89	1.48	1.40	2,2 - 2,0	▼
20	Rasio penduduk yang bekerja	98.17	98.10	98.01	98.11	98.52	98.60	99.25	▼
21	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	19.41	19.69	20.00	20.30	20.60	15.92	15.92	●
	1. tenaga kerja berusaha sendiri	309,058	317,218	315,131	382,948	353,850	366,169	366,169	●
	2. pekerja bebas	207,112	203,142	229,079	196,060	167,900	161,639	161,639	●
22	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	516,170	520,360	544,210	579,008	521,750	527,808	527,808	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
23	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	17.39	16.35	13.9	13.9	14.2	-	5	●
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	72.48	75	75	●
25	Jumlah PAD terhadap pendapatan (Rp. Triliyun)	2,529	2,920	3,041	3,041	3,041	3,701	3,701	●
26	Opini BPK	WTP.DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum	WTP	
27	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94.40	94.40	94,57	95,30	95.60	95.90	95.90	●
28	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	16.57	15.37	15.15	14.57	14.57	14.38	-	
	1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	15.22	14.65	14.65	14.67	14.35			
	2. Kontribusi sektor pertanian pangan terhadap PDRB	16.57	15.37	15.15	14.57	14.57			
29	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	2.52	2.25	2.20	2.10	1.93	2.52	-	
30	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1.48	1.38	1.46	1.47	1.43	1.48	-	
31	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	39.36	37.96	39.65	39	39	16.84	-	
32	Cakupan Bina Kelompok Petani	8,961	9,011	9,011	9,011	9,011			
33	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	13.01	0.01	0.01	13.01	0.01	-	-	
34	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	48.51	51.92	49.72	57.95	58.9	45	-	
35	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	8.31	8.27	8.31	8.3	8.5	-	-	
36	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6.44	6.38	6.52	6.36	6.4	-	-	
37	Pertumbuhan Industri	-	1.5	2	3.28	3.3	-	-	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
1	Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita	994.069,88	1.097.749,27	1.045.144,90	1.099.561,31	1.099.561,31	-	-	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2	Nilai Tukar Petani (NTP)								
	1. Januari	107.57	103.61	104.18	104.96	106.25	103.48	103.48	●
	2. Februari	107.42	103.55	103.9	105.42	105.79	103.88	103.88	●
	3. Maret	106.94	104.33	103.41	104.86	104.72	103.5	103.5	●
	4. April	106.84	103.82	103.05	104.81	104.98	103.18	103.18	●
	5. Mei	107.74	104.44	103.05	105.94	104.57	103.23	103.23	●
	6. Juni	108.36	104.58	103.93	106.58	104.49	103.54	103.54	●
	7. Juli	106.64	105.14	104.6	106.67	104.14	103.4	103.4	●
	8. Agustus	106.66	105.21	104.25	106.66	103.94	103.54	103.54	●
	9. September	106.82	106.02	104.54	107.44	104.45	103.28	103.28	●
	10. Oktober	107	107.06	104.91	107.13	104.49	103.7	103.7	●
	11. November	107.43	106.06	105.41	107.06	104.51	103.15	103.15	●
12. Desember	103.37	104.19	105.13	106.74	103.93	103.87	103.87	●	
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	571,880	639,026	623,568	633,569	-	-	-	
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	65.50%	62.92%	63.72%	49.45%	50.30%	52.42%	52.42%	●
5	Rasio Pinjaman terhadap simpanan di Bank umum	76.68%	81.14%	83.25%	86.16%	84.21%	81.90%	81.90%	●
6	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	119.04%	120.47%	118.12%	105.73%	99.80%	92.53%	92.53%	●
7	Angka kriminalitas	21.00	7,356	7,164	4,250	N/A	4,607	10	●
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>									
<b>1 Pendidikan</b>									
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58.64	67.92	71.21	74.41	75.84	79.1	94.43	▼
1.2	Angka Partisipasi Kasar								
	1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI	108.52	107,97	104,35	109,84	107,99	105.9	112	▼
	2. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	103.51	106,74	106,64	113.75	113,37	106.95	110	▼
	3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	92.40	101,40	100,30	100,89	104,42	100.4	95	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan								
	1. Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	24.36	21.66	22.73	27.06	21.48	24.55	27.55	●
	2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS	10.93	17.54	13.27	16.88	17.54	11.73	11.28	●
	3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA	21.76	30.60	30.73	31.05	31.70	23.41	23.08	●
1.4	Angka Partisipasi Murni								
	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.50	97.21	92.70	97.24	95.70	96.06	97.25	▼
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82.89	86,85	86,91	84.87	84.36	84.54	84.70	▼
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	65.98	76,13	75,64	69,45	72,61	73.15	70.00	●
1.5	Angka Partisipasi Sekolah								
	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	98,50	99.36	99.41	99.35	99.44	99.56	99.00	●
	2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	82,89	97.23	97.41	97.55	97.72	97.92	83.59	●
	3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	65.98	76.13	75.64	66.28		82.35	66.58	●
1.6	Angka Putus Sekolah								
	1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.12	0,09	0,06	0,06	0.06	0.05	0.06	●
	2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.31	0,15	0,14	0,11	0.11	0.1	0.26	●
	3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.23	0,46	0,38	0,26	0.26	0.25	0.18	●
1.7	Angka Kelulusan								
	1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	●
	2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,61	99,98	99.99	100	100	100	99.75	●
	3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,97	99.82	99.99	100	99.99	99.99	99.95	●



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.8	Angka Melanjutkan (AM)								
	1. Angka Kelulusan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	80,00	103,20	96,50	96,49	97,11	96,24	80,00	●
	2. Angka Kelulusan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	70,00	95,27	96,20	95,67	96,88	95,85	70,00	●
1.9	Fasilitas Pendidikan								
	1. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	56,03	74,36	75,00	77,57	76,55	93,28	90,23	●
	2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	84,23	68,24	85,80	68,24	67,24	92,07	92,07	●
	3. Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	50,58	90,29	94,16	92,94	91,49	96	81,45	●
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	49,45	50,84	48,5	51,99	51,68	63,77	62,80	●
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	20,07	21,15	20,69	20,11	20,04	18,12	60	●
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	58,89	59,07	59,25	59,43	59,62	60,61	42,23	●
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah								
	1. SMA/MA (per 1000 murid)	78,18	80,84	84,19	83,21			78,88	
	2. SMK (per 1000 murid)	68,35	71,59	86,38	82,85			70,05	
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata								
	1. SD/MI	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	●
	2. SMP/MTS	0,14	0,11	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	●
	3. SMA/SMK/MA	0,20	0,16	0,16	0,15	0,14	0,1	0,1	●
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	90,42	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	91.03	92.26	92.77	92.82	92.9	92.98	92.98	●
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV								
	1. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	26.56	39.76	46.78	57.02	73.81	87.96	87.96	●
	2. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	73.31	86.6	87.33	90.74	92.23	93.16	93.16	●
	3. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	89.52	92.87	93.52	94.02	95.07	95.91	95.91	●
	4. Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	70	95.05	95.32	96.8	97.06	96.39	95	●
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>								
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5.50	5.99	5.70	6.01	4.80	4.55	10.00	●
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	5.94	6.67	6.40	6.83	5.60	5.17	5.17	●
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3.47	4,50	4.41	4,22	3.19	3.20	3.20	●
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	72.10	70.50	83.41	78.72	68.64	54.03	54.03	●
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	14.04	1.46	1.47	1.47	1.45	1.45	14.038	●
2.6	Rasio Puskesmas, Klinik, pustu per satuan penduduk (dirinci)								
	1. Rasio Puskesmas	0.03	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.031	●
	2. Rasio Klinik	0.032	0.011	0.021	0.021	0.021	0.021	0.033	●
	3. Rasio Puskesmas Pembantu	0.13	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.131	●
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.013	0.13	0.12	0.012	0.014	0.016	0.014	●
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	2,568	2,192	3,621	4.102	2,991	0.35	0.35	●
2.9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk								
	1. Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	832	740	631	605	544	1.85	1.85	●
	2. Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	1,441	1,473	1,283	1,245	947	1.07	1.07	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75.60	76.40	74.96	77.60	74.89	86.53	80	●
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96.52	97.54	97.49	96.4	93.6	95.97	100	●
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95.9	98.5	98.7	98.7	99	99.16	100	●
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	●
2.14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	99.09	101.85	100.55	99.98	99.98	97.4	97.4	●
2.15	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	3.9	4.1	3.2	3.7	2.4	3.4	3.4	●
2.16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	13.63	12.44	5.32	96.68	96.68	64.25	64.25	●
2.17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	78	60	56	59.4	27	30	70	▼
2.18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	72,58	73,91	69,30	74,59	74,59	87	87	●
2.19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3,17	2.14	2.14	3.66	3.66	8.4	8.4	●
2.20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	11,82	11,38	18,15	39,51	39,51	98.1	98.1	●
2.21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	74.97	76.12	70.37	77.59	77.59	88	88	●
2.22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	●
2.23	Penderita diare yang ditangani	109,4	79,48	89,18	62,67	55,2	70.2	70.2	●
2.24	Angka kematian Malaria	0,002	0,01	0,003	0,0024	0,20	0	0	
2.25	Tingkat kematian akibat malaria	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0	0	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.26	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	100	100	100	●
2.27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0.50%	0.47%	0.46%	0.45%	0.49%	0.50%	-	
2.28	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	55%	56%	56.50%	57%	57.50%	55%	-	
2.29	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	20.90%	21%	21.50%	22%	22.20%	21	21	●
2.30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	●
2.31	Cakupan kunjungan bayi	97,36	100,03	99,01	96,17	96,4	102.92	102.92	●
2.32	Cakupan Puskesmas	93,1	94,1	93	91,4	89,7	94.49	94.49	●
2.33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95,33	96,51	95,92	94,71	91,9	96.81	96.81	●
2.34	Cakupan Pelayanan nifas	70,82	69,43	69,67	66,79	62,6	100	100	●
2.35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	81,94	94,99	94,18	96,28	117	100	100	●
2.36	Cakupan pelayanan anak balita	81,94	94,99	94,18	96,28	117	100	100	●
2.37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	●
2.38	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	-	100%	100%	100%	100%	100	100	●
2.39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	●
2.40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	●
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								
<b>3.1</b>	<b>Pekerjaan Umum:</b>								
3.1.1	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	79.53	82.64	82.65	82.72	83.58	80.81	85.54	▼

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.00209	0.00207	0.00204	0.00202	0.00200	0.00198	0.00198	●
3.1.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	62.41	63.66	64.93	66.23	91.07	92.07	67.55	●
3.1.6	Persentase Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik	53.2	56.85	61.39	65.08	68.62	71.51	75	▼
3.1.7	Persentase capaian air minum Persentase penduduk yang berakses air minum aman di Provinsi Bali	-	-	68.48	76.36	84.24	86	90	▼
<b>3.2</b>	<b>Penataan Ruang:</b>								
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	20	18	20	21	21	21	22	▼
3.2.3	Ketaatan terhadap RTRW	22%	33%	67%	67%	68%	68%	67%	●
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>								
4.1	Jumlah rumah tidak layak huni	-	-	-	-	-	52.425 Unit	52.425 Unit	●
4.2	Luas kawasan kumuh	-	-	-	-	-	586.1969	586.1969	●
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>								
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	56.72	58.1	56.69	55.69	55.69	29.83	60.21	▼
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100	100	●
5.3	Persentase Penegakan PERDA	100	100	97	100	100	100	100	●
<b>6</b>	<b>Sosial</b>								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3.81	6.42	4.22	4.7	1.84	0.58	15	●
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	5.42	3.3	3.02	3.21	2.7	0.67	12.9	●
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2.97%	2.73%	2.42%	2.40%	1.87	0.41	9.83	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	5	5	5	3.8	3.8	3.8	21.4	▼
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	25	25	25	25	25	25	25	●
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	●
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	60.03	66.08	▼
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>									
<b>1 Tenaga Kerja</b>									
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2.11	30 kasus 100%	56 kasus 100%	50 kasus 100%	46	43	1.55	▼
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	94	155	26	21	22	18	18	●
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	64.79	59.15	67.49	68.31	52.43	47.57	95.00	▼
1.4	Keselamatan dan perlindungan	123	146	183	226	350	400	400	●
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	89,506	92,630	96,050	110,075	116,922	594,557	594,557	●
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	440	575	690	780	920	2,794	2,794	●
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	145	183	226	226	216	174	174	●
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	280	368	32	540	100	126	1,446	▼

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	200	75	90	30	30	240	665	▼
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	70	75	261	350	42	20	20	●
1.11	Rasio lulusan S1/S2/S3	7.13	0	7.73	7.92	7.31	7.13	-	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	43.73%	43.75%	44.15%	45.22%	41.70%	46.03%	39.80%	●
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	7.27%	7,90%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	●
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	45.50%	44.39%	45.05%	45.70%	46.10%	46.78%	46.78%	●
2.4	Rasio KDRT	0.07%	0.053%	0.057%	0.048%	0.049%	0.056%	0.056%	●
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	66.52%	67.26%	67.24%	70.56%	67.70%	72.55%	56.00%	●
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	●
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	●
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	●
2.11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	88%	86%	80%	87.50%	88.50%	88.50%	88.50%	●
2.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0.98	0.98	0.98	0.97	1.01	1.01	1.01	●
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1.05	1.03	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	●
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	0.88	0.89	0.83	0.91	0.94	0.94	0.94	●
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	0.79	0.84	0.89	0.92	0.93	0.93	0.93	●
2.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	0.90	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.93	●
2.17	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	23.64	25.6	25,00	25.53	25.53	-	-	●
<b>3</b>	<b>Pangan</b>								
3.1	Ketersediaan Pangan Utama								
3.1.1	Beras	539,640	549,638	542,221	489,217	470,080	449,187	449,187	●
3.1.2	Jagung	61,873	66,355	76,883	55,705	4,531	43,892	72,014	▼
3.1.3	Kedelai	8,210	5,550	7,259	6,990	5,191	2,500	9,107	▼
3.1.4	Kacang Tanah	11,616	13,010	66,608	6,437	5,897	4,408	12,090	▼
3.1.5	Ubi Kayu	147,201	163,741	86,070	87,599	101,169	53,267	160,178	▼
3.1.6	Kacang Hijau	1,529	0.750	0.941	0.595	54	170	919	▼
3.1.7	Ubi Jalar	65,132	70,318	36,665	30,470	91,549	25,042	91,549	▼
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>								
4.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	-	-	-	-	Ya	Ya	Ya	Tercapai
4.2	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	6 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	15 Dokumen	●



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	●
4.4	Peningkatan Indeks Kualitas Air	-	61.59	61.82	64.5	62.67	63.17	63.17	●
4.5	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	-	82.02	83.98	87.58	88.39	91.89	91.89	●
4.6	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	36	36	36.02	36.38	38.57	38.57	●
4.7	Laporan Inventarisasi GRK	2	2	2	2	2	1	6	●
4.8	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan pengolahan limbah B3	50 perusahaan	29 perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	27 perusahaan	15 perusahaan	181 perusahaan	●
4.9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	90 Kawasan & 164 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	17 perusahaan	162 Kawasan & 382 perusahaan	●
4.10	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	●
4.11	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	80 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	30 Orang	30 Orang	260 Orang	●
4.12	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	80 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	30 Orang	30 Orang	260 Orang	●
4.13	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	30 Adiwiyata, 3 Kota Adipura	30 Adiwiyata, 3 Kota Adipura	30 Adiwiyata, 6 Kota Adipura	30 Adiwiyata, 4 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata, 4 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru	180 Adiwiyata, 22 Kota Adipura, 3 Kalpataru	●
4.14	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	157 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	20 Kasus	15 Kasus	242 Kasus	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4.15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (volume timbulan sampah m3)	9.809,64 m3/hari	10.005,84 m3/hari	10.266,4 m3/hari	11.806,36 m3/hari	12.833,12 m3/hari	13.854,64 m3/hari	13.854,64 m3/hari	●
4.16	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi	67.10	68.00	70.00	75.00	75.00	73.00	75.00	●
4.17	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	10.00	12.00	13.00	15.00	17.00	18.00	18.00	●
4.18	Persentase jumlah sampah yang tertangani	50	52	55	58	61	65.00	75.00	▼
<b>5</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
5.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	0.37	0.49	0.73	0.80	0.91	0.93	0.93	●
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	7.50	10.32	18.49	43.80	81.30	84.17	84.17	●
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	2.75	3.14	14.59	17.90	31.79	40.38	40.38	●
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	●
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	●
<b>6</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
6.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7,96%	15,92%	23,88%	31,84%	39,80%	43,78%	43,78%	●
6.2	Persentase LPM Berprestasi	2.37%	4,74%	7,12%	9,49%	11,84%	14.24%	14.24%	●
6.3	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
6.4	Persentase Posyandu aktif	69,25%	66,55%	68,74%	68,71%	68,71%	69.80%	69.80%	●
6.5	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	85.39%	91,25%	176,19%	176,88%	833,14%	526.28%	526.28%	●
6.6	Persentase PKK Desa/Kelurahan yang telah dibina	12.02%	12.01%	12.01%	12.01%	12.29%	12.29%	12.29%	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>7</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	●
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,3	2,2	2,2	2,3	2,21	2,1	2,1	●
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	-	-	30,95	25,49	-	-	●
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	●
7.5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,14	2,3	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	●
7.6	Ratio Akseptor KB	85,11	83,59	81,12	116,36	97,40	85,11	85	●
7.7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	57,9	79,95	67,76	67,07	81,44	57,9	-	●
7.8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	48	40	32	19,48	23,87	36	36	●
7.9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	-	-	36,42	-	-	35,12	-	
7.10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,99%	4,79%	5,60%	5,69%	5,61%	5,13%	5,13%	●
7.11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,30	50,86	40,62	48,10	47,49	43,46	43,46	●
7.12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	85,11	83,59	79,95	87,83	92,39	90,2	91,12	●
7.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	71,70%	91,16%	91,42%	88,90%	87,7	99,6	▼
7.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	72,07%	53,40%	65,67%	81,70%	85,2	95,7	▼

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
7.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	70.48%	34.82%	62.64%	84.60%	70.48	99.5	▼
7.16	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	-	-	-	88,6	82.5	94.7	▼
7.17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	614	592	557	567	539	100	100	●
7.18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	88.82	89.44	88.51	82.83	88.6	88.6	88.6	●
7.19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	●
7.20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	157,094	288,920	265,218	128,215	219,681	157,094	-	
7.21	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	22.7	-	-	21.64	22.7	-	
<b>8</b>	<b>Perhubungan</b>								
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum								
8.1.1	Angkutan Darat	n/a	16.110	16.110	16.110	17.086	351,739	16,110	●
8.1.2	Angkutan Laut	10,643,550	11,294,889	11,948,037	7,868,197	11,691,046	6,358,176	13,396,762.00	▼
8.1.3	Angkutan Udara	15655557.74	17064557.93	18600368.14	19966415	21051094	23,644,307	26,255,938	▼
8.2	Jumlah ijin trayek	n/a	231	00:00.0	231	217	141	231	●
8.3	Jumlah uji kir angkutan umum	86,745	107,299	104,483	110,407	113,858	146,324	146,324	●
8.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis								

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
8.4.1	Jumlah Pelabuhan	6	6	6	7	8	8	8	●
8.4.2	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1	1	3	▼
8.4.3	Jumlah Terminal Bis	20	20	20	20	20	20	2	●
8.5	Persentase layanan angkutan darat	0.02	0.0245	0.02	0.03	0.03	3	3	●
8.6	Pemasangan Rambu-rambu (%)	0.262	0.034	0.094	0.017	0.048	25.41	25.41	●
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:396,99	1:416,63	1:412,95	1:438,79	1:460,19	1:470,20	1:200	▼
8.8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum								
8.8.1	Angkutan Darat								
	- Orang	81,456	107,114	110,215	113,065	115,865	115,865	115,865	●
	- Barang	-	146,738	151,429	121,818	121,818	121,818	121,818	●
8.8.2	Angkutan Laut								
	- Orang	5,769,326	6,145,932	6,100,596	5,789,098	2,152,043	2,152,043	2,152,043	●
	- Barang	475,727,259	22,217,802	4,403,570	4,368,215	2,758,093	2,758,093	2,758,093	●
8.8.3	Angkutan Udara								
	- Orang	4,243,722	4,516,553	8,501,343	10,010,772	10,085,537	23,644,307	23,644,307	●
	- Barang	6,271,733	5,522,961	18,276,474	32,912,181	41,850,386	73,379,502	73,379,502	●
8.9	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun								
8.9.1	Dermaga								
	- Orang	11,773,328	12,572,272	12,303,651	8,844,707	6,358,176	6,358,176	6,358,176	●
	- Barang	483,238,509	168,975,121	12,366,418	11,622,564	8,291,379	8,291,379	8,291,379	●
8.9.2	Bandara								
	- Orang	15,634,200	17,290,082	17,112,073	19,986,415	14,481,013	23,644,307	23,644,307	●
	- Barang	185,504,351	175,391,334	176,185,683	202,366,091	148,610,379	73,379,502	73,379,502	●
8.9.3	Terminal								
	- Orang / Barang	966,649	849,601	851,860	852,314	851,464	351,739	351,739	●
<b>9</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>								
9.1	Cakupan layanan telekomunikasi	48.5	49.05	49.2	49.35	49.5	50	50	●
9.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	91.43	91.22	92.64	92.36	93.43	93.62	93.62	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
9.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	10.23	9.88	8.34	7.47	6.24	5.34	5.34	●
9.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	-	-	28.78	33.87	39.49	46.42	46.42	●
9.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	23.16	25.89	27.79	29.15	27.11	33.25	33.25	●
<b>10</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>								
10.1	Persentase Koperasi Aktif	90.29	88.92	88.18	89.53	86.79	87.42	94	▼
10.2	Jumlah UMKM	261,411	265,558	265,558	265,558	300,650	312,967	312,967	●
<b>11</b>	<b>Penanaman Modal</b>								
11.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	110	171	86	136	100	166	603	●
11.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (trilyun rupiah)	2.24	6.75	3.81	6.97	5.55	4.46	25.32	▼
<b>12</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>								
12.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	75.27%	75.27%	75.27%	75.27%	75.27%	76.00%	76.00%	●
12.2	Persentase Wirausaha Muda	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.82%	0.82%	●
12.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	25.61%	39.53%	41.86%	44.18%	48.83%	51.20%	51.20%	●
12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	22.22%	26.66%	32.60%	38.76%	38.46%	38.88%	38.88%	●
12.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	6.58%	6.42%	2.58%	2.66%	3.11%	3.31%	3.31%	●
12.6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	148	152	146	148	168	180	924	●
12.7	Jumlah prestasi Olahraga (Cabor)	15	18	16	17	18	20	20	●
<b>13</b>	<b>Statistik</b>								
13.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	9	9	9	9	9	9	9	●
13.2	Buku "PDRB"	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	●
<b>14</b>	<b>Persandian</b>								
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	80.95%	83.33%	85.71%	90.47%	86.95%	91.30%	91.30%	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>14</b>	<b>Kebudayaan</b>								
14.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	2	2	3	3	3	3	●
14.2	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	17,595	17,595	19,790	20,168	20,377	20,377	●
14.2.1	Benda Cagar Budaya	-	17,053	17,053	18,796	19,150	19,336	19,336	●
14.2.2	Bangunan Cagar Budaya	-	-	-	95	96	97	97	●
14.2.3	Situs Cagar Budaya	-	537	537	582	599	611	611	●
14.2.4	Kawasan Cagar Budaya	-	5	5	5	5	5	5	●
14.2.5	Struktur Cagar Budaya	-	-	-	312	318	328	328	●
14.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.1	Benda Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.2	Bangunan Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.3	Situs Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.4	Kawasan Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	-	
14.4	Jumlah Karya Budaya Yang Diinventarisasi	78	80	121	162	206	233	233	●
<b>15</b>	<b>Perpustakaan</b>								
15.1	Perentase Pengunjung perpustakaan per tahun (%)	8.59	8.59	7.14	7.62	7.76	7.72	7.72	●
15.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	214,853	216,649	219,752	223,850	224,950	225,450	3,500	●
15.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	49.660	56.248	54.965	62.868	62,110	61.823	61.723	●
15.4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	140	148	157	167	177	124	124	●
<b>16</b>	<b>Kearsipan</b>								
16.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100	18	15	20	20	42	20	●
16.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	100	35	30	45	45	70	45	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>									
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>								
1.1	Kunjungan Wisatawan								
1.1.1	Wisatawan Nusantara	7,548,156	6,394,307	7,147,100	8,643,680	8,735,633	9,757,991	8,100,000	●
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	3,728,598	3,766,638	4,001,835	4,927,937	5,697,739	6,070,473	4,400,000	●
1.2	Rata-rata Lama Tinggal								
1.2.1	Wisatawan Nusantara	3.70	3.80	4.00	3.80	4.30	4	4	●
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	9.60	9.11	9.87	10.08	10.45	10.45	10.45	●
1.3	PAD Sektor Pariwisata	48.51	51.92	49.72	57.95	57.95	68.97	69.00	▼
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>								
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	16.84	16.44	15.11	14.73	14.02	13.81	13.81	●
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	2.52	2.25	2.20	2.10	1.93	2.52	-	
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	1.48	1.38	1.46	1.47	1.43	1.48	-	
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	16.84	16.44	15.11	14.73	14.02	13.81	13.81	●
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar								
2.5.1	Padi	58.09	60.12	62.14	60.60	58.80	60.70	61.50	▼
2.5.2	Jagung	61,873	66,355	76,883	55,705	55,042	43,892	43,892	●
2.5.3	Kedelai	7,433	8,188	7,259	6,784	5,405	2,687	2,687	●
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	8,961	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	900	●
<b>3</b>	<b>Kehutanan</b>								
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	44,669.78	1,194	1,124	1,070	1,646.75	1,592.50	46,768.81	●
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	12,400	524	99.82	0	185	105.5	12,650	●
<b>4</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>								
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99.41	99.49	99.67	99.73	99.85	100	100	●



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	70	64.8	60	54	40	30	40	●
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>								
5.1	Nilai Ekspor (USD)	486,063,655.35	503,826,213.14	481,402,783.80	574,276,900.25	679,594,478.52	839,440,122.90	839,440,122.90	●
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	-	-	4.85	9.7	12.4	15.09	15.09	●
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>								
6.1	Cakupan Bina Perajin	3.99	3.93	4.62	3.53	3.00	3.35	3.35	●
<b>7</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>								
7.1	Produksi Perikanan (Ton)	415,513,00	220,706.50	228,873.48	229,403.59	130,075.46	136,496.55	217,290,46	●
7.2	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	30.61	31.17	32.2	32.38	33.52	34.56	32,38	●
7.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	50	60	70	80	90	100	100	●
7.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	84.7	106.21	104.6	102.7	105.19	107.36	100	●
7.5	Nilai Tukar Nelayan	105.47	102.1	102.16	104.34	104.53	104.64	104.64	●
<b>PENUNJANG URUSAN</b>									
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>								
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	●
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>								
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP.DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	Tercapai
2.2	Persentase SiLPA	26.87%	20.17%	13.50%	8.35%	6.73%	11.81%	11.81%	●
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	6.22%	1.92%	-0.62%	-3.17%	-1.29%	4.37%	4.37%	●
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	●
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	17.20%	16.99%	20.04%	20.64%	27.48%	30.79%	30.79%	●
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	13.30%	10.91%	11.38%	14.77%	12.46%	11.22%	11.22%	●
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	32,59 : 67,41	29,85 : 70,15	30,32 : 69,68	26,84 : 71,16	28,37 : 71,63	25,05 : 74,71	25,05 : 74,71	●
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	17.36%	20.26%	21.77%	18.93%	18.10%	19.87%	19.87%	●
2.9	Penetapan APBD	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	●
		12/28/2012	12/27/2013	12/29/2014	12/11/2015	12/30/2016	12/27/2017		
		Perda No 11 Tahun 2012	Perda No. 60 Tahun 2013	Perda No. 9 Tahun 2014	Perda No 11 Tahun 2015	Perda No. 12 Tahun 2016	Perda No. 12 Tahun 2017		
		4,316,449,110,647.76	4,489,667,042,279.90	4,989,465,099,189.07	5,704,727,109,732.32	6,654,312,296,707.50	6,664,144,528,047.54		
<b>3</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>								
3.1	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	80	48	43	3	32	-	Lebih kecil
3.2	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	11.71	10.07	36.95	15.88	18.32	7.61	7.61	●
3.3	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	43	46	49	49	52	45	45	●
3.4	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	5,119	4,920	5,101	4,899	5,172	4,355	4,355	●
3.5	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	1,329	1,397	1,057	1,079	6,880	6,924	6,924	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>								
4.1	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	13,6% 6/44	13,6% 6/44	13,6% 6/44	13,6% 6/44	14% 7/50	13,6% 6/44	-	
4.2	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	66,6% 6/9	66,6% 6/8	66,6% 6/8	66,6% 6/8	70% 7/8	66,6% 6/9	-	
<b>5</b>	<b>Pengawasan</b>								
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	51	44	16	27	27	9	9	●
5.2	Jumlah Temuan BPK	58	55	55	30	10	14	14	●
5.3	Persentase Pelanggaran Pegawai	0.062	0.048	0.066	0.033	0.025	0.06	0.06	●
5.4	Jumlah LHP, Rekomendasi LHP, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, dan Laporan Hasil Monev								
5.5	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	●
5.6	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	●
5.7	Terintegrasi Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	●

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013-2018	Interpretasi : 1. Sudah tercapai ● 2. Akan tercapai ▲ 3. Tidak tercapai ▼
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>6</b>	<b>Bencana</b>								
6.1	Jumlah Sistem Peringatan Dini	6	6	7	11	17	17	17	●
6.2	Jumlah Kawasan Rawan Bencana	64	64	64	65	65	65	65	●
6.3	Jumlah Korban Bencana	3	29	6	154	286	140	140	●
6.4	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	43358	0	0	●
6.5	Jumlah Kerugian Akibat Bencana	1,986,500,000	3,184,000,000	2,396,500,000	2,706,437,000	2,977,000,000	2,960,000,000	2,960,000,000	●
6.6	Jumlah Kejadian Bencana	1,110	1,112	1,376	1,318	2,310	2,514	2,514	●

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2016 - 2020)**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah adalah pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah sedangkan pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, dijabarkan sebagai berikut.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005, gambaran kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

#### **1. Pendapatan Daerah**

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dana penyesuaian, dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara time series menyajikan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Bali dari tahun 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

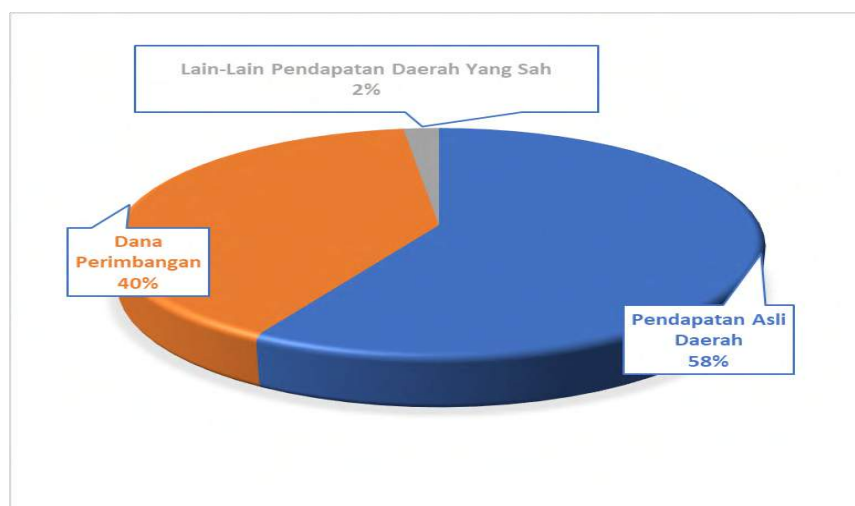
**Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali**

<b>Kode Rek.</b>	<b>Uraian</b>	<b>2016 (x Rp Juta)</b>	<b>2017 (x Rp Juta)</b>	<b>2018 (x Rp Juta)</b>	<b>2019 (x Rp Juta)</b>	<b>2020 (x Rp Juta)</b>	<b>Rata-rata Pertumbuhan (%)</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.249.017,75</b>	<b>5.992.161,67</b>	<b>6.259.367,61</b>	<b>6.645.538,87</b>	<b>5.718.339,70</b>	7,7
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.041.195,26</b>	<b>3.398.472,28</b>	<b>3.718.499,64</b>	<b>4.023.156,31</b>	<b>3.069.474,22</b>	7,3
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.593.093,54	2.872.354,21	3.230.732,17	3.463.996,39	2.607.990,40	7,8
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	63.858,57	46.431,88	40.241,78	33.841,78	18.966,86	(12,5)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	172.408,36	188.456,14	170.219,14	171.076,25	177.395,02	15,9
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	211.834,79	291.230,04	277.306,55	354.241,89	265.121,94	7,5
						-	-
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.867.010,93</b>	<b>2.535.995,75</b>	<b>2.493.979,97</b>	<b>2.548.063,87</b>	<b>2.564.355,20</b>	27,7
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	171.994,34	169.597,18	182.554,55	126.532,56	206.614,86	10,2
4.2.2	Dana Alokasi Umum	850.144,22	1.260.842,52	1.268.585,39	1.325.847,56	1.204.700,79	13,9
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	844.872,36	1.105.556,05	1.042.840,04	1.095.683,76	1.153.039,55	139,6
							-
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>340.811,57</b>	<b>57.693,64</b>	<b>46.888,00</b>	<b>74.318,68</b>	<b>84.510,28</b>	(25,9)
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.890,00	15.654,53	5.388,00	5.884,28	5.708,00	41,7
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000,00	7.500,00	41.500,00	68.434,41	78.802,28	117,3
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	330.921,57	34.539,11	0	0	0	(47,0)
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	-
4.3.7	Alokasi Kurang Bayar DAK	0	0	0	0	0	-
4.3.8	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	0	-

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu Tahun 2016-2020 terjadi peningkatan pendapatan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6,6%. Komposisi pendapatan daerah dari pos dana perimbangan menempati posisi tertinggi dengan angka pertumbuhan sebesar 27,7% diikuti pendapatan asli daerah sebesar 7,3% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar -25,9%. Pendapatan daerah dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang sangat signifikan selama kurun waktu 4 tahun disebabkan oleh tidak adanya bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainya pada tahun 2018 dan 2019, namun demikian pertumbuhannya masih bisa diperbaiki akibat meningkatnya dana penyesuaian dan otonomi khusus untuk Provinsi Bali terutama pada tahun 2018 sampai tahun 2020.

Secara keseluruhan rata-rata proporsi pendapatan daerah Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai tahun 2020 didominasi oleh pendapatan asli daerah dengan persentase sebesar 57,17% selanjutnya diikuti oleh dana perimbangan sebesar 42,71% dan terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan persentase 1,57%. Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.



**Gambar 3.1 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Bali**

Sumber Data: Bapenda Provinsi Bali, 2021



Rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Secara umum, kinerja pendapatan daerah Provinsi Bali periode 2016-2020, rata-rata tumbuh sebesar 6,6% (yoy). Pendapatan daerah Provinsi Bali terutama dikontribusikan oleh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan komponen dengan share terbesar yaitu mencapai 58,45%. Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 85,61%. Sisanya terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,11%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 5,10%, dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 1,18%.

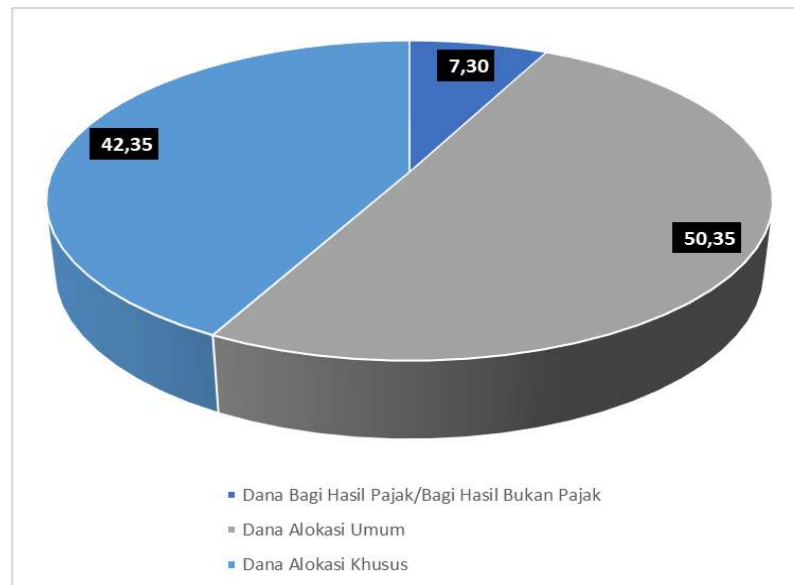


**Gambar 3.2 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali**

Sumber Data: Bapenda Provinsi Bali, 2021

### b. Dana Perimbangan

Komposisi Dana Perimbangan selama tahun 2016 – 2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 42,35% dan Dana Alokasi Umum sebesar 50,35%, sedangkan sisanya sebesar 7,30% merupakan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

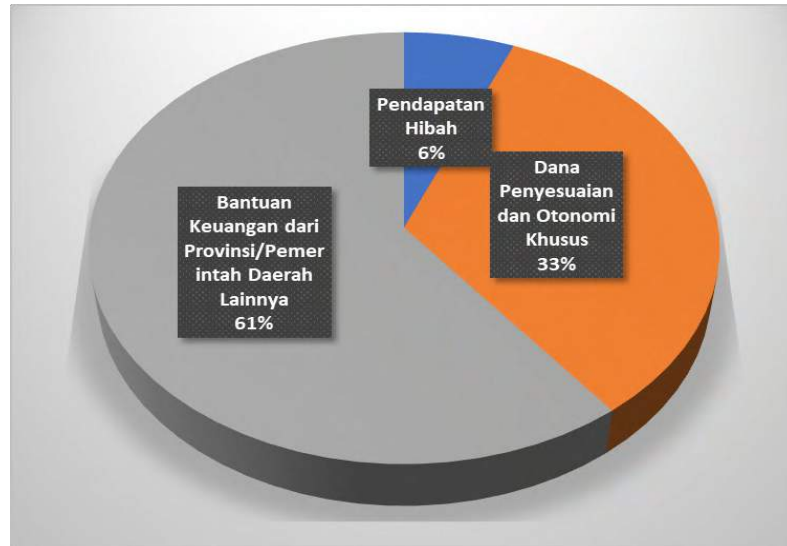


**Gambar 3.3 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali**

Sumber Data: Bapenda Provinsi Bali, 2021

### c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2016 – 2020 terdiri dari Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 60,48%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 33,31%, dan Pendapatan Hibah sebesar 6,21%. Berikut adalah grafik rata-rata proporsi pendapatan daerah Provinsi Bali dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2016 – 2020.



**Gambar 3.4 Rata-Rata Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sumber Data: Bapenda Provinsi Bali, 2021

## 2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali**

URAIAN	2016 (x Rp Juta)	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)	Rerata Pertumbuhan (%)
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.420.933,53</b>	<b>6.070.536,92</b>	<b>5.998.547,03</b>	<b>6.518.313,87</b>	<b>6.358.121,48</b>	<b>5,09</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.857.588,70</b>	<b>4.348.259,19</b>	<b>4.495.096,87</b>	<b>4.679.217,63</b>	<b>4.273.707,90</b>	<b>4,46</b>
Belanja Pegawai	753.993,27	1.493.989,76	1.571.381,34	1.567.790,82	1.572.773,89	21,24
Belanja Bunga						0,00
Belanja Subsidi	9.990,00	10.000,00	9.566,40	9.903,63	4.936,00	-9,83
Belanja Hibah	1.116.809,33	1.122.239,17	1.072.780,45	981.767,66	916.157,57	3,78
Belanja Bantuan Sosial	155.774,83	11.143,00	3.189,00	3.884,50	3.581,00	-29,51
Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.026.250,94	1.098.555,28	1.207.451,79	1.302.125,72	1.054.748,78	0,02
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	794.578,16	612.177,42	630.540,39	812.562,59	386.649,31	-5,68
Belanja Tidak Terduga	192,18	154,55	187,50	1.182,72	334.861,36	5.747,97
						0,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.563.344,83</b>	<b>1.722.277,74</b>	<b>1.503.450,16</b>	<b>1.839.096,24</b>	<b>2.084.413,57</b>	<b>7,25</b>
Belanja Pegawai	96.558,76	13.311,66	19.056,18	22.820,24	24.912,94	0,25
Belanja Barang dan Jasa	735.861,83	1.048.533,25	1.043.683,82	1.259.521,49	1.601.051,75	14,88
Belanja Modal	730.924,24	660.432,83	440.710,16	556.754,50	458.448,89	-0,85

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Provinsi Bali adalah sebesar 5,09%. Pertumbuhan ini cukup kecil dikarenakan terjadi penurunan belanja pada tahun 2018 sebesar 71.989.891.453 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan penurunan belanja pada tahun 2020 sebesar 499.427.472.198,69 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan belanja Provinsi Bali tahun 2017-2018 adalah sebesar -1,19% dan pada tahun 2019-2020 adalah sebesar -7,66%. Komposisi belanja daerah Provinsi Bali terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,46% dan Belanja Langsung dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,25%. Belanja Tidak Langsung Provinsi Bali mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 19,42%. Berbeda dengan Belanja Langsung yang mengalami fluktuasi pertumbuhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu 10,17% pada periode tahun 2016-2017, -12,71% pada periode tahun 2017-2018, 22,33% pada periode tahun 2018-2019, dan 13,34% pada periode tahun 2019-2020.

Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2018 mengalami tantangan yang cukup berat, khususnya terkait dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang masih menunjukkan ketidakpastian. Hal ini berpengaruh terhadap tekanan terhadap pendapatan APBN, dimana berpengaruh terhadap dana transfer ke daerah. Dampak dari erupsi Gunung Agung pada Akhir Tahun 2017 serta masa recovery pasca erupsi juga memberikan tekanan terhadap realisasi pendapatan serta realisasi belanja itu sendiri. Sesuai tabel 3.2 realisasi belanja daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 5,9 triliun, turun sebesar 1,19% jika dibandingkan dengan kinerja belanja daerah pada tahun sebelumnya sebesar Rp6,07 triliun. Pertumbuhan negatif tersebut pertama terjadi dalam waktu 4 tahun terakhir. Pertumbuhan negatif pada tahun 2018 kontradiktif dengan pertumbuhan belanja pada tahun 2017 yang mampu mencapai angka 11,98% (yoy). Komponen yang mendorong pertumbuhan negatif tersebut adalah penurunan realisasi belanja langsung sebesar Rp1,722 triliun pada tahun 2018, turun menjadi Rp1,516 triliun pada tahun 2018. Pertumbuhan negatif sebesar 1,19% pada tahun 2018 masih didukung pertumbuhan

positif belanja tidak langsung sebesar Rp4,478 triliun lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp4,348 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ke-13 serta Tunjangan Hari Raya dan tunjangan kerjanya.

Pertumbuhan belanja pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 11,98% (yoy). Angka pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi kedua dalam rentang 6 tahun terakhir. Pencapaian signifikan ini didorong oleh perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat yang memindahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Pemindahan wewenang tersebut diikuti oleh pemindahan status kepegawaian Guru PNS dan tenaga non PNS ke Pemerintah Provinsi Bali. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari DAU, serta linier dengan peningkatan pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi Belanja tidak langsung sebesar Rp3,857 triliun pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp4,348 triliun pada tahun 2017. Realisasi tersebut didorong oleh penambahan pembayaran gaji guru SMK/SMA serta tenaga non PNS. Selain itu sebagai dampak dari perpindahan wewenangan pengelolaan SMA/SMK juga mendorong pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa dari Rp735 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp1,048 triliun pada tahun 2017, meningkat sebesar 42,49%.

### **3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;

- b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel di bawah ini menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Bali.

**Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali**

<b>KODE REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2016 (x Rp juta)</b>	<b>2017 (x Rp juta)</b>	<b>2018 (x Rp juta)</b>	<b>2019 (x Rp juta)</b>	<b>2020 (x Rp juta)</b>	<b>Rerata Pertumbuhan (%)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>624.677,37</b>	<b>486.687,09</b>	<b>441.524,81</b>	<b>704.590,52</b>	<b>832.637,64</b>	<b>7,0</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>674.677,37</b>	<b>486.687,09</b>	<b>441.914,81</b>	<b>704.590,52</b>	<b>832.637,64</b>	<b>3,0</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	674.677,37	452.761,59	404.137,17	702.345,39	831.863,60	4,6
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,0
6.1.3	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	33.925,49	37.777,64	2.245,14	774,03	-29,6
						-	
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>390,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-55,0</b>
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000,00	-	390,00	-	-	-55,0
6.2.2	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,0
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,0
						-	
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>452.761,59</b>	<b>408.311,83</b>	<b>702.345,39</b>	<b>831.815,53</b>	<b>192.855,86</b>	<b>5,6</b>

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021



Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan rata rata sebesar 7,4%. Komposisi pembiayaan daerah Provinsi Bali terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,0% dan Pengeluaran Pembiayaan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -55,0%.

Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,0 persen, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar -55,0 persen

Bila direview lebih lanjut terkait realisasi komponen belanja, realisasi belanja tidak langsung mendominasi dibandingkan dengan realisasi belanja langsung. Pada tabel 3.2 realisasi Belanja Tidak Langsung didominasi oleh komponen belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Sedangkan untuk belanja langsung didominasi oleh belanja barang dan jasa.

**Tabel 3.4 Struktur Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali**

KODE REK.	URAIAN	2016 (x Rp Juta)		2017 (x Rp Juta)		2018 (x Rp Juta)		2019 (x Rp Juta)		2020 (x Rp Juta)	
		Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share	Realisasi	Share
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.420.933,53</b>	<b>100,00</b>	<b>6.070.536,92</b>	<b>100,00</b>	<b>5.998.547,03</b>	<b>100,00</b>	<b>6.518.313,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6.358.121,48</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.857.588,70</b>	<b>71,16</b>	<b>4.348.259,19</b>	<b>71,63</b>	<b>4.495.096,87</b>	<b>74,94</b>	<b>4.679.217,63</b>	<b>71,79</b>	<b>4.273.707,90</b>	<b>67,22</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	753.993,27	13,91	1.493.989,76	24,61	1.571.381,34	26,20	1.567.790,82	24,05	1.572.773,89	24,74
5.1.2.	Belanja Bunga	-		-		-		-		-	
5.1.3.	Belanja Subsidi	9.990,00	0,18	10.000,00	0,16	9.566,40	0,16	9.903,63	0,15	4.936,00	0,08
5.1.4.	Belanja Hibah	1.116.809,33	20,60	1.122.239,17	18,49	1.072.780,45	17,88	981.767,66	15,06	916.157,57	14,41
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	155.774,83	2,87	11.143,00	0,18	3.189,00	0,05	3.884,50	0,06	3.581,00	0,06
5.1.6.	Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.026.250,94	18,93	1.098.555,28	18,10	1.207.451,79	20,13	1.302.125,72	19,98	1.054.748,78	16,59
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	794.578,16	14,66	612.177,42	10,08	630.540,39	10,51	812.562,59	12,47	386.649,31	6,08
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	192,18	0,00	154,55	0,00	187,50	0,00	1.182,72	0,02	334.861,36	5,27
		-		-		-		-		-	
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.563.344,83</b>	<b>28,84</b>	<b>1.722.277,74</b>	<b>28,37</b>	<b>1.503.450,16</b>	<b>25,06</b>	<b>1.839.096,24</b>	<b>28,21</b>	<b>2.084.413,57</b>	<b>32,78</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	96.558,76	1,78	13.311,66	0,22	19.056,18	0,32	22.820,24	0,35	24.912,94	0,39
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	735.861,83	13,57	1.048.533,25	17,27	1.043.683,82	17,40	1.259.521,49	19,32	1.601.051,75	25,18
5.2.3	Belanja Modal	730.924,24	13,48	660.432,83	10,88	440.710,16	7,35	556.754,50	8,54	458.448,89	7,21

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021

Share belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan dengan share belanja langsung. Perbandingan rata-rata share rata-rata belanja tidak langsung terhadap belanja dari tahun 2016-2020 sebesar 71,35%, dibandingkan dengan share rata-rata belanja langsung yang hanya 28,65%. Komponen belanja tidak langsung dengan share tinggi adalah pada komponen belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik. Pada komponen belanja tidak langsung, share belanja pegawai terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, sejalan dengan kebijakan penerimaan PNS, perpanjangan batas usia pensiun ASN, perpindahan wewenang ASN SMA/SMK. Peningkatan realisasi belanja pegawai secara signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, sebagai akibat pengalihan ASN SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Bali dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Share belanja hibah menunjukkan tren kenaikan baik secara proporsi dan nominal. Rata-rata share belanja hibah dari tahun 2016-2020 sebesar 16,75%. Bila dirinci lebih lanjut terkait dengan belanja hibah, pada tahun 2017 sub komponen utama yang berkontribusi adalah belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat dan belanja hibah bantuan operasional sekolah (BOS). Selain hibah, komponen lain yang berkontribusi signifikan terhadap realisasi belanja tidak langsung adalah belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dengan rata-rata realisasi sebesar 19%. Realisasi ini sebagai dampak langsung dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Komponen Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik juga mempunyai share tinggi dengan rata-rata realisasi dari tahun 2016-2020 sebesar 10,83%. Belanja ini didominasi oleh belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota serta desa di Bali.

Komponen belanja langsung merupakan komponen dengan share rata-rata sebesar 28,6% dibandingkan dengan belanja daerah. Rata-rata perbandingan realisasi komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal pada rentang tahun 2016 - 2020 masing-masing sebesar 2 : 65 : 33. Belanja barang dan jasa dominan dalam realisasi

belanja karena langsung berkaitan dengan belanja kegiatan perangkat daerah. Belanja pegawai yang ditopang oleh honorarium ASN menunjukkan share penurunan meskipun secara nominal menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan positif dalam rentang tahun 2016-2020. Rata-rata proporsi belanja barang dan jasa dibandingkan dengan anggaran belanja sebesar 24,88%. Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2016 menunjukkan persentase sebesar 13,57%, hal ini disebabkan kebijakan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Untuk komponen belanja modal cenderung menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2016-2020. Pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen untuk melakukan belanja modal yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat serta yang mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan belanja modal untuk pembangunan 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Bali Mandara dan Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Persentase belanja modal cenderung menurun sampai dengan tahun 2018, dikarenakan ada kebijakan untuk melakukan saving atas belanja dalam rangka persiapan pilkada pada tahun 2018.

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada saat berakhirnya tahun anggaran. Posisi aset adalah memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang

timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pada tabel dibawah dapat dijelaskan Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Neraca dan LRA adalah laporan yang wajib disusun oleh SKPD, sedangkan PPKD selaku BUD hanya menyusun LAK dan Konsolidasi Neraca SKPD dan LRA SKPD menjadi Neraca Pemda dan LRA Pemda. Transaksi yang menjadi sumber dari mutasi rekening-rekening Neraca.

Pertumbuhan aset Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 4,4%. Rendahnya pertumbuhan aset disebabkan oleh rendahnya kinerja pertumbuhan komponen neraca. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Pada tahun 2018 aset lancar Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp 10 Triliun dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar minus 1,8%. Komponen lain yang menyumbang perlambatan pertumbuhan aset Pemerintah Provinsi Bali adalah piutang yang mengalami penurunan sebesar minus 61,3% dari tahun 2018 sebesar 253 miliar menjadi 98 miliar pada tahun 2019. Komponen yang menunjang pertumbuhan aset terjadi pada komponen investasi jangka panjang yang mengalami pertumbuhan sebesar 16,2% yaitu 1,2 triliun pada tahun 2018 menjadi 1,3 triliun pada

tahun 2019. Aset tetap pada tahun 2019 tumbuh sebesar 3,6%, sedangkan aset lainnya tumbuh sebesar 1,5%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adalah peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah.

**Tabel 3.5 Neraca Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2020**

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019	PERTUMBUHAN (%)
<b>ASET</b>	<b>5.2.1</b>	<b>10.515.561.974.477,17</b>	<b>10.880.737.340.756,59</b>	<b>-3,4</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.2.1.1</b>	<b>375.703.308.559,43</b>	<b>1.016.403.425.383,22</b>	<b>-63,0</b>
<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>5.2.1.1.1</b>	<b>191.594.109.904,54</b>	<b>831.411.352.968,02</b>	<b>-77,0</b>
Kas di Kas Daerah	5.2.1.1.1.1	60.445.286.323,08	650.647.578.852,66	-90,7
Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.1.1.1.2	-	13.286.000,00	-100,0
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.2.1.1.1.3	-	6.187.328,00	-100,0
Kas di BLUD	5.2.1.1.1.4	78.954.565.099,81	135.968.551.038,96	-41,9
Kas Lainnya di Bendahara BOS	5.2.1.1.1.5	52.194.258.481,65	44.775.749.748,40	16,6
Setara Kas	5.2.1.1.1.6	-	-	
<b>Piutang</b>	<b>5.2.1.1.2</b>	<b>98.698.011.588,71</b>	<b>98.088.383.167,94</b>	<b>0,6</b>
Piutang Pajak	5.2.1.1.2.1	27.168.286.627,00	37.295.600.983,00	-27,2
Piutang Retribusi	5.2.1.1.2.2	153.220.000,00	129.039.000,00	18,7
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.2.3	951.680.759,73	951.680.759,73	0,0
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.2.1.1.2.4	65.293.716.530,16	55.378.195.175,16	17,9
Piutang Lainnya	5.2.1.1.2.5	5.131.107.671,82	4.333.867.250,05	18,4
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>5.2.1.1.3</b>	<b>(41.604.264.211,76)</b>	<b>(34.690.843.968,72)</b>	<b>19,9</b>
Penyisihan Piutang Pajak	5.2.1.1.3.1	(329.275.992,14)	(371.211.000,92)	-11,3
Penyisihan Piutang Retribusi	5.2.1.1.3.2	(68.722.150,00)	(36.468.015,00)	88,4
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.3.3	(951.680.759,70)	(951.680.759,70)	0,0
Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah	5.2.1.1.3.4	(36.019.107.263,10)	(29.403.229.280,15)	22,5
Penyisihan Piutang Lainnya	5.2.1.1.3.5	(4.235.478.046,82)	(3.928.254.912,95)	7,8
<b>Beban Dibayar dimuka</b>	<b>5.2.1.1.4</b>	<b>412.064.314,43</b>	<b>112.197.260,27</b>	<b>267,3</b>
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka	5.2.1.1.4.1	412.064.314,43	112.197.260,27	267,3

URAIAN	REFKALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019	PERTUMBUHAN (%)
<b>Persediaan</b>	<b>5.2.1.1.5</b>	<b>126.603.386.963,51</b>	<b>121.482.335.955,71</b>	<b>4,2</b>
Persediaan Bahan Pakai Habis	5.2.1.1.5.1	24.200.298.928,14	19.413.626.729,97	24,7
Persediaan Bahan/Material	5.2.1.1.5.2	44.142.549.893,10	36.691.339.759,58	20,3
Persediaan Barang lainnya	5.2.1.1.5.3	58.260.538.142,27	65.377.369.466,16	-10,9
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.2.1.2</b>	<b>1.373.168.127.148,48</b>	<b>1.373.777.524.568,76</b>	<b>0,0</b>
<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>5.2.1.2.1</b>	-	<b>774.032.140,00</b>	<b>-100,0</b>
Dana Bergulir	5.2.1.2.1.1	-	774.032.140,00	-100,0
<b>Investasi Permanen</b>	<b>5.2.1.2.2</b>	<b>1.373.168.127.148,48</b>	<b>1.373.003.492.428,76</b>	<b>0,0</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.1.2.2.1	1.373.168.127.148,48	1.373.003.492.428,76	0,0
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.2.1.3</b>	<b>7.896.043.889.759,65</b>	<b>7.743.629.861.228,57</b>	<b>2,0</b>
Aset Tetap Tanah	5.2.1.3.1	4.543.910.245.603,19	4.166.232.536.186,23	9,1
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.2.1.3.2	1.689.371.955.634,83	1.600.892.532.185,69	5,5
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.2.1.3.3	2.234.184.022.217,84	2.170.807.551.558,85	2,9
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.1.3.4	2.951.716.071.415,07	2.940.133.070.386,02	0,4
Aset Tetap Lainnya	5.2.1.3.5	48.818.604.458,25	63.719.411.785,25	-23,4
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.2.1.3.6	21.711.749.703,80	21.598.209.957,17	0,5
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.2.1.3.7	(3.593.668.759.273,33)	(3.219.753.450.830,64)	11,6
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.2.1.4</b>	<b>870.646.649.009,61</b>	<b>746.926.529.576,05</b>	<b>16,6</b>
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.2.1.4.1	706.637.729.710,53	593.288.127.933,53	19,1
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.4.2	13.315.142.767,65	12.328.266.365,00	8,0
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.2.1.4.3	(7.971.487.342,00)	(6.289.862.588,00)	26,7
Aset Lain - Lain	5.2.1.4.4	158.665.263.873,43	147.599.997.865,52	7,5
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.2.2</b>	<b>160.015.626.310,79</b>	<b>168.312.600.949,02</b>	<b>-4,9</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.2.2.1</b>	<b>160.015.626.310,79</b>	<b>168.312.600.949,02</b>	<b>-4,9</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.2.2.1.1	-	22.509.092,34	
Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.2.1.2	17.074.334.451,56	18.824.792.711,97	-9,3
Utang Belanja dan Transfer	5.2.2.1.4	139.135.945.622,57	144.744.414.087,57	-3,9
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.1.3	3.805.346.236,66	4.720.885.057,14	-19,4
<b>EKUITAS</b>				<b>-3,3</b>
		<b>10.355.546.348.165,38</b>	<b>10.712.424.739.808,60</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>10.515.561.974.476,19</b>	<b>10.880.737.340.757,62</b>	<b>-3,4</b>

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021

Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, namun masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendapatan daerah yaitu:

- a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap pendapatan daerah.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan perlu ditingkatkan.
- c. Sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan perlu ditingkatkan.

Solusi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi.
- c. Mengoptimalkan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk pendanaan pembangunan daerah.
- d. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat.
- e. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah
- f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.



- g. Melaksanakan evaluasi dan pemutahiran data secara berkesinambungan.
- h. Mengoptimalkan pendapatan dari piutang pajak daerah.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Dalam Periode 2016-2020)**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan unruk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Kebijakan pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Bali periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Kebijakan Pendapatan**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok dan Pemanfaatan Air Permukaan.
  - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan

kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditembus dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu:

### **1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:**

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

- ❑ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
  - ❑ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - ❑ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  - ❑ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
- ❑ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
  - ❑ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
  - ❑ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
  - ❑ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001- 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
  - ❑ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
  - ❑ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
  - ❑ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
  - ❑ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli

Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya

- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
  - Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
  - Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
  - Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

## **2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

### **3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna

mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, Belanja Tidak Terduga ; dan
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

### **3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari.

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah



yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian

tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### **3.2.4 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tak langsung. Berikut disajikan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa total belanja daerah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun realisasi cenderung lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan. Terlihat pada tabel dibawah realisasi belanja daerah Provinsi Bali berada pada tren dibawah 90% penyebabnya adalah efisiensi anggaran, tidak terlaksananya beberapa kegiatan dan kurangnya perencanaan penyerapan anggaran yang baik.

**Tabel 3.6 Proporsi Penggunaan Anggaran APBD Provinsi Bali  
Tahun 2016 – 2020**

<b>NO</b>	<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>RENCANA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>( % )</b>	<b>BERTAMBAH (BERKURANG)</b>
1	2016	5.816.331.660.212	5.420.933.529.304	93,2	-395.398.130.909
2	2017	6.750.176.103.311	6.070.536.923.735	89,9	-679.639.179.576
3	2018	6.595.712.545.307	5.998.547.032.282	90,9	-597.165.513.025
4	2019	7.201.196.359.769	6.518.313.866.322	90,5	-682.882.493.447
5	2020	6.912.955.689.449	6.358.121.475.264	92,0	-554.834.214.185

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021

### **3.2.5 Analisis Pembiayaan**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas:

1. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga; dan
2. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja PD berkenaan, terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Guna mendukung Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelumnya, maka alokasi anggaran untuk belanja langsung diarahkan pada program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin, pengangguran dan

pemberdayaan masyarakat, menjamin ketahanan pangan, pelestarian dan pengembangan budaya, peningkatan pengelolaan insfrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Tabel 3.7 Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

<b>URAIAN</b>	<b>2016 (x Rp Juta)</b>	<b>2017 (x Rp Juta)</b>	<b>2018 (x Rp Juta)</b>	<b>2019 (x Rp Juta)</b>	<b>2020 (x Rp Juta)</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.420.933,53</b>	<b>6.070.536,92</b>	<b>5.998.547,03</b>	<b>6.518.313,87</b>	<b>6.358.121,48</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.857.588,70</b>	<b>4.348.259,19</b>	<b>4.495.096,87</b>	<b>4.679.217,63</b>	<b>4.273.707,90</b>
Belanja Pegawai	753.993,27	1.493.989,76	1.571.381,34	1.567.790,82	1.572.773,89
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi	9.990,00	10.000,00	9.566,40	9.903,63	4.936,00
Belanja Hibah	1.116.809,33	1.122.239,17	1.072.780,45	981.767,66	916.157,57
Belanja Bantuan Sosial	155.774,83	11.143,00	3.189,00	3.884,50	3.581,00
Belanja bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.026.250,94	1.098.555,28	1.207.451,79	1.302.125,72	1.054.748,78
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	794.578,16	612.177,42	630.540,39	812.562,59	386.649,31
Belanja Tidak Terduga	192,18	154,55	187,50	1.182,72	334.861,36
<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.563.344,83</b>	<b>1.722.277,74</b>	<b>1.503.450,16</b>	<b>1.839.096,24</b>	<b>2.084.413,57</b>
Belanja Pegawai	96.558,76	13.311,66	19.056,18	22.820,24	24.912,94
Belanja Barang dan Jasa	735.861,83	1.048.533,25	1.043.683,82	1.259.521,49	1.601.051,75
Belanja Modal	730.924,24	660.432,83	440.710,16	556.754,50	458.448,89

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021

Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa belanja pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk belanja gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja. Oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi APBD Provinsi Bali tahun 2016 – tahun 2019 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah disajikan dalam tabel di atas. Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa anggaran belanja daerah Provinsi Bali mengalami perubahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah Penerimaan PAD yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Produk Domestik Bruto, pembagian DAU yang diluar target yang direncanakan sehingga kedepannya diharapkan melakukan pembenahan serta perancangan yang matang dalam penyusunan APBD serta perencanaan serapan anggaran yang baik.

### **1. Defisit Riil Anggaran**

Dalam penggunaan anggaran belanja daerah Provinsi Bali dari tahun 2016 s/d tahun 2020, defisit anggaran terjadi pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020. Penutupan defisit anggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Struktur APBD yang berbasis kinerja, memungkinkan terdapat SILPA pada akhir tahun anggaran dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai

sumber pembiayaan penerimaan Tahun anggaran. Dalam periode Tahun 2016 s/d 2020 sempat terjadi defisit yaitu pada tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2020 pengeluaran melebihi pendapatan pemerintah.

**Tabel 3.8 Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

No	Uraaian	2016 (x Rp Juta)	2017 (x Rp Juta)	2018 (x Rp Juta)	2019 (x Rp Juta)	2020 (x Rp Juta)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.249.018	5.992.162	6.259.368	6.645.539	5.718.340
2	Belanja Daerah	5.420.934	6.070.537	5.998.547	6.518.314	6.358.121
3	Pengeluaran Pembiayaan	50.000	-	390	-	-
<b>Defisit Riil</b>		(171.916)	(78.375)	260.821	127.225	(639.782)

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021

Untuk menutup defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	263,36	577,68	-	-	130,02
2.	Pencairan Dana Cadangan					
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6.	Penerimaan Piutang Daerah					

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021



Berdasarkan tabel di atas, defisit yang terjadi pada tahun 2017 mampu ditutupi oleh komponen SiLPA pada APBD. Proporsi penutupan defisit riil tergolong tinggi yaitu 577,68% pada tahun 2017. Proporsi tersebut menurun/hilang pada tahun 2018 dan tahun 2019 dikarenakan APBD Tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi surplus masing-masing sebesar Rp 260 milyar dan 127 miliar. Namun pada 2020 defisit riil terjadi lagi dengan persentase sebesar 145,06. Analisis pembiayaan ini penting untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016 (x Rp juta)		2017 (x Rp juta)		2018 (x Rp juta)		2019 (x Rp juta)		2020 (x Rp juta)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	452.762	100,0	408.312	100,0	702.345	100,0	831.816	100,0	192.856	100,0
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	- 130.540	-28,8	- 140.803	-34,5	151.537	21,6	260.371	31,3	-365.312	31,3
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	114.881	25,4	- 100.247	-24,6	-92.489	-13,2	-113.963	-13,7	-9.115	-13,7
4.	Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	46.563	10,3	10.520	2,6	498	0,1	280	0,0	0	0,0
5.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6.	Kegiatan Lanjutan	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	674.638	149,0	452.762	110,9	408.312	58,1	702.345	84,4	831.816	84,4

Sumber Data: BPKAD Provinsi Bali, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2016-2020), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan kenaikan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

## **2. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2019 masih dijumpai permasalahan seperti diuraikan dibawah ini.

- 1) Kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan karena dalam pelaksanaan belanja daerah pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis namun secara fisik program, kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Hanya saja ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena kegagalan dalam proses lelang.
- 2) Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum di bidang pendapatan, tetapi baru dilaksanakan sebatas pembinaan dan belum sampai pada pengenaan sanksi (Narasi disesuaikan dengan Tahun).
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam Tata Kelola Keuangan Daerah.
- 4) Belum tergalinya sumber-sumber pendapatan sebagai alternatif pendanaan pembangunan.

## b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi:

- 1) Pelaksanaan Bimtek dan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi serta mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
- 2) Mengembangkan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam Tata Kelola Keuangan Daerah.
- 3) Pengelolaan Aset secara optimal dengan membentuk BUMD Aset.
- 4) Belum tergalinya sumber-sumber pendapatan sebagai alternatif pendanaan pembangunan.
- 5) Mengembangkan kerjasama dengan privat sektor khususnya yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR)
- 6) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan.
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
- 8) Mengadakan penagihan tunggakan pajak.
- 9) Mengusulkan untuk online dengan BPD Bali.
- 10) Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana dan prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.

### **3.3 Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBD Bali 2021-2023**

Berdasarkan hasil analisis dari data realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali (data realisasi tahun 2016-2020), maka dapat kami informasikan asumsi dan beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan proyeksi APBD Provinsi Bali 2021-2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyusunan proyeksi realisasi APBD Provinsi Bali (Pendapatan Belanja Daerah) pada tahun 2021-2023 disusun mengacu kepada realisasi APBD Provinsi Bali pada tahun 2020, mengacu kepada pagu anggaran 2020 yang telah diterima dari BPKAD Provinsi Bali. Sementara itu, realisasi mengacu kepada persentase realisasi APBD Bali Tahun 2019.
- Penyusunan proyeksi APBD dilakukan berdasarkan asumsi konservatif dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2016-2019) dan prakiraan realisasi tahun 2020.
- Penyusunan proyeksi realisasi APBD telah mempertimbangkan kinerja pertumbuhan ekonomi Bali, meskipun dalam kurun waktu rata-rata 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan kinerja yang signifikan yaitu tumbuh sebesar 6.53% (yoy) dari tahun 2016-2019 dan menurun sebesar -9,31 pada tahun 2020, namun bila melihat kinerja ekonomi Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020), kinerja ekonomi Bali cenderung tumbuh di bawah pertumbuhan rata-ratanya, bahkan pada tahun 2017 kinerja ekonomi Bali mengalami pertumbuhan lebih rendah dan melambat dalam kisaran 5.70% (yoy) -6.10% (yoy), sebagai dampak peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung. Dengan kondisi tersebut, penyusunan proyeksi APBD mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang relative moderat. Selain itu, tingkat inflasi diasumsikan cukup terkendali dalam periode 2021-2023.
- Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini juga belum mempertimbangkan bila terjadi kondisi force majeure, seperti bencana alam yang tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi Bali, khususnya industry pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi, sehingga pada gilirannya akan memengaruhi seluruh kinerja komponen pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen lain-lain pendapatan yang sah maupun realisasi belanja daerah secara umum.

- Penyusunan proyeksi realisasi APBD ini, belum mempertimbangkan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 2021-2023 yang akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, anatara lain kebijakan dana perimbangan, retribusi, perpajakan, bantuan keuangan dan pengelolaan *cashflow* anggaran dari sisi pendapatan, termasuk dari sisi belanja (kebijakan pengembangan infrastruktur, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja barang dan jasa serta bantuan social).
- Penyusunan proyeksi APBD tahun 2021-2023 disusun dengan skema pendekatan pesimis dan optimis, sebagai range dalam proyeksi realisasi APBD ini.

### **3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Untuk mendorong peningkatan realisasi pendapatan daerah dan mendorong peningkatan nilai tambah serta kontribusi realisasi belanja terhadap ekonomi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Dalam rangka mendorong peningkatan PAD, perlu dirumuskan strategi dan langkah-langkah progresif dalam upaya untuk mendorong sumber-sumber PAD baru. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi:
  - ❖ Untuk mengurangi ketergantungan pendapatan pajak dari pajak kendaraan bermotor yang berpotensi ke depan akan terus menurun, maka pengembangan destinasi wisata danau dan sungai seperti kegiatan wisata arung jeram dan pemancingan serta kegiatan water sport yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak air permukaan sebagai salah satu komponen dari pendapatan pajak daerah dapat menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan.
  - ❖ Mendorong peningkatan peran dan pengembangan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendorong peningkatan laba BUMD tersebut. Peningkatan peran dan pengembangan ini dapat dilakukan antara lain dengan

keterlibatan BUMD terkait dalam pengelolaan aset-aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan (dengan persetujuan DPRD Provinsi Bali). Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut dapat dipergunakan sebagai tujuan daerah destinasi wisata untuk kegiatan *Meetings, Incentives, Conventions, and Events* (MICE) seperti kawasan Wisata Nusa Dua maupun pengembangan pusat pengembangan kawasan industri teknologi informasi, sejalan dengan posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Tentunya dibutuhkan kerjasama yang strategis antara BUMD dengan pihak swasta untuk mewujudkan hal ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD khususnya untuk sub komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui pendapatan laba dari penyertaan modal pada BUMD.

- ❖ Pengembangan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Provinsi Bali untuk paket wisata kesehatan. Tentunya hal ini merupakan usulan fungsi tambahan yang dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Bali dengan memanfaatkan infrastruktur kesehatan yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Wisata kesehatan dapat difokuskan untuk pengobatan berbagai macam penyakit yang dikombinasikan dengan paket wisata termasuk dalamnya pelayanan kesehatan untuk manula. Strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah khususnya untuk sub komponen lain-lain PAD yang sah.
- ❖ Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, khususnya terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tersebut, baik melalui pengembangan aplikasi non tunai (mobile aplikasi) maupun memperbanyak distribusi layanan antara lain melalui kerjasama dengan PT. POS Indonesia yang memiliki jaringan kantor yang tersebar luas, maupun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) selain peningkatan frekuensi kegiatan samsat keliling.



- Untuk mendorong peningkatan kontribusi dan nilai tambah realisasi belanja daerah terhadap kinerja ekonomi Bali, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan tahapan untuk mendorong percepatan realisasi belanja daerah sesuai dengan targetnya. Persentase realisasi yang besar dan signifikan diupayakan untuk dapat dilakukan lebih awal dibandingkan periode sebelumnya khususnya untuk komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan ini tentunya memerlukan upaya percepatan tahapan pengadaan (barang dan jasa serta modal), antara lain melalui percepatan tahapan pengadaan yang dapat dilakukan pada tahun sebelum masa anggaran dimulai ataupun pada periode awal masa anggaran, sehingga realisasi pengadaan dan belanja dapat dipercepat.
- Dalam rangka mendorong akselerasi kinerja ekonomi Bali, maka prioritas anggaran pembangunan dapat ditujukan untuk mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, diharapkan prioritas anggaran pembangunan dapat difokuskan pada pengembangan produk olahan untuk hilirisasi hasil pertanian dalam arti luas, yang berorientasi ekspor seperti kopi dan kakao serta pengembangan komoditas perikanan yang berorientasi ekspor baik hasil budidaya maupun komoditas olahan hasil perikanan tangkap.
- Dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, prioritas anggaran pembangunan juga dapat dialokasikan untuk mendorong peningkatan konektivitas anatara Bali Selatan dengan Wilayah Bali lainnya, antara lain melalui pembangunan jalan tol, kereta api dan shortcut jalan. Pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur ini juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui skema public private partnership.
- Untuk mendorong nilai tambah ekspor terhadap ekonomi Bali, maka perlu dilakukan upaya pengembangan pelabuhan ekspor dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas produk ekspor Bali, sehingga pada gilirannya akan mendorong peningkatan nilai tambah komoditas ekspor Bali pada kinerja ekonomi Bali.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 merujuk pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komposisi Belanja Daerah Provinsi Bali untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Operasi, merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai

Proyeksi belanja pegawai telah memperhitungkan pemberian Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN melalui DAK Fisik. Belanja pegawai direncanakan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD, kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dialokasikan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, belanja subsidi diproyeksikan sama setiap tahun selama periode 2019 – 2023.

4) Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja hibah telah memperhitungkan belanja hibah yang bersumber dari APBN melalui Dana BOS diproyeksikan sama setiap tahunnya untuk periode 2019-2023.

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Berdasarkan hal tersebut, dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023, belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan Belanja modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.

1) Belanja Tanah

Belanja Tanah merupakan pengeluaran untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk membeli barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal ini digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja modal ini digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja modal ini digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah Provinsi Bali mengupayakan untuk memprioritaskan alokasi belanja modal dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023 yang dialokasikan sebesar 15% dari total proyeksi belanja daerah untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tabel 3.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun Proyeksi (x Rp juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>6.323.499</b>	<b>6.762.860</b>	<b>7.216.869</b>	<b>7.707.118</b>	<b>8.238.430</b>
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.587.699	3.918.126	4.203.363	4.514.751	4.855.019
	b. Dana Perimbangan	2.662.027	2.796.943	2.964.759	3.142.645	3.331.203
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.772	47.791	48.747	49.722	52.208
2.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>6.833.566</b>	<b>8.128.466</b>	<b>8.419.027</b>	<b>8.756.893</b>	<b>9.230.372</b>
	a. Belanja Langsung	4.702.084	5.174.240	5.425.248	5.694.208	5.982.574
	b. Belanja Tak Langsung	2.131.482	2.954.226	2.993.779	3.062.685	3.247.798
3.	<b>Surplus/Defisit (1-2)</b>	<b>(510.067)</b>	<b>(1.365.606)</b>	<b>(1.202.158)</b>	<b>(1.049.776)</b>	<b>(991.942)</b>
4.	<b>Pembiayaan Daerah (a-b)</b>	<b>510.757</b>	<b>1.365.606</b>	<b>1.202.158</b>	<b>1.049.776</b>	<b>991.942</b>
	a. Penerimaan	510.757	1.365.606	1.202.158	1.049.776	991.942
	b. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

Sumber Data: Bapenda dan Bappeda Provinsi Bali, 2021

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Bali tahun 2018-2023 yang disajikan pada tabel diatas sudah tidak relevan karena sudah terjadi perubahan pada struktur APBD yang harus dimuat dalam revisi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sesuai dengan ketentuan PP No. 12 Tahun 2019. Perubahan struktur pendapatan daerah diikuti juga dengan perubahan proyeksi target pendapatan daerah tahun 2021-2023 yang disebabkan oleh kemungkinan kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19. Diproyeksikan terjadi penurunan target pendapatan daerah tiga tahun kedepan akibat menurunnya target PAD dan menurunnya dana transfer daerah. Struktur dan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Bali pada tahun 2021-2023 disajikan sesuai tabel berikut.

**Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2023**

No	Uraian	Tahun Proyeksi		
		2021 (x Rp juta)	2022 (x Rp juta)	2023 (x Rp juta)
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.995.467</b>	<b>5.187.609</b>	<b>5.446.989</b>
	<b>a. Pendapatan Asli Daerah</b>	3.178.019	3.144.716	3.301.951
	1). Pajak Daerah	2.640.212	2.692.984	2.827.633
	2). Retribusi Daerah	12.602	19.813	20.803
	3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	160.712	160.712	168.747
	4). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	364.493	271.207	284.767
	<b>b. Pendapatan Transfer</b>	2.811.740	2.037.185	2.139.044
	<b>c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	5.708	5.708	5.993
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.538.316</b>	<b>6.102.491</b>	<b>6.559.770</b>
	<b>a. Belanja Operasi</b>	4.761.854	3.857.438	4.202.464
	1) Belanja Pegawai	1.833.756	1.867.729	2.051.115
	2) Belanja Barang dan Jasa	1.853.568	1.654.600	1.737.330
	3) Belanja Bunga	17.776	17.775	18.665
	4) Belanja Subsidi	10.000	38	10.000
	5) Belanja Hibah	994.254	317.156	385.354
	6) Belanja Bantuan Sosial	52.500	140	0
	<b>b. Belanja Modal</b>	2.165.984	878.273	922.187
	<b>c. Belanja Tak Terduga</b>	54.000	50.000	52.500
	<b>d. Belanja Transfer</b>	1.556.478	1.316.780	1.382.619
3	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-2.542.849</b>	<b>-914.882</b>	<b>-1.112.781</b>

No	Uraian	Tahun Proyeksi		
		2021 (x Rp juta)	2022 (x Rp juta)	2023 (x Rp juta)
4	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.542.849</b>	<b>914.882</b>	<b>1.112.781</b>
	<b>a. Penerimaan</b>	2.587.849	1.014.882	1.262.781
	<b>b. Pengeluaran</b>	45.000	100.000	150.000

Sumber Data: Bapenda dan Bappeda Provinsi Bali, 2021

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut berupa total penerimaan/pendapatan yang direncanakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama tahun 2021 dan 2 (dua) tahun ke depan. Khusus pada tahun 2021, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.2,5T lebih didalamnya selain terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA, juga terdapat pinjaman PEN sebesar Rp.1,5T yang dipergunakan untuk membiayai anggaran pembangunan Pusat Kebudayaan Bali.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai dengan urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II, Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I (utama) merupakan program pembangunan daerah yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah dan kebijakan nasional yang definitive harus dilaksanakan oleh kepala daerah pada tahun rencana, seperti untuk prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen), urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen). Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat serta merupakan prioritas belanja wajib yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan prioritas II merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing Perangkat Daerah di Provinsi Bali. Program prioritas kedua ini sangat

berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bansos organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kab/kota dan pemerintah desa serta bidang belanja tak terduga.

Berikut disajikan data Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali sesuai perhitungan dari Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali pada tabel berikut.

**Tabel 3.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023**

No	Jenis Data	Proyeksi Anggaran (Rp X Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Prioritas 1	3.075.105	3.657.810	3.842.242	2.746.121	2.951.896
2	Prioritas 2	1.503.385	1.788.263	1.878.430	1.342.548	1.443.149
3	Prioritas 3	2.255.077	2.682.394	2.817.644	2.013.822	2.164.724
Total		6.833.566	8.128.466	8.538.316	6.102.491	6.559.770

Sumber Data: Bappeda Provinsi Bali, 2021

Berdasarkan tabel diatas yang menyajikan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023, diketahui bahwa Alokasi Kapasitas Riil dialokasikan untuk mendanai Prioritas I, disusul Prioritas III dan Prioritas II dengan persentase Prioritas I sebesar 45%, Prioritas III 33% dan Prioritas II 22% konsisten dalam lima tahun.



## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan belum memperhitungkan pandemi Covid-19. Kondisi saat ini, pandemi Covid-19 masih merupakan ancaman bagi pemerintah daerah, bahkan sampai tahun-tahun mendatang. Capaian makro ekonomi Bali sebelum pandemi Covid-19 menunjukkan kondisi yang baik, namun dengan memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Bali akibat pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pembangunan daerah hingga kebijakan kerangka pendanaannya. Dengan demikian, perlu adanya kaji ulang kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini mengacu pada kondisi capaian pembangunan periode 2016-2019 maupun permasalahan dimasa yang akan datang difokuskan pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu: Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Berdasarkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” 3 (tiga) dimensi utama permasalahan pembangunan Bali diuraikan kedalam beberapa sub permasalahan pembangunan sesuai masing-masing dimensi sebagai berikut:

#### **1. Alam Bali**

- Lahan pertanian semakin berkurang
- Menurunnya jumlah subak
- Pantai semakin rusak akibat abrasi
- Sumber mata air yang aktif semakin berkurang
- Memudarnya kesucian, keagungan, dan taksu alam bali

- Rusaknya ekosistem laut, danau dan sungai
- Munculnya kriminal dan masalah sosial lainnya
- Kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah (Badung, Denpasar dan Gianyar)
- Masalah lingkungan lainnya

## **2. Krama (Manusia) Bali**

- Mengalami perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif
- Cenderung pragmatis
- Konsumtif
- Moralitas menurun
- Kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal
- Melemahnya kohesi sosial (ikatan manyama braya/solidaritas)

## **3. Kebudayaan Bali**

Eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas:

- Kelembagaan
- Sarana dan prasarana
- Sumber daya manusia
- Sistem nilai
- Pranata budaya

Berdasarkan sub permasalahan pembangunan sesuai 3 (tiga) dimensi utama pembangunan Bali kedepan dikaitkan dengan analisis gambaran umum kondisi daerah pada Bab II dapat ditarik permasalahan pembangunan Bali 3 (tiga) tahun kedepan periode 2021-2023 sebagai berikut:

### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

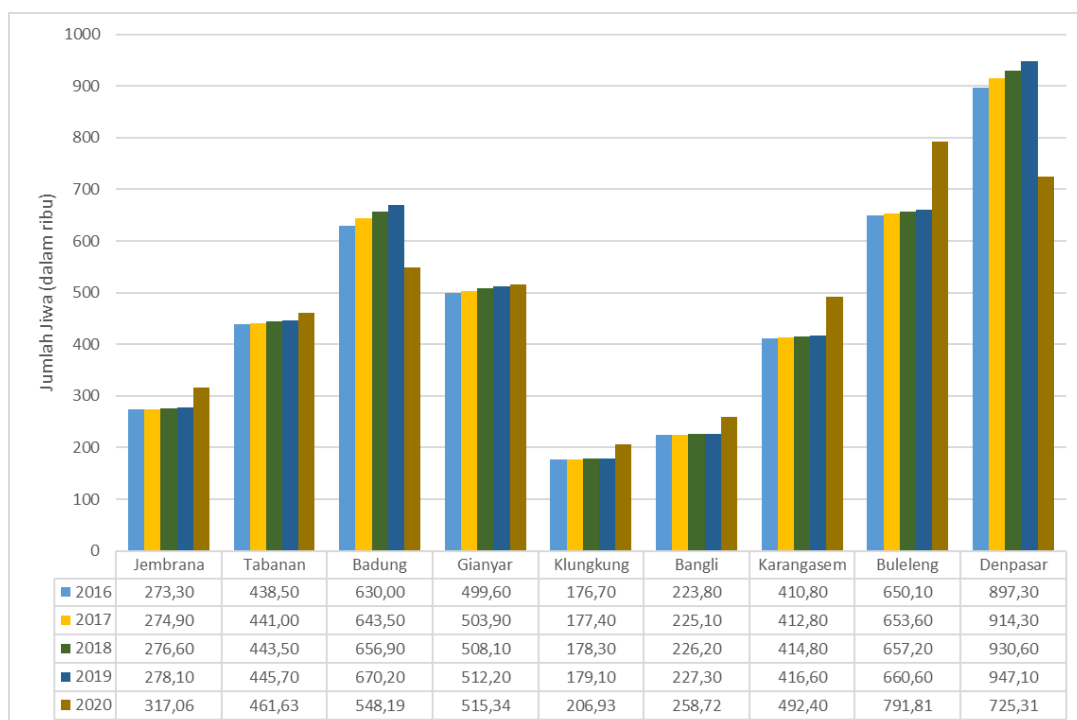
#### **4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Kesenjangan**

Kesenjangan masih menjadi permasalahan pembangunan yang harus diatasi di Provinsi Bali. Kesenjangan yang dimaksud, yaitu kesenjangan dari sisi penduduk, antar wilayah, antar sektor, dan gender.

- Kesenjangan Penduduk: Aspek kependudukan dalam pembangunan dapat menjadi peluang dan menjadi permasalahan dalam pembangunan.

Penduduk dapat menjadi aset berharga dalam mendukung pembangunan jika dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan jika tidak diberdayakan secara optimal. Dalam hal ini, masalah meningkatnya jumlah penduduk dan ketimpangan penduduk akan menjadi sumber berbagai masalah pembangunan yang sudah dan akan terjadi di Provinsi Bali, yaitu masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jumlah penduduk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Namun, jumlah penduduk tidak merata diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kota Denpasar yang luas wilayahnya terkecil di Provinsi Bali memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 947,1 ribu jiwa pada tahun 2020. Besarnya jumlah penduduk Kota Denpasar, terlampaui jauh dengan Kabupaten Klungkung yang memiliki jumlah penduduk terendah di Provinsi Bali yaitu 179,1 ribu jiwa pada tahun 2020.



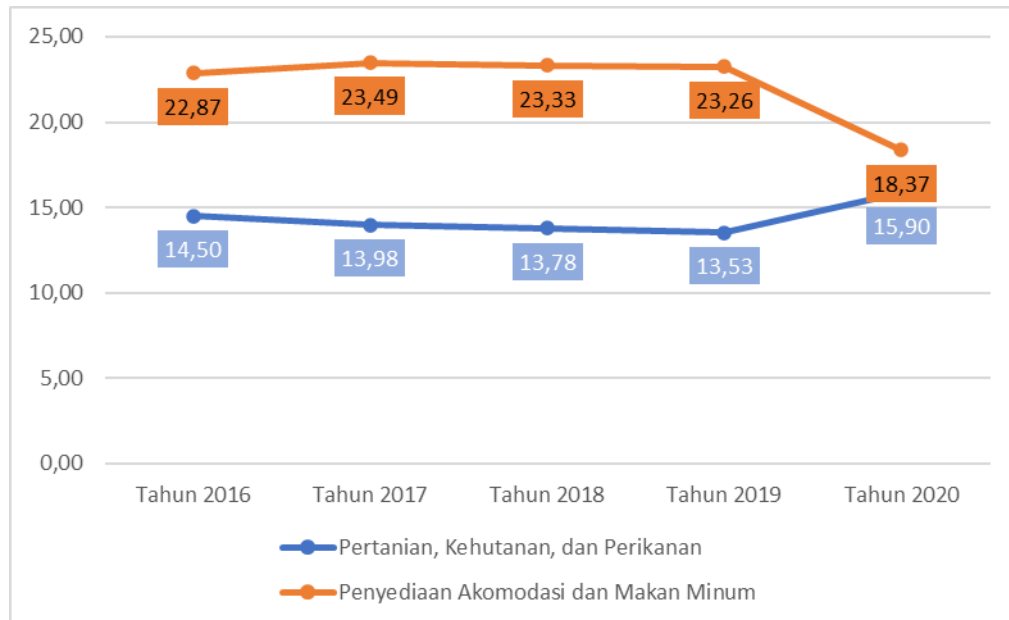
**Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

Sumber Data: Disdukcapil Provinsi Bali, 2021

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk di atas 1,5 persen pada tahun 2000-2019. Sedangkan Kabupaten lainnya memiliki pertumbuhan penduduk di bawah 1 persen. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari

kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran. Dalam 10 tahun terakhir TFR (angka kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya persentase pasangan usia subur yang sedang memakai alat kontrasepsi (*current use*) dan berubahnya pola pemilihan metode kontrasepsi dari metode jangka panjang yang tingkat kelangsungan pemakaiannya (*continuation rate*) lebih tinggi ke metode jangka pendek yang tingkat kelangsungannya lebih pendek. Migrasi yang masuk ke Kota Denpasar dan Kabupaten Badung disebabkan karena pesatnya perkembangan sektor pariwisata di dua Kabupaten/Kota tersebut yang menjadi daya tarik bagi pencari kerja sehingga terjadi perpindahan penduduk. Hal tersebut berarti akan terkait dengan kesenjangan antar sektor dan antar wilayah.

- Kesenjangan Antar Sektor: Selain kesenjangan penduduk, masih adanya kesenjangan antar sektor dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Bali. Sektor yang dimaksud yaitu antara sektor pariwisata dan pertanian. Hal tersebut terlihat dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata) memberikan kontribusi paling dominan sebesar 23,26 persen pada tahun 2019, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 13,53 persen. Sektor pertanian awalnya adalah penggerak perekonomian Provinsi Bali sebelum sektor pariwisata mendominasi. Perlambatan sektor pertanian disebabkan oleh cenderung menurunnya hasil produksi karena kapasitas produksi yang cenderung stagnan. Selain itu, dipengaruhi juga oleh penurunan keterlibatan petani. Hal tersebut juga tidak dapat terlepas dari semakin meningkatnya sektor pariwisata. Meningkatnya sektor pariwisata dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain keramahtamahan, kebersihan lingkungan, daya tarik objek wisata, ketersediaan berbagai fasilitas pariwisata, dan lainnya. Dampak dari meningkatnya sektor pariwisata yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut akan berpengaruh pada terjadinya alih profesi dari sektor pertanian ke sektor pariwisata.



**Gambar 4.2 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertanian terhadap PDRB Provinsi Bali**

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, 2021

- Kesenjangan Antar Wilayah: Kesenjangan antar wilayah juga masih terjadi, yaitu Kabupaten Badung menjadi daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 93.692.000, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bangli yaitu Rp. 30.794.00. Penyebab kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali apabila dikaitkan dengan struktur perekonomian adalah persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpangan dalam menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata. Sektor pariwisata di Provinsi Bali masih terkonsentrasi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar, sehingga berpengaruh terhadap tingginya pendapatan per kapita di daerah tersebut.



**Gambar 4.3 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, 2021

- Kesenjangan Gender: Kesenjangan gender juga masih terjadi di Provinsi Bali. Selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan angkatan kerja perempuan mencapai 65,67 persen pada tahun 2019. Angka tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 50 persen dan namun demikian angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan masih di bawah angkatan kerja laki-laki. Angkatan kerja perempuan ini bekerja di berbagai sektor pembangunan seperti sebagai ASN, pegawai swasta, perdagangan dan lainnya. Keterlibatan perempuan sebagai tenaga professional juga masih dibawah laki-laki yaitu 48,05 persen pada tahun 2019, dan sumbangan pendapatan perempuan baru sebesar 38,61 persen pada tahun 2019. Partisipasi perempuan dalam bidang politik bisa dikatakan berkembang lambat. Partisipasi perempuan dalam parlemen masih jauh di bawah nasional yaitu hanya mencapai 9,09 persen atau sejumlah 5 orang pada tahun 2017. Persentase perempuan Bali yang bergabung dalam

parlemen menduduki peringkat ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia. Walaupun terjadi peningkatan, namun masih jauh dari 30 persen kuota yang di tetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Proporsi perempuan pekerja bebas non pertanian Provinsi Bali pada tahun 2016 sebatas 25,53% dari total 129.932 orang pekerja bebas non pertanian. Artinya penduduk laki-laki masih mendominasi pekerja bebas non pertanian di Provinsi Bali. Dari sisi pendidikan, terlihat bahwa angka melek huruf pada tahun 2019 sebesar 96,99% penduduk laki-laki dan 91,66% untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak terbatas untuk laki-laki dan perempuan.

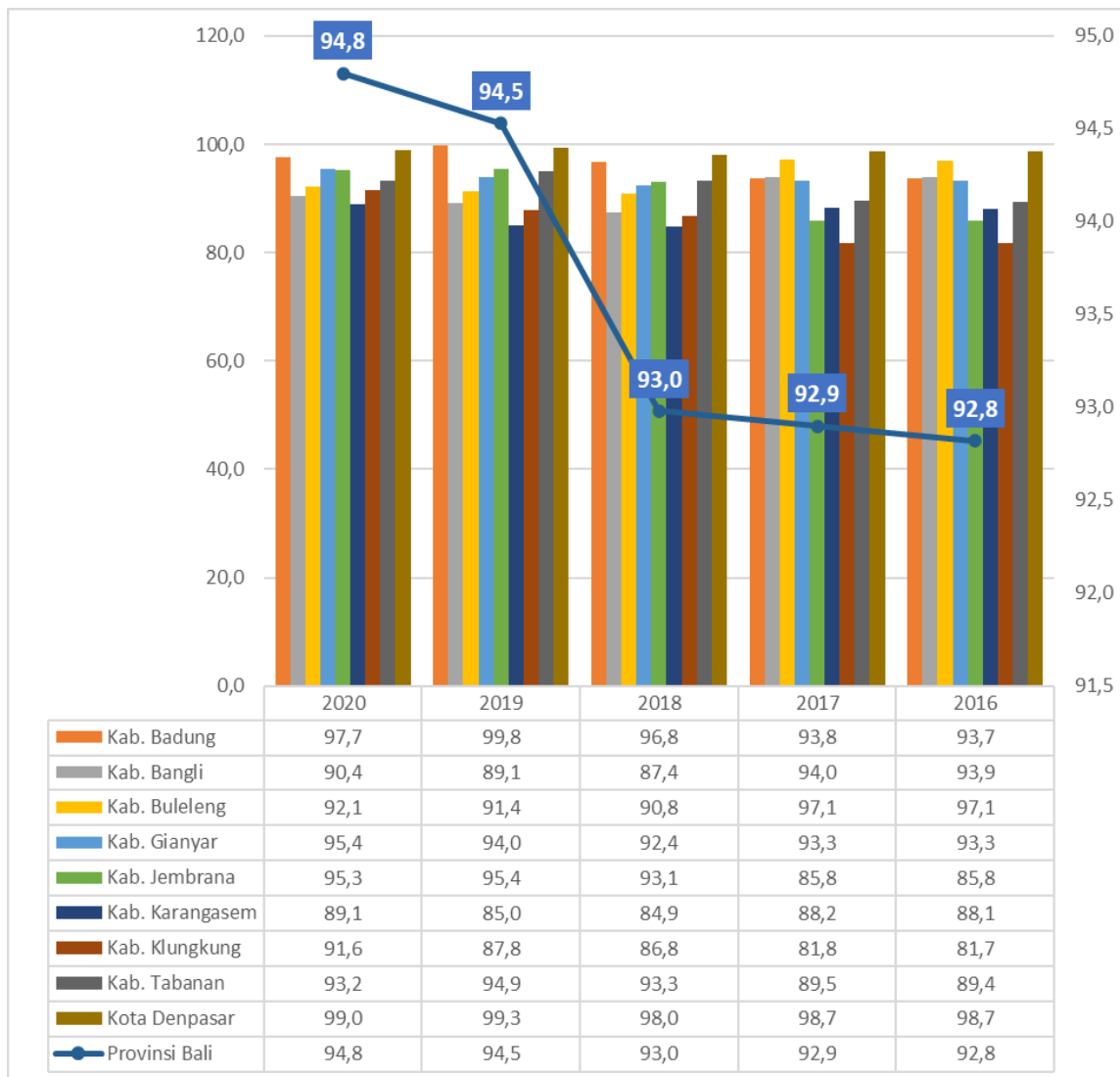
Perkembangan gender dapat dilihat secara nasional dengan menggunakan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG Provinsi Bali tahun 2019 sebesar 72,27, hal ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Capaian tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi lainnya dengan selisih angka yang cukup kecil, dengan pertumbuhan yang lambat. Angka tersebut menunjukkan bahwa para perempuan Bali dalam hal kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih di bawah dari para perempuan nasional.

**Tabel 4.1 Rumusan Permasalahan Kesenjangan**

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>AKAR PERMASALAHAN</b>
Kesenjangan Penduduk	Tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran
Kesenjangan Antar Sektor	Terjadinya perlambatan sektor pertanian dan sektor pariwisata yang berkembang pesat
Kesenjangan Antar Wilayah	Persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpangan dalam menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata
Kesenjangan Gender	Belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama pada keluarga miskin yang jumlahnya masih banyak di Provinsi Bali

## 2. Kualitas SDM

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan yang terjadi dari sisi pendidikan yaitu terkait dengan rata-rata lama sekolah. Meskipun rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 8,8 pada tahun 2019, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 9,37. Adapun penyebab rata-rata lama sekolah ini dikarenakan berkaitan dengan putus sekolah, seperti tidak melanjutkan sekolah, DO (*Drop Out*), dikeluarkan dari sekolah. Jika dilihat per Kabupaten/Kota, rata-rata lama sekolah juga belum merata. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 11,2 di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Karangasem 6,3 pada tahun 2019. Selain rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD yaitu 26,63, SMP yaitu 11,75, dan SMA yaitu 23,35. Capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan untuk SD yaitu 96,9, SMP yaitu 100, dan SMA yaitu 97,5.



**Gambar 4.4 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bali**

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2021



AKB di Provinsi Bali selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu 6,01/1000 kelahiran hidup; 4,80/1000 kelahiran hidup; 4,55/1000 kelahiran hidup; 5,04/1000 kelahiran hidup; dan 5,00/1000 kelahiran hidup. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi angka kematian bayi di Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program terkait penurunan AKB di Bali belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini perlu didorong agar tingkat AKB bisa lebih baik lagi.

Selain dari sisi pendidikan, permasalahan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali yaitu terjadinya perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif. Manusia Bali dahulu terkenal karena *jemet* (rajin, tekun), *seken*, *saja*, *beneh*, *luwih*, serta *undagi* (kreatif), sehingga menghasilkan karya-karya berbasis budaya tinggi. Perilaku manusia Bali dahulu juga bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, dengan ciri yang rendah hati seperti *tragia*, *ipil-ipil* (sedikit demi sedikit tetapi konsisten), *lascarya* (tulus dan ikhlas), *lemuh tusing elung* (luwes tetapi tidak mudah patah), *dabdab* (teratur, sopan, dan matang), loyal serta berdedikasi tinggi. Manusia Bali saat ini memiliki cenderung konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal. Selain itu, manusia Bali dahulu sangat kuat dalam kohesi sosial yang ditunjukkan dengan ikatan *menyama braya* atau solidaritas. Namun saat ini ikatan *menyama braya* cenderung melemah.

**Tabel 4.2 Rumusan Permasalahan Kualitas SDM**

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>AKAR PERMASALAHAN</b>
Rata-rata lama sekolah yang belum mencapai target dan belum merata	Masih adanya putus sekolah, seperti tidak melanjutkan sekolah, DO (Drop Out), dikeluarkan dari sekolah
Terjadinya perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenderung konsumtif, moralitas menurun, kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan local</li> <li>• ikatan <i>menyama braya</i> cenderung melemah</li> </ul>

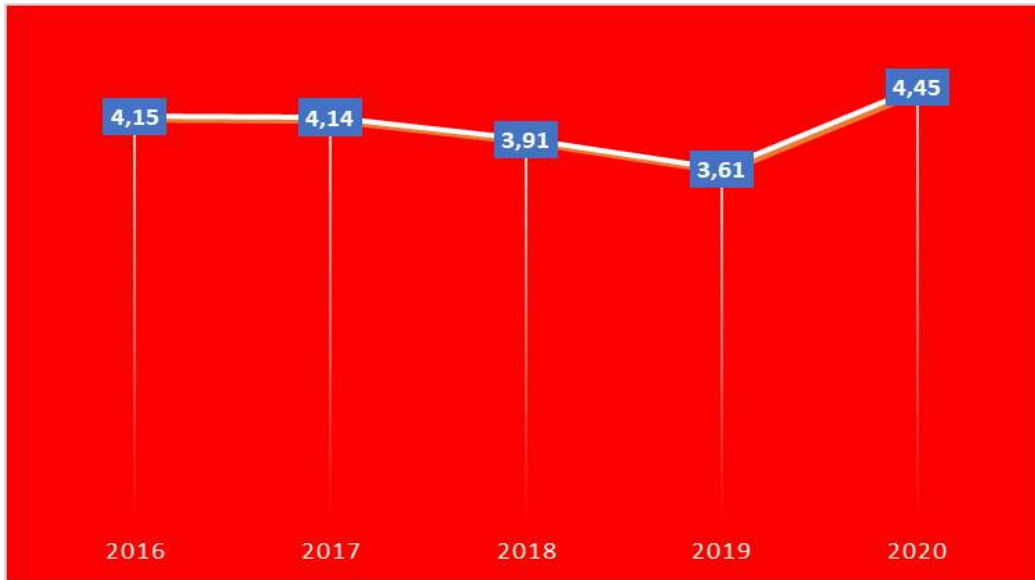
### **3. Kemiskinan dan Pengangguran**

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali cenderung menurun selama kurun waktu 2016 sampai 2019 mencapai 3,78 persen. Capaian jumlah penduduk miskin tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 3,85 persen pada tahun 2019. Jika dilihat per kabupaten/kota, hanya

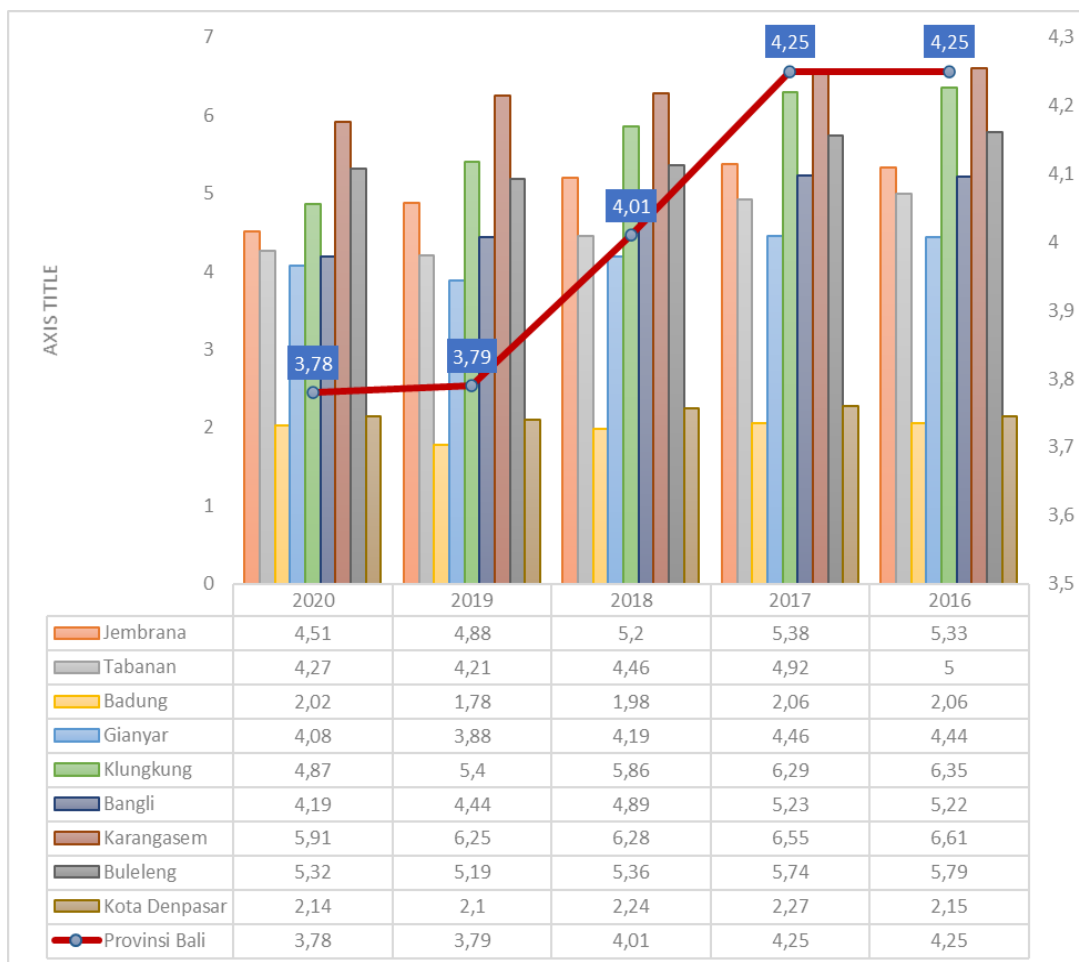
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang persentase kemiskinannya di bawah 3 persen. Persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota lainnya masih diatas 3 persen, bahkan ada sampai 5 persen yaitu di Kabupaten Karangasem. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 3.78%, naik 0.17% dibandingkan dengan posisi bulan September 2019. Tercatat pada bulan Maret jumlah penduduk miskin di Bali adalah sebesar 165,19 ribu orang. Bertambah sekitar 8,3 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2019 yang tercatat sekitar 156,91 orang. Selama periode September 2019-Maret 2020, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan dari 3.04% menjadi 3.33%. Sebaliknya persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan dari 4,86% menjadi 4,78%.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali tahun 2019 sebesar 76,68 persen. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 90 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali cenderung meningkat sebesar 1,19 persen pada tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka sempat mengalami penurunan mencapai 0,86 persen pada tahun 2018. Kecenderungan peningkatan tingkat pengangguran salah satunya disebabkan karena terjadi *mismatch* (tenaga kerja dengan lapangan kerja). Dalam hal ini, karena lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Bali hanya terpusat di Kabupaten Badung dan sebagian besar dari sektor jasa dan pariwisata. Sementara lulusan sekolah berasal dari semua jenis jurusan yang ada, seperti ekonomi, teknik, MIPA, hukum, dan lain-lain.

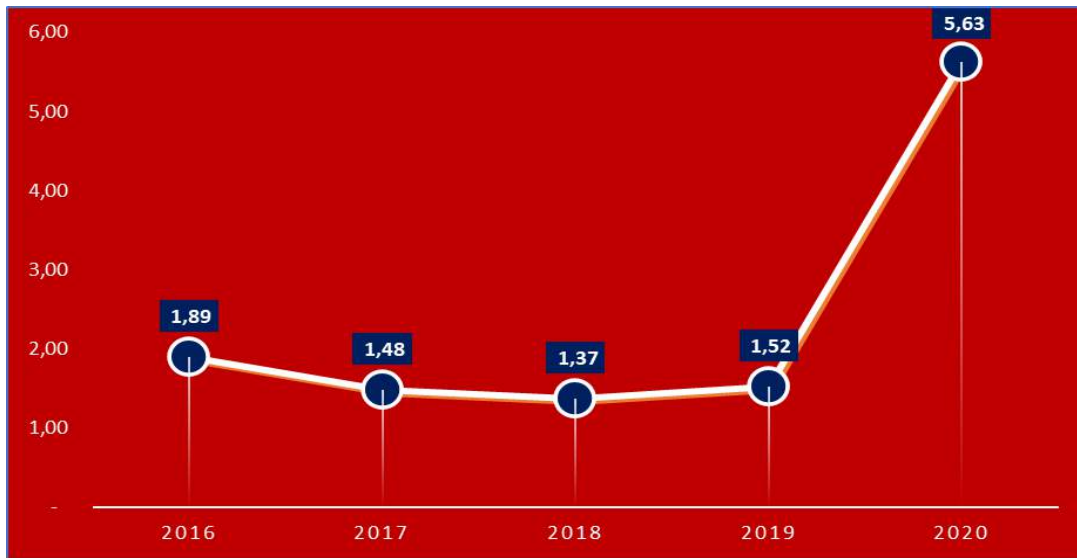
Persentase wirausaha muda masih belum terlalu besar hanya sebesar 0,81 persen selama tahun 2013 sampai 2017. Angka tersebut masih belum ideal, yaitu minimal jumlah wirausaha sebesar 2 persen. Jumlah wirausaha muda ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut karena semakin banyak wirausaha, maka peluang lapangan kerja akan semakin besar sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang terjadi.



**Gambar 4.5 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali**  
 Sumber Data: BPS Provinsi Bali, 2021



**Gambar 4.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**  
 Sumber Data: BPS Provinsi Bali, 2021



**Gambar 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali**

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, 2021

**Tabel 4.3 Rumusan Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran**

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>mismatch</i> (tenaga kerja dengan lapangan kerja)</li> <li>• Persentase wirausaha muda masih belum terlalu besar</li> </ul>

#### 4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

##### 1. Sarana dan Prasarana

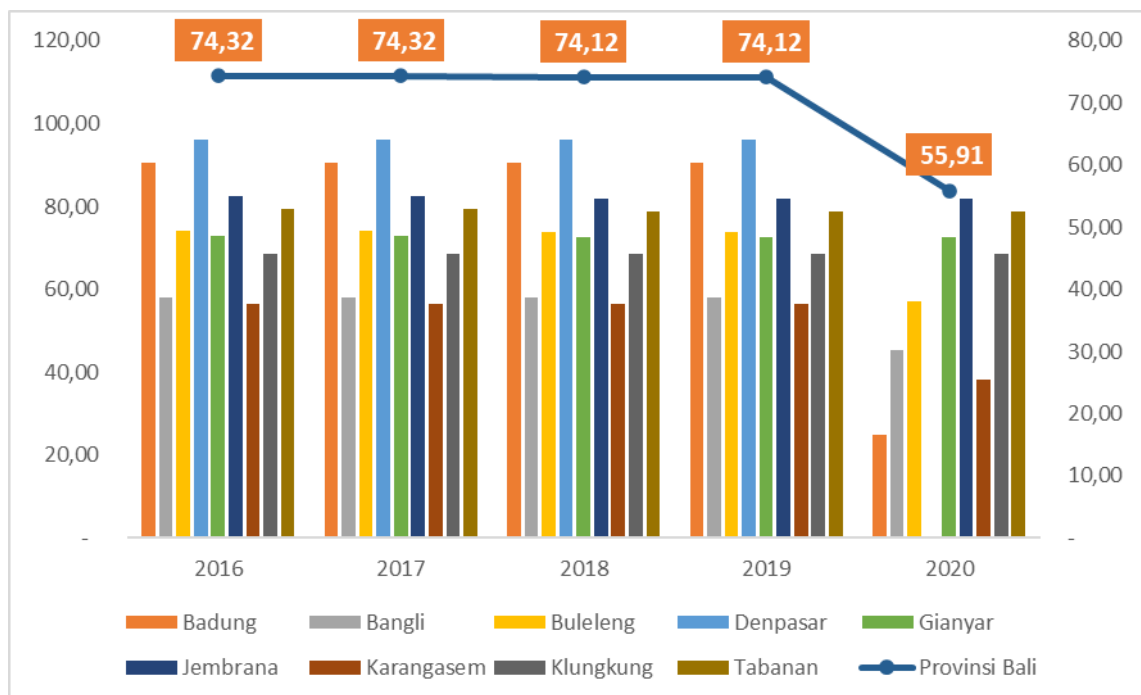
Permasalahan sarana dan prasarana yang terjadi di Provinsi Bali yaitu persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dan jumlah rumah tidak layak huni. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 84,24%. Kondisi ini mengalami penurunan dan peningkatan hingga di akhir tahun 2020 menjadi 82,65%. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas pendanaan yang mendukung peningkatan kualitas jalan dan jembatan baik dari APBD maupun APBN dipandang belum memadai ditambah lagi dengan potensi kerusakan jalan yang diakibatkan oleh volume/beban yang ditimbulkan oleh kendaraan yang melintas di jalan dan jembatan serta kontribusi penurunan kualitas jalan dan jembatan oleh penyedia layanan utilitas yang jaringannya dibawah jalan.



**Gambar 4.8 Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap**

Sumber Data: DPU Perkim Provinsi Bali, 2021

Rumah bersanitasi adalah salah satu faktor penentu kondisi kesehatan masyarakat. Rumah yang bersanitasi memberikan akses yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan yang sehat kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Berdasarkan data dari tahun 2016 sampai dengan 2020, persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Bali stagnan pada angka 74,32 dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2020 presentase rumah bersanitasi mengalami penurunan menjadi 55,91. Data Ini menunjukkan kondisi diluar target yang sudah ditetapkan dan perlu mendapatkan penanganan.



**Gambar 4.9 Persentase Rumah dengan Sanitasi di Provinsi Bali**

Sumber Data: DPU Perkim Provinsi Bali, 2021

**Tabel 4.4 Rumusan Permasalahan Sarana dan Prasarana**

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>AKAR PERMASALAHAN</b>
Terjadi penurunan persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap dan belum mencapai target	Volume/beban kendaraan yang melintas dan perbaikan utilitas yang jaringannya dibawah jalan serta keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan yang sifatnya berkala
Rasio rumah layak huni cenderung mengalami penurunan	Masih perlunya kajian komprehensif dilakukan guna memperoleh data akurat terkait penanganan di bidang perumahan (jumlah rumah tidak layak huni, ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau, kesesuaian rumah yang bercirikan adat dan budaya)

## **2. Lingkungan Hidup**

Kualitas lingkungan hidup Bali pada tahun 2016 menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 61,12 hal ini dapat dilihat dari penjumlahan indeks kualitas air sebesar 61,39, indeks kualitas udara sebesar 96,63 dan tingkat tutupan lahan sebesar 36,38. Namun capaian tahun 2019 belum dapat mencapai target Bali *Green Province* yaitu sebesar 70 yang disebabkan karena tingkat tutupan lahan yang masih relatif kecil dan hal ini akan dapat tercapai pada RPJMD Tahun 2019-2023.

Untuk itu tahun-tahun berikutnya harus bisa dioptimalkan pengembangan penanaman tanaman keanekaragaman hayati (*bio diversity*), tanaman produksi, pemantapan ruang terbuka hijau, taman kota dan pedesaan serta pengembangan kebun arboritum. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target RPJMD di bidang lingkungan hidup masih ada beberapa yang belum tuntas dapat diselesaikan seperti capaian tingkat tutupan lahan yang disebabkan karena adanya alih fungsi lahan yang masih cukup tinggi serta kondisi lahan kritis yang berbatu dan kritis air, hal ini disebabkan karena laju percepatan kematian pohon yang ditanam lebih besar dari tingkat tanaman yang hidup.

Solusi yang diambil dalam rangka meningkatkan tingkat tutupan lahan antara lain meliputi penanaman tanaman keanekaragaman hayati, pengembangan ruang terbuka hijau kota (RTHK), penanaman tanaman arboritum dan lain-lain, namun hal ini masih perlu ditingkatkan melalui kewajiban kabupaten/kota untuk memiliki tanaman keanekaragaman hayati (*bio diversity*) minimal 8 (delapan) hektar per masing-masing kabupaten/kota dan mendorong pengembangan taman-taman baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Penanganan masalah sampah juga menjadi perhatian yang penting. Jumlah timbulan sampah semakin meningkat. Pada tahun 2017 tercatat jumlah timbulan sampah adalah sebesar 12.892,12 m<sup>3</sup>/hari. Hal tersebut memerlukan penanganan yang serius, karena sampah dapat menimbulkan dampak negatif lainnya yang tidak diinginkan. Penanganan sampah di Provinsi Bali menunjukkan angka 75 persen pada tahun 2016. Meskipun menunjukkan peningkatan, namun penanganan sampah selama kurun waktu 2014 sampai 2016 belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 76 persen pada tahun 2016.



**Gambar 4.10 Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bali**

Sumber Data: DKLH Provinsi Bali, 2021

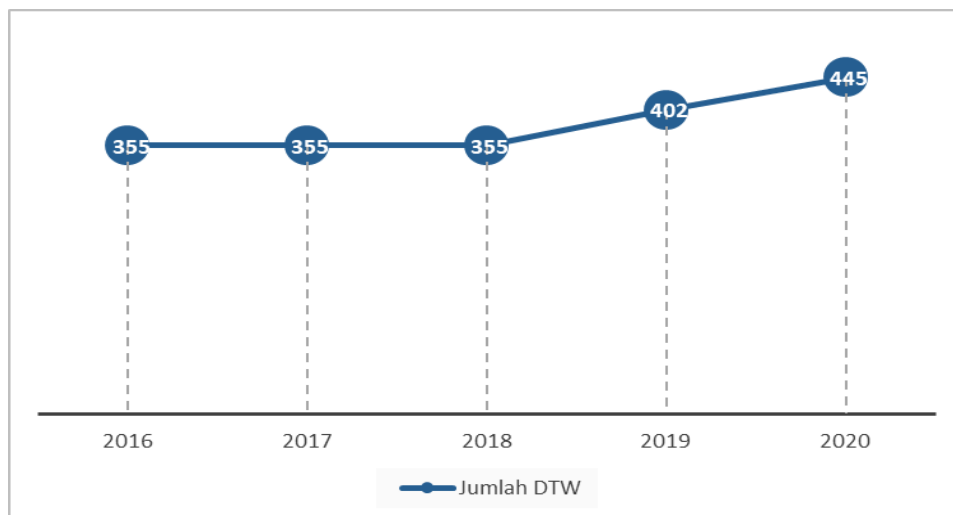
**Tabel 4.5 Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup**

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Penanganan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah penduduk dan wisatawan</li> <li>• Belum efektifnya penangan sampah melalui 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>)</li> <li>• Infrastruktur penanganan sampah yang masih kurang</li> </ul>

### 3. Pariwisata

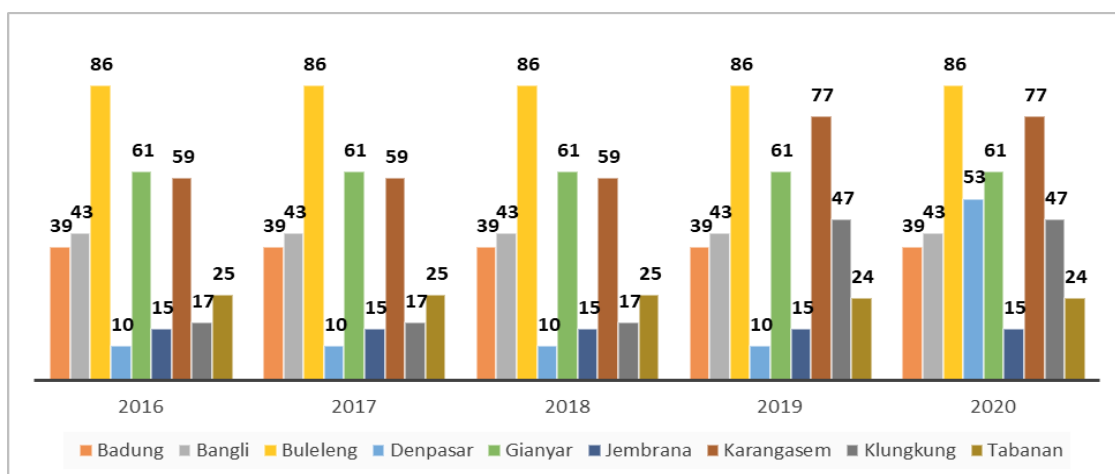
Jumlah daya tarik wisata di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Menurut grafik dibawah jumlah DTW di Provinsi Bali adalah sebanyak 445 DTW meningkat sebanyak 90 DTW jika dibandingkan tahun 2016. Jumlah DTW terbanyak menurut kabupaten/kota

pada tahun 2020 yaitu ada di Kabupaten Buleleng dengan 86 DTW dan yang terendah adalah di Kabupaten Jembrana yaitu 15 DTW.



**Gambar 4.11 Jumlah DTW di Provinsi Bali**

Sumber Data: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021



**Gambar 4.12 Jumlah DTW Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

Sumber Data: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021

Jumlah akomodasi pariwisata di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 tercatat jumlah akomodasi di Provinsi Bali adalah sebanyak 4.306 yang terbagi menjadi hotel bintang sebanyak 217, hotel melati sebanyak 1.511 dan pondok wisata sebanyak 2.578. Pada tahun 2020 jumlah akomodasi di Provinsi Bali meningkat menjadi 5.610 yang terdiri dari hotel bintang sebanyak 2266, hotel melati sebanyak 2.097 dan pondok wisata sebanyak 3.247. Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah akomodasi sebanyak 1.304 selama kurun waktu 5 tahun. Peningkatan terbesar adalah pada pondok wisata yaitu meningkat sebanyak 669.



**Tabel 4.6 Rumusan Permasalahan Pariwisata**

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>AKAR PERMASALAHAN</b>
Jumlah DTW yang stagnan dan akomodasi yang belum merata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak meratanya DTW alam karena faktor bentang alam</li><li>• Belum optimalnya menggali potensi DTW yang ada</li></ul>

#### **4. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan pembenahan terkait dengan birokrasi dan layanan umum. Meskipun sudah mulai ada perubahan, namun masih perlu dioptimalkan. Perlu adanya pengembangan ASN agar kualitas ASN dalam menjalankan tugas dapat lebih optimal. Berdasarkan data, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal menunjukkan penurunan dari 80 persen pada tahun 2014 menjadi 3 persen pada tahun 2017.

Selain itu, permasalahan lainnya yang belum optimal yaitu tindak lanjut temuan di pengawasan Provinsi Bali. Persentase tindak lanjut temuan di pengawasan Provinsi Bali cenderung mengalami penurunan dari 51 pada tahun 2013 menjadi 16 pada tahun 2015. Namun, sudah mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 menjadi 27.

**Tabel 4.7 Rumusan Permasalahan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>AKAR PERMASALAHAN</b>
Perlu peningkatan kapasitas dan kualitas ASN dalam menjalankan tugas	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami penurunan

#### **5. Bencana dan Perubahan Iklim**

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung berbagai upaya dalam rangka menanggulangi perubahan iklim. Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan *UNFCCC COP 21* tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan menjadi penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah baseline emisi GRK tahun 2030.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam PRK adalah Intensitas Emisi. Intensitas Emisi (IE) didefinisikan sebagai jumlah emisi Gas Rumah Kaca (*CO<sub>2</sub>e*) per satuan output ekonomi (miliar rupiah PDB). Perilaku Intensitas Emisi dalam kurun waktu tertentu dapat menggambarkan relasi kecepatan peningkatan emisi terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menurunkan emisi gas dan intensitas emisi rumah kaca dinyatakan melalui Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon tahun 2020. Berdasarkan RPRKD, Provinsi Bali menargetkan penurunan emisi sebesar 10,16% dari kondisi tanpa aksi (*Business as Usual*) pada Tahun 2021, yang akan dicapai melalui kegiatan pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, pengelolaan limbah domestik dan kelautan dan pesisir.

Pada sektor lahan, kegiatan pembangunan rendah karbon adalah rehabilitasi lahan, pertanian *organic*. Pada sektor energy, kegiatan pembangunan rendah karbon yang dilakukan adalah Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta Efisiensi dan Konservasi Energi. Pada sektor pengelolaan limbah adalah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Untuk sektor kelautan dan pesisir adalah Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

Sistem peringatan dini adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut dengan tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko terkena bencana. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali yang baru berdiri hanya memiliki sistem peringatan dini yang jumlahnya belum banyak.

Hal yang sama juga terjadi pada jumlah transportasi tanggap darurat yang jumlahnya belum banyak dan untuk transportasi udara tanggap darurat belum ada. Untuk jumlah peralatan komunikasi, hanya memiliki 20 HT pada tahun 2017. Radio pemancar dan peralatan komunikasi lainnya pada tahun 2017 belum tersedia. Jumlah peralatan kesehatan, peralatan air bersih, MCK mobil, peralatan berat, peralatan hunian sementara, dan peralatan kebakaran belum tersedia pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2016 telah terdapat 1 buah tandu dan 3 tabung oksigen, dan 1 unit mobil tangki air.

Bencana alam belakangan ini sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, gempa bumi, puting beliung, erupsi gunung berapi, arus laut dan gelombang tinggi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selain itu Provinsi Bali juga rawan untuk terjadinya tsunami. Pada tahun 2016, kejadian bencana yang jumlahnya diatas 100 kejadian yaitu pohon tumbang dengan 426 kejadian, kebakaran sebesar 345 kejadian, dan tanah longsong sebanyak 176 kejadian. Di masa yang akan datang, perubahan iklim akan mempengaruhi terjadinya bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selain bencana alam pada tahun 2020 terjadi bencana non alam biologis Covid-19 yang menyebabkan dampak yang sangat luar biasa baik pada sisi kesehatan masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi. Sampai saat ini sudah tercatat ada sebanyak 1,2 Juta kasus aktif Covid-19 dan sebanyak 1 juta orang sembuh dan 34 ribu dinyatakan meninggal. Perkembangan kasus Covid-19 yang belum menunjukkan tendensi untuk menurun menjadi ancaman besar dan isu yang harus segera ditangani karena mempengaruhi semua sektor kehidupan di Indonesia. Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata dunia berdampak luar biasa karena hampir 80% sektor ekonomi berasal dari pariwisata.

**Tabel 4.8 Rumusan Permasalahan Bencana dan Perubahan Iklim**

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>AKAR PERMASALAHAN</b>
Belum optimalnya penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem peringatan dini dan sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas</li> </ul>
Penanggulangan bencana biologis Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terputusnya mata rantai Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kasus aktif</li> </ul>

## 6. Kebudayaan Bali

Kebudayaan Bali adalah aset yang sangat penting dan berharga, sehingga pembangunan kebudayaan Bali tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Akan tetapi, pembangunan kebudayaan Bali saat ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan karena politik legislasi dan politik anggaran yang kurang memadai. Budaya lokal tidak mengalami kemajuan yang berarti kecuali hanya untuk sarana komoditas ekonomi dan pariwisata saja. Selain itu, arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan kurang kuat. Permasalahan lainnya adalah eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas, baik itu kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, dan pranata budaya.

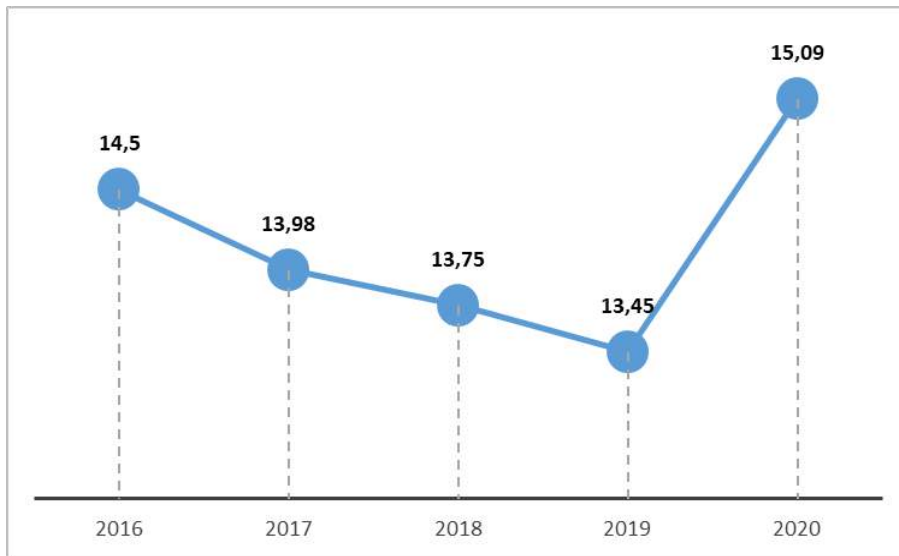
**Tabel 4.9 Rumusan Permasalahan Kebudayaan Bali**

<b>PERMASALAHAN</b>	<b>AKAR PERMASALAHAN</b>
Terjadinya penurunan eksistensi kebudayaan Bali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Politik legislasi dan politik anggaran kurang memadai</li><li>• Arah kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan kurang kuat</li></ul>

### 4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

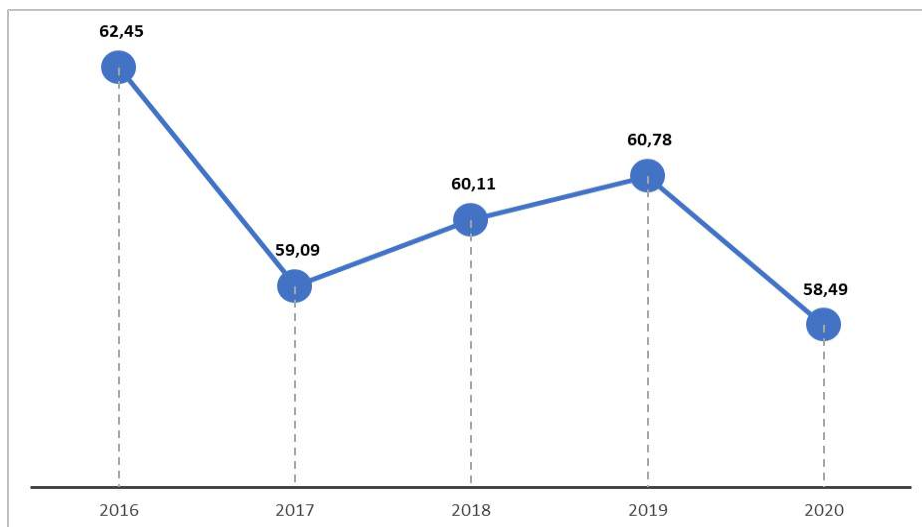
#### 1. Rendahnya Produktivitas

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar 14,5% dan cenderung menurun menjadi 13,45% pada tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020 meningkat lagi menjadi 15,09%. Secara keseluruhan terjadi peningkatan kontribusi PDRB sektor pertanian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 0,59%. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mulai memberikan harapan untuk menjadi sektor yang bisa diandalkan oleh masyarakat Bali. Hal ini tidak terlepas dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor utama di Bali tidak berkembang sama sekali.



**Gambar 4.13 Produktivitas Bahan Pangan Utama di Provinsi Bali**

Sumber Data: Distan Pangan Provinsi Bali, 2021



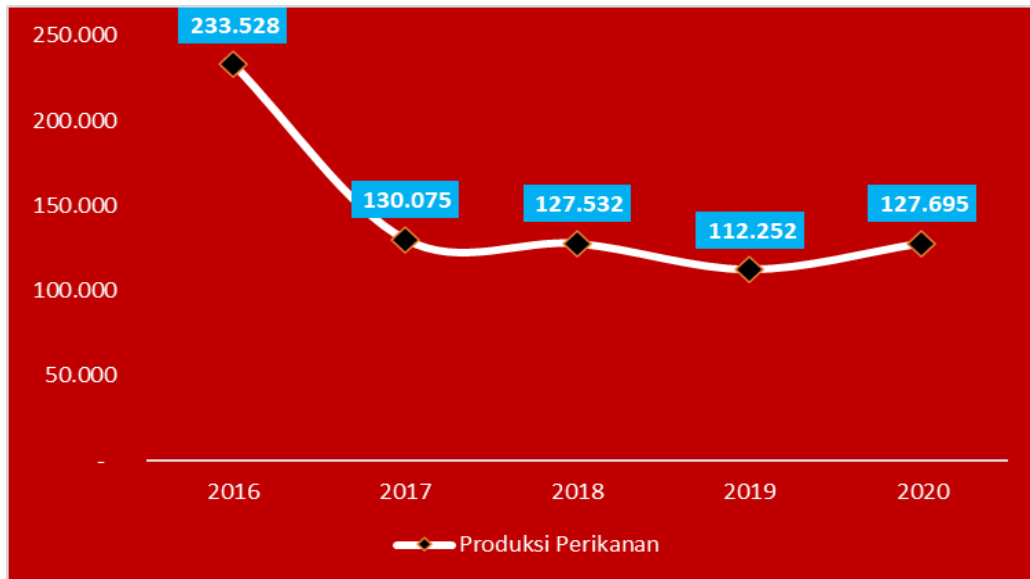
**Gambar 4.14 Ketersediaan Pangan Utama di Provinsi Bali**

Sumber Data: Distan Pangan Provinsi Bali, 2021

Produktivitas padi cenderung menurun dari tahun 2016 sampai 2020. Tercatat pada tahun 2016 jumlah produksi padi mencapai 62,45 ton per hektar selanjutnya pada tahun 2017 turun menjadi 59,09 ton per hektar. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut sebesar 60,11 dan 60,78 ton per hektar produktifitas padi di Provinsi Bali akhirnya mengalami penurunan terbesar justru di tahun 2020 yaitu 58,49 ton per hektar.

Selain penurunan produktivitas tanaman pangan utama, produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 118.241,05 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 160.378,60 ton. Jumlah produksi kelautan dan

perikan pada tahun 2013 sebesar 263.970,45 ton dan mengalami penurunan menjadi 220.706,45 ton pada tahun 2014. Namun, mengalami peningkatan sampai dengan 229.403,58 ton pada tahun 2016 dan kembali menurun menjadi 113.734,46 ton pada tahun 2017.



**Gambar 4.15 Produksi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali**

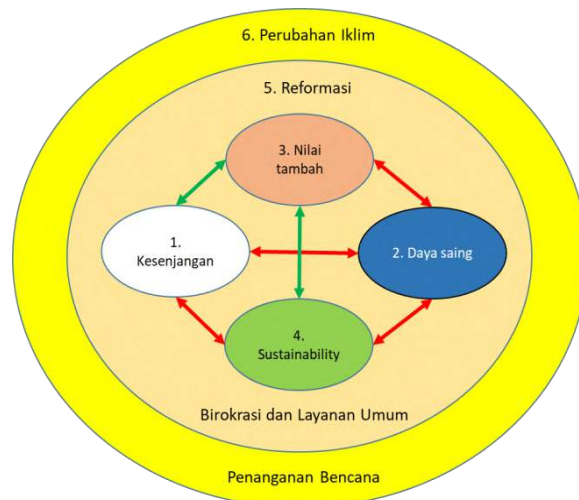
Sumber Data: DKP Provinsi Bali, 2021

**Tabel 4. 10 Rumusan Permasalahan Rendahnya Produktivitas**

PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
Penurunan produktivitas tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan luas lahan pertanian</li> <li>• Sektor pertanian mulai ditinggalkan oleh petani</li> <li>• Pengelolaan pertanian hingga saat ini masih dikelola secara tradisional sehingga hasil produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim</li> </ul>
Penurunan jumlah produksi kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya jumlah kapal yang digunakan sebagai sarana menangkap ikan</li> <li>• Adanya kebijakan tidak ada perpanjangan moratorium izin usaha kapal eks. Asing</li> <li>• Berkurangnya kapal-kapal bergroup dan adanya peraturan terkait pelarangan pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ke kapal pengangkut</li> <li>• Armada lokal tidak memiliki marka ikan yang bisa langsung digunakan menangkap dan menyimpan ikan</li> </ul>

## 4.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada, dan melihat Bali sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia serta sebagai etalase bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan. Terdapat enam rumusan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Enam isu strategis yang dimaksud, yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, *sustainability*/keberlangsungan, reformasi birokrasi dan layanan umum, serta perubahan iklim dan penanganan bencana.

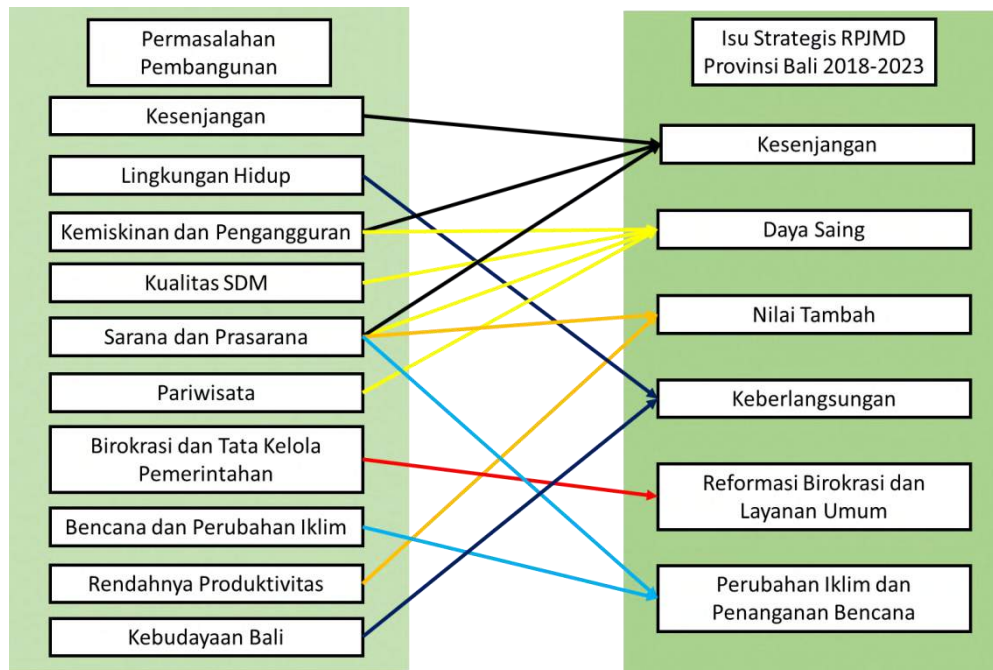


**Gambar 4.16 Isu Strategis Perubahan RPJMD  
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023**

Sumber Data: Analisis, 2021

Berdasarkan gambar isu strategis, terdapat empat isu strategis di tataran program Pemerintah Provinsi Bali yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Empat isu strategis yang dimaksud yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, dan keberlangsungan (*sustainability*). Keempat isu strategis tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nantinya program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan keempat isu strategis tersebut tidak dapat dilakukan terpisah harus saling terintegrasi melalui pendekatan THIS (*Targetted, Holistic, Integrated, dan Spatial*). Dalam hal ini, *targetted* berarti harus ada target yang dapat diukur, dapat dicapai, dan waktu pencapaiannya jelas. *Holistic* dan *integrated* berarti program yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari hulu sampai hilir maupun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, *spatial* berarti adanya detail lokasi dan pemanfaatan tata ruangnya. Untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keempat isu strategis tersebut, sangat tergantung dari kapasitas dan kualitas dari birokrasi. Sehingga perlu adanya

reformasi birokrasi dan layanan umum untuk menunjang pelaksanaannya agar keempat isu strategis tersebut dapat ditangani dengan baik. Selain itu, perlu juga memperhatikan faktor eksternal yaitu kondisi geografis Provinsi Bali dan perubahan iklim yang menyebabkan besarnya risiko bencana yang dapat terjadi. Faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi keempat isu strategis tersebut.



**Gambar 4.17 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2018-2013**

Enam isu strategis tersebut terkait dengan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran, serta sarana dan prasarana sangat terkait dengan isu strategis kesenjangan. Sedangkan isu strategis daya saing terkait dengan permasalahan pembangunan kemiskinan dan pengangguran, kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta pariwisata. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta rendahnya produktivitas terkait dengan isu strategis nilai tambah. Permasalahan pembangunan lingkungan hidup dan kebudayaan Bali terkait erat dengan isu strategis keberlangsungan. Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang menjadi permasalahan pembangunan sangat terkait dengan isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta bencana dan perubahan iklim memiliki keterkaitan dengan isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana.



Isu strategis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, namun berkaitan juga dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Permasalahan yang dimaksud yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Isu strategis keberlangsungan sangat terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana erat kaitannya dengan permasalahan alam Bali. Sedangkan isu strategis daya saing sangat terkait dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis nilai tambah terkait dengan permasalahan manusia dan kebudayaan Bali. Isu strategis kesenjangan erat kaitannya dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis yang terakhir yaitu reformasi birokrasi dan layanan umum terkait dengan isu strategis yang lainnya dan terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Enam isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya telah sinkron dengan lima prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali. Lima prioritas dan sasaran pembangunan tersebut, yaitu (1) pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar, (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, (3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, (4) menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, (5) peningkatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berkualitas. Keterkaitan isu strategis dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.11 Relasi Isu Strategis Dengan Prioritas Dan Sasaran  
Pembangunan Provinsi Bali**

<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>LINGKUP</b>	<b>PRIORITAS</b>	<b>PENDUKUNG</b>
<b>Kesenjangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antar Wilayah (utara vs selatan)</li> <li>• Antar Sektor (pariwisata vs pertanian)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>
<b>Nilai Tambah &amp; Produktivitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas produksi, budaya dan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>
<b>Daya Saing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinasi &amp; atraksi wisata</li> <li>• Produk lokal (<i>Made in Bali</i>)</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>
<b>Sustainability/ Keberlangsungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Dukung Lingkungan</li> <li>• Ketahanan Budaya</li> <li>• Kualitas Sumber Daya Manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>

<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>LINGKUP</b>	<b>PRIORITAS</b>	<b>PENDUKUNG</b>
<b>Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi Birokrasi</li> <li>• Administrasi Publik</li> <li>• Tata Kelola</li> <li>• Ketertiban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>	
<b>Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitigasi dampak perubahan iklim</li> <li>• Penataan lingkungan</li> <li>• Kebencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan</li> <li>• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya</li> <li>• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif</li> <li>• peningkatan pelayanan dasar</li> </ul>

#### **4.2.1 Kesenjangan**

Isu strategis kesenjangan terkait dengan kesenjangan antar wilayah (utara dengan selatan) dan antar sektor (pariwisata dengan pertanian). Isu strategis kesenjangan ini juga telah sinkron dengan prioritas pembangunan, yaitu pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, peningkatan pelayanan dasar, pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif. Isu strategis kesenjangan ini meliputi:

- Kesenjangan kontribusi antar sektor dalam struktur ekonomi Bali,
- belum optimalnya kapasitas infrastruktur dan transportasi darat,
- belum optimalnya tertib pengaturan, pelaksanaan, dan pemanfaatan ruang,
- masih adanya backlog kepemilikan rumah,
- belum optimalnya layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan pemenuhan hak pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas,
- belum optimalnya pelayanan kesehatan paripurna,
- kesenjangan rata-rata lama sekolah dan pendapatan antara laki-laki dan perempuan,
- kesenjangan antar wilayah desa dan kota,
- belum memadainya infrastruktur desa, masih tingginya ketimpangan penduduk antar kabupaten/kota,

- ketimpangan pembangunan pariwisata, serta belum meratanya sebaran investasi antar wilayah.

#### **4.2.2 Daya Saing**

Isu strategis daya saing ini melingkupi destinasi & atraksi wisata, produk lokal (*made in Bali*), sumber daya manusia, dan investasi. Isu strategis daya saing terkait dengan menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, dan peningkatan pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Bali. Isu strategis daya saing yang muncul antara lain:

- rendahnya kualitas sumber daya manusia,
- manajemen dan pemasaran yang belum optimal,
- belum optimalnya akses permodalan dan implementasi teknologi,
- rendahnya nilai ekspor,
- lemahnya daya saing produk,
- masih adanya tenaga kerja yang belum tersertifikasi dan terjadi mismatch (tenaga kerja dengan lapangan kerja),
- belum optimalnya implementasi pendidikan vokasi,
- jaminan kualitas pelayanan pendidikan masih rendah,
- belum optimalnya penanganan kesehatan,
- kurangnya minat kerja di sektor informal,
- kurangnya pemahaman sejarah dan pelestarian adat,
- belum optimalnya peran lembaga adat tradisional.

#### **4.2.3 Nilai Tambah**

Lingkup isu strategis nilai tambah adalah produktifitas produksi, budaya, dan lahan. Isu strategis ini juga terkait dengan prioritas pembangunan diantaranya pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya. Isu strategis nilai tambah yang teridentifikasi yaitu:

- berkurangnya luasan dan kualitas lahan serta air untuk pertanian,
- belum optimalnya produktivitas ternak,
- menurunnya kualitas ekosistem perairan umum, pesisir, dan laut,
- kurangnya pemahaman sejarah dan pelestarian adat tradisi,
- belum optimalnya peran lembaga tradisional.

#### **4.2.4 Keberlangsungan/ Sustainability**

Isu strategis keberlangsungan memiliki lingkup daya dukung lingkungan, ketahanan budaya, dan kualitas sumber daya manusia. Prioritas isu strategis keberlangsungan yang sesuai dengan prioritas pembangunan yaitu pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, peningkatan pelayanan dasar. Isu strategis keberlangsungan yang muncul antara lain:

- belum optimalnya pengelolaan sampah,
- menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air,
- meningkatnya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas tanah,
- menurunnya sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati,
- menurunnya kualitas udara, sumber daya pesisir dan lautan,
- berkembangnya bangunan baru yang tidak sesuai dengan kearifan lokal,
- belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan,
- berkurangnya penggunaan bahasa dan sastra daerah,
- meningkatnya penggunaan air tanah,
- masih rendahnya kualitas penduduk,
- belum optimalnya penanganan stunting,
- belum optimalnya dan kurangnya pemahaman terhadap seni dan cagar budaya serta museum,
- meningkatnya penetrasi pengaruh negatif pendatang terhadap luntarnya budaya,
- rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan.

#### **4.2.5 Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum**

Lingkup isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum yaitu reformasi birokrasi, administrasi publik, tata kelola dan ketertiban. Prioritas pembangunan yang menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi dan layanan umum adalah menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya, birokrasi dan tata kelola yang berkualitas. Isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum yang muncul antara lain:

- belum optimalnya penyebaran informasi program dan kebijakan pemerintah,

- tuntutan akan keterbukaan informasi publik dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,
- tuntutan penggunaan persandian untuk keamanan data dan informasi,
- tingginya urbanisasi berpotensi terhadap gangguan ketertiban dan keamanan,
- masih lemahnya penegakan perda,
- masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat,
- kurangnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia,
- kemajuan teknologi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban dan ketentraman,
- masih tingginya Unmeet need,
- belum optimalnya kualitas rancangan produk hukum daerah,
- rendahnya tata kelola dan jangkauan pelayanan BUMD serta kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.2.6 Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana**

Lingkup isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana yaitu mitigasi dampak perubahan iklim, penataan lingkungan, kebencanaan. Adapun yang menjadi prioritas yang sesuai dengan prioritas pembangunan dalam isu strategis ini yaitu pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. Isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana yang muncul yaitu:

- belum optimalnya rencana pembangunan yang mengedepankan konsep pembangunan ramah karbon
- belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana disetiap fase,
- kondisi geologis Pulau Bali yang rawan terhadap bencana,
- masih rendahnya kapasitas, ketangguhan, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana,
- kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi.
- bencana non alam pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata.

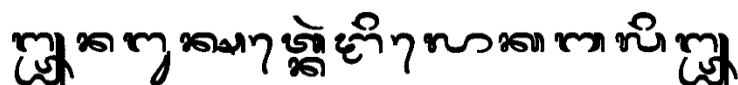
## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini akan membahas terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2018-2023. Visi adalah gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023) yang nantinya diwujudkan ke dalam misi. Penyusunan visi dan misi Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

#### **5.1 Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:



**“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”**

**melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana  
menuju BALI ERA BARU**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh,

terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang bisa disebut dengan Genuine Bali.

Sebagaimana halnya manusia biasa, Krama Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3(tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.



Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kebudayaan Bali harus ditempatkan sebagai hulu pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara konprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bali. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi Krama Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya: *Atita* (masa lalu), *Nagata* (masa kini), dan *Wartamana* (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :

- a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
- b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Bali:

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri Krama Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas Krama Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas

Krama Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
- c. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan.

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi Krama Bali.
- 5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan Krama Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- 1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.

- 2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- 3) Peningkatan daya saing Krama Bali.
- 4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
- 5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif Krama Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan Krama Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

## 5.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi ***“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”*** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, maka ditempuh dengan 22 misi sebagai berikut:

- Misi 1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali.**
- Misi 2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani.**
- Misi 3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan *Krama Bali* Berbasis Kecamatan.**
- Misi 4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil, Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.**
- Misi 5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di *Desa Pakraman/Desa Adat*.**

- Misi 6.** Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas: Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Krama Bali*.
- Misi 7.** Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan *Krama Bali* Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.
- Misi 8.** Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
- Misi 9.** Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komprehensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi *Krama Bali* Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
- Misi 10.** Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya *Krama Bali*.
- Misi 11.** Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama Bali* Secara *Sakala* Dan *Niskala* Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat *Sad Kertih* Yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih*.
- Misi 12.** Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi *Desa Pakraman/Desa Adat* Dalam Menyelenggarakan Kehidupan *Krama Bali* Yang Meliputi *Parahyangan, Pawongan, Dan Palemahan*.
- Misi 13.** Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.
- Misi 14.** Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Baru.
- Misi 15.** Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan Secara Konprehensif.

- Misi 16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kabupaten/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.**
- Misi 17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (*Branding* Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian *Krama* Bali.**
- Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik di Bali.**
- Misi 19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan *Krama* Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.**
- Misi 20. Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.**
- Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.**
- Misi 22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.**

### **5.3 Paradigma Pembangunan Bali**

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa

yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

### **5.3.1 Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala dan Niskala**

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

### **5.3.2 Pembangunan Bersifat Holistik**

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

### **5.3.3 Pembangunan Bersifat Integratif**

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarnya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

#### **5.3.4 Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis**

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

#### **5.3.5 Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural**

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

#### **5.3.6 Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah**

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

#### **5.3.7 Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali**

Pembangunan Bali dalam berbagai sector, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin



Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

#### **5.4 Transformasi Ekonomi Bali**

Perekonomian Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata menyebabkan sangat rentan terhadap guncangan kondisi global maupun domestik. Keterpurukan ekonomi Bali akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat selama masa pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas perekonomian melemah dan sulit untuk bangkit karena struktur ekonomi Bali yang kurang tangguh, sehingga memerlukan intervensi pemerintah untuk segera menata kembali melalui transformasi ekonomi.

Dampak pandemi Covid-19 memberikan momentum untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki, memperkuat dan mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi Bali yang berlandaskan filosofi Alam, Krama dan Budaya Bali. Pemulihan ekonomi dalam jangka pendek diarahkan terutama untuk mengembalikan kegiatan ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memulihkan kesejahteraan masyarakat Bali. Transformasi ekonomi yang bersifat jangka menengah-panjang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya berbasis kearifan lokal, yang menekankan pada keharmonisan alam, krama dan budaya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, ekonomi Bali akan tumbuh lebih tangguh (berdikari, bernilai tambah tinggi, berdaya saing dan berdaya tahan), sekaligus membangun ekonomi Bali menjadi lebih hijau dan berkelanjutan.

Sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan dan perikanan, dan sektor industri kerajinan rakyat di Bali memiliki potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Pengembangan perekonomian yang bersumber dari keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal meliputi: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali sebagai sumber daya potensial pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan industri kerajinan rakyat.

Pembangunan pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan sumber daya kelautan harus ditata dan dikelola dengan baik dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan potensi wilayah. Bali harus mencapai kedaulatan pangan dalam upaya pemenuhan jumlah dan kualitas yang memadai untuk

kebutuhan Krama Bali maupun wisatawan, dan berorientasi ekspor. Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan sudah seharusnya menerapkan sistem pertanian organik menuju Bali Pulau Organik.

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi digital diarahkan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif dan digital sesuai dengan potensi Krama Bali secara efektif, efisien, produktif, serta bernilai tambah.

Penguatan sektor pariwisata sebagai sumber tambahan (bonus) dalam perekonomian Bali. Sektor pariwisata harus berperan sebagai penarik (lokomotif) untuk Bergeraknya sektor pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kerajinan rakyat sehingga secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali. Demikian pula, Industri Branding Bali harus dikembangkan dari hulu sampai ke hilir sejalan dengan Ekonomi Kreatif berbasis budaya Branding Bali serta Ekonomi digital. Pengembangan dan penguatan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi terutama Koperasi Produksi serta Lembaga Perekonomian Adat dalam pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat, juga harus dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di perdesaan.

Pembangunan/pengembangan perekonomian Bali sesuai dengan potensi wilayah dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar wilayah se-Bali, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kebijakan transformasi ekonomi Bali diperkuat oleh konsep Ekonomi Kerthi Bali, yaitu konsep ekonomi yang komprehensif untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi. Enam Sektor Unggulan Ekonomi Kerthi Bali sebagai Pilar Perekonomian Bali, meliputi: 1) Sektor Pertanian; 2) Sektor Kelautan/Perikanan; 3) Sektor Industri; 4) Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata.

Transformasi ekonomi Bali adalah proses pembangunan ekonomi dalam jangka menengah-panjang, yang mencakup enam strategi besar dan diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan, yaitu:

1. Bali Pintar dan Sehat, diarahkan melalui transformasi pembangunan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas

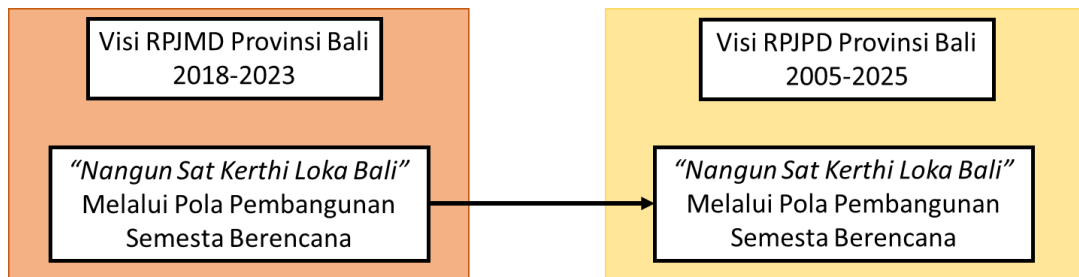
Sumber Daya Manusia (SDM), dengan mewujudkan SDM sehat bergizi, SDM cerdas berkarakter kuat dan SDM yang kreatif dan inovatif.

2. Bali Produktif, diarahkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah, modernisasi pertanian, modernisasi kelautan dan perikanan, peningkatan industrialisasi, penguatan sektor pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM.
3. Bali Hijau, melalui penerapan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menurunkan *Green House Gases* (GHG) secara lebih cepat, serta meningkatkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi hijau.
4. Bali Terintegrasi, melalui peningkatan sarana dan prasarana konektivitas, pengembangan Bali sebagai hub logistik udara, penguatan kerjasama Bali-Nusra, serta pengembangan skema inovatif pembiayaan infrastruktur.
5. *Bali Smart Island*, melalui penguatan infrastruktur digital (100% *coverage* dan berkualitas), dapat mewujudkan peningkatan SDM trampil digital, pengembangan berbagai pelayanan publik dan swasta secara digital, serta digitisasi perekonomian Bali antara lain *start up* UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk pengembangan layanan wiasta digital.
6. Bali Kondusif, melalui penguatan *enabler* atau faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi, meliputi: aspek keuangan daerah, aspek pembiayaan usaha, aspek kemudahan berusaha, aspek reformasi birokrasi, serta perbaikan tata Kelola dan kelembagaan.

### **5.5 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025**

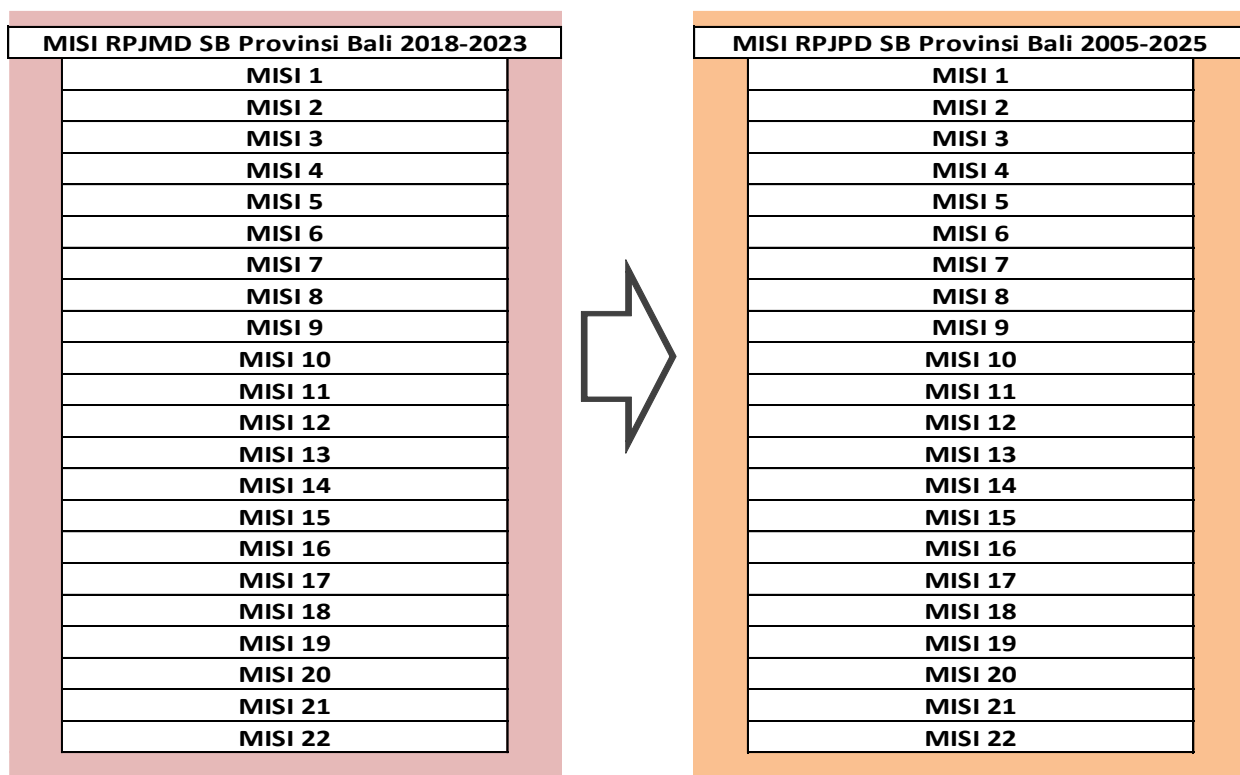
Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 memiliki kesamaan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2023. Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 terkait dalam hal mendukung visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2023. Adapun visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 yaitu **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan

Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.



**Gambar 5.1 Keterkaitan Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025**

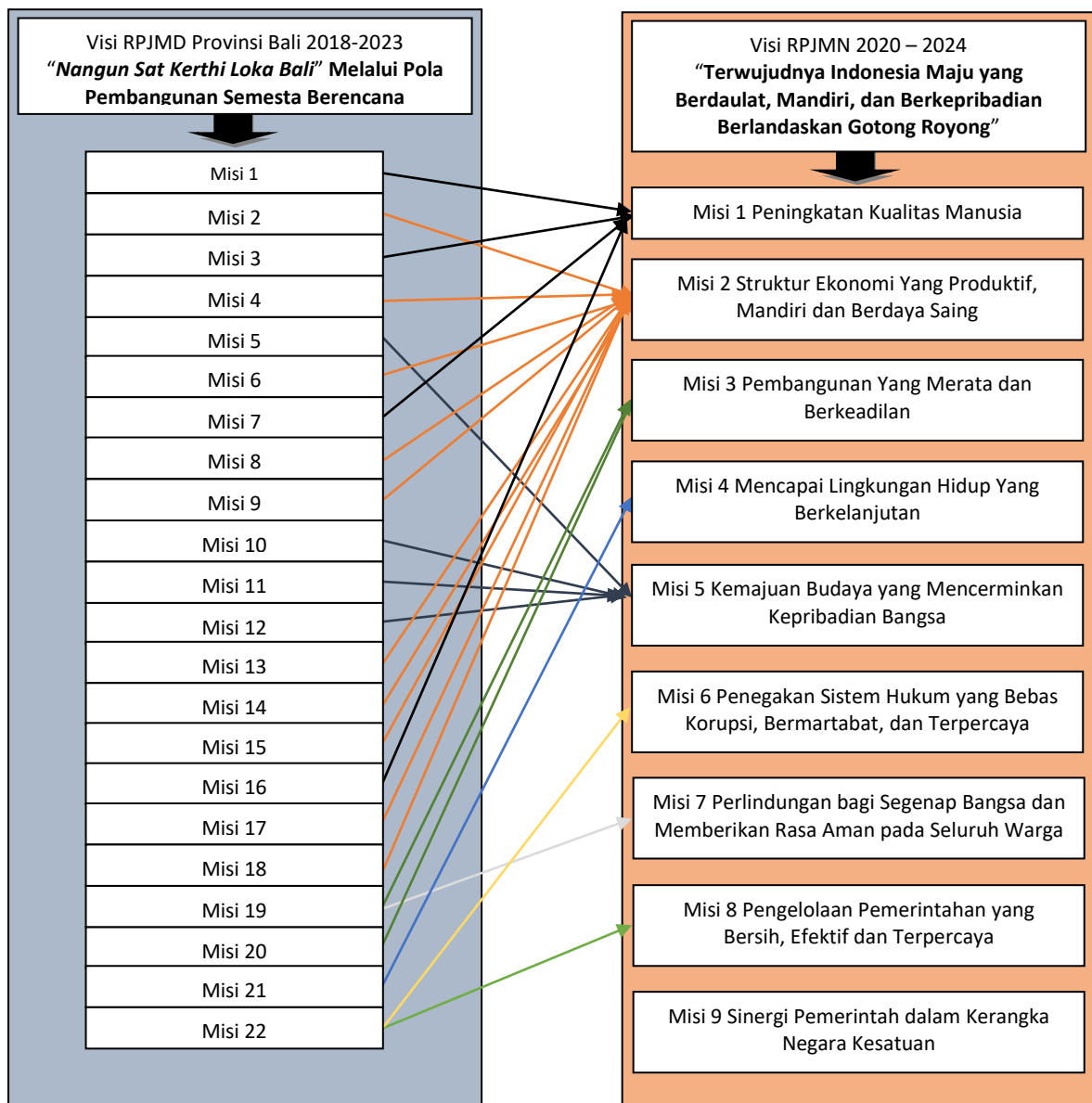
Terdapat dua puluh dua misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Dua puluh dua misi tersebut sama dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025.



**Gambar 5.2 Keterkaitan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025**

## **5.6 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024**

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 yaitu **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**. Visi dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 sangat terkait dengan visi RPJMN 2020-2024. Hal tersebut karena makna yang tersirat dalam visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 yaitu menggunakan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Prinsip Trisakti Bung Karno tersebut terkait dan selaras dengan yang ada dalam visi RPJMN 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam mewujudkan visi RPJMN 2020-2024 ditempuh melalui 7 misi pembangunan. Dua puluh dua misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 terkait dengan Ketujuh misi tersebut. Selain visi dan misi, dalam RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 9 agenda prioritas atau yang disebut dengan Nawa Cita. Misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 juga memiliki keterkaitan dengan 9 agenda prioritas tersebut. Keterkaitan visi misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 dengan visi misi dan agenda prioritas RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 5.3 Keterkaitan Visi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2020-2024**

## 5.7 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan yang dalam hal ini yaitu lima tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran adalah wujud operasional dari visi dan misi. Dalam menyusun tujuan dan sasaran tetap memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Selain itu, tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu lima tahun. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama lima tahun mendatang sebagai berikut:

**1. Misi 1 : Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali**

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak

Sasaran : 1. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali  
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali  
3. Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni  
4. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan

**2. Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani.**

Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian

Sasaran : 1. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal  
2. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali  
3. Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali

**3 Misi 3 : Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali Berbasis Kecamatan.**

Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali

Sasaran : 1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali  
2. Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali  
3. Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat

**4 Misi 4 : Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.**

Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas

- Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas  
2. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun
- 5 Misi 5 : Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di Desa Adat/Desa Pakraman.**
- Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal
- Sasaran : Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman
- 6 Misi 6 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas; Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krama Bali**
- Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi
- Sasaran : Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali
- 7 Misi 7 : Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.**
- Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali
- Sasaran : Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali
- 8 Misi 8 : Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.**
- Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing



- Sasaran : 1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja  
2. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri
- 9 Misi 9 : Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, dan Terintegrasi Bagi Krama Bali Yang Bekerja di Dalam dan di Luar Negeri.**
- Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan
- Sasaran : Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
- 10 Misi 10 : Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya Krama Bali.**
- Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali
- Sasaran : Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.
- 11 Misi 11 : Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sat Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih.**
- Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
- Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
- 12 Misi 12 : Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali Yang Meliputi Parhyangan, Pawongan, Dan Palemahan.**
- Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi
- Sasaran : Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak

**13 Misi 13 : Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kab/Kota Se-Bali.**

Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas  
2. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali

**14 Misi 14 : Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luarnegeri Secara Bersinergi Antar Kab/Kotase-Bali Dengan Mengembangkan Kreativitas Inovasi**

Tujuan : Meningkatnya pasar pariwisata Bali

Sasaran : Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global

**15 Misi 15 : Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataannya Secara Komprehensif**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataannya

Sasaran : 1. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan  
2. Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata

**16 Misi 16 : Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kab/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.**

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali

Sasaran : 1. Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali  
2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal

**17 Misi 17 : Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali.**

Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor  
2. Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali

**18 Misi 18 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Dan Terkoneksi Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.**

Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi

**19 Misi 19 : Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.**

Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

Sasaran : Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

**20 Misi 20 : Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.**

Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali

Sasaran : Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

**21 Misi 21 : Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.**

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis

Sasaran : Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan

Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah

Sasaran : Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan

**22 Misi 22 : Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.**

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik  
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Secara umum penjabaran visi misi tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 mengacu pada pendekatan *architecture* kinerja pembangunan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dirumuskan penjabarannya menjadi jumlah misi 22, jumlah tujuan 24, dan jumlah sasaran 38.

Berdasarkan atas hasil evaluasi dan pengendalian terhadap capaian target indikator makro, indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, serta mempertimbangkan kondisi riil baik yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah serta kondisi lingkungan eksisting, maka dilakukan penyesuaian target indikator makro, indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana.

TABEL 5.1  
RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD SEMESTA BERENCANA

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE									KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023			
						REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	<b>Misi 1 : MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI</b>																
	<b>Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak</b>																
	<b>Indikator Tujuan : 1 Tingkat Inflasi Bali</b>		Persentase (%)	3,5% ±1%(yoy)	2.37	-	0.55	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	<b>: 2 Ketersediaan pangan utama</b>		Persentase (%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Persentase stok pangan aman	Persentase (%)	20	20	8,278,257,170	20	3,089,883,949	20	17,206,834,392	20	7,759,692,795	20	10,712,757,063	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang krama Bali	Persentase pemenuhan kebutuhan sandang krama Bali	Persentase (%)	5.83	N/A	2,864,505,916	N/A	1,209,481,674	10.11	3,013,277,374	9.60	4,178,150,082	8.58	4,392,695,223	8.58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	3 Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	98	N/A	772,665,760	N/A	1,222,265,600	98.60	54,975,044,574	98.80	1,429,125,794	99	1,508,667,894	99	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Inflasi Pangan Bali	Persentase (%)	5.60	N/A	51,487,378	5.65	249,331,442	5,50%±1%(yoy)	338,905,792	5,40%±1%(yoy)	372,795,742	5,40%±1%(yoy)	410,076,008	5,40%±1%(yoy)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	<b>Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB</b>		Persentase (%)	15	13.45	-	15.11	-	20	-	22	-	25	-	25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	98.70	9,440,599,015	29	8,158,726,678	31	3,155,878,807	33	3,232,679,057	35	3,394,313,010	35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2 Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1 Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103.48	104.93	2,310,998,385	93.60	723,386,592	105	4,975,956,176	105.5	4,967,220,306	106	5,215,581,321	106	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	111.44	252,723,870	100.12	48,671,678	117.9	153,571,178	118.5	125,386,916	119.2	290,000,000	119.2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3 Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian	Persentase (%)	75	N/A	226,788,139	79.78	77,399,726	77	133,113,344	78	120,903,344	79	126,948,511	79	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	<b>Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.</b>																
	<b>Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)</b>		Dalam tahun	71.4	71.99	-	72.13	-	72.3	-	72.5	-	72.5	-	72.5	Dinas Kesehatan	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali	Persentase (%)	88	88	13,704,412,700	89.5	5,525,355,223	90	3,427,783,144	90.75	128,982,800	91.47	409,807,160	91.47	Dinas Kesehatan	
	2 Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Persentase (%)	85	85	293,215,711,382	86	167,466,201,462	86	60,703,235,155	86	49,698,162,244	86	249,317,233,490	86	Dinas Kesehatan	
	3 Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KRS)	Persentase (%)	85	95	20,180,991,832	91.78	14,654,023,578	95	38,637,821,358	100	23,742,713,046	100	29,079,366,291	100	Dinas Kesehatan	
4	<b>Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDINYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Rata-rata lama sekolah</b>		Tahun	9.72	8.84	-	8.95	-	10.56	-	10.84	-	11.40	-	11.40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.21	13.27	1,063,517,200	13.33	347,885,970	13.47	299,999,230	13.61	29,048,850	13.75	30,501,293	13.75	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	2 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18	Persentase (%)	82.35	82.6	207,979,728,817	82.96	235,558,338,954	82.92	631,019,395,415	83.11	606,545,872,638	83.3	636,873,166,270	83.3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE									KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019				2020			2021		2022		2023					
		REALISASI				Rp		REALISASI	Rp		TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	<b>Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN.</b>																	
Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal																		
Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu Persentase (%) 2.8 24 - 26 - 72 - 77 - 82 - 82 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga																		
2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat Persentase (%) 0.20 N/A - N/A - 3.64 - 4.29 - 4.93 - 4.93 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga																		
Sasaran : 1 Meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu Jumlah 21 91 N/A 100 N/A 274 26,058,793,926 293 25,240,077,216 312 26,502,081,077 312 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga																		
6	<b>Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI</b>																	
Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi																		
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Persentase (%) 74.77 75.38 - 75.50 - 75.51 (75,61 - 75,61) 76.93 (75,61 - 78,25) 77.78 (75,56 - 80,00) 77.78 (75,56 - 80,00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
Sasaran : 1 Meningkatkan daya saing SDM Krama Bali Indeks Daya Saing SDM Bali Persentase (%) 65.45 70.91 13,074,915,878 63.64 834,081,542 69.09 54,149,969,525 69.09 35,336,552,025 74.55 36,867,117,366 74.55 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral																		
7	<b>Misi 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.</b>																	
Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali																		
Indikator Tujuan : Persentase Kemiskinan Persentase (%) 3.91 3.61 - 4.45 - 3.75 (3,50-4,00) 4.25 (4,00-4,50) 3.75 (3,50-4,00) 3.75 (3,50-4,00) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																		
Sasaran : 1 Meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali Indeks kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial Persentase (%) 75 20.50 1,769,784,616 N/A 611,262,980 78 2,674,559,055 79 4,952,227,600 80 9,074,676,900 80 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak																		
8	<b>Misi 8 : MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.</b>																	
Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing																		
Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka Persentase (%) 1.37 1.57 - 5.63 - 5.63 (5,21 - 6,05) 3.19 (2,77-3,61) 2.32 (1,90-2,74) 2.32 (1,90-2,74) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral																		
Sasaran : 1 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Persentase (%) 76.56 73.77 2,774,060,510 74.32 598,506,219 76.30 199,999,880 76.55 125,150,500 76.80 131,408,300 76.80 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral																		
2 Meningkatkan akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Persentase (%) 98.60 98.43 1,022,201,558 94.37 30,227,450 94.37 199,999,700 98.61 179,010,100 97.68 292,960,500 97.68 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral																		
9	<b>Misi 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPREHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.</b>																	
Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan																		
Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan Persentase (%) 52.26 51.95 - 41.04 - 35.00 - 35.00 - 35.00 - 35.00 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral																		
Sasaran : 1 Meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaan 52.26 51.95 811,756,159 41.04 430,115,400 35.00 306,070,200 35.00 178,500,000 35.00 199,325,000 35.00 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral																		
10	<b>Misi 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.</b>																	
Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali																		
Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju Jumlah 19,782 19,807 - 19,832 - 19,857 - 19,880 - 19,905 - 19,905 Dinas Kebudayaan																		
Sasaran : 1 Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali. 1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali Jumlah 19,745 19,765 804,179,598 19,785 2,068,235,900 19,805 4,969,905,620 19,825 661,513,920 19,845 694,589,616 19,845 Dinas Kebudayaan																		
2 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia Jumlah 37 42 23,585,009,843 47 7,231,219,333 52 30,307,337,786 55 32,835,292,938 60 34,477,057,585 60 Dinas Kebudayaan																		

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023			
						REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	<b>Misi 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.</b>																
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih																
	Indikator Tujuan	: Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	N/A	-	N/A	-	73.98	-	73.98	-	74.98	-	74.98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Sasaran :																
	1	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih	1 Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kertih dalam tata kehidupan sakala	Persentase (%)	40	10.32	33,623,107,431	N/A	14,140,144,554	60	48,503,401,422	70	12,048,570,063	80	17,475,903,526	80	Sekretariat Daerah
	2	Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kertih secara niskala dalam bentuk ritual	Persentase (%)	73	N/A	14,281,717,866	N/A	11,467,527,453	79	24,814,822,433	82	21,038,894,896	85	15,500,000,000	85	Sekretariat Daerah	
12	<b>Misi 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN.</b>																
	Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kertih																
	Indikator Tujuan	: 1 Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase (%)	N/A	N/A	-	7.03	-	8.57	-	12.06	-	15.07	-	15.07	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	
		: 2 Persentase Subak yang lestari	Persentase (%)	N/A	N/A	-	75	-	75	-	80	-	85	-	85	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	
	Sasaran :																
	1	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	1 Persentase desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	99,87	453,889,111,785	99,87	462,462,204,748	99,87	462,348,807,702	100	540,630,818,449	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
			2 Persentase Subak yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	98,50	120,130,000	98,50	407,713,000	98,50	1,064,438,792	100	1,064,438,792	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
13	<b>Misi 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI.</b>																
	Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas																
	Indikator Tujuan	: Meningkatkan Rata-Rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	Hari	10,45 dan 4,00	8,2 dan 4,30	-	2,68 dan 2,01	-	2,68 dan 2,01	-	5,33 dan 3	-	10,9 dan 4,50	-	10,9 dan 4,50	Dinas Pariwisata	
	Sasaran :																
	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Destinasi	100	0	0	0	0	18	429,877,089	21	2,077,500	31	2,181,375	70	Dinas Pariwisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	110	96	450,997,791	31	185,560,786	0	0	40	356,391,845	50	374,211,437	217	Dinas Pariwisata
14	<b>Misi 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI</b>																
	Tujuan : Meningkatkan pasar pariwisata Bali																
	Indikator Tujuan	: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	23.40	23.26	-	18.76	-	18.34	-	20.86	-	25.93	-	25.93	Dinas Pariwisata	
	Sasaran :																
	1	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	9,950,080	9,262,290.00	1,851,845,326	774,020	313,556,156	1,371,680	254,726,459	2,642,000	272,678,644	3,323,470	286,312,576	17,373,460	Dinas Pariwisata
			2 Persentase promosi pariwisata melalui media Elektronik dan online/digital	Persentase (%)	10	0	143,592,545	30	100,000,000	40	1,027,236,149	50	307,534,647	60	322,911,380	60	Dinas Pariwisata
15	<b>Misi 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF</b>																
	Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan																
	Indikator Tujuan	: Indeks kepuasan wisatawan	persentase (%)	75	79	-	-	-	81	-	83	-	85	-	85	Dinas Pariwisata	
	Sasaran :																
	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase (%)	40 dan 60	75 dan 89	401,901,641	-	333,120,554	40 dan 60	556,919,830	40 dan 60	235,133,799	40 dan 60	246,890,489	40 dan 60	Dinas Pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Persentase (%)	N/A	-	1,087,248,374	-	187,597,167	30	1,213,837,894	30	514,559,014	40	540,286,965	100	Dinas Pariwisata
16	<b>Misi 16 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS.</b>																
	Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali																
	Indikator Tujuan	: Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	6.33	5.63	-	-9.33	-	3,00 (2,50-3,50)	-	3,10 (2,70-3,50)	-	5,00 (4,60-5,40)	-	5,00 (4,60-5,40)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Sasaran :																
	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA	Persentase (%)	2.97	2.22	229,699,540	2.64	258,188,800	3.12	349,876,312	3.7	450,080,316	4.39	850,000,000	16.07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE												KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023					
						REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal	1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda)	Persentase (%)	10	N/A	9,103,254,784	N/A	6,011,828,902	20	8,285,496,464	25	5,086,200,420	30	5,340,510,441	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
		2 Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	10	N/A		N/A		20		25		30		30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
		3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah (Toko)	40	40		40		40		40		40		200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah (Toko)	100	N/A		N/A		50		50		50		300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
17	Misi 17 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI.																		
	Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali																		
	Indikator Tujuan	1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali	Persentase (%)	2	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
		2 Persentase KUMKM Menuju Digital	Persentase (%)	10	N/A	-	N/A	-	N/A	-	25,25	-	26,5	-	26,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Sasaran :																		
	1 Meningkatkan kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri	Persentase (%)	2	3.36	2,999,177,104	N/A	1,219,328,449	2.03	3,110,610,404	2.04	4,095,867,274	2.05	4,300,660,638	2.05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
		2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0	Persentase (%)	100	25		N/A		25		25		25		200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	2 Meningkatkan pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi	Jumlah	9	37	7,681,579,218	39	4,736,353,246	17	4,870,113,571	19	5,273,285,126	22	5,536,949,382	22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
18	Misi 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.																		
	Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru																		
	Indikator Tujuan	1 Indeks konektivitas	Indeks	2.74	2.7	-	2.6	-	2.5	-	2.4	-	2.3	-	2.3				
	Sasaran :																		
	1 Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	60	62	188,041,599,338	63	153,459,383,874	75	101,945,989,552	81.25	296,232,100,702	82	326,725,884,320	82	Dinas Perhubungan			
19	Misi 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN.																		
	Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan																		
	Indikator Tujuan	1 Persentase Penyelesaian pelanggaran ketertarikan, kenyamanan dan ketertiban umum	Persentase (%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Satuan Polisi Pamong Praja			
	Sasaran :																		
	1 Meningkatkan rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1 Angka kriminalitas	Kasus	4,607	4,376	834,581,672	2,083	58,464,300	3,200	449,289,792	2,731	284,653,544	2,262	298,886,221	2,262	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		2 Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan	Persentase (%)	70	70	18,636,071,842	74	18,604,036,375	78	21,406,334,453	80	17,801,725,174	82	18,691,811,433	82	Satuan Polisi Pamong Praja			
		3 Persentase penanganan bencana	Persentase (%)	100	100	10,555,415,826	100	9,018,563,960	100	6,489,679,971	100	1,971,491,900	100	2,469,286,495	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
20	Misi 20 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.																		
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali																		
	Indikator Tujuan	1 Indeks demokrasi	Indeks	78.8	81.83	-	77.59	-	81	-	81	-	81	-	81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
		2 Indeks pemberdayaan gender	Indeks	63.76	N/A	-	N/A	-	64.75	-	64.9	-	65	-	65	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak			
	Sasaran :																		
	1 Meningkatkan peran serta Krama Bali dalam ketataan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada	Persentase (%)	70.5	N/A	1,793,365,393	81.84	634,868,150	73.81	12,997,604,118	75.00	16,941,385,528	75	17,886,799,699	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
21	Misi 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.																		
	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis																		
	Indikator Tujuan	1 Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)	Persentase (%)	14.35	N/A	-	N/A	-	15.53	-	15.9	-	16.28	-	16.28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Sasaran :																		
	1 Meningkatkan keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	16.93	N/A	4,310,563,423	17.29	202,373,923,168	17.46	1,947,627,908,350	17.64	432,377,542,490	17.82	453,996,419,615	17.82	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah																		
	Indikator Tujuan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase (%)	61.51	63.62	-	71.98	-	72.02	-	72.21	-	72.40	-	72.40	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Sasaran :																		
	1 Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	1 Indeks kualitas udara	Indeks	91.98	94.35	3,272,211,015	88.34	5,289,354,310	87.27	13,176,975,014	87.38	4,436,922,123	87.48	18,882,435,390	87.48	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
		2 Indeks kualitas air	Indeks	63.17	63.33		64.33		67.93		68.03		68.13		68.13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
		3 Indeks kualitas lahan	Indeks	38.57	40.79		40.58		41.03		41.49		41.95		41.95	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
		4 Indeks kualitas air laut	Indeks	-	N/A		69.75		61.72		62.24		62.76		62.76	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
		5 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	8.38	8.57		8.57		10.16		10.82		11.65		11.65	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
		6 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	0.40	0.43	1,136,305,480	0.68	227,483,030	0.97	349,905,792	1.2	186,047,592	1.4	449,353,192	1.4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral			



NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE									KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2019				2020			2021		2022		2023					
		REALISASI				Rp		REALISASI	Rp		TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
22	Misi 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.																	
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																	
	Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik		Indeks	75	N/A	-	N/A	-	80	-	81	-	82	-	82	Sekretariat Daerah		
	Sasaran :																	
	1	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	N/A	25,185,286,027	83.17	45,138,060,727	80	42,906,470,846	81	142,459,330,298	82	154,966,609,447	82	Sekretariat Daerah	
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan																	
	Indikator Tujuan : 1 Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	66.16	68	-	70	-	71	-	72	-	73	-	73	Sekretariat Daerah		
	2 Opini BPK		Status	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	Inspektorat		
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Persentase (%)	76.37	77	-	78	-	79	-	79.5	-	80	-	80	Sekretariat Daerah		
	Sasaran :																	
	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	75	77	167,411,472,698	79	112,403,682,399	80	1,772,078,367,341	81	1,543,208,413,489	82	1,533,118,971,443	82	Sekretariat Daerah	
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0.78	8.69	13,532,907,797	-24.21	15,087,984,744	5.13	17,784,511,876	5.54	17,858,594,072	6.24	21,703,637,233	6.24	Badan Pendapatan Daerah	

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali selama lima tahun mendatang (2018-2023). Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

#### 6.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023 VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
<b>MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI</b>		
T. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1. Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan</li> <li>2. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat</li> <li>3. Membentuk kelompok bersama satu pintu sebagai sentra penyediaan dan pemasaran pangan</li> </ol>

<b>MISI/TUJUAN</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>STRATEGI</b>
	2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali	1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali menggunakan produk sandang
	3. Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1. Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali 2. Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
	4. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	1. Memperkuat kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan 2. Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
<b>MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, KESEJAHTERAAN PETANI</b>		<b>MENINGKATKAN NILAI DAN MENINGKATKAN</b>
T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
		2. Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali
		3. Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor
	2. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1. Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
		2. Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3. Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
<b>MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.</b>		
T. Meningkatkan derajat kesehatan Krama Bali	1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2. Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	
	3. Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
<b>MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDINYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN</b>		
T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Pendidikan gratis 12 tahun
<b>MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT</b>		
T. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional
<b>MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI</b>		
T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Entrepreneur

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
<b>MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA</b>		
T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali
<b>MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI</b>		
T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja</li> <li>2. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri</li> </ol>	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
<b>MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI</b>		
T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
<b>MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI</b>		
T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal</li> <li>2. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali</li> <li>3. Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan</li> <li>4. Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya</li> </ol>

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
<b>MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH</b>		
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1. Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura
		2. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama
<b>MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN</b>		
T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
<b>MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI</b>		
T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2. Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	Kebudayaan kabupaten/kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
<b>MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU</b>		
T. Meningkatkan pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
<b>MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF</b>		
T. Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan	1. Meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2. Meningkatkan Kualitas SDM Pariwisata	1. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
		2. Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
<b>MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS</b>		
T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1. Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
<b>MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI</b>		
T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1. Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	Mengenalkan, mempromosikan/ mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2. Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	<p>1. Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor</p> <p>2. Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor</p>

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
<b>MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI</b>		
T. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
		2. Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik
<b>MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN</b>		
T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1. Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
		2. Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata
<b>MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETERAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI</b>		
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	1. Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
		2. Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
<b>MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH</b>		
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman



MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
<b>MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH</b>		
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain termasuk optimalisasi peran BUMD dan Pendirian BUMD baru

## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

**Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023**

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"					
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi					
3	Membentuk kelompok bersama satu pintu sebagai sentra penyediaan dan pemasaran pangan	Pembentukan kelompok bersama satu pintu sebagai sentra penyediaan dan pemasaran pangan					
4	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali menggunakan produk	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali					

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
	sandang						
5	Memper memudahkan sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali					
6	Memberdayakan Lembaga keuangan/ perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)					
7	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan	Penguatan pengendalian stabilitas harga pangan					
8	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali					
9	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1. Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi					
		2. Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi					
10	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali					
11	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor	1. Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor					
		2. Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan					
12	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor					
13	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan					
14	Pemberdayaan petani menjadi produsen	1. Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan					

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
	industri pangan olahan hasil pertanian	industri pangan olahan hasil pertanian					
		2. Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas					
		3. Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani					
15	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanan kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali					
16	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanan kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali					
17	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional					
		2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik					
18	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera-II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali					
19	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan ke pemerintah pusat					
20	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Entrepreneur	1. Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan					
		2. Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali					
		3. Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri					
21	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1. Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali					
		2. Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali					

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
		3. Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)					
22	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja					
23	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali					
		2. Membangun hubungan kerjasama antara <i>Government to Government</i> (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri					
24	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali					
25	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi					
26	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya					
27	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik					
28	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	1. Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan					
		2. Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku					
		3. Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu					
		4. Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura					
		5. Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya					
		6. Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbol simbol keagamaan)					
29	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama					

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
30	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak	1. Memperkuat Desa Adat dalam melaksanakan fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa					
		2. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal)					
		3. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)					
		4. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen					
		5. Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi					
		6. Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi					
		7. Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya					
		8. Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat					
		9. Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)					
		10. Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali					
31	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis					
32	Kebudayaan kabupaten/kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah					

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
33	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali					
34	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali					
35	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1. Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara					
		2. Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara					
		3. Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta					
36	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali					
37	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali	Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi					
38	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi local	Mempermudah akses permodalan dan memperluas pemasaran produk ekonomi lokal					
39	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor	Meningkatkan kerja sama promosi produk branding Bali					
40	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	1. Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi					

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
		2. Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi					
		3. Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi					
41	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)					
42	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	Pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia					
43	Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan public	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali					
44	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali					
45	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan					
46	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali					
47	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI					
48	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1. Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan					

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023
		2. Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru					
49	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan perilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali					
50	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan					
51	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya					
52	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain termasuk optimalisasi peran BUMD dan Pendirian BUMD baru	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kapasitas sumber daya pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru termasuk melalui pendirian beberapa BUMD sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah					

Tema fokus pembangunan dan perumusan arah kebijakan tahun 2019-2023 sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

TEMA FOKUS PEMBANGUNAN				
2019	2020	2021	2022	2023
<b>Memperkuat Sinergi Dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata Dan Berdaya Saing Menuju Pembangunan Berkelanjutan.</b>	<b>Peningkatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Bali Didukung Pemajuan Kebudayaan melalui Sinergi Kebijakan Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola</b>	<b>Percepatan Pembangunan Ekonomi Bali Didukung Pembangunan Infrastruktur dan Pemajuan Kebudayaan Menuju Pemerataan</b>	<b>Penyeimbangan Struktur dan Fundamental Perekonomian Bali: Pariwisata, Pertanian, Kelautan Perikanan, dan Industri</b>	<b>Mewujudkan Transformasi Ekonomi Bali: Hujau, Tangguh, dan Sejahtera</b>
<b>1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar</b>	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali	1. Pemenuhan standar hidup yang layak dan peningkatan daya saing SDM Krama Bali
<b>2. Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan</b>	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga	2. Memperkuat sektor perekonomian Bali yang bertumpu pada penguatan sektor primer dan menjaga



<b>TEMA FOKUS PEMBANGUNAN</b>				
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	keseimbangan pembentuk sektor perekonomian
<b>3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Jasa Produktif</b>	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali	3. Memantapkan pengembangan infrastruktur untuk percepatan pemerataan pembangunan Bali
<b>4. Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban serta Pelestarian Adat dan Budaya</b>	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	4. Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi
<b>5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas</b>	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan	5. Terwujudnya Ekosistem yang berkelanjutan
	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola	6. Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan Bali melalui satu pulau, satu pola, satu tata kelola

### **6.3 Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan daerah adalah Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, sehingga menjadi program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan tiap tahunnya. Program dijabarkan sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali, ter-*mapping* dalam 38 sasaran dan 24 tujuan. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2019 (sebelum diubah) disajikan pada tabel 6.3A, sedangkan Perubahan Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana yang secara umum memuat penyesuaian indikator, perubahan target dan penyesuaian nomenklatur Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 disajikan pada tabel 6.3B.

TABEL 6.3 A  
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD SEMESTA BERENCANA (SEBELUM PERUBAHAN)

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Misi 1 : MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI</b>																
<b>Tujuan : Terpenuhi kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak</b>																
<b>Indikator Tujuan : 1 Tingkat Inflasi Bali</b>		Persentase (%)		3,5% ±1%(yoy)	3,5% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)	
<b>: 2 Ketersediaan pangan utama</b>		Persentase (%)		100	100		100		100		100		100		100	
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Persentase stok pangan aman	Persentase (%)	20	20	3,537,783,656	20	12,548,914,489	20	14,117,020,313	20	15,698,787,440	20	17,496,642,343	20	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan ketersediaan pangan	Angka Kekucupan Energi (AKE)	Kkal per kapita per hari	2.646	2.647	340,000,000	2.648	391,000,000	2.649	449,650,000	2.650	517,097,500	2.650	594,662,126	2.650	Dinas Ketahanan Pangan
2	Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Persentase lahan pertanian produktif	Persentase (%)	75	76.95	0	77.45	4,792,052,610	77.95	5,271,257,871	78.45	5,798,383,658	78.95	6,378,222,024	78.95	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	Peningkatan sarana produksi pertanian	Persentase sarana produksi pertanian dalam kondisi baik dan siap pakai	Persentase (%)	75	76	1,437,783,656	77	2,948,417,579	78	3,243,259,337	79	3,567,585,271	80	3,924,343,798	80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4	Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	17,535.70	17,886.41	150,000,000	18,244.14	902,152,000	18,609.02	1,052,690,000	18,981.20	1,240,862,500	19,360.82	1,476,078,125	19,360.82	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	97,157.60	99,100.75	550,000,000	101,082.77	809,857,300	103,104.42	1,012,321,625	105,166.51	1,265,402,031	107,269.84	1,581,752,539	107,269.84	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	Jumlah populasi ternak lokal Bali	Satuan ternak	582,199	-	-	446.893	1,500,000,000	455.831	1,600,000,000	464.948	1,700,000,000	474.247	1,800,000,000	474.247	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyanga Stock Pangan Daerah	Jumlah Lumbung yang masih berfungsi baik	Unit	15	15	500,000,000	15	500,000,000	15	500,000,000	15	500,000,000	15	500,000,000	75	Dinas Ketahanan Pangan
8	Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	Persentase (%)	80	80	360,000,000	85	414,000,000	90	475,900,000	95	547,515,000	95	629,642,251	95	Dinas Ketahanan Pangan
9	Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar yang bersertifikat mutu	Persentase (%)	7	8.47	200,000,000	22	291,435,000	27	511,941,480	32	561,941,480	39	611,941,480	39	Dinas Ketahanan Pangan
<b>Sasaran :</b>																
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase (%)	5.83	10.35	742,150,000	10.19	1,961,675,000	10.11	1,856,200,000	9.60	2,113,225,000	8.58	2,270,250,000	8.58	
<b>Program :</b>																
1	Pemenuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	Persentase (%)	1	15.21	342,150,000	17.21	461,675,000	17.54	456,200,000	17.87	513,225,000	18.21	570,250,000	18.21	Dinas Sosial
2	Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh	Jumlah Unit Usaha	5	5	150,000,000	7	500,000,000	9	400,000,000	11	600,000,000	13	700,000,000	13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Peningkatan Aksesibilitas Produk Sandang Lokal Bali	Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	Jumlah (Toko)	20	20	250,000,000	40	1,000,000,000	60	1,000,000,000	80	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Sasaran :</b>																
3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	98	98.20	8,560,000,000	98.40	30,880,000,000	98.60	33,930,000,000	98.80	35,450,000,000	99	41,560,000,000	99	
<b>Program :</b>																
1	Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	Persentase (%)	8.20	8	3,060,000,000	7.70	4,580,000,000	7.20	7,630,000,000	6.60	9,150,000,000	5.60	15,260,000,000	5.60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	77.59	78.86	5,500,000,000	83.40	26,300,000,000	88.24	26,300,000,000	93.08	26,300,000,000	97.93	26,300,000,000	97.93	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>Sasaran :</b>																
4	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Inflasi Pangan Bali	Persentase (%)	5.60	5,75%±1% (yoy)	300,000,000	5,65%±1% (yoy)	500,000,000	5,50%±1% (yoy)	600,000,000	5,40%±1% (yoy)	650,000,000	5,40%±1% (yoy)	700,000,000	5,40%±1% (yoy)	
<b>Program :</b>																
1	Stabilisasi harga Pangan	Harga GKP lebih besar dari HPP	Rupiah	> Rp. 3700	> Rp. 3700	300,000,000	> Rp.3700	500,000,000	> Rp. 3700	600,000,000	> Rp. 3700	650,000,000	> Rp. 3700	700,000,000	> Rp. 3700	Dinas Ketahanan Pangan
2	Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	N/A	100	0	100	500,000,000	100	525,000,000	100	550,000,000	100	575,000,000	100	Biro Perekonomian
<b>Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian</b>																
<b>Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB</b>		Persentase (%)		15	16		17		20		22		25		25	
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	27	1,850,000,000	29	12,218,231,553	31	13,440,054,708	33	14,784,060,179	35	16,262,466,197	35	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	PPH Konsumsi	Nilai	95.6	95.6	635,000,000	95.7	688,250,000	95.8	783,987,500	95.9	894,085,625	96	943,133,218	96	Dinas Ketahanan Pangan
2	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Jumlah Kelompok pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan	Kelompok	2	1	500,000,000	1	2,667,324,253	1	2,934,056,678	1	3,227,462,346	1	3,550,208,581	7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian yang dibangun dan berproduksi	Industri	1	1	800,000,000	1	5,955,907,300	1	6,551,498,030	1	7,206,647,833	1	7,927,312,616	6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4	Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	Kawasan	4	1	550,000,000	1	3,595,000,000	1	3,954,500,000	1	4,349,950,000	1	4,784,945,000	9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
<b>Sasaran :</b>																
2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1 Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103.48	104.1	713,351,696,398	104.5	1,555,173,514,009	105	1,566,266,578,858	105.5	1,529,670,741,365	106	1,560,198,196,972	106	
		2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	116.6		117.3		117.9		118.5		119.2	119.2		
<b>Program :</b>																
1	Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten	Jumlah unit taman gumi banten yang produktif	Unit	7	1	2,697,294,308	1	8,334,047,478	1	9,167,452,226	1	10,084,197,448	1	11,092,617,193	12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persentase produktivitas pertanian	Persentase (%)	2	2.2	250,000,000	2.4	4,278,758,236	2.6	4,628,415,444	2.8	4,983,038,373	3	5,343,123,594	3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Kelompok yang menerapkan agribisnis peternakan yang baik	Jumlah Kelompok	27	35	462,641,864	35	665,000,000	35	790,000,000	35	906,000,000	35	1,130,000,000	175	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	Sertifikat	134	142	200,000,000	149	270,000,000	149	270,000,000	149	270,000,000	151	290,000,000	151	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	Jumlah pertanian Hidroponic perkotaan yang produktif	Unit Kawasan	1	1	400,000,000	1	2,645,639,502	1	2,910,203,452	1	3,201,223,797	1	3,521,346,177	5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
<b>Sasaran :</b>																
3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian	Persentase (%)	75	75	200,000,000	76	800,000,000	77	880,000,000	78	968,000,000	79	1,064,800,000	79	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Jumlah Kelompok tani yang bersertifikasi	kelompok	45	10	200,000,000	15	800,000,000	20	880,000,000	25	968,000,000	30	1,064,800,000	75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
<b>Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.</b>																
<b>Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali</b>																
<b>Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)</b>																
			Dalam tahun	71.4	71.8		72		72.3		72.5		72.5		72.5	
<b>Sasaran :</b>																
1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali	Persentase (%)	88	89	3,935,241,182	89.5	3,595,199,190	90	3,868,873,390	90.75	4,193,873,390	91.47	4,493,873,390	91.47	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	rasio	0.001	0.001	3,600,918,782	0.001	3,305,356,790	0.001	3,568,873,390	0.001	3,868,873,390	0.001	4,168,873,390	0.001	Dinas Kesehatan
2	Pengembangan Sistem Database Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase (%)	0	20	334,322,400	30	289,842,400	40	300,000,000	50	325,000,000	60	325,000,000	60	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran :</b>																
2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Persentase (%)	85	85	55,445,445,120	86	80,483,798,495	86	60,320,351,607	86	57,654,341,516	86	60,210,347,251	86	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Persentase (%)	49	50	16,602,813,824	60	17,802,110,043	65	17,852,110,043	70	17,852,110,043	75	17,852,110,043	75	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	Persentase (%)	86	90	1,076,610,600	92	1,556,000,000	94	2,090,000,000	96	2,190,000,000	100	2,290,000,000	100	Dinas Kesehatan
		2 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persentase (%)	5.0	4.8	674,573,000	4.6	560,000,000	4.4	1,100,000,000	4.3	1,200,000,000	4.2	1,300,000,000	4.2	Dinas Kesehatan
		3 Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.310	0.35	3,647,439,916	0.40	7,769,409,942	0.45	7,909,262,942	0.50	8,989,262,942	0.55	10,049,262,942	0.55	Dinas Kesehatan
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali	Cakupan ODGJ berat yang dilayani	persentase (%)	35	40	29,374,149,728	45	48,063,403,560	50	25,339,713,332	55	21,048,968,531	60	21,698,974,266	60	Dinas Kesehatan
4	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase WUS 30-50 Tahun yang mendapatkan Deteksi Dini Kanker	Persentase (%)	17.7	27	396,704,500	32	436,374,950	37	1,485,765,290	42	1,500,000,000	47	1,600,000,000	47	Dinas Kesehatan
5	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	kasus rabies	250	200	3,673,153,552	150	4,296,500,000	100	4,543,500,000	75	4,874,000,000	50	5,420,000,000	50	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		kasus flu burung		6	6		5		4		3	2	2	2		
<b>Sasaran :</b>																
3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan Kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Persentase (%)	85	95	91,670,000	95	200,000,000,000	95	250,000,000,000	100	250,000,000,000	100	250,000,000,000	100	
<b>Program :</b>																
1	Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	Persentase (%)	85	85	91,670,000	86	200,000,000,000	86	250,000,000,000	86	250,000,000,000	86	250,000,000,000	86	Dinas Kesehatan
<b>Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDIA Pelayan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas</b>																
<b>Indikator Tujuan : Rata-rata lama sekolah</b>																
			Tahun	9.72	10		10.28		10.56		10.84		11.40		11.40	
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.21	13.49	1,101,784,168	13.63	2,398,453,267	13.77	2,524,372,063	13.91	2,650,590,666	14.05	2,783,120,199	14.05	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai	84	84.5	1,101,784,168	85	2,398,453,267	85.5	2,524,372,063	86	2,650,590,666	86.5	2,783,120,199	86.5	Dinas Pendidikan
<b>Sasaran :</b>																
2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18	Persentase (%)	82.35	82.54	142,773,432,074	82.73	145,363,777,584	82.92	147,457,999,555	83.11	149,636,058,636	83.3	151,850,941,856	83.3	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) Menengah	Persentase (%)	73.15	100.00	107,037,405,972	100.00	108,916,405,972	100.00	110,828,391,085	100.00	112,823,302,124	100.00	114,854,121,562	100.00	Dinas Pendidikan
		Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase (%)	34.96	36.24		37.51		38.79		40.06		41.34		41.34	
2	Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Persentase (%)	15.14	15.23	35,736,026,102	15.32	36,447,371,612	15.41	36,629,608,470	15.50	36,812,756,512	15.59	36,996,820,294	15.59	Dinas Pendidikan
<b>Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/ DESA PAKRAMAN.</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal</b>																
<b>Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu</b>																
		Persentase (%)	2.8	20		35		50		65		70		70		
<b>2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat</b>																
		Persentase (%)	0.20	2.36		3.00		3.64		4.29		4.93		4.93		
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu	Jumlah	21	33	500,000,000	42	518,000,000	51	536,000,000	60	554,000,000	69	554,000,000	69	
<b>Program :</b>																
1	Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	1 Persentase widya pasraman yang tumbuh dan berkembang di Desa Adat	Persentase (%)	1.41	2.21	500,000,000	2.81	518,000,000	3.42	536,000,000	4.02	554,000,000	4.62	554,000,000	4.62	Dinas Pendidikan
<b>Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi</b>																
<b>Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>																
		Persentase (%)	74,45 (74,35-74,50)	75,07 (74,97-75,17)		75,31 (75,21-75,41)		75,61 (75,41-75,61)		78,25 (75,61-78,25)		80 (75,56-80)		80 (75,56-80)		
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	65	65	4,100,482,000	67	4,814,810,000	70	4,944,624,000	73	5,061,012,000	75	5,194,902,000	75	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	Persentase (%)	33.35	38.15	4,100,482,000	43.44	4,814,810,000	49.26	4,944,624,000	55.65	5,061,012,000	62.69	5,194,902,000	62.69	Dinas Tenaga Kerja ESDM
2	Pengembangan pemuda	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase (%)	0.81	3.70	557,943,248	3.85	1,730,000,000	4.00	1,875,000,000	4.15	1,970,000,000	4.30	2,065,000,000	4.30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali yang diperoleh Atlet pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	11	85	8,602,627,080	90	16,150,000,000	95	13,501,500,000	100	10,250,000,000	110	17,000,000,000	480	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
<b>Misi 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali</b>																
<b>Indikator Tujuan : Persentase Kemiskinan</b>																
		Persentase (%)	3.91	3.85		3.59		2.95		1.90		1,00-1,50		1,00-1,50		
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	75	76	5,356,898,800.0	77	11,327,909,800.0	78	12,618,509,800.0	79	14,157,818,400.0	80	15,717,235,980.0	80	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	Persentase (%)	16.87	9.58	886,500,000	20.43	3,280,210,000	21.87	3,550,830,000	23.31	3,956,450,000	24.80	4,382,000,000	24.80	Dinas Sosial
2	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%)	14.78	15.41	397,200,000	19.55	795,000,000	20.62	870,000,000	21.68	940,000,000	22.74	1,020,000,000	22.74	Dinas Sosial
3	Peningkatan Pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%)	10.26	2.03	300,634,000	20.15	1,329,000,000	22.57	1,464,000,000	23.92	1,554,000,000	25.01	1,602,000,000	25.01	Dinas Sosial
4	Pelayanan Sosial	Persentase penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase (%)	95	95	3,772,564,800	95	5,923,699,800	95	6,733,679,800	95	7,707,368,400	95	8,713,235,980	95	Dinas Sosial
5	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	Laporan	1	1	70,000,000	1	26,530,000,000	1	26,530,000,000	1	26,530,000,000	1	26,530,000,000	5	Dinas Sosial
<b>Misi 8 : MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing</b>																
<b>Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka</b>																
		Persentase (%)	1.37	1.28		1.17		1.07		0.98		0.9		0.9		
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	75.24	75.77	7,140,616,700	76.03	14,840,574,200	76.3	18,198,544,480	76.55	19,243,626,008	76.8	20,258,187,279	76.8	
<b>Program :</b>																
1	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	Persentase Lulusan BLK yang bekerja	Persentase (%)	93	90	4,100,482,000	90	4,814,810,000	90	4,944,624,000	92	5,061,012,000	90	5,194,902,000	90	Dinas Tenaga Kerja ESDM
2	Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	Persentase (%)	93	90	3,040,134,700	90	10,025,764,200	90	13,253,920,480	92	14,182,614,008	90	15,063,285,279	90	Dinas Tenaga Kerja ESDM

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET 6	Rp 7	TARGET 8	Rp 9	TARGET 10	Rp 11	TARGET 12	Rp 13	TARGET 14	Rp 15		
2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase (%)	3.88	3.78	4,442,778,900	3.68	14,988,482,600	3.59	15,179,640,800	3.5	15,395,343,500	3.41	15,579,383,350	3.41	
<b>Program :</b>																
1	Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang	1,621	1,821	3,357,022,000	2,035	13,550,000,000	2,250	13,590,000,000	2,385	13,660,000,000	2,512	13,685,000,000	12,624	Dinas Tenaga Kerja ESDM
2	Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	Jumlah	4	1	1,085,756,900	1	1,438,482,600	1	1,589,640,800	1	1,735,343,500	1	1,894,383,350	9	Dinas Tenaga Kerja ESDM
<b>Misi 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan</b>																
<b>Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan</b>																
		Persentase (%)		23.87	27		45		50		55		75		75	
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaan	23.87	27	350,000,000	45	390,000,000	50	450,000,000	55	500,000,000	75	600,000,000	75	
<b>Program :</b>																
1	Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	Persentase (%)	4.74	5.23	200,000,000	5.72	220,000,000	6.22	250,000,000	6.71	280,000,000	7.20	350,000,000	7.20	Dinas Tenaga Kerja ESDM
2	Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah Perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	Perusahaan	330	60	150,000,000	70	170,000,000	80	200,000,000	90	220,000,000	90	250,000,000	720	Dinas Tenaga Kerja ESDM
<b>Misi 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali</b>																
<b>Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju</b>																
		Jumlah		19,782	19,807		19,832		19,857		19,880		19,905		19,905	
<b>Sasaran :</b>																
1	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	Jumlah	19,745	19,765	2,400,000,000	19,785	4,050,000,000	19,805	5,500,000,000	19,825	6,950,000,000	19,845	10,400,000,000	19,845	
		Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia	Jumlah	37	42	34,400,000,000	47	54,335,000,000	52	49,000,000,000	55	55,825,000,000	60	63,850,000,000	60	
<b>Program :</b>																
1	Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persentase	5	5	2,150,000,000	5	3,650,000,000	5	2,900,000,000	5	3,300,000,000	5	4,900,000,000	25	Dinas Kebudayaan
2	Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase	5	5	21,650,000,000	5	35,635,000,000	5	28,600,000,000	5	32,575,000,000	5	36,550,000,000	30	Dinas Kebudayaan
3	Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	Jumlah	410	410	2,400,000,000	515	4,050,000,000	520	5,500,000,000	525	6,950,000,000	1,430	10,400,000,000	3,400	Dinas Kebudayaan
4	Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persentase	5	5	10,600,000,000	5	15,050,000,000	5	17,500,000,000	5	19,950,000,000	5	22,400,000,000	25	Dinas Kebudayaan
<b>Misi 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.</b>																
<b>Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi</b>																
<b>Indikator Tujuan : Indeks Kebahagiaan</b>																
		Indeks		72,48 (2017)	72,48		73,98		73,98		73,98		74,98		74,98	
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala	Persentase (%)	40	40	58,522,785,368	50	155,267,628,992	60	119,232,649,153	70	79,803,611,085	80	62,724,241,693	80	
		Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual	Persentase (%)	73	73	8,977,786,568	76	15,850,000,000	79	16,350,000,000	82	16,850,000,000	85	17,350,000,000	85	
<b>Program :</b>																
1	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Atma Kerthi	Indek Kepuasan pelayanan Atma Kerthi	Indeks	N/A	72	8,977,786,568	74	15,850,000,000	76	16,350,000,000	78	16,850,000,000	80	17,350,000,000	80	Biro Keshjateraaan Rakyat
2	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jana Kerthi	Persentase mahasiswa S1, S2, S3 yang berprestasi di bidang penerapan nilai-nilai Jana Kerthi	Persentase (%)	0.03	0.03	1,704,000,000	0.05	3,408,000,000	0.06	4,172,000,000	0.07	4,936,000,000	0.07	5,010,000,000	0.07	Dinas Pendidikan
3	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Persentase kerusakan kawasan hutan	Persentase (%)	5.56	4.93	4,379,064,000	4.30	4,816,970,000	3.67	5,298,667,000	3.04	5,828,534,000	2.41	6,411,387,000	2.41	Dinas Kehutanan
4	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi	Jumlah danau alam dalam kondisi baik	Jumlah	4	4	675,000,000	4	2,251,396,100	4	2,536,593,210	4	2,490,722,531	4	1,189,664,784	4	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	Panjang pantai terabrasi	Kilometer	118.69	118.39	802,600,000	118.09	29,000,000,000	117.79	38,000,000,000	117.64	16,117,926,600	117.49	16,129,719,260	117.49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	84	87	50,962,121,368	88.75	115,791,262,892	90	69,225,388,943	91.25	50,430,427,954	92.5	33,983,470,649	92.5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>MISI 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN.</b>															
	<b>Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi</b>															
	<b>Indikator Tujuan : 1 Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis</b>															
		Persentase (%)		30	30		60		90		100		100		100	
	<b>2 Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis</b>															
		Persentase (%)		35	35		55		75		100		100		100	
	<b>Sasaran :</b>															
	1 Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	1 Jumlah desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	448	448	4,450,000,000	896	6,950,000,000	1,344	9,650,000,000	1,493	12,350,000,000	1,493	15,050,000,000	1,493	
		2 Jumlah Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	954	954	3,300,000,000	1,499	5,500,000,000	2,045	7,700,000,000	2,726	9,900,000,000	2,726	12,100,000,000	2,726	
	<b>Program :</b>															
	1 Penguatan Desa Adat	Jumlah Desa Adat berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	Jumlah	523	523	4,450,000,000	821	6,950,000,000	1,120	9,650,000,000	1,493	12,350,000,000	1,493	15,050,000,000	1,493	Dinas Kebudayaan
	2 Penguatan Subak	Jumlah Subak berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	Jumlah	1,090	1,090	3,300,000,000	1,636	5,500,000,000	2,181	7,700,000,000	2,453	9,900,000,000	2,726	12,100,000,000	2,726	Dinas Kebudayaan
13	<b>MISI 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI.</b>															
	<b>Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas</b>															
	<b>Indikator Tujuan : Realisasi PMDN dan PMA di Sektor Pariwisata</b>															
		Persentase (%)		19.7	19.8		19.9		20		20.1		20.2		100	
	<b>Sasaran :</b>															
	1 Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Destinasi	100	0	0	2	2,580,000,000	2	3,050,000,000	2	3,475,000,000	2	3,820,000,000	108	
	<b>Program :</b>															
	1 Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	Destinasi	146	0	0	4	2,580,000,000	4	3,050,000,000	5	3,475,000,000	5	3,820,000,000	164	Dinas Pariwisata
	<b>Sasaran :</b>															
	2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	1 Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	110	0	0	3	542,943,248	3	725,000,000	3	865,000,000	3	930,000,000	12	Dinas Pariwisata
		2 Jumlah produk pariwisata berkualitas Indie 4.0	Produk	27	0	0	4	1,500,000,000	4	1,650,000,000	4	1,815,000,000	5	1,996,500,000	17	Dinas Pariwisata
	<b>Program :</b>															
	1 Pengembangan Produk Pariwisata	Jumlah Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	Daya Tarik wisata	27	0	0	84	2,042,943,248	90	2,375,000,000	95	2,680,000,000	100	2,926,500,000	369	Dinas Pariwisata
14	<b>MISI 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI</b>															
	<b>Tujuan : Meningkatkan pasar pariwisata Bali</b>															
	<b>Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB</b>															
		(Persentase%)		45	45		45		45		45		45		45	
	<b>Sasaran :</b>															
	1 Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	6,000,000	0	0	8,542,500	2,600,000,000	9,620,000	2,900,000,000	10,732,500	3,200,000,000	12,015,000	3,500,000,000	54,385,000	
		2 Persentase promosi pariwisata menerapkan Indie 4.0	Persentase (%)	40	0	0	50	1,195,000,000	60	1,445,000,000	70	1,600,000,000	80	1,800,000,000	80	
	<b>Program :</b>															
	1 Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Orang	6,070.473 dan 9.757.991	7.100.000 dan 8.200.000	3,365,720,800	8,000,000 dan 8,395,000	3,795,000,000	8,950,000 dan 8,585,000	4,345,000,000	9,997,000 dan 8,775,000	4,800,000,000	11,156,000 dan 8,970,000	5,300,000,000	44,800,000 dan 51,200,000	Dinas Pariwisata
15	<b>MISI 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF</b>															
	<b>Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan</b>															
	<b>Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Wisatawan</b>															
		persentase (%)		75	77		79		81		83		85		85	
	<b>Sasaran :</b>															
	1 Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase (%)	40 dan 60	40 dan 60	682,943,248	40 dan 60	1,047,000,000	40 dan 60	1,147,000,000	40 dan 60	1,249,000,000	40 dan 60	1,354,000,000	40 dan 60	Dinas Pariwisata
	<b>Program :</b>															
	1 Pengembangan Standar Industri Pariwisata	Jumlah Industri Pariwisata yang bersertifikat usaha	Usaha	248	0	432,943,248	10	447,000,000	20	522,000,000	30	599,000,000	40	679,000,000	100	Dinas Pariwisata
	2 Pengembangan Informasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	Orang	2,800,000	3,825,000	250,000,000	4,098,750	600,000,000	4,383,750	625,000,000	4,693,000	650,000,000	5,031,500	675,000,000	24,000,000	Dinas Pariwisata
	<b>Sasaran :</b>															
	2 Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Persentase (%)	40	41	1,187,943,248	42	1,390,000,000	43	1,565,000,000	44	1,737,000,000	45	1,915,000,000	45	Dinas Pariwisata
	<b>Program :</b>															
	1 Pengembangan SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang Bersertifikat Kompetensi Pariwisata	Orang	4,851	200	1,187,943,248	300	1,390,000,000	400	1,565,000,000	500	1,737,000,000	600	1,915,000,000	6,851	Dinas Pariwisata
16	<b>MISI 16 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS.</b>															
	<b>Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali</b>															
	<b>Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi</b>															
		Persentase (%)		6,35 (6,20-6,40)	6,4 (6,20-6,60)		6,60 (6,40-6,80)		6,80 (6,60-7,00)		7,00 (6,80-7,20)		7,20 (7,00-7,50)		7,20 (7,00-7,50)	
	<b>Sasaran :</b>															
	1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA	Persentase (%)	2.97	2.22	675,000,000	2.64	700,000,000	3.12	750,000,000	3.70	800,000,000	4.39	850,000,000	16.07	
	<b>Program :</b>															
	1 Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian	Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru diluar SARBAGITA.	Jumlah Kawasan	9	9	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	Nilai Investasi	Nilai (Tribun)	29.39	14.87	175,000,000	15.21	200,000,000	15.56	250,000,000	15.91	300,000,000	16.27	350,000,000	77.85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<b>Sasaran :</b>																	
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda)	Persentase (%)	10	10	1,076,000,000	15	1,550,000,000	20	1,780,000,000	25	2,060,000,000	30	2,320,000,000	30	
			2 Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	10	10		15		20		25		30		30	
			3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah (Toko)	40	40		40		40		40		40		200	
			4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah (Toko)	100	100		50		50		50		50		300	
<b>Program :</b>																	
	1	Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	produk	90	96	526,000,000	111	1,000,000,000	126	1,125,000,000	141	1,250,000,000	156	1,400,000,000	156	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2	Penguatan distribusi produk lokal	Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	Persentase (%)	20	20	550,000,000	25	550,000,000	30	655,000,000	35	810,000,000	40	920,000,000	40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	<b>MISI 17 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI.</b>																
	<b>Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan : 1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali</b>		<b>Persentase (%)</b>	2	2		3		3		4		4		4		
	<b>2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali</b>		<b>Persentase (%)</b>	10	11		11.5		12		12.5		13		13		
<b>Sasaran :</b>																	
	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri	Persentase (%)	2	2.01	3,626,000,000	2.02	7,475,000,000	2.03	8,078,000,000	2.04	8,639,480,000	2.05	9,272,020,000	2.05	
			2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0	Persentase (%)	100	-		25		25		25		25		200	
<b>Program :</b>																	
	1	Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Persentase (%)	1.5	1.5	3,200,000,000	1.5	3,500,000,000	1.5	3,600,000,000	1.5	3,700,000,000	1.5	3,800,000,000	7.5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2	Peningkatan ekspor industri kreatif	Persentase Nilai ekspor industri kreatif	Persentase (%)	\$ 818.902.508	2	426,000,000	2	3,975,000,000	3	4,478,000,000	4	4,939,480,000	4	5,472,020,000	4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Sasaran :</b>																	
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi	Jumlah	9	12	5,155,580,282.00	15	8,145,012,570.00	17	9,091,186,422.00	19	14,509,110,564.00	22	15,229,377,153.00	22	Dinas Koperasi dan UKM
<b>Program :</b>																	
	1	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	Persentase (%)	73.58	78.93	1,616,274,064	84.28	1,817,901,471	89.62	1,999,691,618	94.97	2,199,660,780	100	2,419,626,858	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2	Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani	Jumlah subak sebagai koperasi tani	Unit	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	Dinas Koperasi dan UKM
	3	Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Jumlah koperasi tenun yang aktif	Unit	2	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	7	Dinas Koperasi dan UKM
	4	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bankable	Unit	154	52	859,672,462	58	1,550,500,000	64	1,860,600,000	71	2,015,650,000	77	2,170,700,000	322	Dinas Koperasi dan UKM
	5	Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMD, BUMS/Swasta	Unit	62	104	199,910,798	104	481,079,202	126	642,256,527	126	5,403,433,851	128	5,464,611,176	128	Dinas Koperasi dan UKM
	6	Penciptaan Iklim Usaha Dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Jumlah UMKM yang bankable	Unit	70	169	541,779,710	180	1,630,000,000	185	1,780,000,000	190	1,920,000,000	195	2,070,000,000	919	Dinas Koperasi dan UKM
	7	Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Jumlah Pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	Unit	550	50	387,943,248	50	1,015,531,897	50	1,108,638,277	50	1,220,365,933	50	1,354,439,119	800	Dinas Koperasi dan UKM
	8	Pengembangan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang dikembangkan	Jumlah	8	8	250,000,000	8	350,000,000	8	400,000,000	8	450,000,000	8	450,000,000	8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18	<b>MISI 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT,LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI.</b>																
	<b>Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Indeks konektivitas</b>		<b>Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)</b>	2.74	2.7		2.6		2.5		2.4		2.3		2.3		
<b>Sasaran :</b>																	
	1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)	Indeks	60	62	338,306,628,920	63	393,424,448,022	75	439,971,621,680	81.25	484,839,741,847	82	534,147,932,532	82	Dinas Perhubungan
<b>PROGRAM :</b>																	
	1	Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita	Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita	Indeks	N/A	60	6,004,806,384	65	6,605,287,022	70	7,265,815,725	75	7,992,397,297	79	8,791,637,027	79	Dinas Perhubungan
	2	Pengembangan infrastruktur transportasi publik	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	Jumlah	9	9	53,812,000	10	1,750,000,000	10	3,250,000,000	11	4,000,000,000	12	4,750,000,000	12	Dinas Perhubungan
	3	Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi	Tingkat pelayanan simpang	Klasifikasi	C	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	752,650,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	1,956,700,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2,144,570,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2,454,985,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2,874,700,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	Dinas Perhubungan
	4	Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran	Persentase perubahan yang menerapkan manajemen keselamatan	Persentase (%)	40	40	306,572,080	40	900,000,000	50	1,500,000,000	55	2,000,000,000	60	2,500,000,000	60	Dinas Perhubungan
	5	Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	77.44	77.44	331,188,788,456	77.71	382,212,461,000	77.98	425,811,235,955	78.11	468,392,359,550	78.25	515,231,595,505	78.25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
19	<b>MISI 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Persentase Penyelesaian pelanggaran ketertarikan, kenyamanan dan ketertiban umum</b>																
				100	100		100		100		100		100		100		100
	<b>Sasaran :</b>																
	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1. Angka kriminalitas	Kasus	4,607	4,138	1,470,000,000	3,669	3,455,000,000	3,200	3,935,000,000	2,731	4,420,000,000	2,262	4,685,000,000	2,262		
		2. Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan	Persentase (%)	70	70	21,762,000,000	74	23,600,000,000	78	26,015,000,000	80	28,551,500,000	82	31,550,300,000	82		
		2. Persentase penanganan bencana	Persentase (%)	100	100	10,505,686,584	100	30,556,254,140	100	13,711,879,554	100	15,083,067,509	100	15,381,374,260	100		
	<b>Program :</b>																
	1 Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	Persentase (%)	N/A	0	0	66.6	1,600,000,000	77	1,800,000,000	88	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	2 Pengendalian Bencana	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	Persentase (%)	100	100	10,505,686,584	100	30,556,254,140	100	13,711,879,554	100	15,083,067,509	100	15,381,374,260	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kapasitas Sumber Daya Keamanan yang terlatih	Persentase (%)	1.5	4	1,170,000,000	4	1,355,000,000	4	1,435,000,000	4	1,520,000,000	4	1,585,000,000	4	Satuan Polisi Pamong Praja	
	4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	Persentase Sumber Daya Keamanan Tradisional yang terlatih	Persentase (%)	0.9	0.9	300,000,000	1.3	500,000,000	1.3	700,000,000	1.3	900,000,000	1.3	1,100,000,000	6.2	Dinas Kebudayaan	
	5 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	pelanggaran	247	235	20,340,000,000	225	22,100,000,000	215	24,315,000,000	205	26,651,500,000	200	29,200,300,000	200	Satuan Polisi Pamong Praja	
	6 Peningkatan Keamanan Lingkungan	Persentase Sarana Prasarana Keamanan Lingkungan berstandar	Persentase (%)	6.9	6.5	1,422,000,000	6	1,500,000,000	5.5	1,700,000,000	5	1,900,000,000	4.5	2,350,000,000	4.5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
20	<b>MISI 20 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan : 1 Indeks demokrasi</b>																
				78.8	79		80		81		81		81		81		81
	<b>2 Indeks pemberdayaan gender</b>																
				63.76	64.23		64.55		64.75		64.9		65		65		65
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatkan peran serta Krama Bali dalam ketataan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada demokratis	Persentase (%)	70.5	73.81	2,555,000,000	73.81	2,860,000,000	73.81	3,260,000,000	75.00	3,610,000,000	75	4,010,000,000	75		
	<b>Program :</b>																
	1 Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase (%)	77.5	77.5	705,000,000	77.5	900,000,000	78	1,100,000,000	78	1,250,000,000	78	1,450,000,000	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	2 Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Menuruminya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat.	Persentase (%)	100	33.3	690,000,000	16.6	800,000,000	16.6	1,000,000,000	16.6	1,200,000,000	16.6	1,400,000,000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	3 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	Persentase (%)	98.45	98.55	1,160,000,000	98.65	1,160,000,000	98.70	1,160,000,000	98.75	1,160,000,000	98.80	1,160,000,000	98.80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
21	<b>MISI 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.</b>																
	<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)</b>																
				14.35	14.71		15.06		15.53		15.9		16.28		16.28		16.28
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatkan keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	16.93	17.11	12,242,595,013	17.29	77,110,914,176	17.46	79,647,579,144	17.64	57,909,434,157	17.82	77,623,239,073	17.82		
	<b>Program :</b>																
	1 Peningkatan kualitas penataan ruang	Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persentase (%)	90	91	2,012,344,633	92	3,583,880,000	93	3,785,305,000	94	3,942,690,000	95	4,121,550,000	95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	2 Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase (%)	5.02	4.99	3,366,210,000	4.95	3,702,831,000	4.89	4,073,114,000	4.83	4,480,425,000	4.75	4,928,468,000	4.75	Dinas Kehutanan	
	3 Perlindungan Sumber Daya Air	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persentase (%)	68	68.5	2,855,312,400	69.4	30,248,856,100	70.3	40,643,799,210	70.6	19,808,649,131	72.3	19,119,384,044	72.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	4 Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	58	60	4,008,727,980	64	39,575,347,076	68	31,145,360,934	72	29,677,670,026	75	49,453,837,029	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	<b>Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>																
				61.51	62.08		62.64		63.21		63.77		64.34		64.34		64.34
	<b>Sasaran :</b>																
	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	1 Indeks kualitas air	Indeks	63.17	64.67	4,335,853,000	66.17	12,294,080,000	67.67	10,034,488,000	69.17	10,991,836,800	70.67	11,937,220,480	70.67		
		2 Indeks kualitas udara	Indeks	91.98	92.39		92.89		93.39		93.89		94.39		94.39		94.39
		3 Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	38.57	39.57		40.57		41.57		42.57		43.57		43.57		43.57
		4 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	8.38	9.38		10.38		11.38		12.29		12.29		12.29		12.29
		5 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	0.40	0.43	1,320,999,664	1.10	1,625,000,000	7.14	1,850,000,000	13.79	2,125,000,000	20	2,500,000,000	20		



NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>PROGRAM :</b>																
1	Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	Persentase (%)	100	100	205,000,000	55	1,294,700,000	65	1,424,170,000	75	1,566,587,000	90	1,723,245,700	90	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase (%)	7.21	6.64	282,500,000	6.06	799,380,000	5.47	879,318,000	4.87	967,249,800	4.31	1,063,974,780	4.31	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	Persentase (%)	100	100	3,696,353,000	100	9,250,000,000	100	6,681,000,000	100	7,258,000,000	100	7,925,000,000	100	Dinas Lingkungan Hidup	
4	Peningkatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase (%)	18	20	152,000,000	22	950,000,000	24	1,050,000,000	26	1,200,000,000	27	1,225,000,000	27	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase (%)	73	73		75		74		73		72		72	Dinas Lingkungan Hidup	
5	Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum	MW	4.3	5	1,320,999,664	15	1,625,000,000	90	1,850,000,000	185	2,125,000,000	300	2,500,000,000	300	Dinas Tenaga Kerja ESDM	
		Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	Persentase (%)	55	60		65		70		75		80		80	Dinas Tenaga Kerja ESDM	
22	<b>Misi 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.</b>																
	<b>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>																
	Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik	Indeks		75	77		79		80		81		82		82		
	<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	77	7,873,967,400	79	10,535,865,000	80	12,563,451,000	81	14,756,795,800	82	18,227,476,080	82		
	<b>PROGRAM :</b>																
1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.22	1.35	5,588,967,400	1.72	7,720,865,000	2.18	9,482,951,000	2.52	11,289,245,800	3	14,365,171,080	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	68	71	1,050,000,000	74	1,155,000,000	77	1,270,500,000	79	1,397,550,000	81	1,537,305,000	81	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	200,000,000	86.5	200,000,000	87	225,000,000	87.5	250,000,000	88	275,000,000	88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks	76.25	76.50	150,000,000	77.00	175,000,000	77.50	200,000,000	78.00	225,000,000	78.50	250,000,000	78.50	Badan Pendapatan Daerah	
5	Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	Indeks	10	10	885,000,000	11	1,285,000,000	20	1,385,000,000	28	1,595,000,000	33	1,800,000,000	33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
6	Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP-el yang mencapai target	Persentase (%)	88.89	88.89	950,000,000	88.89	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,050,000,000	100	1,185,000,000	100	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	
	<b>Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan</b>																
	Indikator Tujuan : 1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		66.16	68		70		72		74		76		76		
	2 Opini BPK	Status		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase (%)		76.37	77		78		79		80		81		81		
	<b>Sasaran :</b>																
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	66.16	68	165,266,949,450	70	287,338,765,023	72	228,927,446,220	74	236,426,986,454	76	251,219,050,347	76		
	<b>PROGRAM :</b>																
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	Persentase (%)	82	5	108,777,898,692	5	142,590,256,242	5	122,855,688,561	5	126,000,655,028	5	132,300,687,780	100	Sekretariat DPRD	
2	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rencana Kelitbangan yang diimplementasikan	Persentase (%)	80	70	13,831,215,392	70	15,214,336,931	75	16,735,770,624	75	18,409,347,687	80	20,250,282,455	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	
3	Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral yang valid	Persentase (%)	100	100	724,206,200	100	50,800,000,000	100	5,800,000,000	100	6,000,000,000	100	7,000,000,000	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	Persentase perencanaan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase (%)	100	100	6,000,000,000	100	6,600,000,000	100	7,260,000,000	100	7,986,000,000	100	8,784,600,000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persentase (%)	100	100	6,000,000,000	100	6,600,000,000	100	7,260,000,000	100	7,986,000,000	100	8,784,600,000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
6	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase (%)	100	100	1,700,000,000	100	1,870,000,000	100	2,057,000,000	100	2,262,700,000	100	2,488,970,000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
7	Peningkatan Pengolahan Arsip	Nilai Evaluasi Kearsipan	Nilai	67	70	2,950,000,000	71	2,950,000,000	72	2,950,000,000	73	2,950,000,000	74	2,950,000,000	74	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
8	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Persentase (%)	100	100	1,079,193,750	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	
9	Pengembangan Manajemen Karir	Persentase peningkatan manajemen karir	Persentase (%)	3.50	3.50	2,508,495,000	6.50	8,387,220,000	6.90	8,387,220,000	12.60	8,387,220,000	25.20	8,387,220,000	25.20	Badan Kepegawaian Daerah	
10	Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi kriteria Penilaian dan penghargaan	Persentase (%)	88.67	88.67	937,850,000	90.00	3,040,000,000	92.00	3,040,000,000	93.67	3,040,000,000	96.00	3,040,000,000	96.00	Badan Kepegawaian Daerah	
11	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif	Persentase ASN dan legislatif yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	Persentase (%)	42	43	1,358,300,000	44	2,518,800,000	46	2,118,800,000	47	2,528,800,000	48	2,228,800,000	48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah	Persentase (%)	100	0	0	100	3,743,656,595	100	4,118,022,254.5	100	4,529,824,479.95	100	4,982,806,927.95	100	Biro Hukum dan HAM
13	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peringkat	15	0	0	10	1,200,000,000	9	1,400,000,000	8	950,000,000	7	950,000,000	7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
14	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat daerah melaksanakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik dengan baik	Persentase (%)	75	77	361,014,000	79	397,115,400	81	436,826,940	83	480,509,634	85	528,560,597	85	Biro Organisasi
15	Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat daerah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	Persentase (%)	75	77	952,856,000	79	1,695,000,000	81	1,864,500,000	83	2,050,950,000	85	2,256,045,000	85	Biro Organisasi
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase (%)	75	77	718,130,000	79	1,405,000,000	81	1,545,500,000	83	1,700,050,000	85	1,870,055,000	85	Biro Organisasi
17	Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Jumlah Informasi yang diberitakan media	Tayang/berita	3,151	4,800	13,858,300,000	4,850	12,550,000,000	4,950	12,785,000,000	5,050	12,950,000,000	5,150	13,450,000,000	5,150	Biro Humas dan Protokol
18	Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Persentase (%)	100	0	0	100	7,506,978,297	100	7,927,676,127	100	8,720,443,740	100	9,592,488,114	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
19	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Level Kematangan Kelembagaan UKPBJ	Level	Level 3	0.00	0	Level 4	1,804,389,100	Level 4	2,314,828,010	Level 4	2,546,310,811	Level 5	2,800,941,892	Level 5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
20	Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Indeks pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase (%)	100	0	0	100	947,573,000	100	1,042,330,300	100	1,146,563,330	100	1,261,219,663	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
21	Peningkatan Kapabilitas APMP	Level APMP	Level	3	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	3	1,100,000,000	3	1,500,000,000	3	1,800,000,000	3	Inspektorat
22	Peningkatan Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	2,220,000,000	3	4,970,000,000	3	5,545,000,000	4	3,000,000,000	4	3,200,000,000	4	Inspektorat
23	Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan	Persentase kepuasan pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase (%)	100	100	0	100	8,030,000,000	100	8,833,000,000	100	9,716,300,000	100	10,687,930,000	100	Biro Umum
24	Peningkatan administrasi pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase (%)	50	54	289,490,416	65	318,439,458	76	350,283,403	87	385,311,744	100	423,842,918	100	Biro Administrasi Pembangunan
25	Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	Indeks	60	75	1,630,000,000	80	1,725,000,000	85	1,890,000,000	90	1,975,000,000	90	7,220,000,000	90	Badan Penghubung
<b>Sasaran</b>																
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0.78	2.53	1,888,313,500.00	7.13	2,327,144,850.00	7.28	2,574,211,291.00	7.41	2,840,771,415.00	7.54	3,128,770,330.00	7.54	Badan Pendapatan Daerah
<b>Program</b>																
1	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	57.53	57.55	1,888,313,500.00	57.94	2,077,144,850.00	58.24	2,274,211,291.00	58.58	2,490,771,415.00	58.93	2,728,770,330.00	58.93	Badan Pendapatan Daerah
2	Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	5	0	0	5	250,000,000	6	300,000,000	7	350,000,000	8	400,000,000	8	Biro Perekonomian

TABEL 6.3 B  
RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD SEMESTA BERENCANA (SETELAH PERUBAHAN)

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023				
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>MISI 1 : MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI</b>																
	<b>Tujuan : Terpenuhi kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak</b>																
	Indikator Tujuan : 1	Tingkat inflasi Bali	Persentase (%)	3,5% ±1%(yoy)	2.37	-	0.55	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	-	3,00% ±1%(yoy)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Indikator Tujuan : 2	Ketersediaan pangan utama	Persentase (%)	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	<b>Sasaran :</b>																
	1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Persentase stok pangan aman	Persentase (%)	20	20	8,278,257,170	20	3,089,883,949	20	17,206,834,392	20	7,759,692,795	20	10,712,757,063	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	<b>Program :</b>																
	1	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal per kapita per hari	2,647 kkal/kapita/hari	2,650 kkal/kapita/hari	310,406,833	2,648 kkal/kapita/hari	93,486,511	2,649 kkal/kapita/hari	377,296,832	2,440 kkal/kapita/hari	523,099,224	2,460 kkal/kapita/hari	549,254,185	2,460 kkal/kapita/hari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	Persentase (%)	76,95 Persen	76,95 Persen	647,394,171	77,45 Persen	370,782,551	77,95 Persen	10,324,905,642	90 Persen	362,608,292	90 Persen	380,738,707	90 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	Persentase (%)	6,1 ton benih padi, 1,8 ton benih palawija, 26 ton benih sayuran, 10.000 buah-buahan dan tanaman hias	6,1 ton benih padi, 1,8 ton benih palawija, 26 ton benih sayuran, 10.000 buah-buahan dan tanaman hias	3,028,838,505	77 Persen	1,196,150,506	78 persen	939,928,500	-	-	-	79 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	5 persen	1,127,113,210	5 persen	1,183,468,871	5 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Jumlah Populasi Ternak	ternak	438.131 (satuan ternak)	623.915 (satuan ternak)	592,416,351	446.893 (satuan ternak)	196,592,622	455.831 (satuan ternak)	4,384,339,136	-	-	-	455.831 (satuan ternak)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	0,8 persen	4,157,926,867	1 Persen	4,365,823,210	1 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	97,157.6	95,842	130,926,100	95,973	38,757,678	103,104	187,475,168	105,166,51	469,284,796	107,269,84 ton	1,581,752,539	107,269.84 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	17,535.7	16,411	28,079,300	31,862,23	42,960,678	18,609.02	59,475,148	18,981.2	0	19,360.82 Ton	1,476,076,125	19,360.82 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Peningkatan Distribusi Pangan	ton	<10%	<10%	2,269,108,321	55 Ton	556,049,468	70 Ton	170,011,392	-	-	-	70 Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persentase (%)	95.6	95.6	1,105,262,437	95.7	348,033,519	95.8	188,732,592	-	-	-	95.8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	82 persen	358,701,184	83 persen	376,636,243	83 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	Persentase (%)	8,47 Persen	8,47 Persen	165,825,152	22 Persen	247,070,416	27 persen	574,669,982	3 persen	760,959,222	4 persen	799,007,183	4 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	<b>Sasaran :</b>																
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang krama Bali	Persentase pemenuhan kebutuhan sandang krama Bali	Persentase (%)	5.83	N/A	2,864,505,916	N/A	1,209,481,674	10.11	3,013,277,374	9.60	4,178,150,082	8.58	4,349,944,723	8.58	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	<b>Program :</b>																
	1	Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	Persentase (%)	1	0.00	0	0.00	2,026,000	31.03	102,666,600	34.48	42,249,870	0.06	7,249,500	0.06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Persentase (%)	15216	4.93%	2,835,915,916	1.50%	1,205,823,949	1.50%	2,860,610,864	1.50%	4,087,383,454	1.50%	4,291,752,627	1.50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama Bali	Persentase (%)	25%	25%	28,590,000	25%	1,631,725	30	49,999,910	30	48,516,758	30%	50,942,596	30%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	<b>Sasaran :</b>																
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	98	N/A	772,665,760	N/A	1,222,265,600	98.60	54,975,044,574	98.80	1,429,125,794	99	1,508,667,894	99	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	<b>Program :</b>																
	1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase (%)	8,2%	7,70%	772,665,760.00	2.28 %	1,021,453,400	8.00%	797,921,210	8.00%	372,454,988	6.62%	685,805,088	6.62%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	Unit	N/A	N/A	N/A	4.00	200,812,200	20.00	54,177,123,364	N/A	N/A	-	-	20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.00%	1,056,670,806	71%	822,862,806	71%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	<b>Sasaran :</b>																
	4	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Inflasi Pangan Bali	Persentase (%)	5.60	N/A	51,487,378	5.65	249,331,442	5,50% ±1%(yoy)	338,905,792	5,40% ±1%(yoy)	372,795,742	5,40% ±1%(yoy)	557,324,000	5,40% ±1%(yoy)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	3				2019		2020		2021		2022		2023			
						REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Program</b>																	
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang difundaklanjuti	Persentase (%)	N/A	100	51,487,378	100	249,331,442	100	338,905,792	100	372,795,742	100	557,324,000	100	Sekretariat Daerah	
<b>Misi 2 : MEWILJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.</b>																	
<b>Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian</b>																	
<b>Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB</b>																	
		Persentase (%)	15	13.45			15.11			20		22		25		25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>Sasaran</b>																	
1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	98.70	9,440,599,015	29	8,158,726,678	31	3,155,878,807	33	3,232,679,057	35	983,658,047	35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
<b>Program</b>																	
1	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	Persentase	5 Persen	5 Persen	2,526,313,450	4,5 Persen	2,029,353,506	50 Persen	1,074,387,428	5 Persen	2,295,861,869	5 Persen	0	5 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian Yang Dibangun dan Berproduksi	Komoditi	98,524 ton	98,524 ton	2,269,108,321	1 Unit	1,335,057,416	1 Komoditi	852,674,672	-	-	-	-	1 Komoditi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	15 persen	936,817,188	15 persen	983,658,047	30 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Jumlah Kawasan Pertanian Organik Yang Produktif	kawasan	1 unit, 1 paket, 1 paket ; 100 kelompok	1 unit, 1 paket, 1 paket ; 100 kelompok	4,645,177,244	1 Kawasan Hidroponik Perkotaan dan 1 kawasan pertanian organik	4,794,315,756	1 Kawasan	1,228,816,707	-	-	-	-	1 Kawasan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
<b>Sasaran</b>																	
2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1 Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103.48	104.93	2,310,998,385	93.60	723,386,592	105	4,975,956,176	105.5	4,967,220,306	106	5,215,581,321	106	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	111.44	252,723,870	100.12	48,671,678	117.9	153,571,178	118.5	125,386,916	119.2	290,000,000	119.2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
<b>Program</b>																	
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Taman Gumi Banten Yang Produktif	unit	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 ros/30.000 phn/1.500 btr/500.000 kg/580.000 ros/7.638.500 phn/240.000	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 ros/30.000 phn/1.500 btr/500.000 kg/580.000 ros/7.638.500 phn/240.000	2,888,302,998	1 Unit	2,081,313,022	1 Unit	2,492,534,282	-	-	-	-	1 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	1 Persen	2,797,491,922	1 Persen	2,937,366,518	2 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persentase (%)	59 Kwintal/Ha	1 Persen	1,813,315,142	1 Persen	574,202,893	1 Persen	4,553,685,296	1 persen	1,876,082,946	1 Persen	1,969,887,093	5 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Agribisnis Peternakan Yang Baik	kelompok	27 Kelompok	35 Klp	497,683,243	35 Klp	149,183,699	35 Klp	422,270,880	-	-	-	-	35 Klp	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	3,73 Persen	293,645,438	4,1 Persen	308,327,710	4,1 Persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	Sertifikat	134	277	252,723,870	242	48,671,678	149	153,571,178	149	125,386,916	151 SKP	290,000,000	151 SKP	Dinas Kelautan dan Perikanan	
<b>Sasaran</b>																	
3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian	Persentase (%)	75	N/A	226,788,139	79.78	77,399,726	77	133,113,344	78	120,903,344	79	126,948,511	79	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
<b>Program</b>																	
1	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Bersertifikat	kelompok	3 Orang, 57 Unit	3 Orang, 57 Unit	226,788,139	15 Kelompok	77,399,726	20 Kelompok	133,113,344	-	-	-	-	20 Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	-	15 persen	120,903,344	16 persen	126,948,511	31 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
<b>Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.</b>																	
<b>Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali</b>																	
<b>Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)</b>																	
		Dalam tahun	71.4	71.99			72.13			72.3		72.5		72.5		72.5	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran</b>																	
1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali	Persentase (%)	88	88	13,704,412,700	89.5	5,525,355,223	90	3,427,783,144	90.75	128,982,800	91.47	409,807,160	91.47	Dinas Kesehatan	
<b>Program</b>																	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase (%)	0	19	211,860,440	60	62,564,100	60	230,332,210	60	34,422,800	70%	153,431,960	70%	Dinas Kesehatan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Singa Aktif Mandiri	Persentase (%)	0	11.11	3,415,385,317	11,11	790,723,748	44	2,718,397,154	44	94,560,000	56%	147,500,000	56%	Dinas Kesehatan	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persentase (%)	85%	83.75	10,077,166,943	80	4,672,067,375	79	479,053,780	81		83%	108,875,200	83%	Dinas Kesehatan	
<b>Sasaran</b>																	
2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Persentase (%)	85	85	293,215,711,382	86	167,466,201,462	86	60,703,235,155	86	49,698,162,244	86	178,121,077,362	86	Dinas Kesehatan	
<b>Program</b>																	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Persentase (%)	49%	37.5	8,160,329,892	47,5	18,485,575,130	60	26,228,837,770	60	32,777,513,792	62%	13,955,010	62%	Dinas Kesehatan	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase (%)	85%	87	281,979,472,916	87	148,205,047,912	87	34,101,104,121	87	16,564,940,308	87%	177,733,628,801	87%	Dinas Kesehatan
	3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	kasus	250 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	230 kasus rabies dan 2 kasus flu burung	3,075,908,574	150 kasus rabies dan 5 kasus flu burung	775,578,420	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	373,293,264	-	-	-	-	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Pemurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	Persentase	-	-	-	-	-	5 persen	355,708,144	10 persen	373,493,551	10 persen	373,493,551	10 persen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran :															
	3 Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Persentase (%)	85	95	20,180,991,832	91.78	14,654,023,578	95	38,637,821,358	100	23,742,713,046	100	29,079,366,291	100	Dinas Kesehatan
	Program :															
	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	Persentase (%)	100%	100	20,180,991,832	100	14,654,023,578	100	38,637,821,358	100	23,742,713,046	100%	29,079,366,291	100%	Dinas Kesehatan
4	Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDIA NYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.															
	Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas															
	Indikator Tujuan : Rata-rata lama sekolah		Tahun	9.72	8.84	-	8.95	-	10.56	-	10.84	-	11.40	-	11.40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.21	13.27	1,063,517,200	13.33	347,885,970	13.47	299,999,230	13.61	29,048,850	13.75	62,263,900	13.75	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program :															
	1 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai	84	82.00	1,063,517,200	85.99	347,885,970	85.50	299,999,230	86.00	29,048,850	86.50	62,263,900	86.50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran :															
	2 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18	Persentase (%)	82.35	82.6	207,979,728,817	82.96	235,558,338,954	82.92	631,019,395,415	83.11	606,545,872,638	83.3	627,465,705,967	83.3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program :															
	1 Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Persentase (%)	73.15	73.21	81,862,163,059	82.51	91,136,128,947	100.00	314,418,395,115	100.00	317,588,560,170	100.00	320,347,905,537	100.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkerja di dunia usaha/dunia industri	Persentase (%)	0	52.73	92,804,144,889	47.96	104,706,643,902	46.5	290,407,896,006	47	264,159,362,318	47.50	280,643,714,074	47.50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	Persentase (%)	15.14	43.46	33,313,420,869	43.73	39,715,566,105	35.35	26,193,104,294	35.45	24,797,950,150	35.55	26,474,086,356	35.55	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN.															
	Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal															
	Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu	Persentase (%)	Persentase (%)	2.8	24	-	26	-	72	-	77	-	82	-	82	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat	Persentase (%)	Persentase (%)	0.20	N/A	-	N/A	-	3.64	-	4.29	-	4.93	-	4.93	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	Jumlah jahar pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu	Jumlah	21	91	N/A	100	N/A	274	26,058,793,926	293	25,240,077,216	312	288,863,300	312	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program :															
	1 Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50.87	274,997,750	51.37	233,380,850	51.87	209,722,900	51.87	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Nilai rata-rata bahasa bali pada satuan pendidikan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69.80	25,783,796,176	70.00	25,006,696,366	70.20	79,140,400	70.20	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
6	Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI															
	Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi															
	Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Persentase (%)	74.77	75.38	-	75.50	-	75.51 (75,41-75,61)	-	76.93 (75,61 - 78,25)	-	77.78 (75,56 - 80,00)	-	77.78 (75,56 - 80,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	Persentase (%)	65.45	70.91	13,074,915,878	63.64	834,081,542	69.09	54,149,969,525	69.09	35,336,552,025	74.55	5,274,997,600	74.55	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
	Program :															
	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	Persentase (%)	34.75	43.99	3,914,345,550	47.93	196,378,600	49.26	149,999,740	0	0	55.21	24,997,600	55.21	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
	2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	77	77	557,943,248	20	146,323,444	79	199,970,300	80	767,258,585	81.00	0	81.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	3 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Medali yang diperoleh Atlit pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	11	98	8,602,627,080	0	491,379,498	90	52,699,999,485	100	34,069,293,440	110	5,000,000,000	480	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	4 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif dalam Satuan Karya Pramuka	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48	1,100,000,000	50	500,000,000	52.00	250,000,000	52.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023			
						REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	<b>MISI 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Persentase Kemiskinan</b>																
		Persentase (%)	3.91	3.61	-	4.45	-	3,75 (3,50-4,00)	-	4,25 (4,00-4,50)	-	3,75 (3,50-4,00)	-	3,75 (3,50-4,00)		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	75	20.50	1,769,784,616	N/A	611,262,980	78	2,674,559,055	79	4,952,227,600	80	2,772,273,868	80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
	<b>Program :</b>																
	1 Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlambatan yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	Persentase (%)	16.87	9.58%	1,007,887,616	8.87%	433,855,800	21.87%	2,027,203,470	17,91%	4,650,332,465	17,91%	2,470,381,168	17,91%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
	2 Penanganan Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%)	14.78	14.78%	397,200,000	13.46%	1,955,400	20,62%	380,949,755	100%	255,939,600	100%	255,937,800	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
	3 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang terdata dan termonitor	Persentase (%)	10.26	1 laporan	66,250,000	1 laporan	1,384,500	100%	51,806,160	100%	3,805,370	100%	3,805,200	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
	4 Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase (%)	95	2.03	298,447,000	1,37%	174,067,280	22,57%	214,599,670	8,22%	42,150,165	8,22%	42,149,700	8,22%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
8	<b>MISI 8 : MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka</b>																
		Persentase (%)	1.37	1.57	-	5.63	-	5,63 (5,21 - 6,05)	-	3,19 (2,77-3,61)	-	2,32 (1,90-2,74)	-	2,32 (1,90-2,74)		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (PPAK)	Persentase (%)	76.56	73.77	2,774,060,510	74.32	598,506,219	76.30	199,999,880	76.55	125,150,500	76.80	125,150,500	76.80	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	Persentase (%)	51.56	63.06	2,774,060,510	10.80	598,506,219	30	199,999,880	30	125,150,500	30	125,150,500	30	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	<b>Sasaran :</b>																
	2 Meningkatkan akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase (%)	98.60	98.43	1,022,201,558	94.37	30,227,450	94.37	199,999,700	98.61	179,010,100	97.68	176,010,100	97.68	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang	9,638	6,918	1,022,201,558	4,380	26,037,750	5,200	100,000,000	0	0	5,950	3,000,000	22,448	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	Kawasan	0	0	0	0	4,189,700	1	99,999,700	4	179,010,100	4	173,010,100	9	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
9	<b>MISI 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPREHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan</b>																
		Persentase (%)	52.26	51.95	-	41.04	-	35.00	-	35.00	-	35.00	-	35.00		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persentase (%)	52.26	51.95	811,756,159	41.04	430,115,400	35.00	306,070,200	35.00	178,500,000	35.00	165,748,002	35.00	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	Persentase (%)	4.74	5.23	530,656,159	5.72	73,550,400	6.22	149,999,600	6.71	27,500,000	7.2	11,279,900	7.2	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
		Persentase Perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	Persentase (%)	100	100	281,100,000	10	356,565,000	100	156,070,600	100	151,000,000	100	138,248,002	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	2 Program Hubungan Industrial	Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan dan penyelesaian PHI	Persentase (%)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	100	16,220,100	100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
10	<b>MISI 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju</b>																
		Jumlah	19,782	19,807	-	19,832	-	19,857	-	19,880	-	19,905	-	19,905		Dinas Kebudayaan	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	Jumlah	19,745	19,765	804,179,598	19,785	2,068,235,900	19,805	4,969,905,620	19,825	661,513,920	19,845	694,589,616	19,845	Dinas Kebudayaan	
		2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia	Jumlah	37	42	23,585,009,843	47	7,231,219,333	52	30,307,337,786	55	32,835,292,938	60	34,477,057,585	60	Dinas Kebudayaan	
	<b>Program :</b>																
	1 Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persentase	5	5%	1,807,153,775.00	4%	553,908,016.00	5%	2,110,490,220.00	5%	336,500,000.00	5%	353,325,000	24%	Dinas Kebudayaan	
	2 Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase	5	5%	20,059,050,341.00	3%	3,813,825,805.00	5%	14,244,670,242.00	5%	1,217,138,902.00	5%	1,277,995,847	23%	Dinas Kebudayaan	
	3 Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	Jumlah	410	410	804,179,598.00	515	2,068,235,900.00	520	4,969,905,620.00	525	661,513,920.00	1,430	694,589,616	3,400	Dinas Kebudayaan	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persentase	5	5%	1,718,805,727.00	4%	2,863,485,512.00	5%	13,952,177,324.00	5%	31,281,654,036.00	5%	32,845,736,738	24%	Dinas Kebudayaan
11	<b>MISI 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.</b>															
	<b>Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi</b>															
	<b>Indikator Tujuan : Indeks Kebahagiaan</b>															
		Indeks		72,48 (2017)	N/A	-	N/A	-	73.98	-	73.98	-	74.98	-	74.98	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	<b>Sasaran :</b>															
	1 Meningkatkan kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1 Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala	Persentase (%)	40	10.32	33,623,107,431	N/A	14,140,144,554	60	48,503,401,422	70	12,048,570,063	80	9,409,030,164	80	Sekretariat Daerah
		2 Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual	Persentase (%)	73	N/A	14,281,717,866	N/A	11,467,527,453	79	24,814,822,433	82	21,038,894,896	85	15,500,000,000	85	Sekretariat Daerah
	<b>Program :</b>															
	1 Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sat Kerthi	Indeks	N/A	N/A	14,281,717,866	74	11,467,527,453	76	24,814,822,433	77	21,038,894,896	78	15,500,000,000	78	Sekretariat Daerah
	2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan layanan air limbah layak	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	1,898,518,800	89.79%	924,603,034	89.95%	970,833,186	89.95%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	84%	88.00%	29,826,358,618.49	78.80%	13,581,064,710.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase cakupan layanan air minum aman	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	46,098,723,490	92%	6,080,840,047	93%	6,384,882,049	93%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase (%)	0.81	3.85	2,324,769,248	1.14	249,615,388	0.2	0	0	0	1.30	1,000,000,000	1.30	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
	5 Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	Persentase (%)	5.56	4.11	521,519,137	4.10	76,089,500	3.67	199,952,536	3.04	4,895,944,786	2.41%	122,507,596	2.41%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	6 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah danau dalam kondisi baik kuantitas (volume air danau) dan kualitas (status mutu air)	Jumlah	4	4	0	4	19,770,000	4	0	4	0	4 danau	45,838,400	4 danau	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	7 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Kawasan	3	3	950,460,428	3	213,604,956	3	306,206,596	4	147,182,196	5 Kawasan	884,968,933	5 Kawasan	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	<b>MISI 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN.</b>															
	<b>Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi</b>															
	<b>Indikator Tujuan : 1 Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali</b>															
		Persentase (%)		N/A	N/A	-	7.03	-	8.57	-	12.06	-	15.07	-	15.07	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
	<b>2 Persentase Subak yang lestari</b>															
		Persentase (%)		N/A	N/A	-	75	-	75	-	80	-	85	-	85	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
	<b>Sasaran :</b>															
	1 Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	1 Persentase desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	99,87	453,889,111,785	99,87	462,462,204,748	99,87	462,348,807,702	100	466,288,950,348	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
		2 Persentase Subak yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	98,50	120,130,000	98,50	407,713,000	98,50	1,064,438,792	100	431,983,892	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
	<b>Program :</b>															
	1 Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	99,87	453,889,111,785	99,87	462,462,204,748	99,87	462,348,807,702	100	466,288,950,348	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
		Persentase Subak berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	Persentase (%)	N/A	N/A	N/A	98,50	120,130,000	98,50	407,713,000	98,50	1,064,438,792	100	431,983,892	100	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
13	<b>MISI 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI.</b>															
	<b>Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas</b>															
	<b>Indikator Tujuan : Meningkatkan Rata-Rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara</b>															
		Hari		10,45 dan 4,00	8,2 dan 4,30	-	2,68 dan 2,01	-	2,68 dan 2,01	-	5,33 dan 3	-	10,9 dan 4,50	-	10,9 dan 4,50	Dinas Pariwisata
	<b>Sasaran :</b>															
	1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas lokal	Destinasi	100	0	0	0	0	18	429,877,089	21	2,077,500	31	41,138,200	70	Dinas Pariwisata
	<b>Program :</b>															
	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Persentase (%)	17.53	-	0	-	0	2.56	429,877,089	3.85	2,077,500	5.13	41,138,200	11.54	Dinas Pariwisata
	<b>Sasaran :</b>															
	2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	110	96	450,997,791	31	185,560,786	0	0	40	356,391,845	50	452,105,784	217	Dinas Pariwisata
	<b>Program :</b>															
	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	Persentase (%)	N/A	-	450,997,791	-	185,560,786	0	0	1	356,391,845	1	452,105,784	2	Dinas Pariwisata

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023			
						REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	<b>MISI 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEKSPANSI KREATIVITAS INOVASI</b>																
	<b>Tujuan : Meningkatkan pasar pariwisata Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB</b>																
		Persentase (%)		23.40	23.26	-	18.76	-	18.34	-	20.86	-	25.93	-	25.93	Dinas Pariwisata	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatkan pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	9,950,080	9,262,290	1,851,845,326	774,020	313,556,156	1,371,680	254,726,459	2,642,000	272,678,644	3,323,470	286,312,576	17,373,460	Dinas Pariwisata	
		2 Persentase promosi pariwisata melalui media Elektronik dan online/digital	Persentase (%)	10	0	143,592,545	30	100,000,000	40	1,027,236,149	50	307,534,647	60	322,911,380	60	Dinas Pariwisata	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase (%)	9.67	6.27	1,995,437,871	-66.43	413,556,156	-29.16	1,281,962,608	37.50	580,213,291	45.45	436,051,688	45.45	Dinas Pariwisata	
15	<b>MISI 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF</b>																
	<b>Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Indeks kepuasan wisatawan</b>																
		persentase (%)		75	79	-	-	-	81	-	83	-	85	-	85	Dinas Pariwisata	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase (%)	40 dan 60	75 dan 89	401,901,641	-	333,120,554	40 dan 60	556,919,830	40 dan 60	235,133,799	40 dan 60	181,213,096	40 dan 60	Dinas Pariwisata	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemasaran dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase (%)	N/A	-	401,901,641	-	333,120,554	1	556,919,830	3	235,133,799	5	181,213,096	9	Dinas Pariwisata	
	<b>Sasaran :</b>																
	2 Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Persentase (%)	N/A	-	1,087,248,374	-	187,597,167	30	1,213,837,894	30	514,559,014	40	483,354,984	100	Dinas Pariwisata	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	Persentase (%)	N/A	-	1,087,248,374	-	187,597,167	43	1,213,837,894	44	514,559,014	45	483,354,984	45	Dinas Pariwisata	
16	<b>MISI 16 : MEMBANGUN DAN MENGEKSPANSI PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.</b>																
	<b>Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi</b>																
		Persentase (%)		6.33	5.63	-	-9.33	-	3,00 (2,50-3,50)	-	3,10 (2,70-3,50)	-	5,00 (4,60-5,40)	-	5,00 (4,60-5,40)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA	Persentase (%)	2.97	2.22	229,699,540	2.64	258,188,800	3.12	349,876,312	3.7	450,080,316	4.39	450,080,316	16.07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi	Nilai (Triliun)	20.39	17.72	114849770	9.66	129,094,400	15.56	174,938,156.00	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2 Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Program sesuai Permenandagri 90 Tahun 2019)	Persentase Peningkatan Nilai Investasi/Penanaman Modal di Luar SARBAGITA	Persentase (%)	38.28	7.88	114,849,770	13.69	129,094,400	13.80	174,938,156	14	450,080,316	18	450,080,316.00	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	<b>Sasaran :</b>																
	2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda)	Persentase (%)	10	N/A	9,103,254,784	N/A	6,011,828,902	20	8,285,496,464	25	5,086,200,420	30	9,465,017,108	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		2 Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	10	N/A	-	N/A	-	20	-	25	-	30	-	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah (Toko)	40	40	-	40	-	40	-	40	-	40	-	200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah (Toko)	100	N/A	-	N/A	-	50	-	50	-	50	-	300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama Bali	Persentase (%)	25%	25%	28,590,000	25%	1,631,725	30	49,999,910	30	48,516,758	30%	50,942,596	30%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2 Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	Persentase (%)	100%	100%	9,074,664,784.00	100%	6,010,197,177.00	100%	8,235,496,554	100%	5,037,683,662	100%	9,414,074,512	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
17	<b>MISI 17 : MEMBANGUN DAN MENGEKSPANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI</b>																
	<b>Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan : 1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali</b>																
		Persentase (%)		2	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	<b>Indikator Tujuan : 2 Persentase KUMKM Menuju Digital</b>																
		Persentase (%)		10	N/A	-	N/A	-	N/A	-	25,25	-	26,5	-	26,5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	



NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri	Persentase (%)	2	3.36	2,999,177,104	N/A	1,219,328,449	2.03	3,110,610,404	2.04	4,095,867,274	2.05	4,300,660,638	2.05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualitas Indie 4.0	Persentase (%)	100	25		N/A		25		25		25		200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>Program :</b>																
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Persentase (%)	15216	4.93%	2,835,915,916	1.50%	1,205,823,949	1.50%	2,860,610,864	1.50%	4,087,383,454	1.50%	4,291,752,627	1.50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	Persentase (%)	49.11%	67.42%	163,261,188	64.95%	13,504,500	64.95%	249,999,540	64.95%	8,483,820	64.95%	8,908,011	64.95%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>Sasaran :</b>																
2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi	Jumlah	9	37	7,681,579,218	39	4,736,353,246	17	4,870,113,571	19	5,273,285,126	22	5,416,553,466	22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>Program :</b>																
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar ber SNI	Jumlah	4	4	0	4	17,852,275	4	50,000,000	4	95,778,800	6	100,567,740	6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi / koperasi tenun / koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Persentase (%)	1.45	2.60	394,330,798	2.54	144,824,549	3.08	583,089,605	3.08	468,864,290	3.13	327,995,940	3.13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM yang bankable	Persentase (%)	0.02	0.03	924,792,710	0.05	501,750,080	0.06	601,178,890	0.12	609,048,900	0.13	639,917,950	0.13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkerpetaan	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	Persentase (%)	2.35	0.99	5,856,773,248	0.25	3,766,889,434	0.25	3,392,755,626	0.24	3,844,528,896	0.30	4,073,007,696	0.30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjaman	Persentase koperasi yang bankable	Persentase (%)	146.67	49.02	505,682,462	53.70	305,036,908	59.26	243,089,450	83.33	255,064,240	86.49	275,064,140	86.49	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	<b>MISI 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI.</b>															
<b>Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru</b>																
<b>Indikator Tujuan : Indeks konektivitas</b>																
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)	Indeks	60	62	188,041,599,338	63	153,459,383,874	75	101,945,989,552	81.25	296,232,100,702	82	315,234,242,989	82	Dinas Perhubungan
<b>Program :</b>																
1	Program pengelolaan perkeretaapian	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	Jumlah	9	9	1,404,260,520	9	1,855,910,000	10	637,344,840	-	-	-	-	10	Dinas Perhubungan
		Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	50	242,150,340	50	1,779,625,888	100	Dinas Perhubungan	
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali	Indeks	N/A	72.07	5,990,059,229	73	5,880,449,401	70	3,640,000,000	75	3,836,802,200	79	3,979,999,540	79	Dinas Perhubungan
		Tingkat Pelayanan Simpang	Tingkat	C	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	752,650,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	1,956,700,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	774,689,960	-	-	-	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	72.51	Dinas Perhubungan
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	66.35	561,848,468	72.51	1,685,999,728	72.51	Dinas Perhubungan	
3	Program pengelolaan pelayaran	Persentase Pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	Persentase (%)	40	100	1,607,860,520	100	825,738,000	50	1,646,881,405	-	-	-	-	50	Dinas Perhubungan
		Persentase Pelabuhan Pengumpulan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	Persentase (%)	-	-	-	-	-	-	25	1,366,617,510	50	3,052,701,540	50	Dinas Perhubungan	
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	80.81%	82.66%	178,286,769,069.07	78.25%	142,940,586,473.00	77.98%	95,247,073,347	76.89%	290,224,682,184	78.67%	304,735,916,293	78.67%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	<b>MISI 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN.</b>															
<b>Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan</b>																
<b>Indikator Tujuan : Persentase Penyelesaian pelanggaran ketertarikan, kenyamanan dan ketertiban umum</b>																
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1 Angka kriminalitas	Kasus	4,607	4,376	#REF!	2,083	#REF!	3,200	#REF!	2,731	#REF!	2,262	#REF!	2,262	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan	Persentase (%)	70	70	18,636,071,842	74	18,604,036,375	78	21,406,334,453	80	17,801,725,174	82	20,512,092,644	82	Satuan Polisi Pamong Praja
		3 Persentase penanganan bencana	Persentase (%)	100	100	10,555,415,826	100	9,018,563,960	100	6,489,679,971	100	1,971,491,900	100	1,972,017,200	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Program :</b>																
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	Persentase (%)	100	100	10,555,415,826	100	9,018,563,960	100	6,489,679,971	100	1,971,491,900	100%	1,972,017,200	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN					2019		2020		2021		2022		2023			
						REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Program Peningkatan Keterterapan dan Keterbacaan Umum	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	Persentase (%)	543	100	869,815,344	100	207,316,456	100	426,664,816	100	168,518,816	100%	168,518,596	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahannya) yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	247	235	17,766,256,498	225	18,396,719,919	215	20,979,669,637	100	17,633,206,358	100%	20,343,574,048	100%		
20	<b>MISI 20 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.</b>																
	<b>Tujuan 1 : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali</b>																
	<b>Indikator Tujuan 1 : Indeks demokrasi</b>																
			Indeks	78.8	81.83	-	77.59	-	81	-	81	-	81	-	81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	<b>2 Indeks pemberdayaan gender</b>																
			Indeks	63.76	N/A	-	N/A	-	64.75	-	64.9	-	65	-	65	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatkan peran serta Krama Bali dalam ketertarikan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada	Persentase (%)	70.5	N/A	1,207,806,232	81.84	607,632,950	73.81	11,347,850,916	75.00	16,758,520,384	75	16,768,519,844	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase (%)	77.5	81.58	546,363,702	73.43	560,310,150	78	11,303,522,516	78	16,747,420,284	78	16,757,419,744	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	2 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	Persentase (%)	98.45	98.85%	661,442,530	67.29%	47,322,800	98.7%	44,328,400	98.75%	11,100,100	98.8%	11,100,100	98.8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
21	<b>MISI 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.</b>																
	<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis</b>																
	<b>Indikator Tujuan 1 : Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)</b>																
			Persentase (%)	14.35	N/A	-	N/A	-	15.53	-	15.9	-	16.28	-	16.28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Meningkatkan keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	16.93	N/A	4,310,563,423	17.29	202,373,923,168	17.46	1,947,627,908,350	17.64	432,377,542,490	17.82	453,247,054,963	17.82	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persentase (%)	90%	100%	1,796,170,594	100%	1,011,671,910	93%	1,700,686,923	94%	1,173,557,688	95%	1,232,235,572	95%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persentase (%)	47.5%	57.46%	2,306,415,901.63	62.47%	48,342,007,150.00	58.06%	61,146,114,606	48.33%	2,901,101,400	48.50%	3,046,156,470	48.50%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	3 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persentase (%)	58%	60%	59,125,764.72	56.31%	152,973,729,408	68%	1,884,568,630,688	72%	427,410,477,402	74%	448,781,001,272	74%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	4 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase (%)	5.02	11.14	148,851,162	7.72	46,514,700	4.89	212,476,133	4.83	892,406,000	4.75%	187,661,648	4.75%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	<b>Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah</b>																
	<b>Indikator Tujuan 2 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>																
			Persentase (%)	61.51	63.62	-	71.98	-	72.02	-	72.21	-	72.40	-	72.40	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	<b>Sasaran :</b>																
	1 Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	1 Indeks kualitas udara	Indeks	91.98	94.35	3,272,211,015	88.34	5,289,354,310	87.27	13,176,975,014	87.38	4,436,922,123	87.48	2,451,551,688	87.48	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		2 Indeks kualitas air	Indeks	63.17	63.33		64.33		67.93		68.03		68.13		68.13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		3 Indeks kualitas lahan	Indeks	38.57	40.79		40.58		41.03		41.49		41.95		41.95	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		4 Indeks kualitas air laut	Indeks	-	N/A		69.75		61.72		62.24		62.76		62.76	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		5 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	8.38	8.57		8.57		10.16		10.82		11.65		11.65	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		6 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	0.40	0.43	1,136,305,480	0.68	227,483,030	0.97	349,905,792	1.2	186,047,592	1.4	36,141,800	1.4	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
	<b>Program :</b>																
	1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase (%)	7.21	6.64	272,902,620	0.00	95,585,966	5.47	49,999,800	4.87	28,292,800	4.31%	0	4.31%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	2 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketepatan terhadap ijin lingkungan	Persentase (%)	100	100	185,306,029	48	122,574,166	65	312,429,344	75	0	90%	0	90%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase (%)	18	17.60	175,742,410	11.38	217,359,949	24	349,905,612	26	209,890,467	27%	192,344,292	27%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase (%)	73	54.74		51.73		74		73		72%		72%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	4 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	Persentase (%)	100	100	2,638,259,956	100	4,853,834,229	100	12,464,640,258	100	4,198,738,856	100%	2,259,207,396	100%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE									KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW	4.3	4.3	453,478,000	6.39	100,689,600	9	100,000,000	11	186,047,592	13	20,141,800	13	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
6	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	Persentase (%)	55	100	682,827,480	97	126,793,430	55	249,905,792	0	0	60	8,000,000	60	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
7	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	Persentase (%)	55	100	0	97	0	55	0	0	0	60	8,000,000	60	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
22	<b>MISI 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.</b>															
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>																
<b>Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik</b>		<b>Indeks</b>	<b>75</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
<b>Sasaran :</b>																
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	N/A	25,185,286,027	83.17	45,138,060,727	80	42,906,470,846	81	142,459,330,298	82	298,872,739,562	82	Sekretariat Daerah
<b>Program :</b>																
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbitan yang diimplementasikan	Persentase (%)	80%	100%	13,831,215,392	100%	15,214,336,931	75%	10,955,294,050	75%	8,653,925,700	80%	8,425,138,482	80%	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.22	1.35	7,912,424,098	1.72	8,953,141,482	2.18	12,504,269,221	2.52	116,737,802,736	3	272,574,692,872	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	68	85.87	2,653,011,807	92.20	20,624,758,604	92.50	18,597,363,279	93	15,846,130,310	93.20	16,638,436,826	93.20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	86	86.429	99,020,230	92.98	15,517,200	87	1,065,693,824	87.5	1,047,798,138	88	1,047,798,138.00	88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP-el yang mencapai target	Persentase (%)	88.89	88.89	788,634,730	88.89	345,823,710	100	849,544,296	100	173,673,414	100%	186,673,244.00	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan</b>																
<b>Indikator Tujuan : 1 Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>Indeks</b>	<b>66.16</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
<b>2 Opini BPK</b>		<b>Status</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>-</b>	<b>WTP</b>	<b>-</b>	<b>WTP</b>	<b>-</b>	<b>WTP</b>	<b>-</b>	<b>WTP</b>	<b>-</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>Inspektorat</b>
<b>3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>		<b>Persentase (%)</b>	<b>76.37</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>79.5</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
<b>Sasaran :</b>																
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	75	77	167,411,472,698	79	112,403,682,399	80	1,772,078,367,341	81	1,543,208,413,489	82	1,551,079,244,563	82	Sekretariat Daerah
<b>Program :</b>																
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	Persentase (%)	82	2%	92,062,373,615	3%	71,159,913,537	5%	77,410,472,010	5%	119,481,630,541	5%	125,185,489,163	20%	Sekretariat DPRD
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	Persentase (%)	100	100	613,455,850	100	305,270,321	100	446,271,968	100	486,822,218	100	511,163,329	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali Kab/Kota dab Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	Persentase (%)	100%	100%	6,039,875,474	100%	5,877,034,388	100%	1,634,947,954,543	100%	1,388,128,627,499	100%	1,389,553,216,617	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	Persentase (%)	100%	100%	1,666,579,154	100%	4,237,945,956	100%	5,842,165,100	100%	3,664,143,602	100%	3,847,350,782	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Evaluasi Kearsipan	Nilai	67	70	210,903,300	71	152,969,711	61	170,329,148	62	37,476,448	63	950,000,000	63	Sekretariat Daerah
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	Persentase (%)	100%	100%	3,754,935,643	100%	575,705,076	100%	8,240,848,784	100%	5,561,454,662	100%	5,386,905,872	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase (%)	100%	100%	1,198,675,415	100%	1,631,013,717	100%	1,014,250,645	100%	897,059,160	100%	902,876,728	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
		Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase (%)	100%	100%	707,859,835	100%	395,476,272	100%	888,783,862	100%	605,640,162	100%	796,354,480	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
		Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase (%)	100%	100%	1,246,323,633	100%	592,832,380	100%	1,440,440,380	100%	828,975,475	100%	834,007,528	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
8	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Merit Sistem	Indeks	N/A	0.52	2,088,658,693	0.63	9,860,034,704	0.61	4,109,550,976	0.80	6,399,965,314	0.81	6,399,965,314	0.81	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	Persentase (%)	100	100	36,804,894,403	100	1,555,906,318	100	16,395,945,624	100	5,482,707,114	100	5,482,707,114	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE									KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2019		2020		2021		2022		2023			
					REALISASI	Rp	REALISASI	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitas dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	Persentase (%)	100	100%	5,694,443,356	100%	4,052,359,969	100%	4,541,017,674	100%	3,802,769,888	100%	4,266,987,636	100%	Sekretariat Daerah
11	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	Nilai/Skor	15	11	535,000,000	2,0	430,485,640	2,2	1,893,481,635	2,4	2,226,585,227	2,6	1,850,000,000	2,6	Sekretariat Daerah
12	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	Persentase (%)	75	77	1,775,855,520	79	179,593,200	81	574,949,246	83	271,872,406	85.00%	285,466,026	85.00%	Sekretariat Daerah
13	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	Indeks	70	75	9,051,430,046	80	8,508,818,671	85	7,742,061,400	90	2,016,673,950	95	511,646,000	95	Sekretariat Daerah
14	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level APIP	Level	3	3	3,180,393,091	3	1,975,101,176	3	4,062,065,981	3	1,774,642,598	Level 3	2,711,256,332	Level 3	Inspektorat
15	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	510,394,472	3	564,439,598	3	1,956,396,465	3	1,099,848,465	Level 3	1,528,791,642	Level 3	Inspektorat
16	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase (%)	50	54	269,421,198	65	348,781,765	76	401,381,900	87	441,518,760	100	75,060,000	100	Sekretariat Daerah
<b>Sasaran :</b>																
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0.78	8.69	13,532,907,797	-24.21	15,087,984,744	5.13	17,784,511,876	5.54	17,858,594,072	6.24	4,025,790,853	6.24	Badan Pendapatan Daerah
<b>Program :</b>																
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	57.53	60.48	13,018,034,013	56.35	14,961,578,025	53.01	17,347,082,652	60.62	17,677,422,008	60.62%	3,954,038,853	60.62%	Badan Pendapatan Daerah
2	Program Perencanaan dan Pembangunan	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	5	4.25	514,873,784	5.78	126,406,719	5	437,429,224	5.5	181,172,064	6	71,752,000	6	Sekretariat Daerah

#### **6.4 Kegiatan Indikatif**

Untuk menjamin penjabaran visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, secara utuh dalam aspek substansi, konsistensi dan keselarasannya maka dirumuskan kegiatan indikatif yang bersumber dari intisari visi misi tersebut.

Kegiatan-kegiatan indikatif tersebut diampu oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan dipetakan dalam berbagai rencana tindak lanjut meliputi Usulan DAK, Regulasi, Program Unggulan, *One Island One Managent One Commando*, Kerjasama, Kegiatan Unggulan, Hibah *Top Down*, Hibah, BKK Desa Pakraman, Bantuan Sosial dan Belanja Langsung. Secara terinci kegiatan indikatif tertuang pada Tabel 6.4.

**TABEL 6.4**  
**KEGIATAN INDIKATIF SESUAI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023**

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN				
1	2	3	4	17	
1	<b>MISI 1 : MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI</b>				
	<b>Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak</b>				
	<b>Indikator Tujuan : 1 Tingkat Inflasi Bali</b>		<b>Persentase (%)</b>		
	<b>: 2 Ketersediaan pangan utama</b>		<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Sasaran :</b>				
	<b>1 Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali</b>	<b>Persentase stok pangan aman</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan</b>				
	1 Studi pemetaan potensi pertanian	Jumlah studi pemetaan potensi pertanian	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Penyediaan bibit pertanian bermutu sebagai sumber pangan pokok	Jumlah bibit pertanian bermutu yang disediakan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	3 Penyediaan obat-obatan tani bermutu	Jumlah obat-obatan tani bermutu yang disediakan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	4 Penyusunan master Plan pemenuhan pangan sehat yang bernilai gizi cukup bagi Krama Bali	Jumlah master plan pemenuhan pangan sehat yang bernilai gizi cukup bagi Krama Bali yang tersusun	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	5 Penetapan regulasi tentang Peran Kabupaten/Kota se Bali sebagai Sumber Pangan Pokok sesuai Potensi Daerah	Jumlah regulasi peran Kab/Kota sebagai sumber pangan pokok yang ditetapkan	Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	6 Pembinaan dan pengawasan pengembangan sumber pangan pokok sesuai potensi daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Pengembangan sumber pangan pokok	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	7 Pengendalian dan pengawasan penggunaan pestisida / bahan kimia berbahaya pada pertanian pangan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan penggunaan pestisida / bahan kimia berbahaya pada pertanian pangan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	8 Pemetaan daerah rentan pangan dan konsumsi pangan sehat, bernilai gizi cukup rumah tangga Krama Bali	Jumlah daerah rentan pangan dan konsumsi pangan sehat, bernilai gizi cukup rumah tangga Krama Bali yang dipetakan	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	9 Penyusunan standar pelayanan minimal pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali	Jumlah standar pelayanan minimal pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali yang disusun	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	10 Sosialisasi, komunikasi, informasi edukasi terintegrasi tentang pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali	Jumlah peserta sosialisasi komunikasi, informasi edukasi terintegrasi tentang pangan sehat dan bernilai gizi cukup Krama Bali	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	11 Peningkatan layanan gizi masyarakat kurang mampu	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mendapatkan layanan gizi	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	12 Penyusunan agenda tahunan daerah objek, komoditi pangan murah Kabupaten/Kota	Jumlah even promosi objek, komoditi pangan murah Kabupaten/Kota	Jumlah	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	13 Kerjasama pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota pada sektor produsen pangan murah	Jumlah kerjasama antara provinsi dengan Kabupaten/Kota pada sektor produsen pangan murah yang ditetapkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	14 Penyusunan perda dan peraturan turunannya terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah jenis peraturan daerah dan turunannya yang tersusun	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	15 Studi pemetaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Bali	Jumlah luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipetakan untuk dilindungi	Ha	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	16 Pemberian insentif lahan pertanian petani yang lahannya berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah petani yang lahannya berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mendapatkan insentif	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BKK
	17 Pemberdayaan BUMD untuk memasarkan produksi pertanian lahan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang difasilitasi pemasarannya oleh BUMD	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	18 Peningkatan produksi pertanian lokal untuk pemenuhan swasembada beras	Jumlah Produksi Pertanian Lokal untuk pemenuhan swasembada beras	Jumlah	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung
	19 Penyediaan obat-obatan tani bermutu	Jumlah obat-obatan tani bermutu yang disediakan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	20 Pengembangan produksi peternakan komoditas lokal	Jumlah produksi peternakan komoditas lokal	Ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	21 Pengembangan Budidaya ikan konsumsi dan ikan hias di Kabupaten Buleleng	Jumlah budidaya ikan konsumsi dan ikan hias yang diproduksi	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	22 Pengembangan Budidaya ikan tawar di Kabupaten Bangli dan Tabanan	Jumlah ikan budidaya tawar yang diproduksi	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	23 Pengembangan budidaya ikan laut, udang galah, di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan dan Jembrana	Jumlah ikan budidaya laut dan udang galah yang diproduksi	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	24 Pengembangan pasar ikan di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Badung dan Klungkung	Jumlah pasar ikan yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	25 Penyediaan benih perikanan bermutu	Jumlah benih perikanan bermutu yang disediakan	Jumlah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	26 Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Badung dan Klungkung	Jumlah jenis produksi Perikanan Tangkap yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung
	27 Pengembangan industri pengolahan perikanan tangkap untuk pasar ekspor	Jumlah jenis industri pengolahan perikanan tangkap	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	28 Pembinaan dan pengawasan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak yang tersertifikasi. Terseleksinya ternak sapi unggul. Terseleksinya petugas berprestasi. Terbentuknya kelompok anjing belang bungkem	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	29 Pengembangan Ternak Ruminansia	Jumlah kelompok peternak yang memahami budidaya ternak ruminansia. Jumlah kelompok peternak yang mengembangkan ternak kambing.	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	30 Pengembangan Ternak Non Ruminansia	Jumlah pengembangan ternak babi dan itik lokal Bali di lokasi sentra	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
31	Pendataan lumbung yang masih berfungsi	Jumlah lumbung berfungsi baik yang terdata	Unit	Dinas ketahanan Pangan	Belanja Langsung	
32	Studi revitalisasi lumbung sebagai penyangga stok pangan daerah	Jumlah studi revitalisasi lumbung sebagai penyangga stok pangan daerah	Jumlah	Dinas ketahanan Pangan	Belanja Langsung	
33	Pemberdayaan fungsi lumbung di masyarakat	Jumlah lumbung masyarakat yang diberdayakan	Jumlah	Dinas ketahanan Pangan	Belanja Langsung	
34	Penataan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pelaku usaha PSAT yang mendapatkan pembinaan	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung	
35	Pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase peningkatan sampel pangan segar yang aman dikonsumsi	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung	
36	Peningkatan penyebaran informasi penanganan keamanan pangan dan mutu pangan segar	Persentase peningkatan kelompok pengusaha pangan segar yang dibina	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung	
37	Peningkatan registrasi sertifikasi dan keamanan pangan segar	Persentase peningkatan PSAT yang ter-registrasi dan ter-sertifikasi prima	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung	
38	Penerapan jaminan mutu keamanan pangan segar	Persentase peningkatan PSAT yang menerapkan sistem jaminan mutu keamanan pangan	Persentase (%)	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Langsung	
<b>Sasaran :</b>						
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase (%)			
<b>Kegiatan :</b>						
1	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten / Kota untuk penyediaan sarana prasarana melalui pemberdayaan komunitas/ lembaga Badan usaha desa (BUD) untuk menyediakan sandang gratis dan murah bagi Krama Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
2	Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan swasta dengan swasta dalam pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali gratis/murah			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
3	Penyediaan bahan baku tenun	Jumlah bahan baku tenun yang tersedia	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung	
4	Pembentukan koperasi usaha sandang Bali Krama Bali	Jumlah koperasi usaha sandang krama Bali yang dibentuk	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung	
5	Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan swasta dengan swasta dalam pemenuhan bahan baku industri sandang Bali	Jumlah kerjasama dalam bidang sandang	Jumlah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
6	Pemberian insentif kepada Krama Bali yang berusaha dibidang industri sandang berorientasi ramah lingkungan dan berlokasi di Bali Barat, Timur dan utara	Jumlah Krama Bali yang berusaha dibidang industri sandang yang mendapat insentif	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Hibah Top Down	
7	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kesetaraan sandang dan pendapatan pelaku usaha sandang Krama Bali.	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan kesetaraan sandang dan pendapatan pelaku usaha sandang	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung	
8	Pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam pemberian kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha sandang Bali untuk Krama Bali	Jumlah Pelaku Usaha Sandang Bali yang mendapatkan kredit mudah dan murah dari BPD	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung	
9	Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam pemberian kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha sandang Krama Bali	Jumlah Pelaku usaha sandang bali yang difasilitasi kredit mudah dan murah oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung	
10	Bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudahan akses permodalan pelaku usaha sandang Krama Bali	Jumlah laporan bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudahan akses permodalan pelaku usaha sandang Krama Bali	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung	
11	Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan swasta dengan swasta pelaku usaha sandang Branding Bali Krama Bali dalam peningkatan promosi dan pemasaran terintegrasi dengan produk Krama Bali lainnya melalui media cetak dan elektronik, pameran, penyelenggaraan event-event terintegrasi dengan promosi daerah lainnya di dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan swasta dengan swasta pelaku usaha sandang Branding Bali Krama Bali	Jumlah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
12	Pembangunan sarana prasarana pemasaran online terintegrasi produk sandang Bali	Jumlah sarana prasarana pemasaran produk sandang bali secara online	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung	
13	Penyusunan buku biru rencana strategis pengembangan usaha "Sandang Bali Krama Bali" menjadi unggulan pasar lokal dan ekspor.	Jumlah komoditas usaha sandang krama Bali yang menjadi unggulan pasar lokal dan ekspor berdasarkan buku biru rencana strategis	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung	
<b>Sasaran :</b>						
3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)			
<b>Kegiatan :</b>						
1	Penyusunan standar rumah layak huni minimal Krama Bali - SLM-KB	Jumlah Standar rumah layak huni minimal krama bali yang tersedia	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung	
2	Pemetaan kebutuhan rumah layak huni masyarakat miskin	Jumlah pemetaan kebutuhan rumah layak huni masyarakat miskin	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung	
3	Penyusunan Master Plan pencapaian dan realisasi kebutuhan rumah layak huni masyarakat miskin	Jumlah Master plan pencapaian dan realisasi kebutuhan rumah layak huni masyarakat miskin	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung	
4	Mendorong pemerintah pusat melaksanakan program sejuta rumah sebagai salah satu sumber rumah layak huni Krama Bali di Provinsi Bali			Dinas Perumahan dan Permukiman	Usulan DAK	
5	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pemenuhan dan realisasi kebutuhan rumah masyarakat miskin	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/ Kota pemenuhan dan realisasi kebutuhan rumah masyarakat miskin	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2		3	4	17	
	6	Penetapan regulasi kredit kepemilikan perumahan murah layak huni Krama Bali melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan sumber pendanaan lainnya.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	7	Peningkatan kepemilikan rumah Krama Bali melalui kredit rumah murah	Jumlah kepemilikan rumah krama Bali melalui kredit rumah murah	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung
	8	Pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu sumber pendanaan mudah dan rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali	Jumlah LPD yang memberikan layanan kredit rumah layak huni kepada Krama Bali	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	9	Pembangunan sistem data base Krama Bali yang terintegrasi dengan data base kependudukan Krama Bali untuk sasaran bantuan rumah layak huni kab/Kota di Provinsi Bali dan menyusun skala prioritas bantuan	Jumlah integrasi sistem database kependudukan untuk sasaran bantuan rumah layak huni	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung
	10	Pemberian bantuan Rp.50.000.000,-pembangunan rumah layak huni Krama Bali yang memenuhi sarana sumur bor, instalasi dan sanitasi rumah layak huni			Dinas Perumahan dan Permukiman	Hibah Top Down
	11	Bimbingan dan pengawasan Pemberdayaan dana desa untuk mengembangkan lingkungan dan drainase sehat di lingkungan rumah layak huni Krama Bali	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pemberdayaan dana desa untuk mengembangkan lingkungan dan drainase sehat di lingkungan rumah layak huni Krama Bali	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	12	Pengendalian dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan bantuan pembangunan rumah layak huni Krama Bali	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan rumah layak huni Krama Bali yang terbangun	Jumlah	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Langsung
	<b>Sasaran :</b>					
	4	<b>Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan</b>	<b>Inflasi Pangan Bali</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Stabilisasi harga jual hasil-hasil pertanian	Tingkat stabilitas harga jual hasil pertanian	Rupiah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	2	Operasi pasar penggunaan zat berbahaya pada makanan secara berkesinambungan	Jumlah pelaksanaan operasi pasar penggunaan zat berbahaya pada makanan secara berkesinambungan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
2	<b>Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB</b>				<b>Persentase (%)</b>	
	<b>Sasaran :</b>					
	1	<b>Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal</b>	<b>Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Pemetaan potensi komoditi pertanian dalam arti luas pasar lokal dan export	Jumlah jenis potensi komoditas pertanian dalam arti luas untuk pemenuhan pasar lokal dan ekspor yang dipetakan	Jumlah Jenis	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2	Penetapan Regulasi penyaluran hasil pertanian lokal Bali ke hotel, restoran, usaha dan jasa pariwisata.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	3	Pengembangan pasar sentra daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	Jumlah pasar sentra daging yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung
	4	Pendampingan teknologi pembibitan, peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dalam arti luas	Jumlah teknologi pembibitan untuk peningkatan produktifitas pertanian yang diberikan kepada petani	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	5	Kerja sama dengan pemerintah kab/Kota dalam pemberian bantuan benih unggul secara berkala dan terstruktur serta pendampingan pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	6	Sistem pertanian terpadu Semesta Berencana (Sipardu SB) yang berisi pemberian bantuan sapi untuk menghasilkan produk organik dan biogas kepada petani yang tinggal disawah/kebun berdasarkan hasil pemetaan	Jumlah Sistem pertanian terpadu Semesta Berencana (Sipardu SB) yang dikembangkan	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kegiatan Unggulan
	7	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyangga kebutuhan pangan dan penyaluran hasil produksi pangan Krama Bali	Jumlah penyaluran hasil produksi pangan krama Bali melalui BUMD	Ton	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	8	Pemberian insentif bagi Krama Bali agar memanfaatkan lahan pekarangan perumahannya untuk budidaya tanaman sarana upakara Krama Bali dan kebutuhan pangan keluarga	Jumlah krama bali yang mendapatkan insentif	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BKK
	9	Pemberian bibit tanaman tumpangsari dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan bahan upakara Krama Bali	Jumlah bibit tanaman tumpangsari dan peternakan yang terpenuhi untuk kebutuhan bahan upakara	Jumlah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	BKK
	10	Pemberian insentif bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian olahan bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BKK
	11	Penyusunan studi kelayakan Pembangunan Kebun Raya Gumi Banten Bali dan Tanaman Langka Bali	Jumlah jenis varietas tanaman langka dan bernilai tinggi yang dibangun di kebun raya Gumi Banten sesuai dengan hasil penyusunan studi kelayakan	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	12	Pembangunan Kebun Raya Gumi Banten Bali dan Tanaman Langka	Jumlah kebun raya Gumi Banten Bali dan tanaman langka yang dibangun	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kegiatan Unggulan
	13	Pemberian insentif kepada Desa Dinas dan atau Desa Adat yang mengembangkan Taman Gumi Banten		Juta Rupiah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BKK



NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
14	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan usaha pertanian dalam arti luas	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan usaha pertanian dalam arti luas	Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
15	Pendampingan tenaga ahli untuk mengembangkan koperasi Subak bidang usaha komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Jumlah koperasi Subak bidang usaha komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkembang	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
16	Peningkatan produktivitas tanaman pangan berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah	Jumlah produksi tanaman pangan yang meningkat berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah	Ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
17	Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pemberian bantuan bibit unggul tanaman hortikultura			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
18	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pertumbuhan usaha komoditi tanaman hortikultura	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pertumbuhan usaha komoditi tanaman hortikultura	Laporan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung	
19	Pengendalian dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap dalam peningkatan peran Subak sebagai mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan peran Subak sebagai mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
<b>Sasaran :</b>						
<b>2 Meningkatkan kualitas hasil pertanian Krama Bali</b>			<b>1 Nilai Tukar Petani (NTP)</b>	<b>Persentase (%)</b>		
			<b>2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)</b>	<b>Persentase (%)</b>		
<b>Kegiatan :</b>						
1	Pembangunan sistem irigasi untuk pertanian.	Persentase irigasi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
2	Pembangunan jalan usaha tani.	Panjang jalan usaha tani	Kilometer	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
3	Pembangunan jalan produksi.	Panjang jalan produksi yang dibangun	Kilometer	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
4	Pembangunan waduk, bendungan, dan embung.	Jumlah waduk, bendungan, dan embung yang dibangun	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan DAK	
5	Pengembangan Industri pengolahan buah-buahan di Kabupaten Buleleng.	Jumlah jenis industri pengelolaan buah yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung	
6	Pengembangan Industri pengolahan kopi, tanaman obat (simplicia) dan sayur-sayuran di Kabupaten Bangli.	Jumlah jenis industri pengelolaan buah yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung	
7	Pengembangan Industri pengolahan daging di Kabupaten Badung.	Jumlah jenis industri pengelolaan buah yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung	
8	Pengembangan Industri pengolahan pertanian di Kabupaten Tabanan.	Jumlah jenis industri pengelolaan pertanian yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
9	Pengembangan Industri pengolahan ikan di Kabupaten Jembrana.	Jumlah jenis industri pengelolaan ikan yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung	
10	Pengembangan Industri pengolahan pakan ternak di Kabupaten Tabanan.	Jumlah jenis industri pengelolaan pakan ternak yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belanja Langsung	
11	Pengembangan Industri pengolahan garam di Kabupaten Buleleng.	Jumlah jenis industri pengelolaan garam yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung	
12	Pengembangan Industri pengolahan sampah di Kota Denpasar.	Jumlah jenis industri pengelolaan sampah yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
13	Penerapan sistem pertanian organik di daerah tangkapan air danau, waduk, bendungan, dan embung di Bali.	Jumlah penerapan sistem pertanian organik di daerah tangkapan air danau, waduk, bendungan, dan embung di Bali	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
14	Penyusunan master plan dan Pemetaan daerah sebagai pilot project, pengembangan usaha pertanian organik	Jumlah pilot project pengembangan usaha pertanian organik berdasarkan master plan	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung	
15	Kerja Sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan pilot project pengembangan pertanian organik di kab/Kota Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
16	Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan koperasi Subak produk pertanian organik yang terintegrasi dengan koperasi bidang usaha komoditas hortikultura			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
17	Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pemberian bantuan pengembangan usaha pertanian organik di kab/Kota Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
18	Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pemberian bantuan pengembangan usaha peternakan dan perikanan organik di kab/Kota Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
19	Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pertumbuhan usaha pertanian berwawasan lingkungan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pertumbuhan usaha pertanian berwawasan lingkungan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung	
20	Penyusunan bisnis plan Badan usaha milik daerah (BUMD)	Jumlah bisnis plan Badan usaha milik daerah (BUMD) yang disusun	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung	
21	Pengembangan Badan usaha milik daerah (BUMD) membangun mitra kerja dengan pelaku usaha pertanian	Jumlah pelaku usaha pertanian yang bekerja sama dengan BUMD	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung	
<b>Sasaran :</b>						
<b>3 Meningkatkan kapasitas SDM pertanian Krama Bali</b>			<b>Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian</b>	<b>Persentase (%)</b>		
<b>Kegiatan :</b>						
1	Penyusunan "cetak biru" rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen "cetak biru" rencana pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam arti luas yang tersusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung	

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN				
1	2	3	4	17	
	2 Pengembangan balai latihan kerja (BLK) terintegrasi dengan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian dalam arti luas berdasarkan "cetak biru"	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertanian dalam arti luas	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	3 Pelatihan, magang pelatih dan penyuluh di dalam dan luar negeri terintegrasi dengan pengembangan produk pertanian dalam arti luas berdasarkan "cetak biru"	Jumlah peserta pelatihan, magang pelatih dan penyuluh di dalam dan luar negeri yang mengembangkan produk pertanian dalam arti luas	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	4 Bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota pertumbuhan jumlah sumber daya manusia pertanian dalam arti luas sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Jumlah laporan bimbingan dan pengawasan pertumbuhan jumlah sumber daya manusia pertanian dalam arti luas sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	5 Pendampingan dan pelatihan kepada petani.	Jumlah petani yang mendapatkan pendampingan dan pelatihan	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	6 Pelatihan terintegrasi kepada petani untuk peningkatan hasil produktivitas lahan pertanian dalam arti luas	Jumlah petani yang mendapat pelatihan terintegrasi	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	7 Pemberdayaan dan pembinaan komunitas sosial kemasyarakatan petani Sekaa Manyi	Jumlah komunitas sosial kemasyarakatan tani (sekaa manyi) yang diberdayakan dan dibina	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Program Unggulan
	8 Pelatihan secara terintegrasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas	jumlah produktivitas pertanian dalam arti luas yang meningkat	Ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	9 Pelatihan terpadu komunitas Subak dengan program peningkatan produktivitas lahan pertanian	Jumlah Komunitas subak yang terlatih	Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
	10 Pelatihan usaha pertanian organik	Jumlah usaha pertanian organik yang dilatih	Jumlah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Belanja Langsung
3	<b>Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.</b>				
	<b>Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan Krama Bali</b>				
	<b>Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)</b>		<b>Dalam tahun</b>		
	<b>Sasaran :</b>				
	<b>1 Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali</b>	<b>Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>				
	1 Peningkatan kualitas jalan untuk pelayanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada masyarakat kab/Kota	Panjang jalan untuk pelayanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang dibangun	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	2 Pengembangan Rumah Sakit Khusus berstandar internasional	Jumlah Rumah Sakit Khusus berstandar internasional yang dibangun	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	3 Pembangunan Pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana			Dinas Sosial	Usulan DAK
	4 Pemetaan ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga medis dan para medis berdasarkan standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah sarana prasarana kesehatan, tenaga medis dan para medis yang dipetakan sesuai standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	5 Pemetaan rasio Poskedes, Polides/Pustu/ penduduk setiap Desa /Kelurahan Kab/Kota Provinsi Bali	Rasio Poskedes/Polides/Pustu yang dipetakan	Rasio	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	6 Penyediaan kebutuhan tenaga medis dan paramedis disalurkan lembaga pelayanan kesehatan daerah berdasarkan standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah tenaga medis dan paramedis pada lembaga pelayanan kesehatan daerah berdasarkan SPM KBS yang tersedia	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	7 Kerja sama pemerintah daerah dengan universitas yang memiliki fakultas kedokteran dalam pemenuhan kebutuhan Dokter Spesialis Kandungan dan Anak melalui pola pemberian beasiswa			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rencana Hibah
	8 Pengembangan pelayanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada masyarakat kab/Kota Provinsi Bali	Jumlah jenis layanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada masyarakat yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	9 Kerjasama pemerintah Kabupaten /Kota dalam pembangunan sarana prasarana pelayanan kesehatan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Krama Bali			Dinas Kesehatan	One Island One Management and One Commando
	10 Pembentukan komunitas sosial kemasyarakatan pemerhati kesehatan lingkungan Krama Bali	Jumlah komunitas sosial kemasyarakatan pemerhati kesehatan lingkungan Krama Bali yang dibentuk	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	11 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha peternakan di lingkungan pemukiman yang berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	12 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan derajat pelayanan kesehatan Krama Bali	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan derajat pelayanan kesehatan Krama Bali	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	13 Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan swasta di bidang pelayanan kesehatan			Dinas Kesehatan	One Island One Management and One Commando
	14 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Usada Bali).	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional (Usada Bali) yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
	15 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan promosi terintegrasi dan berkesinambungan kampanye pola dan lingkungan hidup sehat Krama Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	16 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pembentukan komunitas Krama Bali Mandiri pemerhati kesehatan lingkungan hidup dan pola hidup sehat			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/output/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
17	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota pembentukan komunitas Krama Bali Mandiri pemerhati kesehatan lingkungan hidup dan pola hidup sehat	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota pembentukan komunitas Krama Bali Mandiri pemerhati kesehatan lingkungan hidup dan pola hidup sehat	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung	
18	Mendorong pemerintah pusat membangun pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA yang dibangun	Jumlah	Dinas Sosial	Usulan DAK	
19	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kesepertaan jaminan kesehatan Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kesepertaan jaminan kesehatan Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah laporan	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung	
<b>Sasaran :</b>						
<b>2 Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali</b>		<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan</b>	<b>Persentase (%)</b>			
<b>Kegiatan :</b>						
1	Penetapan regulasi pelayanan kesehatan GRATIS sesuai dengan standar pelayanan kesehatan Krama Bali Sehat (KBS)		Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Regulasi	
2	pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan minimal kesehatan Provinsi Bali	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan minimal kesehatan Provinsi Bali	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung	
3	Pembangunan sistem standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah sistem standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS) yang terbangun	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung	
4	Penetapan regulasi sistem standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi	
5	Penetapan regulasi ketersediaan sarana prasarana kesehatan berkualitas International Organization for Standardization (ISO)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi	
6	Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan sarana prasarana lembaga kesehatan pemerintah daerah berdasarkan standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
7	Pembinaan dan pengawasan (Binwas) Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Krama Bali untuk memenuhi standar pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sehat (KBS)	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Krama Bali	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung	
8	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pengembangan standar pelayanan minimal kesehatan berkualitas International Organization for Standardization (ISO)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
<b>Sasaran :</b>						
<b>3 Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat</b>		<b>Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)</b>	<b>Persentase (%)</b>			
<b>Kegiatan :</b>						
1	Pembangunan Sistem riwayat kesehatan Elektronik Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Krama Bali	Jumlah sistem riwayat kesehatan Elektronik Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Krama Bali yang dibangun	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung	
2	Kerjasama membentuk lembaga dan manajemen antar pemerintah daerah pengelola sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali terintegrasi seluruh Kabupaten/Kota			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
3	Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan sistem pengelola sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali terintegrasi seluruh Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan sistem pengelola sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali terintegrasi	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung	
4	Penetapan regulasi mengembangkan data base riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi	
5	Pelatihan pengoperasian sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali terintegrasi	Jumlah peserta pelatihan pengoperasian sistem riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung	
4	<b>Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDINYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.</b>					
<b>Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas</b>						
<b>Indikator Tujuan : Rata-rata lama sekolah</b>			<b>Tahun</b>			
<b>Sasaran :</b>						
<b>1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas</b>		<b>Angka harapan lama sekolah</b>	<b>Tahun</b>			
<b>Kegiatan :</b>						
1	Penetapan regulasi SPM pendidikan menengah Provinsi Bali	Jumlah regulasi SPM pendidikan menengah Provinsi Bali yang ditetapkan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Regulasi	
2	Pengintegrasian pendidikan pertanian organik dalam kurikulum muatan lokal	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan pertanian organik dalam kurikulum muatan lokal	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung	
3	Pembentukan ekstra kurikulum Gerakan Siswa Pencinta Pertanian Organik (GSP2O)	Jumlah sekolah yang membentuk ekstra kurikulum Gerakan Siswa Pencinta Pertanian Organik (GSP2O)	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung	
4	Pemetaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Provinsi Bali	Persentase pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Provinsi Bali	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung	

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN				
1	2	3	4	17	
	5 Pemetaan pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik dan pendukung pendidikan usia dini, Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum, kejuruan dan sederajat lainnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Krama Bali	Persentase pemenuhan sarana prasarana, tenaga pendidik dan pendukung pendidikan usia dini, Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum, kejuruan dan sederajat lainnya	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	6 Pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Krama Bali sekolah menengah Provinsi Bali	Persentase Pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Krama Bali sekolah menengah Provinsi Bali	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	7 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan dan pengembangan laboratorium dan sarana prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan standar pelayanan pendidikan minimal (SPM) Krama Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	8 Pembangunan sistem movev berbasis informasi teknologi kondisi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Krama Bali sekolah menengah Provinsi Bali	Persentase terbangunnya sistem movev berbasis informasi teknologi tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	9 Monitoring dan evaluasi berkesinambungan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di seluruh sekolah menengah Provinsi Bali secara berkesinambungan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di seluruh sekolah menengah	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	10 Pendidikan dan pelatihan berkesinambungan kepada guru untuk mata pelajaran tertentu	Jumlah guru yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mata pelajaran tertentu	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	11 Pertukaran guru untuk mata pelajaran tertentu khususnya pada daerah-daerah pencapaian Ujian Nasional (UN)	Persentase pertukaran guru untuk mata pelajaran tertentu khususnya pada daerah-daerah pencapaian Ujian Nasional (UN)	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	12 Pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi			Dinas Pendidikan	Hibah Top Down
<b>Sasaran :</b>					
	<b>2 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18</b>	<b>Persentase (%)</b>		
<b>Kegiatan :</b>					
	1 Pengadaan sarana dan prasarana untuk pendidikan menengah	Jumlah sarana dan prasarana untuk pendidikan menengah yang diadakan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	2 Pemberian beasiswa kepada anak dari kelompok masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan (SMK)	Jumlah siswa dari kelompok masyarakat kurang mampu yang mendapat beasiswa	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	3 Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten /Kota dalam pemberian beasiswa bagi siswa/siswi Sekolah Pendidikan Dasar/ sederajat dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	4 Penetapan regulasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5 Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota tercapainya pelaksanaan program pemerintah Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota tercapainya pelaksanaan program pemerintah Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
<b>5</b>	<b>Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN.</b>				
	<b>Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal</b>				
	<b>Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu</b>		<b>Persentase (%)</b>		
	<b>2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat</b>		<b>Persentase (%)</b>		
<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman</b>	<b>Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu</b>	<b>Jumlah</b>		
<b>Kegiatan :</b>					
	1 Penyelenggaraan pendidikan non formal berbasis keagamaan Hindu	Jumlah pendidikan non formal berbasis keagamaan Hindu yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	2 Penyusunan buku panduan pelaksanaan penataran, pelatihan tentang implementasi nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah buku panduan pelaksanaan penataran, pelatihan tentang implementasi nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	3 Penataran, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Sat Kerthi	Jumlah peserta Penataran, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-Nilai Sat Kerthi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	4 Penguatan internalisasi nilai-nilai Sat Kerthi melalui sistem pendidikan formal, informal dan non formal.	Jumlah peserta internalisasi nilai-nilai Sat Kerthi melalui sistem pendidikan formal, informal dan non formal.	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	5 Penyediaan kebutuhan tenaga pendidik untuk proses belajar mengajar Seni, Sastra dan Budaya di sekolah, sanggar - sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat	Jumlah tenaga pendidik untuk proses belajar mengajar Seni, Sastra dan Budaya yang disediakan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	6 Pengangkatan Guru Kontrak yang bertugas untuk mengajar Seni, Sastra dan Budaya serta Agama Hindu di sekolah	Jumlah Guru Kontrak yang bertugas untuk mengajar Seni, Sastra dan Budaya serta Agama Hindu di sekolah	Jumlah	Badan Kepegawaian Daerah	Belanja Langsung
	7 Penataran penghayatan nilai-nilai Tri Hita Karana pada penduduk usia kerja	Jumlah peserta penghayatan nilai-nilai Tri Hita Karana pada penduduk usia kerja	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	8 Mendorong pemerintah pusat agar pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional			Biro Hukum dan HAM	Usulan DAK
	9 Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah berbasis Agama Hindu			Biro Hukum dan HAM	Regulasi

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
	10	Kerjasama dengan Parisada Hindu Darma dan pihak terkait lainnya yang kompeten dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	11	Kerjasama dengan desa Adat dalam penetapan penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu dalam bentuk Pasraman			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	12	Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik pendidikan dan manajemen penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu	Jumlah jenis sistem pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik pendidikan dan manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
	13	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan berbasis Agama Hindu pada tingkat sekolah dasar			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	14	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengadaan tenaga pendidik pendidikan berbasis Agama Hindu			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	15	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	16	Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan menengah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan menengah	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung
6	<b>Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>			<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Sasaran:</b>					
	<b>1 Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali</b>	<b>Indeks Daya Saing SDM Bali</b>		<b>Indeks</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Pemetaan potensi usaha berbasis unggulan/ potensi daerah sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor di Provinsi Bali	Jumlah potensi usaha berbasis unggulan/ potensi daerah sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor di Provinsi Bali yang dipetakan	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2	Kerjasama pelatihan/magang tenaga kerja Krama Bali dengan perusahaan dalam dan luar negeri dalam pengembangan usaha unggulan Provinsi Bali			Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Kerja Sama
	3	Pembangunan pusat pengembangan dan pelatihan pelaku usaha pemula ekonomi kreatif berbasis inovasi, teknologi dan berorientasi ramah lingkungan terintegrasi dengan pelatihan pelaku usaha lainnya	Jumlah pusat pengembangan dan pelatihan pelaku usaha pemula ekonomi kreatif berbasis inovasi, teknologi dan berorientasi ramah lingkungan terintegrasi dengan pelatihan pelaku usaha lainnya yang dibangun	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	4	Pengembangan fasilitas dan tenaga pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai kompetensi sesuai hasil pemetaan pengembangan usaha, industri dan usaha produk unggulan terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah fasilitas dan tenaga pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai kompetensi sesuai hasil pemetaan pengembangan usaha, industri dan usaha produk unggulan terintegrasi antar kab/Kota yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	5	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota dalam peningkatan wirausaha baru	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota dalam peningkatan wirausaha baru	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	6	Pengembangan sistem Link and Match antara kompetensi kewirausahaan Krama Bali dengan dunia usaha dan industri	Jumlah jenis sistem Link and Match antara kompetensi kewirausahaan Krama Bali dengan dunia usaha dan industri yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Belanja Langsung
	7	Penetapan regulasi penerapan nilai-nilai Tri Hita Karana menjadi budaya kerja pada pelaku usaha, manajemen dan karyawan/ti perusahaan yang berusaha di Provinsi Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	8	Pengembangan Kawasan pedangang kaki lima (PKL) yang berciri khas Bali untuk pekerja sektor informal	Jumlah kawasan pedangang kaki lima (PKL) yang berciri khas Bali untuk pekerja sektor informal yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	9	Pemberian insentif kepada pelaku wirausaha baru sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu			Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	Hibah Top Down
	10	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menumbuh-kembangkan wirausaha baru	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	One Island One Management and One Commando
7	<b>Misi 7 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Persentase Kemiskinan</b>			<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali</b>	<b>Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial</b>		<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) keluarga Krama Bali sejahtera (KKBS)	Jumlah jenis standar pelayanan minimal (SPM) keluarga Krama Bali sejahtera (KKBS)	Jumlah	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Belanja Langsung
	2	Pemetaan kondisi sosial ekonomi keluarga Krama Bali yang berpotensi untuk mendapatkan bantuan sosial	Jumlah Krama Bali yang mendapatkan bantuan sosial sesuai pemetaan	Jumlah	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Belanja Langsung
	3	Penetapan regulasi standar pelayanan minimal (SPM) keluarga Krama Bali sejahtera (KKBS)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	17		
	4	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten / Kota dalam mengurangi dampak kemiskinan melalui menyalurkan bantuan sosial Keluarga Krama Bali Sejahtera (KKBS)	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten / Kota dalam mengurangi dampak kemiskinan melalui menyalurkan bantuan sosial Keluarga Krama Bali Sejahtera (KKBS)	Jumlah	Dinas Sosial	Belanja Langsung
	5	Pemberian bantuan pelaksanaan upacara massal Pitra Yadnya dan Mantusa Yadnya Krama Bali			Biro Kesra	Hibah Top Down
	6	Pemetaan potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR)	Jumlah potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipetakan	Jumlah	Dinas Sosial	Belanja Langsung
	7	Pembentukan lembaga pengelola Corporate Social Responsibility (CSR)	Jumlah unsur Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan sebagai pengelola	Jumlah	Dinas Sosial	Belanja Langsung
	8	Penetapan regulasi tentang pengelola Corporate Social Responsibility (CSR)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	9	Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR)			Dinas Sosial	Bansos
	10	Pemberian bantuan Santunan Kematian Masyarakat (Santimas) Krama Bali Provinsi Bali dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu sumber pendanaannya (Unggulan)			Dinas Sosial	Bansos
	11	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos) penunjang masyarakat Difabel			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
8	<b>Misi 8 : MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka</b>			<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja</b>		<b>Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Penyediaan sarana prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK)	Jumlah sarana prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) yang disediakan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	2	Pengembangan pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi penderita cacat permanen	Jumlah penderita cacat permanen yang mendapat pelatihan BLK	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	3	Sertifikasi instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan	Jumlah instruktur BLK yang disertifikasi sesuai kompetensi teknis yang dibutuhkan	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	4	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja melalui inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja	Jumlah angkatan kerja yang ditingkatkan kompetensinya melalui inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja	Orang	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	5	Kerjasama kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan industri dalam memperluas akses peluang kerja melalui bursa tenaga kerja			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	6	Kerjasama kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja Krama Bali melalui pemagangan			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	7	Pengembangan sistem Link and Match antara kompetensi tenaga kerja Krama Bali dengan dunia usaha dan industri	Jumlah jenis sistem Link and Match antara kompetensi tenaga kerja Krama Bali dengan dunia usaha dan industri yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	8	Pengembangan jaringan informasi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal dan internasional melalui online, lembaga pemerintah, pelaku usaha dalam dan luar negeri	Jumlah jaringan informasi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal dan internasional melalui online, lembaga pemerintah, pelaku usaha dalam dan luar negeri yang dikembangkan	Jumlah jenis	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	9	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan lapangan kerja Krama Bali	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan lapangan kerja Krama Bali	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri</b>		<b>Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja paripurna (dilatih, disertifikasi dan ditempatkan) berdasarkan buku biru pengembangan sumber daya manusia Krama Bali sesuai dengan kebutuhan pasar domestik dan global	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan tenaga kerja paripurna	Orang	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	2	Pengembangan Bank pembangunan daerah (BPD) sebagai sumber pendanaan mudah dan murah bagi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat akses bantuan pendanaan mudah dan murah dari BPD	Orang	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	3	Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai sumber pendanaan mudah dan murah bagi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat akses bantuan pendanaan mudah dan murah dari LPD	Orang	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	4	Penetapan regulasi mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan rasio tertentu pada tingkat manajemen dan staf di Kabupaten/Kota Provinsi Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5	Penetapan regulasi pengendalian tenaga kerja KTP non domisili Bali dengan ketentuan-ketentuan tertentu			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	6	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penurunan angka pencari kerja Krama Bali	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penurunan angka pencari kerja Krama Bali	Laporan	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/output/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
9	<b>Misi 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan</b>			Persentase (%)		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan</b>		<b>Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaan</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1 Pengembangan Jaminan sosial Kesehatan pekerja Krama Bali berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)		Jumlah pekerja Krama Bali yang mendapatkan jaminan sosial kesehatan berdasarkan SPM KBS	Orang	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	2 Kerjasama dengan klinik penyelenggara layanan BPJS Kesehatan dalam jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	3 Penetapan regulasi kepesertaan tenaga kerja sektor informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan				Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	4 Pemberian insentif keikutsertaan pekerja di sektor informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan				Dinas Tenaga Kerja ESDM	Bansos
	5 Kerjasama kemitraan Pemerintah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam perluasan jaminan untuk tenaga kerja informal				Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
6 Pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	Laporan	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung	
7 Penetapan regulasi jaminan tenaga kerja dan menjadi bagian dari kontrak kerjasama tenaga kerja bekerja di luar negeri.				Biro Hukum dan HAM	Regulasi	
8 Pembinaan dan pengendalian terintegrasi agen tenaga kerja asing yang memenuhi regulasi tentang ketenagakerjaan.		Jumlah laporan pembinaan dan pengendalian terintegrasi agen tenaga kerja asing yang memenuhi regulasi tentang ketenagakerjaan.	Laporan	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung	
9 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi tenaga kerja Krama Bali yang bekerja di luar negeri				Dinas Tenaga Kerja ESDM	One Island One Management and One Commando	
10 Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten / Kota dalam peningkatan perlindungan tenaga kerja Krama Bali yang bekerja diluar negeri (sesuai kewenangan)		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten / Kota dalam peningkatan perlindungan tenaga kerja Krama Bali yang bekerja diluar negeri	Laporan	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung	
10	<b>Misi 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju</b>			Jumlah		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.</b>		<b>1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali</b>	<b>Jumlah</b>		
			<b>2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia</b>	<b>Jumlah</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1 Pemeliharaan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali.		Jumlah adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali yang dipelihara	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	2 Pemberian penghargaan kepada para pelaku Seni, Sastra, dan Budaya.		Jumlah pelaku seni sastra dan budaya yang mendapat penghargaan	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	3 Pembangunan Gedung Opera		Jumlah gedung opera yang dibangun	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Usulan DAK
	4 Revitalisasi gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan seni, sastra dan budaya di Kabupaten/Kota		Jumlah gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan seni, sastra dan budaya yang direvitalisasi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Usulan DAK
5 Pembangunan panggung terbuka berkapasitas besar dan sedang Gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan Seni, Sastra dan Budaya, Bali Convention Center di Kabupaten/Kota		Jumlah gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan seni, sastra dan budaya yang dibangun	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Usulan DAK	
6 Apresiasi pelaku dan karya seni, sastra dan budaya		Jumlah pelaku dan karya seni, sastra dan budaya yang diapresiasi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung	
7 Pembudayaan nilai- nilai tradisi, seni, dan budaya pada pendidikan formal dan non formal untuk memperkokoh jati diri Krama Bali		Persentase pendidikan formal dan non formal yang membudayakan nilai-nilai tradisi, seni, dan budaya	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung	
8 Integrasi nilai-nilai Sad Kerthi ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai menengah atas		Persentase kurikulum pendidikan dasar sampai menengah atas yang mengintegrasikan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase (%)	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung	
9 Pengangkatan Guru Kontrak untuk mengajar Seni, Sastra dan Budaya di Sekolah serta membina Sanggar - Sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat.		Jumlah guru kontrak yang diangkat untuk mengajar Seni, Sastra dan Budaya di Sekolah serta membina Sanggar - Sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat	Orang	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung	
10 Promosi tradisi, seni dan budaya dalam tata kehidupan Krama Bali		Jumlah tradisi, seni dan budaya dalam tata kehidupan Krama Bali yang dipromosikan	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung	
11 Peringatan hari-hari suci keagamaan Hindu secara sekala dan niskala bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kerthi meliputi Atma Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi dan Jagat Kerthi.		Jumlah hari-hari suci keagamaan Hindu bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kerthi yang diperingati	Rahina suci	Biro Kesra	Belanja Langsung	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
	12	Pengembangan sistem kehidupan kebudayaan Bali sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali	Persentase sistem kehidupan kebudayaan Bali sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali yang dikembangkan	Persentase (%)	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	13	Penguatan kelembagaan Majelis Pertimbangan Dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBYA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali			Dinas Kebudayaan	Hibah Top Down
	14	Pembentukan lembaga sertifikasi dan akreditasi di bidang kebudayaan (sesuai kewenangan)	Jumlah lembaga sertifikasi dan akreditasi di bidang kebudayaan yang dibentuk	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	15	Penetapan regulasi Standarisasi dan sertifikasi pada pelaku, hasil karya Seni, Sastra, dan Budaya.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	16	Penyusunan standar kualitas dan kompetensi pelaku, hasil karya Seni, Sastra, dan Budaya.	Jumlah jenis standar kualitas dan kompetensi pelaku, hasil karya Seni, Sastra, dan Budaya yang disusun	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	17	Penetapan regulasi pentas Seni, dan Budaya Bali sebagai salah satu yang harus disajikan / diselenggarakan pada pentas di Hotel dan Restoran			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	18	Kerjasama antar pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan swasta dalam pembangunan sarana prasarana, karya seni dan budaya			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	19	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pembangunan/revitalisasi Gedung - Gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan Seni, Sastra dan Budaya	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota membangun/merevitalisasi Gedung - Gedung Sasana Budaya sebagai pusat pengembangan Seni, Sastra dan Budaya	Laporan	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	20	Pembangunan balai budaya kepemudaan di Kota Denpasar	Jumlah balai budaya kepemudaan di Kota Denpasar yang dibangun	Jumlah	Dinas Pemuda dan Olahraga	Usulan DAK
	21	Penetapan regulasi Rahina Mebasa Bali, Busana Bali pada hari Kamis, Purnama, Tilem, Hari Jadi Pemprov Bali dan Hari Jadi Kabupaten/Kota.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	22	Penetapan regulasi Aksara Bali sebagai identitas dalam penamaan fasilitas publik, jalan, perkantoran, toko, dan sejenisnya			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	23	Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali	Jumlah even-even Bulan Bahasa Bali yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	24	Kerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan data base benda cagar budaya			Dinas Kebudayaan	One Island One Management and One Commando
	25	Penyusunan master plan restorasi dan revitalisasi benda cagar budaya	Jumlah master plan restorasi dan revitalisasi benda cagar budaya yang disusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	26	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelestarian peninggalan benda Cagar Budaya			Dinas Kebudayaan	One Island One Management and One Commando
11	<b>Misi 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Indeks Kebahagiaan</b>			<b>Indeks</b>		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi</b>		<b>1 Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala</b>	<b>Persentase (%)</b>		
			<b>2 Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Penyusunan standar minimal fasilitas sarana prasarana kawasan suci	Jumlah jenis standar minimal fasilitas sarana prasarana kawasan suci yang disusun	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	2	Rehabilitasi Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa).	Jumlah Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa) yang direhabilitasi	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	3	Bantuan sarana peribadatan Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa)			Biro Kesra	Hibah Top Down
	4	Penataan kawasan/lingkungan Pura agar menjadi tempat yang bersih, hijau, indah dan lestari. (Disesuaikan dg kewenangan)	Jumlah kawasan/lingkungan Pura yang ditata agar menjadi tempat yang bersih, hijau, indah dan lestari	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung
	5	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju Pura (Sat Kahyangan, Dang Kahyangan dan Kahyangan jagat)			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	6	Kerjasama dengan Kabupaten /Kota dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Desa untuk pembangunan/pengembangan taman, tempat parkir, kios, fasilitas MCK dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	7	Pembinaan dan pengawasan pemerintah kab/Kota dalam pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju Pura	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah kab/Kota dalam pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju Pura	Jumlah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	8	Penetapan regulasi Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	9	Pelindungan simbol - simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota).			Biro Hukum dan HAM	(REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbol keagamaan) termasuk



NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
10	Pemberdayaan sulinggih dan pemangku untuk memberikan dharmawacana nilai-nilai ajaran Agama Hindu Dharma pada upacara keagamaan Krama Bali	Jumlah sulinggih dan pemangku yang diberdayakan untuk memberikan dharmawacana nilai-nilai ajaran Agama Hindu Dharma pada upacara keagamaan Krama Bali	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung	
11	Penyelenggaraan dharmawacana di Pura, di Desa Adat, atau di tempat umum lainnya	Persentase penyampaian dharmawacana yang diselenggarakan di Pura, Desa Adat, atau di tempat umum lainnya	Persentase (%)	Biro Kesra	Belanja Langsung	
12	Penyebarluasan buku pendidikan keagamaan untuk umat Hindu di Desa Adat.	Jumlah buku pendidikan keagamaan untuk umat Hindu di Desa Adat yang disebarluaskan	Jumlah	Dinas Pendidikan	Belanja Langsung	
13	Peningkatan pemahaman dan pelatihan keagamaan kepada umat Hindu terutama generasi muda	Persentase generasi muda umat Hindu yang mendapat pelatihan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan	Persentase (%)	Biro Kesra	Belanja Langsung	
14	Peningkatan budaya kebersamaan dan hubungan sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase budaya kebersamaan dalam hubungan sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Persentase (%)	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung	
15	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan sradha dan bhakti	Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan sradha dan bhakti	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung	
16	Penyusunan Purana Pura di Kabupaten/Kota	Jumlah purana Pura di Kab/Kota yang disusun	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung	
17	Pemberdayaan dan bantuan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali			Biro Kesra	Hibah Top Down	
18	Pembangunan kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia di Kabupaten/Kota			Biro Kesra	Hibah Top Down	
19	Pelestarian, pemanfaatan dan tata kelola Kawasan Pesisir berdasarkan konsep Segara Kerthi	Jumlah Kawasan Pesisir berdasarkan konsep Segara Kerthi yang dilestarikan, dimanfaatkan dan dikelola	Jumlah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung	
12	<b>Misi 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>1 Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis</b>	<b>Persentase (%)</b>			
		<b>2 Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis</b>	<b>Persentase (%)</b>			
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak</b>	<b>1 Jumlah desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi</b>	<b>Jumlah</b>			
		<b>2 Jumlah Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi</b>	<b>Jumlah</b>			
	<b>Kegiatan :</b>					
1	Studi Kajian awig-awig dan pararem sebagai hukum positif	Jumlah awig-awig dan pararem yang dikaji sebagai hukum positif	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung	
2	Pemberdayaan sekaa teruna-teruni melalui pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal Bali	Jumlah sekaa teruna-teruni yang diberdayakan melalui pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal Bali	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung	
3	Penguatan dan pemberdayaan organisasi pecalang Desa Adat			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Pakraman	
4	Pengembangan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point berbasis teknologi	Jumlah wantilan Desa Adat yang dikembangkan sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point berbasis teknologi	Jumlah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung	
5	Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat: Banjar, Sekaa teruna - teruni, sekaa dan lembaga lainnya			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat	
6	Pemberdayaan dan penguatan Hukum Adat	Jumlah hukum adat yang ditetapkan sebagai hukum positif	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung	
7	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Desa Adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali	Jumlah jenis norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Desa Adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali yang disusun	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung	
8	Penetapan regulasi tentang norma, standar, prosedur dan kriteria Desa Adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali			Biro Kesra	Regulasi	
9	Pemberdayaan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat	
10	Pemenuhan kebutuhan Prajuru (Prajuru Desa Desa Adat dan Prajuru Banjar) yang dipilih sesuai dengan Awig-awig/Pararem yang berlaku di wilayah Desa-Desa Adat			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat	
11	Pemberdayaan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni	Jumlah Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung	
12	Peningkatan kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas Prajuru melalui pelatihan nilai-nilai Tri Hita Karana berdasarkan Sad Kerthi	Jumlah prajuru yang mengikuti pelatihan nilai-nilai Tri Hita Karana berdasarkan Sad Kerthi	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung	
13	Pemberdayaan Desa Adat sebagai tempat pengembangan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen)	Jumlah Desa Adat yang diberdayakan untuk pengembangan perekonomian rakyat	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung	
14	Peningkatan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan Prajuru			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
	15	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam monitoring dan evaluasi desa adat, dan lembaga-lembaga, komunitas Krama Bali yang sudah menjalankan lembaganya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan			Biro Kesra	One Island One Management and One Commando
	16	Penetapan regulasi unifikasi awig-awig sumber tata kehidupan adat istiadat Krama Bali yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	17	Penyusunan regulasi urusan pemerintahan dibidang budaya dan adat istiadat Bali dan kewenangan berdasarkan jenjang lembaga adat			Biro Kesra	Regulasi
	18	Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan tata kelola desa adat	Jumlah jenis norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan tata kelola desa adat yang disusun	Jumlah	Biro Kesra	Belanja Langsung
	19	Pemberian bantuan atribut pecalang sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan Pakem (tata busana, estetika, dan atribut lainnya) yang berlaku di Desa Adat			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat
	20	Peningkatan kompetensi Pecalang di bidang keamanan di wilayah/wewidangan Desa	Jumlah pecalang yang ditingkatkan kompetensinya di bidang keamanan	Jumlah	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Langsung
	21	Pembinaan pecalang Desa Adat dalam membangun kerjasama dengan aparatatur lembaga Kepolisian	Jumlah kerjasama aktifitas pengamanan pecalang dengan kepolisian	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	22	Peningkatan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan Pecalang			Dinas Kebudayaan	BKK Desa Adat
	23	Penetapan regulasi tentang aset desa adat			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	24	Penetapan regulasi tentang kriteria krama tamu dan tamu di lingkungan wewidangan Desa Pakraman/Desa Adat (masuk dalam muatan Ranperda Desa Adat)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	25	Penyusunan Kajian pemanfaatan kawasan pesisir untuk kepentingan desa adat	Jumlah kajian kawasan pesisir yang disusun untuk dimanfaatkan oleh desa adat	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
13	<b>Misi 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/Kota SE-BALI.</b>					
	<b>Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Realisasi PMDN dan PMA di Sektor Pariwisata</b>			<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas</b>		<b>Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas</b>	<b>Destinasi</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Studi pengembangan destinasi wisata baru	Jumlah Studi pengembangan destinasi wisata baru	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2	Pengembangan wisata pedesaan, wisata budaya kab/Kota di provinsi Bali	Jumlah wisata pedesaan, wisata budaya kab/Kota yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	3	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan kawasan destinasi wisata terpadu	Jumlah kawasan destinasi wisata terpadu antar Kabupaten/Kota yang dibangun	Jumlah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	4	Penyusunan buku biru "Bali New Eyes"	Jumlah konten central of excelent yang disusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	5	Penetapan regulasi seni budaya Bali menjadi atraksi wisata dan produk wisata			Biro Kesra	Regulasi
	6	Pengembangan seni budaya Bali sebagai destinasi pariwisata dan produk wisata	Jumlah seni budaya Bali sebagai destinasi pariwisata dan produk wisata yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	7	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan even, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat yang dilakukan oleh komunitas desa adat sesuai "Bali New Eyes "			Dinas Kebudayaan	One Island One Management and One Commando
	8	Identifikasi potensi investasi daerah untuk destinasi pariwisata baru di Kabupaten/Kota	Jumlah potensi investasi daerah untuk destinasi pariwisata baru di Kabupaten/Kota yang diidentifikasi	Jumlah	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	9	Penyusunan Master Plan Promosi investasi destinasi baru	Jumlah jenis investasi destinasi baru sesuai master plan promosi investasi yang disusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	10	Penyelenggaraan event - event terintegrasi dengan promosi pariwisata berbasis komunitas adat dan budaya	Jumlah event - event terintegrasi dengan promosi pariwisata berbasis komunitas adat dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	11	Penyelenggaraan pameran potensi baru destinasi pariwisata terintegrasi di dalam dan luar negeri	Jumlah konten potensi baru destinasi pariwisata terintegrasi di dalam dan luar negeri yang dipamerkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	12	Pengembangan upacara Pitrayadnya sebagai produk wisata yang terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah upacara Pitrayadnya yang dikembangkan sebagai produk wisata terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	13	Pengembangan upacara Mepandes sebagai produk wisata yang terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah upacara Mepandes yang dikembangkan sebagai produk wisata yang terintegrasi antar kab/Kota	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	14	Pengembangan Wisata Spiritual	Jumlah Wisata Spiritual yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	15	Pengembangan wisata alam	Jumlah wisata alam yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	16	Pengembangan wisata Pantai	Jumlah wisata pantai yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/output/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	17		
17	Pembangunan wisata Minat Khusus		Jumlah wisata Minat Khusus yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
18	Penyusunan Master Plan percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas destinasi wisata baru Bali Timur dan Bali Utara sesuai dengan hasil "Bali New Eyes"		Jumlah konten infrastruktur aksesibilitas destinasi wisata baru Bali Timur dan Bali Utara sesuai dengan master plan yang disusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
19	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sarana prasarana sebagai penunjang usaha produk pariwisata baru berdasarkan hasil pemetaan				Dinas Pariwisata	One Island One Management and One Commando
20	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan kebutuhan Air Bersih untuk Industri Jasa Pariwisata				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	One Island One Management and One Commando
21	Kerjasama dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan swasta dalam percepatan pembangunan usaha industri pariwisata				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
22	Kerjasama dengan pemerintah kab/Kota dalam pengembangan Pusat Kuliner Bali (PKB) di Gianyar, Badung, dan Denpasar bernuansa Bali dan ramah lingkungan				Biro Hukum dan HAM	One Island One Management and One Commando
23	Pengembangan taman tematik berbasis Kabupaten/Kota				Dinas Kehutanan	Usulan DAK
24	Pemberian bantuan dan pembinaan pembangunan Batur UNESCO Global Geopark di Kabupaten Bangli (Kewenangan pemerintah pusat)				Dinas Pariwisata	Hibah
25	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan destinasi dan produk wisata baru		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan destinasi dan produk wisata baru	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
<b>Sasaran :</b>						
<b>2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali</b>			<b>1 Jumlah produk pariwisata berbasis budaya</b>	<b>Produk Wisata</b>		
			<b>2 Jumlah produk pariwisata berkualitas Indie 4.0</b>	<b>Produk</b>		
<b>Kegiatan :</b>						
1	Kerjasama Pembangunan taman kunjungan wisata Disneyland/ universal Studio dengan karakter budaya Bali (Kerja Sama)				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
2	Pengembangan produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota		Jumlah produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
3	Pengembangan wisata pedesaan /wisata Budaya		Jumlah wisata pedesaan /wisata Budaya yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
4	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan pusat kuliner, cinderatama kekhususan wisata daerah di destinasi wisata, desa-desa berciri khas Bali				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
14	<b>Misi 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KotaSE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI</b>					
<b>Tujuan : Meningkatnya pasar pariwisata Bali</b>						
<b>Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB</b>				<b>(Persentase%)</b>		
<b>Sasaran :</b>						
<b>1 Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global</b>			<b>1 Jumlah devisa sektor pariwisata</b>	<b>USD</b>		
			<b>2 Persentase promosi pariwisata menerapkan Indie 4.0</b>	<b>Persentase (%)</b>		
<b>Kegiatan :</b>						
1	Pengembangan agenda tahunan event pariwisata Provinsi Bali "Bali Karya Maha Agung"		Jumlah agenda tahunan event pariwisata Provinsi Bali "Bali Karya Maha Agung" yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
2	Penyelenggaraan event-event adat dan Budaya Provinsi Bali "Bali Karya Maha Agung"		Jumlah event-event adat dan Budaya Provinsi Bali "Bali Karya Maha Agung" yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
3	Pengembangan pemasaran dan promosi wisata digital "Bali Karya Maha Agung"		Jumlah pemasaran dan promosi wisata digital "Bali Karya Maha Agung" yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
4	Pemetaan kegiatan budaya, adat istiadat dan keagamaan yang dapat dikembangkan menjadi event pariwisata "Bali Karya Maha Agung"		Jumlah kegiatan budaya, adat istiadat dan keagamaan yang dapat dikembangkan menjadi event pariwisata "Bali Karya Maha Agung" yang dipetakan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
5	Kerjasama dengan pelaku industri pariwisata dalam pengembangan even pariwisata "Bali Karya Maha Agung"				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
6	Penyediaan sarana dan prasarana untuk operasional Bali Incorporated		Jumlah sarana dan prasarana untuk operasional Bali Incorporated yang disediakan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
7	Pengembangan sistem promosi berbasis teknologi informasi khusus Provinsi Bali dan networking dengan pelaku usaha industri lokal dan internasional		Jumlah konten promosi berbasis teknologi informasi dan networking dengan pelaku usaha industri lokal dan internasional yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
	8	Kerjasama Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, dengan pelaku usaha industri pariwisata dan kerjasama antara pelaku industri pariwisata di Bali dengan pelaku usaha di luar negeri /global dengan wadah/ media Bali Incorporated			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	9	Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam pengembangan Bali Incorporated melalui produk pariwisata baru berbasis potensi adat istiadat dan budaya potensi daerah "Bali Karya Maha Agung"			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	10	Kerjasama pemerintah daerah dengan perwakilan-2 pemerintah dan komunitas-2 masyarakat Indonesia di luar negeri serta pelaku usaha industri pariwisata, untuk promosi pariwisata			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama promosi
	11	Penyelenggaraan hot deals, incentive sales, bulan promosi wisata	Jumlah promosi wisata yang menghasilkan hot deals, incentive sales yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	12	Pameran khusus industri pariwisata di negara negara dengan jumlah wisatawan 3 (tiga) terbesar	Jumlah konten industri pariwisata di negara negara dengan jumlah wisatawan 3 (tiga) terbesar yang dipamerkan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	13	Pemberian kemudahan/pelayanan/acara khusus waktu kunjungan wisatawan			Dinas Pariwisata	Regulasi
	14	Penetapan regulasi untuk pencegahan praktek Kartel dan sindikat pelaku industri pariwisata			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	15	Peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha industri pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah usaha industri pariwisata yang diawasi dan dikendalikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Belanja Langsung
15	<b>Misi 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF</b>					
	<b>Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan</b>					
	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>: Indeks kepuasan wisatawan</b>		persentase (%)		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1</b>	<b>Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan</b>	<b>Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Pengawasan dan pengendalian kepatuhan pelaku usaha industri pariwisata di Provinsi Bali terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Regulasi)	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian kepatuhan pelaku usaha industri pariwisata terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Belanja Langsung
	2	Penetapan regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pariwisata Provinsi Bali			Biro Perekonomian	Regulasi
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata</b>	<b>Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Pelatihan kepada pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang dilatih	Jumlah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Langsung
	2	Penyusunan SPM dengan memasukkan nilai-nilai Tri Hita Karana pada pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang memasukkan nilai-nilai Tri Hita Karana pada SPM yang disusun	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	3	Penetapan regulasi sertifikasi kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bidang pariwisata			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	4	Kerjasama dengan pemerintah pusat dalam pembangunan pelatihan bersertifikat untuk tenaga kerja pada industri pariwisata			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	5	Pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	6	Penetapan regulasi standarisasi tarif hotel di Provinsi Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM) kepariwisataan	Jumlah usaha pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah	Biro Perekonomian	Kerja Sama
	8	Kerjasama pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) Pariwisata Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	9	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten /Kota dalam pembangunan infrastruktur untuk destinasi dan produk wisata sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) Pariwisata Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	10	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan destinasi pariwisata yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan destinasi pariwisata yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	11	Pelatihan pemasar produk paket wisata "Bali Karya Maha Agung"	Jumlah pemasar produk paket wisata "Bali Karya Maha Agung" yang dilatih	Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	12	Pemberian insentif kepada kelompok masyarakat/perorangan pelaku usaha produk wisata baru di wilayah Bali Barat, Timur dan Utara			Dinas Pariwisata	Hibah Top Down
	13	Integrasi pelatihan sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha di bidang pengembangan perekonomian Bali dengan masyarakat pelaku industri pariwisata	Jumlah pelatihan yang diintegrasikan	Jumlah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Langsung

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	17		
16	<b>Misi 16 : MEMBANGUN DAN MENGEKEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/Kota DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi</b>			<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali</b>	<b>Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA</b>		<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1 Pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata	Jumlah kawasan ekonomi berbasis pariwisata yang dikembangkan		Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	2 Penyusunan buku biru pengembangan Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan kawasan Sarbagita terintegrasi dengan buku biru Bali New Eyes	Jumlah kawasan pertumbuhan ekonomi baru diluar SARBAGITA dan di SARBAGITA sesuai Buku Biru Bali New Eyes		Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung
	3 Penetapan regulasi moratorium pengalihan investasi dalam jumlah tertentu ke Bali Barat, Timur dan Bali Utara				Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	4 Penetapan regulasi moratorium pengalihan investasi dalam jumlah tertentu dan berwawasan lingkungan di Kawasan Sarbagita				Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	5 Peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru sesuai dengan potensi daerahnya dan pada kawasan berwawasan lingkungan di Provinsi Bali	Jumlah investasi pada pusat-pusat perekonomian baru yang dikembangkan		Triliun (Rp)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	6 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten di luar SARBAGITA dalam penyiapan pelayanan perijinaan terpadu satu pintu yang mudah, cepat dan berbiaya murah				Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	One Island One Management and One Commando
	7 Penetapan regulasi pemberian insentif kepada investor yang berinvestasi pada industri berskala besar pengolahan hasil pertanian pangan dalam arti luas di wilayah Bali Barat, Timur dan Utara	Jumlah investor yang berinvestasi di Bali Barat, Bali Timur dan Bali Utara yang mendapatkan insentif		Jumlah	Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	8 Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan aksesibilitas di Kabupaten/Kota se-Bali	Persentase pengembangan sarana dan prasarana di Bali Barat, Timur dan Utara		Jumlah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	9 Penyusunan Master Plan Promosi peluang investasi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru	Jumlah peluang investasi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru sesuai Master Plan Promosi yang disusun		Jumlah	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	10 Pembangunan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota se Bali	Jumlah kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota se-Bali yang dibangun		Jumlah	Dinas Pariwisata	Belanja Langsung
	11 Promosi investasi potensi daerah Kabupaten/Kota terintegrasi dengan program promosi investasi daerah lainnya berdasarkan "cetak biru" dan percepatan pembangunan Provinsi Bali	Persentase peningkatan investasi daerah lainnya		Persentase (%)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	12 Penetapan regulasi pembangunan infrastruktur kab/Kota Provinsi Bali memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur				Biro Perekonomian	Regulasi
	13 Penyelenggaraan pameran potensi investasi daerah terintegrasi dengan pameran wisata di dalam dan luar negeri	Jumlah konten potensi investasi daerah terintegrasi dengan pameran wisata yang dipamerkan di dalam dan luar negeri		Jumlah	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal</b>	<b>1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda)</b>		<b>Persentase (%)</b>		
		<b>2 Persentase Pertokoan Milik UMKM</b>		<b>Persentase (%)</b>		
		<b>3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</b>		<b>Jumlah (Toko)</b>		
		<b>4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi</b>		<b>Jumlah (Toko)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1 Pembentukan lembaga industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor	Jumlah lembaga industri kerajinan yang berorientasi ekspor yang dibentuk			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	2 Peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi peluang kerja pada rencana investasi yang dikembangkan	Jumlah tenaga kerja yang terserap untuk memenuhi peluang kerja pada rencana investasi yang dikembangkan		Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung
	3 Penetapan regulasi pemberian insentif bagi investor untuk usaha agroindustri, agribisnis menengah dan besar ramah lingkungan di Wilayah Bali Barat, Timur dan Utara				Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi
	4 Pemberian insentif bagi koperasi, UKM, IKM untuk berusaha berbasis pengembangan sumberdaya potensi daerah				Dinas Koperasi dan UKM	Hibah Top Down

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	17		
	5	Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan pengembangan pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	6	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan usaha berbasis sumberdaya potensi daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan usaha berbasis sumberdaya potensi daerah	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	One Island One Management and One Commando
	7	Pemberian insentif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu untuk berinvestasi di Bali Barat, Utara dan Timur			Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi
17	<b>Misi 17 : MEMBANGUN DAN MENGEKSPANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI.</b>					
	<b>Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali</b>					
	<b>Indikator Tujuan : 1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali</b>			<b>Persentase (%)</b>		
	<b>2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali</b>			<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatkan kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor</b>		<b>1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri</b>	<b>Persentase (%)</b>		
			<b>2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Pengembangan pelatihan instruktur dari dalam dan luar negeri untuk pelaku usaha mikro, kecil	Jumlah pelaku usaha mikro, kecil yang diberikan pelatihan instruktur dari dalam maupun luar negeri	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	2	Pengembangan usaha, desain, produk yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik	Jumlah pemenuhan usaha desain produk lokal yang berkualitas untuk pasar domestik	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	3	Pengembangan usaha, desain, produk yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor	Jumlah pemenuhan usaha desain produk lokal yang berkualitas untuk pasar ekspor	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	4	Kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan sesama swasta pelaku usaha sandang Bali dalam peningkatan daya saing di bidang disain dan kualitas sandang produk Branding Bali yang berorientasi ekspor			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	5	Peningkatan sarana prasarana dan sertifikasi produk yang memenuhi International Organization for Standardization (ISO)	Jumlah sarana prasarana dan sertifikasi produk yang memenuhi International Organization for Standardization (ISO)	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	6	Pemberian insentif kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sandang Branding Bali yang berorientasi ekspor, ramah lingkungan dan berlokasi di Bali Barat, Utara dan Timur			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Hibah Top Down
	7	Bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pangsa pasar lokal	Jumlah laporan bimbingan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pangsa pasar lokal	Jumlah	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	8	Pengembangan koperasi kunjungan Objek Wisata Tour	Jumlah koperasi kunjungan Objek Wisata Tour yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	9	Pemberdayaan Bumdes Desa Pakraman/Desa Adat	Jumlah BUMDes Desa Pakraman/Desa Adat yang diberdayakan	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	10	Penguatan Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian dan industri kerajinan rakyat	Jumlah Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian dan industri kerajinan rakyat yang diperkuat	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	11	Pengembangan unit usaha sesuai potensi dan komoditi unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha sesuai potensi dan komoditi unggulan Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	12	Pembentukan koperasi/lembaga penjamin bagi produk-produk/komoditas lokal.	Jumlah koperasi/lembaga penjamin bagi produk-produk/komoditas lokal yang dibentuk	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	13	Penetapan regulasi seluruh jenis produk yang dihasilkan di wilayah Provinsi Bali menggunakan Branding Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	14	Kerjasama dengan pelaku usaha dalam promosi pengenalan persepsi Branding Bali untuk pasar lokal dan ekspor			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kerja Sama
	15	Penyelenggaraan event-event perdagangan untuk promosi pengenalan persepsi Branding Bali pada pelaku usaha pasar lokal dan ekspor	Jumlah event-event perdagangan untuk promosi pengenalan persepsi Branding Bali pada pelaku usaha pasar lokal dan ekspor yang diselenggarakan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	16	Penyelenggaraan event-event untuk kelompok masyarakat tertentu (seperti generasi milenial) sebagai media untuk mempercepat pengenalan persepsi produk Branding Bali	Jumlah event-event untuk kelompok masyarakat tertentu yang diselenggarakan untuk mempercepat pengenalan produk Branding Bali	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	17	Pelatihan dan pendampingan melakukan pemasaran melalui E-Commerce bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Brand Bali	Jumlah tenaga kerja pemasaran melalui E-Commerce bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Brand Bali yang dilatih	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2		3	4	17	
	18	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan kepada pelaku usaha menggunakan "Branding Bali" setiap produk yang dihasilkan di daerahnya.			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	One Island One Management and One Commando
	19	Bimbingan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk pemberian label "Branding Bali" dari setiap produk yang dihasilkan diwilayahnya			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	One Island One Management and One Commando
	20	Pembangunan Sentra Pemasaran dan Promosi Kerajinan Rakyat di Kabupaten Badung, Gianyar dan Denpasar	Jumlah Sentra Pemasaran dan Promosi Kerajinan Rakyat di Kabupaten Badung, Gianyar dan Denpasar yang dibangun	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	21	Penetapan regulasi tentang kerjasama kemitraan terintegrasi antara Usaha mikro, Kecil dan Menengah (MUKM) dengan Usaha /industri besar (Perda)			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	22	Pembangunan pasar produk UKM-kerajinan masyarakat Bali	Jumlah pasar produk UKM-kerajinan masyarakat Bali yang dibangun	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Langsung
	23	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sentra promosi dan pemasaran produk-produk kerajinan masyarakat pelaku usaha UKM, IKM dan Koperasi kab/Kota			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
<b>Sasaran :</b>						
	2	<b>Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali</b>	<b>Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi</b>	<b>Jumlah</b>		
<b>Kegiatan :</b>						
	1	Pengembangan Pasar Buah di Kota Denpasar	Jumlah pasar buah di Denpasar yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	2	Pengembangan Pasar Agro di Kabupaten Tabanan	Jumlah Pasar Agro di Kabupaten Tabanan yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	3	Pengembangan Pasar Ikan di Kabupaten/Kota	Jumlah pasar ikan yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	4	Revitalisasi Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri di Kabupaten Buleleng	Persentase Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri di Kabupaten Buleleng yang direvitalisasi	Persentase (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	5	Revitalisasi Pasar Kintamani, Pasar Kayu Ambua, Pasar Kidul Bangli di Kabupaten Bangli	Persentase Pasar Kintamani, Pasar Kayu Ambua, Pasar Kidul Bangli di Kabupaten Bangli yang direvitalisasi	Persentase (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	6	Pembangunan Terminal Agro/Pasar Agro dan kawasan Agro Industri	Jumlah Terminal Agro/Pasar Agro dan kawasan Agro Industri yang dibangun	Jumlah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	7	Pengembangan pasar hasil pertanian lokal dan kerajinan rakyat di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Usulan DAK
	8	Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis budaya dengan "Branding Bali"	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah berbasis budaya dengan branding Bali yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	9	Pemberian insentif bagi pelaku usaha mikro/skala kecil dan koperasi yang baru tumbuh, dalam jangka waktu tertentu			Dinas Koperasi dan UKM	Hibah Top Down
	10	Pengembangan lembaga pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) terintegrasi berbasis pengembangan inovasi/kreatif, teknologi, dan metode produksi	Jumlah lembaga pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) terintegrasi berbasis pengembangan inovasi/kreatif, teknologi, dan metode produksi yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	11	Penyelenggaraan pelatihan khusus dan berkesinambungan sesuai dengan produk yang dikembangkan bagi pelaku usaha mikro/skala kecil yang baru tumbuh, dalam jangka waktu tertentu	Jumlah pelaku usaha mikro/skala kecil yang baru tumbuh yang dilatih khusus dan berkesinambungan sesuai dengan produk yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	12	Pemberian insentif pajak dan retribusi, ekspor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	13	Pembentukan asosiasi percepatan pengurusan HAKI bagi seniman, budayawan, dan pengerajin lokal Bali	Jumlah asosiasi percepatan pengurusan HAKI bagi seniman, budayawan, dan pengerajin lokal Bali	Jumlah	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	14	Pemberian insentif untuk diversifikasi, pengkayaan desain, packaging, kualitas produk, pengembangan produk yang prospek tinggi di pasar internasional untuk meningkatkan jumlah produk ekspor			Biro Hukum dan HAM	Hibah Top Down
	15	Pendampingan tenaga ahli koperasi dalam bidang usaha sumber bahan baku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Jumlah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mendapatkan pendampingan tenaga ahli	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	16	Penguatan hubungan industrial antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah (MUKM) dan Koperasi sebagai mitra kerja terintegrasi	Jumlah usaha mikro, usaha kecil dan menengah (MUKM) dan Koperasi sebagai mitra kerja terintegrasi dengan pelaku usaha besar melalui hubungan industrial yang diperkuat	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2		3	4	17	
	17	Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan dan ekspor produk mikro, usaha kecil dan menengah (MUKM) dan Koperasi.	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan peningkatan pendapatan dan ekspor produk mikro, usaha kecil dan menengah (MUKM) dan Koperasi.	Laporan	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	18	Pembinaan pengembangan Bumdes Desa Pakraman/Desa Adat untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan rumah tangga Krama Bali	Persentase berkembangnya Bumdes Desa Pakraman/Desa Adat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga Krama Bali	Persentase (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung
	19	Kerjasama dengan lembaga keuangan milik pemerintah Bank dan Non Bank dalam penyaluran kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerja Sama
	20	Pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi	Persentase pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi yang mendapat kredit mudah dan murah	Persentase (%)	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	21	Pemberdayaan lembaga perkreditan desa (LPD) dalam penyaluran kredit mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil, Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan Koperasi	Persentase pelaku usaha industri kecil, Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan Koperasi yang mendapat kredit mudah dan murah	Persentase (%)	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	22	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan rumah tangga berbasis budaya	Persentase sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan rumah tangga berbasis budaya yang dikembangkan	Persentase (%)	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	23	Pembinaan kemitraan antara industri kecil menengah (IKM) dengan BUMN dan industri besar dalam pengembangan produk dan pemasaran sesuai hasil bisnis plan			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kerja Sama
	24	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan pasar produk UKM-kerajinan masyarakat Bali sesuai bisnis plan			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	25	Pembangunan sentra pemasaran produk Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan hasil bisnis plan	Persentase peningkatan pembangunan sentra pemasaran produk Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase (%)	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
	26	Pembinaan pengembangan koperasi sebagai mitra usaha menengah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah koperasi yang dibina sebagai mitra usaha menengah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung
18	<b>Misi 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI.</b>					
	<b>Tujuan</b> : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru					
	<b>Indikator Tujuan</b> : Indeks konektivitas			Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)		
	<b>Sasaran</b> :					
	<b>1</b> Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	<b>Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)</b>	<b>Indeks</b>			
	<b>Kegiatan</b> :					
	1 Pengembangan Jalan Penghubung (Jalan Singkat/Shortcut) Antar Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Penghubung (Jalan Singkat/Shortcut) yang dikembangkan	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	One Island One Management and One Commando	
	2 Pembangunan Jalan Tol Lingkar Bali			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan DAK	
	3 Pengembangan angkutan publik yang menggunakan gas atau listrik	Jumlah angkutan publik ramah lingkungan yang dikembangkan	Jumlah	Dinas Perhubungan	Belanja Langsung	
	4 Promosi potensi investasi transportasi ramah lingkungan di Kawasan Sarbagita	Jumlah potensi investasi transportasi ramah lingkungan di Kawasan Sarbagita yang dipromosikan	Jumlah	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung	
	5 Mendorong pemerintah pusat dalam pengembangan Pelabuhan Bongkar Muat Celukan Bawang Buleleng berstandar internasional			Dinas Perhubungan	Usulan DAK	
	6 Mendorong pemerintah pusat melanjutkan Pembangunan Pelabuhan Gunaksa			Dinas Perhubungan	Usulan DAK	
	7 Mendorong pemerintah pusat untuk Pembangunan Bandar Udara berstandar internasional di Kubutambahan Buleleng			Dinas Perhubungan	Usulan DAK	
	8 Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam Pembangunan Pelabuhan Sanur			Dinas Perhubungan	Usulan DAK	
	9 Mendorong pemerintah pusat untuk Pengembangan Pelabuhan Kapal Pesiar berstandar internasional : Pelabuhan Benoa di Denpasar, Pelabuhan di Amed dan di Tanah Ampo Kabupaten Karangasem			Dinas Perhubungan	One Island One Management and One Commando	
	10 Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur transportasi	Jumlah jenis standar pelayanan minimal infrastruktur transportasi yang diterapkan	Persentase (%)	Biro Perekonomian	Belanja Langsung	



NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
	11	Pembinaan dan pengawasan (Binwas) pemerintah Kabupaten/Kota pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian Kabupaten/Kota	Laporan pembinaan dan pengawasan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian	Laporan	Biro Perekonomian	Belanja Langsung
	12	Pembangunan Kereta Api Lingkar Bali			Dinas Perhubungan	Usulan DAK
	13	Pemberian kemudahan investasi modal transportasi berbahan bakar listrik ramah lingkungan	Persentase peningkatan investasi modal transportasi ramah lingkungan	Persentase (%)	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi
	14	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos) penunjang masyarakat Difabel			Dinas Sosial	One Island One Management and One Commando
	15	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan (Binwas) pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan utilitas lingkungan melalui dana Desa			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	16	Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan sarana jalan dan transportasi publik dari dan ke wilayah Bali Barat, Utara dan Timur			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	17	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan Binwas dana desa pembangunan infrastruktur penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasos dan Fasum) di lingkungan pemukiman			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	One Island One Management and One Commando
	18	Pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada pemerintah Kabupaten / Kota untuk pembangunan aksesibilitas antar wilayah di daerahnya.	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan pembangunan aksesibilitas antar wilayah	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung
	19	Pembangunan transportasi ramah lingkungan di kawasan Sarbagita	Jumlah transportasi ramah lingkungan di kawasan Sarbagita yang dibangun	Jumlah	Dinas Perhubungan	Belanja Langsung
19	<b>Misi 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum</b>			Persentase (%)		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatkan rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.</b>		<b>1. Angka kriminalitas</b>	<b>Kasus</b>		
			<b>2. Persentase penanganan bencana</b>	<b>Persentase (%)</b>		
	<b>Kegiatan :</b>					
	1	Pelebagaan pecalang sebagai penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan pemukiman Krama Bali	Persentase terlebagnya pecalang Bali	Persentase (%)	Dinas Kebudayaan	Belanja Langsung
	2	Deteksi dini pencegahan terjadinya potensi pelanggaran hukum	Persentase menurunnya pelanggaran hukum	Persentase (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Langsung
	3	Pencegahan dan penegakkan Perda Provinsi	Persentase menurunnya pelanggaran Perda Provinsi	Persentase (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Langsung
	4	Kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan pecalang sebagai pengamanan lingkungan pemukiman Krama Bali			Satuan Polisi Pamong Praja	One Island One Management and One Commando
	5	Pembinaan dan pengawasan (Binwas) Pemerintah Kabupaten/Kota penegakkan Peraturan Daerah (Perda)	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penegakkan Peraturan Daerah (Perda)	Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja Langsung
	6	Pembangunan Command Center yang terintegrasi se-Bali	Jumlah Command Center yang dibangun terintegrasi	Jumlah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Langsung
	7	Pengembangan unit reaksi cepat di wilayah strategis objek wisata di Bali	Persentase pengembangan unit reaksi cepat di wilayah strategis objek wisata	Persentase (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Langsung
	8	Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan (Binwas) pengendalian keamanan wisatawan			Satuan Polisi Pamong Praja	One Island One Management and One Commando
	9	Penetapan Regulasi pemberlakuan asuransi kecelakaan berlalu lintas kepada wisatawan yang berwisata di Bali			Biro Hukum dan HAM	Regulasi
	10	Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah terkait (Jiwa Sraya) / pihak ketiga (Lembaga Asuransi) dalam pemberlakuan asuransi kecelakaan berlalu lintas kepada wisatawan yang berwisata di Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando
	11	Monitoring dan evaluasi wisatawan yang tercover/terlindungi dengan asuransi kecelakaan berlalulintas	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi wisatawan yang tercover/terlindungi dengan asuransi kecelakaan berlalulintas	Jumlah	Dinas Kesehatan	Belanja Langsung
20	<b>Misi 20 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.</b>					
	<b>Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali</b>					
	<b>Indikator Tujuan : 1 Indeks demokrasi</b>			Persentase (%)		
	<b>2 Indeks pemberdayaan gender</b>			<b>Indeks</b>		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatkan peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis</b>		<b>Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada</b>	<b>Persentase (%)</b>		

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kegiatan :</b>						
1	Peningkatan transparansi yang berkeadilan dalam pengambilan keputusan hukum adat	Persentase pengambilan keputusan hukum adat yang transparan dan berkeadilan	Persentase (%)	Biro Hukum dan HAM	Belanja Langsung	
2	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi yang diberdayakan	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belanja Langsung	
3	Pencegahan perkawinan usia dini	persentase penurunan perkawinan usia dini	Persentase (%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belanja Langsung	
4	Pembentukan masyarakat Madani	Jumlah masyarakat madani yang dibentuk	Jumlah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belanja Langsung	
5	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota (Binwas) dalam Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belanja Langsung	
6	Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penguatan dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas Krama Bali penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak ditingkat desa kab/Kota Provinsi Bali			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	One Island One Management and One Commando	
21	<b>Misi 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.</b>					
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis</b>						
<b>Indikator Tujuan : Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)</b>				Persentase (%)		
<b>Sasaran :</b>						
<b>1 Meningkatkan keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan</b>		<b>Daya dukung lingkungan</b>	Persentase (%)			
<b>Kegiatan :</b>						
1	Kerjasama pemenuhan Kebutuhan Air Bersih untuk rumah tangga Krama Bali			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kerja Sama	
2	Pemetaan kawasan pesisir dengan citra satelit	Persentase kawasan pesisir yang dipetakan dengan citra satelit	Persentase (%)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja Langsung	
3	Penyusunan buku biru tata ruang Bali berlandaskan Sat Kerthi terintegrasi dengan Bali New Eyes yang mengakomodasi Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan Lingkungan	Jumlah buku biru tata ruang Bali yang tersusun	Buku	Bappeda Litbang	Belanja Langsung	
4	Penetapan regulasi tataruang wilayah Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan Lingkungan buku biru terintegrasi dengan Bali New Eyes			Biro Hukum dan HAM	Regulasi	
5	Monitoring dan evaluasi penyesuaian tata ruang berlandaskan wilayah Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan Lingkungan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyesuaian tata ruang wilayah sesuai dokumen tata ruang	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung	
6	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota penyesuaian tata ruang Bali berlandaskan Sat Kerthi yang mengakomodasi Bali Barat, Timur dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru Bali dan Kawasan Sarbagita sebagai kawasan berwawasan Lingkungan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyesuaian tata ruang Bali berlandaskan Sat Kerthi	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung	
7	Pendataan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain	Persentase sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain yang terdata	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
8	Perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain	Persentase sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain yang terlindungi	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
9	Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyediaan Energi Listrik	Persentase peningkatan energi listrik	Persentase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung	
10	Penyusunan kajian pembangkit Listrik Tenaga Air: air laut, air terjun, danau, matahari	Jumlah kajian pembangkit listrik tenaga air: air laut, air terjun, danau, matahari yang tersusun	Jumlah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Langsung	
11	Penyusunan master plan pembangunan pembangkit listrik	Jumlah master plan pembangunan pembangkit listrik yang tersusun	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung	
<b>Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah</b>						
<b>Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>				Persentase (%)		
<b>Sasaran :</b>						
<b>Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan</b>		<b>1 Indeks kualitas air</b>	<b>Indeks</b>			
		<b>2 Indeks kualitas udara</b>	<b>Indeks</b>			
		<b>3 Indeks kualitas tutupan lahan</b>	<b>Indeks</b>			
		<b>4 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)</b>	<b>Persentase (%)</b>			
		<b>5 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</b>	<b>Persentase (%)</b>			
<b>Kegiatan :</b>						
1	Penyusunan Master Plan Provinsi Bali sebagai Green Island	Persentase penyusunan master plan	Persentase (%)	Bappeda Litbang	Belanja Langsung	
2	Promosi investasi daerah pengelolaan sampah dengan metoda zero Waste	Jumlah jenis investasi pengelolaan sampah dengan metode Zero Waste yang dipromosikan	Ton	Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belanja Langsung	
3	Pengembangan sistem pengolahan dan penanganan limbah B3 terpadu kab/Kota/provinsi	Persentase sistem pengolahan dan penanganan limbah B3 terpadu kab/Kota/provinsi yang dikembangkan	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
4	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kab/Kota di Provinsi Bali	Jumlah sistem pengelolaan persampahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kab/Kota di Provinsi Bali yang dikembangkan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7
5	Penyediaan fasilitas peralatan pengolahan sampah di masyarakat kab/Kota Provinsi Bali	Jumlah fasilitas pengolahan sampah yang berfungsi	Unit	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
6	Pendampingan dan bantuan Pengolahan sampah di lingkungan pemukiman Krama Bali	Jumlah sampah yang dikelola dengan baik	Ton	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
7	Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten Kota dalam pengendalian dan pengelolaan sampah di daerahnya.	Jumlah laporan pengelolaan sampah di kab/Kota yang dibina dan dikendalikan	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
8	Penataan jalur jalan provinsi untuk memperindah dan kenyamanan pemakai lalu lintas jalan	Persentase jalur jalan provinsi yang indah dan nyaman bagi pemakai lalu lintas jalan	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
9	Pengendalian dan pengawasan pemakaian bahan plastik dalam kehidupan masyarakat sehari hari	Jumlah laporan hasil pengendalian pemakaian bahan plastik dalam kehidupan masyarakat sehari hari	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
10	Pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha tambang	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha tambang	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
11	Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia berbahaya dan usaha/ kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan kualitas hidup	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia berbahaya dan usaha/kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan kualitas hidup	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
12	Pengawasan dan pengendalian pencemaran sumber daya air (SDA)	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pencemaran sumber daya air (SDA)	Jumlah	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
13	Internalisasi budaya sadar kebersihan lingkungan hidup Krama Bali melalui pengelolaan dan pemrosesan sampah dini	Persentase pengelolaan dan pemrosesan sampah dini	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
14	Penegakan hukum berkesinambungan kepada pelaku perusak lingkungan hidup	Persentase penegakan hukum berkesinambungan kepada pelaku perusak lingkungan hidup	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
15	Pemetaan kawasan danau di Kabupaten/Kota dan pemanfaatannya untuk kepentingan desa adat berdasarkan konsep Danu Kertih	Persentase pemetaan kawasan danau dan pemanfaatannya untuk kepentingan desa adat berdasarkan konsep Danu Kertih	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
16	Pelestarian, pemanfaatan dan tata kelola Danau berdasarkan konsep Danu Kertih	Persentase pelestarian, pemanfaatan dan tata kelola danau berdasarkan konsep Danu Kertih	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
17	Pemetaan kawasan danau dengan citra satelit	Persentase pengelolaan kawasan yang sesuai pemetaan	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Belanja Langsung	
18	Revitalisasi Danau Batur sesuai dengan fungsinya	Persentase luas kerusakan lingkungan danau yang tertangani	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan DAK	
19	Revitalisasi Danau Beratan, Buyan dan Tamblingan	Persentase luas kerusakan lingkungan danau yang tertangani	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan DAK	
20	Pelestarian, pemanfaatan dan tata kelola Hutan berdasarkan konsep Wana Kertih	Jumlah hutan yang dikelola menerapkan konsep Wana Kertih	Jumlah	Dinas Kehutanan	Belanja Langsung	
21	Revitalisasi lahan kritis	Persentase lahan kritis yang tertangani	Persentase (%)	Dinas Kehutanan	Belanja Langsung	
22	Penyusunan master plan pembangunan pembangkit listrik dan sumber energi lainnya sesuai hasil "Bali New Eyes" untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Bali	Jumlah potensi sesuai master plan pembangunan pembangkit listrik dan sumber energi lainnya yang disusun sesuai hasil "Bali New Eyes" untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Bali	Jumlah	Bappeda Litbang	Belanja Langsung	
23	Pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi	Jumlah infrastruktur pendukung penyediaan energi listrik yang dibangun dalam rangka kemandirian energi	Jumlah	Dinas Tenaga Kerja ESDM	Belanja Langsung	
24	Kerjasama dengan pemerintah pusat dalam pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan wilayah Provinsi Bali			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan DAK	
25	Pembentukan Hub LNG di wilayah Gerokgak, Buleleng untuk distribusi LNG Jawa Timur dan Wilayah Indonesia bagian tengah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan DAK	
22	<b>Misi 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.</b>					
	<b>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>					
	<b>Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik</b>			<b>Indeks</b>		
	<b>Sasaran :</b>					
	<b>1 Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</b>	<b>Indeks</b>			
	<b>Kegiatan :</b>					
	1 Kerjasama yang berkesinambungan dengan Lembaga pemerintah dalam penyelenggara pelayanan publik bersama	Jumlah kerjasama	Kerjasama	Biro Organisasi	One Island One Management and One Commando	
	2 Pemberian Ijin usaha gratis untuk usaha dan industri kecil dan menengah, koperasi yang berorientasi ekspor dan ramah lingkungan	Jumlah UMKM yang mendapat ijin usaha gratis	Unit	Dinas Koperasi dan UKM	Regulasi	
	3 Simplifikasi prosedur penyelenggaraan pelayanan publik terpadu antar instansi lembaga pemerintah	Jumlah SOP Pelayanan Publik yang disederhanakan	SOP	Biro Organisasi	Belanja Langsung	
	4 Pembangunan sistem cepat tanggap pengaduan masyarakat secara online	Kecepatan tanggapan terhadap pengaduan dari masyarakat	Menit	Inspektorat	Belanja Langsung	
	5 Penetapan lama waktu dan biaya standar setiap jenis pelayanan publik.	Persentase kepatuhan pelayanan publik terhadap SOP	Persentase (%)	Biro Organisasi	Belanja Langsung	
	6 Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah daerah	Jumlah pemanfaatan aset untuk sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Langsung	
	7 Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang etika, integritas dan profesional sebagai pelaku pelayanan publik	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan etika, integritas dan profesionalitas	Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Langsung	

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (sasaran/outcome/output)	SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	STATUS TINDAK LANJUT
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/KEGIATAN					
1	2		3	4	17	
	8 Pengembangan budaya kerja S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timebond) pada aparaturn sipil negara (ASN) di seluruh lembaga pemerintah Provinsi Bali		Persentase pengembangan budaya kerja SMART pada ASN	Persentase (%)	Biro Organisasi	Belanja Langsung
<b>Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan</b>						
<b>Indikator Tujuan : 1 Indeks Reformasi Birokrasi</b>				<b>Indeks</b>		
<b>2 Opini BPK</b>				Status		
<b>3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>				Persentase (%)		
<b>Sasaran :</b>						
<b>1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>			<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap</b>	<b>Indeks</b>		
<b>Kegiatan :</b>						
	1 Sensus pembangunan semesta berencana	Jumlah jenis data yang dihasilkan dari sensus pembangunan Semesta Berencana	Persentase (%)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung	
	2 Pengembangan manajemen pengelolaan data terintegrasi	Jumlah jenis manajemen pengelolaan data terintegrasi yang dikembangkan	Persentase (%)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Langsung	
	3 Penetapan regulasi bagi penduduk pendatang non domisili Bali		Persentase (%)	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Regulasi	
	4 Pengendalian jumlah penduduk non domisili di Bali dengan ketentuan-ketentuan tertentu	jumlah laporan hasil pengendalian jumlah penduduk non domisili di Bali dengan ketentuan-ketentuan tertentu	Persentase (%)	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Belanja Langsung	
	5 Penerapan manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penerapan manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan	Persentase (%)	Badan Kepegawaian Daerah	Belanja Langsung	
	6 Internalisasi pendekatan Merit System dalam rangka pembinaan ASN	Persentase Internalisasi pendekatan Merit Sistem dalam rangka pembinaan ASN	Persentase (%)	Badan Kepegawaian Daerah	Belanja Langsung	
	7 Manajemen penggajian dan pengupahan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan	Persentase kepatuhan pelaksanaan regulasi terkait sistem penggajian dan pengupahan ASN	Persentase (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Langsung	
	8 Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan berdasarkan pendekatan Merit System	Persentase penerapan Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan evaluasi jabatan	Persentase (%)	Biro Organisasi	Belanja Langsung	
	9 Pembangunan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif sesuai dengan jumlah dan area pelayanan publik dan potensi ekonomi daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan efektivitas	Jumlah OPD	Biro Organisasi	Belanja Langsung	
	10 Pembentukan Badan Riset dan Inovasi	Persentase riset dan inovasi yang diterapkan	Persentase (%)	Bappeda Litbang	Belanja Langsung	
<b>Sasaran :</b>						
<b>2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>			<b>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase (%)</b>		
<b>Kegiatan :</b>						
	1 Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam peningkatan produktivitas aset sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase produktivitas aset	Persentase (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Langsung	
	2 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber-pajak daerah dan retribusi dengan menggunakan sistem informasi teknologi	Persentase penerapan sistem IT terkait peningkatan PAD	Persentase (%)	Badan Pendapatan Daerah	Belanja Langsung	
	3 Restrukturisasi Bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengembangkan perusahaan induk BUMD sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD	Persentase (%)	Biro Perekonomian	Belanja Langsung	
	4 Peningkatan kontribusi Bank Pembangunan Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase kontribusi BPD terhadap PAD	Persentase (%)	Biro Perekonomian	Belanja Langsung	

## **6.5 Program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali**

Program Prioritas Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana mencakup 5 (lima) bidang, yaitu:

Bidang 1 : Pangan, Sandang, dan Papan

Bidang 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Bidang 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang 5 : Pariwisata

Pembangunan 5 (lima) Bidang Prioritas tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Adapun Program Prioritas dimaksud secara terperinci per bidang adalah sebagai berikut.

### **6.5.1 Bidang 1: Pangan, Sandang, dan Papan**

#### **Bidang Pangan**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pangan, mulai dari hulu sampai ke hilir berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi ekspor.

1. Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, meliputi:
  - a. Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Bali.
  - b. Memetakan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan di Kabupaten/Kota se-Bali, yang mencakup: (1) tanaman pangan yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali berupa padi; (2) hortikultura yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, berupa sayuran (kol, sawi, wortel, kacang panjang, kangkung, kelor, gonda) dan buah-buahan (manggis, pisang, pepaya, mangga, rambutan); (3) perkebunan yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali adalah kelapa; dan (4) peternakan lokal Bali yang menjadi unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali adalah sapi Bali, babi Bali, ayam Bali, itik Bali (termasuk bebek putih jambul).

- c. Program yang mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui kedaulatan beras, yaitu: (1) perlindungan sawah; (2) perlindungan sumber daya air; (3) perlindungan kesuburan tanah; (4) peningkatan akses terhadap sarana produksi, yaitu benih, bibit, pupuk, pestisida bermutu; (5) pemberian bantuan sapi kepada petani untuk menghasilkan pupuk organik dan untuk pengembangan biogas; (6) pemberian bantuan sapi dan biogas kepada petani yang tinggal di sawah/kebun; (7) menghidupkan kembali sekaa manyi dan lainnya yang berbasis pertanian; (8) penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya; (9) pendampingan dan pelatihan petani; (10) pemberian insentif dan penghargaan bagi petani berprestasi. Selain itu, program ini juga dilaksanakan dengan: (11) memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pascapanen hasil pertanian dalam bentuk Koperasi Tani; (12) merevitalisasi fungsi jineng/klumpu/gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah; (13) membentuk Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) untuk menangani hasil-hasil pertanian dengan jalan memberikan subsidi harga jual hasil pertanian serta memberikan jaminan kepastian harga hasil pertanian; dan (14) menyalurkan hasil-hasil pertanian lokal Bali kepada pihak akomodasi wisata, seperti hotel, resort, villa, serta restoran, termasuk usaha dan jasa lain yang bergerak pada sektor pariwisata.
- d. Mengembangkan pertanian Taman Gumi Banten unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, yang terdiri atas: (1) berbagai jenis kelapa untuk sarana upakara, seperti nyuh gading, nyuh gadang, nyuh bulan, dan lain-lainnya; (2) berbagai jenis buah untuk sarana upakara, seperti buah pinang, buah pisang, buah tingkih/kemiri, pangi, tebu, dan lain-lainnya; (3) berbagai jenis bunga untuk sarana upakara, antara lain, sandat, cempaka, jepun, tunjung, dan lain-lainnya; dan (4) berbagai jenis pohon untuk sarana upakara/Taru Pramana, antara lain, majegau, cendana, dapdap, base/sirih, kelor, medori, kayu tulak, dan semacamnya.
- e. Mendorong pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman, seperti sayuran, buah-buahan, bunga untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.

- f. Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, antara lain: buah juwet, buah sentul, buah mengkudu.
  - g. Mendorong Program Revitalisasi Subak Lestari/ Subak Abadi di Kabupaten/Kota se-Bali.
  - h. Membangun industri pengolahan hasil pertanian.
  - i. Memfasilitasi kebijakan perdagangan hasil pertanian antardaerah di luar Bali
2. Program sesuai potensi/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. Memetakan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota se-Bali, yang terdiri atas: (1) tanaman pangan yang menjadi potensi/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, yakni jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar; (2) hortikultura yang menjadi potensi/ kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, yakni mentimun, semangka, melon, durian, rambutan, jambu air, jambu biji, nanas, alpukat, salak, sawo, duku, jeruk, strawberry, wani, buah naga, tanaman hias; (3) perkebunan yang menjadi potensi/ kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, yakni kopi, cengkeh, vanili, kakao; (4) peternakan lokal Bali yang menjadi potensi/kemampuan masing masing Kabupaten/Kota, yaitu kambing, kelinci, lebah, anjing kintamani, anjing belang bungkem; serta (5) perikanan yang menjadi potensi/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau.
  - b. Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka potensi/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu buah mundeh, buah wani, buah leci, buah ceroring, buah jerungga, buah boni, buah badung, buah bekul, buah gatep, buah kalimoko, buah delima, tabia bun, kesuna Bali, dan kentang Bali.
  - c. Mengembangkan pertanian organik dalam rangka diversifikasi pangan. Program ini dilaksanakan dalam bentuk membuat proyek percontohan (pilot project) di masing-masing Kabupaten/Kota; membangun komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya; mengadakan sosialisasi secara

intensif kepada petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya; dan memasukkan pendidikan pertanian organik dalam kurikulum (muatan lokal) dan/atau sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang TK hingga SMA.

- d. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (*urban farming*).
- e. Membangun industri pengolahan hasil pertanian, masing-masing berupa: industri pengolahan gabah di Kabupaten Tabanan; industri pengolahan buah-buahan di Kabupaten Buleleng; industri pengolahan kopi dan tanaman obat (*simplicia*) di Kabupaten Bangli; dan industri pengolahan buah menjadi wine di Kabupaten Gianyar.
- f. Menerapkan sistem pertanian organik di sekitar Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng, serta Danau Beratan di Kabupaten Tabanan dengan cara memberikan bantuan sapi dan biogas.
- g. Mengembangkan budidaya ikan, masing-masing: budidaya ikan konsumsi dan ikan hias di Kabupaten Buleleng; budidaya ikan air tawar di Kabupaten Bangli; budidaya ikan laut dan udang galah di Kabupaten Gianyar; budidaya ikan air laut di Kabupaten Badung; budidaya ikan air laut dan air tawar di Kabupaten Tabanan; serta budidaya ikan air laut di Kabupaten Jembrana.

### **Bidang Sandang**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan sandang, mulai dari hulu sampai ke hilir berorientasi pada upaya pemenuhan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali dan kebutuhan para wisatawan, selain juga berorientasi untuk ekspor.

Guna mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan program yang sesuai dengan potensi/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, meliputi: (1) penyediaan bahan baku tenun; (2) pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan; (3) peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun; (4) pembentukan dan penguatan koperasi perajin tenun; serta (5) fasilitasi pemasaran, promosi, dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun.



## **Bidang Papan**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan papan, berorientasi pada upaya pemenuhan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai baik buat kebutuhan Krama Bali maupun kebutuhan para wisatawan. Guna mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan program yang sesuai dengan kebutuhan/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, berupa: (1) pemberian bantuan untuk membangun/merehabilitasi rumah yang tidak layak huni dengan anggaran masing-masing Rp 50 juta per unit; (2) penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin; (3) pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM; (4) pembangunan instalasi pengolahan sampah; serta (5) pembangunan dan normalisasi sanitasi pemukiman.

### **6.5.2 Bidang 2: Kesehatan dan Pendidikan**

#### **Bidang Kesehatan**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan, berorientasi pada upaya pemenuhan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali.

1. Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, meliputi:
  - a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama berupa pembangunan POSKESDES dan POLINDES/PUSTU di masing-masing Desa/ Kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali.
  - b. Mendorong/memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali supaya mengadakan mobil keliling pelayanan kesehatan ke Desa-Desa sebagai bentuk nyata pelayanan kegawatdaruratan.
  - c. Membangun Puskesmas Rawat Inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama di seluruh Kecamatan se-Provinsi Bali.
  - d. Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan.

- e. Pengadaan Dokter Spesialis Kandungan dan Anak melalui pola ikatan dinas yang ditugaskan di Puskesmas Rawat Inap; perekrutan dilakukan dengan sistem kuota dan melakukan MOU dengan Universitas Udayana (Fakultas Kedokteran); dan membuat regulasi tentang penambahan Dokter Spesialis di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
  - f. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Tanpa Kelas, dan RSUD milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali.
  - g. Pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi, baik RS milik Pemerintah Daerah maupun RS Swasta, di seluruh wilayah Bali.
  - h. Mengembangkan program pelayanan kesehatan gratis dengan format Krama Bali Sehat (KBS) yang dikembangkan/disempurnakan dengan cakupan layanan dan tata laksana dari program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).
  - i. Pengembangan Rumah Sakit Khusus berstandar internasional.
2. Program sesuai kebutuhan/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, berupa pembangunan pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

### **Bidang Pendidikan**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, berorientasi pada upaya pemenuhan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali.

- 1. Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, meliputi:
  - a. Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK secara gratis, yang dilaksanakan dalam bentuk: perluasan dan pemerataan akses pendidikan PAUD/TK di Desa Adat yang berupa pendidikan PAUD/TK berbahasa Bali dan pendidikan PAUD/TK Hindu; pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa Alat Peraga Edukasi (APE); serta pendidikan PAUD/TK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat. Supaya dapat memenuhi kebutuhan program ini maka ditetapkan pula program pemenuhan Guru PAUD/TK.

- b. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar (SD dan SMP) secara gratis dilaksanakan dalam bentuk: perluasan dan pemerataan akses pendidikan SD dan SMP serta peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP. Bersamaan dengan itu juga ditetapkan program pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP.
- c. Pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara gratis (sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota) dilaksanakan dalam bentuk: perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK, dengan komposisi masing-masing 40% pendidikan SMA, 60% pendidikan SMK. Adapun pembangunan pendidikan SMK disesuaikan dengan potensi Kabupaten/Kota. Bersamaan dengan itu juga dilaksanakan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK melalui penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Selain itu juga ditetapkan program pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, baik berupa laboratorium, perpustakaan, penyediaan buku-buku pelajaran, pemberian subsidi untuk buku pelajaran, maupun penyediaan sarana olah raga, seni, dan budaya, sarana teknologi informasi (TI), sarana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), serta sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler. Hal lain yang terkait dengan program pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan Wajib Belajar 12 Tahun secara gratis ini adalah pemenuhan Guru SMA dan Guru SMA Pendidikan Keagamaan Hindu, pemenuhan Guru SMK dan Guru SMK Pendidikan Keagamaan Hindu sesuai dengan kebutuhan pendidikan vokasi (keahlian/keterampilan), serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan workshop.
- d. Mendirikan Pendidikan berbasis keagamaan Hindu mulai dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK dalam bentuk Pasraman (formal, nonformal, dan informal) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.

2. Program sesuai kebutuhan/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mendirikan Perguruan Tinggi Negeri dalam bentuk Akademi Komunitas guna menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan/potensi yang dimiliki. Akademi Komunitas ini masing-masing akan dibangun di Kabupaten Gianyar, Jembrana, Karangasem, Bangli, dan Klungkung.

### **6.5.3 Bidang 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**

#### **Bidang Jaminan Sosial**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial, berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Bali.

1. Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, meliputi: pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia; memastikan Jaminan Sosial Wajib, yang terdiri atas Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian; pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas); serta fasilitasi dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya yang diistilahkan dengan sebutan Ngaben Gotong Royong.
2. Program sesuai kebutuhan/kemampuan masing-masing Kabupaten/ Kota berupa perluasan dan penambahan fasilitas Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bangli serta pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng.

#### **Bidang Ketenagakerjaan**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Bali. Bali perlu fokus pada penyiapan ketenagakerjaan (sumber daya manusia) yang spesifik, yaitu yang berkaitan dengan pertanian modern, pariwisata, industri kreatif berbasis budaya, arsitektur dan desain, pengobatan tradisional, dan SPA.

1. Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, dilaksanakan dengan membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri. Kerjasama juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Bali, selain

juga dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan cara magang tenaga kerja guna mendorong terciptanya wirausahawan baru pascamagang di luar negeri. Untuk itu juga diadakan program fasilitasi kebijakan pinjaman lunak kepada pekerja Bali yang ke luar negeri supaya mampu tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha muda, sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Bersamaan dengan itu para investor/pengusaha yang berusaha di Bali pun diwajibkan memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal Bali. Adapun bagi pekerja sektor informal akan dibuatkan program pembangunan kawasan khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berciri khas Bali.

2. Program sesuai potensi/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota berupa peningkatan kompetensi produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang dijabarkan dengan cara merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Misalnya, pariwisata, pertukangan, bengkel, tenun ikat, inovasi pertanian, kerajinan, dan lain-lain. Program lainnya adalah pembangunan Techno Park di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana dalam rangka menyediakan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja.

#### **6.5.4 Bidang 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**

##### **Bidang Adat**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan adat, berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan adat istiadat Krama Bali yang meliputi: perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat istiadat Krama Bali.

Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, meliputi:

- a. Memperkuat dan memberdayakan kedudukan serta kewenangan Desa Adat sebagai lembaga untuk menyelenggarakan fungsi: (1) Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, serta awig-awig dan pararem; (2) pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan nonformal); (3) pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekaa taruna-taruni (generasi muda; (4) memperkuat jatidiri dan integritas moral Krama Bali sesuai dengan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan local; dan (5) mengembangkan perekonomian rakyat, seperti pasar adat, LPD, Baga

Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), toko modern milik Desa Adat yang berpenampilan seperti toko berjaringan.

- b. Program Penguatan Adat-Istiadat, berupa: (1) penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat, mencakup: Banjar, Sekaa Taruna, dan Sekaa-sekaa lainnya, serta lembaga lainnya; (2) memenuhi kebutuhan Prajuru (Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar) yang dipilih sesuai dengan Awig-awig/Perarem yang berlaku di wilayah Desa Adat; (3) melaksanakan pelatihan Prajuru untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan adat yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan; (4) memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan Prajuru; (5) menyediakan sarana bagi Pacalang sesuai dengan kebutuhan serta busana yang memiliki identitas sesuai dengan pakem adat Bali, seperti tata busana, estetika, dan lain-lain yang berlaku di Desa Adat; (6) melaksanakan pelatihan untuk memberi pemahaman mengenai tugas Pacalang yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di wilayah/wewidangan Desa Adat bekerja sama dengan kepolisian setempat; (7) memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan Pacalang; (8) memberi bantuan anggaran langsung ke Desa Adat minimum Rp 300.000.000 per tahun; (8) membangun/ memberi Kantor Desa Adat yang representatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan adat; (9) memelihara, merevitalisasi, dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat; (10) memberi perlindungan terhadap padruwen/asset milik Desa Adat; serta (11) pengaturan Krama Tamiu dan Tamiu di lingkungan/wewidangan Desa Adat.
- c. Membangun Kantor Majelis Desa Adat Provinsi serta Majelis Desa Adat Kabupaten yang representatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan adat.
- d. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali.

## **Bidang Agama**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan agama adalah sebagai berikut.

Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, meliputi:

- a. Merehabilitasi Pura (Sat Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa).
- b. Memberi bantuan sarana peribadatan Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa).
- c. Menata kawasan/lingkungan Pura agar menjadi tempat yang hijau, bersih, indah, dan lestari.
- d. Membangun/mengembangkan tempat parkir, kios, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura.
- e. Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pamangku.
- f. Meningkatkan *sradha* dan *bhakti* umat Hindu, yang meliputi:  
(1) menyelenggarakan kegiatan *dharmawacana* di Pura, di Desa Adat, atau di tempat umum; (2) menyebarkan buku pendidikan keagamaan untuk umat Hindu di Desa Adat; serta mengadakan program pemahaman dan pelatihan keagamaan kepada umat Hindu terutama generasi muda.
- g. Memberdayakan dan membantu Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Bali agar mampu berperan secara optimal dalam membina umat Hindu di Bali
- h. Menyusun, melestarikan, dan menyosialisasikan Purana Pura di Kabupaten/Kota di Bali.
- i. Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura.
- j. Perlindungan terhadap aset Pura (*Palaba Pura*), termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya.
- k. Melindungi simbol-simbol keagamaan yang sakral dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- l. Mengangkat guru kontrak untuk memenuhi pendidikan agama Hindu yang ditugaskan di SD yang ada di Desa Adat.
- m. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama di seluruh Bali.

## **Bidang Kebudayaan**

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan tradisi, seni, dan budaya dari hulu sampai ke hilir, berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan Kebudayaan Bali yang meliputi: perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.

1. Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali berupa pembangunan/pengembangan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir. Program ini dijabarkan dalam bentuk:
  - a. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali dengan pelembagaan dan internalisasi nilai-nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, nonformal, dan informal guna memperkokoh jatidiri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali.
  - b. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Bali.
  - c. Program untuk memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek-objek pemajuan kebudayaan Bali.
  - d. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya masyarakat Bali.
  - e. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali berupa perayaan dan peringatan hari-hari suci secara sakala dan niskala yang bersumber dari nilai-nilai filsafat Sad Kerthi, yaitu Atma Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.
  - f. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi Majelis Kebudayaan dengan merevitalisasi keberadaan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (LISTIBYA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
  - g. Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan Seni, Sastra, dan Budaya yang mencakup: (1) membangun dan memperkuat kelembagaan Seni, Sastra, dan Budaya, seperti sanggar, yayasan, sekaa, dan lain-lain dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi; (2) memfasilitasi bantuan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Seni, Sastra, dan Budaya Bali; (3) standarisasi dan sertifikasi karya Seni, Sastra, dan Budaya Bali sesuai dengan pakem (Patram



Budaya) Bali; (4) memberi penghargaan yang bermanfaat dan layak secara nyata kepada para pelaku (pencipta dan praktisi) dalam bidang Seni, Sastra, dan Budaya; serta (5) mengutamakan Seni, dan Budaya Bali pada pentas-pentas di Hotel dan Restoran.

- h. Mengangkat Guru Kontrak yang bertugas untuk mengajar Seni, Sastra, dan Budaya Bali, serta agama Hindu di SD serta membina sanggar-sanggar dan lembaga lain yang ada di Desa Adat.
  - i. Membangun panggung terbuka dan merevitalisasi gedung-gedung Sasana Budaya yang memadai sebagai sentral berkesenian, pusat pengembangan Seni, Sastra, dan Budaya di Kabupaten/Kota se-Bali.
  - j. Membangun Gedung Opera.
  - k. Membangun Pusat Kebudayaan Bali dalam satu kawasan, meliputi: panggung terbuka berkapasitas besar, gedung kesenian/panggung tertutup, museum tematik, dan Bali Convention Center.
  - l. Menerapkan Rahina Mabasa Bali serta Mabusana Bali pada setiap hari Kamis, Purnama, Tilem, serta Hari Jadi Provinsi Bali dan Hari Jadi Kabupaten/Kota, serta menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali.
  - m. Menggunakan Aksara Bali sebagai identitas dalam penamaan fasilitas publik, jalan, perkantoran, toko, dan sejenisnya.
  - n. Memfasilitasi upaya memperoleh Hak Cipta dan Paten kepada para Pencipta Karya Seni, Sastra, dan Budaya.
2. Program sesuai kebutuhan/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, meliputi merestorasi peninggalan benda Cagar Budaya serta merevitalisasi sistem kehidupan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali.

### **6.5.5 Bidang 5: Pariwisata**

#### **Bidang Pariwisata**

Arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek, yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran wisatawan adalah: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli

lingkungan dan kebudayaan, serta wisatawan yang memberdayakan sumber daya lokal (tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal).

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka disusun Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali yang meliputi:

- a. Mengembangkan destinasi Wisata Baru sesuai potensi Kabupaten/Kota, seperti: Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam/Kebun Raya, Wisata Pantai, dan Wisata Minat Khusus.
- b. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourism/penggunaan material yang *renewable* (natural dan ramah lingkungan), pengembangan wisata pedesaan/wisata budaya, dan membangun kawasan wisata terpadu yang menghubungkan antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
- c. Pengembangan SDM Pariwisata yang mencakup: (1) pemberian pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat; (2) penerapan standarisasi dan sertifikasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Bidang Jasa Pariwisata, seperti hotel, restoran, travel/agen perjalanan wisata, pramuwisata, souvenir, dan jasa penunjang pariwisata lainnya dengan mengutamakan Local Genius; serta (3) penerapan sistem rekrutmen baru untuk penyiapan tenaga pramuwisata yang memberi ruang secara optimal bagi Krama Bali.
- d. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif, baik berhubungan dengan infrastruktur, jasa transportasi, sarana prasarana perhotelan, restoran, SDM pariwisata, maupun keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja.
- e. Memfasilitasi penetapan standarisasi tarif hotel di Kabupaten/Kota se-Bali.
- f. Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata.
- g. Meningkatkan promosi pariwisata secara terpadu ke negara-negara lain dan promosi dengan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi.
- h. Menghentikan praktek kartel dan sindikat pelaku pariwisata dalam penerapan komisi (fee) yang tidak rasional oleh pelaku jasa transportasi.
- i. Menghentikan beroperasinya usaha dan jasa pariwisata ilegal sehingga mengakibatkan kompetisi yang tidak sehat.

- j. Menyelesaikan pembangunan Batur UNESCO Global Geopark di Kabupaten Bangli.
- k. Pembangunan taman kunjungan wisata, seperti Disneyland atau Universal Studio, dengan karakter budaya Bali.

### **Program Pendukung**

Program yang dikategorikan sebagai program pendukung dalam kaitan ini adalah program pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mempercepat pewujudan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali

Tahun 2005- 2025. Program pendukung ini meliputi pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan cakupan 5 Bidang Program Prioritas Pembangunan Bali yang telah diuraikan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut.

### **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Bidang Pangan**

1. Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, meliputi:
  - a. Program perlindungan air dan sumber mata air: danau, sungai, air terjun, sumber air kelebutan, dan sumber daya air lainnya;
  - b. Pembangunan sistem irigasi untuk pertanian;
  - c. Pembangunan jalan usaha tani; serta
  - d. Pembangunan jalan produksi.
2. Program sesuai potensi/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, meliputi:
  - a. Pembangunan waduk, bendungan, dan embung.
  - b. Pembangunan Pabrik Besar pengolahan hasil pangan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, di antaranya: (1) industri pengolahan buah-buahan di Kabupaten Buleleng; (2) industri pengolahan kopi, tanaman obat (*simplicia*), dan sayur-sayuran di Kabupaten Bangli; (3) industri pengolahan daging di Kabupaten Badung; (4) industri pengolahan pertanian di Kabupaten Tabanan; (5) industri pengolahan ikan di Kabupaten Jembrana; (6) industri pengolahan pakan ternak di Kabupaten Tabanan; (6) industri pengolahan garam di Kabupaten Buleleng; serta (7) industri pengolahan sampah di Kota Denpasar.

- c. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (Agro Techno Park) di Kabupaten Tabanan.
- d. Pembangunan Pasar/ sentra hasil pertanian/ perikanan, seperti pasar buah, pasar bunga, dan pasar ikan di Kabupaten/Kota se-Bali sesuai dengan potensinya. Secara lebih spesifik pasar atau sentra hasil pertanian ini disebar, meliputi: (1) Pasar Buah, berupa jeruk, salak, mangga, dan pisang di Denpasar; (2) Pasar Agro di Kabupaten Tabanan; (3) Sentra Perikanan Terpadu di Kabupaten Jembrana; serta (4) Pasar Ikan di Kabupaten Buleleng.
- e. Pembangunan/revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten/Kota se-Bali, yakni: (1) Pasar Badung di Kota Denpasar pada tahun 2017; (2) Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri di Kabupaten Buleleng; dan (3) Pasar Kintamani, Pasar Kayu Ambua, Pasar Kidul Bangli di Kabupaten Bangli.
- f. Mendorong pembangunan Terminal Agro/Pasar Agro dan kawasan Agro Industri.
- g. Menjadikan Badung dan Kota Denpasar sebagai pasar hasil pertanian lokal dan kerajinan rakyat.

### **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Bidang Papan**

Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali, meliputi dua program utama, yaitu membangun infrastruktur jalan lingkungan dan utilitas lingkungan serta menata fasilitas umum dan fasilitas sosial.

### **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Bidang Pendidikan**

Program pendukung ini difokuskan pada pengembangan Stadion Sepakbola Kapten I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar hingga bisa berstandar Internasional.

### **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Bidang Adat**

Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali dalam kaitan dengan infrastruktur pendukung bidang adat diarahkan untuk membangun Kantor Majelis Desa Adat Provinsi serta Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota yang

representatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan adat.

### **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Bidang Agama**

Program Unggulan Integrasi Kabupaten/Kota se-Bali dalam kaitan dengan infrastruktur pendukung bidang agama meliputi: (a) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan menuju Pura, baik yang berstatus sebagai Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, maupun Kahyangan Jagat yang dilaksanakan secara sinergis dengan Kabupaten/Kota di Bali; (b) membangun/ mengembangkan taman, tempat parkir, kios, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura; (c) Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, serta (d) memfasilitasi kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota di kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota.

### **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Bidang Kebudayaan**

Program pembangunan infrastruktur pendukung bidang kebudayaan sesuai dengan kebutuhan/kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, mencakup: (a) membangun Pusat Kebudayaan Bali Tingkat Provinsi yang meliputi: panggung terbuka berskala besar; panggung tertutup berskala menengah untuk fasilitasi kegiatan Seni, Sastra, dan Budaya; museum tematik; serta Bali Convention Center; (b) membangun panggung terbuka berkapasitas sedang dan merevitalisasi Gedung-gedung Sasana Budaya sebagai sentral berkesenian, pusat pengembangan Seni, Sastra, dan Budaya di Kabupaten/Kota se-Bali; serta (c) membangun Sentra Pemasaran dan Promosi Kerajinan Rakyat di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar.

### **Pembangunan Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara secara Terintegrasi dan Konektivitas**

Pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata berupa infrastruktur jalan, diwujudkan dengan: (a) meningkatkan standarisasi kualitas infrastruktur jalan Se-Bali; (b) pembangunan/pengembangan jalan penghubung (jalan singkat/*Shortcut*) antar-Kabupaten/Kota; (c) peningkatan kualitas jalan menuju Pura Sat Kahyangan/Dang Kahyangan; serta (d) peningkatan jalan menuju destinasi wisata. Selain itu, guna lebih memperlancar transportasi darat juga dilakukan

pembangunan Jalan Tol Lingkar Bali serta pembangunan Jalan Tol Denpasar, Jembrana, dan Gilimanuk, serta pembangunan Kereta Api Lingkar Bali. Adapun dalam hal infrastruktur laut akan dilakukan pengembangan: Pelabuhan Bongkar Muat Celukan Bawang Buleleng berstandar internasional, Pelabuhan Kapal Pesiar berstandar internasional, Pelabuhan Benoa di Denpasar, serta pelabuhan Amed/Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem. Selanjutnya, untuk meningkatkan layanan transportasi udara serta mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah Bali Selatan dengan wilayah Bali Utara maka diprogramkan pembangunan Bandara Udara berstandar internasional di Kubutambahan Buleleng.

Adapun pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan air diarahkan supaya dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi: (1) Krama Bali; (2) industri, jasa, dan pariwisata; serta (3) pendukung pertanian dan Subak. Selain itu juga perlu dilakukan pendataan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lainnya. Bersamaan dengan itu juga dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap sumber-sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lainnya, serta pembangunan jaringan air ke rumah-rumah Krama Bali.

### **Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyediaan Energi Listrik Dalam Rangka Kemandirian Energi**

Pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten/Kota, tidak terpusat dalam satu wilayah sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi listrik se-Bali. Oleh karena itu, dalam jangka panjang harus diprogramkan pembangunan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu: (1) pembangkit listrik tenaga air, baik air laut, air terjun, maupun air danau; (2) pembangkit listrik tenaga matahari; serta (3) pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

Pembangunan pembangkit listrik dilakukan adalah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik yang murah bagi Krama Bali. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik ini juga dilakukan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk industri, perdagangan, dan komersial, serta pariwisata

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Dalam Bab ini akan diuraikan terlebih dahulu kerangka pendanaan pembangunan. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun (2019-2023). Selanjutnya akan dijabarkan indikasi rencana program prioritas disertai dengan kebutuhan pendanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Proyeksi belanja daerah periode 2019-2023 dirancang dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi defisit menurun setiap tahunnya.

- a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

1) Belanja Pegawai

Proyeksi belanja pegawai telah memperhitungkan pemberian Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN melalui DAK Fisik. Belanja pegawai direncanakan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 5% untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD, kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai.

2) Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, belanja subsidi diproyeksikan sama setiap tahun selama periode 2019 - 2023.

3) Belanja Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja hibah telah memperhitungkan belanja hibah yang bersumber dari APBN melalui Dana BOS diproyeksikan sama setiap tahunnya untuk periode 2019 - 2023.

4) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Berdasarkan hal tersebut, dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023, belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya.



5) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proyeksi belanja bagi hasil dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023 didasarkan atas proyeksi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah Tahun 2019-2023.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja bantuan keuangan diproyeksikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga diproyeksikan sama setiap tahunnya dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam belanja langsung dipergunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023, belanja pegawai diproyeksikan sama setiap tahunnya yang didasarkan atas pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 - 2023.

## 3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Pemerintah Provinsi Bali mengupayakan untuk memprioritaskan alokasi belanja modal dalam kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023 yang dialokasikan sebesar 15% dari total proyeksi belanja daerah untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyeksi kerangka pendanaan pembangunan Daerah Provinsi Bali periode tahun 2019-2023, disajikan sebagaimana pada tabel 7.1A berikut:

**Tabel 7.1A Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019-2023**

No	URAIAN	Tahun Proyeksi (x Rp juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.323.499</b>	<b>6.762.860</b>	<b>7.216.869</b>	<b>7.707.118</b>	<b>8.238.430</b>
	<b>a. Pendapatan Asli Daerah</b>	3.587.699	3.918.126	4.203.363	4.514.751	4.855.019
	1) Pajak Daerah	3.069.236	3.308.381	3.518.837	3.745.628	3.990.137
	2) Retribusi Daerah	49.803	53.397	56.067	58.871	61.814
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	170.886	226.819	249.501	274.451	301.896
	4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	297.774	329.528	378.957	435.801	501.171
	<b>b. Dana Perimbangan</b>	2.662.027	2.796.943	2.964.759	3.142.645	3.331.203
<b>c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	73.772	47.791	48.747	49.722	52.208	
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.834.256</b>	<b>7.086.047</b>	<b>7.567.297</b>	<b>8.086.961</b>	<b>8.650.152</b>
	<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>	4.702.084	5.174.240	5.425.248	5.694.208	5.982.574
	1) Belanja Pegawai	1.732.663	1.839.379	1.931.348	2.027.915	2.129.311
	2) Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	3) Belanja Subsidi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4) Belanja Hibah	962.216	962.216	962.216	962.216	962.216
	5) Belanja Bantuan Sosial	4.220	14.068	14.771	15.510	16.285
	6) Belanja Bagi Hasil	1.167.613	1.702.673	1.797.918	1.900.173	2.010.028
	7) Belanja Bantuan Keuangan	812.927	630.904	693.994	763.394	839.733
	8) Belanja Tidak Terduga	12.444	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>b. Belanja Langsung</b>	2.132.172	1.911.807	2.142.049	2.392.753	2.667.577
	1) Belanja Pegawai	19.652	17.971	17.971	17.971	17.971
	2) Belanja Barang dan Jasa	1.327.790	818.541	976.596	1.149.350	1.339.696
	3) Belanja Modal	784.730	1.075.295	1.147.482	1.225.432	1.309.910

No	URAIAN	Tahun Proyeksi (x Rp juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(510.757)</b>	<b>(323.187)</b>	<b>(350.428)</b>	<b>(379.843)</b>	<b>(411.721)</b>
4	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>704.591</b>	<b>1.365.606</b>	<b>1.202.158</b>	<b>1.049.776</b>	<b>991.942</b>
	<b>a. Penerimaan Pembiayaan</b>	704.591	193.833	1.042.419	851.730	669.933
	<b>b. Pengeluaran Pembiayaan</b>					
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	193.833	1.042.419	851.730	669.933	580.221

Mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019, struktur kerangka pendanaan pembangunan daerah Provinsi Bali tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang pada tabel 7.1A, akan berubah menjadi struktur sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 7.1B untuk APBD tahun 2021, 2022 dan tahun 2023. Selain perubahan struktur, terdapat juga perubahan proyeksi pendanaan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19.

**Tabel 7.1B Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Uraian	Tahun Proyeksi		
		2021 (x Rp juta)	2022 (x Rp juta)	2023 (x Rp juta)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.995.467</b>	<b>5.187.609</b>	<b>5.446.989</b>
	<b>a. Pendapatan Asli Daerah</b>	3.178.019	3.144.716	3.301.951
	1). Pajak Daerah	2.640.212	2.692.984	2.827.633
	2). Retribusi Daerah	12.602	19.813	20.803
	3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	160.712	160.712	168.747
	4). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	364.493	271.207	284.767
	<b>b. Pendapatan Transfer</b>	2.811.740	2.037.185	2.139.044
	<b>c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	5.708	5.708	5.993
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.538.316</b>	<b>6.102.491</b>	<b>6.559.770</b>
	<b>a. Belanja Operasi</b>	4.761.854	3.857.438	4.202.464
	1) Belanja Pegawai	1.833.756	1.867.729	2.051.115
	2) Belanja Barang dan Jasa	1.853.568	1.654.600	1.737.330
	3) Belanja Bunga	17.776	17.775	18.665
	4) Belanja Subsidi	10.000	38	10.000
	5) Belanja Hibah	994.254	317.156	385.354
	6) Belanja Bantuan Sosial	52.500	140	0
	<b>b. Belanja Modal</b>	2.165.984	878.273	922.187
	<b>c. Belanja Tak Terduga</b>	54.000	50.000	52.500
	<b>d. Belanja Transfer</b>	1.556.478	1.316.780	1.382.619
<b>3</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-2.542.849</b>	<b>-914.882</b>	<b>-1.112.781</b>
<b>4</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.542.849</b>	<b>914.882</b>	<b>1.112.781</b>
	<b>a. Penerimaan</b>	2.587.849	1.014.882	1.262.781
	<b>b. Pengeluaran</b>	45.000	100.000	150.000

Sumber Data: Bapenda dan Bappeda Provinsi Bali, 2021

Selain perubahan struktur dan proyeksi kerangka pendanaan, juga terdapat perubahan nomenklatur program dari semula sebagaimana disajikan pada tabel 7.2A dan 7.2B menjadi tabel 7.2C, yang mempedomani nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

**Tabel 7.2A**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019			
					Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
1	01		<b>Pendidikan</b>					
1	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	88,87	88.5	182,992,987,502	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Bahasa	Angka Partisipasi Kasar (APK) PLB	15.14	71.5	14,201,550,106	Dinas Pendidikan
				Persentase karya Bahasa, Aksara dan Sastra yang teridentifikasi		50	21,534,475,996	
1	01	03	Program Pembinaan SMA	APM SMA		34.78	95,993,576,904	Dinas Pendidikan
1	01	04	Program Pembinaan SMK	APM SMK		39.22	107,037,405,972	Dinas Pendidikan
1	01	05.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan berkualifikasi S1/S2	95	98.5	1,101,784,168	Dinas Pendidikan
1	01	06	Program Pengembangan Teknologi Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Pembelajaran Berbasis TIK		72	3,859,800,000	Dinas Pendidikan
1	02		<b>KESEHATAN</b>					
1	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai SAKIP	81.46	82	5,723,781,011	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial		95	15,197,754,416	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	49	50	16,725,383,024	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar		85	3,600,918,782	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (/100.000 Kelahiran Hidup)		69	8,812,806,684	Dinas Kesehatan
1	02	06	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan		77.77	648,975,416	Dinas Kesehatan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	02	07	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Case Detection Rate TB (%)	27	30	11,199,972,328	Dinas Kesehatan
1	02	08	Program Penguatan Surveilans dan Imunisasi	Persentase Kejadian Luar Biasa Yang Ditangani		100	341,448,000	Dinas Kesehatan
1	02	09	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk Diatas Atau Sama Dengan Dari Usia 18 Tahun		19.5	1,161,270,500	Dinas Kesehatan
1	02	10	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan laboratorium kesehatan		80	11,362,014,904	Dinas Kesehatan
1	02	11	Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Persentase Kelulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan		100	10,774,466,000	Dinas Kesehatan
1	02	12	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga		2	2,692,552,824	Dinas Kesehatan
1	02	13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPT RSUD Bali Mandara	Persentase Pelayanan Yang Memenuhi SPO Pada UPT RSUD Bali Mandara	100	100	271,211,812,560	UPT RSUD Bali Mandara
1	02	14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT RSUD Bali Mandara	Indeks Kepuasan Pelanggan		80	26,000,000,000	UPT RSUD Bali Mandara
1	02	15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Persentase Peningkatan Pasien Yang Dilayani Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali		2	31,500,000,000	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
1	02	16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80	29,374,149,728	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
1	02	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	30,000,000,000	Rumah Sakit Mata Bali Mandara
1	02	18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Persentase Pasien yang Dilayani Rumah Sakit Mata Bali Mandara		0.5	10,996,127,832	Rumah Sakit Mata Bali Mandara



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1	03	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	78	70	6,508,835,277	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	71.51	72.01	13,108,986,398	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	55	57.46	2,855,312,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali	100	100	1,211,416,292	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	58	60	27,039,537,980	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	100	100	443,771,287	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Pemberdayaan sumber daya manusia jasa konstruksi di 9 Kabupaten/kota	100	100	1,528,546,741	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase kondisi jalan dan jembatan provinsi mantap	80.81	77.44	350,219,523,456	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	85	87	49,656,226,418	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Persentase penduduk yang berakses sanitasi layak di Provinsi Bali	75	87	1,305,894,950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program Pengawasan Tata Ruang	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang	100	100	314,857,054	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Alat Berat	Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100	100	2,126,646,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100	100	21,729,314,416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	14	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100	100	13,239,450,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1	04	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	80	80	2,256,095,602	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	12	12	783,147,400	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	12	12	1,521,334,830	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
1	05	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP	86	86.5	3,229,810,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM/SDA Pol PP	100	100	330,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan NonYustisi	543	350	870,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Kemampuan Tenaga Perlindungan Masyarakat dan Informasi Rawan Bencana Kebakaran		2.8% dan 20%	670,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	05	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	247	235	17,972,257,100	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019			
					Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>1</b>	<b>06</b>		<b>SOSIAL</b>					
1	06	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	12 bulan	A	2,079,705,200	Dinas Sosial
1	06	02	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1	1	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	03	Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	725	400	5,500,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	1421 orang, 7 paket	2000	886,500,000	Dinas Sosial
1	06	05	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	387 orang, 70 lembaga, 1 TMP, 12 Bulan, 1 Laporan	510	300,634,000	Dinas Sosial
1	06	06	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	696	740	397,200,000	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pelayanan Sosial	Jumlah penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	195	200	3,772,564,800	Dinas Sosial
<b>1</b>	<b>07</b>		<b>BENCANA</b>					
1	07	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	82.93	82.93	4,118,316,611	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	07	02	Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang di Bina dalam Menghadapi Bencana	100	100	1,525,997,805	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	07	03	Program Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100	100	1,200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	07	04	Program Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100	100	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	07	05	Program Pengendalian Bencana	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	100	100	10,505,685,584	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>						
2	01	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Prosentase Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	100 persen	100 persen	4,529,618,736	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	02	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap (ditempatkan) dan perluasan kesempatan kerja	4.570 orang	4.570 orang	3,357,022,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	03	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang kompetensi dan tersertifikat	358 orang	358 orang	4,100,482,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	04	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang mendapatkan perlindungan tenaga kerja	250 perusahaan	250 perusahaan	874,429,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	05	Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten	112 orang	112 orang	3,090,134,700	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	06	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang diuji lingkungan kerjanya serta kesehatan kerja bagi tenaga kerja	60 perusahaan	60 perusahaan	1,085,756,900	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
2	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	A	A	2,102,879,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	02	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk Perempuan yang Bekerja	98.45	98.55	262,838,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100	100	396,838,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
2	02	04	Program Perlindungan Anak	Persentase Kab/kota Layak Anak Minimal predikat Madya	22	44	1,011,676,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>03</b>		<b>PANGAN</b>					
2	03	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	71	72	2,022,019,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	02	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	100	100	340,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	03	Program Mendukung Ketahanan Pangan Melalui Kedaulatan Beras	Persentase Stabilitas Harga Pangan	lebih kecil dari 10%	lebih kecil dari 10%	260,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	04	Program Peningkatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Persentase Pangan B2SA (Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi)	95.6	95.6	635,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	05	Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar aman dikonsumsi	13.5	13.5	360,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	03	06	Program Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Persentase Sertifikasi Mutu Pangan Segar	8.47	8.47	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
<b>2</b>	<b>04</b>		<b>PERTANAHAN</b>					
2	04	01	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase data informasi pertanahan yang handal	0	5	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>2</b>	<b>05</b>		<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					
2	05	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70	100	1,591,361,832	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	02	Program Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan peraturan lingkungan hidup	100	100	205,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	03	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan; Terpantaunya kualitas air; Terpantaunya kualitas udara; Terkelola dan lestarnya ekosistem pesisir dan laut	1% ; 9 Kab./Kota; 13 Kawasan	1% ; 9 Kab./Kota; 13 Kawasan	282,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	05	04	Program Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase tercapainya pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	100	100	152,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	05	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	90	90	340,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	05	06	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan pada TPA Regional	2 TPA Regional	2 TPA Regional	3,696,646,000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>2</b>	<b>06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
2	06	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) - Nilai Evaluasi Laporan Manajemen Kinerja	100	100	2,023,510,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
2	06	02	Program Kependudukan	Persentase lembaga yang menggunakan KTP elektronik berbasis NIK	100	100	950,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
2	06	03	Program Peningkatan Pencatatan Sipil	persentase penduduk yang memiliki catatan sipil	100	100	550,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
2	07	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	82	82	4,016,881,956	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	02	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Persentase Perkembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)	78.93	78.93	1,616,274,064	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	03	Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna	Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan	47.01	47.01	1,283,722,664	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	04	Program Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	65	65	8,067,698,460	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	05	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	40.09	40.09	2,441,710,668	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
2	08	01	Program Keluarga Berencana	Angka TFR (Total Fertility Rate)	100% (2,1)	100% (2,1)	400,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>						
2	09	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100	100	2,474,850,816	Dinas Perhubungan
2	09	02	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	100	674,634,576	Dinas Perhubungan
2	09	03	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran	Persentase penerapan manajemen keselamatan di pelabuhan pengumpan regional	100	100	306,572,080	Dinas Perhubungan
2	09	04	Program Peningkatan Pengawasan LLAJ	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	100	100	990,601,904	Dinas Perhubungan
2	09	05	Program Perencanaan Pengembangan Aksesibilitas	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan	3	3	804,044,080	Dinas Perhubungan
2	09	06	Program Pengendalian Persimpangan Berbasis APILL	Tingkat pelayanan di persimpangan	C	C	752,650,000	Dinas Perhubungan
2	09	07	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita	Prosentase Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	60	60	6,004,806,384	Dinas Perhubungan
2	09	08	Program Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Tingkat pelayanan ruas jalan	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	1,126,844,160	Dinas Perhubungan
2	09	09	Program Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	1 tahun	1 tahun	200,000,000	Dinas Perhubungan
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
2	10	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	80.5	80.5	4,525,891,986	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	10	02	Program Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	100	100	1,050,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
2	10	03	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	100	100	1,693,906,300	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	10	04	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100	100	8,441,636,040	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	10	05	Program Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi	90	90	500,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						
2	11	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LKjIP]	82.15	82.15	2,161,826,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	02	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas	210 Unit	210 Unit	381,935,798	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	03	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah kelompok masyarakat/anggota koperasi yang mendapat penyuluhan dan jumlah koperasi yang ijinnya diverifikasi	50 Unit	50 Unit	505,682,462	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	04	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	104 Unit	104 Unit	394,330,798	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	05	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya dan jumlah KUMKM yang mendapat pendampingan konsultan PLUT	204 UMKM	204 UMKM	924,792,710	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	06	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM	Jumlah SDM KUKM yang berkompeten	50 KUKM	50 KUKM	5,856,773,248	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>						
2	12	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	95	95	2,952,782,696	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
2	12	02	Program Pengembangan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase nilai investasi (%)	29.39	14.87	175,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	03	Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	32.33	13.43	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	04	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100	100	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100	100	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	06	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88	88	54,904,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	12	07	Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						
2	13	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	70	70	2,492,872,592	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	02	Program Pembudayaan Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	30	30	536,257,664	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	03	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar di tingkat regional, nasional dan internasional	177	177	8,602,627,080	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	04	Program Pemberdayaan Pemuda	Persentase Pemuda yang Menjadi Anggota Aktif Organisasi Kepemudaan	77	77	2,324,769,248	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	05	Program Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	62.59	62.59	557,943,248	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019			
					Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>2</b>	<b>14</b>		<b>STATISTIK</b>					
2	14	01	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan Data Statistik Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	100	100	640,380,200	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>2</b>	<b>15</b>		<b>PERSANDIAN</b>					
2	15	01	Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100	100	790,482,340	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>2</b>	<b>16</b>		<b>KEBUDAYAAN</b>					
2	16	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	79	79	5,578,618,928	Dinas Kebudayaan
2	16	02	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Persentase Komunitas Seni Yang Dilestarikan	5	5	16,612,876,656	Dinas Kebudayaan
2	16	03	Program Penguatan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang Diperkuat dan Diberdayakan	4219	4219	2,369,457,736	Dinas Kebudayaan
2	16	04	Program Pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra	Persentase Pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra	5	5	4,949,943,248	Dinas Kebudayaan
2	16	05	Program Pelestarian Nilai Tradisi	Jumlah Nilai Tradisi yang Diinventarisasi dan Ditetapkan	50	50	1,000,398,848	Dinas Kebudayaan
2	16	06	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Persentase Cagar Budaya dan Permuseuman Yang Dilestarikan	5	5	622,572,080	Dinas Kebudayaan
2	16	07	Program Peningkatan Kualitas UPTD. Taman Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya	75	75	6,172,400,000	UPTD. Taman Budaya
2	16	08	Program Peningkatan Kualitas UPTD. Museum Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75	75	3,734,190,000	UPTD. Museum Bali
2	16	09	Program Peningkatan Kualitas UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75	75	5,415,023,000	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali
<b>2</b>	<b>17</b>		<b>PERPUSTAKAAN</b>					
2	17	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	76	76	1,660,127,700	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	02	Program Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan	10	10	185,700,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	03	Program Pengembangan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	3	3	146,350,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019			
					Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2	17	04	Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	48	48	237,100,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>KEARSIPAN</b>					
2	18	01	Program Peningkatan Pengembangan Kearsipan	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	25	25	203,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	02	Program Pengembangan dan Peningkatan Pengolahan Arsip	Persentase Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah Mengelola Arsip dengan Baik	20	20	215,381,300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>3</b>			<b>URUSAN PILIHAN</b>					
<b>3</b>	<b>01</b>		<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
3	01	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	84.40	84.40	2,185,183,288	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	02	Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Ekosistem	1 Kawasan	1 Kawasan	2,891,518,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	03	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	99.100 ton	99.100 ton	148,742,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	04	Program Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	17.886,41 Ton	17.886,41 Ton	211,624,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	05	Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	142 SKP	142 SKP	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	06	Program Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha taat hukum	75	75	55,524,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	07	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	238,500,000	284,400,000	1,083,032,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	08	Program Peningkatan Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	187,500,000	362,000,000	1,063,768,344	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	09	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola (kawasan)	1 Kawasan	1 Kawasan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	10	Program Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan	3500 Ton	3500 Ton	126,976,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3</b>	<b>02</b>		<b>PARIWISATA</b>					
3	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	80	81	2,501,572,080	Dinas Pariwisata

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
3	02	02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	10,45 hari dan 4 hari	9,87 hari dan 4,5 hari	542,943,248	Dinas Pariwisata
3	02	03	Program Kelembagaan Pariwisata	Peningkatan kualitas sumber daya pariwisata	748 orang	748 orang	1,187,943,248	Dinas Pariwisata
3	02	04	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	6.070.473 orang dan 9.757.991 orang	7.100.000 orang dan 8.200.000 orang	3,516,572,080	Dinas Pariwisata
3	02	05	Program Industri Pariwisata	Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	118,98 USD dan Rp. 454.000,-	145,00 USD dan Rp. 463.000,-	432,943,248	Dinas Pariwisata
<b>3</b>	<b>03</b>		<b>PERTANIAN</b>					
3	03	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	81	81	3,181,192,736	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	02	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pemanfaatan Lahan Sawah Dua Kali Tanam Padi Se-tahun	76.95	76.95	1,012,030,908	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	03	Program Peningkatan Produksi dan Pengembangan Agribisnis Komoditas Perkebunan	Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan	98,524 ton	98,524 ton	2,697,294,308	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	04	Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Padi ; Palawija (ton) ; Kawasan Pelaksanaan Pertanian Organik Sempadan Danau	843.468 ; 168.000 ; 1 Kawasan Danau Tamblingan	843.468 ; 168.000 ; 1 Kawasan Danau Tamblingan	1,245,473,492	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
				Jumlah Produksi Sayuran; Buah-buahan (ton)	208.000 ; 429312 ton	208.000 ; 429312 ton	889,284,744	
3	03	05	Program Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Benih Padi ; Palawija (ton) ; Sayuran (ton) ; Buah-Buahan dan Tanaman Hias (phn)	6,1 ; 1,8 ; 26 ; 10.000	6,1 ; 1,8 ; 26 ; 10.000	3,476,490,324	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	06	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Luas Serangan Maksimum Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	5	5	2,609,092,736	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	03	07	Program Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah pengawasan peredaran sertifikasi dan mutu benih (ton); sayuran (ton) dan buah-buahan (btg).	Benih padi bersertifikat : 50 ha (20 unit)= 150 ton ; Benih hortikultura bersertifikat = 200 unit (70.	Benih padi bersertifikat : 50 ha (20 unit)= 150 ton ; Benih hortikultura bersertifikat = 200 unit (70.	999,513,576	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	08	Program Pengembangan Pertanian Gumi Banten	Jumlah unit taman gumi banten yang produktif	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 ros/30.000 phn/1.500 btr/500.000 kg/580.000 ros/7.638.500 phn/240.000	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 ros/30.000 phn/1.500 btr/500.000 kg/580.000 ros/7.638.500 phn/240.000	3,889,078,156	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	09	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan	65	65	5,495,242,099	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	10	Program Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani	1 unit, 1 paket, 1 paket ; 100 kelompok	1 unit, 1 paket, 1 paket ; 100 kelompok	4,717,451,282	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	03	11	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	76	76	2,336,901,700	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	12	Program Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (satuan ternak)	438,131	442,512	660,332,080	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	13	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok yang menerapkan Agribisnis Peternakan (kelompok)	27	35	518,777,448	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (kasus)	250 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	200 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	3,248,153,552	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	15	Program Pengembangan Semen	Jumlah Produksi Semen	101.000 dosis	101.000 dosis	3,367,062,484	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	16	Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	82.5	82.5	1,406,999,984	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
3	04		<b>KEHUTANAN</b>					
3	04	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	100	100	1,190,908,996	Dinas Kehutanan
3	04	02	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	1,65% (680 Ha)	1,65% (680 Ha)	95,000,000	Dinas Kehutanan
3	04	03	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Persentase kerusakan kawasan hutan	8,33% (50 Ha)	8,33% (50 Ha)	385,000,000	Dinas Kehutanan
3	04	04	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	200 Ha (29,41%)	200 Ha (29,41%)	773,787,000	Dinas Kehutanan
3	04	05	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	341,243,252	Dinas Kehutanan
3	04	06	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	200 Ha (29,41%)	200 Ha (29,41%)	629,896,700	Dinas Kehutanan
3	04	07	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	255,154,300	Dinas Kehutanan
3	04	08	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	200 Ha (29,41%)	200 Ha (29,41%)	623,787,000	Dinas Kehutanan
3	04	09	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	217,379,000	Dinas Kehutanan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	04	10	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	200 Ha (29,41%)	200 Ha (29,41%)	410,500,000	Dinas Kehutanan
3	04	11	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	180,698,000	Dinas Kehutanan
3	04	12	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Persentase kerusakan kawasan hutan	50 Ha (8,33%)	50 Ha (8,33%)	406,657,000	Dinas Kehutanan
<b>3</b>	<b>05</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						
3	05	01	Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	Terkelolanya dan terlaksananya pengembangan usaha-usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	RE (100 persen) ; ESDM (70 persen); Rektek (500 buah); 1 Perda RUED	RE (100 persen) ; ESDM (70 persen); Rektek (500 buah); 1 Perda RUED	1,320,999,664	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
<b>3</b>	<b>06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>						
3	06	01	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Pangan	<15%	<10%	97,178,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	02	Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	2.22	2	426,600,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	03	Program Perlindungan Konsumen	Indeks Pemberdayaan Konsumen	-	2	115,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	04	Program Pengembangan Pelayanan Penguji Mutu Barang	Jumlah Barang Yang Tersertifikasi	45	45	486,995,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>						
3	07	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	82.1	82.1	2,073,653,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	02	Program Pengembangan Industri	Indeks Peningkatan Produksi	-	3.5	3,595,460,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	03	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	Jumlah Komoditi Olahan Pangan Yang Tumbuh dan Berkembang	5	5	196,864,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2019			
					Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>3</b>	<b>08</b>		<b>TRANSMIGRASI</b>					
3	08	01	Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	Jumlah dokumen laporan evaluasi ketransmigrasian	4	4	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
<b>4</b>			<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>					
<b>4</b>	<b>01</b>		<b>PERENCANAAN</b>					
4	01	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Meningkatnya Nilai LKJIP Bappeda Litbang Provinsi Bali	Nilai B (80)	Nilai B (80)	4,643,672,182	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	01	02	Program Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Daerah	100	100	4,417,653,790	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	01	03	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kesesuaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	1,088,628,832	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	01	04	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	1,556,144,356	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4	01	05	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kesesuaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	1,313,709,078	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>4</b>	<b>02</b>		<b>KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>					
4	02	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	84.4	84.4	2,972,746,984	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	02	02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase regulasi penyusunan APBD (Induk dan Perubahan) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun tepat waktu	100	100	6,019,264,364	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
4	02	03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100	100	4,957,082,144	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	02	04	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan	75	75	956,009,416	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah serta pertanggungjawaban APBD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota tepat waktu	100	100	580,825,016	
4	02	05	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase utilisasi aset terhadap total aset daerah	80	80	1,060,334,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>4</b>	<b>03</b>		<b>KEUANGAN SUB PENGELOLAAN PENDAPATAN</b>					
4	03	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	87	87	15,620,785,522	Badan Pendapatan Daerah
4	03	02	Program Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan pendapatan daerah yang tepat	90	90	1,195,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4	03	03	Program Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	59.3	56.81	1,888,313,500	Badan Pendapatan Daerah
4	03	04	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Samsat dan Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	90	90	1,187,150,000	Badan Pendapatan Daerah
4	03	05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (1)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	76.25	76.5	3,639,835,068	Badan Pendapatan Daerah
4	03	06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (2)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (2)	76.25	76.5	1,457,266,552	Badan Pendapatan Daerah
4	03	07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (3)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	76.25	76.5	1,973,448,540	Badan Pendapatan Daerah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	03	08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (4)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (4)	76.25	76.5	3,538,752,624	Badan Pendapatan Daerah
4	03	09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (5)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (5)	76.25	76.5	3,963,456,193	Badan Pendapatan Daerah
4	03	10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (6)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	76.25	76.5	2,763,197,548	Badan Pendapatan Daerah
4	03	11	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (7)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (7)	76.25	76.5	1,776,627,328	Badan Pendapatan Daerah
4	03	12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (8)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	76.25	76.5	2,087,790,303	Badan Pendapatan Daerah
4	03	13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (9)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan Retribusi (9)	76.25	76.5	1,505,260,836	Badan Pendapatan Daerah
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>						
4	04	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	100	100	2,167,728,776	Badan Kepegawaian Daerah
4	04	02	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi ASN	Persentase peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan ASN	20.33	20.33	4,286,945,158	Badan Kepegawaian Daerah
4	04	03	Program Pengembangan Manajemen Karier	Persentase peningkatan manajemen karier	3.5	3.5	2,508,495,000	Badan Kepegawaian Daerah
4	04	04	Program Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi kriteria Penilaian dan penghargaan	88.67	88.67	937,850,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						
4	05	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	76	76	6,041,956,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	05	02	Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	5	5	1,713,186,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	05	03	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat manajerial dan fungsional	100	100	51,164,413,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	05	04	Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural	Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test	100	100	3,425,888,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>4</b>	<b>06</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
4	06	01	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	15,513,695,948	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
<b>4</b>	<b>07</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
4	07	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Bali	10	10	20,392,101,308	Sekretariat DPRD
4	07	02	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Anggota DPRD Provinsi Bali	5	5	108,777,898,692	Sekretariat DPRD
4	07	03	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	3	3	10,330,000,000	Sekretariat DPRD
<b>4</b>	<b>08</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
4	08	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	20	20	751,338,832	Biro Hukum dan HAM
4	08	02	Program Pengembangan Produk Hukum	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum	20	20	3,127,457,828	Biro Hukum dan HAM
4	08	03	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase pelayanan permasalahan hukum dan HAM	20	20	2,728,268,816	Biro Hukum dan HAM
4	08	04	Program Pembinaan dan Dokumentasi Hukum	Persentase penyebarluasan informasi hukum	20	20	512,341,004	Biro Hukum dan HAM
4	08	05	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	persentase pelaporan dan capaian kinerja yang ditangani	4 laporan	4 laporan	894,893,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	08	06	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase implementasi kerjasama pemerintah daerah	2 draf	2 draf	1,219,468,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	08	07	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Rumusan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20	20	574,352,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	08	08	Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan	Persentase Peningkatan Kualitas Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan	20	20	546,528,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	08	09	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Indek Kepuasan Pelayanan ke Tatasahaan Perangkat daerah	86	86	768,000,000	Biro Organisasi
4	08	10	Program Peningkatan Ketatalaksana dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Baik	77	77	361,014,000	Biro Organisasi
4	08	11	Program Peningkatan Dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi yang Baik	77	77	952,856,000	Biro Organisasi
4	08	12	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (Right Sizing)	77	77	718,130,000	Biro Organisasi
4	08	13	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase Peningkatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100	100	1,333,871,144	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	08	14	Program Pengembangan dan Peningkatan Kebijakan Daerah Bagian Agama	Persentase Peningkatan Kehidupan Beragama	100	100	8,977,786,568	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	08	15	Program Pengembangan dan Peningkatan Kebijakan Daerah Bagian Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Kebudayaan	2 kebijakan	2 kebijakan	563,872,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	08	16	Program pengembangan dan peningkatan kebijakan daerah bagian pendidikan dan kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	Jumlah Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 kebijakan	2 kebijakan	3,449,691,288	Biro Kesejahteraan Rakyat

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	08	17	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase peningkatan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Provinsi Bali	82.64	82.64	592,536,000	Biro Perekonomian
4	08	18	Program Pemberdayaan Perekonomian	LPD sehat dan berdaya saing	865	877	150,000,000	Biro Perekonomian
				Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil	4.5	4.5	150,000,000	
				BUMD Sehat dan Berdaya Saing	7	7	200,000,000	
				Jumlah Kebijakan di Bidang Ekonomi	2 kebijakan (peraturan) dibidang ekonomi	2 kebijakan (peraturan) dibidang ekonomi	85,000,000	
4	08	19	Program Pengembangan Produksi Daerah	Jumlah Kebijakan Produksi Daerah	2 kebijakan (peraturan) Produksi Daerah	2 kebijakan (peraturan) Produksi Daerah	120,000,000	Biro Perekonomian
				Tingkat Harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan $\hat{\alpha}\% \times$ HET	HET Rp.14.500	HET Rp.14.500	70,546,416	
4	08	20	Program Pengembangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan	Jumlah Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber daya Air serta Kehutanan	2 kebijakan (peraturan) dibidang lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan	2 kebijakan (peraturan) dibidang lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan	110,546,416	Biro Perekonomian
4	08	21	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	persentase pelaporan dan capaian kinerja yang ditangani	100	100	571,854,416	Biro Administrasi Pembangunan
4	08	22	Program Pengendalian Pembangunan	Persentase Kesesuaian Rencana dengan Realisasi Pembangunan	100	100	295,804,832	Biro Administrasi Pembangunan
4	08	23	Program Pelayanan Aparatur	Persentase Laporan Pembangunan yang disampaikan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	54	54	436,814,416	Biro Administrasi Pembangunan
4	08	24	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	50	50	289,490,416	Biro Administrasi Pembangunan
4	08	25	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase layanan administrasi yang ditangani	100	100	36,337,397,680	Biro Umum

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
						Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	08	26	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	indeks kepuasan pelayanan pengelola keuangan setda	100	100	1,278,050,912	Biro Umum
4	08	27	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	Persentase Pelayanan administrasi yang ditangani dengan Baik	100	100	7,300,000,000	Biro Umum
4	08	28	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Prosentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100	100	2,680,592,000	Biro Humas dan Protokol
4	08	29	Program Kehumasan	Prosentase Peningkatan Kegiatan Publikasi Pemprov Bali	100	100	13,858,300,000	Biro Humas dan Protokol
4	08	30	Program Keprotokolan	Prosentase Kegiatan Keprotokolan Yang Ditangani	100	100	3,040,422,416	Biro Humas dan Protokol
4	08	31	Program Peningkatan Layanan Informasi	Prosentase Updating Data dan Informasi	100	100	3,831,087,408	Biro Humas dan Protokol
4	08	32	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	100	100	9,962,477,600	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	08	33	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase tingkat penyelesaian pengadaan barang/jasa	100	100	6,471,798,452	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	08	34	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan level kematangan lembaga pengadaan barang/jasa	100	100	1,663,081,000	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	08	35	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Indeks pelayanan pengadaan barang/jasa	100	100	1,191,430,000	Biro Administrasi Barang/Jasa
<b>4</b>	<b>09</b>	<b>INSPEKTORAT</b>						
4	09	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Terlayannya Administrasi perkantoran	100	100	4,353,880,720	Inspektorat
4	09	02	Program Monitoring Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti	90	90	714,314,416	Inspektorat
4	09	03	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Level APIP	WTP, APIP Level 3	WTP, APIP Level 3	4,190,433,696	Inspektorat
<b>4</b>	<b>10</b>	<b>KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT</b>						
4	10	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	77	77	2,648,841,256	Badan Penghubung

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019				
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
4	10	02	Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	70	70	830,679,744	Badan Penghubung
<b>4</b>	<b>11</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>						
4	11	01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	80	80	2,233,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	11	02	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana Keamanan Lingkungan	5.90	5.90	1,422,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	11	03	Program pendidikan politik masyarakat	Pencapaian Indek Demokrasi di Provinsi Bali	80	80	705,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	11	04	Program Bina Ideologi dan Pemantapan wawasan Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat yang terdaftar di kesbang yang mendapat pembinaan bina ideologi	20	20	690,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH							2,131,481,658,001	

Tabel 7.2B  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	01	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan</b>														
1	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88,87	88,89	181,195,484,600	88,90	181,398,208,254	88,91	181,601,158,717	88,92	181,804,336,244	88,92	725,999,187,815	Dinas Pendidikan
1	01	02	Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) Menengah	73.15	100.00	108,916,405,972	100.00	110,828,391,085	100.00	112,823,302,124	100.00	114,854,121,562	100.00	447,422,220,743	Dinas Pendidikan
			Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	34.96	37.51	38.79		40.06		41.34		41.34				
1	01	03	Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	15.14	15.32	36,447,371,612	15.41	36,629,608,470	15.50	36,812,756,512	15.59	36,996,820,294	15.59	146,886,556,888	Dinas Pendidikan
1	01	04	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84.00	85.00	2,398,453,267	85.50	2,524,372,063	86.00	2,650,590,666	86.50	2,783,120,199	86.50	10,356,536,195	Dinas Pendidikan
1	01	05	Pengembangan Teknologi Pendidikan UPT BPTKDIK	Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia	29.85	32.84	4,187,500,000	34.33	4,543,021,983	35.82	4,928,728,056	37.31	5,347,180,873	37.31	19,006,430,912	Dinas Pendidikan
1	01	06	Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	Persentase widya pasraman yang tumbuh dan berkembang di Desa Adat	1.41	2.81	518,000,000	3.42	536,000,000	4.02	554,000,000	4.62	554,000,000	4.62	2,162,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	07	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jana Kerthi	Persentase mahasiswa S1, S2, S3 yang berprestasi di bidang penerapan nilai-nilai Jana Kerthi	0.03	0.05	3,408,000,000	0.06	4,172,000,000	0.07	4,936,000,000	0.07	5,010,000,000	0.07	17,526,000,000	Dinas Pendidikan
1	02	<b>Kesehatan</b>														
1	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.46	82.5	7,785,557,895	83	7,885,557,895	83.5	7,985,557,895	84	8,085,557,895	84.5	31,742,231,580	Dinas Kesehatan
1	02	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	86	92	1,556,000,000	94	2,090,000,000	96	2,190,000,000	100	2,290,000,000	100	8,126,000,000	Dinas Kesehatan
			Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	5	4.6	560,000,000	4.4	1,100,000,000	4.3	1,200,000,000	4.2	1,300,000,000	4.2	4,160,000,000		
			Indeks Keluarga Sehat	0.31	0.40	7,769,409,942	0.45	7,909,262,942	0.50	8,989,262,942	0.55	10,049,262,942	0.55	34,717,198,768		
1	02	03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Case Detection Rate TBC (%)	30	32	16,493,740,520	34	17,854,171,660	36	17,854,171,660	38	17,854,171,660	38	70,056,255,500	Dinas Kesehatan
1	02	04	Penguatan Surveilans dan Imunisasi	Persentase Desa UCI	94	95,5	562,300,000	96	675,890,800	96,5	675,890,800	97	675,890,800	97	2,589,972,400	Dinas Kesehatan
1	02	05	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase WUS 30-50 Tahun yang mendapatkan Deteksi Dini Kanker	17.7	32	436,374,950	37	1,485,765,290	42	1,500,000,000	47	1,600,000,000	47	5,022,140,240	Dinas Kesehatan
			Persentase ODG Berat yang tidak ditelantarkan	0,7	0,6	463,355,480	0,55	463,355,480	0,5	473,355,480	0,45	483,355,480	0,45	1,883,421,920		
1	02	06	Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	85	85	200,000,000,000	85	250,000,000,000	85	250,000,000,000	85	250,000,000,000	85	950,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	07	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentas fasilitas pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	85	95	13,778,349,160	95	14,042,034,000	95	14,072,034,000	95	14,102,034,000	95	55,994,451,160	Dinas Kesehatan
1	02	08	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	49	60	17,802,110,043	65	17,882,110,043	70	17,932,110,043	75	17,982,110,043	75	71,598,440,172	Dinas Kesehatan
1	02	09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.001	0.001	3,305,356,790	0.001	3,568,873,390	0.001	3,868,873,390	0.001	4,168,873,390	0.001	14,911,976,960	Dinas Kesehatan
1	02	10	Pengembangan Sistem Database Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	0	30	289,842,400	40	300,000,000	50	325,000,000	60	325,000,000	60	1,239,842,400	Dinas Kesehatan
1	02	11	Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	0	2	3,332,150,780	3	3,461,611,336	3	3,561,611,336	4	3,661,611,336	4	14,016,984,788	Dinas Kesehatan



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	02	12	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	80	80.5	15,278,182,596	81	16,042,091,726	81.5	16,242,091,726	82	16,442,091,726	82	64,004,457,773	Dinas Kesehatan
1	02	13	Pelatihan Tenaga Kesehatan	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100	100	5,242,198,000	100	5,500,000,000	100	5,500,000,000	100	5,500,000,000	100	21,742,198,000	Dinas Kesehatan
1	02	14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara	Persentase Pelayanan Yang Memenuhi SPO Pada UPTD RSUD Bali Mandara	100	100	168,615,822,980	100	194,951,485,278	100	204,951,485,278	100	214,951,485,278	100	783,470,278,814	Dinas Kesehatan
1	02	15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Cakupan ODGI berat yang dilayani	35	45	48,063,403,560	50	25,339,713,332	55	21,048,968,531	60	21,698,974,266	60	116,151,059,689	Dinas Kesehatan
1	02	16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Persentase Pasien yang Dilayani UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0.5	0.5	2,749,354,520	0.5	3,161,519,520	0.5	3,261,519,520	0.5	3,361,519,520	0.5	12,533,913,080	Dinas Kesehatan
1	02	17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara	80	85	37,345,800,546	90	39,231,090,573	95	41,231,090,573	95	43,231,090,573	95	161,039,072,265	Dinas Kesehatan
1	02	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali	79	80.5	25,500,000,000	81	26,010,000,000	81.5	26,530,000,000	82	27,600,000,000	82	105,640,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara	78	80.5	39,000,000,000	81	40,000,000,000	81	41,000,000,000	82	42,000,000,000	82	162,000,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>														
1	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	80	6,500,000,000	80	6,800,000,000	85	7,000,000,000	85	7,500,000,000	85	27,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	71.51	74.26	32,599,280,330	76.8	27,662,003,545	78.54	27,507,003,899	80.87	22,516,904,289	80.87	110,285,192,063	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Perlindungan Sumber Daya Air	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	68	69.4	30,248,856,100	70.3	40,643,799,210	70.6	19,808,649,131	72.3	19,119,384,044	72.3	109,820,688,485	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	Panjang pantai terabrasi (Km)	118.69	118.09	29,000,000,000	117.79	38,000,000,000	116.52	16,117,926,600	116.02	16,129,719,260	117.49	99,247,645,860	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	80.81	77.71	382,212,461,000	77.98	425,811,235,955	78.11	468,392,359,550	78.25	515,231,595,505	78.25	1,791,647,652,010	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	58	64	39,575,347,076	68	31,145,360,934	72	29,677,670,026	75	49,453,837,029	75	149,852,215,065	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	70%	72%	1,678,983,430	74%	1,727,000,000	76%	1,899,700,000	80%	2,089,670,000	80%	7,395,353,430	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan	Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil Pelayanan pengujian laboratorium dan Peralatan	100	100	2,707,500,000	100	2,800,000,000	100	2,850,000,000	100%	2,900,000,000	100%	11,257,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100	100	31,277,500,000	100	51,500,000,000	100	42,500,000,000	100	45,500,000,000	100	170,777,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	100	100	18,190,000,000	100	23,836,000,000	100	19,285,000,000	100	20,320,000,000	100	81,631,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	84	88.75	115,791,262,892	90	69,225,388,943	91.25	50,430,427,954	92.5	33,983,470,649	92.5	269,430,550,438	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Peningkatan kualitas penataan ruang	Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	90	92	3,583,880,000	93	3,785,305,000	94	3,942,690,000	95	4,121,550,000	95	15,433,425,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>														
1	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	80	3,071,222,837	80	2,913,344,892	85	3,041,881,000	85	3,346,069,000	85	12,372,517,729	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02	Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	N/A	20	3,025,000,000	20	3,327,500,000	20	3,660,250,000	20	4,026,275,000	80	14,039,025,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	04	03	Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni	77.59	11,065,000,000	79	31,940,000,000	88.24	32,915,000,000	93.08	35,817,875,000	97.93	111,737,875,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	8.20	4,580,000,000	7.7	7,630,000,000	6.6	9,150,000,000	5.6	15,260,000,000	5.6	36,620,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>1</b>	<b>05</b>		<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>												
1	05	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	8,643,500,000	81.5	5,343,500,000	82.5	5,350,500,000	83	4,600,500,000	83	23,938,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pol PP	Persentase Kapasitas SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya	100	600,000,000	20	700,000,000	20	740,000,000	20	800,000,000	20	2,840,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03	Penegakan Produk Hukuk Daerah	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non yustisi	543	1,575,000,000	340	1,670,500,000	320	1,800,000,000	310	1,880,000,000	310	6,925,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kapasitas Sumber Daya Keamanan yang Terlatih	1.5	1,355,000,000	4	1,435,000,000	4	1,520,000,000	4	1,585,000,000	4	5,895,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	05	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	247	22,100,000,000	225	24,315,000,000	205	26,651,500,000	200	29,200,300,000	200	102,266,800,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	06	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	N/A	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	2,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	07	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.93	4,490,902,414	82.93	4,932,992,656	82.93	5,426,291,922	82.93	5,968,921,114	100	20,819,108,106	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	08	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang di Bina dalam Menghadapi Bencana	90	1,678,597,585	20	1,846,457,344	20	2,031,103,078	20	2,234,213,386	100	7,790,371,393	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	09	Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan	Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100	1,320,000,000	100	1,452,000,000	100	1,597,200,000	100	1,756,920,000	100	6,126,120,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	10	Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100	495,000,000	100	544,500,000	100	598,950,000	100	658,845,000	100	2,297,295,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	11	Pengendalian Bencana	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	100	30,556,254,140	100	13,711,879,554	100	15,083,067,509	100	15,381,374,260	100	74,732,575,463	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1</b>	<b>06</b>		<b>Sosial</b>												
1	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	4,177,987,000	A	4,523,287,000	A	4,882,117,000	A	5,255,730,000	A	18,839,121,000	Dinas Sosial
1	06	02	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	16.87	3,280,210,000	20.43	3,550,830,000	23.31	3,956,450,000	24.80	4,382,000,000	24.80	15,169,490,000	Dinas Sosial
1	06	03	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	14.78	795,000,000	19.55	870,000,000	21.68	940,000,000	22.74	1,020,000,000	22.74	3,625,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1	26,530,000,000	1	26,530,000,000	1	26,530,000,000	1	26,530,000,000	5	106,120,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10.26	1,329,000,000	20.15	1,464,000,000	23.92	1,554,000,000	25.01	1,602,000,000	25.01	5,949,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	Pemenuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	1	461,675,000	17.21	456,200,000	17.87	513,225,000	18.21	570,250,000	18.21	2,001,350,000	Dinas Sosial
1	06	07	Pelayanan Sosial	Persentase penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	95	5,923,699,800	95	6,733,679,800	95	7,707,368,400	95	8,713,235,980	95	29,077,983,980	Dinas Sosial
<b>2</b>			<b>URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR</b>												
<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Tenaga Kerja</b>												
2	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	4,416,507,000	81.5	4,545,363,000	82.5	4,548,594,000	83	4,742,500,000	83	18,252,964,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	02	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	33.35	4,814,810,000	43.44	4,944,624,000	55.65	5,061,012,000	62.69	5,194,902,000	62.69	20,015,348,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2	01	03	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	Persentase Lulusan BLK yang bekerja	93	90	4,814,810,000	90	4,944,624,000	92	5,061,012,000	90	5,194,902,000	90	20,015,348,000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	04	Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	93	90	10,025,764,200	90	13,253,920,480	92	14,182,614,008	90	15,063,285,279	90	52,525,583,967	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	05	Peningkatan kualitas penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	1,621	2,035	13,550,000,000	2,250	13,590,000,000	2,385	13,660,000,000	2,512	13,685,000,000	12,624	54,485,000,000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	06	Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	4	1	1,438,482,600	1	1,589,640,800	1	1,735,343,500	1	1,894,383,350	9	6,657,850,250	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	07	Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	4.74	5.72	220,000,000	6.22	250,000,000	6.71	280,000,000	7.20	350,000,000	7.20	1,100,000,000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
2	01	08	Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	330	70	170,000,000	80	200,000,000	90	220,000,000	90	250,000,000	720	840,000,000	Disnas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan anak</b>														
2	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	A	2,510,000,000	A	2,510,000,000	A	2,510,000,000	A	2,510,000,000	A	10,040,000,000	Disnas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	02	02	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98.45	98.65	1,160,000,000	98.70	1,160,000,000	98.75	1,160,000,000	98.80	1,160,000,000	98.80	4,640,000,000	Disnas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	02	03	Peningkatan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100	100	1,670,000,000	100	1,710,000,000	100	1,750,000,000	100	1,790,000,000	100	6,920,000,000	Disnas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	02	04	Peningkatan Perlindungan Anak	Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya	22	66	4,650,000,000	77	4,650,000,000	100	4,650,000,000	100	4,650,000,000	100	18,600,000,000	Disnas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Pangan</b>														
2	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	72	73	2,395,438,428	74	2,536,488,428	75	2,582,195,928	76	2,633,259,553	76	10,147,382,337	Disnas Ketahanan Pangan
2	03	02	Peningkatan ketersediaan pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.646	2.648	391,000,000	2.649	449,650,000	2.650	517,097,500	2.650	594,662,126	2.650	1,952,409,626	Disnas Ketahanan Pangan
2	03	03	Stabilisasi harga Pangan	Harga GKP lebih besar dari HPP	> Rp. 3700	> Rp. 3700	500,000,000	> Rp. 3700	600,000,000	> Rp. 3700	650,000,000	> Rp. 3700	700,000,000	> Rp. 3700	2,450,000,000	Disnas Ketahanan Pangan
2	03	04	Peningkatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	PPH Konsumsi	95.6	95.7	688,250,000	95.8	783,987,500	95.9	894,085,625	96	943,133,218	96	3,309,456,343	Disnas Ketahanan Pangan
2	03	05	Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	80	85	414,000,000	90	475,900,000	95	547,515,000	95	629,642,251	95	2,067,057,251	Disnas Ketahanan Pangan
2	03	06	Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar yang bersertifikat mutu	7	22	291,435,000	27	511,941,480	32	561,941,480	39	611,941,480	39	1,977,259,440	Disnas Ketahanan Pangan
2	03	07	Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyanga Stock Pangan Daerah	Jumlah Lumbung yang masih berfungsi baik	15	15	500,000,000	15	500,000,000	15	500,000,000	15	500,000,000	75	2,000,000,000	Disnas Ketahanan Pangan
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>Pertanahan</b>														
2	04	01	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase data informasi pertanahan yang handal	0	15	400,000,000	30	500,000,000	70	500,000,000	85	500,000,000	85	1,900,000,000	Disnas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>														
2	5	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	77	2,961,455,080	78	3,247,600,588	79	3,562,360,647	80	3,908,596,711	80	13,680,013,026	Disnas Lingkungan Hidup
2	05	02	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	7.21	6.06	799,380,000	5.47	879,318,000	4.87	967,249,800	4.31	1,063,974,780	4.31	3,709,922,580	Disnas Lingkungan Hidup
2	05	03	Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan terhadap ijin lingkungan	100	55	1,294,700,000	65	1,424,170,000	75	1,566,587,000	90	1,723,245,700	90	6,008,702,700	Disnas Lingkungan Hidup
2	05	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	90	91	594,172,920	92	653,590,212	93	718,949,233	94	790,844,157	94	2,757,556,522	UPTD Laboratorium Lingkungan
2	05	05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100	100	9,250,000,000	100	6,681,000,000	100	7,258,000,000	100	7,925,000,000	100	31,114,000,000	UPTD Pengelolaan Sampah
2	05	06	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi	Jumlah danau alam dalam kondisi baik	4	4	2,251,396,100	4	2,536,593,210	4	2,490,722,531	4	1,189,664,784	4	8,468,376,625	Disnas Lingkungan Hidup

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)
2	05	07	Peningkatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	18		22		24		26		27		Dinas Lingkungan Hidup		
				Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73	950,000,000	73		74	1,050,000,000	73		72	1,225,000,000	72	4,425,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	06		<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>														
2	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.59		82.6	1,861,875,400	82.60	2,048,062,940	82.65	2,252,869,234	82.65	2,478,156,157	82.65	8,640,963,731	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
2	06	02	Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	88.89		88.89	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,050,000,000	100	1,185,000,000	100	4,535,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
2	06	03	Peningkatan Pencatatan Sipil	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	88.89		88.89	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,300,000,000	100	1,400,000,000	100	5,000,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
2	07		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>														
2	07	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.88		83	4,618,570,152	84	5,080,427,167	85	5,588,469,884	86	6,147,316,872	86	21,434,784,075	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	02	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	31.13		49.05	2,700,000,000	58.01	2,970,000,000	66.98	3,267,000,000	75.94	3,593,700,000	75.94	12,530,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	03	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	73.58		84.28	1,817,901,471	89.62	1,999,691,618	94.97	2,199,660,780	100	2,419,626,858	100	8,436,880,727	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	04	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna	Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan	38.05		55.97	1,667,314,030	64.94	1,834,045,433	73.9	2,017,449,976	82.86	2,219,194,974	82.86	7,738,004,413	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	05	Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	60		70	11,677,590,466	75	12,845,349,513	80	14,129,884,464	85	15,542,872,910	85	54,195,697,353	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	08		<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>														
2	08	01	Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	46,2		49,8	505,000,000	51,8	610,000,000	53,2	640,000,000	55,4	695,000,000	55,4	2,450,000,000	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana
2	09		<b>Perhubungan</b>														
2	09	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	100		100	2,692,000,000	100	2,910,500,000	100	3,150,750,000	100	3,305,000,000	100	12,058,250,000	Dinas Perhubungan
2	09	02	Pengembangan infrastruktur transportasi publik	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	9		10	1,750,000,000	10	3,250,000,000	11	4,000,000,000	12	4,750,000,000	12	13,750,000,000	Dinas Perhubungan
2	09	03	Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran	Persentase perubahan yang menerapkan manajemen keselamatan	40		40	900,000,000	50	1,500,000,000	55	2,000,000,000	60	2,500,000,000	60	6,900,000,000	Dinas Perhubungan
2	09	04	Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	50%		100%	760,000,000	100%	836,000,000	100%	919,600,000	100%	1,011,560,000	100%	3,527,160,000	Dinas Perhubungan
2	09	05	Peningkatan Pengawasan LLAJ	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	C		85%	3,284,590,000	90%	1,819,959,000	95%	1,940,755,000	100%	2,073,631,000	100%	9,118,935,000	Dinas Perhubungan
2	09	06	Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita	Indeks kepuasan pelayanan umum Trans Sarbagita	N/A		65	6,605,287,022	70	7,265,815,725	75	7,992,397,297	79	8,791,637,027	79	30,655,137,071	UPTD Trans Sarbagita
2	09	07	Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi	Tingkat pelayanan simpang	C		C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	1,956,700,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2,144,570,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2,454,985,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2,874,700,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	9,430,955,000	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ
2	09	08	Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Tingkat pelayanan ruas jalan	C		C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	4,578,000,000	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	4,978,000,000	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	5,421,000,000	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	5,907,000,000	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	20,884,000,000	UPTD Perlengkapan Jalan
2	09	09	Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	Waktu operasional perubahan pengumpan regional	0		12 Jam	500,000,000	12 Jam	1,000,000,000	12 Jam	1,000,000,000	12 Jam	1,000,000,000	12 Jam	3,500,000,000	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan
2	10		<b>Komunikasi dan Informatika</b>														
2	10	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,42		81	4,720,366,073	81,50	5,192,402,180	82	5,711,646,498	82,50	6,282,810,348	82,50	21,907,225,099	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	10	02	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	68		74	1,155,000,000	77	1,270,500,000	79	1,397,550,000	81	1,537,305,000	81	5,360,355,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	10	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	100		40	1,007,833,000	60	1,108,617,000	80	1,219,478,000	100	1,341,427,000	100	4,677,355,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2	10	04	Pengembangan Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100	40	7,720,865,000	60	9,482,951,000	80	11,289,245,800	100	14,365,171,080	100	42,858,232,880	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	10	05	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.22	1.72	7,720,865,000	2.18	9,482,951,000	2.52	11,289,245,800	3	14,365,171,080	3	42,858,232,880	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
<b>2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																
2	11	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.15	82.5	2,882,855,756	83	3,341,399,421	83.5	3,879,849,070	84	4,513,005,625	84	14,617,109,872	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	02	Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	62	104	481,079,202	126	642,256,527	126	5,403,433,851	128	5,464,611,176	128	11,991,380,756	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	03	Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	78 Unit	118 Unit	370,616,276	130 Unit	426,208,718	142 Unit	490,140,026	157 Unit	563,661,029	157 Unit	1,850,626,049	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	04	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang bankable	70	180	1,630,000,000	185	1,780,000,000	190	1,920,000,000	195	2,070,000,000	195	7,400,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	05	Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Jumlah Pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	550	50	1,015,531,897	50	1,108,638,277	50	1,220,365,933	50	1,354,439,119	800	4,698,975,226	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	06	Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani	Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5	2,000,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	07	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bankable	154	58	1,550,500,000	64	1,860,600,000	71	2,015,650,000	77	2,170,700,000	322	7,597,450,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	11	08	Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Jumlah koperasi tenun yang aktif	2	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	7	3,200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
<b>2 12 Penanaman Modal</b>																
2	12	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86	86.2	3,253,455,072	86.3	3,500,000,000	86.5	4,000,000,000	87	4,250,000,000	87	15,003,455,072	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	02	Pengembangan investasi	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	29.39	15.21	200,000,000	15.56	250,000,000	15.91	300,000,000	16.27	350,000,000	77.85	1,100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	03	Pengembangan promosi penanaman modal	Persentase investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	13.43	15.27	1,000,000,000	18.3	1,200,000,000	22.66	1,300,000,000	30.34	1,400,000,000	30.34	4,900,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	04	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88	89	184,000,000	90	200,000,000	91	210,000,000	92	220,000,000	92	814,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks pelayanan publik perizinan dan non perizinan	86	86.5	200,000,000	87	225,000,000	87.5	250,000,000	88	275,000,000	88	950,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	06	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100	100	270,000,000	100	300,000,000	100	320,000,000	100	350,000,000	100	1,240,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	12	07	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan	100	100	600,000,000	100	610,000,000	100	620,000,000	100	630,000,000	100	2,460,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
<b>2 13 Kepemudaan dan Olah Raga</b>																
2	13	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	69	71	4,748,450,000	72	4,103,750,000	73	4,220,000,000	74	4,320,000,000	74	17,392,200,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	02	Pemberdayaan Pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	77	78	7,025,000,000	79	8,025,000,000	80	8,500,000,000	81	9,275,000,000	81	32,825,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	03	Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	0.81	3.85	1,730,000,000	4.00	1,875,000,000	4.15	1,970,000,000	4.30	2,065,000,000	4.30	7,640,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	04	Pembudayaan Olahraga	Persentase Masyarakat yang berolahraga	29	31	4,350,000,000	32	5,860,000,000	33	6,825,000,000	34	7,650,000,000	34	24,685,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	13	05	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali yang diperoleh Atlit pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	11	90	16,150,000,000	95	13,501,500,000	100	10,250,000,000	110	17,000,000,000	480	56,901,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
<b>2 14 Statistik</b>																
2	14	01	Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	50,800,000,000	100	5,800,000,000	100	6,000,000,000	100	7,000,000,000	100	69,600,000,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
<b>2 15 Persandian</b>																
2	15	01	Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100	40	687,514,000	60	756,265,000	80	831,893,000	100	915,081,000	100	3,190,753,000	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	16	01	<b>Kebudayaan</b> Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	80	17,626,804,800	81	19,389,485,280	82	21,328,433,808	83	23,461,277,189	84	81,806,001,077	Dinas Kebudayaan
2	16	02	Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5	5	3,650,000,000	5	2,900,000,000	5	3,300,000,000	5	4,900,000,000	25	14,750,000,000	Dinas Kebudayaan
2	16	03	Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5	5	35,635,000,000	5	28,600,000,000	5	32,575,000,000	5	36,550,000,000	30	133,360,000,000	Dinas Kebudayaan
2	16	04	Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	410	515	4,050,000,000	520	5,500,000,000	525	6,950,000,000	1,430	10,400,000,000	3,400	26,900,000,000	Dinas Kebudayaan
2	16	05	Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	5	15,050,000,000	5	17,500,000,000	5	19,950,000,000	5	22,400,000,000	25	74,900,000,000	Dinas Kebudayaan
2	16	06	Penguatan Desa Adat	Jumlah Desa Adat berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	523	821	6,950,000,000	1,120	9,650,000,000	1,493	12,350,000,000	1,493	15,050,000,000	1,493	44,000,000,000	Dinas Kebudayaan
2	16	07	Penguatan Subak	Jumlah Subak berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	1,090	1,636	5,500,000,000	2,181	7,700,000,000	2,453	9,900,000,000	2,726	12,100,000,000	2,726	35,200,000,000	Dinas Kebudayaan
2	16	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	Persentase Sumber Daya Keamanan Tradisional yang terlatih	0,9	1.3	500,000,000	1.3	700,000,000	1.3	900,000,000	1.3	1,100,000,000	6.2	3,200,000,000	Dinas Kebudayaan
2	16	09	Pengembangan UPTD Taman Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Taman Budaya	N/A	75	14,504,820,000	75	15,955,302,000	75	17,550,832,200	75	19,305,915,420	75	67,316,869,620	Dinas Kebudayaan / UPTD Taman Budaya
2	16	10	Pengembangan UPTD Museum Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	N/A	75	7,702,827,000	75	8,473,109,700	75	9,320,420,670	75	10,252,462,737	75	35,748,820,107	Dinas Kebudayaan / UPTD Museum Bali
2	16	11	Pengembangan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	N/A	75	9,784,575,900	75	10,763,033,490	75	11,839,336,839	75	13,023,270,523	75	45,410,216,752	Dinas Kebudayaan / UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
2	17	<b>Perpustakaan</b>														
2	17	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	82	4,378,250,000	83	26,413,500,000	84	9,348,750,000	85	9,684,000,000	85	49,824,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	02	Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	10	11	1,285,000,000	20	1,385,000,000	28	1,595,000,000	33	1,800,000,000	33	6,065,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	03	Pengembangan Perpustakaan	Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan	10	18.85	2,775,000,000	20	3,150,000,000	21.12	3,425,000,000	22.28	3,600,000,000	22.28	12,950,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	17	04	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	47	49	1,275,000,000	51	1,390,000,000	53	1,485,000,000	55	1,650,000,000	55	5,800,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	<b>Kearsipan</b>														
2	18	01	Peningkatan Pengolahan Arsip	Nilai Evaluasi Kearsipan	67	71	2,950,000,000	72	2,950,000,000	73	2,950,000,000	74	2,950,000,000	74	11,800,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	18	02	Peningkatan, Pengembangan Kearsipan	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	25	35	1,837,000,000	50	1,880,000,000	75	2,060,000,000	100	2,300,000,000	100	8,077,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	<b>URUSAN PILIHAN</b>															
3	01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>														
3	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	77	12,082,825,000	78	2,318,350,000	79	2,553,875,000	80	2,789,400,000	80	19,744,450,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	02	Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	97,157.60	101,082.77	809,857,300	103,104.42	1,012,321,625	105,166.51	1,265,402,031	107,269.84	1,581,752,539	107,269.84	4,669,333,495	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	03	Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	17,535.70	18,244.14	902,152,000	18,609.02	1,052,690,000	18,981.2	1,240,862,500	19,360.82	1,476,078,125	19,360.82	4,671,782,625	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	06	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten/Kota	Jumlah pasar ikan yang direvitalisasi	350	5	978,305,430	5	1,222,881,788	5	1,528,602,234	5	1,910,752,793	370	5,640,542,245	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	01	07	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Laut	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	3 kawasan	3 kawasan	453,100,000	3 kawasan	566,375,000	4 kawasan	707,968,750	5 kawasan	884,960,938	5 kawasan	2,612,404,688	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	08	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	134	149	270,000,000	149	270,000,000	149	270,000,000	151	290,000,000	151	1,100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	01	09	Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pelaku Usaha taat hukum	50	200,000,000	25	300,000,000	25	400,000,000	25	500,000,000	200	1,400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	01	10	Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Sampel yang diuji	1000 sampel	4850 sampel	978,305,430	4900 sampel	1,222,881,788	4950 sampel	1,528,602,234	5000 sampel	1,910,752,793	5000 sampel	5,640,542,245	UPT. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
3	01	11	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Jumlah perubahan perikanan yang dikelola	2 pelabuhan	2 pelabuhan	126,976,000	2 pelabuhan	126,976,000	2 pelabuhan	126,976,000	2 pelabuhan	126,976,000	2 pelabuhan	507,904,000	UPT. Pelabuhan Perikanan
3	01	12	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	2 kawasan	2 kawasan	500,000,000	3 kawasan	500,000,000	4 kawasan	500,000,000	5 kawasan	500,000,000	5 kawasan	2,000,000,000	UPT. Kawasan Konservasi Perairan Bali
3	01	13	Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	1 komoditas (pembenihan udang galah)	3 komoditas (udang galah, udang vaname dan rumput laut)	1,095,978,750	2 komoditas (udang vaname dan udang galah)	1,369,973,438	2 komoditas (udang vaname dan udang galah)	1,712,466,797	2 komoditas (udang vaname dan udang galah)	2,140,583,496	3 komoditas (udang galah, udang vaname dan rumput laut)	6,319,002,480	UPT. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
<b>3</b>	<b>02</b>		<b>Pariwisata</b>													
3	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	82	2,919,244,641	83	3,449,093,569	84	2,501,572,080	85	2,501,572,080	85	11,371,482,370	Dinas Pariwisata
3	02	02	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	146	4	2,580,000,000	4	3,050,000,000	5	3,475,000,000	5	3,820,000,000	164	12,925,000,000	Dinas Pariwisata
3	02	03	Pengembangan SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang Bersertifikat Kompetensi Pariwisata	4,851	300	1,390,000,000	400	1,565,000,000	500	1,737,000,000	600	1,915,000,000	6,851	6,607,000,000	Dinas Pariwisata
3	02	04	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	6.070.473 dan 9.757.991	8.000.000 dan 8.395.000	3,795,000,000	8.950.000 dan 8.585.000	4,345,000,000	9.997.000 dan 8.775.000	4,800,000,000	11.156.000 dan 8.970.000	5,300,000,000	44.800.000 dan 51.200.000	18,240,000,000	Dinas Pariwisata
3	02	05	Pengembangan Produk Pariwisata	Jumlah Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	27	84	2,042,943,248	90	2,375,000,000	95	2,680,000,000	100	2,926,500,000	369	10,024,443,248	Dinas Pariwisata
3	02	06	Pengembangan Standar Industri Pariwisata	Jumlah Industri Pariwisata yang bersertifikat usaha	248	10	447,000,000	20	522,000,000	30	599,000,000	40	679,000,000	100	2,247,000,000	Dinas Pariwisata
3	02	07	Pengembangan Informasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	2,800,000	4,098,750	600,000,000	4,383,750	625,000,000	4,693,000	650,000,000	5,031,500	675,000,000	24,000,000	2,550,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3</b>	<b>03</b>		<b>Pertanian</b>													
3	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	82	3,494,312,010	83	3,838,743,211	84	4,217,617,532	85	4,634,379,285	85	16,185,052,038	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
3	03	02	Pendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Kedaulatan Beras	Indek Pertanaman Lahan sawah	N/A	167%		169%		171%		173%		0	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	
3	03	03	Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten	Jumlah unit taman gumi banten yang produktif	7	1	4,167,023,739	1	4,583,726,113	1	5,042,098,724	1	5,546,308,597	12	19,339,157,173	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				Jumlah Peningkatan Produksi Perkebunan	N/A	98,799	4,167,023,739	99,074	4,583,726,113	99,349	5,042,098,724	99,624	5,546,308,597	99,624	19,339,157,173	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	06	Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Persentase lahan pertanian produktif	75	77.45	4,792,052,610	77.95	5,271,257,871	78.45	5,798,383,658	78.95	6,378,222,024	78.95	22,239,916,163	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	07	Peningkatan sarana produksi pertanian	Persentase sarana produksi pertanian dalam kondisi baik dan siap pakai	75	77	2,948,417,579	78	3,243,259,337	79	3,567,585,271	80	3,924,343,798	80	13,683,605,984	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	11	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Jumlah Kelompok pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan	2	1	2,667,324,253	1	2,934,056,678	1	3,227,462,346	1	3,550,208,581	7	12,379,051,858	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	12	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian yang dibangun dan berproduksi	1	1	5,955,907,300	1	6,551,498,030	1	7,206,647,833	1	7,927,312,616	6	27,641,365,779	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	13	Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	4	1	3,595,000,000	1	3,954,500,000	1	4,349,950,000	1	4,784,945,000	9	16,684,395,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	14	Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	Jumlah pertanian Hidroponic perkotaan yang produktif	1	1	2,645,639,502	1	2,910,203,452	1	3,201,223,797	1	3,521,346,177	5	12,278,412,929	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	15	Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Jumlah Kelompok tani yang bersertifikasi	45	15	800,000,000	20	880,000,000	25	968,000,000	30	1,064,800,000	75	3,712,800,000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	16	Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Pengawasan Peredaran Serifikasi dan Mutu Benih (ton) ; Sayuran (ton) dan Buah-buahan (btg)	N/A	155 ; 55 ; 71.000	2,097,673,793	165 ; 65 ; 72.000	2,048,634,046	160 ; 60 ; 73.000	2,000,352,969	165 ; 65 ; 74.000	1,868,996,087	165 ; 65 ; 74.000	8,015,656,896	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	17	Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Luas Serangan Maksimum Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	0	4.5	2,713,210,869	4	2,725,724,830	3.5	2,745,152,832	3	2,688,275,936	3	10,872,364,467	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	03	22	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persentase produktivitas pertanian	2	2.4	6,434,324,286	2.6	6,818,949,589	2.8	7,247,700,065	3	7,641,077,894	3	28,142,051,834	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
3	03	23	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	76	2,612,390,000	77	2,979,228,000	79	3,478,727,000	80	3,914,411,000	80	12,984,756,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	03	24	Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	Jumlah populasi ternak lokal Bali	438,131	1,500,000,000	446.893	1,600,000,000	464,948	1,700,000,000	474,247	1,800,000,000	474,247	6,600,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	03	25	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok yang menerapkan Agribisnis Peternakan yang baik (Jumlah kelompok)	27	665,000,000	35	790,000,000	35	906,000,000	35	1,130,000,000	175	3,491,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	03	26	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	250 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	4,296,500,000	150 kasus rabies dan 5 kasus flu burung	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	4,543,500,000	75 kasus rabies dan 3 kasus flu burung	4,874,000,000	50 kasus rabies dan 2 kasus flu burung	5,420,000,000	50 kasus rabies dan 2 kasus flu burung	19,134,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	03	27	Pengembangan Semen	Jumlah produksi semen (dosis)	100.000 Dosis	3,156,860,259	102.000 Dosis	2,822,083,000	104.000 Dosis	2,965,868,000	105.000 Dosis	3,422,811,000	105.000 Dosis	12,367,622,259	UPTD. Balai Inseminasi Buatan Daerah	
3	03	28	Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	82.50	1,674,500,000	83.30	1,900,026,000	84.97	2,176,629,000	85.81	2,543,854,000	85.81	8,295,009,000	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
<b>3</b>	<b>04</b>	<b>Kehutanan</b>														
3	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	5,486,312,000	77	6,034,943,000	79	6,638,438,000	80	7,302,282,000	80	25,461,975,000	Dinas Kehutanan	
3	04	02	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5.02	3,702,831,000	4.95	4,073,114,000	4.83	4,480,425,000	4.75	4,928,468,000	4.75	17,184,838,000	Dinas Kehutanan	
3	04	03	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Persentase kerusakan kawasan hutan	5.56	4,816,970,000	4.3	5,298,667,000	3.04	5,828,534,000	2.41	6,411,387,000	2.41	22,355,558,000	Dinas Kehutanan	
3	04	04	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5.02	1,375,000,000	4.95	1,512,500,000	4.83	1,663,750,000	4.75	1,830,125,000	4.75	6,381,375,000	UPTD KPH Bali Barat	
3	04	05	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Persentase kerusakan kawasan hutan	5.56	3,410,000,000	4.30	3,751,000,000	3.04	4,126,100,000	2.41	4,530,870,000	2.41	15,817,970,000	UPTD KPH Bali Barat	
3	04	06	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5.02	1,375,000,000	4.95	1,512,500,000	4.83	1,663,750,000	4.75	1,830,125,000	4.75	6,381,375,000	UPTD KPH Bali Utara	
3	04	07	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Persentase kerusakan kawasan hutan	5.56	3,410,000,000	4.30	3,751,000,000	3.04	4,126,100,000	2.41	4,530,870,000	2.41	15,817,970,000	UPTD KPH Bali Utara	
3	04	08	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5.02	1,375,000,000	4.95	1,512,500,000	4.83	1,663,750,000	4.75	1,830,125,000	4.75	6,381,375,000	UPTD KPH Bali Selatan	
3	04	09	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Persentase kerusakan kawasan hutan	5.56	3,410,000,000	4.30	3,751,000,000	3.04	4,126,100,000	2.41	4,530,870,000	2.41	15,817,970,000	UPTD KPH Bali Selatan	
3	04	10	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5.02	1,375,000,000	4.95	1,512,500,000	4.83	1,663,750,000	4.75	1,830,125,000	4.75	6,381,375,000	UPTD KPH Bali Timur	
3	04	11	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Persentase kerusakan kawasan hutan	5.56	3,410,000,000	4.30	3,751,000,000	3.04	4,126,100,000	2.41	4,530,870,000	2.41	15,817,970,000	UPTD KPH Bali Timur	
3	04	12	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	5.02	550,000,000	4.95	605,000,000	4.83	665,500,000	4.75	732,050,000	4.75	2,552,550,000	UPTD Tahura Ngurah Rai	



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
3	04	13	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Persentase kerusakan kawasan hutan	5.56	4.30	3,410,000,000	3.67	3,751,000,000	3.04	4,126,100,000	2.41	4,530,870,000	2.41	15,817,970,000	UPTD Tahura Ngurah Rai
3	05		<b>Energi dan Sumber daya Mineral</b>													
3	05	01	Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	4.3	15	1,625,000,000	90	1,850,000,000	185	2,125,000,000	300	2,500,000,000	300	8,100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	55	65		70		75		80	80		Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	
3	06		<b>Perdagangan</b>													
3	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	82.1	5,486,312,000	82.1	6,034,943,000	82.1	6,638,438,000	82.1	7,302,282,000	82.1	25,461,975,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	02	Perlindungan Konsumen	Indeks Pemberdayaan konsumen	-	2%	1,300,000,000	2%	1,560,000,000	2%	1,620,000,000	2%	1,780,000,000	10%	6,260,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	03	Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	90	111	1,000,000,000	126	1,125,000,000	141	1,250,000,000	156	1,400,000,000	156	4,775,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	04	Penguatan distribusi produk lokal	Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	20	25	550,000,000	30	655,000,000	35	810,000,000	40	920,000,000	40	2,935,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	05	Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Barang yang tersertifikasi	45	48	1,359,254,500	50	890,179,950	53	979,197,945	56	1,077,045,739	46	4,305,678,134	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3	06	06	Pengembangan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang dikembangkan	8	8	350,000,000	8	400,000,000	8	450,000,000	8	450,000,000	8	1,650,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	7	Peningkatan Aksesibilitas Produk Sandang Lokal Bali	Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	20	40	1,000,000,000	60	1,000,000,000	80	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	4,000,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	06	08	Peningkatan ekspor industri kreatif	Persentase Nilai ekspor industri kreatif	\$ 818.902.508	2	3,975,000,000	3	4,478,000,000	4	4,939,480,000	4	5,472,020,000	4	18,864,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07		<b>Perindustrian</b>													
3	07	01	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	Jumlah Komoditi olahan pangan yang tumbuh dan berkembang	-	7 Produk Olahan	605,685,000	9 Produk Olahan	671,253,500	10 Produk Olahan	740,378,850	12 Produk Olahan	813,416,735	12 Produk Olahan	2,830,734,085	UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan
3	07	02	Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	1.5	3,500,000,000	1.5	3,600,000,000	1.5	3,700,000,000	1.5	3,800,000,000	7.5	14,600,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	07	03	Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh	5	7	500,000,000	9	400,000,000	11	600,000,000	13	700,000,000	13	2,200,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	08		<b>Transmigrasi</b>													
3	08	01	Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	Jumlah dokumen laporan evaluasi ketransmigrasian	4 dokumen	4 dokumen	225,000,000	4 dokumen	250,000,000	4 dokumen	250,000,000	4 dokumen	250,000,000	4 dokumen	975,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral
4			<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>													
4	01		<b>Perencanaan</b>													
4	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	82	5,063,376,616	82	5,569,714,277	82	6,126,685,705	82	6,739,354,275	82	23,499,130,873	Bappeda Litbang
4	01	02	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100	4,800,000,000	Bappeda Litbang
4	01	03	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	31,084,336,892	100	31,084,336,892	100	31,084,336,892	100	31,084,336,892	100	124,337,347,568	Bappeda Litbang
4	01	04	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	15,542,168,446	100	15,542,168,446	100	15,542,168,446	100	15,542,168,446	100	62,168,673,784	Bappeda Litbang
4	01	05	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	15,542,168,446	100	15,542,168,446	100	15,542,168,446	100	15,542,168,446	100	62,168,673,784	Bappeda Litbang
4	02		<b>Penelitian dan Pengembangan</b>													
4	02	01	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rencana Kelitbangan yang diimplementasikan	80	70	15,214,336,931	75	16,735,770,624	75	18,409,347,687	80	20,250,282,455	80	70,609,737,697	Bappeda Litbang

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
4	02	02	Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian	Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru diluar SARBAGITA.	9	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	4	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>4</b>	<b>03</b>		<b>Kepegawaian</b>													
4	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81.5	1,961,197,200	82	1,961,197,200	82.5	1,961,197,200	83	1,961,197,200	83	7,844,788,800	Badan Kepegawaian Daerah
4	03	02	Peningkatan pelayanan Pengadaan Pemberhentian Informasi dan Fasilitas ASN	Persentase peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan ASN	20.33	39.16	10,348,021,346	60.02	10,348,021,346	80.46	10,348,021,346	100	10,348,021,346	100	41,392,085,384	Badan Kepegawaian Daerah
4	03	03	Pengembangan Manajemen Karir	Persentase Peningkatan Manajemen Karir	3.5	6.5	8,387,220,000	6.9	8,387,220,000	12.6	8,387,220,000	25.2	8,387,220,000	25.2	33,548,880,000	Badan Kepegawaian Daerah
4	03	04	Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi kriteria Penilaian dan penghargaan	88.67	90	3,040,000,000	92	3,040,000,000	93.67	3,040,000,000	96	3,040,000,000	96	12,160,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>4</b>	<b>04</b>		<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>													
4	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	76	77	18,628,555,500	78	9,108,345,000	79	9,630,414,000	80	10,183,272,000	80	47,550,586,500	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	02	Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	5	8	2,595,800,000	10	2,118,800,000	12	2,588,800,000	15	2,228,800,000	15	9,532,200,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	03	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat manajerial dan fungsional	100	100	41,419,260,000	100	40,169,260,000	100	39,819,260,000	100	40,519,260,000	100	161,927,040,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	04	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural	Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test	100	100	4,665,000,000	100	6,255,000,000	100	4,355,000,000	100	3,115,000,000	100	18,390,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	05	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif	Persentase ASN dan legislatif yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	42	44	2,518,800,000	46	2,118,800,000	47	2,528,800,000	48	2,228,800,000	48	9,395,200,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>4</b>	<b>05</b>		<b>Sekretariat Daerah</b>													
4	05	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81.5	715,265,100	82	786,791,610	82.5	865,470,771	83	952,017,848	83	3,319,545,329	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	02	Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase implementasi kerjasama pemerintah daerah	100	100	1,400,000,000	100	1,500,000,000	100	1,700,000,000	100	1,800,000,000	100	6,400,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	03	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	100	1,400,000,000	100	1,500,000,000	100	1,700,000,000	100	1,800,000,000	100	6,400,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	04	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15	10	1,200,000,000	9	1,400,000,000	8	950,000,000	7	950,000,000	7	4,500,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	05	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	87	1,115,913,800	88	1,227,505,180	89	1,350,255,698	90	1,485,281,268	90	5,178,955,946	Biro Organisasi
4	05	06	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat daerah melaksanakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik dengan baik	75	79	397,115,400	81	436,826,940	83	480,509,634	85	528,560,597	85	1,843,012,571	Biro Organisasi
4	05	07	Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat daerah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	75	79	1,695,000,000	81	1,864,500,000	83	2,050,950,000	85	2,256,045,000	85	7,866,495,000	Biro Organisasi
4	05	08	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	75	79	1,405,000,000	81	1,545,500,000	83	1,700,050,000	85	1,870,055,000	85	6,520,605,000	Biro Organisasi
4	05	09	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81	21,508,932,000	82	23,659,827,000	83	26,025,811,000	84	28,628,392,000	84	99,822,962,000	Biro Umum
4	05	10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks kepuasan pelayanan pengelola keuangan setda	100	100	1,439,721,000	100	1,576,693,000	100	1,734,362,300	100	1,907,798,530	100	6,658,574,830	Biro Umum
4	05	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100	100	8,030,000,000	100	8,833,000,000	100	9,716,300,000	100	10,687,930,000	100	37,267,230,000	Biro Umum
4	05	12	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81.5	3,500,500,000	82	4,493,000,000	82.5	4,723,200,000	83	4,961,870,000	83	17,678,570,000	Biro Humas dan Protokol
4	05	13	Peningkatan pelayanan Keprotokolkan	Indeks kepuasan pimpinan dan tamu VIP/VVIP terhadap pelayanan keprotokolkan	75	79	3,830,000,000	80	4,118,000,000	81	4,542,300,000	82	5,006,530,000	82	17,496,830,000	Biro Humas dan Protokol
4	05	14	Peningkatan Layanan Informasi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	75	79	4,400,000,000	80	4,475,000,000	81	4,650,000,000	82	4,825,000,000	82	18,350,000,000	Biro Humas dan Protokol

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
4	05	15	Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Jumlah Informasi yang diberitakan media	3,151	4,850	12,550,000,000	4,950	12,785,000,000	5,050	12,950,000,000	5,150	13,450,000,000	5,150	51,735,000,000	Biro Humas dan Protokol
4	05	16	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	100	6,570,177,000	100	7,227,217,272	100	7,945,098,939	100	8,739,608,632	100	30,482,101,843	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	05	17	Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100	100	7,506,978,297	100	7,927,676,127	100	8,720,443,740	100	9,592,488,114	100	33,747,586,278	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	05	18	Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Indeks pelayanan pengadaan barang/jasa	100	100	947,573,000	100	1,042,330,300	100	1,146,563,330	100	1,261,219,663	100	4,397,686,293	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	05	19	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Level Kematangan Kelembagaan UKPBJ	Level 3	Level 4	1,804,389,100	Level 4	2,314,828,010	Level 4	2,546,310,811	Level 5	2,800,941,892	Level 5	9,466,469,813	Biro Administrasi Barang/Jasa
4	05	20	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81.5	881,446,100	82	969,590,710	82.5	1,066,549,781	83	1,173,204,759	83	4,090,791,350	Biro Hukum dan HAM
4	05	21	Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah	100	100	3,743,656,595	100	4,118,022,254.5	100	4,529,824,479.95	100	4,982,806,927.95	100	17,374,310,257	Biro Hukum dan HAM
4	05	22	Pengembangan Produk Hukum	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum	20	20	996,000,000	20	1,095,600,000	20	1,205,160,000	20	1,325,676,000	100	4,622,436,000	Biro Hukum dan HAM
4	05	23	Bantuan Hukum dan HAM	Persentase pelayanan permasalahan hukum dan HAM	20	20	2,636,238,332	20	2,899,862,165.20	20	3,189,848,381.72	20	3,508,833,219.89	100	12,234,782,099	Biro Hukum dan HAM
4	05	24	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.54	82.74	785,950,000	82.84	790,000,000	82.94	795,000,000	83	800,000,000	83	3,170,950,000	Biro Perekonomian
4	05	25	Pemberdayaan Perekonomian	Jumlah LPD yang Sehat	865	889	200,000,000	901	225,000,000	913	250,000,000	923	275,000,000	923	950,000,000	Biro Perekonomian
4	05	26	Pengembangan Produksi Daerah	Jumlah Kebijakan Produksi Daerah	N/A	4	1,250,000,000	4	750,000,000	4	800,000,000	4	1,250,000,000	16	4,050,000,000	Biro Perekonomian
4	05	27	Pengembangan Industri Pariwisata dan Perhubungan	Jumlah kebijakan di bidang industri pariwisata dan perhubungan	N/A	2	400,000,000	2	450,000,000	2	475,000,000	2	500,000,000	8	1,825,000,000	Biro Perekonomian
4	05	28	Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	N/A	100	500,000,000	100	525,000,000	100	550,000,000	100	575,000,000	100	2,150,000,000	Biro Perekonomian
4	05	29	Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5	5	15,250,000,000	6	20,300,000,000	7	25,350,000,000	8	25,400,000,000	8	86,300,000,000	Biro Perekonomian
4	05	30	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	100	1,351,950,000	100	1,390,000,000	100	1,434,550,000	100	1,491,250,000	100	5,667,750,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	05	31	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Atma Kerthi	Indeks kepuasan pelayanan atma kerthi	N/A	74	15,850,000,000	76	16,350,000,000	78	16,850,000,000	80	17,350,000,000	80	66,400,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	05	32	Peningkatan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar	Persentase Capaian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar	N/A	95	790,000,000	95	845,000,000	95	900,000,000	95	950,000,000	95	3,485,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	05	33	Peningkatan Kesejahteraan Pelayanan Dasar	Prosentase Capaian Kesejahteraan Pelayanan Dasar	N/A	90	6,800,000,000	90	7,300,000,000	90	7,800,000,000	90	7,800,000,000	90	29,700,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	05	34	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81.5	629,039,858	82	691,943,844	82.5	761,138,228	83	837,252,051	83	2,919,373,981	Biro Administrasi Pembangunan
4	05	35	Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	50	65	325,385,315	76	357,923,847	87	393,716,231	100	433,087,855	100	1,510,113,248	Biro Administrasi Pembangunan
4	05	36	Peningkatan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50	65	318,439,458	76	350,283,404	87	385,311,744	100	423,842,919	100	1,477,877,525	Biro Administrasi Pembangunan
4	05	37	Pelayanan Aparatur	Persentase laporan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50	65	480,495,858	76	528,545,443	87	581,399,988	100	639,539,986	100	2,229,981,275	Biro Administrasi Pembangunan
4	06		<b>Inspektorat</b>													
4	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	85	5,110,000,000	90	5,930,000,000	90	6,000,000,000	90	6,200,000,000	90	23,240,000,000	Inspektorat
4	06	02	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Dengan Baik	75	79	1,075,000,000	81	1,250,000,000	83	900,000,000	85	950,000,000	85	4,175,000,000	Inspektorat

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
4	06	03	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level APIP	3	3	1,000,000,000	3	1,100,000,000	3	1,500,000,000	3	1,800,000,000	3	5,400,000,000	Inspektorat
4	06	04	Peningkatan Maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3	3	4,970,000,000	3	5,545,000,000	4	3,000,000,000	4	3,200,000,000	4	16,715,000,000	Inspektorat
<b>4</b>	<b>07</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri</b>														
4	07	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81	2,058,000,000	82	2,058,000,000	83	2,058,000,000	84	2,058,000,000	84	8,232,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	02	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	77.5	77.5	900,000,000	78.0	1,100,000,000	78.0	1,250,000,000	78.0	1,450,000,000	78.0	4,700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	03	Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan	100	16.6	800,000,000	16.6	1,000,000,000	16.6	1,200,000,000	16.6	1,400,000,000	100	4,400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	07	04	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	33.3	66.6	1,600,000,000	77.0	1,800,000,000	88.0	2,000,000,000	100.0	2,000,000,000	100	7,400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>4</b>	<b>08</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>														
4	08	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	83	20,857,605,976	84	22,491,311,437	85	40,470,248,700	86	44,517,273,570	86	128,336,439,683	Sekretariat DPRD
4	08	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali	82	5	142,590,256,242	5	122,855,688,561	5	126,000,655,028	5	132,300,687,780	100	523,747,287,611	Sekretariat DPRD
4	08	03	Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	87	3	11,626,364,000	3	11,363,000,000	3	12,499,300,000	3	13,749,230,000	100	49,237,894,000	Sekretariat DPRD
<b>4</b>	<b>09</b>	<b>Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>														
4	09	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	85.8	3,000,000,000	87.2	3,000,000,000	88.6	3,000,000,000	90	3,000,000,000	90	12,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	09	02	Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	Persentase perencanaan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	100	100	6,600,000,000	100	7,260,000,000	100	7,986,000,000	100	8,784,600,000	100	30,630,600,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	09	03	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	100	100	6,600,000,000	100	7,260,000,000	100	7,986,000,000	100	8,784,600,000	100	30,630,600,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	09	04	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	100	100	1,870,000,000.00	100	2,057,000,000.00	100	2,262,700,000.00	100	2,488,970,000.00	100	8,678,670,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4	09	05	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	87	16,715,364,073.00	88	18,854,400,479.00	88	20,225,591,529.00	88	22,762,399,580.00	88	78,557,755,661	Badan Pendapatan Daerah
4	09	06	Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan pendapatan daerah tepat waktu	-	91	1,258,500,000	92	1,283,670,000	93	1,309,343,400	94	1,335,530,268	94	5,187,043,668	Badan Pendapatan Daerah
4	09	07	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	57.55	57.94	2,077,144,850	58.24	2,274,211,291	58.58	2,490,771,415	58.93	2,728,770,330	58.93	9,570,897,886	Badan Pendapatan Daerah
4	09	08	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Samsat dan Inovasi Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	-	91	1,305,865,000	92	1,436,451,500	93	1,580,096,650	94	1,738,106,315	94	6,060,519,465	Badan Pendapatan Daerah
4	09	09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (1)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77	4,003,818,575	77.50	4,404,200,432	78	4,844,611,477	78.50	5,329,082,522	78.50	18,581,713,006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (1)	-	1		1		1		1		1		
4	09	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77.00	1,602,993,207.00	77.50	1,763,292,529.00	78.00	1,939,621,781.00	78.50	2,133,583,958.00	78.50	7,439,491,475.00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (2)	-	90		90		90		90		90		
4	09	11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (3)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77.00	2,170,793,394.00	77.50	2,387,872,734.00	78.00	2,626,660,007.00	78.50	2,889,326,008.00	78.50	10,074,652,143.00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (3)	-	90		90		90		90		90		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
4	09	12	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (4)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77.00	3,892,627,886.00	77.50	4,281,890,675.00	78.00	4,710,079,743.00	78.50	5,181,087,716.00	78.50	18,065,686,020.00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (4)	--	90		90		90		90		90		
4	09	13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (5)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77.00	4,359,801,813.00	77.50	4,795,781,993.00	78.00	5,275,360,192.00	78.50	5,802,896,212.00	78.50	20,233,840,210.00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Denpasar
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (5)	--	90		90		90		90		90		
4	09	14	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (6)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77.00	3,039,517,303.00	77.50	3,343,469,032.00	78.00	3,677,815,937.00	78.50	4,045,597,529.00	78.50	14,106,399,801.00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (6)	--	90		90		90		90		90		
4	09	15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (7)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77.00	1,964,290,060.00	77.50	2,149,719,067.00	78.00	2,364,690,974.00	78.50	2,601,160,073.00	78.50	9,079,860,174.00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (7)	--	90		90		90		90		90		
4	09	16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (8)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77.00	2,296,569,333.00	77.50	2,526,226,267.00	78.00	2,778,848,893.00	78.50	3,056,733,781.00	78.50	10,658,378,274.00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (8)	--	90		90		90		90		90		
4	09	17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (9)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	76.25	77.00	1,655,786,921.00	77.50	1,821,365,611.00	78.00	2,003,502,173.00	78.50	2,203,852,389.00	78.50	7,684,507,094.00	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem
				Persentase Capaian Pad terhadap Target PAD (UPTD) (9)	--	90		90		90		90		90		
4	10		<b>Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah</b>													
4	10	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	74	80	66,820,000,000	83	3,640,000,000	86	3,502,000,000	89	3,651,000,000	89	77,613,000,000	Badan Penghubung
4	10	02	Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	60	75	1,630,000,000	80	1,725,000,000	85	1,890,000,000	90	1,975,000,000	90	7,220,000,000	Badan Penghubung
				Jumlah per tahun			2,954,226,202,523		2,993,778,783,512		3,062,685,423,552		3,247,798,221,291			

Tabel 7.2C  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>																		
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88,87	83,75	195,793,907,843	80,90	200,544,759,500	88,9	1,606,812,844,576	81,00	891,094,243,466	81,25	916,786,469,828	81,25	3,811,032,225,213	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	73,15	73,21	81,862,163,059	82,51	91,136,128,947	100,00	314,418,395,115	100,00	317,588,560,170	100,00	320,347,905,537	100,00	1,125,353,152,828	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	-	52,73	92,804,144,889	47,96	104,706,643,902	46,50	290,407,896,006	47,00	264,159,362,318	47,50	280,643,714,074	47,50	1,032,721,761,189	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	15,14	43,46	33,313,420,869	43,73	39,715,566,105	35,35	26,193,104,294	35,45	24,797,950,150	35,55	26,474,086,356	35,55	150,494,127,774	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	29,85	-	0	-	0	45,00	839,940,195	50,00	813,016,810	75,00	2,339,046,500	75,00	3,992,003,505	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	-	-	0	-	0	50,87	274,997,750	51,37	233,380,850	51,87	209,722,900	51,87	718,101,500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	84,00	82,00	1,063,517,200	85,99	347,885,970	85,50	299,999,230	86,00	29,048,850	86,50	62,263,900	86,50	1,802,715,150	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Nilai rata-rata bahasa bali pada satuan pendidikan	-	-	0	-	0	69,80	25,783,796,176	70,00	25,006,696,366	70,20	79,140,400	70,20	50,869,632,942	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						<b>404,837,153,860</b>		<b>436,450,984,424</b>		<b>2,265,030,973,342</b>		<b>1,523,722,258,980</b>		<b>1,546,942,349,495</b>		<b>6,176,983,720,101</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																		
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,46	87,66	94,368,499,897	87,66	76,213,174,571	81	220,313,582,461	81	259,947,431,054	81	295,071,218,113	81	945,913,906,097	Dinas Kesehatan
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	79	80	124,108,208,254	80,5	155,672,247,114	81	143,500,000,000	81	175,898,908,740	81	207,854,508,933	81	807,033,873,041	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	0	19%	211,860,440	60%	62,564,100	60%	230,332,210	60%	34,422,800	70%	153,431,960	70%	692,611,510	Dinas Kesehatan
				Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani	100%	100%	20,180,991,832	100%	14,654,023,578	100%	38,637,821,358	100%	23,742,713,046	100%	29,079,366,291	100%	126,294,916,105	Dinas Kesehatan
				Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	85%	87%	281,979,472,916	87%	148,205,047,912	87%	34,101,104,121	87%	16,564,940,308	87%	177,733,628,801	87%	658,584,194,058	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	49%	37,5%	8,160,329,892	47,5%	18,485,575,130	60%	25,563,509,552	60%	32,777,513,792	62%	13,955,010	62%	85,000,883,376	Dinas Kesehatan
				Persentase kelulusan peserta pelatihan Tenaga Kesehatan	100%	100%	5,721,748,881	100%	244,952,850	100%	1,072,631,018	100%	0	100%	713,961,910	100%	7,753,294,659	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	85%	83,75%	10,077,166,943	80%	4,672,067,375	79%	479,053,780	81%	0	83%	108,875,200	83%	15,337,163,298	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	0	11,11%	3,415,385,317	11,11%	790,723,748	44%	2,718,397,154	44%	94,560,000	56%	147,500,000	56%	7,166,566,219	Dinas Kesehatan
						<b>548,223,664,372</b>		<b>419,000,376,378</b>		<b>466,616,431,654</b>		<b>509,060,489,740</b>		<b>710,876,446,218</b>		<b>2,653,777,408,362</b>		
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																		
1	03	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	70	6,046,071,820	80	3,567,394,314	80	28,283,993,995	85	25,862,222,135	85	27,155,333,242	85	90,915,015,506	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	-	-	0	-	0	80	2,829,244,114	85	2,901,869,938	85	3,046,963,435	85	8,778,077,487	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah	-	-	0	-	0	80	2,001,096,643	85	1,715,343,100	85	1,801,110,255	85	5,517,549,998	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum	-	-	0	-	0	80	1,733,257,800	85	1,505,775,583	85	1,581,064,362	85	4,820,097,745	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	72%	73,99%	8,632,994,036	75,55%	7,239,439,496	76,8%	14,230,395,032	77,96%	10,811,499,500	80,27%	11,352,074,475	80,27%	52,266,402,539	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	47,50%	57,46%	2,306,415,902	62,47%	48,342,007,150	58,06%	61,146,114,606	48,33%	2,901,101,400	48,50%	3,046,156,470	48,50%	117,741,795,528	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		Target (15)	Rp (16)
1 03 03	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100%	100%	26,683,960,097	89,81%	31,207,623,567	100%	32,673,863,140	-	0	-	0	100%	90,565,446,804	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupatere/kota	-	-	0	-	0	-	0	41%	33,347,185,888	43%	35,014,545,182	43%	68,361,731,070	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	-	-	0	-	0	90%	46,098,723,490	92%	6,080,840,047	93%	6,384,882,049	93%	58,564,445,586	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 05	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	100%	100%	16,703,799,327	100%	13,265,804,266	100%	12,161,000,000	100%	11,148,098,400	100%	11,705,503,320	100%	64,984,205,313	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	-	-	0	-	0	89.00%	1,898,518,800	89,79%	924,603,034	89,95%	970,833,186	89,95%	3,793,955,020	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 09	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	58%	60%	59,125,765	56,31%	152,973,729,408	68%	1,884,568,630,688	72.00%	427,410,477,402	74%	448,781,001,272	74%	2,913,792,964,535	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 10	Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	80,81%	82,66%	178,286,769,069	78,25%	142,940,586,473	77,98%	95,247,073,347	76,89%	290,224,682,184	78,67%	304,735,916,293	78,67%	1,011,435,027,366	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 11	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	70%	16,5%	1,112,079,018	20%	378,387,328	20%	1,826,651,442	16,51%	998,151,682	19,64%	1,048,059,266	19,64%	5,363,328,737	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100%	100%	1,775,578,163	100%	838,318,452	100%	1,853,793,276	90%	2,359,864,416	95%	2,477,857,637	95%	9,305,411,944	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 12	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	90%	100%	1,796,170,594	100%	1,011,671,910	93%	1,700,686,923	94%	1,173,557,688	95%	1,232,235,572	95%	6,914,322,688	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					<b>243,402,963,792</b>		<b>401,764,962,364</b>		<b>2,188,253,043,296</b>		<b>819,365,272,397</b>		<b>860,333,536,017</b>		<b>4,513,119,777,866</b>	
<b>1 04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>															
1 04 02	Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	-	-	0	4	200,812,200	20	54,177,123,364	-	0	-	0	20	54,377,935,564	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	-	-	0	-	0	-	0	70%	1,056,670,806	71%	822,862,806	71%	1,879,533,612	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 05	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	8,2%	7,7%	772,665,760	2,28 %	1,021,453,400	8%	797,921,210	8.00%	372,454,988	6,62%	685,805,088	6,62%	3,650,300,446	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
					<b>772,665,760</b>		<b>1,222,265,600</b>		<b>54,975,044,574</b>		<b>1,429,125,794</b>		<b>1,508,667,894</b>		<b>59,907,769,622</b>	
<b>1 05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>															
1 05 01	Program Pemungutan Pajak Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81,89	3,120,193,536	-	2,658,275,572	82	27,211,326,085	82,5	23,615,378,239	83	22,286,136,555	83	78,891,309,987	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	543	100%	869,815,344	100%	207,316,456	100%	426,664,816	100%	168,518,816	100%	168,518,596	100%	1,840,834,028	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Kapasitas SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya	100	20%	315,691,380	4,5%	161,387,012	20%	277,789,496	-	0	-	0	-	754,867,888	Satuan Polisi Pamong Praja
		Rasio Linmas	1,5	29,83	597,153,500	29,83	54,546,356	30,11	174,952,896	-	0	-	0	-	826,652,752	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	247	235	17,766,256,498	225	18,396,719,919	215	20,100,262,429	-	0	-	0	-	56,263,238,846	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	-	-	0	-	0	-	0	100%	17,633,206,358	100%	20,343,574,048	100%	37,976,780,406	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		Target (15)	Rp (16)		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.93%	83.35%	3,579,077,624	83.35%	2,650,392,910	82.93%	12,984,714,319	82.93%	10,822,538,802	82.93%	13,738,297,976	82.93%	43,775,021,631	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	0	-	0	82.93%	5,276,598,265	82.93%	8,123,560,905	82.93%	3,963,612,588	82.93%	17,363,771,758	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang di tingkatkan dalam Menghadapi Bencana	95%	20%	1,308,820,536	40%	197,166,783	60%	1,600,000,000	0%	0	80%	28,364,000	80%	3,134,351,319	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%	997,888,239	100%	278,613,270	100%	696,859,600	0%	0	0%	0	100%	1,973,361,109	
				Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	393,129,200	100%	326,187,000	100%	268,229,810	0%	0	0%	0	100%	987,546,010	
				Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	100%	100%	10,555,415,826	100%	9,018,563,960	100%	6,489,679,971	100%	1,971,491,900	100%	1,972,017,200	100%	30,007,168,857	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							<b>39,503,441,683</b>		<b>33,949,169,238</b>		<b>75,507,077,687</b>		<b>62,334,695,020</b>		<b>62,500,520,963</b>		<b>273,794,904,591</b>	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																
1	06	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	A	1,929,661,908	A	3,014,955,638	A	22,893,734,981	A	25,300,596,484	A	23,246,767,620	A	76,385,716,631	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	02	Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10.26%	2.03	298,447,000	1.37%	174,067,280	22.57%	214,599,670	8.22%	42,150,165	8.22%	42,149,700	8.22%	771,413,815	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	03	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0	0%	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	16.87%	9.58%	1,007,887,616	8.87%	433,855,800	21.87%	2,027,203,470	17.91%	4,650,332,465	17.91%	2,470,381,168	17.91%	10,589,660,519	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	1	0.00	0	0.00	2,026,000	31.03%	102,666,600	34.48%	42,249,870	0.06	7,249,500	0.06	154,191,970	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	05	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang terdata dan termonev	1 laporan	1 laporan	66,250,000	1 laporan	1,384,500	1 laporan	51,806,160	100%	3,805,370	100%	3,805,200	100%	127,051,230	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	06	Penanganan Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	14.78%	14.78%	397,200,000	13.46%	1,955,400	20.62%	380,949,755	100%	255,939,600	100%	255,937,800	100%	1,291,982,555	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	07	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang terpelihara	-	-	0	-	0	-	0	100%	127,164,000	100%	127,163,800	100%	254,327,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
							<b>3,699,446,524</b>		<b>3,628,244,618</b>		<b>25,670,960,636</b>		<b>30,422,237,954</b>		<b>26,153,454,788</b>		<b>89,574,344,520</b>	
<b>2</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA</b>																
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	83.64	3,866,245,478	86.54	2,856,993,163	82	29,619,005,145	82.5	29,992,073,879	83	29,383,362,352	83	95,717,680,017	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	34.75	43.99	3,914,345,550	47.93	196,378,600	49.26	149,999,740	0	0	55.21	24,997,600	55.21	4,285,721,490	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	51.56	63.06	2,774,060,510	10.8	598,506,219	30	199,999,880	30	125,150,500	30	125,150,500	30	3,822,867,609	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	9,638	6,918	1,022,201,558	4,380	26,037,750	5,200	100,000,000	0	0	5,950	3,000,000	22,448	1,151,239,308	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	0	0	0	0	4,189,700	1	99,999,700	4	179,010,100	4	173,010,100	9	456,209,600	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan dan penyelesaian PHI	100	100	0	100	0	0	0	0	0	100	16,220,100	100	16,220,100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	4.74	5.23	530,656,159	5.72	73,550,400	6.22	149,999,600	6.71	27,500,000	7.2	11,279,900	7.2	792,986,059	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase perusahaan yang menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	100	100	281,100,000	10	356,565,000	100	156,070,600	100	151,000,000	100	138,248,002	100	1,082,983,602	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
							<b>12,388,609,255</b>		<b>4,112,220,832</b>		<b>30,475,074,665</b>		<b>30,474,734,479</b>		<b>29,875,268,554</b>		<b>107,325,907,785</b>	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																
2	08	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A	A	2,249,263,907	-	0	A	2,306,895,304	A	3,662,448,147	A	510,113,192	A	8,728,720,550	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target	Rp
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		(15)	(16)
2 08 02	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98.45%	98.85%	661,442,530	67.29%	47,322,800	98.7%	44,328,400	98.75%	11,100,100	98.8%	11,100,100	98.8%	775,293,930	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 03	Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100%	100%	374,930,930	100%	210,827,300	100%	602,506,800	100%	381,834,000	100%	6,831,000	100%	1,576,930,030	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 04	Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	75%	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 05	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data Gender dan Anak dalam Pembangunan Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	72%	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 06	Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya	22%	55.56	885,906,875	100%	751,473,300	100%	658,000,000	100%	653,101,000	100%	653,100,500	100%	3,601,581,675	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 07	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang tertangani Sesuai dengan Standar	-	-	0	-	0	100%	85,272,000	100%	76,806,000	0%	0	100%	162,078,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
						<b>4,171,544,242</b>		<b>1,009,623,400</b>		<b>3,697,002,504</b>		<b>4,785,289,247</b>		<b>1,181,144,792</b>		<b>14,844,604,185</b>
<b>2 09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>															
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Peningkatan Distribusi Pangan	<10%	<10%	2,269,108,321	55 Ton	556,049,468	70 Ton	170,011,392	-	-	-	-	70 Ton	2,995,169,181	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Agribisnis Peternakan Yang Baik	27 Kelompok	35 Klp	497,683,243	35 Klp	149,183,699	35 Klp	422,270,880	-	-	-	-	35 Klp	1,069,137,822	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	3,73 Persen	293,645,438	4,1 Persen	308,327,710	4,1 Persen	601,973,148	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,647 kkal/kapita/hari	2,650 kkal/kapita/hari	310,406,833	2,648 kkal/kapita/hari	93,486,511	2,649 kkal/kapita/hari	377,296,832	2,440 kkal/kapita/hari	523,099,224	2,460 kkal/kapita/hari	549,254,185	2,460 kkal/kapita/hari	1,853,543,585	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	95.6	95.6	1,105,262,437	95.7	348,033,519	95.8	188,732,592	-	-	-	-	95.8	1,642,028,548	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	-	-	-	-	-	-	-	82 persen	358,701,184	83 persen	376,636,243	83 persen	735,337,427	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	8,47 Persen	8,47 Persen	165,825,152	22 Persen	247,070,416	27 persen	574,669,982	3 persen	760,959,222	4 persen	799,007,183	4 persen	2,547,531,955	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 27 01	Program Pemungjung Urusan Pemerintahan Dsarah Provinsi	Nilai Bvahuasi Manajemen Kinerja	-	-	0	-	0	83	367,228,740	84	725,784,974	85	762,074,223	85	1,855,087,937	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						<b>4,348,285,986</b>		<b>1,393,823,613</b>		<b>2,100,210,418</b>		<b>2,662,190,042</b>		<b>2,795,299,544</b>		<b>13,299,809,603</b>
<b>2 10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>															
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase data informasi pertanahan yang handal	5%	5%	49,600,000	15%	7,600,000	30%	388,089,940	40%	162,888,950	50%	162,888,950	50%	771,067,840	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
						<b>49,600,000</b>		<b>7,600,000</b>		<b>388,089,940</b>		<b>162,888,950</b>		<b>162,888,950</b>		<b>771,067,840</b>
<b>2 11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>															
2 11 01	Program Pemungjung Urusan Pemerintahan Dsarah Provinsi	Nilai Bvahuasi Manajemen Kinerja	75	76	1,641,191,105	77	94,797,666	78	2,254,743,974	79	2,047,000,772	80	363,296,440	80	6,401,029,957	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
					1,392,011,388		4,849,080,749		2,537,080,554		2,284,106,588		530,423,088		11,592,702,367	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	-	-	0	-	0	-	0	100%	209,579,144	100%	172,102,696	100%	381,681,840	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah danau dalam kondisi baik kuantitas (volume air danau) dan kualitas (status mutu air)	4 danau	4 danau	0	4 danau	19,770,000	4 danau	0	4 danau	0	4 danau	45,838,400	4 danau	65,608,400	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	7.21%	6.64%	272,902,620	0.00%	95,585,966	5.47%	49,999,800	4.87%	28,292,800	4.31%	0	4.31%	446,781,186	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	90%	90%	269,124,193	91%	117,177,249	92%	237,429,344	93%	0	94%	0	94%	623,730,786	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pph)	Persentase Ketaatan terhadap ijin lingkungan	100%	100%	185,306,029	48%	122,574,166	65%	312,429,344	75%	0	90%	0	90%	620,309,539	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	18%	17.60%	175,742,410	11.38%	217,359,949	24%	349,905,612	26%	209,890,467	27%	192,344,292	27%	1,145,242,730	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	73%	54.74%		51.73%		74%		73%		72%		72%		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Target (15)	Rp (16)	
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)				
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	0	-	0	-	0	0%	0	100%	0	100%	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengadilan Lingkungan Hidup	-	-	0	-	0	-	0	0%	0	100%	0	100%	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	100%	100%	2,638,259,956	100%	4,853,834,229	100%	12,464,640,258	100%	4,198,738,856	100%	2,259,207,396	100%	26,414,680,695	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
						<b>6,574,537,701</b>		<b>10,370,179,974</b>		<b>18,206,228,886</b>		<b>8,977,608,627</b>		<b>3,563,212,312</b>		<b>47,691,767,500</b>	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>															
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	88.89	88.89%	788,634,730	88.89%	345,823,710	100%	849,544,296	100%	173,673,414	100%	186,673,244	100%	2,344,349,394	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	88.89	35.15%	448,760,080	112.5%	162,277,434	100%	689,780,344	100%	133,195,744	100%	140,195,744	100%	1,574,209,346	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						<b>1,237,394,810</b>		<b>508,101,144</b>		<b>1,539,324,640</b>		<b>306,869,158</b>		<b>326,868,988</b>		<b>3,918,558,740</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>															
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	81,88 Nilai	80,14 Nilai	3,296,791,469	-	2,916,241,394	82,6 Nilai	14,567,784,778	82,65 Nilai	15,402,711,807	82,65 Nilai	13,262,110,811	82,65 Nilai	49,445,640,259	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	-	-	0	-	0	25 Desa	224,952,706	25 Desa	114,915,006	25 Desa	125,732,196	75 Desa	465,599,908	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	31.13	46.70%	2,043,270,351	46.70%	416,422,294	58.01%	1,308,247,124	66.98%	727,309,784	75.94%	953,309,784	75.94%	5,448,559,337	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	73.58	90.14%	9,074,664,784	92.92%	6,010,197,177	89.62%	8,235,496,554	-	5,037,683,662	-	9,414,074,512	-	37,772,116,689	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	60	65%		68%		75%							Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	100%	100%		100%		100%							Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						<b>14,414,726,604</b>		<b>9,342,860,865</b>		<b>24,336,481,162</b>		<b>21,282,620,259</b>		<b>23,755,227,303</b>		<b>93,131,916,193</b>	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>															
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	2 Sektor	266,595,695	0	159,820,006	15 Sektor	537,381,575	7 Sektor	349,495,851	7 Sektor	603,495,336	31 Sektor	1,916,788,463	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						<b>266,595,695</b>		<b>159,820,006</b>		<b>537,381,575</b>		<b>349,495,851</b>		<b>603,495,336</b>		<b>1,916,788,463</b>	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>															
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	83.99	83.63	2,877,360,716	-	2,250,206,077	83.55	15,629,584,200	83.99	13,713,727,414	84	13,937,249,768	84	48,408,128,175	Dinas Perhubungan
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.99	83.63	241,698,300	-	189,017,310	83.55	2,013,839,032	83.99	1,767,085,565	84	1,767,085,565	84	5,978,725,772	Dinas Perhubungan
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.99	83.63	202,566,194	-	158,414,507	83.55	1,660,871,768	83.99	1,621,048,274	84	1,621,048,274	84	5,263,949,017	Dinas Perhubungan
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.99	83.63	276,226,629	-	216,019,783	83.55	2,340,152,760	83.99	1,900,994,355	84	1,900,994,355	84	6,634,387,882	Dinas Perhubungan
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.99	83.63	234,217,162	-	183,166,775	83.55	1,931,800,046	83.99	1,686,389,492	84	1,686,389,492	84	5,721,962,967	Dinas Perhubungan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		Target (15)	Rp (16)		
2	15	05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	9	1,404,260,520	9	1,855,910,000	10	637,344,840	-	0	-	0	10	3,897,515,360	Dinas Perhubungan	
				Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan	-	0	0	0	0	50	217,150,340	50	1,779,625,888	100	1,996,776,228	Dinas Perhubungan		
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	50%	674,969,144	100%	1,311,339,573	100%	799,813,758	-	0	-	0	100%	2,786,122,475	Dinas Perhubungan	
				Rasio konektivitas layanan angkutan	-	0	0	0	0	0.78	1,222,797,596	0.84	3,463,564,188	0.84	4,686,361,784	Dinas Perhubungan		
				Tingkat Pelayanan Sempang	C	752,650,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	1,956,700,000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	774,689,960	-	0	-	0	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	3,484,039,960	Dinas Perhubungan	
				Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	-	0	0	0	0	66.35	511,848,468	72.51	1,685,999,728	72.51	2,197,848,196	Dinas Perhubungan		
				Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali.	N/A	72.07	5,990,059,229	73	5,880,449,401	70	3,640,000,000	75	3,586,802,200	79	3,979,999,540	79	23,077,310,370	Dinas Perhubungan
				Tingkat Pelayanan ruas jalan	C	1,322,051,728	C (kecepatan rata-rata 60km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	2,955,067,142	C (kecepatan rata-rata 60km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	1,379,255,462	-	0	-	0	C (kecepatan rata-rata 60km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)	5,656,374,332	Dinas Perhubungan	
				Persentase pencapaian waktu tempuh 2.5 jam /100km dari KSP menuju jalan nasional	-	0	0	0	0	50	550,985,860	65	3,806,192,449	65	4,357,178,309	Dinas Perhubungan		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	40	1,607,860,520	100	825,738,000	50	1,646,881,405	-	0	-	0	50	4,080,479,925	Dinas Perhubungan	
				Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	-	0	0	0	0	25	691,617,510	50	3,052,701,540	50	3,744,319,050	Dinas Perhubungan		
<b>2</b>	<b>16</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>15.583.920.142</b>		<b>17.782.028.568</b>		<b>32.454.233.231</b>		<b>27.470.447.074</b>		<b>38.680.850.787</b>		<b>131.971.479.802</b>		
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80.17	80.38	4,321,187,901	*)	4,591,356,533	81.50	20,612,041,759	82	18,871,637,282	82.50	19,815,219,146	82.50	68,211,442,621	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	68	85.87	2,653,011,807	92.20	20,624,758,604	92.50	18,597,363,279	93	15,846,130,310	93.20	16,638,436,826	93.20	74,359,700,826	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.22	1.35	7,912,424,098	1.72	8,953,141,482	2.18	12,504,269,221	2.52	116,737,802,736	3	272,574,692,872	3	418,682,330,409	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>2</b>	<b>17</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			<b>14.886.623.806</b>		<b>34.169.256.619</b>		<b>51.713.674.259</b>		<b>151.455.570.328</b>		<b>309.028.348.844</b>		<b>561.253.473.856</b>		
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.15	82.26	2,063,531,001	-	2,380,350,277	83	16,047,323,164	83,5	17,145,548,968	84	16,365,936,168	84	54,002,689,578	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	146.67	49.02	505,682,462	53.70	305,036,908	59.26	243,089,450	83,33	255,064,240	86,49	275,064,140	86,49	1,583,937,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas	44.32	67.84	368,001,166	55.66	200,748,399	61.32	209,952,106	-	0	74,06	49,999,800	74,06	828,701,471	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	-	0	0	0	72.22	127,476,198	78,89	118,552,896	87,22	118,552,496	87,22	364,581,590	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	2.35	0.99	5,856,773,248	0.25	3,766,889,434	0.25	3,392,755,626	0,24	3,844,528,896	0,30	4,073,007,696	0,30	20,933,954,900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi / koperasi temun / koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	1.45	2.60	394,330,798	2.54	144,824,549	3.08	583,089,605	3,08	468,864,290	3,13	327,995,940	3,13	1,919,105,182	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM yang bankable	0.02	0.03	924,792,710	0.05	501,750,080	0.06	601,178,890	0,12	609,048,900	0,13	639,917,950	0,13	3,276,688,530	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			<b>10.113.111.385</b>		<b>7.299.599.647</b>		<b>21.204.865.039</b>		<b>22.441.608.190</b>		<b>21.850.474.190</b>		<b>82.909.658.451</b>		
2	18	01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86	80.75	2,952,782,696	83,62	3,242,589,456	86,3	16,159,468,729	77	19,830,824,907	78	19,830,824,907	78	62,016,490,695	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi / Penanaman Modal di luar Sarbagita	38.28	7.88	114,849,770	19,66T	129,094,400	15,56	174,938,156	14	450,080,316	18	450,080,316	18	1,319,042,958	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	32.33	46,47	249,250,000	25.46	18,337,200	18.3	187,928,854	22,66	458,026,986	30,34	458,026,986	30,34	1,371,570,026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	88	88	30,992,000	89.55	8,080,000	90	530,542,200	91	792,840,792	92	792,840,792	92	2,155,295,784	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	99,020,230	92,98	15,517,200	87	1,065,693,824	87,5	1,047,798,138	88	1,047,798,138	88	3,275,827,530	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		Target (15)	Rp (16)
2 18 06	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100	100	200,000,000	100	225,000,000	100	0	100	178,381,096	100	178,381,096	100	781,762,192	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					<b>3,646,894,696</b>		<b>3,638,618,256</b>		<b>18,118,571,763</b>		<b>22,757,952,235</b>		<b>22,757,952,235</b>		<b>70,919,989,185</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>																
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	77	77,00	557,943,248	20,00	146,323,444	79,00	199,970,300	80,00	767,258,585	81,00	0	81,00	1,671,495,577	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	0,81	3,85	2,324,769,248	1,14	249,615,388	0,20	0	0,00	0	1,30	1,000,000,000	1,30	3,574,384,636	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat yang berolahraga	29	30	536,257,664	40	0	32	699,999,885	33	375,000,000	34	2,050,000,000	34	3,661,257,549	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Medali yang diperoleh Atlit pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	11	98	8,602,627,080	0	491,379,498	90	52,699,999,485	100	33,694,293,440	110	5,000,000,000	480	100,488,299,503	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif dalam Satuan Karya Pramuka	-	-	0	-	0	48,00	1,100,000,000	50,00	500,000,000	52,00	250,000,000	52,00	1,850,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					<b>12,021,597,240</b>		<b>887,318,330</b>		<b>54,699,969,670</b>		<b>35,336,552,025</b>		<b>8,300,000,000</b>		<b>111,245,437,265</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>																
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	613,455,850	100	305,270,321	100	446,271,968	100	486,822,218	100	511,163,329	100	2,362,983,686	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
					<b>613,455,850</b>		<b>305,270,321</b>		<b>446,271,968</b>		<b>486,822,218</b>		<b>511,163,329</b>		<b>2,362,983,686</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>																
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100	20	715,953,279	40	607,374,223	60	559,999,226	80	341,503,236	100	358,578,398	100	2,583,408,362	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
					<b>715,953,279</b>		<b>607,374,223</b>		<b>559,999,226</b>		<b>341,503,236</b>		<b>358,578,398</b>		<b>2,583,408,362</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>																
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	79	21,064,308,382	81,63	18,320,987,162	81	37,447,089,992	81	38,136,428,892	81	40,043,250,337	81	155,012,064,765	Dinas Kebudayaan
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5%	5%	1,718,805,727	4%	2,863,485,512	5%	13,952,177,324	5%	31,281,654,036	5%	32,845,736,738	24%	82,661,859,337	Dinas Kebudayaan
2 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5%	5%	20,059,050,341	3%	3,813,825,805	5%	14,244,670,242	5%	1,217,138,902	5%	1,277,995,847	23%	40,612,681,137	Dinas Kebudayaan
2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5%	5%	1,807,153,775	4%	553,908,016	5%	2,110,490,220	5%	336,500,000	5%	353,325,000	24%	5,161,377,011	Dinas Kebudayaan
2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	410	410	804,179,598	515	2,068,235,900	520	4,969,905,620	525	661,513,920	1,430	694,589,616	3,400	9,198,424,654	Dinas Kebudayaan
2 22 06	Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan masyarakat	75%	75%	2,900,000,000	75%	4,923,200,000	75%	3,186,390,505	75%	3,600,000,000	75%	3,780,000,000	75%	18,389,590,505	Dinas Kebudayaan
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	18,875,754,730	80	18,875,754,730	82	15,658,077,498	83	15,737,789,843	83	69,147,376,801	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2 22 09	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	N/A	N/A	N/A	99,87	462,462,204,748	99,87	462,462,204,748	99,87	462,348,807,702	100	466,288,950,348	100	1,853,562,167,546	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
		Persentase Subak berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	N/A	N/A	N/A	98,50	407,713,000	98,50	407,713,000	98,50	1,064,438,792	100	431,983,892	100	2,311,848,684	
					<b>48,353,497,823</b>		<b>514,289,314,873</b>		<b>557,656,396,381</b>		<b>554,304,559,742</b>		<b>561,453,621,621</b>		<b>2,236,057,390,439</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>																
2 23 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	N/A	N/A	82	1,403,601,681	83	16,731,816,331	0	0	0	0	0	18,135,418,012	Sekretariat Daerah
2 23 02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Tertangan dengan Baik	0%	0%	0	50%	0	51,00%	967,000,000	52,00%	444,857,938	53,00%	467,100,835	53,00%	1,878,958,773	Sekretariat Daerah
2 23 03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	16,500,000	0	0	0	0	0	16,500,000	Sekretariat Daerah
					<b>0</b>		<b>83</b>		<b>1,403,601,681</b>		<b>444,857,938</b>		<b>467,100,835</b>		<b>20,030,876,785</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>																
2 24 02	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Evaluasi Kearsipan	67	70	210,903,300	71	152,969,711	61	170,329,148	62	37,476,448	63	950,000,000	63	1,521,678,607	Sekretariat Daerah
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	25%	25%	194,968,020	35%	134,574,208	50%	202,382,458	75%	126,976,898	100%	1,225,000,000	100%	1,883,901,584	Sekretariat Daerah
					<b>405,871,320</b>		<b>287,543,919</b>		<b>372,711,606</b>		<b>164,453,346</b>		<b>2,175,000,000</b>		<b>3,405,580,191</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN</b>																
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																
3 25 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahandaerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	75	80	3,572,157,832	N/A	2,904,052,737	78,00	25,357,412,932	79	24,001,798,019	80	30,297,306,000	80	86,132,727,520	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		Target (15)	Rp (16)
3 25 02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	3 Kawasan	2 kawasan	950,460,428	3 Kawasan	213,604,956	3 Kawasan	306,206,596	4 kawasan	147,182,196	5 Kawasan	884,968,933	5 Kawasan	2,502,423,109	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	2 kawasan	1 kawasan	58,903,000	1 kawasan	574,594,458	3 kawasan	1,460,690,928	4 kawasan	1,146,253,500	5 kawasan	500,000,000	5 kawasan	3,740,441,886	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	97,157.6 Ton	95,841.73 Ton	130,926,100	95,973.24 ton	38,757,678	103,104.42 ton	187,475,168	105,166.51 ton	469,284,796	107,269.84 ton	1,581,752,539	107,269.84 ton	2,408,196,281	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap dipelabuhan	2 pelabuhan	1 Pelabuhan	60,641,838	1 Pelabuhan	59,903,720	2 pelabuhan	69,364,448	2 pelabuhan	0	2 pelabuhan	126,976,000	2 pelabuhan	316,886,006	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	17,535.7 Ton	16,410.75 ton	28,079,300	31,862.23 ton	42,960,678	18,609.02 Ton	59,475,148	18,981.2 Ton	0	19,360.82 Ton	1,476,076,125	19,360.82 Ton	1,606,591,251	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	1 komoditas (pembenihan Udang galah)	2 komoditas (Udang galah dan udang vaname)	1,020,456,721	2 komoditas (Udang galah dan udang vaname)	1,012,094,761	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	4,340,604,572	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	99,999,770	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	2,140,583,496	3 komoditas (Udang galah, udang vaname dan rumput laut)	8,613,739,320	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah pelaku usaha taat hukum	-	38 Pelaku Usaha	53,241,300	2 pelaku usaha	9,174,100	25 pelaku usaha	41,746,000	25 pelaku usaha	0	25 pelaku usaha	500,000,000	200 pelaku usaha	604,161,400	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasilperikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	134 SKP	277 SKP	252,723,870	242 SKP	48,671,678	149 SKP	153,571,178	149 SKP	125,386,916	151 SKP	290,000,000	151 SKP	870,353,642	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah sampel yang diuji	1,000 sampel	6,113 sampel	1,080,651,903	4,098 sampel	686,416,460	4,900 sampel	305,976,200	4,950 sampel	219,996,600	5,000 sampel	1,910,752,793	5,000 sampel	4,203,793,956	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				<b>7,208,242,292</b>		<b>5,590,231,226</b>		<b>32,282,523,170</b>		<b>26,209,901,797</b>		<b>39,708,415,886</b>		<b>110,999,314,371</b>	
3 26 01	Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	81.27	2,442,984,264	82.02	1,797,584,649	83	15,422,931,538	82	14,271,974,457	83	12,026,021,202	83	45,961,496,110	Dinas Pariwisata
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	17.53	-	0	-	0	2.56	429,877,089	3.85	2,077,500	5.13	41,138,200	11.54	473,092,789	Dinas Pariwisata
		Persentase Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	-	-	450,997,791	-	185,560,786	-	0	1	356,391,845	1	452,105,784	2	1,445,056,206	Dinas Pariwisata
3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	9.67	6.27	1,995,437,871	-66.43	413,556,156	-29.16	1,281,962,608	37.50	580,213,291	45.45	436,051,688	45.45	4,707,221,614	Dinas Pariwisata
3 26 04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	401,901,641	-	333,120,554	1	556,919,830	3	235,133,799	5	181,213,096	9	1,708,288,920	Dinas Pariwisata
3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat	-	-	1,087,248,374	-	187,597,167	43	1,213,837,894	44	514,559,014	45	483,354,984	45	3,486,597,433	Dinas Pariwisata
<b>3 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>6,378,569,941</b>		<b>2,917,419,312</b>		<b>18,905,528,959</b>		<b>15,960,349,906</b>		<b>13,619,884,954</b>		<b>57,781,753,072</b>	
3 27 01	Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81	6,433,800,752	82	4,198,356,385	83	65,486,031,324	84	58,328,124,860	85	61,244,531,103	85	195,690,844,424	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	76,95 Persen	76,95 Persen	647,394,171	77,45 Persen	370,782,551	77,95 Persen	10,324,905,642	90 Persen	362,608,292	90 Persen	380,738,707	90 Persen	12,086,429,363	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	59 Kwintal/Ha	1 Persen	1,813,315,142	1 Persen	574,202,893	1 Persen	4,553,685,296	1 persen	1,876,082,946	1 Persen	1,969,887,093	5 Persen	10,787,173,370	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Populasi Ternak	438.131 (satuian ternak)	623.915 (satuian ternak)	592,416,351	446.893 (satuian ternak)	196,592,622	455.831 (satuian ternak)	4,384,339,136	-	0	-	0	455.831 (satuian ternak)	5,173,348,109	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	-	-	0	-	0	-	0	0,8 persen	4,157,926,867	1 Persen	4,365,823,210	1 Persen	8,523,750,077	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Benih Bersertifikat yang Beredar dipasaran	Benih padi bersertifikat : 50 ha (20 unit)= 150 ton ; Benih hortikultura bersertifikat = 200 unit (70).	Benih padi bersertifikat : 50 ha (20 unit)= 150 ton ; Benih hortikultura bersertifikat = 200 unit (70).	937,302,745	75 Persen	802,046,292	80 persen	705,402,646	85 persen	693,004,696	90 persen	727,654,931	90 persen	3,865,411,310	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	6,1 ton benih padi, 1,8 ton benih palawija, 26 ton benih sayuran, 10.000 buah-buahan dan tanaman hias	6,1 ton benih padi, 1,8 ton benih palawija, 26 ton benih sayuran, 10.000 buah-buahan dan tanaman hias	3,028,838,505	77 Persen	1,196,150,506	78 persen	939,928,500	-	0	-	0	79 Persen	5,164,917,511	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	-	-	0	-	0	-	0	5 persen	1,127,113,210	5 persen	1,183,468,871	5 persen	2,310,582,081	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Unit Taman Gumi Banten Yang Produktif	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 ros/30.000 phn/1.500 btr/500.000 kg/580.000 ros/7.638.500 phn/240.000	1.000.000 biji/8.000 kg/50.000 ros/30.000 phn/1.500 btr/500.000 kg/580.000 ros/7.638.500 phn/240.000	2,888,302,998	1 Unit	2,081,313,022	1 Unit	2,492,534,282	-	0	-	0	1 Unit	7,462,150,302	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	-	-	0	-	0	-	0	1 Persen	2,797,491,922	1 Persen	2,937,366,518	2 Persen	5,734,858,440	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Produksi Semen (Dosis)	100,000 Dosis	106,955 Dosis	3,348,938,075	102,000 Dosis	2,110,130,744	103,000 dosis	1,016,240,913	-	0	-	0	103,000 dosis	6,475,309,732	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke						Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target (15)	Rp (16)			
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak	-	-	0	-	0	-	0	81 Persen	1,896,798,872	91 Persen	1,991,638,816	91 Persen	3,888,437,688	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Jumlah Bibit Yang Dikembangkan	N/A	N/A	0	8 Ekor Bibit Ternak dan 5.000 Bibit HPT	302,878,935	8 Ekor Bibit Ternak dan 5.000 Bibit HPT	690,240,928	-	0	-	0	-	993,119,863	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian Yang Dibangun dan Berproduksi	98,524 ton	98,524 ton	2,269,108,321	1 Unit	1,335,057,416	1 Komoditi	852,674,672	-	0	1 Komoditi	4,456,840,409	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	-	-	0	-	0	15 persen	936,817,188	15 persen	983,658,047	30 persen	1,920,475,235	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				Jumlah Kawasan Pertanian Organik Yang Produktif	1 unit, 1 paket, 1 paket ; 100 kelompok	1 unit, 1 paket, 1 paket ; 100 kelompok	4,645,177,244	1 Kawasan Hidroponik Perkotaan dan 1 kawasan pertanian organik	4,794,315,756	1 Kawasan	1,228,816,707	-	0	1 Kawasan	10,668,309,707	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	250 kasus rabies dan 6 kasus flu burung	230 kasus rabies dan 2 kasus flu burung	3,075,908,574	150 kasus rabies dan 5 kasus flu burung	775,578,420	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	373,293,264	-	0	100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung	4,224,780,258	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	-	-	0	-	0	5 persen	355,708,144	10 persen	373,493,551	10 persen	729,201,695	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	82.50	81.95	1,333,319,784	83.3	1,272,604,286	84.13 persen	718,287,512	84.97	712,022,782	85.81	747,623,921	85.81	4,783,858,285	
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	5 Persen	5 Persen	2,526,313,450	4,5 Persen	2,029,353,506	50 Persen	1,074,387,428	5 Persen	2,295,861,869	5 Persen	10,336,571,215	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	65 Kelompok	65 Kelompok	2,667,197,717	50 Persentase	1,221,835,209	50 Persen	757,051,907	5 Persen	0	5 Persen	4,646,084,833	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Bersertifikat	3 Orang, 57 Unit	3 Orang, 57 Unit	226,788,139	15 Kelompok	77,399,726	20 Kelompok	133,113,344	-	0	20 Kelompok	437,301,209	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
				Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	-	-	0	-	0	15 persen	120,903,344	16 persen	126,948,511	31 persen	247,851,855	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
							<b>36,434,121,968</b>		<b>23,338,598,269</b>		<b>95,730,933,501</b>		<b>75,660,464,992</b>		<b>310,607,606,972</b>			
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>																
3	28	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	76	1,188,280,546	77	2,189,293,735	78	19,875,183,378	79	14,744,184,959	80	38,792,050,546	80	76,788,993,164	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
							127,411,368		111,558,395		3,306,374,709		2,498,809,878		379,276,444		6,423,430,794	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
							161,553,464		251,315,478		5,238,581,716		4,448,647,083		420,278,250		10,520,375,991	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
							259,133,359		237,561,595		8,066,637,916		7,533,807,827		639,822,232		16,736,962,929	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
							322,381,899		321,666,719		6,773,548,940		6,626,026,571		770,919,720		14,814,543,849	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
							127,963,956		94,873,204		2,305,578,732		2,102,461,502		184,232,848		4,815,110,242	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	5.56%	4.11%	339,997,437	4.10%	31,330,800	3.67%	199,952,536	3.04%	122,507,686	2.41%	122,507,596	2.41%	816,296,055	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Barat	2.06%	1.52%	58,198,000	1.53%	3,468,500	1.36%	2,030,080,000	0.00%	0	0.89%	0	0.89%	2,091,746,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Selatan	0.58%	0.43%	29,409,200	0.45%	14,496,600	0.38%	1,248,654,000	0.31%	1,749,210,600	0.25%	0	0.25%	3,041,770,400	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Timur	0.88%	0.65%	35,877,300	0.63%	21,737,000	0.58%	1,358,400,000	0.48%	3,024,226,500	0.38%	0	0.38%	4,440,240,800	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Utara	2.04%	1.51%	58,037,200	1.49%	5,056,600	0.00%	0	0.00%	0	0.89%	0	0.89%	63,093,800	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase peningkatan kelestarian hutan konservasi mangrove Tahura Ngurah Rai	67.00%	70.50%	201,512,720	74.50%	20,301,275	79.50%	124,999,830	0.00%	0	5.40%	0	5.40%	346,813,825	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok	0.00%	0.00%	0	0.00%	2,529,100	0.00%	0	0.00%	0	11.27%	0	11.27%	2,529,100	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Barat	0.00%	0.56%	404,537,540	1.13%	66,364,000	1.69%	1,399,365,000	0.00%	0	2.82%	0	2.82%	1,870,266,540	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				Persentase peningkatan kelas kelompok wilayah UPTD KPH Bali Selatan	0.00%	0.56%	615,557,760	1.13%	1,059,100	0.00%	0	0.00%	0	2.82%	0	2.82%	616,616,860	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		Target (15)	Rp (16)		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	80.13	766,420,086	-	648,310,614	81	8,458,027,356	81.5	7,860,057,575	82	2,993,091,684	82	20,725,907,315	Sekretariat Daerah		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	80	9,962,477,600	81	13,003,588,650	82	8,599,334,642	83	0	83		85	31,565,400,892	Sekretariat Daerah		
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	N/A	843,470,292	75	1,737,619,492	76	7,369,036,965	77	7,029,593,778	78	8,300,000,000	78	25,279,720,527	Sekretariat Daerah		
4	01	02	Program Penataan organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	75%	77%	1,775,855,520	79%	179,593,200	81.00%	574,949,246	83.00%	271,872,406	85.00%	285,466,026	85.00%	3,087,736,398	Sekretariat Daerah
4	01	05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100%	100%	5,694,443,356	100%	4,052,359,969	100%	4,541,017,674	100%	3,802,769,888	100%	4,266,987,636	100%	22,357,578,523	Sekretariat Daerah
4	01	07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	70	75	9,051,430,046	80	8,508,818,671	85	7,742,061,400	90	2,016,673,950	95	511,646,000	95	27,830,630,067	Sekretariat Daerah
4	01	06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	-	100	273,930,956	100	368,460,386	100	523,334,786	100	80,223,260	100	557,324,000	100	1,803,273,388	Sekretariat Daerah
				Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5	4.25	514,873,784	5.78	126,406,719	5	437,429,224	5.5	152,593,450	6	71,752,000	6	1,303,055,177	Sekretariat Daerah
4	01	08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50	54	983,412,357	65	348,781,765	76	401,381,900	87	58,375,030	100	75,060,000	100	1,867,011,052	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	15	11	535,000,000	2,0	430,485,640	2,2	1,893,481,635	2,4	2,226,585,227	2,6	1,850,000,000	2,6	6,935,552,502	Sekretariat Daerah
4	01	04	Program Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sat Kerthi	N/A	N/A	14,281,717,866	74	11,467,527,453	76	24,814,822,433	77	21,038,894,896	78	15,500,000,000	78	87,102,962,648	Sekretariat Daerah
							<b>100,817,160,198</b>		<b>89,994,636,547</b>		<b>153,603,053,359</b>		<b>157,226,641,810</b>		<b>141,640,452,081</b>		<b>643,281,943,995</b>	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																
4	02	01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	-	22,399,307,757	-	18,259,045,071	78	95,863,541,643	82	85,060,154,065	82.5	94,470,146,220	82.5	316,052,194,756	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	82	2%	92,062,373,615	3%	71,159,913,537	5%	107,517,756,505	5%	119,481,630,541	5%	125,185,489,163	20%	515,407,163,361	Sekretariat DPRD
							<b>114,461,681,372</b>		<b>89,418,958,608</b>		<b>203,381,298,148</b>		<b>204,541,784,606</b>		<b>219,655,635,383</b>		<b>831,459,358,117</b>	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>PERENCANAAN</b>																
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai B (80)	Nilai B (80)	4,663,193,461	86,2	3,114,112,962	82	19,526,010,889	82	15,827,121,384	82	18,276,106,744	82	61,406,545,440	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	3,754,935,643	100%	575,705,076	100%	8,240,848,784	100%	5,561,454,662	100%	5,386,905,872	100%	23,519,850,037	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	1,198,675,415	100%	1,631,013,717	100%	1,014,250,645	100%	897,059,160	100%	902,876,728	100%	5,643,875,665	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	707,859,835	100%	395,476,272	100%	888,783,862	100%	605,640,162	100%	796,354,480	100%	3,394,114,611	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	1,246,323,633	100%	592,832,380	100%	1,440,440,380	100%	828,975,475	100%	834,007,528	100%	4,942,579,396	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							<b>11,570,987,987</b>		<b>6,309,140,407</b>		<b>31,110,334,560</b>		<b>23,720,250,843</b>		<b>26,196,251,352</b>		<b>98,906,965,149</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>KEHANGAN</b>																
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	81	3,077,711,244	83	2,945,807,341	84	28,825,358,460	85	23,205,054,715	86	20,487,451,024	86	78,541,382,784	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100%	100%	6,039,875,474	100%	5,877,034,388	100%	1,634,947,954,543	100%	1,388,128,627,499	100%	1,389,553,216,617	100%	4,424,546,708,521	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	100%	1,666,579,154	100%	4,237,945,956	100%	5,842,165,100	100%	3,664,143,602	100%	3,847,350,782	100%	19,258,184,594	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		Target (15)	Rp (16)		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	83.96	13,722,978,871	83.96	5,587,044,777	87	86,152,375,466	88	79,309,562,432	88	101,746,002,663	88	286,517,964,209	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kab. Buleleng	-	79.51	1,296,653,946	81.04	1,202,084,320	77.5	5,950,994,440	78	5,116,043,193	78.5	7,347,688,986	78.5	20,913,464,885	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kab. Jembrana	-	85.68	888,105,433	84.16	953,552,412	77.5	3,892,080,792	78	3,494,726,332	78.5	4,771,680,355	78.5	14,000,145,324	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kota Denpasar	-	80.53	1,835,766,218	81.24	1,730,919,274	77.5	11,262,246,755	78	9,978,572,595	78.5	11,365,725,810	78.5	36,173,230,652	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kab. Tabanan	-	86.95	1,177,363,720	81.05	1,159,159,003	77.5	6,395,853,490	78	6,450,504,137	78.5	10,921,949,797	78.5	26,104,830,147	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kab. Badung	-	78.18	1,855,670,186	78.59	1,518,616,148	77.5	10,740,954,761	78	10,265,613,394	78.5	7,577,497,695	78.5	31,958,352,184	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kab. Gianyar	-	80.47	1,489,924,887	80.59	1,307,155,615	77.5	6,997,845,691	78	6,318,774,512	78.5	6,941,423,892	78.5	23,055,124,597	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kab. Bangli	-	80.10	885,622,097	81.11	894,125,754	77.5	4,139,251,713	78	4,122,196,147	78.5	4,593,460,343	78.5	14,634,656,054	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kab. Klungkung	-	78.48	1,320,234,316	81.01	1,230,675,744	77.5	4,755,040,312	78	4,442,073,397	78.5	4,817,131,528	78.5	16,565,155,297	Badan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada UPTD. PPRD Kab. Karangasem	-	82.65	887,519,118	83.04	863,811,166	77.5	4,678,959,026	78	3,377,460,079	78.5	3,708,467,825	78.5	13,516,217,214	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	82.92%	82,919,512	92.77%	21,363,325	100%	54,962,000	100%	42,694,340	100%	116,732,880	100%	318,672,057	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	57.53%	60.48%	3,329,934,237	56.35%	1,094,486,270	53.01%	2,322,266,236	60.62%	1,917,954,080	60.62%	3,954,038,853	60.62%	12,618,679,676	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kab. Buleleng	100%	110.60%	2,142,032,776	82.93%	2,853,118,859	100%	3,212,823,600	100%	3,634,910,976	100%	3,738,177,447	100%	15,581,063,658	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kab. Jembrana	100%	111.29%	535,656,465	88.25%	698,493,492	100%	773,439,616	100%	854,492,512	100%	939,941,762	100%	3,802,023,847	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kab. Tabanan	100%	111.97%	617,494,145	86.36%	819,867,560	100%	880,478,960	100%	884,018,960	100%	993,119,052	100%	4,194,978,677	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kab. Badung	100%	108.43%	1,708,026,589	85.12%	2,694,026,233	100%	2,830,454,640	100%	2,913,480,432	100%	3,204,828,474	100%	13,350,816,368	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kota Denpasar	100%	106.17%	1,974,996,272	89.22%	2,588,188,630	100%	2,905,595,456	100%	3,041,328,800	100%	3,345,461,680	100%	13,855,570,838	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kab. Gianyar	100%	111.03%	1,213,895,626	84.71%	1,839,138,985	100%	1,856,630,816	100%	1,808,717,920	100%	1,989,589,711	100%	8,707,973,058	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kab. Bangli	100%	119.29%	487,369,367	87.84%	982,559,765	100%	994,541,200	100%	996,311,200	100%	1,095,942,319	100%	4,556,723,851	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kab. Klungkung	100%	112.20%	487,369,367	80.43%	643,343,357	100%	794,106,064	100%	821,571,064	100%	968,718,720	100%	3,715,108,572	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan pada UPTD. PPRD Kab. Karangasem	100%	109.78%	521,259,169	82.69%	748,354,874	100%	776,746,064	100%	804,636,064	100%	944,529,854	100%	3,795,526,025	Badan Pendapatan Daerah
							<b>49,244,958,188</b>		<b>44,490,873,248</b>		<b>1,831,983,125,201</b>		<b>1,565,593,468,382</b>		<b>1,598,970,128,069</b>		<b>5,090,282,553,088</b>	
5	03		<b>KEPEGAWAIAN</b>															
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80.71	85.73	12,498,799,782	85.73	8,462,888,149	82	51,922,112,726	82.5	19,291,201,981	83	38,197,960,251	83	130,372,962,889	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Tahun Ke				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				Realisasi (5)	Rp (6)	Realisasi (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)		Target (15)	Rp (16)
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Merit Sistem	-	0.52	2,088,658,693	0.63	9,860,034,704	0.61	4,109,550,976	0.8	6,399,965,314	0.81	6,399,965,314	0.81	28,858,175,001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					<b>14,587,458,475</b>		<b>18,322,922,853</b>		<b>56,031,663,702</b>		<b>25,691,167,295</b>		<b>44,597,925,565</b>		<b>159,231,137,890</b>	
<b>5 04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>															
5 04 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80.71	85.73	5,642,311,444	85.73	5,749,667,316	82	18,852,767,623	82.5	18,906,758,270	0	0	0	49,151,504,653	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi	100	100	36,804,894,403	100	1,555,906,318	100	16,395,945,624	100	5,482,707,114	100	5,482,707,114	100	65,722,160,573	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					<b>42,447,205,847</b>		<b>7,305,873,634</b>		<b>35,248,713,247</b>		<b>24,389,465,384</b>		<b>5,482,707,114</b>		<b>114,873,665,226</b>	
<b>5 05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															
5 05 01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	0	-	0	76 Nilai	15,205,211,421	77 Nilai	14,589,186,063	78 Nilai	14,865,341,862	78 Nilai	44,659,739,346	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbitan yang diimplementasikan	80%	100%	13,831,215,392	100%	15,214,336,931	75%	10,955,294,050	75%	8,653,925,700	80%	8,425,138,482	80%	57,079,910,555	Badan Riset dan Inovasi Daerah
					<b>13,831,215,392</b>		<b>15,214,336,931</b>		<b>26,160,505,471</b>		<b>23,243,111,763</b>		<b>23,290,480,344</b>		<b>101,739,649,901</b>	
<b>5 07</b>	<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>															
5 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	74	79	2,648,841,256	80.16	2,476,075,882	82	7,094,285,165	82	6,597,664,389	82	6,589,266,499	82	25,406,133,191	Badan Penghubung
5 07 02	Program Pelayanan Penghubung	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	60	83.92	830,679,744	85.96	1,488,862,454	80	1,152,545,900	90	1,034,004,860	90	1,409,710,180	90	5,915,803,138	Badan Penghubung
					<b>3,479,521,000</b>		<b>3,964,938,336</b>		<b>8,246,831,065</b>		<b>7,631,669,249</b>		<b>7,998,976,679</b>		<b>31,321,936,329</b>	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>6 01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>															
6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85%	90%	2,898,644,995	90%	2,462,966,302	94%	23,317,148,506	94%	23,258,365,481	95%	25,563,801,313	95%	77,500,926,597	Inspektorat
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level APIP	Level 3	Level 3	3,180,393,091	Level 3	1,975,101,176	Level 3	4,062,065,981	Level 3	1,774,642,598	Level 3	2,711,256,332	Level 3	13,703,459,178	Inspektorat
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	510,394,472	Level 3	564,439,598	Level 3	1,956,396,465	Level 3	1,099,848,465	Level 3	1,528,791,642	Level 3	5,659,870,642	Inspektorat
					<b>6,589,432,558</b>		<b>5,002,507,076</b>		<b>29,335,610,952</b>		<b>26,132,856,544</b>		<b>29,803,849,287</b>		<b>96,864,256,417</b>	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>															
<b>8 01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>															
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	82.15	1,934,656,522	82.92	1,934,656,522	83	11,072,217,715	83	10,045,906,737	83	10,075,516,303	83	35,062,953,799	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	370,344,596	95%	173,169,344	95%	543,513,940	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etnika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	77.5	81.58	546,363,702	73.43	560,310,150	78	11,303,522,516	78	16,747,420,284	78	16,757,419,744	78	45,915,036,396	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Nilai Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Berpendapat, dan Berkeyakinan	100	33.3	585,559,161	16.6	27,235,200	16.6	1,649,753,202	16.6	182,865,144	16.6	284,412,391	0	2,729,825,098	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	N/A	33.3	834,581,672	66.6	58,464,300	77	449,289,792	88	284,653,544	100	444,952,896	100	2,071,942,204	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					<b>3,901,161,057</b>		<b>2,580,666,172</b>		<b>24,474,783,225</b>		<b>27,631,190,305</b>		<b>27,735,470,678</b>		<b>86,323,271,437</b>	
<b>Jumlah per tahun</b>					<b>1,813,453,529,317</b>		<b>2,225,540,303,406</b>		<b>8,538,316,473,052</b>		<b>6,102,490,842,762</b>		<b>6,559,769,864,222</b>		<b>25,239,571,012,759</b>	

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang akan dituangkan dalam Tabel 8.1.

Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terdapat 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Daerah mencakup indikator makro ekonomi diantaranya Tingkat Inflasi Bali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang dalam kurun waktu 2019-2023, yang secara umum penetapan target-target capaiannya cenderung optimis, pilihan ini didasarkan pada analisis kinerja capaian 5 (lima) tahun sebelumnya serta memperhatikan *push* dan *pull* faktor kunci yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pencapaian target-target makro tersebut. Indikator-indikator lainnya yang ditetapkan juga berkaitan langsung untuk mendukung pencapaian indikator makro tersebut serta mengacu pada potensi dan daya saing daerah, antara lain urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menempatkan indikator kinerja utama daerah meliputi rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (APS), Penduduk Usia 16-18 tahun, Umur Harapan Hidup, Angka Stunting. Selain itu ada beberapa prioritas pembangunan yang ditetapkan menjadi IKU Daerah diantaranya terkait peningkatan daya saing pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani, menempatkan 4 (empat) indikator meliputi ketersediaan pangan utama, nilai tambah produk pertanian (NTTP), nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Bidang prioritas peningkatan daya saing tenaga kerja menempatkan dua indikator meliputi: indeks daya saing SDM Bali dan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Bidang prioritas pariwisata menempatkan tiga indikator meliputi: kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, jumlah devisa sektor pariwisata dan indeks kepuasan wisatawan. Bidang prioritas daya saing industri kreatif, kelestarian lingkungan didukung dengan pengembangan infrastruktur untuk membangun koneksitas dan pengembangan energi terbarukan serta

ketentraman, ketertiban dan demokratisasi didukung tata kelola birokrasi secara rinci akan disajikan pada tabel 8.1 Sedangkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode yang akan dituangkan dalam Tabel 8.2.

IKK dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum penetapan target-target IKK cenderung moderat dan mendukung secara langsung capaian IKU Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Sebelum masa pandemi Covid-19, capaian makro Provinsi Bali selalu berada lebih baik diatas rata-rata Nasional. Pertumbuhan Ekonomi Bali terjaga pada angka 5 - 6 % dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada saat Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali untuk pertama kalinya berkontraksi berada pada angka -9,33%. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum adanya Pandemi Covid-19 berada pada kisaran angka 1% lebih dan meroket pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,63%. Perekonomian Bali yang ditopang dari sektor Pariwisata sebagai sektor utama sangat rentan dengan adanya pandemi Covid-19. Penurunan pariwisata di Bali sangat berdampak pada sektor lainnya. Dengan adanya kondisi tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian target makro ekonomi bali sesuai dengan kondisi riil saat ini, namun juga tetap dengan semangat optimisme di tengah beratnya perekonomian yang terjadi.

**TABEL 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	REALISASI DAN TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tingkat Inflasi Bali	Persentase (%)	3,4% (yoy)	2,37	3,5% ±1% (yoy)	0,55	3,00% ±1% (yoy)	3,00% ±1% (yoy)	3,00% ±1% (yoy)	3,00% ±1% (yoy)	3,00% ±1% (yoy)	3,00% ±1% (yoy)	3,00% ±1% (yoy)	3,00% ±1% (yoy)	3,00% ±1% (yoy)
2	Ketersediaan pangan utama	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	15	13.45	16	15.11	17	20	20	22	22	25	25	25	25
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	98.7	27	29	29	31	31	33	33	35	35	35	35
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103.87	104.93	104.1	93.6	104.5	105	105	105.5	105.5	106	106	106	106
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	111,44	116.6	100,12	117.3	117.9	117.9	118.5	118.5	119.2	119.2	119.2	119.2
7	Umur Harapan Hidup (UHH)	Dalam tahun	71.4	71.99	71.8	72.13	72	72.3	72.3	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
8	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9.72	8.84	10	8.95	10.28	10.56	10.56	10.84	10.84	11.4	11.4	11.4	11.4
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16 -18 tahun	Persentase (%)	82.35	82.6	82.54	71,44	82.73	82.92	82.92	83.11	83.11	83.3	83.3	83.3	83.3
10	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.21	8.84	13.49	8.95	13.63	13.77	13.77	13.91	13.91	14.05	14.05	14.05	14.05
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	74.45	75.38	75,07 (74,97-75,17)	75.5	75,31 (75,21-75,41)	75,61 (75,41-75,61)	75,51 (75,41-75,61)	78,25 (75,61-78,25)	76,93 (75,61-78,25)	80 (75,56-80)	77,78 (75,56-80,00)	80 (75,56-80)	77,78 (75,56-80,00)
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	65.45	70.91	65	63.64	67	70	69.09	73	69.09	75	74.55	75	74.55
13	Persentase Kemiskinan	Persentase (%)	3.91	3.61	3.85	4.45	3.59	2.95	3,75 (3,50-4,00)	1.9	4,25 (4,00-4,50)	1,00-1,50	3,75 (3,50-4,00)	1,00-1,50	3,75 (3,50-4,00)
14	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1.4	1.57	1.28	5.63	1.17	1.07	5,63 (5,21-6,05)	0.98	3,19 (2,77-3,61)	0.9	2,32 (1,90-2,74)	0.9	2,32 (1,90-2,74)
15	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	76.56	73.77	75.77	74.32	76.03	76.3	76.3	76.55	76.55	76.8	76.8	76.8	76.8
16	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	N/A	72.48	N/A	73.98	73.98	73.98	73.98	73.98	74.98	74.98	74.98	74.98
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	(Persentase%)	23.4	23.26	45	18.76	45	45	18.34	45	20.86	45	25.93	45	25.93
18	Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	9,950,080	9,262,290	0	774,020	8,542,500	9,620,000	1,371,680	10,732,500	2,642,000	12,015,000	3,323,470	54,385,000	17,373,460
19	Indeks kepuasan wisatawan	persentase (%)	75	79	77	N/A	79	81	81	83	83	85	85	85	85
20	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	6,35 (6,20-6,40)	5.6	6,4 (6,20-6,60)	-9,33	6,60 (6,40-6,80)	6,80 (6,60-7,00)	3,00 (2,50-3,50)	7,00 (6,80-7,20)	3,10 (2,70-3,50)	7,20 (7,00-7,50)	5,00 (4,60-5,40)	7,20 (7,00-7,50)	5,00 (4,60-5,40)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	REALISASI DAN TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	Persentase (%)	10		11		11.5	12	12	12.5	12.5	13	13	13	13
22	Indeks konektivitas	Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)	2.74	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3
23	Angka kriminalitas	Kasus	4,607	4,376	4,138	2,083	3,669	3,200	3,200	2,731	2,731	2,262	2,262	2,262	2,262
24	Indeks demokrasi	Persentase (%)	78.8	81.83	79	77.59	80	81	81	81	81	81	81	81	81
25	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	63.76	N/A	64.23	N/A	64.55	64.75	64.75	64.9	64.9	65	65	65	65
26	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	16.93	N/A	17.11	17.29	17.29	17.46	17.46	17.64	17.64	17.82	17.82	17.82	17.82
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase (%)	61.51	63.62	62.08	71.98	62.64	63.21	63.21	63.77	63.77	64.34	64.34	64.34	64.34
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	8.7	8.57	9.7	8.57	12.3	13.3	13.3	14.8	14.8	15	15	15	15
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	0.4	0.43	0.43	0.68	1.1	7.14	0.97	13.79	1.2	20	1.4	20	1.4
30	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66.16	68	68	70	70	72	72	74	74	76	76	76	76

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>															
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	6.33	5.60	6,4 (6,20-6,60)	-9,33	6,6 (6,40-6,80)	6,8 (6,60-7,00)	3,00 (2,50-3,50)	7,0 (6,80-7,20)	3,10 (2,70-3,50)	7,2 (7,00-7,50)	5,00 (4,60-5,40)	7,2 (7,00-7,50)	5,00 (4,60-5,40)
2	Laju Inflasi	Persentase (%)	3.4	2.37	3.50±1%	0.55	3.00±1%	3.00±1%	3.00±1%	3.00±1%	3.00±1%	3.00±1%	3.00±1%	3.00±1%	3.00±1%
3	PDRB per kapita	Jumlah	54,62 juta	57.76	53 juta – 58 juta	51.94	56 juta – 61 juta	59 juta – 64 juta	59 juta – 64 juta	62 juta – 67 juta	62 juta – 67 juta	66 juta – 71 juta	66 juta – 71 juta	66 juta – 71 juta	66 juta – 71 juta
4	Indeks Gini	Persentase (%)	0,3640	0,37	0,3582	0,369	0,3264	0,3081	-	0,2800	0,3570	0,2500	0,3740	0,2500	0,3740
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persentase (%)	3.91	3.61	3.85	4.45	3.59	2.95	3,75 (3,50-4,00)	1,9	4,25 (4,00-4,50)	1,00-1,50	3,75 (3,50-4,00)	1,00-1,50	3,75 (3,50-4,00)
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	74,45	75.38	75,07 (74,97-75,17)	75.50	75,31 (75,21-75,41)	75,61 (75,41-75,61)	75,51 (75,41-75,61)	78,25 (75,61-78,25)	76,93 (75,61-78,25)	80 (75,56-80,00)	77,78 (75,56-80,00)	80 (75,56-80,00)	77,78 (75,56-80,00)
7	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	89.17	94.53	92.56	94.80	92.77	92.82	92.82	92.9	92.9	92.9	92.9	90.42	90.42
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9.72	8.84	10	8.95	10.28	10.56	10.56	10.84	10.84	11.40	11.40	11.40	11.40
9	Angka usia harapan hidup	tahun	71.4	71.99	71.8	72.13	72	72.3	72.3	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
10	Persentase balita gizi buruk	Persentase (%)	2	1,33	2	0,6	2	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase (%)	13.1	4.46	13.1	8.5	12.5	10.1	10.1	8.5	8.5	5.6	5.6	5.6	5.6
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2,561,518	2,508,294	2,533,567	2,567,919	2,588,567	2,653,567	2,653,567	2,723,567	2,723,567	2,793,567	2,793,567	2,793,567	2,793,567
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	76,56	73.77	75,77	74.32	76,03	76,30	76,30	76,55	76,55	76,80	76,80	76,80	76,80
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1,37	1.57	1.28	5.63	1.17	1.07	5,63 (5,21 - 6,05)	0,98	3,19 (2,77-3,61)	0,9	2,32 (1,90-2,74)	0,9	2,32 (1,90-2,74)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	N/A	77	N/A	79	80	80	81	81	82	82	82	82
17	Opini BPK	Status	Belum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	95.90	95.70	95.90	95.7	96.14	96.38	96.38	96.62	96.62	96.86	96.86	96.86	96.86
19	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14.38	13.45	15.37	15.11	15.15	14.57	14.57	14.57	14.57	14.57	14.57	14.57	14.57
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	2.52	1.53	2.25	1.67	2.20	2.10	2.10	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.48	1.34	1.38	1.54	1.46	1.47	1.47	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persentase (%)	16.84	N/A	16.44	N/A	15.11	14.73	14.73	14.38	14.38	14.38	14.38	19,24-20,88	19,24-20,88
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>															
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persentase (%)	17.45	17.35	17.14	17.55	16.83	16.52	16.52	16.21	16.21	15.90	15.90	15.59	15.59
2	Nilai Tukar Petani	Persentase (%)	103.87	104.93	104.10	93.60	104.50	105.00	105.00	105.50	105.50	106.00	106.00	106.00	106.00
3	Angka kriminalitas	Kasus	4607	4.376	4138	2,083	3669	3200	3200	2731	2731	2262	2262	2262	2262
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	N/A	72,48	N/A	73,98	73,98	73,98	73,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	23.40	23.26	45	18.76	45	45	18,34	45	20,86	45	25,93	45	25,93
6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	15	13.45	16	15.11	17	20	20	22	22	25	25	25	25
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>															
<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>															
<b>1 Pendidikan</b>															
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase (%)	79.1	32.97	80.1	82,3	81.1	82.1	82.1	83.1	83.1	84.1	84.1	84.1	84.1
<b>1.2 Angka Partisipasi Kasar</b>															
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	105.9	109.38	106.688	100,56	107.48	108.264	108.264	109.052	109.052	109.84	109.84	109.84	109.84
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106.95	106.88	108.31	96.40	109.67	111.03	111.03	112.39	112.39	113.75	113.75	113.75	113.75
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	100.4	98.00	101.20	100,30	102.01	102.812	102.812	103.616	103.616	104.42	104.42	104.42	104.42
<b>1.3 Angka Pendidikan yang Ditamatkan</b>															
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	24.55	23.49	24.84	24,80	25.14	25.43	25.43	25.73	25.73	26.02	26.02	26.02	26.02
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persentase (%)	11.73	11.69	12.02	21,78	12.32	21.61	21.61	12.91	12.91	13.2	13.2	13.2	13.2

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	23.41	23.89	23.7	38,59	24	24.29	24.29	24.59	24.59	24.88	24.88	24.88	24.88
1.4	Angka Partisipasi Murni														
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96.06	99.63	100	92,06	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	84.54	88.72	100	79,22	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	73.15	73.21	100	82,51	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Angka Partisipasi Sekolah														
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99.56	99.71	99.56	99,21	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	97.92	97.72	97.92	95,52	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	82.35	82.60	82.35	71,44	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35
1.6	Angka Putus Sekolah														
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0.05	0.03	0.04	0,08	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0	0	0
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0.10	0.12	0.09	0,08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.25	0.55	0.24	0,06	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20
1.7	Angka Kelulusan														
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	99.99	99.97	100	99,98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.8	Angka Transisi (AT)														
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	96.24	96.73	97.3	98,74	98.36	99.42	99.42	100.47	100.47	101.53	101.53	101.53	101.53
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	95.85	96.79	96.91	97,89	97.97	99.03	99.03	100.47	100.47	101.53	101.53	101.53	101.53
1.9	Fasilitas Pendidikan														
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	93.28	96.69	94.03	95,34	94.77	95.52	95.52	96.26	96.26	97.01	97.01	97.01	97.01
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	92.07	97.46	92.82	94,31	93.56	94.31	94.31	95.05	95.05	95.80	95.80	95.8	95.8
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persentase (%)	96.00	99.34	96.47	97,06	96.93	97.40	97.40	97.87	97.87	98.33	98.33	98.33	98.33
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	63.77	7.04	63.82	7,32	63.87	63.92	63.92	63.97	63.97	64.03	64.03	64.03	64.03
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	18.12	0.86	23,61	23,08	22,73	24,09	24,09	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	60.61	66.27	62,36	63,84	64,99	65,57	65,57	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persentase (%)	61.27	61.97	63,82	65,83	67,17	66,83	66,83	65,37	65,37	65,37	65,37	65,37	65,37
	- SMA/MA (per 1000 murid)		78.88	70.93		72,38									
	- SMK (per 1000 murid)		70.05	56.65		63,78									
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata														
1.14.1	SD/MI	Persentase (%)	0.03	1.54	0.03	0,03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1.14.2	SMP/MTS	Persentase (%)	0.09	2.01	0.09	0,09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
1.14.3	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.10	2.28	0.10	0,10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	100.00	99.97	106.94	99,98	106.94	107.83	107.83	108.72	108.72	109.61	109.61	109.61	109.61
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	99.87	99.93	99.87	99,91	99.88	99.89	99.89	99.90	99.90	99.91	99.91	99.91	99.91
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	92.98	94.53	92.98	98,34	93.06	93.14	93.14	93.22	93.22	93.30	93.30	93.30	93.30
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV														
1.18.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	87.96	98.86	75.19	76,85	75.88	76.57	76.57	77.26	77.26	77.95	77.95	77.95	77.95
1.18.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	93.16	94.31	94.08	94,86	95.00	95.92	95.92	96.84	96.84	97.76	97.76	97.76	97.76
1.18.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	95.91	96.62	96.42	96,78	96.93	97.44	97.44	97.95	97.95	98.46	98.46	98.46	98.46



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.18.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	96.39	99.10	96.68	97,08	96.97	97.26	97.26	97.55	97.55	97.84	97.84	97.84	97.84
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>														
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4.55	5.04	10	5.51	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5.17	0.62	6.67	0.59	6.35	6.99	6.99	6.50	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	3.2	3.59	4,50	3.66	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	54.03	68	69	83.84	68	67	67	66	66	65	65	65	65
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persentase (%)	1.45	1.5	1.46	22.81	1.47	1.47	1.47	1.45	1.52	1.45	1.52	1.45	1.52
2.6	Rasio Puskesmas, klinik, pustu per satuan penduduk														
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persentase (%)	1.17	0.029	0.029	0.027	0.029	0.029	0.027	0.029	0.027	0.029	0.027	0.029	0.027
2.6.2	Rasio klinik	Persentase (%)	0.021	0.021	0.021	0.025	0.021	0.021	0.032	0.021	0.032	0.021	0.032	0.021	0.032
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persentase (%)	0.016	0.016	0.0016	0.018	0.0016	0.0016	0.0018	0.0016	0.0018	0.0016	0.0018	0.0016	0.0018
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persentase (%)	0.35	1.56	0.36	0.620	0.382	0.40	0.95	0.40	0.97	0.40	0.97	0.40	0.97
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk														
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persentase (%)	1.85	1.85	1.94	2.630	2.04	2.1	2.5	2.3	2.6	2.4	2.6	2.4	2.6
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persentase (%)	1.07	1.02	1.12	1.46	1.18	1.20	1.20	1.30	1.25	1.40	1.25	1.40	1.25
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	86.53	50.77	87.00	80.95	87.50	88.00	88.00	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	95.97	97.57	96	91.78	96.5	96.6	96.6	96.7	96.7	96.8	96.8	96.8	96.8
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persentase (%)	99.16	96	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	30	34	33	19	34	35	35	36	36	37	37	37	37
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	89	89	90	88	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	21.1	116	110	269.94	108	106	106	104	104	102	102	102	102
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	70.20	64.12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.19	Angka kematian Malaria	Persentase (%)	0	0	<1	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0.02	0.01	< 1	0.01	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	66.4	72	70	72	75	80	80	85	85	90	90	90	90
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	57.54	57	55	57	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persentase (%)	21	21	21	21	21.5	22	22	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.25	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	102.92	100	100	99.92	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persentase (%)	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persentase (%)	94.49	94.65	94.6	86.91	95	95.5	95.5	96	96	96.5	96.5	96.5	96.5
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	Persentase (%)	96.81	88.03	97	89.94	97.5	98	98	98.5	98.5	99	99	99	99
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	100	35.71	100	72.88	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	100	74.75	100	99.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI	
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.33	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	87.89	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>															
3.1	Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase (%)	71.51	73.99	72.01	75.55	74.26	76.80	76.80	78.54	77.96	80.27	80.27	80.27	80.27	80.27
3.2	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persentase (%)	68.00	57.46	68.50	62.47	69.40	70.30	58,06%	70.60	48.33%	72.30	48.50%	72.30	48.50%	
3.4	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	80.81	82.66	77.44	78,25	77.71	77.98	77.98	78.11	76.89	78.25	78.67	78.25	78.67	
3.5	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persentase (%)	58.00	60,00	60.00	56,31	64.00	68.00	68.00	72.00	72.00	75.00	74.00	75.00	74.00	
3.6	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	Persentase (%)	70.00	16,50	70.00	20,00	72.00	74.00	20.00	76.00	16.51	80.00	19.64	80.00	19.64	
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	90.00	100	95.00	100	95.00	
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	Persentase (%)	100	100	100	89,81	100	100	100	100	41.00%	100	43.00%	100	43.00%	
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persentase (%)	86.00	67.82	87.00	70,33	89.00	91.00	90.00	93.00	92.00	95.00	93.00	95.00	93.00	
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persentase (%)	82.00	98.87	87.00	87,26	88.50	89.00	89.00	89.50	89.79	90.00	89.95	90.00	89.95	
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persentase (%)	90.00	100	91.00	100	92.00	93.00	93.00	94.00	94.00	95.00	95.00	95.00	95.00	
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>															
4.5	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah	Persentase (%)	12.00	24.00	24.00	28.44	36.00	48.00	48.00	60.00	70.00	72.00	71.00	72.00	71.00	
4.6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase (%)	8.20	7,70	8.00	<b>7,70</b>	7.70	7.20	8.00	6.60	8.00	5.60	6.62	5.60	6.62	
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>															
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase (%)	29.83	29.83	29.97	29.83	30.11	30.32	30.32	30.39	30.39	30.59	30.59	30.59	30.59	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	35.54	35.55	35.55	39.77	35.56	35.57	35.57	35.58	35.58	35.59	35.59	35.59	35.59	
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	44.62	44.63	44.63	57.13	44.64	44.65	44.65	44.66	44.66	44.67	44.67	44.67	44.67	
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>															
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	0.58	5.26	0,25	0,06	0,27	0,29	0,29	0,31	0,31	0,33	0,33	1,82	1,82	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	0.67	10.48	0,96	0,67	0,99	1.02	1.02	1.05	1.05	1.08	1.08	5,55	5,55	
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	0.41	10.29	0,63	0,43	0,65	0,67	0,67	0,7	0,7	0,72	0,72	3,68	3,68	
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persentase (%)	3,8	100	60	100	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	25	-	20	N/A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	60,03	17.81	60	52,63	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>															
<b>1 Tenaga Kerja</b>															
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 Perusahaan	0,006 : 1000 perusahaan	0,003 : 1000 perusahaan	30 kasus 100%	0,003 : 1000 perusahaan	56 kasus 100%	50 kasus 100%	0,004 : 1000 perusahaan	46	0,004 : 1000 perusahaan	46	0,003 : 1000 perusahaan	1.55	2,26 : 1000 perusahaan
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase (%)	100.00	100	155	100	26	21	100.00	22	100.00	22	100.00	22	100.00
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persentase (%)	78.05	100	4113	100	9977	2042	100.00	1621	100.00	1621	100.00	1621	100.00
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persentase (%)	0.94	3.181540964	146	4.28	183	226	4.71	350	6.28	350	6.91	350	25.70
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persentase (%)	29.93	32	92,630	33.12	96,050	110,075	33.26	116,922	36.39	116,922	39.53	116,922	39.53
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persentase (%)	4.49	9.432811547	575	6.02	690	780	6.84	920	7.40	920	8.17	920	46.95
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persentase (%)	42.26	67.0694864	183	17.89	226	226	21.79	216	19.37	216	19.37	216	19.37
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase (%)	38.4	22.4	368	39.27	32	540	17.60	100	18.01	100	18.01	100	24.00
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persentase (%)	100	100	75	100	90	30	100	30	100	30	100	30	100
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persentase (%)	80	80	75	80	261	350	-	42	-	42	-	42	80
1.11	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0,073: 10.000 Penduduk	0,071 : 10.000 Penduduk	0	0,069 : 10.000 Penduduk	7.73	7.92	0,069 : 10.000 Penduduk	7.31	0,069 : 10.000 Penduduk	7.31	0,069 : 10.000 Penduduk	7.31	0,069 : 10.000 Penduduk
<b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>															
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	46.03	47.29	46.23	47.53	46.43	46.63	46.63	46.83	46.83	46.95	46.95	46.95	46.95
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	9.09	14.11	9.90	16.00	11.90	13.90	13.90	15.90	15.90	17.90	17.90	17.90	17.90
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	46.70	49.47	47.10	37.71	47.60	48.10	48.10	48.60	48.60	49.10	49.10	49.10	49.10
2.4	Rasio KDRT	Persentase (%)	0.056	0.035	0.049	0.021	0.048	0.047	0.047	0.046	0.046	0.045	0.045	0.045	0.045
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	72.55	65.86	72.65	70.75	72.75	72.85	72.85	72.95	72.95	73	73	73	73
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	88.50	100	88.50	100	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persentase (%)	1.01	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persentase (%)	0.97	0.87	0.98	1.03	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persentase (%)	0.94	0.73	0.95	0.98	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persentase (%)	0.93	1.00	0.94	0.96	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persentase (%)	0.93	0.94	0.94	0.999	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98
<b>3 Pangan</b>															
3.1	Ketersediaan Pangan Utama														
3.1.1	Padi	Ton	847,523	836,081	849,523	783,989	851,523	853,523	853,523	855,523	855,523	857,523	857,523	857,523	857,523
3.1.2	Jagung	Ton	43,892	54,920	44,000	68,415	44,500	45,000	45,000	45,500	45,500	46,000	46,000	46,000	46,000

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI	
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
3.1.3	Kedelai	Ton	2,500	1,896	2,550	1,857	2,601	2,653	2,653	2,706	2,706	2,760	2,760	2,760	2,760	
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4,408	4,458	4,596	7,099	4,686	4,778	4,778	4,871	4,871	4,967	4,967	4,967	4,967	
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	53,267	91,766	54,000	70,038	54,500	55,000	55,000	55,500	55,500	56,000	56,000	56,000	56,000	
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	170	151	173	300	175	177	177	179	179	181	181	181	181	
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	25,042	15,610	25,543	27,774	26,054	26,575	26,575	27,106	27,106	27,648	27,648	27,648	27,648	
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2,646	2,656	2,647	2,650	2,648	2,649	2,649	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
		Gram/Kap/Hari	63	63.10	63	64,31	63	63	63	63	63	63	63	63	63	
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	80.00	100.00	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	
<b>4 Pertanian</b>																
4.1	Persentase data informasi pertanian yang handal	Persentase (%)	0	5,00	5,00	15,00	15,00	30%	30	0.7	40	0.85	50	0.85	50	
<b>5 Lingkungan Hidup</b>																
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	15 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.89	94.35	92.39	88.34	92.89	93.39	87.27	93.89	87.38	94.39	87.48	94.39	87.48	
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	63.17	63.33	64.67	64.33	66.17	67.67	67.93	69.17	68.03	70.67	68.13	70.67	68.13	
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	38,57	40.79	39.57	40.58	40.57	41.57	41,03	42.57	41,49	43.57	41,95	43.57	41,95	
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61.72	N/A	62.24	N/A	62.76	N/A	62.76	
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	6	1	2	N/A	2	2	1	2	1	2	1	2	6	
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
5.12	Jumlah limbah B3 yang dikelola			9 Kab/Kota		9 Kab/Kota		9 kab/kota		9 kab/kota		9 kab/kota		9 kab/kota	9 kab/kota	
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	17 perusahaan	30 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	25 Perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen	10 Perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	10 Perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	10 Perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	60 Perusahaan	
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	100	-	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persentase (%)	100	-	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persentase (%)	100	-	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.19	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	100	-	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	-	0	731	30	30	30	30	30	30	30	150	150	
5.21	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.22	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	30	-	40	731	40	40	30	30	30	30	30	30	30	
5.23	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru	46 Sekolah Adiwiyata, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	1 kalpataru	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata	
5.24	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	15 Kasus	10 kasus	20 Kasus	3 kasus	20 Kasus	10 Kasus	2 kasus	20 Kasus	2 kasus	20 Kasus	2 kasus	20 Kasus	46 kasus	
5.25	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di	Ton/tahun	9,305,453	556,257.56	945,225,853	894,951,05	961,841,563	975,583,128	975,583,128	991,573,370	991,573,370	1,008,414,118	1,008,414,118	1,008,414,118	1,008,414,118	
5.26	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persentase (%)	73	54.74	80	44,96	75	74	74	73	73	72	72	72	72	
<b>6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>																
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persentase (%)	0.93	0.96	0.95	0,48	0.97	0.99	0.99	0.99	0.99	1	1	1	1	
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persentase (%)	84	96.13	86.67	92,08	89.17	91.67	91.67	94.17	94.17	96.67	96.67	96.67	96.67	
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase (%)	40	37.33	45.38	42,76	50.38	55.38	55.38	60.38	60.38	65.38	65.38	65.38	65.38	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI		
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	94.62	98.99	96.5	99,10	98.5	99	99	99.5	99.5	100	100	100	100		
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	33.64	42.07	41.5	43,91	45.5	49.5	49.5	54	54	58	58	58	58		
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>																
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persentase (%)	43.78	49.21	49.06	59,59	58.02	66.98	66.98	75.94	75.94	84.9	84.9	84.9	84.9		
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persentase (%)	12.29	12.29	12.29	12,29	12.29	12.29	12.29	12.29	12.29	12.29	12.29	12.29	12.29		
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persentase (%)	14.24	15.56	14.1	15,56	16.33	18.56	18.56	20.79	20.79	23.02	23.02	23.02	23.02		
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persentase (%)	60.61	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persentase (%)	69.8	75.67	71.8	78,60	73.8	75.8	75.8	77.8	77.8	79.8	79.8	79.8	79.8		
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	200	225	225	250	250	275	275	300	300	325	325	325	325		
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	50	76.92	76.92	91,67	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92	76.92		
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	2.15	2.15	2.15	2,15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15		
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2.1	2.3	2.2	2,2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase (%)	29	33	33	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40		
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase (%)	13.73	15	15	17	17	20	20	25	25	30	30	30	30		
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6		
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	2	11	5	6	6	8	8	10	10	12	12	12	12		
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase (%)	2.02	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	57,9	79.95	57,9	82,35	57.5	57.3	57.3	57	57	56.5	56.5	56.5	56.5		
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persentase (%)	36	32	30	29	29	28.4	28.4	28.02	28.02	27.66	27.66	27.66	27.66		
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase (%)	35.12	36.42	36.15	36,42	36.42	37.10	37.10	38.20	38.20	39.75	39.75	39.75	39.75		
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	18.56	5.61	13.53	12,18	12.18	10.96	10.96	9.86	9.86	8.88	8.88	8.88	8.88		
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	43.46	34.14	43	31.2	42.25	32.99	42	30.02	41.5	-	41	-	41		
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	29.6	72.7	24.6	69,4	24	74.3	23.5	64.34	23	-	22.5	-	22.5		
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	87.80	92.39	87.70	24	91,16	91,42	91,42	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9	88,9		
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	85.2	87.90	86	91,16	87	88	88	89	89	90	90	90	90		
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	70.48	78.2	70.48	87,0	71.5	72	72	73	73	73	73	73	73		
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	77.2	80.5	77.2	84,3	80	85	85	90	90	100	100	100	100		
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase (%)	266	87.7	466	80	500	510	510	520	520	530	530	530	530		
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase (%)	100	319	100	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	88.6	100	90	100	91	92	92	93	93	94	94	94	94		
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	88.17	1	91	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	100	1	100	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	7	100	8	100	10	12	12	14	14	16	16	16	16		
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	22,7	8	22,7	10	22,7	22,7	22,7	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64	21,64		
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	9.4	22.1	10.2	22,7	15.03	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5		
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>																
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum																
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	351,739	314,877	386,912	435,525	422,085	457,258	457,258	492,431	492,431	527,604	527,604	527,604	527,604		
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	13,958,286	15,697,534	13,958,286	4,945,965	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286	13,958,286		
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	23,779,178	24,169,561	23,800,000	5,806,270	23,900,000	24,000,000	24,000,000	24,500,000	24,500,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	141	96	145	96	150	155	155	160	160	165	165	165	165		
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	146,324	148,167	147,787	114,498	150,728	153,742	153,742	156,817	156,817	158,386	158,386	158,386	158,386		
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis																
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	8	8	8	11	8	8	8	9	9	9	9	9	9		
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	25.41	27.01	26.56	27.01	35.00	45.00	45.00	55.00	55.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:470	0,147222222	1:400	07:19,1	1:400	1:350	1:350	1:350	1:350	1:300	1:300	1:300	1:300		
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum																
9.9.1	Angkutan Darat																
	- Orang	Jumlah	351,739	314,877	386,912	435,525	422,085	457,258	457,258	492,431	492,431	527,604	527,604	527,604	527,604		
	- Barang	Jumlah	121,818	392,129	127,908	70,612	134,303	141,018	141,018	148,068	148,068	155,471	155,471	155,471	155,471		
9.9.2	Angkutan Laut																
	- Orang	Jumlah	13,958,286	15,697,534	14,656,200	4,945,965	15,354,115	16,052,029	16,052,029	16,749,943	16,749,943	17,447,858	17,447,858	17,447,858	17,447,858		
	- Barang	Jumlah	543,159,485	200,412,990	570,317,459	1,539,540	597,475,434	624,633,408	624,633,408	651,791,382	651,791,382	678,949,356	678,949,356	678,949,356	678,949,356		
9.9.3	Angkutan Udara																
	- Orang	Jumlah	23,779,178	24,169,561	23,800,000	5,806,270	23,900,000	24,000,000	24,000,000	24,500,000	24,500,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
	- Barang	Jumlah	313,520,106	372,013,846	350,096,479	47,276,383	351,597,443	353,113,417	353,113,417	354,644,551	354,644,551	356,190,996	356,190,996	356,190,996	356,190,996		
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun																
9.10.1	Dermaga																
	- Orang	Jumlah	13,958,286	15,697,534	14,656,200	4,945,965	15,354,115	16,052,029	16,052,029	16,749,943	16,749,943	17,447,858	17,447,858	17,447,858	17,447,858		
	- Barang	Jumlah	543,159,485	200,412,990	570,317,459	2,425,410	597,475,434	624,633,408	624,633,408	651,791,382	651,791,382	678,949,356	678,949,356	678,949,356	678,949,356		
9.10.2	Bandara																
	- Orang	Jumlah	23,779,178	24,169,561	23,800,000	5,806,270	23,900,000	24,000,000	24,000,000	24,500,000	24,500,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
	- Barang	Jumlah	313,520,106	372,013,846	350,096,479	47,276,383	351,597,443	353,113,417	353,113,417	354,644,551	354,644,551	356,190,996	356,190,996	356,190,996	356,190,996		
9.10.3	Terminal																
	- Orang / Barang	Jumlah	351739 / 121818	314877 / 392129	386912 / 127908	326710 / 70612	422085 / 134303	457258 / 141018	457258 / 141018	492431 / 148068	492431 / 148068	527604 / 155471	527604 / 155471	527604 / 155471	527604 / 155471		
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>																
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			120		120											
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	50.00	N/A	60.00	64.97	65.00	75.00	75.00	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon																
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persentase (%)	93.62	78.69	93.75	94.93	93.90	94.07	94.07	94.20	94.20	95.00	95.00	95.00	95.00		
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persentase (%)	5.34	3.51	4.48	3.65	4.34	3.84	3.84	3.44	3.44	3.01	3.01	3.01	3.01		
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persentase (%)	46.42	54.08	51.23	85.67	57.72	62.50	62.50	68.41	68.41	74.85	74.85	74.85	74.85		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	33.25	23.50	35.50	25.82	45.23	47.12	47.12	50.00	50.00	52.15	52.15	52.15	52.15
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>														
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	87.42	79.67	87.92	88.42	88.42	88.92	88.92	89.42	89.42	89.92	89.92	89.92	89.92
11.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	312,967	326,009	312,967	327,353	326,009	327,353	412,265	412,265	440,609	440,609	441,309	441,309	441,309
11.3	Persentase peningkatan produktifitas koperasi	Persentase (%)	4.1	8.15	4.2	8.35	5.7	4.4	6.27	4.5	6.85	4.6	7.50	4.6	7.50
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>														
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	166	176	168	3,958	170	172	172	174	174	176	176	176	176
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	4.46	5.33	4.63	5,33	4.80	4.98	4.98	5.16	5.16	5.33	5.33	5.33	5.33
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase	34.16	28.53	29.68	2,47	29.39	29.10	29.10	28.81	28.81	28.53	28.53	28.53	28.53
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persentase (%)	0.16	0.16	0.16	-22,41	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	86	92.99	86	86	86	86	86	86	86	86	86
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>														
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	81	81
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	0.82	0.83	0.83	0	0.84	0.85	0.85	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	51.2	52	52	0	54	56	56	58	58	60	60	60	60
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	38.88	50	40	40	42	44	44	46	46	48	48	48	48
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	3.31	6.5	5	0	7.5	10	10	12.5	12.5	15	15	15	15
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 Orang	180 orang	177 Orang	0	186 Orang	192 Orang	192 Orang	199 Orang	199 Orang	205 Orang	205 Orang	959 Orang	959 Orang
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	24 cabor	22 cabor	0	24 cabor	26 cabor	26 cabor	28 cabor	28 cabor	30 cabor	30 cabor	30 cabor	30 cabor
<b>14</b>	<b>Statistik</b>														
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
14.2	Buku "PDRH"	Jumlah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
<b>15</b>	<b>Persandian</b>														
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	91.30	93.62	91.30	100.00	93.48	95.65	95.65	97.82	97.82	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>														
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan														
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	2,435	19,336	22,809	19,336	19,336	19,336	19,336	19,336	19,336	19,336	19,336	19,336
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	67	97	493	97	97	97	97	97	97	97	97	97
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	88	631	673	651	671	671	691	691	711	711	711	711
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	4	5	16	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	226	328	532	328	328	328	328	328	328	328	328	328
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu														
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	2,435	19,336	22,809	19,336	22,809	19,336	165	19,336	-	19,336	-	19,336
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	67	97	493	97	533	97	5	97	-	97	-	97
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	88	631	673	651	680	671	3	691	-	691	-	691
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	4	5	16	5	5	5	0	5	-	5	-	5
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	233	337	260	361	287	314	314	341	341	368	368	368	368
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>														
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persentase (%)	6	10.77	6.65	8,039	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.244	8.244
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	225.450	1,700	1,000	130,610	1,500	2,000	2,000	2,500	2,500	3,000	3,000	235.450	235.450
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	-	-	n/a	0,34	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	61.823	41,538	30,000	14,220	32,000	35,000	35,000	38,000	38,000	42,000	42,000	42,000	42,000
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	9,651	625	500	39,790	750	1,000	1,000	1,250	1,250	1,500	1,500	14,651	19,151
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	124	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	155	155
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>														
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase (%)	42	11	20%	20	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	70	N/A	30	2	30	30	30	30	30	30	30	150	150
<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>															
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>														
1.1	Kunjungan Wisatawan														
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	9,757,991	10,545,039	8,200,000	4,213,316	8,395,000	8,585,000	4,000,000	8,775,000	5,000,000	8,970,000	7,000,000	8,970,000	7,000,000

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	6,070,473	6,291,141	7,100,000	1,050,366	8,000,000	8,950,000	0	9,997,000	500,000	11,156,000	1,000,000	11,156,000	1,000,000
1.2	Lama Tinggal Wisatawan														
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	4.00	4.30	4.50	4.84	4.60	4.80	2.30	5.00	2.45	5.10	2.55	5.10	2.55
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	10,45	8.2	9.8	2,45	10.1	10.3	3,50	10.6	3.55	10.9	3.60	10.9	3.60
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persentase (%)	48.51		51.92	5,73	49.72	57.95	16.19	57.95	20.86	57.95	25.93	57.95	25.93
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>														
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14.38	13.45	15.37	15.11	15.15	14.57	14.57	14.57	14.57	14.57	14.57	14.57	14.57
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	2.52	1.53	2.25	1.67	2.20	2.10	2.10	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.48	1.34	1.38	1.54	1.46	1.47	1.47	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	13.81	N/A	16.44	N/A	15.11	14.73	14.73	14.38	14.38	14.38	14.38	19,24-20,88	19,24-20,88
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar														
2.5.1	Padi	Jumlah	60.70	59.09	60.12	60.47	62.14	60.60	60.60	58.80	58.80	58.80	58.80	61.50	61.50
2.5.2	Jagung	Jumlah	43,892	33.05	24,34	46,36	26,46	33,17	33,17	31,22	31,22	31,22	31,22	31,22	31,22
2.5.3	Kedelai	Jumlah	2,687	13.34	15,28	13,68	14,11	13,09	13,09	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase (%)	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011
<b>3</b>	<b>Kehutanan</b>														
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase (%)	1,6%	223.24%	2,72%	7,72%	2,63%	2,57%	2,57%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	105.5	639.42	696	797,00	580.00	600	835	n/a	835	n/a	835	250ha	4171.98
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persentase (%)	60	73.15	60	73.15	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>4</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>														
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase (%)	100	100	99.49	100	99.67	99.73	100	99.85	100	99.85	100	99.85	100
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persentase (%)	80	80	80	100	80	80	100	80	100	80	100	80	100
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persentase (%)	-	-	50	-	60	60	-	70	-	70	-	70	-
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>														
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persentase (%)	2	-40.98	2.44	21.55	2.6	2.75	2.75	2.85	2.85	3	3	3	3
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persentase (%)	15.09	15.09	18.87	15.09	22.64	26.41	26.41	30.19	30.19	33.96	33.96	33.96	33.96
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>														
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persentase (%)	3.35	6.10	3.50	14.28	3.64	3.78	3.78	3.91	3.91	4.04	4.04	4.04	4.04
<b>7</b>	<b>Transmigrasi</b>														
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persentase (%)	-	-	40	-	40	40	-	40	-	40	-	40	-
<b>8</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>														
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	136,496.55	127,869.66	220,706.50	127,835.47	228,873.48	229,403.59	121,713.44	130,075.46	124,147.71	130,075.46	126,630.66	226,517.79	126,630.66
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	34.56	31.77	31.17	38.83	32.2	32.38	34.87	33.52	35.57	33.52	36.28	34.86	36.28
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase (%)	100	100	60	100	70	80	80	90	90	90	90	100	100
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase (%)	107.36	183.88	60	118,23	70	80	80	97	97	97	97	100	100
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	97,157.60	109,335.22	99,100.75	95,973.24	101,082.77	103,104.42	103,104.42	105,166.51	105,166.51	107,269.84	107,269.84	107,269.84	107,269.84
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persentase (%)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persentase (%)	104.64	111.44	106.21	100,12	104.6	102.7	117.9	105.19	118.5	106.19	119.2	106.19	119.2
<b>PENUNJANG URUSAN</b>															
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>														
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				2019		2020		2021		2022		2023		SEMULA	MENJADI	
				REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	Persentase (%)	100	98.52	100	95.27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>															
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	Persentase (%)	6	6	6	2.79	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase (%)	6	6	6	2.79	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	0	0	0	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	20	20	20	29.63	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	10	10	10	12.95	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	26,70 : 73,30	28,15:71,85	25,21 : 74,78	31,78:68,22	26,66 : 73,33	28,00 : 71,99	28,00 : 71,99	29,28 : 70,71	29,28 : 70,71	30,54 : 69,45	30,54 : 69,45	30,54 : 69,45	30,54 : 69,45	30,54 : 69,45
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1,249,485,906,461	1,302,125,715,639	1,629,026,199,757	1,054,748,783,172	1,702,672,669,256	1,797,918,066,903	1,797,918,066,903	1,900,172,786,199	1,900,172,786,199	2,010,028,403,889	2,010,028,403,889	2,010,028,403,889	2,010,028,403,889	2,010,028,403,889
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
<b>3</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>															
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase (%)	32	41.67	80	47.23	48	43	43	3	3	3	3	3	3	3
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase (%)	7.61	39.12	30.00	43.49	32.00	34.00	34.00	36.00	36.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	45	45	46	42	49	49	49	52	52	52	52	52	52	52
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4,355	5,284	4490	4,654	4441	247	4389	270	3981	270	3981	270	3981	3981
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	6,924	5,981	1.397	5,932	1.057	1.079	1.079	6.869	6.869	6.869	6.869	6.869	6.869	6.869
<b>4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>															
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDA:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	16,6 6/36	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	14% 7/50	14% 7/50	14% 7/50	14% 7/50	14% 7/50	14% 7/50	14% 7/50
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/9	70% 7/10	70% 7/10	70% 7/10	70% 7/10	70% 7/10	70% 7/10	70% 7/10
<b>5</b>	<b>Pengawasan</b>															
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase (%)	9	44	44	95.13	16	27	27	27	27	27	27	27	27	27
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase (%)	0.06	5	5	0.01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persentase (%)	14	55	55	100	55	30	30	10	10	10	10	10	10	10
<b>6</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>															
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPDP)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

#### **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dapat dimaknai sebagai aturan dalam pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut.

- 1) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini dengan sebaik-baiknya.

- 2) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang yang berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Bappeda Provinsi Bali berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah (Renstra-PD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.
- 5) Gubernur Bali berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
- 6) RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam menyusun RKPD dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- 7) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER